

KEJAHATAN SATWA LIAR DAN KEHUTANAN

PERANGKAT ANALITIS
EDISI KEDUA 2022



KEJAHATAN SATWA LIAR DAN KEHUTANAN PERANGKAT ANALITIS



**International Consortium
on Combating Wildlife Crime**

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen asli berbahasa Inggris. Apabila terdapat istilah, kata, atau kalimat yang tidak tepat, multi tafsir, atau sulit ditafsirkan, maka penafsiran merujuk pada dokumen asli berbahasa Inggris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Edisi kedua dari Perangkat Analitis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan (*Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit*) dibuat oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dengan dukungan dari anggota International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC), yaitu Sekretariat Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), International Criminal Policy Organization (INTERPOL), Bank Dunia dan World Customs Organization (WCO).

ICCWC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Andreas Schloenhardt, Daniel Romanchenko, Daniel Muonda, dan Jenna Dawson-Faber (UNODC) atas kerja mereka pada Perangkat ini, dan kepada Stanley Allan atas kerjanya dalam mengedit dokumen dan kepada Indra Eleonora Espinosa Garcia dari unit Informasi Publik di Kantor Penghubung dan Kemitraan UNODC di Meksiko untuk desainnya.

Terima kasih juga disampaikan kepada mitra ICCWC dari CITES: Clio di Giovanni, Barend Janse van Rensburg, Pia Jonsson, David Morgan, Edward van Asch Caballero; INTERPOL: Rory Corcoran, Marco Foddi, Ilona Kononenko, Jayme Messias Rosa; UNODC: Maria Adomeit, Sinead Brophy, Giovanni Broussard, Marion Crepet, Inneke Geyskens-Borgions, Regina Jonsson, Shamini Jayanathan, Olga Kuzmianok, Manuela Matzinger, Javier Montano, Riikka Puttonen, Jorge Eduardo Rios, Elisabeth Seidl, Daniela Sota Valdivia, Tim Steele, Stephen Thurlow, Lejda Toci, Julie Viollaz; Bank Dunia: Nigel Bartlett, Garo Batmanian, Lisa Farroway, Monica Zavagli; WCO: Igor Jakupic, Tiffany Lormeau.

ICCWC ingin mengucapkan terima kasih kepada para ahli teknis dan substantif eksternal yang berkontribusi pada edisi ini, termasuk Nick Ahlers, Crawford Allen, Martin Andimile, Debbie Banks, Steve Broad, Gayle Burgess, Steve Carmody, Claudia de Windt, John Dodsworth, Ed Espinoza, Brian Gonzales, Tamara Leger, Bill Magrath, Jenny Maher, Drew McVey, Allen Mgaza, Rob Ogden, Rob Parry-Jones, Kevin Pretorius, Simon Robertson, John Sellar, Rohit Singh, Julie Thomson, dan Andy Tobiason. dedikasi mereka terhadap proyek ini ditunjukkan dalam kontribusi mereka secara murah hati serta komentar dan umpan balik bijaksana yang mereka sampaikan.

Revisi Perangkat tidak akan dimungkinkan tanpa kontribusi besar Uni Eropa dan Kerajaan Belgia kepada ICCWC.



KINGDOM OF BELGIUM
diplomatie.belgium.be

DAFTAR ISI

Ucapan terima kasih	3
Daftar singkatan dan akronim	8
Glosarium	9
Tentang perangkat analitis	10
Ringkasan eksekutif	12
PENDAHULUAN	14
1. Latar belakang	14
2. Tujuan, konsep, dan sasaran	17
2.1 Tujuan	17
2.2 Konsep	18
2.3 Sasaran spesifik	19
2.4 Audiens	20
3. Struktur dan isi	21
4. Metodologi	22
5. Penggunaan perangkat analitis	23
6. Kerangka indikator dan perangkat lainnya	25
BAGIAN I	26
KERANGKA HUKUM	27
1. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora	28
1.1 Akses dan implementasi cites	29
1.2 Reservasi cites	30
1.3 Implementasi cites di dalam negeri	30
1.4 Lingkup dan jadwal	31
1.5 Otoritas cites	32
2. Hukum internasional lainnya	34
2.1 United Nations Convention against Organized Crime	35
2.2 United Nations Convention against Corruption	36
2.3 Convention on Biological Diversity	37
2.4 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage	38
2.5 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals	39
2.6 Perjanjian bilateral	40
2.7 Implementasi hukum internasional di dalam negeri	41
3. Hukum satwa liar dan kehutanan nasional	42
3.1 Hukum yang berhubungan dengan satwa liar	44
3.2 Hukum yang berhubungan dengan kehutanan	45
3.3 Penangkaran dan kepemilikan hewan	47
3.4 Hukum dan peraturan kesejahteraan hewan	48
3.5 Hukum lingkungan umum	49
4. Pelanggaran satwa liar dan kehutanan khusus	50
4.1 Perburuan ilegal dan pelanggaran terkait	52
4.2 Penebangan liar dan pelanggaran terkait	54
4.3 Pemanenan tumbuhan bukan kayu secara ilegal	56
4.4 Pemrosesan ilegal bahan dari hewan dan tumbuhan	57
4.5 Perdagangan gelap dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan perdagangan dan transportasi	58

4.6	Pelanggaran impor dan ekspor	59
4.7	Akuisisi, kepemilikan, dan konsumsi ilegal	60
4.8	Pelanggaran lebih lanjut	61
4.9	Sanksi hukum	62
4.10	Statistik kejahatan dan data lainnya	63
5.	Memfasilitasi dan memungkinkan pelanggaran	66
5.1	Penipuan dokumen dan hal-hal terkait	66
5.2	Pencucian uang	68
5.3	Pelanggaran terkait korupsi	71
5.4	Penggelapan pajak dan penghindaran pembayaran biaya	74
5.5	Kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait dengan internet	74
5.6	Pelanggaran yang berkaitan dengan kelompok kejahatan terorganisir	76
5.7	Obstruksi keadilan	78
6.	Hukum pidana – masalah umum	70
6.1	Sumber hukum pidana	79
6.2	Prinsip pertanggungjawaban pidana	80
6.3	Perluasan tanggung jawab pidana	81
6.4	Tanggung jawab badan hukum	82

BAGIAN II **84**

PENEGAKAN HUKUM **85**

1.	Lembaga penegak hukum	86
1.1	Struktur penegakan hukum	86
1.2	Mandat penegakan dan manajemen	87
1.3	Manajemen cites	89
1.4	Koordinasi dan kerja sama nasional	90
1.5	Keterlibatan militer	92
1.6	Keterlibatan masyarakat dalam pemolisian	93
1.7	kerja sama pemerintah dan badan usaha	94
1.8	Pemolisian dan penegakan hukum oleh perusahaan keamanan swasta	96
2.	Sumber daya lembaga penegak hukum	98
2.1	Kepegawaian	98
2.2	Rekrutmen, masa kerja dan promosi	100
2.3	Pelatihan	101
2.4	Fasilitas dan peralatan	104
3.	Wewenang penegakan	106
3.1	Sumber wewenang penegakan hukum	106
3.2	Jenis kewenangan investigasi	108
3.3	Pelaksanaan kewenangan, checks and balances	108
4.	Intelijen	110
4.1	Jenis intelijen	110
4.2	Pengembangan intelijen	111
4.3	Analisis intelijen	114
4.4	Diseminasi	116
4.5	Investigasi proaktif	117
4.6	Penilaian risiko dan ancaman	117
5.	Teknik investigasi	119
5.1	Teknik investigasi khusus	119
5.2	Penggunaan informan	127
5.3	Patroli, pemantauan dan pos pemeriksaan	128
5.4	Pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan	129
5.5	Forensik	130
5.6	Metode investigasi korupsi	132
6.	Prosedur investigasi	134
6.1	Pelaporan pelanggaran	134
6.2	Pendorong dan manajemen investigasi	136

6.3	Pengumpulan dan penanganan bukti	136
6.4	Identifikasi tersangka	137
6.5	Wawancara	137
6.6	Perlindungan saksi dan korban	139
6.7	Penyitaan dan perampasan	140
6.8	Hasil investigasi dan indikator kinerja	142
7.	Aspek keuangan investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan	144
7.1	Investigasi keuangan: konteks dan kondisi	144
7.2	Unit Intelijen Keuangan (FIU)	146
7.3	Metode investigasi keuangan	147
7.4	Pencatatan dan pelaporan	148
8.	Kendali perbatasan dan bea cukai	150
8.1	Pemeriksaan perbatasan dan bea cukai	150
8.2	Data bea cukai	152
8.3	Indikator kinerja bea cukai	153
9.	Korupsi, integritas dan akuntabilitas	154
9.1	Korupsi	154
9.2	Akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum	157

BAGIAN III **158**

ACARA DAN PENGADILAN PIDANA **159**

1.	Acara Pidana	160
1.1	Dari investigasi hingga pengadilan	160
1.2	Yurisdiksi	161
1.3	Bukti	162
1.4	Persidangan tanpa penundaan	165
1.5	Akses terhadap keadilan	166
2.	Sumber, organisasi dan delegasi wewenang penuntutan	168
2.1	Sumber daya penuntutan	169
2.2	Data dan hasil penuntutan	171
2.3	Data dan hasil penuntutan	173
3.	Peradilan	176
3.1	Struktur dan organisasi peradilan	176
3.2	Sumber daya peradilan	179
3.3	Manajemen informasi	182
3.4	Data dan hasil pengadilan	182
4.	Hukuman dan sanksi	184
4.1	Penalti dan hukuman	184
4.2	Sanksi	186
5.	Restitusi, kompensasi dan pemulihan	188
5.1	Restitusi dan kompensasi	188
5.2	Langkah-langkah pemulihan dan perbaikan	189
6.	Tindakan gangguan lainnya	190
7.	Korupsi, integritas dan akuntabilitas jaksa dan peradilan	192
7.1	Korupsi kejaksaan dan peradilan	192
7.2	Akuntabilitas dan integritas kejaksaan dan peradilan	194

BAGIAN IV **196**

KERJA SAMA INTERNASIONAL **197**

1.	Kerangka hukum dan administratif untuk kerja sama internasional	198
1.1	Kerangka hukum untuk kerja sama internasional	198
1.2	Prosedur dan administrasi	199
1.3	kerja sama internasional informal	200
1.4	Pola dan praktik kerja sama internasional	201
2.	kerja sama penegakan hukum internasional	202
2.1	kerja sama penegakan hukum dan berbagi informasi	202

2.2	Investigasi bersama	203
2.3	kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan	204
2.4	Peran INTERPOL	205
3.	kerja sama bea cukai	207
3.1	kerja sama antara bea cukai dan otoritas cetes	207
3.2	Environet	208
3.3	Jaringan Penegakan Bea Cukai dan basis data	209
4.	kerja sama yudisial	210
4.1	Bantuan hukum timbal balik	210
4.2	Ekstradisi	212
4.3	Pemindahan proses pidana	214
4.4	Pemindahan terpidana	214
5.	Inisiatif regional dan khusus	216
5.1	Penegakan hukum dan tata kelola kehutanan	216
5.2	Jaringan penegakan satwa liar	217
5.3	Twix – Trade in Wildlife Information Exchange	218
5.4	Skema sertifikasi dan verifikasi; standar pribadi dan sukarela	219
5.5	kerja sama investigasi keuangan	221
5.6	kerja sama pemulihan aset	221
5.7	kerja sama forensik internasional	222
6.	Bantuan internasional, regional dan bilateral	224
6.1	Bantuan internasional, regional dan bilateral	224
6.1	Koordinasi donor	225

BAGIAN V **226**

PENDORONG DAN PENCEGAHAN **227**

1.	Aktor	228
1.1	Pelaku	228
1.2	Pejabat publik	232
1.3	Masyarakat lokal dan masyarakat adat	233
1.4	Konsumen	235
2.	Analisis konteks	236
2.1	Perdagangan dan pasar legal	236
2.2	Integritas rantai pasokan	238
2.3	Pemanfaatan satwa liar dan sumber daya kehutanan	241
2.4	Analisis dan pemantauan sumber daya	247
2.5	Konsekuensi kejahatan satwa liar dan kehutanan	248
2.6	Tren dan ancaman yang muncul	251
3.	Manajemen satwa liar dan kehutanan	253
3.1	Sistem Manajemen	253
3.2	Lembaga dan mandat	255
3.3	Rencana manajemen	256
3.4	Basis data, alat daring, dan manajemen informasi	260
3.5	Kepatuhan	263
4.	Pembangunan kapasitas sosial	265
4.1	Pengurangan kemiskinan	265
4.2	Penghidupan yang berkelanjutan	266
4.3	Pendekatan partisipatif	267
5.	Penjeraan	269
6.	Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku	271
6.1	Kampanye kesadaran	272
6.2	Program pendidikan	273
6.3	Inisiatif masyarakat	274
7.	Penelitian dan analisis	275
7.1	Penelitian ilmiah dan independen	275
7.2	Survei diagnostik	276
7.3	Diseminasi	277

Daftar singkatan dan akronim

AML	Anti-Money Laundering
APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
CEN	Customs Enforcement Network
CENcomm	Customs Enforcement Network Communication
CFT	Counter Financing of Terrorism
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CMS	Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
DNFBP	Designated Non-Financial Businesses and Professions
EU	European Union
FATF	Financial Action Task Force
FAO	Food and Agriculture Organization
FIU	Financial Intelligence Unit
FLEG	Forest Law Enforcement and Governance
IATA	International Air Transport Association
ICWC	International Consortium on Combating Wildlife Crime
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
IF	Indicator Framework
INTERPOL	International Criminal Police Organization
ITTO	International Tropical Timber Organization
IUCN	International Union for the Conservation of Nature
MLA	Mutual Legal Assistance
MOU	Memorandum of Understanding
NGO	Non-Governmental Organization
SFM	Sustainable Forest Management
SWFS	Society for Wildlife Forensic Services
TRACE	Tools and Resources for Applied Conservation and Enforcement
TWIX	Trade in Wildlife Information Exchange
UN	United Nations
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC	United Nations Convention against Transnational Organized Crime
USFWS	United States Fish and Wildlife Service

Kejahatan satwa liar dan kehutanan mengacu pada setiap kegiatan kriminal yang terkait dengan pengambilan, perdagangan (memasok, menjual, atau memperdagangkan), mengimpor, mengekspor, memproses, memiliki, memperoleh, dan mengonsumsi fauna dan flora liar, termasuk produk/hasil kayu dan hutan lainnya, yang bertentangan dengan hukum nasional atau internasional.

Kejahatan satwa liar dan kehutanan mengacu secara khusus pada undang-undang atau ketentuan hukum lainnya yang mengkriminalisasi aspek tertentu dari atau perilaku yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Untuk tujuan Perangkat ini, istilah 'kejahatan' mencakup semua aktivitas yang dapat dikenakan hukuman pidana atau administratif.

Satwa liar dan hasil hutan ilegal mengacu pada satwa liar dan hasil hutan, produk, dan turunannya baik hidup, mati, mentah, atau yang bersumber, diproses, diperdagangkan, diangkut, diimpor, diekspor, diperoleh, dimiliki, dan sebagainya secara melanggar hukum.

Pembalakan liar menggambarkan berbagai kegiatan melanggar hukum yang terkait dengan penebangan pohon. Ini umumnya mengacu pada satu atau lebih kegiatan berikut: penebangan spesies yang dilindungi atau terancam punah; penebangan di kawasan lindung atau terlarang; penebangan yang berlebihan; penebangan tanpa izin atau dengan izin palsu; mendapatkan izin penebangan secara ilegal; tidak membayar pajak dan biaya hutan lainnya; merusak ekosistem hutan.

Kelompok kejahatan terorganisir didefinisikan dalam Pasal 2(a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Batas (UNTOC) yang diartikan sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran serius yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya.

Kejahatan serius didefinisikan dalam Pasal 2(a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Batas (UNTOC) sebagai perilaku yang merupakan kejahatan/tindak pidana yang dapat dihukum dengan perampasan kebebasan paling lama setidaknya empat tahun atau hukuman lain yang lebih serius.

Korupsi tidak didefinisikan secara universal; sebaliknya, Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang merupakan satu-satunya instrumen antikorupsi universal yang mengikat secara hukum, mengakui bahwa korupsi adalah fenomena yang terus berkembang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai kerangka hukum oleh karenanya akan memberikan deskripsi konsep yang berbeda-beda. Konvensi ini tetap memberikan daftar tindakan korupsi yang disepakati secara universal (penyuapan, penggelapan, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, pengayaan terlarang, pencucian uang, penyembunyian, dan penghalangan keadilan), dan memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam Konvensi.

*Untuk keperluan dokumen ini, kata **transit** berlaku untuk barang-barang ilegal.*

TENTANG PERANGKAT ANALITIS

Perangkat Analitis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan ICCWC ini merupakan edisi kedua yang sepenuhnya telah direvisi dan memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan-permasalahan utama yang terkait dengan penanganan kejahatan satwa liar dan kehutanan di lokasi tertentu. Perangkat ini berfungsi sebagai panduan untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan jenis-jenis kejahatan ini dalam konteks yang lebih luas dari kejahatan yang mempengaruhi lingkungan hidup dan mengkaji langkah-langkah hukum, administratif, dan praktis yang diadopsi untuk mencegah dan mengatasinya.

Perangkat Analitis ICCWC dirancang untuk membantu pejabat pemerintah yang bekerja dalam administrasi satwa liar dan kehutanan, pembuat kebijakan, petugas bea cukai dan petugas penegak hukum terkait lainnya, dan mungkin juga berguna bagi para ahli independen dan entitas penelitian. Perangkat ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis komprehensif tentang kerangka hukum, langkah-langkah penegakan hukum, mekanisme penuntutan dan peradilan, kerja sama internasional, dan langkah-langkah lain yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan satwa liar dan kehutanan dalam konteks nasional tertentu. Selain itu, pemangku kepentingan lain di tingkat internasional dan nasional, serta masyarakat sipil, mungkin juga dapat menggunakan Perangkat ini untuk menjalankan mandat dan tanggung jawab mereka.

Sementara berfokus pada respons peradilan pidana terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan, Perangkat ini juga melihat secara lebih luas cara-cara dan langkah-langkah yang terkait dengan perlindungan dan pemantauan fauna dan flora liar dan eksploitasi ilegal satwa liar dan sumber daya hutan oleh penjahat, termasuk kelompok kejahatan terorganisir. Perangkat ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis dan dapat digunakan sebagai bahan pelatihan untuk penegakan hukum.

Perangkat Analitis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan ICCWC dibagi ke dalam lima bagian :

<p>BAGIAN I</p> 	<p>KERANGKA HUKUM</p> <p>Bagian I menganalisis undang-undang yang relevan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan serta kegiatan terkait. Bagian ini mencakup ikhtisar perjanjian-perjanjian internasional yang relevan dan implementasi domestiknya, serta kejahatan satwa liar dan kehutanan nasional dan kejahatan terkait, seperti korupsi dan pencucian uang.</p>
<p>BAGIAN II</p> 	<p>PENEGAKAN</p> <p>Bagian II menganalisis langkah-langkah penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Bagian ini mencakup alat analitis yang terkait dengan lembaga penegak hukum, sumber daya manusia, intelijen, teknik dan prosedur investigasi, kontrol perbatasan dan kepabeanan, serta akuntabilitas dan integritas otoritas penegak hukum.</p>

BAGIAN III



PROSEDUR DAN PERADILAN PIDANA

Bagian III menganalisis kapasitas sistem penuntutan dan peradilan untuk menanggapi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Bagian ini mencakup analisis aspek prosedural yang relevan dan mandat, struktur dan proses layanan lembaga penuntutan dan peradilan. Bagian ini juga mencakup masalah hukuman, restitusi dan kompensasi dan langkah-langkah peradilan non-pidana .

BAGIAN IV



KERJA SAMA INTERNASIONAL

Bagian IV menganalisis mekanisme kerja sama internasional. Bagian ini mencakup analisis penegakan hukum internasional, kerja sama peradilan, platform dan inisiatif regional dan khusus, serta asistensi dan bantuan teknis .

BAGIAN V



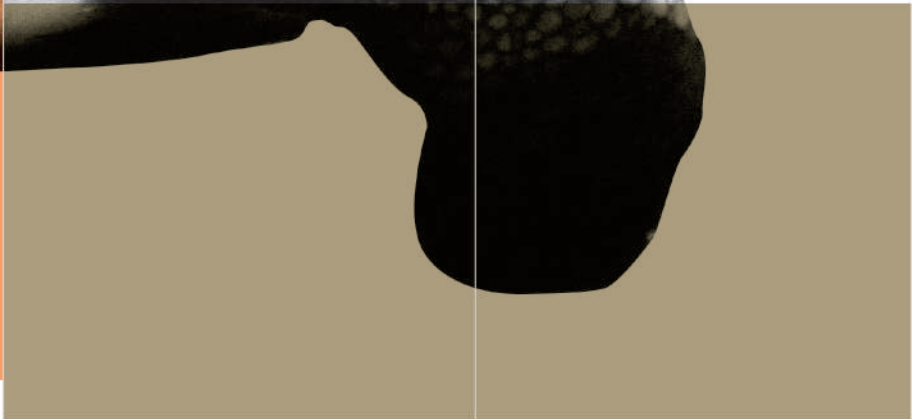
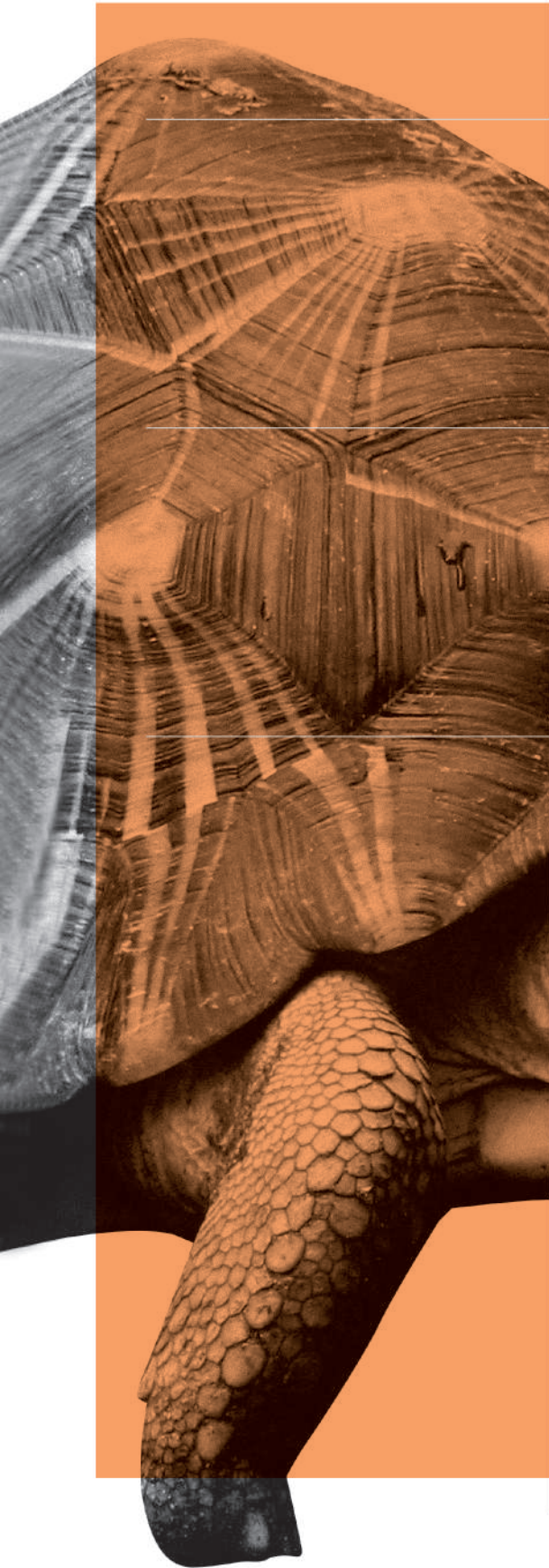
PENDORONG DAN PENCEGAHAN

Bagian V menyediakan alat untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan. Bagian mencakup analisis mengenai aktor-aktor yang relevan, analisis konteks dan pertimbangan konsekuensi kejahatan satwa liar dan kehutanan dan pengelolaan satwa liar dan hutan. Bagian ini juga memberikan gambaran umum tentang masalah yang terkait dengan pengembangan kapasitas sosial, pencegahan, peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku, serta penelitian dan analisis.

Setiap Bagian dari Perangkat ICCWC memberikan panduan praktis dan terperinci tentang masalah-masalah utama yang akan dikaji, dengan mengacu pada Konvensi, standar, dan norma internasional yang relevan, serta pedoman dan dokumen yang relevan. Segala upaya telah dilakukan untuk membuat setiap Bagian komprehensif dalam menyediakan daftar periksa kepada pengguna untuk menganalisis akar penyebab kejahatan, mekanisme pencegahan, dan potensi tanggapan sistem peradilan pidana. Perangkat ini tidak menggantikan kebutuhan akan pendekatan yang dibuat khusus untuk menilai situasi khusus di lokasi tertentu dan tidak bermaksud untuk mencakup semua aspek dari sistem hukum di setiap yurisdiksi.

Perangkat ICCWC harus dilihat sebagai dokumen hidup yang dimaksudkan untuk menyajikan kumpulan alat dan sumber daya yang membantu penggunanya memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya pendekatan holistik untuk mengatasi kejahatan ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Kejahatan satwa liar dan kehutanan adalah fenomena kompleks dengan banyak lapisan dan dimensi. Seringkali ini merupakan akibat dari interaksi banyak faktor – politik, budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan – dan dapat melibatkan berbagai aktor. Kompleksitas ini menyulitkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem legislatif, administrasi, penegakan, peradilan dan pencegahan yang ada, serta area-area di mana ada kesenjangan. Untuk mencapai respons yang efektif, kejahatan satwa liar dan kehutanan perlu ditangani melalui pendekatan yang terkoordinasi dan multi-sektoral.

Selain itu, perbedaan mendasar antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya harus diakui. Sebagian besar kejahatan properti, seperti perampokan, pencurian, pembakaran, dan vandalisme, dikriminalisasi karena menimbulkan kerugian pada manusia atau properti dengan menciptakan ketidakpastian, mengurangi kepercayaan, dan merugikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Semua alasan ini berlaku untuk mengriminalisasi tindakan yang sama terhadap sumber daya alam. Namun, ada dimensi tambahan untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan: hukum untuk melindungi satwa liar dan kehutanan juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sistem sumber daya alam dan untuk memastikan lingkungan yang sehat, di mana pembangunan manusia dan hak asasi manusia bergantung pada hal-hal ini. Hal ini menciptakan dinamika yang berbeda untuk penegakan hukum satwa liar dan kehutanan, yang harus mengarah pada analisis penggunaan dan pengguna sumber daya satwa liar yang mempertimbangkan keberlanjutan dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen sumber daya yang baik.

Perangkat Analitis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan ICCWC ini (selanjutnya disebut Perangkat ICCWC) menyediakan inventarisasi langkah-langkah yang dapat membantu dalam analisis sifat dan luasan kejahatan satwa liar dan kehutanan dan dalam mencegah dan memerangi kejahatan ini. Perangkat ini juga dimaksudkan untuk berkontribusi pada pemahaman tentang berbagai faktor-faktor yang mendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk mengintegrasikan informasi dan pengalaman yang diperoleh dari pemahaman tersebut ke dalam strategi nasional, regional, dan internasional.

Perangkat ICCWC dimaksudkan untuk berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis tanggapan nasional terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Oleh karena itu, pengguna utamanya adalah pejabat pemerintah dan asesor ahli. Tidak semua bagian dari Perangkat akan sama relevannya di setiap lingkungan nasional. Pengguna

diharapkan untuk memilih alat yang paling relevan dan berguna untuk analisis mereka. ICCWC (International Consortium on Combating Wildlife Crime) akan mendukung negara-negara yang meminta dalam seluruh proses analitis, termasuk melalui mobilisasi dana, mempekerjakan para ahli, menganalisis hasilnya, dan merancang serta memberikan bantuan teknis yang berasal dari rekomendasi dan temuan dari analisis.

Selain itu, Perangkat ICCWC berfungsi sebagai titik masuk awal bagi pemerintah nasional, aktor internasional, praktisi dan akademisi untuk lebih memahami kompleksitas kejahatan satwa liar dan kehutanan dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengembangan strategi pencegahan dan respons. Perangkat ini telah dikembangkan dan diperbarui berdasarkan (a) pembelajaran yang dipetik dari upaya nasional dan internasional untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar, tumbuhan, turunan hewan dan bahan tanaman, (b) analisis ilmiah dan pemeriksaan kasus, dan (c) konsultasi dengan pemangku kepentingan utama dan pakar terkait.

Penyebab, komponen, dan konsekuensi dari kejahatan satwa liar dan kehutanan bervariasi di antara negara, wilayah, dan masyarakat di seluruh dunia. Tidak ada solusi tunggal untuk masalah ini. Dalam merumuskan tindakan penanggulangan yang efektif, penting bahwa pola lokal kejahatan satwa liar dan kehutanan dan kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal juga dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan undang-undang. Perangkat ICCWC menyediakan berbagai opsi yang, dalam berbagai kombinasi, dapat memberikan kesempatan kepada Negara untuk menyusun strategi efektif yang akan memenuhi kebutuhannya sendiri dalam memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Kerangka Indikator yang melengkapi Perangkat ini menawarkan alat yang lebih sederhana untuk penilaian mandiri pertama oleh petugas di tingkat nasional, memberikan pendekatan standar untuk mengembangkan baseline dan mengukur dan memantau efektivitas pendekatan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan ini dari waktu ke waktu. Kerangka Indikator dan Perangkat harus selalu digunakan bersama-sama.²

² Lihat The ICCWC Indicator Framework: https://sites.org/sites/default/files/EN_ICCWC%20Indicator%20framework%20step-by-step%20guide.pdf

¹ Lihat <https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13>

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat mempercepat perusakan satwa liar dan sumber daya hutan, menghancurkan penyerap karbon penting seperti hutan dan lautan, dan berkontribusi pada deforestasi, penggurunan (desertifikasi), dan bentuk-bentuk degradasi lingkungan lainnya



Kejahatan ini juga dapat berdampak pada keanekaragaman hayati karena kejahatan ini mengurangi atau bahkan menghilangkan spesies, merusak ekosistem, menghancurkan banyak habitat alami yang unik, dan membuat banyak negara dan rakyatnya kehilangan sumber daya terbarukan yang langka.

Kejahatan satwa liar dan kehutanan mengancam keberadaan banyak spesies tumbuhan dan hewan. Pada saat suatu spesies semakin terancam punah maka nilai komersial dari spesimen yang tersisa akan meningkat, sehingga meningkatkan insentif untuk kegiatan ilegal lebih lanjut. Fakta bahwa beberapa perdagangan fauna dan flora diizinkan sementara beberapa perdagangan spesimen dari spesies yang sama dilarang memberikan peluang untuk menghindari hukum dan peraturan yang relevan melalui penipuan, pencucian uang, dan korupsi. Secara khusus, petugas yang belum menerima pelatihan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam membedakan antara spesimen yang dapat diperdagangkan secara sah dan yang tidak dapat.

Lebih lanjut, perdagangan ilegal satwa liar dan sumber daya hutan memiliki dampak negatif pada ekonomi nasional karena mengikis pendapatan pemerintah yang bisa diperoleh dari perdagangan legal tumbuhan, bahan tumbuhan, satwa liar dan turunan hewan sehingga merusak kemampuan negara untuk melaksanakan program pembangunan, memperkuat supremasi hukum, dan memenuhi kewajiban mereka untuk secara progresif mewujudkan hak-hak sosial dan ekonomi. Jika bersinggungan dengan kejahatan terorganisir, kekerasan, korupsi atau konflik bersenjata, kejahatan satwa liar dan kehutanan juga dapat mengacaukan pemerintah dan mengancam keamanan regional.

Meskipun banyak indikasi bahwa kejahatan satwa liar dan kehutanan adalah bentuk kejahatan terorganisir yang semakin menguntungkan, tetap sulit, bahkan tidak mungkin, untuk memperkirakan skala sebenarnya dari masalah tersebut. Fauna dan flora adalah spesimen heterogen yang bersumber, diperdagangkan, dan dikonsumsi untuk berbagai keperluan, termasuk makanan, bahan bakar, konstruksi, furnitur, obat-obatan, sebagai barang koleksi, dan dalam pembuatan barang lainnya. Satwa liar dan hasil hutan sekunder tidak diproduksi dengan standar yang seragam dan oleh karena itu variasi harga yang cukup besar dapat terjadi. Heterogenitas ini membuat penilaian perdagangan ilegal fauna dan flora menjadi sangat menantang. Selain itu, hilangnya fauna dan flora, dan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan satwa liar dan kehutanan terhadap lingkungan dan iklim, jauh melampaui nilai moneter.



Di banyak negara, memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan bukanlah prioritas dan seringkali tetap diabaikan dan kurang dipahami, terlepas dari skala dan konsekuensi aktual dan potensialnya. Pada saat kebijakan dan undang-undang satwa liar dan kehutanan serta penegakannya diberlakukan, aturan yang ada tidak selalu mengikuti tingkatan dan pola perdagangan fauna dan flora yang terus berubah. Kerangka hukum yang kurang berkembang, penegakan hukum yang lemah, praktik penuntutan dan peradilan yang buruk, dan kurangnya pemahaman tentang berbagai faktor yang mendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan telah mengakibatkan sumber daya satwa liar dan tumbuhan yang berharga menjadi terancam. Ancaman utama meliputi pembalakan liar, perdagangan ilegal produk kayu, perburuan liar, dan perdagangan bagian tubuh hewan, turunannya, dan bahan tanaman. Perdagangan ilegal fauna dan flora yang dilindungi menawarkan peluang bagi penjahat terorganisir untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan karena mereka dapat memasok barang-barang secara jauh lebih murah daripada bahan yang bersumber secara legal atau yang tidak dapat diperoleh secara legal. Perdagangan ilegal ini juga merupakan hambatan untuk mengembangkan industri legal jangka panjang, yang dengan demikian dapat mengganggu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kelemahan dalam kontrol domestik dan internasional dalam sektor satwa liar dan kehutanan serta kesulitan untuk mengidentifikasi antara komoditas legal dan ilegal dan produk sekunder, dan rumitnya rute perdagangan, telah menghadirkan tantangan yang cukup besar dalam mengatasi perdagangan ilegal secara efektif.

Di banyak negara, sistem yang mengatur sektor satwa liar dan kehutanan juga memungkinkan korupsi berkembang di kalangan pejabat di sektor satwa liar dan kehutanan, serta politisi dan pengusaha, dalam bentuk suap dan imbalan. Hal ini, pada gilirannya, telah memberi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penebangan dan perburuan kebebasan untuk terlibat dalam praktik ilegal tanpa takut ditangkap atau dituntut. Kejahatan satwa liar dan kehutanan juga memperkaya kelompok kriminal terorganisir transnasional dan jaringan kriminal lainnya yang terlibat dalam pengadaan lintas batas dan memasok barang selundupan. Berbagai irisan antara korupsi dan kejahatan satwa liar dan kehutanan dibahas di berbagai bagian yang berbeda dari Perangkat ini.

Meskipun beberapa pemerintah negara produsen dan konsumen, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah telah meluncurkan inisiatif yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional pada masalah kejahatan satwa liar dan kehutanan, tingkat komitmen politik dan kapasitas operasional yang dihasilkan untuk mengatasi masalah ini masih belum sepadan dengan besaran dari permasalahan itu sendiri.

Ketika langkah-langkah penegakan hukum satwa liar dan hutan diterapkan atau diperkuat, dampak langsung dari langkah-langkah ini terhadap hak dan mata pencaharian masyarakat pedesaan seringkali bukan aspek utama yang dipertimbangkan. Selain itu, undang-undang yang terkait dengan satwa liar dan kehutanan seringkali cenderung membatasi hak dan mata pencaharian orang-orang yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan tidak mempertimbangkan elemen-elemen penting ini dan hanya berfokus pada penegakan hukum, masyarakat dapat dirugikan dan peluang dapat hilang. Kerugian tersebut dapat diperburuk lebih lanjut lagi ketika dimensi penegakan hukum hak asasi manusia tidak diterapkan dengan tepat. Hubungan antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dan isu-isu di luar sektor satwa liar dan kehutanan, seperti keterlibatan masyarakat, pembangunan pedesaan, hak asasi manusia, keamanan, kesehatan masyarakat, dan supremasi hukum, sering luput atau diabaikan.



Aspek-aspek lain yang harus diingat oleh asesor, pejabat pemerintah, dan siapa pun yang terlibat dalam memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan meliputi:

» **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** : fitur penting dari semua aspek hukum lingkungan internasional adalah konsep pembangunan berkelanjutan, yang diakui dalam banyak perjanjian internasional dan perjanjian regional. Pembangunan berkelanjutan mengakui perlunya perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi dan berusaha untuk mendamaikan kedua tujuan yang seringkali bertentangan dan tarik-menarik ini; untuk mengupayakan pencapaian keseimbangan antara kebutuhan konservasi dan perlindungan pada satu sisi, dan tuntutan ekonomi dan pembangunan di sisi lain. ³

» **Hak Asasi Manusia** : kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat muncul dalam konteks, atau berkontribusi lebih lanjut pada, pelanggaran hak asasi manusia mulai dari kekerasan terbuka, ancaman, dan paksaan, hingga eksploitasi, terutama dalam bentuk kerja paksa dan penggusuran. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun kejahatan satwa liar dan kehutanan sering menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penting untuk dicatat bahwa tanggapan terhadap kejahatan ini sendiri dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bahwa, ketika bekerja untuk mencegah dan mengatasi kejahatan ini, mereka yang terlibat menyadari sepenuhnya peran dan tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak tersebut. Penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal membantu menjaga lingkungan dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, mengatasi kejahatan satwa liar dapat berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia, dan upaya harus dilakukan untuk mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia secara memadai ke dalam tindakan yang bertujuan mencegah dan menangani kejahatan ini.



Selain itu, hak-hak orang yang bekerja di sektor satwa liar dan kehutanan juga perlu dipertimbangkan, karena terlalu sering mereka bekerja dalam kondisi berbahaya dengan gaji yang tidak memadai. Kemiskinan dapat menjadi penyebab dan konsekuensi dari kejahatan satwa liar dan kehutanan. Kejahatan ini merugikan masyarakat lokal dengan mengurangi atau menguras sumber daya alam yang mereka andalkan sehingga semakin memperdalam kemiskinan. Di beberapa negara, kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait langsung dengan konflik bersenjata.

» **Gender** : Ketidaksetaraan, perbedaan, dan dinamika gender memainkan peran penting dalam penggunaan, pengelolaan, dan konservasi satwa liar dan kehutanan di tingkat lokal. Perempuan dan laki-laki dapat berinteraksi secara berbeda dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan oleh karena itu memperoleh pengetahuan dan hubungan yang berbeda dengan sumber daya ini. Biaya dan manfaat kejahatan satwa liar dan kehutanan juga berbeda untuk laki-laki dan perempuan, dan mereka dapat dipengaruhi secara berbeda oleh upaya untuk mengatasi dan mencegah kejahatan ini. Memahami peran laki-laki dan perempuan, serta kaum muda, dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan dan dalam menanggapinya, sangat penting untuk mengatasi tantangan secara efektif. Kebutaan gender dapat mengakibatkan penguatan peran dan stereotip gender yang kaku – dan berbahaya. Selain itu, memahami nuansa budaya dan gender yang mempengaruhi konsumsi dapat membantu menciptakan kampanye yang sesuai dan efektif secara budaya untuk tidak memperoleh dan menggunakan satwa liar dan hasil hutan ilegal.



³ See further Part V, Section 4.2 of this Perangkat.

Diluncurkan pada November 2010, International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC) adalah upaya kolaboratif dari lima organisasi antarpemerintah yang bekerja untuk menghadirkan dukungan terkoordinasi kepada lembaga penegak hukum satwa liar nasional dan untuk jaringan sub-regional dan regional yang bekerja untuk menjaga sumber daya alam.



Bersama-sama, perwakilan-perwakilan ICWC mendukung pihak yang berwenang dengan membangun kapasitas mereka dan memberikan kepada mereka perangkat, layanan dan dukungan teknis yang mereka perlukan untuk secara efektif memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan

1. Tujuan

Tujuan dari Perangkat ICWC adalah untuk memberikan panduan komprehensif untuk analisis berbasis bukti terkait tanggapan administratif, pencegahan, dan peradilan pidana terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan dan kejahatan terkait di lokasi tertentu. Tujuan tambahan dari Perangkat ini adalah untuk membantu mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan dan untuk memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kegiatan mereka, untuk mendukung pemahaman tentang apa yang mungkin diperlukan untuk mencegah peningkatan jenis kejahatan ini sebagai fenomena global. Untuk itu, Perangkat berisi komponen-komponen kunci yang sangat penting untuk mengatasi kejahatan satwa liar dan kehutanan baik secara nasional maupun internasional.

Walaupun audiens utama Perangkat ini adalah asesor yang menggunakan Perangkat ini dan pejabat pemerintah yang ingin meningkatkan respons mereka terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan dalam yurisdiksi tertentu, Perangkat ini juga memfasilitasi berbagi pengetahuan dan informasi di antara pembuat kebijakan, petugas penegak hukum, hakim, jaksa, peneliti, administrator, dan anggota masyarakat sipil yang bekerja pada tingkat yang berbeda menuju tujuan yang sama.

Perangkat ini menyajikan kumpulan alat dan sumber daya dari mana penggunaannya dapat memilah dan memilih, karena beberapa aspek mungkin lebih relevan dengan pengaturan nasional atau regional tertentu daripada yang lain. Pengguna diundang untuk menggunakan Perangkat sebagai dasar untuk pekerjaan mereka, sambil menyelami lebih dalam dalam aspek-aspek yang mereka anggap tepat. Sumber daya yang dirujuk dalam Perangkat mewakili pilihan materi yang dikembangkan oleh mitra ICWC atau disiapkan bersama dengan entitas dengan keahlian profesional yang diakui di bidangnya, dan publikasi dari proses resmi pemerintah atau lainnya. Pengguna juga didorong untuk berkonsultasi dengan banyak literatur akademis dan masyarakat sipil lainnya tentang subjek yang relevan di mana analisis mendalam diperlukan.



2.1 Konsep

Memerangi kejahatan, seperti kejahatan satwa liar dan kehutanan serta kejahatan lain yang memfasilitasi seperti pencucian uang dan korupsi, di sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak negara, sangat penting bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masa depan suatu negara. Ini adalah proses kompleks yang membutuhkan komitmen dari semua tingkatan dan sektor pemerintah dan masyarakat sipil. Pencegahan, penangkalan, deteksi, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan satwa liar dan kehutanan memerlukan tekad, waktu, dan konsistensi, serta pemahaman yang komprehensif tentang penyebab dan pendorong yang mendasari perilaku kriminal tersebut. Membangun integritas, membangun kredibilitas, dan membasmi korupsi di sektor-sektor yang mungkin memiliki sejarah panjang kegiatan ilegal adalah proses yang lambat dan berkelanjutan. Kesuksesan tidak dapat diharapkan dicapai dalam semalam; namun, perubahan itu mungkin terjadi.

Perangkat ini berupaya memberikan seperangkat pedoman penilaian terperinci, yang – secara sendiri-sendiri dan kolektif – dapat membantu negara-negara dalam memahami kekuatan mereka dan mengidentifikasi kelemahan mereka dalam mencegah dan mengatasi kejahatan satwa liar dan kehutanan

Perangkat ini meliputi empat elemen utama, yang membantu pengguna dengan cara-cara berikut :

1. Mengidentifikasi pola kejahatan satwa liar dan kehutanan saat ini, termasuk pendorong dan pelakunya;
2. Menganalisis respons peradilan pidana, termasuk sistem hukum, penegakan hukum, penuntutan, dan peradilan yang digunakan;
3. Memahami berbagai hubungan dan aktor dalam rantai kejahatan satwa liar dan kehutanan; dan
4. Menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah kejahatan satwa liar dan kehutanan terjadi.

Dikembangkan berdasarkan perangkat penilaian UNODC lainnya, khususnya Perangkat Penilaian Peradilan Pidana (alat analitis dengan cakupan yang lebih luas),⁴ Perangkat Analitis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan dikembangkan untuk berfungsi sebagai ringkasan yang dapat diminta oleh dan disediakan kepada negara-negara sebagai bantuan awal dalam isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Meskipun mencakup berbagai aspek internasional kejahatan satwa liar dan kehutanan (dan dengan demikian tidak terbatas pada pengalaman regional), Perangkat ini diatur agar dapat disesuaikan dengan situasi spesifik di masing-masing negara .

⁴ UNODC, Criminal Justice Assessment Toolkit (New York, United Nations, 2006).



2.2 Sasaran spesifik

Perangkat ini dirancang untuk membantu pengguna untuk:

- Menganalisis kapasitas lembaga penegak hukum dan peradilan satwa liar dan kehutanan nasional dalam menyidik, menuntut, dan mengadili kasus kejahatan satwa liar dan kehutanan;
- Mengkaji kapasitas lembaga dan mekanisme pengelolaan satwa liar dan kehutanan nasional untuk mengatasi kejahatan yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan;
- Menganalisis prosedur, kapasitas, dan tingkat transparansi dalam penegakan hukum satwa liar dan kehutanan terkait deteksi, penangkalan, serta pengumpulan dan analisis data;
- Menganalisis efektivitas mekanisme dan proposal yang ada untuk meningkatkan kapasitas keseluruhan pemerintah – atau sekelompok otoritas di suatu wilayah – dalam melawan kejahatan satwa liar dan kehutanan;
- Mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan, serta faktor-faktor yang mendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan;
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam respons yang ada terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan; serta
- Memfasilitasi perumusan dan pengembangan langkah-langkah yang secara efektif menanggapi kebutuhan dan kekurangan yang diidentifikasi .

Perangkat ini tidak dirancang untuk menggantikan keahlian, pengalaman, atau pengambilan keputusan dalam penilaian kejahatan satwa liar dan kehutanan dan tanggapan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Sebaliknya, Perangkat ini dapat berguna bagi praktisi ahli sebagai daftar periksa dan panduan efektif untuk memahami masalah utama. Langkah-langkah yang diusulkan dalam Perangkat dimaksudkan untuk membantu menganalisis sistem peradilan pidana dan mekanisme lain untuk mencegah dan mengatasi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Seperangkat alat terperinci dapat memberikan wawasan tentang penyebab dan konsekuensi yang relevan dari kejahatan satwa liar dan kehutanan dan bagaimana pemerintah dapat mengatasinya.

Dasar dari Perangkat ini adalah analisis khusus tentang aspek-aspek sistem satwa liar dan kehutanan di suatu negara, seperti pemolisian atau peradilan. Namun, analisis yang komprehensif akan selalu mencakup pemahaman tentang kerangka hukum dan administrasi suatu negara sehingga pembuat keputusan dapat memahami konteks di mana suatu sistem ada dan beroperasi, juga sebagai peluang, tantangan, dan keterbatasan yang mungkin dihadirkan oleh kerangka kerja saat ini. Yang penting dalam hal ini adalah pemahaman yang cukup tentang tradisi hukum yang berbeda, serta konsep hukum dasar dan arahan kebijakan nasional. Dengan demikian, Perangkat dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka acuan analisis awal dan dapat berfungsi sebagai daftar periksa di mana temuan dan metodologi yang diusulkan dapat diverifikasi.



2.3 Audiens

Perangkat ini dirancang untuk memungkinkan pejabat pemerintah di lembaga terkait, serta masyarakat sipil, industri dan individu, untuk (a) melakukan analisis komprehensif terhadap sistem domestik, (b) mengidentifikasi bidang bantuan teknis, (c) membantu dalam mendesain intervensi yang mengintegrasikan standar dan norma internasional tentang pencegahan, penangkalan, dan deteksi pelanggaran yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan (d) membantu dalam pelatihan tentang masalah ini.

Perangkat ini cukup fleksibel untuk memfasilitasi analisis baik di tempat-tempat terdapat infrastruktur yang solid untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan, maupun di tempat-tempat dengan institusi yang kurang kompleks. Secara khusus, Perangkat berupaya melayani audiens dan kelompok sasaran berikut :

- Pemerintah, termasuk pembuat kebijakan, legislator, dan otoritas khusus, dengan memberi mereka pemahaman yang baik tentang tanggapan mereka terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan, serta kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan akan tanggapan ini;
- Organisasi masyarakat sipil internasional, non-pemerintah, dan lainnya, dengan membantu mereka dalam menganalisis sejauh mana tanggapan yang diberikan oleh negara-negara memenuhi kewajiban internasional dan standar praktik terbaik yang ada;
- Lembaga penegak hukum khusus, otoritas kejaksaan dan lembaga peradilan, dengan membantu mereka dalam meninjau kegiatan mereka sendiri;
- Entitas pemerintah dan internasional, dengan memungkinkan penegakan hukum lintas batas dan kerja sama peradilan;
- Entitas penelitian nasional dan internasional, dan lembaga akademik, dengan membantu mereka dalam mengembangkan analisis mendalam dan sebanding dengan tanggapan negara; dan
- Negara dan lembaga donor, dengan menyediakan dan meningkatkan pendanaan yang bertujuan untuk kegiatan melawan kejahatan satwa liar dan kehutanan .

Perangkat Analitis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan ICCWC dibagi menjadi dalam lima bagian:

- I. Kerangka Legislatif
- II. Penegakan
- III. Prosedur dan pengadilan pidana
- IV. kerja sama internasional
- V. Pendorong dan pencegahan



Setiap Bagian mewakili salah satu sektor yang terlibat dalam respons peradilan preventif dan pidana terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Sistem peradilan pidana dan mekanisme relevan lainnya yang berkaitan dengan satwa liar dan kehutanan – bahkan ketika kurang berfungsi secara optimal – sangat saling bergantung dan interaktif. Dengan demikian, lima Bagian Perangkat tidak boleh dipertimbangkan secara terpisah. Banyak bagian tumpang tindih dan beberapa alat dan elemen muncul di lebih dari satu Bagian. Duplikasi ini disengaja. Dalam setiap Bagian dari Perangkat ini terdapat alat dan daftar periksa yang dirancang untuk memungkinkan analisis komprehensif tentang aspek sistem satwa liar dan kehutanan tersebut. Jika relevan, alat dirujuk silang ke Bagian yang terkait di bagian lain.

Secara keseluruhan, Perangkat ini memberikan gambaran awal tentang sejumlah besar dan beragam alat yang tersedia dalam mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Di setiap Bagian, Perangkat memberikan panduan tentang aspek-aspek spesifik kejahatan satwa liar dan kehutanan dan tindakan peradilan pidana yang terkait.

Analisis menyeluruh dari yurisdiksi mana pun akan melibatkan penggunaan Perangkat secara lengkap, tetapi bagian dan alat individual dapat dipisahkan untuk memungkinkan analisis yang lebih kecil dan terpisah dari masing-masing sektor dan dengan demikian memberikan kesempatan untuk berbagai jenis analisis, anggaran, dan kerangka waktu. Setiap Bagian memberikan panduan praktis dan terperinci untuk masalah-masalah utama yang akan diperiksa, dengan mengacu pada konvensi, standar, dan norma internasional yang relevan, serta referensi ke sumber daya tambahan yang diproduksi oleh mitra ICCWC (dan organisasi terkait lainnya jika ada). Tingkat rincian di setiap Bagian sengaja dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pemahaman tentang kedalaman dan kompleksitas yang harus melibatkan analisis menyeluruh dari sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan sektor satwa liar dan kehutanan.

Ketersediaan dan kualitas data yang tersedia di semua alat yang digambarkan dalam Perangkat sangat penting untuk membuktikan temuan tersebut. Data sangat penting untuk mewujudkan konsep Perangkat: mengidentifikasi, menganalisis, memahami, mengimplementasikan. Dengan demikian, pertanyaan yang terkait dengan data dan analisis ada di semua bagian Perangkat untuk memastikan bahwa data utama diidentifikasi dan digunakan dalam penilaian. Namun, harus dicatat bahwa penting untuk tidak hanya mengidentifikasi data yang ada, tetapi juga untuk merekam, jika mungkin, sebagian atau semua informasi tentang bagaimana data dikumpulkan, di mana data berada, siapa yang memilikinya, apakah tersedia untuk umum, seberapa sering diperbarui, tingkat rinciannya, bagaimana data itu diproses dan dibagikan, dan apakah data dianggap dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan valid. Untuk itu, asesor didorong untuk mengajukan pertanyaan lanjutan kepada mereka sebagai bagian dari penilaian mengenai ketersediaan dan kualitas data untuk memverifikasi atau memperkuat tanggapan.

4

Metodologi

Perangkat ini didasarkan pada tinjauan komprehensif terhadap literatur akademik, analisis materi legislatif, publikasi resmi dari sumber pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah, dan konsultasi dengan banyak ahli.



Perangkat yang terdapat dalam publikasi ini tidak bersifat statis. Alat-alat ini berada di lingkungan dinamis karena pola dan tingkat kejahatan satwa liar dan hutan – dan upaya untuk memerangi mereka – terus-menerus berubah bahkan seringkali dalam waktu singkat. Perangkat mencerminkan informasi terbaik yang tersedia dan paling komprehensif pada saat penulisan.

Perangkat adalah edisi kedua, dan informasi yang terkandung di dalamnya adalah informasi terbaru per 31 Maret 2022.

Pengembangan, peninjauan, dan pemeliharaan Perangkat Analisis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan di masa depan akan didasarkan pada penggunaan Perangkat di beberapa pemerintah mitra, serta penelitian berkelanjutan tentang sistem peradilan pidana yang relevan untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Bidang-bidang utama penelitian meliputi :

- Analisis mekanisme, dinamika dan celah di berbagai aktifitas lembaga pemerintah yang bertugas memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan;
- Ketersediaan dan kualitas kerangka hukum untuk melawan kejahatan satwa liar dan kehutanan;
- Efektivitas penegakan internal, standar kontrol perbatasan nasional dan kolaborasi lintas batas; dan
- kerja sama antar-lembaga, hambatan dan kesenjangan yang menghambat tindakan efektif, dan cara mengatasi hambatan tersebut.
- Ketersediaan dan kualitas data, statistik, dan penelitian ilmu sosial dan kebutuhan untuk perbaikan-perbaikannya.



Setiap bagian dari Perangkat disusun sedemikian rupa agar dapat digunakan secara independen dari bagian lain, meskipun ICCWC mendorong penggunaan Perangkat secara umum untuk memastikan penilaian komprehensif atas tanggapan nasional terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Pengguna Perangkat yang hanya memiliki minat pada aspek tertentu dapat merujuk hanya ke Bagian dan alat tertentu saja yang menarik bagi mereka. Namun, kelima bagian di dalam Perangkat tidak bekerja secara terpisah, dan dengan demikian alat-alat tersebut dirujuk silang ke Bagian yang relevan di bagian lain.

Dalam setiap bagian, 'alat' dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama. Desain, struktur, dan tata letak setiap alat mengikuti pola sederhana yang memberikan informasi latar belakang tentang signifikansi dan konteks setiap alat. Kemudian diikuti dengan penjelasan tentang alat dan penerapannya. Jika memungkinkan, referensi ke sumber daya tambahan telah disertakan.

Setiap subbagian dari Perangkat ini berisi satu atau lebih 'alat' yang merangkum poin-poin analitis yang relevan, biasanya dalam bentuk pertanyaan.

Alat ini bukan daftar periksa dengan pertanyaan-pertanyaan untuk hanya dicentang sebagai jawaban 'ya atau tidak'. Tidak semua sistem terkait satwa liar dan kehutanan di setiap negara melakukan pendekatan terhadap masalah yang sama dengan cara yang sama. Penting juga untuk mengapresiasi perbedaan, sama pentingnya dengan pengakuan kesamaan dalam hal pengembangan wawasan tentang apa yang paling berhasil dalam pengaturan tertentu. Tidak semua alat yang disarankan sesuai atau, memang ingin digunakan dalam setiap situasi. Alat-alat itu ada di sana untuk mendorong penyelidikan sistematis dan untuk memandu pengguna di sepanjang area utama yang akan dianalisis.

Seperti disebutkan di atas, kualitas, ketersediaan, dan validitas data penting untuk dipahami saat melakukan penilaian. Pengguna Perangkat didorong untuk tidak hanya mengidentifikasi data apa yang ada untuk memverifikasi dan membuktikan temuan, tetapi juga untuk mencatat detail tentang data seperti lokasi, kepemilikan, apakah data itu tersedia untuk umum, granularitasnya dan bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, dan dibagikan. Memahami di mana kesenjangan data ada dapat menerangi dasar mendasar di mana penilaian dibuat dan juga dapat menunjukkan di mana kesenjangan tersebut mempengaruhi nasional pemahaman tentang respons peradilan pidana terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan.



Sumber daya yang dikutip dalam Perangkat tidak berarti merupakan kumpulan lengkap dari semua tanggapan terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan yang berhasil, kreatif, dan inovatif. Namun demikian, Perangkat ini menyediakan sumber daya tambahan yang dibuat oleh mitra ICCWC atau entitas yang secara resmi diakui sebagai pakar di bidang tertentu sehingga dapat membantu asesor dan pengguna Perangkat untuk mempelajari lebih dalam topik tertentu.

Untuk penggunaan Perangkat secara paling efektif, disarankan agar analisis yang dipimpin pemerintah dilakukan dengan partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk, antara lain, lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan komunitas dan kelompok lokal. Pengguna Perangkat dapat memilih bidang minat mereka dan menggunakan alat yang direkomendasikan di Bagian Perangkat yang relevan.

ICCWC merekomendasikan penggunaan Kerangka Indikator ICCWC bersama-sama dengan Perangkat; Kerangka Indikator adalah latihan yang berguna tidak hanya untuk menetapkan garis dasar (baseline) untuk mengukur perkembangan di masa yang akan datang dalam respons nasional terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan tetapi juga dapat membantu memandu pemerintah dalam menentukan aspek mana dari Perangkat yang paling berguna dan/atau layak untuk dilakukan.

Untuk memungkinkan analisis yang efektif dan rekomendasi tindak lanjut yang dibuat dengan melakukan proses Perangkat, disarankan agar hasil analisis disusun dalam format laporan. Laporan ini dimiliki oleh pemerintah dan selanjutnya dapat dibagikan dengan kepala lembaga nasional terkait dan pembuat kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendorong perubahan undang-undang yang ada, struktur lembaga, sumber daya manusia dan logistik, serta kebijakan lembaga dan pemerintah. Jika pemerintah memilih untuk mempublikasikan laporan, atau Ringkasan Eksekutif atau bagian lain dari laporan, hal ini mungkin sangat berguna bagi organisasi dan lembaga donor yang dapat menawarkan dukungan dan pengembangan kapasitas untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat dari analisis. Laporan semacam itu selanjutnya mungkin sangat berguna dalam berhubungan dengan komunitas donor ketika merancang proyek atau program untuk memicu perubahan di tingkat nasional.



ICCWC mengembangkan Kerangka Indikator untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan (KI)

sebagai alat penilaian mandiri untuk digunakan oleh otoritas nasional bersama dengan Perangkat dan memberikan tambahan alat penilaian untuk digunakan di tingkat nasional.

Lebih lanjut lagi, ICCWC merekomendasikan agar negara-negara menggunakan temuan dan rekomendasi analisis Perangkat untuk memprioritaskan intervensi dan mengembangkan rencana aksi untuk melakukan intervensi tersebut, dan menekankan pentingnya memanfaatkan dana, mitra, dan memantau kemajuan dalam pelaksanaan rekomendasi.

Diharapkan bahwa panduan yang ditawarkan dan sumber daya yang direkomendasikan dalam edisi kedua Perangkat Analisis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan ini dapat menginspirasi dan membantu pembuat kebijakan, penegak hukum, hakim, jaksa, administrator, dan anggota masyarakat sipil dalam memainkan perannya dalam upaya global untuk memerangi perdagangan ilegal fauna dan flora. ICCWC menawarkan dukungan berkelanjutan kepada negara-negara yang meminta bantuan teknis dan pengembangan kapasitas.

Walaupun Perangkat menyediakan sarana untuk analisis yang komprehensif, Kerangka Indikator untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan (KI) memungkinkan penilaian yang lebih cepat terhadap respons penegakan hukum nasional terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan. KI juga menyediakan kerangka kerja standar untuk memantau setiap perubahan dalam kapasitas dan efektivitas penegakan hukum nasional dari waktu ke waktu dengan menciptakan garis dasar yang dapat diukur dengan mengulangi proses pada interval yang dipilih. KI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area spesifik mana dari proses Perangkat yang mungkin layak untuk analisis lebih lanjut dan penilaian mendalam.⁵

KI terdiri dari 50 indikator komprehensif yang disusun berdasarkan delapan hasil yang diinginkan dari penegakan hukum yang efektif untuk memerangi kejahatan satwa liar. Meskipun KI dimaksudkan sebagai mekanisme penilaian mandiri, sebaiknya KI diisi melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua lembaga penegak hukum nasional terkait. Proses ini sering dilakukan di bawah bimbingan para ahli UNODC yang kemudian melaporkan temuan tersebut kepada badan nasional terkait. Walaupun KI dapat digunakan sebagai produk yang berdiri sendiri, ICCWC merekomendasikan agar produk tersebut digunakan sebagai bagian integral dari proses penilaian Perangkat sebagai sarana penilaian awal.

⁵ Lihat https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Indicator_Framework_e.pdf



KERANGKA HUKUM

Bagian I



Selama 50 tahun terakhir, berbagai instrumen hukum internasional telah dikembangkan untuk berusaha melindungi lingkungan, sumber daya alam, habitat, serta fauna dan flora dunia.

Meski tidak satu pun dari inisiatif ini secara khusus ditujukan untuk mencegah dan menekan kejahatan satwa liar dan kehutanan, secara bersama-sama perjanjian internasional dan hukum nasional yang ada menyediakan kerangka kerja yang, secara langsung atau tidak langsung, mengatur, mengendalikan, dan membatasi perdagangan internasional fauna dan flora, dan mengkriminalisasi banyak kegiatan ilegal di sektor satwa liar dan kehutanan.

Perbedaan besar terus ada di dalam dan di antara kerangka hukum satwa liar nasional, kehutanan, pidana dan sistem hukum nasional lainnya. Banyak negara tidak secara komprehensif mengkriminalisasi berbagai kegiatan yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Di beberapa yurisdiksi, hukum pidana tidak memuat ketentuan khusus untuk korupsi dan pencucian uang di sektor satwa liar dan kehutanan. Di tempat lain, hukum yang ada mungkin tidak cukup menangkap upaya melakukan kejahatan atau partisipasi dalam kejahatan ini. Dalam keadaan ini, reformasi sistem hukum dan peraturan menjadi prasyarat untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Sama seperti kejahatan satwa liar dan kehutanan yang bervariasi dari satu negara ke negara lain, begitu pula undang-undang dan peraturan terkait satwa liar dan kehutanan. Di sebagian besar yurisdiksi, kerangka hukum yang relevan dapat ditemukan di berbagai undang-undang yang membahas beragam aspek kejahatan satwa liar dan kehutanan ketimbang dalam satu undang-undang tertentu saja. Pelanggaran undang-undang atau peraturan satwa liar dan kehutanan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata atau pidana, dengan beberapa negara lebih mengandalkan sanksi pidana sedangkan negara-negara lain lebih berfokus pada sanksi perdata atau administratif. Untuk alasan ini, analisis kerangka hukum tidak boleh terbatas pada hukum terkait satwa liar dan kehutanan atau hukum pidana saja.

Bagian I dari Perangkat ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan memeriksa kerangka hukum dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan Kehutanan, melingkupi :

1. Konvensi dan perjanjian internasional yang dapat menimbulkan kewajiban dan prinsip yang relevan dengan yurisdiksi tertentu,
2. Undang-undang nasional tentang perlindungan dan penggunaan fauna, flora, dan lingkungan,
3. Kejahatan satwa liar dan kehutanan tertentu,
4. Kejahatan yang memfasilitasi atau terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan,
5. Hukum dan prinsip umum tentang pertanggungjawaban pidana,
6. Kerangka hukum dan administrasi untuk kerja sama internasional dibahas secara terpisah di Bagian IV, Bagian 1 dari Perangkat ini.

1

Bagian 1

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah)

CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,⁶ adalah instrumen internasional utama untuk mengendalikan dan mengatur perdagangan internasional spesies yang dilindungi dan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.



Tujuan ini dicapai dengan menciptakan sistem kontrol untuk setiap perdagangan dan transaksi spesies yang terancam punah. Konvensi ini berisi tiga Lampiran spesies yang terpisah, yang masing-masing menetapkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang berlaku untuk spesies yang terdaftar :

- Lampiran I mencakup spesies-spesies yang terancam punah dan berkenaan dengan perdagangan komersial yang tidak patut atau tidak berkelanjutan. Setiap perdagangan spesimen dari spesies yang terdaftar dalam Lampiran I hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa dan memerlukan izin sebelumnya baik dari negara pengimpor maupun negara pengekspor. Sertifikat juga diperlukan untuk ekspor ulang spesies.
- Lampiran II mencakup spesies-spesies yang tidak selalu dalam bahaya kepunahan tetapi yang mungkin menjadi terancam punah jika perdagangan mereka tidak diatur secara ketat, serta perdagangan yang harus diatur secara ketat untuk memungkinkan kontrol yang efektif. Izin ekspor diperlukan untuk setiap perdagangan spesies yang terdaftar dalam Lampiran II dan harus ditunjukkan kepada otoritas bea cukai negara pengimpor.
- Lampiran III mencakup spesies-spesies yang dipilih oleh masing-masing Negara Pihak dalam CITES untuk dijadikan subjek regulasi dan yang memerlukan kerja sama Pihak lain dalam mengendalikan perdagangan. Perdagangan spesies yang terdaftar di Lampiran III memerlukan Otoritas Pengelolaan (Management Authority) di Negara pengekspor untuk mengeluarkan izin ekspor, bagi negara yang memasukkan spesies yang bersangkutan dalam Lampiran III, atau sertifikat asal, jika itu adalah negara lain.

CITES adalah satu-satunya instrumen internasional terpenting untuk menangani perdagangan ilegal fauna dan flora karena merupakan satu-satunya perjanjian yang mengharuskan Para Pihak untuk menghukum beberapa aspek perdagangan ilegal spesies yang dilindungi. CITES adalah satu-satunya perjanjian internasional yang menetapkan kejahatan khusus yang berkaitan dengan kegiatan ilegal di sektor satwa liar dan kehutanan, dan juga memungkinkan negara untuk menyita fauna dan flora yang bersumber secara ilegal.

⁶ 999 UNTS 243 (No 14537). CITES dibuka untuk ditandatangani di Washington, DC, pada 3 Maret 1973 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1975.

⁷ Lihat lebih lanjut Bagian I, Section 2.3.3 dalam Perangkat ini.

1. Akses dan implementasi CITES

Dengan lebih dari 180 Pihak, CITES memiliki tingkat kepatuhan yang hampir universal. Ketika pemerintah suatu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional memutuskan bahwa mereka akan terikat oleh ketentuan CITES, mereka dapat 'bergabung' dengan Konvensi dengan membuat deklarasi formal untuk hal ini dengan menulis kepada depositary, yaitu Pemerintah Swiss. Setelah dokumen yang berisi deklarasi ini diterima oleh depositary melalui saluran diplomatik, Konvensi mulai berlaku 90 hari kemudian untuk Negara yang bersangkutan (Pasal XXII Ayat 2).

CITES hanya bisa efektif apabila Para Negara Pihak memberlakukan dan menegakkan ketentuan spesifiknya. Hal ini seringkali dilakukan melalui undang-undang spesies yang terancam punah atau undang-undang serupa. Implementasi CITES ke dalam hukum nasional dapat terjadi melalui satu bagian undang-undang yang berdiri sendiri atau melalui beberapa undang-undang. Jika undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan spesies dan perdagangan internasional fauna dan flora sudah ada, implementasi CITES dapat melibatkan amandemen undang-undang nasional tersebut. Implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional diuraikan lebih lanjut dalam Bab I, Bagian 1.6 dari Perangkat ini.

CITES diterapkan secara luas di seluruh dunia, jika mau dibilang selalu sepenuhnya. Konvensi ini telah berhasil mencegah kepunahan spesies yang sangat terancam punah, terutama pada saat perdagangan komersial telah berakhir sepenuhnya. Beberapa Pihak dalam CITES belum memberlakukan undang-undang khusus untuk melaksanakan Konvensi; sebaliknya, mereka bergantung pada undang-undang satwa liar dan kehutanan umum, atau dalam beberapa kasus mereka menggunakan undang-undang bea cukai atau perdagangan luar negeri untuk mengendalikan perdagangan spesies yang terdaftar di CITES. Terkadang, undang-undang ini tidak sepenuhnya sesuai atau mematuhi persyaratan CITES, terutama dalam hal di mana undang-undang tersebut diberlakukan sebelum CITES muncul. Implementasi sistem CITES yang tidak memadai tidak hanya mengurangi perlindungan spesies di yurisdiksi tertentu tetapi juga mengurangi efektivitas Konvensi secara internasional.

Implementasi domestik kewajiban CITES dikaji lebih lanjut di Bab I, Bagian 2.3 dari Perangkat ini.



Akses dan Pelaksanaan CITES

- » Apakah Negara dimaksud adalah Pihak CITES?
- » Di undang-undang nasional mana CITES telah dilaksanakan?
- » Apakah undang-undang tersebut memberdayakan pemerintah untuk mengatur perdagangan internasional dan domestik, kepemilikan dan transportasi spesies hewan dan tumbuhan?

*Sumber daya tambahan:
C de Klemm, Guidelines for Legislation to Implement CITES, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 26 (1993) 5–9*

1.1 Reservasi/Pengecualian CITES

Operasi dan penerapan CITES dapat dibatasi sehubungan dengan tumbuhan atau hewan tertentu jika suatu Negara melakukan reservasi sehubungan dengan spesies apa pun yang termasuk dalam tiga Lampiran atau bagian atau turunan apa pun yang ditentukan sehubungan dengan spesies yang termasuk dalam Lampiran III (sesuai dengan Pasal XXIII, Paragraf 2 dari CITES). Hal ini dapat dilakukan setelah menjadi Pihak dalam Konvensi atau setelah amandemen Lampiran sehubungan dengan perdagangan spesies atau bagiannya atau produk turunnya. Mekanisme reservasi di bawah CITES secara efektif memungkinkan negara-negara untuk bertindak sebagai non-Pihak dalam kaitannya dengan spesies tertentu (Pasal XV, Paragraf 3 dan Artikel XVI, Paragraf 2).

Reservasi yang diizinkan berdasarkan CITES kadang-kadang dianggap melemahkan tujuan Konvensi, karena dapat membuka pintu bagi negara-negara untuk memilih keluar dari perlindungan beberapa spesies, sehingga memungkinkan eksploitasi komersial spesies yang terancam punah. Di sisi lain, klausul reservasi adalah jalan untuk meningkatkan dukungan umum untuk Konvensi dan mendorong keanggotaan oleh negara-negara yang mungkin tidak menyetujui CITES. Selain itu, klausul reservasi mengakui bahwa negara-negara mungkin memiliki kepentingan perdagangan yang sah pada beberapa spesies dan berusaha melindungi kepentingan ekonomi mereka.

Perlindungan spesies yang terdaftar di CITES di bawah hukum nasional dianalisis lebih lanjut di Bab I, Bagian 2.3 dari Perangkat ini.

Reservasi CITES

- » Apakah Negara dimaksud telah memasukkan reservasi sehubungan dengan spesies tertentu yang terdaftar di CITES? Apa spesies tersebut? Apa saja reservasinya?
- » Bagaimana reservasi diterjemahkan ke dalam hukum nasional?
- » Apakah ada perdagangan spesies tersebut? Jika demikian, apakah perdagangan ini terkait dengan kelompok kriminal?



1. Implementasi domestik CITES

Di sebagian besar yurisdiksi, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan spesies dan peraturan perdagangan spesies fauna dan flora yang terancam punah dapat ditemukan dalam undang-undang nasional yang menerapkan CITES. Mengingat tingkat penerimaan CITES yang meluas secara global, hanya ada sangat sedikit negara di mana undang-undang perlindungan spesies tidak terkait dengan CITES. Di beberapa negara, undang-undang yang relevan disebut 'Undang-Undang Spesies Terancam Punah', 'Undang-Undang Perlindungan Spesies Terancam Punah' atau undang-undang dengan nama yang sama, sementara yang lain menggunakan undang-undang satwa liar umum, dan terkadang undang-undang kepabeanaan atau perdagangan luar negeri, untuk mengontrol perdagangan spesimen spesies yang terdaftar di CITES.

Sekretariat CITES lebih lanjut mencatat bahwa sementara

[k]etentuan legislatif untuk menerapkan CITES di masing-masing Negara Pihak mirip, Para Negara Pihak mungkin memiliki struktur hukum, kebijakan nasional, budaya, spesies yang diperdagangkan, atau jenis perdagangan yang berbeda. Namun, semua Pihak harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur perdagangan satwa liar internasional. Hanya melalui undang-undang yang memadai, mutakhir, dan ditegakkan secara efisien, CITES benar-benar dapat bekerja.⁹

⁸ Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 1.1 dari Perangkat ini.

⁹ CITES Secretariat, Model Law on International Trade, p. 2 (emphasis added).



ALAT
1.3

Alat berikut menetapkan elemen-elemen CITES yang memiliki relevansi khusus dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan dan apakah undang-undang dan aturan lampirannya diperbarui secara teratur sesuai kebutuhan.¹⁰

Pelaksanaan CITES di dalam negeri

- » Hukum nasional mana yang menerapkan kewajiban dan ketentuan lain di bawah CITES? Kapan undang-undang ini diberlakukan? Kapan terakhir kali diperbarui?
- » Apakah undang-undang terkait menetapkan:
- » Aturan umum untuk mengatur perdagangan internasional dan domestik spesies yang terancam punah;
 1. Peran dan wewenang penegak hukum;
 2. Larangan dan tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan ilegal spesies yang terancam punah;
 3. Kekuasaan untuk penyitaan; dan
 4. Kekuasaan umum bagi pemerintah untuk membuat peraturan seperlunya?
- » Apakah undang-undang menggunakan

Sumber daya tambahan:

C de Klemm, Guidelines for Legislation to Implement CITES, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 26 (1993) 5–106

Sekretariat CITES telah mengeluarkan daftar periksa undang-undang untuk meninjau undang-undang CITES di dalam negeri. Daftar ini berisi 70 item untuk ditinjau yang didasarkan pada resolusi Konferensi Para Pihak CITES dan Pedoman agar undang-undang dapat mengimplementasikan CITES. Daftar periksa ini berisi item-item yang berkaitan dengan desain umum dan penerapan undang-undang CITES di dalam negeri; otoritas pengelola CITES dan otoritas keilmuan; persyaratan izin; bentuk dan keabsahan izin dan sertifikat; pencabutan, modifikasi, dan penangguhan izin; pengecualian untuk persyaratan izin; kontrol perbatasan; kontrol pengiriman dan izin; penegakan hukum dan hukuman; pembuangan spesimen yang disita; penerimaan dan penolakan izin asing; laporan; dan masalah keuangan.

1.2 Cakupan dan lampiran

CITES mengklasifikasikan spesies dan subspecies di bawah Lampiran I, II atau III tergantung pada tingkat ancaman yang dihadapi spesies tersebut dari eksploitasi melalui perdagangan internasional. Spesies yang tercantum dalam Lampiran I tunduk pada batasan yang paling ketat, diikuti oleh Lampiran II dan III.

Dalam hukum nasional, Lampiran CITES biasanya ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian dari hukum nasional yang terkait. Lampiran-lampiran tersebut mendapatkan kekuatan hukumnya dari referensi yang terdapat dalam ketentuan substantif dalam batang tubuh undang-undang. Lampiran digunakan dalam undang-undang untuk memberikan rincian yang, untuk kemudahan penggunaan, tidak dapat dibahas secara memadai di badan utama undang-undang. Tergantung pada sistem hukum yang dimaksud, lampiran dapat dimasukkan dalam instrumen legislatif utama seperti undang-undang, atau instrumen legislatif turunan seperti peraturan.

Penerapan dan penegakan ketentuan CITES tentu terbatas pada spesimen spesies yang tercantum dalam Lampiran CITES. Banyak spesies kayu, misalnya, tidak terdaftar dalam CITES dan tidak dilindungi oleh perjanjian internasional lainnya. Ini, pada gilirannya, berarti bahwa mekanisme perlindungan dan penegakan hukum di bawah CITES tidak tersedia untuk menanggapi perdagangan ilegal spesies yang tidak tercantum dalam Lampiran. Mereka juga tidak berlaku untuk perdagangan apa pun yang melibatkan

¹⁰ CITES Secretariat, Model Law on International Trade, p. 3.

negara-negara yang bukan merupakan Negara Pihak CITES. Akibatnya, perdagangan melalui non-Pihak dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari persyaratan pelaporan dan perizinan.

Karena alasan inilah beberapa negara telah mengadopsi undang-undang tambahan untuk mencegah dan menekan perdagangan ilegal spesies non-CITES dan memperluas penerapan persyaratan dokumentasi, izin, dan pelaporan kepada negara-negara yang bukan merupakan Pihak CITES. Sekretariat CITES juga merekomendasikan penggunaan standar Konvensi dalam setiap perdagangan yang melibatkan negara-negara non-penandatanganan, menggunakan "dokumentasi yang sebanding" yang dikeluarkan oleh otoritas yang kompeten sebagaimana diatur dalam Pasal X CITES.

Isi dan kategorisasi lampiran satwa liar masing-masing Negara adalah urusan Negara. Lampiran ini didasarkan, setidaknya sebagian, pada evaluasi masing-masing Negara bagian tentang spesies atau subspecies flora dan fauna apa yang membutuhkan perlindungan legislatif. Sebagian besar Negara memanfaatkan daftar internasional yang ada dalam mengembangkan lampiran fauna dan flora yang terancam punah, dan juga menyesuaikan lampiran ini dengan nilai-nilai lokal dan realitas lokal. Selain Lampiran CITES, daftar internasional yang relevan termasuk Lampiran Konvensi Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi (CMS)¹¹ dan Daftar Merah yang dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature.

Alat berikut mempertimbangkan apakah undang-undang CITES nasional mencakup semua spesimen dari semua spesies (hewan dan tumbuhan, hidup atau mati, termasuk bagian dan turunannya) yang termasuk dalam tiga Lampiran CITES (dan daftar internasional lainnya), dan apakah undang-undang dan lampirannya diperbaharui secara teratur seperlunya.

Cakupan undang-undang perlindungan spesies

- » Apakah hukum nasional berlaku untuk semua hewan dan tanaman yang ada pada Lampiran I, II dan III CITES?
- » Apakah tabel dan lampiran diperbaharui apabila dan ketika Lampiran CITES berubah?
- » Apakah UU berlaku untuk spesies non-CITES? Apakah mereka terdapat pada lampiran yang terpisah?
- » Apakah UU nasional yang terkait dengan perlindungan spesies berlaku untuk perdagangan satwa terancam punah dengan negara-negara yang bukan Pihak pada CITES?

Sumber daya tambahan:

C de Klemm, Guidelines for Legislation to Implement CITES, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 26 (1993) 13–17
UNODC, Guide on drafting legislation to combat wildlife crime (2018) 6



1.3 Otoritas CITES

Para Negara Pihak CITES harus menunjuk Otoritas Pengelola (atau Otoritas) untuk mengeluarkan izin atau sertifikat, serta Otoritas Keilmuan (atau Otoritas) untuk dikonsultasikan dalam kasus-kasus tertentu sebelum izin atau sertifikat dikeluarkan. Setiap perdagangan internasional, termasuk ekspor, ekspor ulang, impor atau pengiriman dari laut, hewan atau tumbuhan apa pun, atau bagian atau turunan dari spesies yang termasuk dalam Lampiran CITES, memerlukan penerbitan izin atau sertifikat (tergantung pada kasusnya) oleh Otoritas Pengelola. Prosedur untuk mengeluarkan izin atau sertifikat bervariasi tergantung pada Lampiran CITES yang terlibat, sumber spesimen dan faktor lainnya.

Analisis Otoritas CITES nasional harus mempertimbangkan instrumen hukum (hukum, peraturan atau keputusan) yang mengesahkan penunjukan Otoritas Pengelola dan Otoritas Keilmuan CITES atau secara tegas menunjuk Otoritas tersebut. Misalnya, undang-undang beberapa negara mungkin tidak membuat ketentuan untuk penunjukan Otoritas Keilmuan.

¹¹ Lihat Bab I, Bagian 1.4.3 dari Perangkat ini.

Analisis harus mempertimbangkan lebih lanjut apakah undang-undang dengan jelas dan tepat memberi Otoritas Pengelola CITES kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya (misalnya, kekuatan untuk memberikan izin dan sertifikat) dan menyediakan mekanisme untuk koordinasi dan komunikasi antara Otoritas Pengelola dan lembaga pemerintah lainnya dengan kompetensi yang relevan.

Mandat Otoritas Pengelola nasional memerlukan kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum nasional, termasuk polisi, yang dapat memberikan dukungan dalam mengidentifikasi satwa liar ilegal dan hasil hutan yang diangkut melalui jalan darat, dan otoritas bea cukai. Untuk memfasilitasi kerja sama tersebut, Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) dan Sekretariat CITES merekomendasikan penandatanganan nota kesepahaman nasional (MOU) antara Bea Cukai dan Otoritas Pengelola CITES. Kerangka kerja semacam itu memberi otoritas bea cukai platform yang tepat untuk memperoleh informasi dari Otoritas Manajemen yang dapat digunakan untuk menargetkan pengiriman dan pelancong berisiko tinggi. MOU juga dapat memungkinkan otoritas bea cukai untuk membantu Otoritas Pengelola dengan menunjukkan adanya keadaan atau kiriman yang mencurigakan. Peningkatan kuantitas dan frekuensi informasi yang disediakan oleh Otoritas Pengelola memungkinkan otoritas bea cukai untuk mengidentifikasi, membedakan, dan menargetkan lalu lintas berisiko tinggi secara lebih efektif, sambil memungkinkan sebagian besar perdagangan yang sah untuk bergerak bebas.¹²

Peran utama Otoritas Keilmuan CITES nasional adalah untuk memberikan saran kepada Otoritas Pengelola di negara mereka, sebelum penerbitan izin dan sertifikat CITES, tentang apakah ekspor yang disetujui tidak akan merugikan kelangsungan hidup spesies yang terlibat. Untuk spesimen hidup yang termasuk dalam Lampiran I, Otoritas Keilmuan di negara impor juga harus puas bahwa penerima spesimen yang diusulkan memiliki kelengkapan yang tepat untuk menampung dan merawatnya. Ketika diminta oleh Otoritas Pengelola mereka, Otoritas Keilmuan juga harus memberikan saran tentang pengembalian (ke negara ekspor) atau penempatan di pusat penyelamatan atau fasilitas serupa, dari spesimen hidup yang disita dari spesies yang terdaftar di CITES. Otoritas Keilmuan juga diminta untuk meninjau semua aplikasi untuk mengekspor spesimen spesies yang terdaftar di CITES yang diklaim dibiakkan di penangkaran atau diperbanyak secara artifisial dan memberi saran kepada Otoritas Pengelola mereka apakah fasilitas yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk klaim tersebut.



ALAT
I.5

OTORITAS CITES

- » Apakah hukum nasional menerapkan aturan CITES umum untuk mengatur perdagangan internasional dan domestik spesies yang terancam punah;
 1. menunjuk Manajemen dan Otoritas Keilmuan dan mengartikulasikan peran masing-masing; dan
 2. menetapkan persyaratan izin, termasuk (a) bentuk dan keabsahan izin dan sertifikat, (b) pencabutan, modifikasi dan penangguhan izin, dan (c) pengecualian untuk persyaratan izin?
- » Bagaimana Otoritas Manajemen bekerja sama dengan bea cukai, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya? Apakah MOU atau perjanjian lain telah dibuat untuk memfasilitasi kerja sama mereka? Apa saja yang diatur dalam MOU?
- » Bagaimana Otoritas Pengelola bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya ?
- » Apakah Otoritas Pengelola diberi mandat untuk memberikan bantuan kepada lembaga penegak hukum lain dalam hal identifikasi, penanganan, dan pembuangan spesimen yang ditahan atau disita?

Sumberdaya tambahan:

C de Klemm, Guidelines for Legislation to Implement CITES, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 26 (1993) 22–25
WCO, Guidelines on Co-operation between Customs Administrations and CITES Management Authorities Managing the Trade in Animals and Plants (CITES). WCO reference number Annex IV to Doc. 41.827 (classified, only available to WCO members)

¹² Lihat lebih lanjut Bab IV, Bagian 4.3.1 dari Perangkat.

2

Bagian 1

Hukum Internasional Lainnya

Hukum internasional yang ada berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan terdiri dari beberapa konvensi dan perjanjian lain yang menangani beberapa aspek lingkungan dan kriminal dari fenomena ini.



Ini dicapai dengan menciptakan sistem kontrol untuk setiap perdagangan dan transaksi dalam spesies ini. Konvensi ini berisi tiga Lampiran spesies yang terpisah, yang masing-masing menetapkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang berlaku untuk spesies yang terdaftar :

Singkatnya, perjanjian ini berkaitan dengan :

- Kejahatan terorganisir, korupsi dan pencucian uang. Instrumen dalam kategori ini ditujukan untuk mencegah dan menghukum individu dan jaringan yang terlibat dalam kegiatan kriminal serius termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan, merampas hasil kejahatan mereka, memerangi korupsi dan memfasilitasi kerja sama lintas batas.
- Perlindungan keanekaragaman hayati yang melibatkan konservasi dan perlindungan habitat untuk menjaga ekosistem atau kawasan alam tertentu dan semua spesies di dalamnya. Konservasi keanekaragaman hayati biasanya melibatkan perlindungan lahan yang ditunjuk, kawasan konservasi atau cagar alam dari perambahan apa pun. Perlindungan habitat mengacu pada langkah-langkah yang berusaha untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan habitat dan mencegah kepunahan spesies, fragmentasi atau pengurangan jangkauan.
- Perlindungan spesies, termasuk langkah-langkah untuk menekan perdagangan ilegal spesies tersebut. Ini penting untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan tertentu, dan untuk mencegah eksploitasi yang tidak perlu.¹³
- Perlindungan taman nasional, ekosistem atau wilayah geografis. Instrumen dalam kategori ini sebagian besar berkaitan dengan pelestarian area yang ditentukan dengan nilai ekologis, biologis atau alami tertentu. Daerah-daerah ini dapat ditempatkan dalam perlindungan internasional karena ciri-cirinya yang langka atau unik, atau fauna atau floranya.

¹³ Lihat Bab I, Bagian 1 dari Perangkat ini.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Kelompok kriminal terorganisir sering terlibat dalam perdagangan satwa liar. Bentuk-bentuk kejahatan satwa liar dan kehutanan yang serius dan canggih seperti itu dapat termasuk dalam ruang lingkup Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (sering disebut dengan akronim UNTOC),¹⁴ satu-satunya instrumen global untuk mencegah dan memerangi kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya. Sejak awal, Konvensi ini telah menjadi alat penting dan hampir universal dalam mencegah dan memerangi kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan satwa liar dan bentuk kejahatan satwa liar dan kehutanan lainnya. Karena pelaksanaan dan konsekuensi dari kejahatan satwa liar dan kehutanan sering melampaui batas internasional, dan mengingat keterlibatan kelompok kriminal terorganisir dalam kejahatan tersebut, ada potensi yang cukup besar untuk mengajukan UNTOC.¹⁵ Majelis Umum PBB mengakui bahwa Konvensi "merupakan alat yang efektif dan kerangka hukum yang diperlukan untuk kerja sama internasional dalam memerangi [...] kegiatan kriminal seperti [...] perdagangan ilegal spesies flora dan fauna liar yang terancam punah".¹⁶

Tujuan UNTOC "adalah untuk mempromosikan kerja sama untuk mencegah dan memerangi kejahatan terorganisir transnasional secara lebih efektif" (Pasal 1). UNTOC berlaku untuk semua "kejahatan serius" dengan aspek kejahatan terorganisir transnasional. Berdasarkan Pasal 2, Ayat (b), "'kejahatan serius' berarti melakukan, yang merupakan kejahatan yang dapat dihukum dengan perampasan kebebasan maksimum setidaknya empat tahun penjara atau hukuman yang lebih serius." Keseriusan dengan demikian mengacu pada hukuman hukum untuk suatu kejahatan di bawah hukum nasional; Dengan demikian, 'kejahatan serius' termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan hukuman penjara empat tahun atau lebih. Untuk tujuan ini, Konferensi Para Pihak UNTOC dalam Resolusinya 10/6 telah mendesak para pihak dalam UNTOC untuk menjadikan perdagangan satwa liar sebagai kejahatan serius, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi.

Konvensi ini telah menjadi alat global yang penting dalam mencegah dan memerangi kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya. UNTOC mendorong Para Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah terhadap kejahatan terorganisir transnasional, termasuk persyaratan untuk menetapkan tindak pidana, mekanisme kerja sama internasional, dan langkah-langkah pencegahan berdasarkan hukum nasional. Konvensi ini berupaya untuk meningkatkan standardisasi dan koordinasi langkah-langkah legislatif, administratif, dan penegakan hukum nasional yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir transnasional, dan untuk memastikan upaya global yang lebih efisien dan efektif untuk mencegah dan menemukannya. UNTOC menetapkan empat kejahatan khusus: partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir (Pasal 5); pencucian uang (Pasal 6); korupsi (Pasal 8); dan obstruksi keadilan (Pasal 23). Untuk membantu Negara-negara Anggota dalam penyelidikan, penuntutan, dan adjudikasi atas kejahatan-kejahatan ini, Konvensi mempromosikan penggunaan alat-alat kerja sama internasional seperti bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), ekstradisi (Pasal 16), penggunaan teknik investigasi khusus (Pasal 20), dan investigasi bersama (Pasal 19).



ALAT
I.6

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

- » Apakah negara tersebut merupakan Pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional ?
- » Apakah negara telah membuat reservasi untuk ketentuan apa pun berdasarkan Konvensi?
- » Dalam hukum nasional atau hukum mana Konvensi telah dilaksanakan?
- » Apakah kejahatan, tindakan kerja sama internasional atau ketentuan lain berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional telah digunakan dalam proses yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumberdaya tambahan:

UNODC, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2nd ed, 2017)* UNODC, *Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: Needs Assessment Tools (2016)*

¹⁴ United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. Diadopsi pada tanggal 15 November 2000; mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003.

¹⁵ Dengan ketentuan bahwa pelanggaran tersebut dipertimbangkan dalam undang-undang Negara Pihak Konvensi.

¹⁶ Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 tanggal 15 November 2000.

Implementasi nasional ketentuan di bawah UNTOC dibahas lebih lanjut di Bab I, Bagian 4 (dalam kaitannya dengan kriminalisasi) dan di Bab IV (dalam konteks kerja sama internasional) dari Perangkat ini.

2.2 United Nations Convention against Corruption

Korupsi adalah pendorong utama kejahatan satwa liar dan kehutanan. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi* (UNCAC)¹⁷ tidak memberikan definisi tunggal untuk korupsi tetapi mengakui bahwa itu adalah fenomena yang terus berkembang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kerangka hukum dengan demikian berbeda dalam deskripsi mereka tentang korupsi. Konvensi, bagaimanapun, memberikan daftar tindakan korupsi yang disepakati secara universal bahwa Negara-negara harus mengkriminalisasi (atau, dalam beberapa kasus, mempertimbangkan kriminalisasi), memberikan setiap Negara kemampuan untuk melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam Konvensi. Konvensi ini juga menetapkan berbagai langkah untuk mencegah dan memerangi tindakan ini. UNCAC melengkapi upaya yang lebih luas untuk mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan di bawah instrumen internasional lainnya yang dibahas di sini. UNCAC adalah satu-satunya instrumen universal yang mengikat secara hukum melawan korupsi dan dibangun di atas preseden *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional* dan menggabungkan sejumlah ketentuan serupa.

Tujuan UNCAC adalah untuk :

- mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi secara lebih efisien dan efektif;
- mempromosikan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pemulihan aset; dan
- mempromosikan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan urusan publik dan properti publik yang tepat.¹⁸

UNCAC berisi beberapa ketentuan kriminalisasi yang mungkin relevan untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini mensyaratkan kriminalisasi penyuaan pejabat publik nasional (Pasal 15), penyuaan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16), penggelapan, penyalahgunaan atau pengalihan properti lainnya oleh pejabat publik (Pasal 17), pencucian uang (Pasal 23) dan obstruksi keadilan (Pasal 25). Selain itu juga mendorong kriminalisasi perdagangan pengaruh (Pasal 18), penyalahgunaan fungsi (Pasal 19), pengayaan diri secara tidak sah (Pasal 20), penyuaan dan penggelapan di sektor swasta (Pasal 21 dan 22) dan penyembunyian (Pasal 24). Ini juga menetapkan tanggung jawab badan hukum (Pasal 26).

Peran UNCAC dalam mencegah dan memerangi satwa liar dan kejahatan hutan ditekankan dalam berbagai dokumen internasional. Pada tahun 2013, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa "*tindakan terkoordinasi sangat penting untuk menghilangkan korupsi dan mengganggu kelompok kriminal terorganisir terlarang yang mendorong dan memungkinkan perdagangan satwa liar*".¹⁹ Pada Juli 2015, Majelis Umum menyerukan kepada Negara-negara untuk "*melarang, mencegah, dan melawan segala bentuk korupsi yang memfasilitasi perdagangan gelap satwa liar dan produk satwa liar*".²⁰ Pada sesi kedelapan Konferensi Negara-negara Pihak UNCAC, suatu

¹⁷ United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. Diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005.

¹⁸ United Nations Convention against Corruption, Chapter I, Art. 1.

¹⁹ Majelis Umum PBB, Resolusi diadopsi oleh Majelis Umum pada 18 Desember 2013: Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity, UN Doc A/RES/68/193 (14 Februari 2014).

²⁰ Majelis Umum PBB, Resolusi diadopsi oleh Majelis Umum pada 30 Juli 2015: Tackling illicit trafficking in wildlife, UN Doc A/RES/69/314 (19 Agustus 2015).



ALAT
1.7

Resolusi komprehensif tentang "Mencegah dan Memerangi Korupsi yang berkaitan dengan kejahatan yang berdampak pada lingkungan" disahkan yang mengakui dampak korupsi dalam konteks ini dan menguraikan berbagai cara di mana UNCAC dapat digunakan untuk mencegah dan memerangi korupsi terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan.²¹ Konferensi Para Pihak CITES juga mengeluarkan Resolusi pada tahun 2016 tentang Melarang, Mencegah, Mendeteksi, dan Memerangi Korupsi, yang Memfasilitasi Kegiatan yang Dilakukan dengan Melanggar Konvensi, yang menegaskan kembali "bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi (UNCAC) merupakan alat yang efektif dan bagian penting dari kerangka hukum untuk kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan gelap spesies flora dan fauna liar yang terancam punah."²² Pada tahun 2021 Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menguraikan komitmen bersama oleh Negara-negara untuk secara efektif menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi; untuk mengakhiri impunitas atas tindak pidana korupsi; memperkuat kerja sama internasional dalam mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi; dan untuk meningkatkan upaya dalam penelusuran, pemulihan dan pengembalian aset sitaan sesuai dengan Konvensi.²³

United Nations Convention against Corruption

- » Apakah negara tersebut merupakan pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Menentang Korupsi?
- » Apakah negara telah membuat reservasi untuk ketentuan apa pun berdasarkan Konvensi?
- » Dalam hukum nasional atau hukum manakah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi telah dilaksanakan?
- » Apakah kejahatan, tindakan kerja sama internasional, atau ketentuan lain berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi telah digunakan dalam proses yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah negara telah mengalami salah satu siklus Mekanisme Peninjauan Konvensi? Apakah salah satu rekomendasi yang dikeluarkan relevan untuk mengatasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumberdaya tambahan:

UNODC, *Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption (2nd revised ed, 2012)*
UNODC & UNICRI, *Technical guide to the United Nations Convention against Corruption (2009)*

Implementasi nasional ketentuan di bawah UNCAC dibahas lebih lanjut di Bab I, Bagian 4 (dalam kaitannya dengan kriminalisasi) dan di Bab IV (dalam konteks internasional kerja sama) dari Perangkat ini.

2.3 Convention on Biological Diversity

Konvensi Keanekaragaman Hayati, dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1992,²⁴ berupaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil dan setara dari penggunaan sumber daya genetik (Pasal 1). Keanekaragaman hayati didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi sebagai :

variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber termasuk , antara lain, ekosistem darat, laut dan perairan lainnya dan kompleks ekologis di mana mereka menjadi bagiannya: ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan dari Ekosistem.

Konvensi ini mencakup berbagai hal penting, termasuk deforestasi, akses ke bioteknologi, dan pengelolaan ekosistem yang rapuh. Konvensi ini terutama berkaitan dengan

²¹ UN Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Resolution 8/12.

²² CITES Resolution Conf. 17.6, p. 1.

²³ United Nations General Assembly Resolution A/75/L.116 (2021)

²⁴ United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. Diadopsi pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993.

pengelolaan pilihan pembangunan nasional yang berdampak langsung pada sumber daya alam. Fokus utama Konvensi ini adalah pada konservasi in situ: "*konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi spesies yang layak di lingkungan alami mereka dan, dalam kasus spesies yang didomestikasi atau dibudidayakan, di lingkungan di mana mereka telah mengembangkan sifat khas mereka*" (Pasal 2). Konvensi ini meminta Negara-negara untuk mengambil berbagai langkah terkait dengan konservasi in situ yang mencakup perlindungan spesies yang terancam punah yang menjadi sasaran perdagangan satwa liar

Secara khusus, Pasal 8 mensyaratkan Negara-negara Pihak, antara lain dan "sejauh mungkin dan sebagaimana mestinya" untuk :

- ↳ mempromosikan perlindungan ekosistem dan habitat alami, dan pemeliharaan populasi spesies yang layak;
- ↳ membuat undang-undang untuk perlindungan spesies dan populasi yang terancam; dan
- ↳ mengatur kegiatan yang dinilai memiliki efek buruk yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati.

Konvensi ini selanjutnya mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan keanekaragaman hayati, seperti mengembangkan strategi, rencana, atau program nasional (Pasal 6), dan mengadopsi langkah-langkah untuk pemulihan dan rehabilitasi spesies yang terancam (Pasal 9). Langkah-langkah ini dapat mencakup tindakan untuk mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan termasuk implementasi CITES. Kebutuhan akan kerja sama antara Konvensi Keanekaragaman Hayati dan CITES telah diakui oleh badan administratif kedua instrumen.

Convention on Biological Diversity

- » Apakah negara tersebut merupakan Pihak dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati?
- » Apakah negara telah membuat reservasi untuk ketentuan apa pun berdasarkan Konvensi?
- » Di mana hukum nasional atau hukum Konvensi Keanekaragaman Hayati telah dilaksanakan?
- » Bagaimana undang-undang ini memastikan penegakan ketentuan mereka? Apakah mereka menciptakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan ?



2.4 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, atau Konvensi Warisan Dunia, diadopsi pada tahun 1972.²⁵ Ini bertujuan untuk membangun " sistem perlindungan kolektif yang efektif dari warisan budaya dan alam dengan nilai universal yang luar biasa, yang diselenggarakan secara permanen dan sesuai dengan metode ilmiah modern" (Pembukaan).

Para pihak dalam Konvensi dapat mengidentifikasi properti budaya dan alam untuk perlindungan. Ini diserahkan kepada Komite Warisan Dunia untuk dipertimbangkan dan potensi dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia. Agar suatu situs dapat dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia, situs tersebut harus memiliki "nilai universal yang luar biasa". Nilai universal yang luar biasa ditentukan berdasarkan kriteria yang termasuk dalam Pedoman Operasional untuk Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia. Salah satu pertimbangan yang relevan (Kriteria (x)) adalah apakah situs tersebut mengandung habitat alami penting yang signifikan untuk spesies yang terancam punah.

Komite Warisan Dunia selanjutnya mengumpulkan informasi tentang langkah-langkah legislatif dan administratif yang relevan dengan perlindungan properti yang ditunjuk. Ini juga memelihara dan memperbarui

²⁵ United Nations, Treaty Series, vol. 1037, No. 15511. Diadopsi pada 16 November 1972 dan mulai berlaku pada 17 Desember 1975

Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya untuk warisan alam yang membutuhkan operasi besar untuk konservasinya. Pencantuman dalam daftar ini terbatas pada properti yang menghadapi "bahaya serius dan spesifik seperti ancaman penghilangan" (Pasal 11(4)). Fakta bahwa sejumlah besar situs mengandung spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, banyak di antaranya dipengaruhi oleh kejahatan satwa liar dan hutan dan tercantum dalam Lampiran CITES, telah mendorong kerja sama antara badan pengatur CITES dan Konvensi Warisan Dunia. Meskipun Konvensi Warisan Dunia tidak melindungi spesies tumbuhan atau hewan tertentu dan tidak memerlukan langkah-langkah perlindungan dan konservasi wajib, konvensi ini memberikan pedoman penting yang mendorong Para Pihak untuk melindungi warisan budaya dan alam mereka. Pasal 5 menetapkan berbagai langkah yang dapat diambil negara untuk mencapai perlindungan, konservasi, dan pelestarian warisan alam dan budaya. Konvensi ini juga menciptakan Dana Warisan Dunia, di mana Para Pihak berkontribusi secara sukarela, dan dari mana mereka dapat mencari bantuan keuangan dan lainnya untuk melindungi warisan budaya dan alam mereka (Pasal 15).



ALAT
I.9

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

- » Apakah Negara merupakan pihak dalam Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia?
- » Di mana hukum nasional atau undang-undang konvensi mengenai perlindungan warisan budaya dan alam dunia telah dilaksanakan?
- » Apakah negara telah membuat reservasi untuk ketentuan apa pun berdasarkan Konvensi?
- » Apakah ada situs alam di Negara yang terdaftar tercantum di dalam Konvensi sebagai warisan dunia dengan "nilai universal yang luar biasa"?
- » Hukum atau undang-undang nasional mana yang melindungi situs warisan alam? Apakah undang-undang ini mengandung tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan ilegal warisan alam?

2.5 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

Konvensi Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi (CMS) dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1983.²⁶ Konvensi mendorong Negara-negara Pihak secara individu dan kolektif untuk melestarikan spesies yang bermigrasi dan habitatnya dan "untuk mengambil tindakan untuk menghindari spesies yang bermigrasi menjadi terancam punah" (Pasal II). Spesies yang bermigrasi didefinisikan sebagai :

seluruh populasi atau bagian yang terpisah secara geografis dari populasi spesies apa pun atau takson hewan liar yang lebih rendah, proporsi yang signifikan dari anggotanya secara siklis dan dapat diprediksi melintasi satu atau lebih batas yurisdiksi nasional (Pasal I(1)(a)).

Mirip dengan CITES, *Konvensi Konservasi Spesies Hewan Liar* yang Bermigrasi mendekati perlindungan spesies tertentu dengan mencantumkannya dalam dua Lampiran. Spesies yang tercantum dalam Lampiran I terancam punah di seluruh atau sebagian besar wilayah migrasi mereka. Kewajiban ketat ditempatkan pada Negara-negara Pihak yang merupakan negara-negara rentang dalam kaitannya dengan spesies yang terdaftar dalam Lampiran I (Pasal III). Ini termasuk persyaratan untuk melestarikan dan memulihkan habitat spesies tersebut, menghilangkan hambatan migrasi mereka, dan untuk melarang pengambilan hewan milik spesies tersebut (Pasal III(4), (5)). Hewan yang terdaftar di Lampiran I hanya dapat diambil untuk sejumlah tujuan terbatas, termasuk tujuan ilmiah, meningkatkan kelangsungan hidup spesies, dan untuk kebutuhan pengguna subsisten tradisional (Pasal III (5)).

²⁶ United Nations, Treaty Series, vol. 1651, No. 28395. Diadopsi pada tanggal 23 Juni 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1983.

Spesies yang tercantum dalam Lampiran II memiliki "status konservasi yang tidak menguntungkan dan [...] mensyaratkan perjanjian internasional untuk konservasi dan pengelolaannya", atau sebaliknya akan mendapat manfaat dari kerja sama internasional. Konvensi menyatakan bahwa Negara-negara Pihak yang merupakan negara-negara rentang harus berusaha untuk menyimpulkan perjanjian "di mana ini akan menguntungkan spesies dan harus memberikan prioritas kepada spesies-spesies tersebut dalam status konservasi yang tidak menguntungkan" (Pasal IV (3)). Perjanjian semacam itu adalah instrumen terpisah dan dapat mencakup Negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi.

Negara-negara rentang dalam kaitannya dengan spesies migrasi tertentu berarti "setiap Negara (dan jika sesuai dengan Pihak lain yang dirujuk berdasarkan sub-ayat (k) ayat ini) yang menjalankan yurisdiksi atas bagian mana pun dari rentang spesies yang bermigrasi itu, atau Negara, kapal bendera yang beroperasi di luar batas yurisdiksi nasional dalam mengambil spesies yang bermigrasi itu" (Pasal 1(1) (h)).

Banyak spesies yang dicakup oleh *Konvensi Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi* dipengaruhi oleh kejahatan satwa liar dan kehutanan dan badan pengatur CMS telah mencurahkan lebih banyak perhatian pada masalah ini. Yang paling relevan adalah resolusi Konferensi Para Pihak, seperti Resolusi tentang Pencegahan Pembunuhan Ilegal, Pengambilan dan Perdagangan Burung yang Bermigrasi, serta pembentukan Program Kerja Bersama CMS-CITES.

Convention on the Conservation of Migratory Species

- » Apakah negara tersebut merupakan Pihak dalam Konvensi Konservasi Spesies yang Bermigrasi?
- » Apakah negara telah membuat reservasi untuk ketentuan apa pun berdasarkan Konvensi?
- » Di mana hukum nasional Konvensi Konservasi Spesies Bermigrasi telah dilaksanakan?



ALAT
I.10

2.6 Perjanjian bilateral

Banyak Negara atau otoritas terkait yang bertanggung jawab telah menandatangani perjanjian bilateral, seperti perjanjian bantuan administratif atau yudisial timbal balik dan nota kesepahaman (MOU), untuk penegakan umum isu-isu yang juga dapat berlaku untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan transnasional. Beberapa Negara bahkan telah menandatangani perjanjian bilateral khusus untuk membatasi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Perjanjian tersebut dapat dibuat antara masing-masing produsen dan konsumen Negara yang setuju untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menekan perdagangan ilegal fauna atau flora yang mempengaruhi mereka. Kemungkinan memiliki perjanjian sukarela semacam itu juga telah didukung oleh inisiatif Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan, yang dibahas lebih lanjut di Bab IV, Bagian 4.1 dari Perangkat ini.

Perjanjian bilateral

- » Apakah negara tersebut telah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain yang, secara langsung atau tidak langsung, terkait dengan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan ?
- » Apa fokus utama dari perjanjian ini? Apakah itu termasuk tindak pidana?
- » Mekanisme apa yang terkandung dalam perjanjian untuk memastikan penegakannya; apakah mekanisme ini telah digunakan sebelumnya, dan apakah mekanisme ini efektif



ALAT
I.11

2.7 Implementasi dalam negeri dari hukum internasional

Implementasi, penerapan, penggunaan, dan penegakan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional seperti yang diuraikan dalam Bagian sebelumnya tergantung pada sistem hukum masing-masing Negara. Di Negara-negara di mana penerapan langsung perjanjian dimungkinkan (disebut sistem monis), ketentuan yang dijalankan sendiri di bawah hukum internasional berlaku tanpa perlu undang-undang implementasi khusus. Di Negara-negara di mana undang-undang tersebut diperlukan (disebut sistem dualist), ketentuan perjanjian tidak dapat diterapkan tanpa adopsi hukum yang memungkinkan. Yang mana dari sistem ini yang digunakan sering kali diatur dalam konstitusi Negara : dapat memberikan eksekutif kekuasaan untuk menyimpulkan dan masuk ke dalam perjanjian internasional, memerlukan persetujuan parlemen untuk ratifikasi, atau menggunakan sistem hibrida. Untuk memahami penerapan dalam negeri perjanjian internasional, sebagai masalah awal, dapat berguna untuk memeriksa bagaimana perjanjian internasional diratifikasi dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.



Penerapan hukum internasional di dalam negeri

- » Cabang pemerintahan mana yang memiliki otoritas hukum di bawah hukum nasional untuk menandatangani perjanjian internasional?
- » Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian dan kewajiban internasional yang timbul dari hukum internasional ke dalam hukum nasional?
- » Jika undang-undang nasional diperlukan untuk memberikan efek pada perjanjian internasional yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, apakah undang-undang tersebut telah disahkan?
- » Apa hukum nasional yang berlaku untuk perjanjian tersebut? » Apakah ada inkonsistensi dengan hukum nasional yang sudah ada sebelumnya atau yang berikutnya?

3

Bagian 1

Hukum margasatwa dan hutan nasional

Bagian Perangkat ini berfungsi untuk mengidentifikasi sumber utama hukum nasional yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan hutan, terutama yang menetapkan aturan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan dan satwa liar, administrasi cites, dan undang-undang lingkungan terkait lainnya.



Sebagaimana diuraikan dalam Bab I, Bagian 1 dari Perangkat ini, tidak ada instrumen internasional yang berdiri sendiri tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa ketentuan yang relevan untuk mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan akan tersebar di berbagai bagian undang-undang nasional. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki beberapa undang-undang hutan dan satwa liar yang sangat spesifik. Di tempat lain, undang-undang yang relevan mungkin lebih umum, yang mencakup masalah hutan dan satwa liar dalam konteks perlindungan lingkungan yang lebih luas .

Di beberapa Negara, undang-undang yang berkaitan dengan satwa liar dan kehutanan kurang berkembang atau mengalami kesenjangan yang signifikan. Di tempat lain, kerangka hukum mungkin sangat luas sehingga lembaga pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum, tidak memiliki sumber daya untuk memantau kepatuhan secara memadai. Dalam keadaan seperti itu, reformasi sistem hukum dan peraturan merupakan prasyarat untuk secara efektif menangani kejahatan satwa liar dan kehutanan. Salah satu dari banyak tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem ini adalah kenyataan bahwa kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat jatuh di bawah naungan berbagai sektor pemerintah yang diatur oleh berbagai macam instrumen legislatif.

Dalam menganalisis undang-undang satwa liar dan kehutanan nasional - dan dalam mengembangkan rekomendasi untuk reformasi hukum - penting untuk menghindari duplikasi, komplikasi, dan birokratisasi yang tidak perlu: "[s] implisitas dan efisiensi peraturan sering berjalan beriringan" :²⁷

Aturan pemerintah yang lebih [s]edikit dan sederhana mengurangi peluang untuk interpretasi sewenang-wenang dan penyimpangan ... [h]ukum yang terlalu kompleks dan sulit dipahami memerlukan prosedur yang rumit dan mahal serta reorientasi perilaku institusional atau sosial yang tiba-tiba, berisiko menjadi tidak dapat dilaksanakan, tidak relevan, dan membuka peluang untuk korupsi dan kegiatan ilegal lainnya. ²⁸

Selain itu, tidak cukup hanya memiliki undang-undang yang tepat: transparansi juga penting. Ini termasuk penyebaran hukum yang luas dan komitmen untuk memastikan bahwa bahasa yang mereka gunakan dapat dimengerti oleh publik. ²⁹

²⁷ Esa Puustjärvi, Proposal Tipologi Pembalakan Liar (Helsinki, Savcor Indufor Oy, 2008), hal. 30.

²⁸ Arnoldo Contreras-Hermosilla, Kepatuhan hukum di sektor hutan: ikhtisar, Kertas Kerja Institut Bank Dunia (Washington, DC, Bank Dunia, 2002), hlm. 15-16.

²⁹ Bank Dunia, Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola hutan: mengatasi kendala sistematis untuk pembangunan berkelanjutan, Laporan No. 36638-GLB (Washington, DC, 2006), hlm. 6.

Bank Dunia mencatat bahwa, meskipun tidak ada deskripsi 'satu ukuran untuk semua' tentang undang-undang satwa liar dan kehutanan yang baik, pembuat undang-undang dapat merancang undang-undang dengan cara yang dapat mencegah kegiatan ilegal dan korupsi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- Hindari penjangkauan legislatif yang berlebihan: Jangan menulis undang-undang yang melebihi kapasitas nasional, yang lebih rumit dari yang diperlukan untuk mencapai kebijakan yang dimaksud atau yang secara sosial tidak dapat diterima.
- Hindari Persyaratan yang tidak perlu untuk lisensi atau izin: Ini menambah beban sumber daya pemerintah dan sektor swasta dan menawarkan peluang untuk korupsi. Pastikan Persyaratan lisensi dan kontrol memenuhi tujuan yang sesungguhnya.
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas: Ini berfungsi baik untuk mencegah tindakan buruk dan untuk membuat deteksi mereka lebih mudah. Jika undang-undang memberikan diskresi kepada pejabat, undang-undang harus memberikan Standar untuk pelaksanaan diskresi tersebut.
- Meningkatkan kepentingan lokal, bukan pemerintah dalam pengelolaan [satwa liar dan] hutan: Undang-undang dapat melakukan ini dengan lebih mengakui hak-hak yang ada atau dengan menciptakan peluang baru bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan. Tanpa dukungan lokal, penegakan hukum di kawasan hutan sulit dilakukan.
- Mengadopsi hukum melalui proses partisipatif yang luas : Ini mempromosikan rasa kepemilikan hukum di antara para pemangku kepentingan dan kemudian menghasilkan rasa hormat karenanya.
- Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam hukum : Tetapkan hukuman yang sesuai dan miliki kekuatan dan prosedur penegakan yang efektif.³⁰

Hukum nasional umumnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pengembangan kebijakan satwa liar dan kehutanan merupakan prekursor penting untuk mengembangkan dan memelihara peraturan perundang-undangan yang memadai. Penting untuk dicatat bahwa keputusan kebijakan harus dibuat dengan hati-hati dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan.

Dasar kebijakan satwa liar dan kehutanan yang jelas memfasilitasi pengenalan prosedur dan praktik untuk memastikan, antara lain :

- Koherensi dan prediktabilitas undang-undang;
- Transparansi hak dan kewajiban hukum;
- Konsistensi, keadilan dan Proses hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan; dan
- Efisiensi manajemen dan kemudahan implementasi.³¹

Lembaga donor dan organisasi internasional dapat membantu dalam proses perbaikan tata kelola dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis dan, dalam beberapa kasus, dengan membuat pencairan bantuan pembangunan tergantung pada perbaikan tersebut.

³⁰ Aspek pengelolaan dan partisipasi hutan dibahas lebih lanjut dalam Bagian IV Perangkat.

³¹ Sekretariat CITES, Model Law on International Trade in Wild Fauna and Flora (Jenewa, n.d.), hal. 5.

³² Lihat further Bab IV, Bagian 5 dari Perangkat.

3.1 Undang-undang terkait satwa liar

Di sebagian besar negara, kepemilikan dan pengelolaan, dan kejahatan yang berkaitan dengan, sektor satwa liar biasanya diatur dalam undang-undang tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya satwa liar, seperti 'Undang-Undang Satwa Liar', 'Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar', atau undang-undang dengan nama yang sama.

Secara historis, klaim yang bersaing terkait dengan perburuan dan penjeratan satwa liar telah menjadi pendorong utama di balik pengembangan undang-undang satwa liar. Masalah lingkungan serta konflik manusia-satwa liar (di mana satwa liar menghancurkan tanaman, properti, membunuh hewan peliharaan, atau mengancam atau membunuh manusia) telah menjadi pendorong penting lebih lanjut. Di beberapa negara, undang-undang margasatwa nasional dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari klaim mengenai konflik atas hewan liar yang hidup di atau melintas melalui ruang publik, atau tanah pribadi atau saluran air.

Di beberapa Negara, undang-undang tersebut mencakup fauna dan flora liar. Beberapa Negara memiliki undang-undang khusus tentang penggunaan flora liar. Undang-undang semacam itu sering dikaitkan dengan perlindungan spesies, yang ditelaah di bagian selanjutnya dari Perangkat ini. Ada kemungkinan bahwa undang-undang terpisah, seperti UU konservasi, UU flora liar atau undang-undang serupa, ada dan menetapkan ketentuan untuk menerapkan dan mengelola pemanenan, pengambilan, pemrosesan, perdagangan, pemasokan, penjualan, atau kepemilikan tanaman tertentu atau flora liar. Sejauh ada, undang-undang ini harus diintegrasikan ke dalam analisis hukum satwa liar dan kehutanan nasional.

Ketika mencermati undang-undang satwa liar nasional, perlu dipertimbangkan bagaimana undang-undang ini menangani masalah kepemilikan, termasuk hak untuk menggunakan dan mengendalikan satwa liar, tanah dan wilayah, pengalihan hak-hak tersebut, dan tanggung jawab, kewajiban, dan pengekangan terkait. Tenurial mengacu pada hubungan antara orang-orang (baik secara individu, dalam kelompok, atau melalui Negara) dan tanah, flora dan fauna (baik yang didefinisikan secara hukum atau adat). Di beberapa yurisdiksi, satwa liar dapat dianggap res nullius, yaitu milik siapa pun. Dalam sistem lain, Negara dapat memiliki satwa liar atau masyarakat lokal dan adat dapat memegang satwa liar di bawah pengelolaan masyarakat. Status hukum satwa liar juga mungkin tergantung pada status hukum tanah atau hutan di atau di mana ia berada. Hal-hal ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada bagaimana undang-undang satwa liar nasional dirancang dan beroperasi, termasuk kejahatan substantif dan ketentuan prosedural yang berkaitan dengan hal-hal seperti kompensasi.

Secara umum, hukum nasional yang berkaitan dengan sektor satwa liar harus, setidaknya, menetapkan aturan untuk aspek-aspek berikut :

- ↳ Kepemilikan atas satwa liar, yaitu kepemilikan Negara, hak milik pribadi, hak masyarakat, hak masyarakat adat atau hak milik pribumi;
- ↳ Penunjukan instansi pemerintah untuk mengawasi dan mengatur sektor satwa liar, proses administrasi dan sebagainya;
- ↳ Jadwal satwa liar, kawasan Lindung, Cagar Alam permainan, dan daerah perburuan, termasuk identifikasi daerah di mana perburuan subsisten, komersial, atau rekreasi dilarang atau diizinkan;
- ↳ Sistem lisensi untuk rekreasi dan perburuan komersial, termasuk ketentuan untuk memberikan, memperbarui, dan membatalkan lisensi serta jadwal senjata, perangkat, dan metode yang dilarang dan diatur ;
- ↳ Aturan transportasi dan impor/ekspor untuk mengontrol pergerakan satwa liar, mati atau hidup, bagian hewan dan produk yang terbuat dari satwa liar di seluruh negeri dan melintasi perbatasan internasional; dan
- ↳ Kejahatan atas pelanggaran hukum satwa liar domestik dan tindakan penegakan hukum.



ALAT
I.13

Sementara banyak aspek hukum satwa liar nasional berfokus terutama pada masalah administratif, kerangka kerja ini secara langsung dan tidak langsung membentuk pola kegiatan kriminal di sektor satwa liar. Penjahat dengan cepat beradaptasi dengan celah dalam hukum nasional, mencoba menghindari aturan dan proses tertentu, atau mengidentifikasi titik akses untuk memfasilitasi kegiatan kriminal melalui korupsi dan paksaan. Oleh karena itu, undang-undang satwa liar nasional, termasuk yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan, harus menjadi bagian dari analisis tanggapan peradilan pidana terhadap kejahatan satwa liar.

Alat berikut menetapkan pertanyaan analitik dasar untuk mengidentifikasi komponen inti dan organisasi undang-undang satwa liar domestik. Ketentuan yang berkaitan secara khusus dengan kejahatan satwa liar dan penegakan hukum satwa liar diperiksa secara terpisah di Bab I, Bagian 3.1, dan Bab II dari Perangkat ini.

Hukum satwa liar domestik

- » Hukum nasional mana yang mengatur sektor satwa liar? Kapan undang-undang ini diberlakukan?
Kapan terakhir kali diperbarui ?
- » Undang-undang nasional mana yang secara khusus mengatur kepemilikan dan hak milik atas Satwa Liar?
- » Undang-undang nasional mana yang secara khusus mengatur pengelolaan dan administrasi sektor satwa liar?
- » Badan mana yang bertanggung jawab atas administrasi satwa liar? Departemen pemerintah mana yang dimiliki lembaga itu, dan kepada siapa dilaporkan?
- » Apakah undang-undang satwa liar nasional menetapkan tanggung jawab khusus dari masing-masing lembaga atau otoritas dan mekanisme koordinasi dan kerja sama?
- » Apakah undang-undang satwa liar nasional mencakup jadwal spesies yang dilindungi?
- » Apakah undang-undang Margasatwa nasional mencakup jadwal kawasan Lindung seperti Cagar Alam atau daerah lain di mana perburuan tidak diizinkan ? Apakah mereka menunjuk daerah di mana perburuan subsisten, rekreasi, atau komersial diizinkan? Apa persyaratan untuk berburu secara legal?
- » Apakah undang-undang Margasatwa nasional mencakup jadwal senjata, perangkat, dan Metode yang dilarang dan diatur untuk berburu atau menjerat?
- » Apakah hukum nasional menetapkan sistem untuk konsesi perburuan? Siapa yang mengeluarkan konsesi perburuan; Siapa yang memantau mereka? Bagaimana mereka bisa diperoleh, diperbarui, ditangguhkan, dan dibatalkan?
- » Apakah undang-undang nasional menetapkan aturan untuk pengangkutan dan impor/ekspor spesimen satwa liar? Apa saja yang termasuk di dalamnya?
- » Apakah undang-undang satwa liar domestik menetapkan kejahatan dan tindakan penegakan hukum tertentu?
- » Apakah undang-undang yang terkait dengan sektor satwa liar telah disebarluaskan secara luas? Apakah mereka tersedia dalam semua bahasa yang relevan?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 9

3.2 Hukum terkait hutan

Di sebagian besar negara, kepemilikan dan pengelolaan, dan kejahatan yang berkaitan dengan, sektor kehutanan diatur dalam 'Undang-Undang Hutan', 'Undang-Undang Kehutanan', 'Undang-Undang Perlindungan Hutan' atau undang-undang dengan nama yang sama. Undang-undang tersebut mencakup konservasi dan pengelolaan sumber daya hutan.

Ketika memeriksa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan hutan, perlu dipertimbangkan bagaimana hukum nasional menangani masalah kepemilikan, termasuk hak untuk menggunakan dan mengendalikan sumber daya hutan, pengalihan hak-hak tersebut, dan yang terkait tanggung jawab, kewajiban, dan pengekangan. Di beberapa yurisdiksi, Negara dapat memiliki hutan atau masyarakat lokal dan adat dapat memegang hutan di bawah pengelolaan masyarakat. Status hukum hutan juga dapat semakin

tergantung pada status hukum tanah tempat mereka berada. Hal-hal ini dapat memiliki pengaruh penting terhadap bagaimana UU hutan nasional disusun dan dilaksanakan baik untuk kejahatan substantif dan ketentuan prosedural yang berkaitan dengan hal-hal seperti kompensasi

Paling tidak, hukum nasional yang berkaitan dengan sektor kehutanan harus menetapkan aturan untuk aspek-aspek berikut :

- Kepemilikan atas hutan, yaitu kepemilikan Negara, hak milik pribadi, hak masyarakat, hak masyarakat adat atau hak milik pribumi;
- Penunjukan instansi pemerintah untuk mengawasi dan mengatur sektor kehutanan, proses administrasi dan lain sebagainya;
- Hutan dan Cagar Alam, daerah tangkapan air dan area penebangan, termasuk identifikasi area di mana penebangan subsisten dan/atau komersial (atau kepentingan komersial lainnya) dilarang dan daerah yang diizinkan;
- Sistem lisensi untuk penebangan, termasuk ketentuan untuk memberikan, memperbarui dan membatalkan konsesi penebangan, dan sistem perizinan untuk perubahan klasifikasi hutan yang memperuntukannya bagi tujuan komersial;
- Sistem lisensi untuk pemrosesan kayu, termasuk ketentuan untuk memberikan, memperbarui, dan membatalkan lisensi;
- Aturan transportasi dan ekspor untuk mengontrol pergerakan kayu (kayu gelondongan, kayu Gergajian dan produk lainnya) melintasi negara dan melintasi perbatasan internasional; dan
- Kejahatan atas pelanggaran hukum hutan domestik dan tindakan penegakan hukum.

Selain itu, industri lain dapat mempengaruhi hutan dan undang-undang terkait dapat tumpang tindih atau bertentangan dengan undang-undang kehutanan. Sangat penting bahwa hukum nasional harus diselaraskan, dengan aturan mengenai kegiatan bukan kehutanan yang dapat mempengaruhi hutan – seperti pertanian, pertambangan, atau perluasan infrastruktur – sedang ditinjau dan didekonflikasi.

Alat berikut menetapkan pertanyaan dasar yang dirancang untuk mengidentifikasi komponen inti dan organisasi hukum kehutanan domestik. Ketentuan yang berkaitan secara khusus dengan kejahatan kehutanan dan penegakan hukum kehutanan diuraikan dalam Bab I, Bagian 3.2, dan Bab II dari Perangkat ini.

Hukum hutan domestik

- » Hukum nasional mana yang mengatur sektor kehutanan? Kapan undang-undang ini diberlakukan?
Kapan terakhir kali diperbarui ?
- » Apakah undang-undang nasional tentang hutan berfokus pada konservasi atau penggunaan hutan (yaitu siapa yang akan menerima hak untuk menggunakan hutan)?
- » Undang-undang nasional mana yang secara khusus mengatur kepemilikan dan hak milik yang berkaitan dengan hutan?
- » Hukum nasional mana yang secara khusus mengatur pengelolaan dan administrasi hutan dan sumber daya hutan?
- » Departemen atau lembaga mana yang bertanggung jawab atas administrasi kehutanan? Bagian pemerintahan mana yang dimiliki departemen atau lembaga tersebut, dan kepada siapa ia melaporkan?
- » Apakah undang-undang kehutanan domestik menetapkan tanggung jawab khusus dari masing-masing lembaga atau otoritas dan mekanisme koordinasi dan kerja sama?
- » Apakah undang-undang nasional menetapkan kawasan Lindung seperti hutan, Cagar Alam, dan daerah tangkapan air (di mana tidak ada penebangan atau pengambilan tanaman yang diizinkan)?



ALAT
I.14

Hukum hutan domestik

- » Apakah undang-undang nasional menetapkan daerah di mana penebangan subsisten atau komersial diizinkan? Apa Persyaratan untuk mengekstraksi kayu dan mengambil tanaman lain secara legal?
- » Apakah undang-undang nasional mengatur budidaya dan pemanenan spesies yang dilindungi di tanah pribadi?
- » Bisakah konsesi pertambangan disetujui di kawasan lindung, sehingga mengesampingkan undang-undang hutan yang melarang hal tersebut?
- » Apakah pertanian subsisten diperbolehkan di kawasan hutan berdasarkan hukum nasional? Jika ya, undang-undang apa yang ada untuk mengatur, misalnya, mengubah praktik pertanian?
- » Apakah undang-undang nasional menetapkan sistem untuk konsesi penebangan? Siapa yang mengeluarkan konsesi penebangan? Bagaimana ini bisa diperoleh, diperbarui, ditangguhkan, dan dibatalkan?
- » Apakah hukum nasional mensyaratkan lisensi untuk memproses kayu (misalnya, untuk penggergajian kayu)? Siapa yang mengeluarkan lisensi ini? Bagaimana ini bisa diperoleh, diperbarui, ditangguhkan, dan dibatalkan?
- » Apakah undang-undang nasional menetapkan aturan untuk transportasi, impor, dan ekspor komoditas berisiko hutan, seperti kayu, termasuk kayu Gelondongan dan kayu Gergajian?

*Sumber daya tambahan:
UNODC, Memberantas Korupsi: Pengantar untuk mengatasi korupsi yang mendorong hilangnya hutan (2022)*

3.3 Penangkaran dan kepemilikan hewan

Undang-undang dan peraturan nasional yang berkaitan dengan penangkaran dan kepemilikan hewan dapat berdampak pada pola kejahatan satwa liar dan dapat membantu mencegah dan memeranginya.

Kepemilikan hewan

Tergantung pada yurisdiksinya, kepemilikan hewan yang diambil dari alam liar dapat dikenakan sedikit, jika ada, pembatasan atau mungkin bersyarat pada pemberitahuan atau konsesi oleh otoritas publik. Di yurisdiksi lain, kepemilikan hewan dari alam liar dilarang untuk pemilik individu (pribadi) dan/atau terbatas pada entitas tertentu (suaka, kebun binatang, lembaga penelitian, dan lain-lain). Pembatasan juga dapat dilakukan pada pemeliharaan (yaitu perumahan, sanitasi) dan penanganan (makanan, perangkat pelatihan/kontrol, dan lain-lain) hewan tersebut. Kepemilikan selanjutnya dapat tergantung pada kategorisasi hewan yang bersangkutan, misalnya, apakah itu diklasifikasikan sebagai, antara lain, liar, terancam punah atau berbahaya.



Kepemilikan hewan

- » Hukum atau undang-undang nasional mana yang mengatur kepemilikan hewan yang diambil dari Alam Liar?
- » Siapa yang diizinkan memiliki satwa liar dan pada kondisi apa (jika ada)?
- » Apa yang terjadi pada spesimen yang disita dari perdagangan satwa liar ilegal?

Penangkaran

Semakin tidak diatur kepemilikan pribadi spesies hewan liar, semakin banyak pertanyaan mendesak tentang penangkaran dan penggunaan serta penjualan hewan-hewan ini di kemudian hari. Banyak hewan memasuki perdagangan hewan liar yang dibiakkan. Beberapa hewan ini merupakan 'surplus' dari kebun binatang atau

kandang hewan lainnya. Yang lain ditangkap dari habitat asli mereka atau berasal dari peternak rumahan atau pasar gelap. Hewan liar ini sering dijual di lelang ilegal, toko hewan peliharaan atau melalui internet.

Bahkan ketika kepemilikan pribadi dibatasi dan/atau perdagangan hewan liar dilarang, mungkin ada kebutuhan untuk peraturan penangkaran. Misalnya, penangkaran spesies tertentu dapat diizinkan untuk tujuan konservasi atau untuk perdagangan hewan peliharaan, yang dapat berkontribusi pada perlindungan populasi liar. Jika penangkaran satwa liar dilakukan secara etis dan berkelanjutan dapat mencegah pengambilan sumber daya yang merugikan dari alam liar. Di sisi lain, jika penangkaran dilakukan secara ilegal dan/atau tidak berkelanjutan, hal itu dapat berkontribusi pada perdagangan ilegal, merangsang permintaan konsumen yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan penyiksaan hewan, membahayakan dan kepunahan spesies. Penangkaran dapat menjadi titik masuk bagi spesimen yang ditangkap secara liar secara ilegal, terutama jika asal stok tidak diatur dan dibatasi, misalnya, untuk mengimpor dari negara asal tepercaya atau fasilitas penangkaran lainnya. Pertanyaan tambahan berkaitan dengan penandaan spesimen yang dibiakkan di penangkaran (seperti pita, tag, microchip).

Penangkaran

- » Peraturan apa (jika ada) yang berlaku untuk Penangkaran Satwa Liar?
- » Apakah Penangkaran satwa liar diatur untuk semua pemilik atau hanya untuk penggunaan komersial?
- » Apa syarat (jika ada) untuk mendapatkan dan memegang izin Penangkaran ?
- » Lembaga mana yang bertugas memastikan bahwa fasilitas Penangkaran mematuhi Persyaratan hukum?
- » Bagaimana hewan yang dikembangbiakkan secara penangkaran ditandai dan bagaimana integritas rantai pasokan dipantau?
- » Apakah ada ketentuan yang mengkriminalisasi Metode Penangkaran yang sangat kejam atau berbahaya bagi hewan?
- » Apakah peraturan mengenai penangkaran satwa liar juga berlaku untuk Penangkaran hibrida domestik/ penangkaran-liar?
- » Apakah ada ketentuan yang sebanding untuk budidaya buatan tanaman tertentu?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Pembohong Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 26



ALAT
I.16

3.4 Hukum dan peraturan kesejahteraan hewan

Kesejahteraan hewan, tidak seperti perdagangan, kerja sama internasional dalam masalah kriminal, atau konservasi lingkungan, sebagian besar telah diabaikan di seluruh kerangka hukum internasional, tanpa instrumen tunggal yang membahas masalah ini. Memang ada inisiatif tertentu yang bertujuan untuk menciptakan prinsip-prinsip internasional, seperti Deklarasi Universal tentang Kesejahteraan Hewan yang diusulkan dan rancangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kesehatan dan Perlindungan Hewan.

CITES berisi beberapa ketentuan yang mengatur interaksi manusia dengan hewan liar dan kesejahteraan hewan dalam perjalanan perdagangan internasional. Ini termasuk Pasal XII(2)(c), yang mengamanatkan agar Sekretariat menyiapkan "studi mengenai standar untuk persiapan dan pengiriman spesimen hidup yang tepat". Sebagai hasil dari persyaratan ini, Pedoman CITES untuk Transportasi Bukan Udara unguj Hewan dan Tumbuhan Liar Hidup telah diadopsi oleh Konferensi Para Pihak. Transportasi udara diatur oleh Peraturan Hewan Hidup dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA).³³

Ketentuan CITES lainnya yang relevan dengan kesejahteraan hewan termasuk persyaratan pemberian izin berdasarkan Pasal III, IV dan V untuk memastikan bahwa "setiap spesimen hidup akan disiapkan dan dikirim

³³ Resolusi CITES Conf. 10.21 (Wahyu CoP16)

untuk meminimalkan risiko cedera, kerusakan kesehatan atau perlakuan kejam". Pasal VIII(4) lebih lanjut mengatur bahwa spesimen yang diperdagangkan secara ilegal yang disita ditempatkan di pusat penyelamatan atau tempat lain yang sesuai atau konsisten dengan Konvensi. Resolusi 17.8 dari Konferensi Para Pihak selanjutnya membahas masalah ini.³⁴ Meskipun demikian, CITES bukanlah kendaraan untuk kemajuan kesejahteraan hewan secara umum; itu terbatas dalam ruang lingkup perawatan selama kegiatan perdagangan internasional. Lebih lanjut, banyak Negara Pihak CITES gagal menyimpan catatan efektif tentang perawatan spesimen yang tepat selama transportasi, termasuk kasus penganiayaan dan kematian.

Perjanjian lingkungan, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi, menangani interaksi manusia dengan hewan melalui perspektif konservasi dan keanekaragaman hayati yang bertujuan melestarikan hewan pada tingkat spesies tersebut.³⁵ Sebaliknya, pendekatan kesejahteraan hewan berusaha melindungi masing-masing hewan terlepas dari konservasi dan status terancam punah. Integrasi pertimbangan kesejahteraan hewan dalam aturan internasional yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan konservasi perlahan-lahan muncul.

Dalam hukum nasional, banyak yurisdiksi memiliki ketentuan tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan. Meskipun hewan secara tradisional dipahami (atau diperlakukan) sebagai properti, komoditas, dan/atau sumber daya, 'pendekatan berbasis properti' ini semakin dilengkapi dengan pertimbangan kesejahteraan, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya jumlah undang-undang kesejahteraan hewan. Beberapa yurisdiksi lebih lanjut mengakui bahwa manusia seharusnya tidak memiliki hak mutlak atas hewan dan telah memperkenalkan kejahatan yang mengkriminalisasi pelanggaran terhadap hak-hak hewan (seperti hak tidak mengalami rasa sakit). Biasanya, pengakuan semacam itu terbatas pada hewan tertentu, khususnya mamalia.



Kesejahteraan hewan

- » Hukum atau hukum nasional apa yang berlaku untuk dan melindungi kesejahteraan hewan?
- » Apakah hewan diberikan keadaan khusus berdasarkan hukum nasional?
- » Jenis hewan apa yang dilindungi oleh undang-undang ini? Apakah mereka mencakup Satwa Liar?
- » Apakah undang-undang kesejahteraan hewan mencakup tindak pidana yang mungkin relevan dengan perdagangan satwa liar ilegal?
- » Apakah ada ketentuan dalam kaitannya dengan pengujian hewan dan penggunaan satwa liar dalam eksperimen? Jika demikian, bagaimana penggunaan, pasokan, dan potensi pelepasan satwa liar untuk tujuan eksperimen diatur?

Sumber daya tambahan :

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kesehatan dan Perlindungan Hewan, www.uncahp.org.

3.5 Hukum lingkungan umum

Tergantung pada yurisdiksinya, ketentuan yang relevan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat ditemukan dalam undang-undang lingkungan lain yang lebih umum daripada dalam undang-undang khusus mengenai sektor satwa liar dan kehutanan. Ini mungkin termasuk, misalnya, undang-undang umum yang membahas perlindungan lingkungan, dan undang-undang yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, atau hilangnya habitat. Di tempat lain, undang-undang umum yang berkaitan dengan undang-undang pertanian, perburuan, atau perencanaan mungkin relevan untuk sepenuhnya menilai kerangka hukum yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan.



Hukum Lingkungan umum

- » Apa undang-undang lain yang relevan yang berkaitan dengan, Antara lain, perlindungan Lingkungan, perburuan atau keanekaragaman hayati yang berlaku untuk dan /atau berdampak pada kejahatan satwa liar dan kehutanan?

³⁴ Resolusi CITES Conf. 17.8

³⁵ Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 1.4.1 dan 1.4.3 dari Perangkat ini.

4

Bagian 1

Kejahatan satwa liar dan kehutanan khusus

Kejahatan satwa liar dan kehutanan mencakup berbagai perilaku dan keadaan. Beberapa kejahatan menyangkut spesies yang dilindungi. Yang lain terkait dengan kawasan Lindung atau melibatkan produk ilegal atau praktik ilegal. Kejahatan dapat berkaitan dengan berbagai tahap dan aktivitas perdagangan satwa pembohong, seperti perburuan, pemrosesan, ekspor, impor, atau penjualan.



ICCWC lebih lanjut menjelaskan :

*Ini mungkin dimulai dengan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, seperti perburuan gajah, pencabutan anggrek langka, penebangan pohon yang tidak sah, atau penjarangan sturgeon tanpa izin. Ini juga dapat mencakup tindakan selanjutnya, seperti pemrosesan satwa liar menjadi produk, transportasi mereka, penawaran untuk dijual, dijual, dimiliki, dan sebagainya. Ini juga termasuk menyembunyikan dan pencucian manfaat finansial yang dihasilkan dari kejahatan ini. Beberapa kejahatan ini akan terjadi hanya di negara asal, sementara yang lain juga akan terjadi di negara tujuan, di mana spesimen fauna atau flora hidup, atau bagian dan turunannya, akhirnya dikonsumsi.*³⁶

Kejahatan satwa liar dan hutan dapat terjadi secara merata di negara asal, di titik transit dan di negara tujuan. Beberapa kejahatan hanya berlaku untuk perilaku yang terjadi di dalam satu yurisdiksi, yang lain terkait dengan kegiatan lintas batas.

Untuk memerangi kejahatan satwa liar dan hutan secara efektif, penting untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan semua kemungkinan kejahatan dan untuk menegakkan hukuman yang sesuai untuk rangkaian lengkap kejahatan. Mengidentifikasi banyak kejahatan yang merupakan atau berkontribusi pada kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat membantu dalam mendefinisikan fenomena dan dalam mengartikulasikan apa itu kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan — sama pentingnya — apa yang bukan. Menjelajahi seluruh spektrum kegiatan kriminal yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, termasuk korupsi, pencucian uang, penipuan atau penggelapan pajak, juga membantu dalam mengidentifikasi titik akses untuk penyelidikan penegakan hukum dan intervensi pemerintah lainnya.

Gambar 1 di bawah ini menyajikan gambaran yang tidak lengkap tentang kategori tindak pidana di titik asal, transit dan tujuan, serta daftar kejahatan terkait. Setiap kategori dieksplorasi lebih lanjut di Bagian berikut dari Perangkat ini. Pengulangan dan tumpang tindih dalam kategori ini disengaja karena negara sering memainkan lebih dari satu peran. Misalnya, suatu negara dapat secara bersamaan menjadi sumber tanaman atau hewan dan tempat di mana bahan tanaman atau hewan diproses lebih lanjut dan mungkin juga dikonsumsi.

³⁶ Sekretariat CITES, n.d., Wildlife Crime, diakses 31 Maret 2022, <<https://cites.org/eng/prog/iccwc/crime.php>>.

Gambar 1. Kejahatan satwa liar dan kehutanan dan Kejahatan Terkait di asal transit dan titik tujuan

	Kejahatan satwa liar	Kejahatan hutan dan Flora	Fasilitasi dan memungkinkan kejahatan
Asal	<ul style="list-style-type: none"> Perburuan liar (perburuan ilegal) Penggunaan peralatan atau Metode berburu yang dilarang Mengambil mangsa terbatas (pengembangbiakan betina, muda, spesies yang dilindungi) Kepemilikan ilegal Pemrosesan bahan hewani secara ilegal Ekspor ilegal dan ekspor ulang Penangkaran ilegal Pemusnahan ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembalakan liar Pemanenan ilegal produk bukan kayu Kepemilikan ilegal Pemrosesan ilegal bahan tanaman Ekspor ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> Korupsi Penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya biaya Penipuan dokumen Pencucian uang Kejahatan yang berkaitan dengan Internet Obstruksi
Transit	<ul style="list-style-type: none"> Impor ilegal Kepemilikan ilegal Pasokan dan penjualan ilegal Pemrosesan ilegal Ekspor ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> Impor ilegal Kepemilikan ilegal Pasokan dan penjualan ilegal Pemrosesan ilegal Ekspor ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> Korupsi Penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya biaya Penipuan dokumen Pencucian uang Kejahatan yang berkaitan dengan Internet Obstruksi keadilan
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Impor ilegal Pemrosesan ilegal Kepemilikan ilegal Pasokan dan penjualan ilegal Akuisisi/ konsumsi ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> Impor ilegal Pemrosesan ilegal Kepemilikan ilegal Pasokan dan penjualan ilegal Akuisisi/ konsumsi ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> Korupsi Penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya biaya Penipuan dokumen Pencucian uang Kejahatan yang berkaitan dengan Internet Obstruksi keadilan

Tindakan kriminal yang sama dapat melibatkan lebih dari satu tindak pidana. Misalnya, perburuan menggunakan metode terlarang di kawasan lindung dapat berupa pelanggaran terhadap beberapa ketentuan. Untuk membantu memastikan bahwa kegiatan kejahatan satwa liar dan kehutanan ditangani dengan tepat, kriminalisasi dapat terjadi dari berbagai sudut. Bagaimana Negara menangani penuntutan pelanggar dalam kasus beberapa kejahatan yang tumpang tindih sebagian adalah kewenangan setiap Negara sesuai dengan tradisi hukumnya. Di beberapa Negara, beberapa dakwaan yang tumpang tindih sebagian dimungkinkan pada dakwaan pidana. Di Negara lain, ini tidak akan mungkin.

Di sebagian besar yurisdiksi, kejahatan satwa liar dan kehutanan diatur dalam undang-undang khusus yang berkaitan dengan hukum lingkungan, satwa liar, hutan, spesies yang terancam punah, kawasan lindung, konservasi atau

keanekaragaman hayati (lihat lebih lanjut Bab 1, Bagian 2 dari Perangkat ini). Sangat jarang menemukan kejahatan semacam itu dalam hukum pidana umum atau hukum pidana. Namun demikian, aturan umum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, prosedur pidana, hukuman dan hukuman relevan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan karena mereka menentukan cara-cara di mana tindak pidana terdiri, pertanggungjawaban pidana ditetapkan, dan sejauh mana tanggung jawab meluas ke upaya dan partisipasi. Aturan umum ini dibahas lebih lanjut di Bab 1, Bagian 5 dari Perangkat ini.

Ada sedikit kesamaan di antara yurisdiksi tentang ruang lingkup yang tepat dan unsur-unsur kejahatan satwa liar dan kehutanan. Apa yang mungkin ilegal di satu Negara mungkin legal di Negara tetangga. Dalam menganalisis kejahatan satwa liar dan kehutanan yang relevan dan mengembangkan rekomendasi untuk reformasi, penting untuk menghindari menciptakan ketidakseimbangan yang nyata antara yurisdiksi. Jika satu Negara memiliki undang-undang satwa liar dan kehutanan yang sangat kuat dan terdefinisi dengan baik, maka spektrum satwa liar dan aktivitas hutan yang relatif luas mungkin ilegal. Sebaliknya, di Negara tetangga, kegiatan yang sama mungkin sah. Oleh karena itu, konsep 'legalitas' tingkat nasional murni berpotensi menciptakan disparitas antar negara ketika kontrol diterapkan di tingkat internasional.

Legalisasi dan kriminalisasi kegiatan tertentu di sektor satwa liar dan kehutanan didorong oleh berbagai kekuatan, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, yang berada di luar cakupan analisis apa pun yang berkaitan dengan respons sistem peradilan pidana terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Bab V dari Perangkat ini menawarkan alat untuk menganalisis beberapa faktor ini, serta intervensi pencegahan untuk mengatasinya.

Sumber daya tambahan:

UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 18

4.1 Perburuan ilegal dan kejahatan terkait

4.1.1 Perburuan

Perburuan liar (atau perburuan ilegal) mengacu pada berbagai kejahatan yang mengkriminalisasi pengambilan hewan liar secara tidak sah. Misalnya, perburuan sering melibatkan perburuan hewan yang termasuk dalam spesies yang dilindungi atau dilarang. Kegiatan berburu juga bisa jadi ilegal karena lokasi di mana mereka dilakukan. Ini biasanya terjadi jika perburuan terjadi di wilayah geografis yang ditempatkan di bawah perlindungan lingkungan, seperti taman nasional atau cagar alam, atau jika perburuan berlangsung di luar area yang ditentukan. Kejahatan yang relevan juga termasuk mengambil mangsa yang dibatasi (membiakkan betina, hewan muda) atau bagian hewan (seperti tanduk).

Jenis perburuan lainnya melibatkan kegiatan yang melebihi kuota yang dialokasikan atau orang atau organisasi yang tidak memiliki lisensi atau izin yang sah untuk berburu. Yang terakhir ini adalah kasus jika lisensi atau izin berburu tidak pernah diperoleh, tidak valid, telah kedaluwarsa atau telah dipalsukan. Lisensi atau izin berburu juga bisa batal karena telah diperoleh dengan cara paksaan atau korupsi.

Dalam beberapa kasus, pemerintah menawarkan hak adat kepada kelompok atau komunitas, memungkinkan perburuan terjadi untuk penghidupan, mata pencaharian atau bentuk lain dari hak yang diakui untuk berburu. Dalam hal ini, perbedaan yang cermat perlu dipertimbangkan ketika menentukan apakah insiden perburuan telah terjadi atau apakah perburuan telah terjadi dalam hak adat individu.



ALAT I.19

Perburuan

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Membunuh atau menangkap spesies hewan yang dilindungi;
 - Membunuh atau menangkap hewan liar tanpa izin yang sah (termasuk tidak ada izin, izin kedaluwarsa, izin palsu, izin yang diperoleh dengan paksaan atau kekerasan, izin yang dikeluarkan dengan nama lain dan izin yang dikeluarkan secara salah);
 - Membunuh atau menangkap hewan liar di kawasan Lindung (termasuk Cagar alam dan Taman nasional);
 - Membunuh atau menangkap hewan liar di luar batas yang diizinkan;
 - Membunuh atau menangkap hewan liar di atas kuota Berlisensi;
 - Membunuh atau menangkap hewan muda; penghancuran atau kerusakan sarang, liar dan telur; dan pengambilan telur;
 - Membunuh atau menangkap seks yang tidak ditentukan;
 - Membunuh atau menangkap hewan hamil.
- » Berdasarkan undang-undang Manakah kegiatan ini dikriminalisasi?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, memfasilitasi dan memberi saran pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apakah kejahatan mengkriminalisasi perburuan insidental (ketika hasilnya insidental untuk beberapa kegiatan lain)?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?
- » Apakah ada pengecualian untuk kriminalisasi salah satu kegiatan yang disebutkan di atas berdasarkan hukum nasional, seperti untuk daging satwa liar untuk konsumsi pribadi?

4.1.2 Kejahatan terkait perburuan liar

Banyak yurisdiksi mengkriminalisasi penggunaan peralatan dan metode berburu tertentu. Ini dapat mencakup metode menembak, mengambil, berburu, menangkap, membunuh, melukai, mengumpulkan, memotong, membelah atau menghancurkan spesimen, atau menggunakan jenis senjata, jerat, perangkap, dan senjata, perangkat, dan metode terlarang tertentu. Ini lebih lanjut termasuk peralatan dan metode yang izin atau sertifikatnya tidak akan pernah diberikan (dengan alasan, misalnya, sifatnya yang tidak pandang bulu atau karena mereka sangat tidak manusiawi) serta peralatan dan metode yang diatur dalam situasi di mana penggunaannya tidak diizinkan. Misalnya, kaliber minimum senjata api mungkin perlu digunakan untuk berburu satwa liar besar atau penggunaan panah otomatis, busur dan anak panah, atau jerat atau perangkap mungkin dilarang untuk pemburu. Pertimbangan peralatan dan metode tidak terbatas pada senjata, tetapi juga dapat mencakup bahan peledak, racun, dan perangkap. Kejahatan terkait lainnya termasuk gangguan terhadap perburuan atau penjeratan yang dilakukan orang lain, dan kurang melaporkan dan salah melaporkan kegiatan atau kuota berburu.

Kejahatan terkait perburuan liar

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Mengambil mangsa terbatas (membiakkan betina, hewan muda);
 - Penggunaan perangkat berburu atau Metode berburu yang tidak sah (termasuk perangkap dan bahan peledak);
 - Gangguan terhadap perburuan atau perangkat orang lain;
 - Kurang melaporkan dan salah melaporkan kegiatan atau kuota berburu; dan
 - Berburu di malam hari.
- » Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi?
- » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?



4.2 Penebangan liar dan kejahatan terkait

4.2.1 Pembalakan liar

Istilah 'pembalakan liar' sering digunakan secara sinonim untuk kejahatan terkait hutan yang mencakup berbagai macam kegiatan yang terkait dengan penebangan pohon. Dalam arti yang lebih luas, ini digunakan untuk menggambarkan setiap kejahatan hukum kehutanan; Dalam arti sempit, pembalakan liar biasanya mengacu pada satu atau lebih kegiatan berikut.

Penebangan spesies yang dilindungi

Pembalakan liar sering melibatkan penebangan pohon yang termasuk dalam spesies yang dilindungi. Sebagian besar negara melindungi spesies pohon yang menjadi perhatian konservasi di bawah hukum nasional dan melarang penebangan mereka. Pembalakan liar terjadi jika pohon dianggap melanggar larangan ini atau karena tidak adanya wewenang atau izin untuk mengambilnya.

Penebangan di kawasan lindung

Kegiatan penebangan mungkin ilegal karena lokasi di mana mereka dilakukan. Ini biasanya terjadi jika penebangan terjadi di wilayah geografis yang ditempatkan di bawah perlindungan lingkungan, seperti taman nasional atau kawasan konservasi. Sebagian besar Negara melarang kegiatan penebangan di daerah yang telah dilindungi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, habitat alami atau warisan mereka, atau untuk melindungi mata pencaharian masyarakat adat atau komunitas lokal. Jenis pembalakan liar ini juga mencakup situasi di mana penebangan dilakukan di daerah yang dicadangkan untuk digunakan oleh masyarakat adat atau masyarakat setempat, atau di daerah yang sangat rentan, seperti lereng curam, tepi sungai atau resapan air.

Penebangan berlebihan

Jenis penebangan liar lebih lanjut melibatkan kegiatan yang melebihi konsesi yang dialokasikan. Ini biasanya melibatkan kasus-kasus di mana pemegang konsesi memanen pohon melebihi konsesi mereka di mana konsesi tersebut menetapkan kuota penebangan. Masalah ini sangat umum di Negara-negara dengan sedikit, jika ada, kapasitas untuk mengambil persediaan hutan mereka, sehingga tidak ada cara yang siap untuk mengidentifikasi kelebihan panen. Penebangan yang berlebihan juga mencakup situasi di mana penebangan dilakukan di luar batas konsesi.

Penebangan tanpa izin atau dengan izin palsu

Banyak kegiatan penebangan liar karena orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki izin yang sah untuk melakukannya. Hal ini terjadi jika izin tidak pernah diperoleh atau telah habis masa berlakunya, atau jika kegiatan yang dilakukan berada di luar ruang lingkup izin penebangan. Daerah-daerah yang jarang diperiksa oleh pejabat pemerintah sangat rentan terhadap penebangan yang tidak sah semacam ini. Juga termasuk di sini adalah penggunaan izin yang diperoleh secara curang dan duplikasi izin.

Mendapatkan izin penebangan secara ilegal

Mungkin salah satu bentuk pembalakan liar yang paling luas melibatkan kasus-kasus di mana konsesi penebangan telah diperoleh secara ilegal. Hal ini dapat terjadi karena paksaan, konflik kepentingan atau penipuan, atau dengan memberikan informasi palsu kepada otoritas hutan. Namun lebih umum, konsesi penebangan dikeluarkan secara ilegal oleh pejabat pemerintah sebagai imbalan atas suap. Dugaan korupsi tersebar luas di sektor kehutanan di banyak negara dan sama-sama mempengaruhi tahap pemanenan, pemrosesan, transportasi, ekspor dan impor perdagangan kayu.



ALAT
I.21

Pembalakan liar

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Penebangan spesies kayu yang dilindungi;
 - Penebangan tanpa izin yang sah (termasuk tidak ada izin, izin kedaluwarsa, izin palsu, izin yang diperoleh dengan Paksaan atau kekerasan, izin yang dikeluarkan dengan nama lain dan izin yang dikeluarkan secara salah);
 - Penebangan di kawasan Lindung (termasuk Cagar Alam dan Taman nasional);
 - Penebangan di daerah terlarang (seperti lereng curam, tepi sungai dan daerah tangkapan air);
 - Penebangan di luar batas konsesi;
 - Penebangan di atas kuota konsesi; dan
 - Penebangan atau perusakan atau kerusakan pada pohon muda.
- » Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi? Apakah ada pengecualian untuk kriminalisasi, yaitu untuk penggunaan tradisional?
- » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apakah kejahatan tersebut mengkriminalisasi pembalakan liar insidental (ketika hasilnya bersifat insidental untuk beberapa aktivitas lain)?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?

4.2.2 Kejahatan yang terkait dengan penebangan kayu

Metode dan peralatan pembalakan liar

Beberapa yurisdiksi mengkriminalisasi penggunaan peralatan dan metode penebangan tertentu. Ini dapat mencakup metode pengumpulan atau penebangan pohon, pemindahan pohon atau pembukaan lahan. Ini juga mencakup peralatan dan metode yang izin atau sertifikatnya tidak akan pernah diberikan serta peralatan dan metode yang diatur dalam situasi di mana penggunaannya tidak diizinkan.

Merusak ekosistem hutan

Kegiatan lebih lanjut yang terkait dengan pembalakan liar melibatkan perusakan pohon, terutama dengan cara memotong kulit kayu, menguliti pohon atau membakarnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merusak pohon sejauh mereka dapat dipanen secara legal karena sebagian besar negara mengizinkan pemindahan pohon yang rusak untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan bahaya lainnya. Setelah pohon dipindahkan dari lokasi aslinya, menjadi sulit jika bukan tidak mungkin untuk membedakan kayu yang bersumber secara legal dari pohon yang rusak secara ilegal.

Beberapa yurisdiksi memiliki kejahatan khusus untuk menebang spesies kayu yang serupa tetapi berbeda dari yang diizinkan dan untuk memanen pohon di bawah diameter legal atau dalam volume yang lebih besar dari yang diizinkan. Kejahatan lain terkait dengan kejadian di mana hutan publik atau hutan lindung ditempatkan secara ilegal dan dikonversi menjadi lahan untuk penggunaan pertanian atau peternakan sapi.

Kejahatan terkait penebangan

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Pendudukan dan penggunaan lahan hutan secara ilegal ;
 - Menghilangkan pohon yang kurang atau terlalu besar, merusak pohon, menggunakan praktik Tebang dan bakar, memotong kulit kayu dan pengulitan pohon;
 - Aktivitas atau kuota Penebangan yang kurang dilaporkan dan salah dilaporkan.
- » Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi?
- » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?



4.3 Pemanenan flora bukan kayu secara ilegal

Flora bukan kayu termasuk tanaman serta bahan tanaman seperti resin, bambu, buah-buahan, kacang-kacangan dan biji-bijian. Kejahatan yang berkaitan dengan flora bukan kayu meliputi berbagai kegiatan kriminal yang terkait dengan pemanenan tanaman, termasuk pengambilan spesies yang dilindungi, pemindahan spesimen langka dan terancam punah dari habitat aslinya (juga dirujuk menjadi 'perburuan tanaman'), pemanenan yang berlebihan, merusak tanaman, mengambil tanaman atau bahan tanaman tanpa izin atau lisensi, penggunaan izin palsu dan mendapatkan izin secara ilegal.



ALAT
I.23

Pemanenan Flora bukan kayu secara ilegal

Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?

- Pemanenan (serta pencurian dan pengambilan lainnya) dari spesies yang dilindungi;
 - Pemanenan tanpa izin Yang Sah (termasuk tidak ada izin, izin kedaluwarsa, dan izin palsu);
 - Pemanenan di kawasan Lindung (termasuk Cagar Alam dan taman nasional);
 - Pemanenan di daerah terlarang (seperti lereng curam, tepi sungai dan daerah tangkapan air);
 - Pemanenan di luar batas konsesi;
 - Pemanenan di atas kuota konsesi;
 - Memperoleh konsesi Pemanenan secara ilegal; dan
 - Kurang melaporkan dan salah melaporkan kegiatan atau kuota panen.
- Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi?
- » Apakah ada kejahatan khusus dalam kaitannya dengan biji, buah-buahan, kacang-kacangan, getah atau jamur?
 - » Berdasarkan undang-undang Manakah kegiatan ini dikriminalisasi? Apakah ada pengecualian untuk kriminalisasi, yaitu untuk penggunaan tradisional?
 - » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
 - » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
 - » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
 - » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
 - » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
 - » Apakah kejahatan mengkriminalisasi Pemanenan ilegal insidental (ketika hasilnya insidental untuk beberapa kegiatan lain)?
 - » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?

Catatan : Pertanyaan-pertanyaan ini juga akan relevan dengan jamur, yang mungkin relevan dalam beberapa konteks negara.

4.4 Pemrosesan ilegal bahan hewan dan tumbuhan

Pemrosesan ilegal (seperti penggilingan pohon atau penyembelihan hewan) dan pembuatan produk satwa liar dan hasil hutan adalah salah satu langkah paling kompleks dalam rantai pasokan dan sering digunakan untuk menyamarkan asal bahan yang digunakan dan jenis spesies yang terlibat sehingga produk akhir menjadi tidak dapat dibedakan dari produk yang melibatkan bahan yang diperoleh secara legal.

'Pencucian' bahan hewan dan tumbuhan pada umumnya, dan kayu pada khususnya, mengacu pada situasi di mana bahan yang diperoleh secara ilegal disembunyikan, dicampur, atau diproses untuk menyamarkan sumber ilegal. Sehubungan dengan kayu, ini termasuk, misalnya, mencampur kayu gelondongan yang ditebang secara ilegal dengan kayu legal dengan melebihi kuota pemotongan di tempat, dengan mengangkut kayu ilegal dari lokasi penebangan ilegal ke operasi hutan yang legal, menggunakan izin atau konsesi penebangan di satu area untuk memotong di area yang berbeda, menggunakan transportasi jalan untuk menyembunyikan asalnya, dan mencampur kayu yang ditebang secara ilegal dengan kayu gelondongan legal di penggergajian kayu atau pabrik pulp, kadang-kadang melebihi kapasitas resmi pabrik.

Penggunaan tanaman atau hewan yang diperoleh secara ilegal terkadang mengurangi biaya produksi dan pada akhirnya biaya produk jadi, sehingga menciptakan keuntungan bagi operator yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan industri. Jika spesies eksotis terlibat, tahap pemrosesan sering melibatkan pembuatan barang-barang mewah yang terbuat dari bahan langka, seperti gading, mahoni atau kayu keras lainnya, atau bahan makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan tumbuhan atau hewan yang dilindungi.³⁷ Pemrosesan dan manufaktur ilegal juga melibatkan kegiatan seperti pemrosesan tanpa lisensi, dengan lisensi palsu atau dengan lisensi yang diperoleh secara ilegal.

Pemrosesan ilegal bahan hewan dan tumbuhan

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Pemrosesan (termasuk pencampuran, penyembunyian, dan pencucian) yang diperoleh secara ilegal atau melindungi bahan tumbuhan atau hewan;
 - Pemrosesan di atas kuota yang ditetapkan;
 - Pemrosesan tanpa dokumentasi yang memverifikasi asal bahan yang sah;
 - Kegagalan untuk mematuhi aturan pemrosesan;
 - Pembuatan barang terlarang yang terbuat dari Fauna atau Flora liar;
 - Mengoperasikan fasilitas pemrosesan untuk kayu atau bahan tanaman atau hewan lainnya tanpa izin; dan
 - Pelaporan palsu tentang jumlah dan aktivitas pemrosesan.
- » Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi?
- » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?



4.5 Perdagangan manusia dan kejahatan lain yang berkaitan dengan perdagangan dan transportasi

Kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia mencakup berbagai kegiatan komersial yang melibatkan fauna dan flora, dan kegiatan yang berkaitan dengan transportasi mereka. Misalnya, hukum nasional dapat mengkriminalisasi penjualan dan pasokan spesies yang dilindungi dan satwa liar dan bahan hewan yang diperoleh secara ilegal atau dapat melarang perdagangan dan pengangkutan bahan tersebut. Ketika diperluas, ini juga termasuk kejahatan untuk penjualan palsu dan penawaran untuk dijual. Kejahatan yang berkaitan dengan transportasi termasuk transportasi tanpa izin yang sah, dengan dokumen palsu, di atas kuota yang ditetapkan dan melanggar undang-undang biosekuriti. Kejahatan yang berkaitan dengan ekspor, impor, dan transaksi lintas batas lainnya ditetapkan secara terpisah di Bab I, Bagian 3.6 dari Perangkat ini.

³⁷ Lihat lebih lanjut Bab V, Bagian 2.3.5 dari Perangkat ini



ALAT
I.25

Perdagangan manusia dan kejahatan lain yang berkaitan dengan

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Menjual fauna atau flora yang telah ditebang secara ilegal, dipanen, atau diperoleh secara ilegal;
 - Transportasi, penjualan, dan penawaran untuk penjualan spesimen spesies yang terdaftar di CITES yang telah diimpor, diperkenalkan dari Laut atau diambil dari alam liar tanpa izin yang diperlukan;
 - Perdagangan dan pengangkutan spesimen yang diimpor secara tidak sah; dan
 - Perdagangan dan transportasi yang melanggar pembatasan lain atau tindakan kontrol nasional.
- » Apakah ini merupakan tindak pidana atau kejahatan administratif?
- » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?

Selain tindak pidana ini, beberapa negara memberlakukan pembatasan luas pada perdagangan satwa liar dan bahan hewan dalam upaya untuk menutup pasar untuk produk apa pun di mana asal-usul hukum tidak dapat dibuktikan. Peraturan perdagangan semacam itu tidak dieksplorasi lebih lanjut dalam Perangkat ini, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam strategi yang lebih luas untuk menghentikan kejahatan satwa liar dan kehutanan.

4.6 Kejahatan impor dan ekspor

Kejahatan ekspor melibatkan berbagai kegiatan lintas batas ilegal seperti ekspor satwa liar dan hasil hutan yang diperoleh secara ilegal, ekspor ilegal spesies yang dilindungi dan kesalahan klasifikasi ekspor. Juga termasuk ekspor dengan dokumen palsu, ekspor berlebihan dan menyatakan nilai dan volume yang lebih rendah, ekspor klandestin, ekspor tanpa izin dan secara ilegal mendapatkan izin ekspor.

Serupa dengan kejahatan ekspor ini, impor fauna dan flora ke suatu negara mungkin ilegal karena melanggar persyaratan bea cukai dan kontrol perbatasan lainnya. Kejahatan yang relevan dapat berkaitan dengan, antara lain, impor spesies yang dilindungi, kejahatan larangan impor dari sumber tertentu, kegagalan untuk menyatakan impor, deklarasi palsu dan impor melebihi kuota yang ditetapkan.

CITES menyediakan langkah-langkah yang secara khusus disesuaikan untuk menegakkan ketentuan Konvensi dan untuk melarang ekspor dan impor spesies yang terdaftar di CITES. Berdasarkan Pasal VIII, Ayat 1 Negara Pihak diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Konvensi dan untuk melarang perdagangan spesimen yang melanggarnya. Secara khusus, mereka harus melarang dan menjadikannya kejahatan untuk mengimpor atau mengekspor spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi, yang berarti tanpa izin yang sesuai dan valid. Pasal VIII tidak dengan sendirinya menciptakan tindak pidana dan tidak memberikan panduan apapun mengenai rancangan tindak pidana berdasarkan hukum nasional. Penciptaan kejahatan dan penegakan ketentuan-ketentuan CITES diserahkan kepada para penandatanganan, dan Negara-negara Pihak bebas untuk mengadopsi larangan dan persyaratan pembatasan yang lebih ketat dari yang dipersyaratkan oleh Konvensi. Kriminalisasi perdagangan eceran spesies yang bersumber secara ilegal dan upaya untuk memperdagangkan atau memiliki spesies yang dilindungi tidak termasuk dalam Konvensi.

Di sebagian besar yurisdiksi, undang-undang pabeian atau undang-undang serupa mengkriminalisasi impor dan ekspor barang terlarang dan menyiapkan sistem lisensi untuk perdagangan lintas batas yang sah untuk barang yang tanpanya bersifat terlarang. Undang-undang semacam itu biasanya berlaku untuk berbagai barang selundupan mulai dari fauna dan flora liar hingga obat-obatan terlarang, senjata, dan barang terlarang lainnya. Mereka tidak selalu mengandung langkah-langkah yang dirancang khusus untuk fauna dan flora liar; biasanya hewan dan tumbuhan terdaftar di samping barang terlarang lainnya. Juga relevan adalah undang-undang karantina yang melarang impor spesies fauna dan flora tertentu, meskipun undang-undang ini umumnya berkaitan dengan pengendalian penyakit dan hama dan fokus pada spesies dan perlindungan lingkungan lainnya hanya sebagai tambahan.

Kejahatan impor dan ekspor

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Ekspor dan impor spesies yang dilindungi (dilindungi oleh hukum nasional atau dilindungi dalam Lampiran CITES);
 - Ekspor dan impor Fauna dan Flora tanpa izin yang sah (termasuk tidak ada izin, izin tidak sah, izin palsu);
 - Ekspor dan impor dengan dokumentasi yang salah (sehubungan dengan konten, spesies, jumlah, asal dan tujuan)
 - Ekspor dan impor Fauna dan Flora di atas kuota yang ditetapkan atau di atas kuota yang terdokumentasi;
 - Ekspor dan impor Fauna dan Flora yang bertentangan dengan larangan nasional; dan
 - Ekspor dan impor Fauna dan Flora lainnya tidak sesuai dengan izin yang berlaku.
- » Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi?
- » Kejahatan apa lagi yang termasuk?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini menjadi lebih parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?



ALAT
I.26

4.7 Akuisisi, kepemilikan, dan konsumsi ilegal

Permintaan dan konsumsi fauna dan flora merupakan pendorong integral dari kejahatan satwa liar dan kehutanan. Sementara banyak kejahatan terjadi di negara sumber dan transit, kejahatan ini tidak akan terjadi jika bukan karena permintaan yang berkelanjutan di negara tujuan. Tanpa permintaan atas hewan peliharaan eksotis, furnitur yang terbuat dari kayu tropis, makanan yang mengandung hewan atau tumbuhan langka, ukiran yang terbuat dari gading atau cula badak, veneer dan kayu lapis impor yang murah, dan sebagainya, kejahatan satwa liar dan kehutanan akan secara dramatis Berkurang. Permintaan sebagai faktor pendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan dibahas lebih lanjut di Bab V, Bagian 2.3 dari Perangkat ini.

Banyak Negara, terutama yang memiliki tingkat konsumsi lebih tinggi, baru-baru ini memperkenalkan mekanisme untuk mengatasi permintaan fauna dan flora ilegal. Kejahatan yang ditujukan untuk mengkriminalisasi mereka yang, secara sadar atau tidak, memperoleh, memiliki, atau mengkonsumsi hewan, tumbuhan, bahan, atau turunannya yang diproduksi, diperdagangkan, atau diperoleh secara ilegal hanya dapat ditemukan di sedikit yurisdiksi. Umumnya tidak ada persyaratan untuk memegang izin untuk mendapatkan atau membeli bahan-bahan tertentu, kecuali melibatkan spesies yang dilindungi. Selain itu, beberapa Negara melarang pembelian



produk tumbuhan atau hewan yang berasal dari sumber ilegal atau melibatkan spesies yang dilindungi, dan umumnya tidak ada hukuman untuk kepemilikan spesimen fauna atau flora liar yang diperoleh secara ilegal. Sebagian besar, konsumen fauna dan flora ilegal kebal dari penuntutan, penyitaan, dan sanksi. Pasal VIII, Ayat 1, CITES adalah salah satu dari sedikit ketentuan yang mengharuskan Negara-negara Pihak untuk menghukum kepemilikan salah satu spesies yang tercantum dalam Lampiran CITES.

Akuisisi, kepemilikan, dan konsumsi ilegal

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?
 - Kepemilikan dan pembelian spesimen spesies yang terdaftar di CITES yang telah diimpor, diperkenalkan dari Laut atau diambil dari alam liar tanpa izin yang diperlukan;
 - Kepemilikan dan pembelian spesimen impor yang melanggar hukum; dan
 - Memperoleh, mengonsumsi, dan menggunakan Fauna dan flora yang bersumber secara ilegal/diimpor.
- » Berdasarkan undang-undang manakah kegiatan ini dikriminalisasi? Apakah ini kejahatan pidana atau administratif ?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini menjadi semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?

4.8 Kejahatan lebih lanjut

Selain kejahatan yang secara khusus terkait dengan perdagangan satwa liar dan bentuk kejahatan satwa liar dan kehutanan lainnya, kejahatan yang lebih umum berdasarkan undang-undang lingkungan, undang-undang perlindungan hewan, kejahatan terkait penangkaran atau di bawah hukum pidana umum dapat memainkan peran penting dalam memerangi kejahatan ini.

Kejahatan kekejaman terhadap hewan, misalnya, dapat berfungsi untuk menghukum cara hewan hidup ditangkap, diangkut, diperdagangkan, diburu, atau disembelih. Mereka sangat penting dalam kasus-kasus di mana burung diangkut dalam botol plastik atau di mana kaki dan kepala kura-kura dan penyu diisolasi agar diam selama perjalanan. Kejahatan semacam itu juga dapat berhubungan secara khusus dengan penangkaran atau metode budidaya yang kejam.

Beberapa yurisdiksi memiliki kejahatan yang berkaitan dengan daging semak, yang biasanya didefinisikan sebagai daging dari hewan liar yang telah dibunuh atau diburu secara ilegal dan dimaksudkan untuk konsumsi manusia. Di beberapa negara, daging semak adalah ancaman utama bagi konservasi dan berkontribusi pada penurunan populasi satwa liar, serta menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Kejahatan yang dicatat dalam undang-undang nasional dapat mencakup larangan perdagangan dan kepemilikan, atau transaksi dalam, daging apa pun dari spesies satwa liar mana pun. Ini juga dapat mencakup larangan konsumsi satwa liar yang melanggar hukum. Namun, masalah ini sangat kompleks, karena mungkin ada pengaburan antara undang-undang yang terkait dengan konflik manusia/satwa liar dan daging semak. Selanjutnya, mungkin sulit untuk membuktikan motivasi untuk membunuh hewan di bawah undang-undang yang berbeda.

Kejahatan lingkungan umum, yang sering ditemukan dalam hukum administratif daripada pidana, mungkin relevan untuk mengkriminalisasi dan menghukum aspek-aspek tertentu dari kejahatan satwa liar dan kehutanan atau kegiatan terkait. Ini mungkin termasuk, misalnya, kejahatan yang berkaitan dengan polusi air, tanah atau udara, kejahatan yang berkaitan dengan hilangnya habitat, dan kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan terlarang di alam atau permainan

Beberapa yurisdiksi memiliki kejahatan umum 'membahayakan fauna dan flora/lingkungan' yang dapat relevan dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Di yurisdiksi yang memiliki sedikit, jika ada, kejahatan khusus yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, mungkin perlu untuk menggunakan kejahatan yang lebih luas dan lebih umum untuk mengkriminalisasi dan menangkap kegiatan yang relevan. Ini mungkin termasuk, misalnya, kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan yang disengaja dan penghancuran properti orang lain, kejahatan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api atau pengaturan perangkap, dan kejahatan yang berkaitan dengan karantina atau kesejahteraan hewan. Penerapan dan penggunaan kejahatan (umum) yang berkaitan dengan penipuan dokumen, pencucian uang, korupsi, dan penggelapan pajak dibahas lebih lanjut di Bab I, Bagian 5 dari Perangkat ini.

Kejahatan impor dan ekspor

- » Kejahatan mana yang membahas kekejaman terhadap hewan dan aspek lain dari pengembangbiakan, pengangkutan, dan perawatan hewan?
- » Apakah ada kejahatan khusus yang berkaitan dengan Penangkaran?
- » Apakah ada kejahatan khusus yang berkaitan dengan perdagangan atau kepemilikan/konsumsi daging semak?
- » Kejahatan Lingkungan apa lagi yang mungkin relevan dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ketentuan ini merupakan tindak pidana atau kejahatan administratif?



4.9 Hukuman hukum

Jenis dan tingkat hukuman yang dapat dijatuhkan untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan sangat bervariasi antar yurisdiksi. Di beberapa negara, hanya denda kecil dan/atau hukuman penjara singkat yang disediakan. Di tempat lain, denda bisa sangat tinggi dan hukuman penjara bisa lama. Dalam kasus ekstrem, kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat menerima hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Hukuman khusus untuk banyak kejahatan yang diidentifikasi dalam Bagian sebelumnya akan bervariasi tergantung pada berbagai jenis perilaku yang terlibat dan keadaan serta konsekuensi dari perilaku tersebut.

CITES, misalnya, tidak menetapkan hukuman khusus untuk perdagangan ilegal spesies yang dilindungi berdasarkan Pasal VIII dan, karenanya, Para Pihak dalam Konvensi bebas untuk menentukan denda atau hukuman yang dijatuhkan pada perdagangan ilegal. Sebagai aturan umum, hukuman harus, di satu sisi, adil dan sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan dan, di sisi lain, cukup berat untuk merupakan penjera yang efektif. Mereka juga harus dapat diterima secara sosial, karena jika tidak, pengadilan mungkin merasa tersudut untuk tidak menerapkannya. Banyak kejahatan yang ditetapkan di atas adalah kejahatan serius dan sangat penting bahwa hukuman untuk kejahatan ini mencerminkan sifat seriusnya. Kejahatan lain yang disebutkan di atas tidak sama beratnya. Hukuman untuk setiap kejahatan harus proporsional dengan keseriusannya. Denda dan sanksi bukan penahanan lainnya harus tersedia untuk kejahatan kecil; Pemenjaraan hanya boleh dijatuhkan dalam kasus yang sangat serius. Hukuman hukum juga dapat membatasi penggunaan teknik investigasi tertentu seperti pengawasan, intersepsi komunikasi, akses ke rekening bank dan catatan keuangan lainnya, dan pengiriman terkontrol, yang secara umum hanya berlaku untuk kejahatan serius.

Perbedaan di antara negara-negara mengenai hukuman yang dijatuhkan dapat menciptakan tantangan dalam upaya multilateral untuk secara efektif memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Negara-negara dengan hukuman yang relatif lebih rendah dapat dilihat sebagai target lunak dan dengan demikian mungkin lebih rentan terhadap aktivitas ilegal. Oleh karena itu tampaknya diinginkan untuk mencapai tingkat harmonisasi hukuman tertentu karena beberapa pelaku dapat lebih mudah dihalangi jika mereka tahu mereka akan menghadapi prospek hukuman serupa di mana pun mereka beroperasi. Negara-negara juga harus memastikan bahwa hukuman keuangan tetap relevan dan menjaga kekuatan penjeraan mereka dari waktu ke waktu, misalnya dengan mengindeksnya ke tingkat inflasi jika sesuai.

Seruan agar sanksi bagi satwa liar dan kejahatan hutan ditingkatkan secara besar-besaran dan diwajibkan untuk semua kegiatan ilegal yang terdeteksi harus dijawab dengan hati-hati. Hukuman yang sangat berat harus diperuntukan untuk kejahatan serius yang dilakukan dengan sengaja, untuk kejahatan berulang, dan untuk kejahatan yang menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain. Penting untuk dicatat bahwa meningkatkan hukuman untuk kegiatan ilegal tidak selalu merupakan penjera yang efektif. Dalam beberapa kasus mungkin kontraproduktif, karena dapat meningkatkan kesediaan untuk membayar suap dan dapat menyebabkan tingkat korupsi yang lebih tinggi. Dengan demikian, hukuman yang lebih tinggi hanya akan bertindak sebagai penjera ketika tata kelola keseluruhan sektor satwa liar dan kehutanan ditingkatkan.

Alat berikut ini dirancang untuk mengidentifikasi jenis hukuman hukum yang tersedia serta hukuman hukum maksimum dan minimum yang disediakan untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini akan sering berbeda dari hukuman sebenarnya yang dijatuhkan pada pelaku. Spektrum penuh sanksi yang tersedia, bersama dengan prinsip-prinsip hukuman, dianalisis lebih lanjut di Bab III, Bagian 4 dari Perangkat ini.



Hukuman hukum

- » Jenis hukuman hukum apa yang disediakan untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan (seperti denda atau penjara)?
- » Apakah undang-undang menetapkan ketentuan penjara maksimum atau denda maksimum?
- » Apakah undang-undang menetapkan ketentuan penjara Minimum atau denda Minimum?
- » Apakah beratnya hukuman untuk setiap kejahatan cukup mencerminkan tingkat keparahan bahaya atau kerusakan yang disebabkan oleh pelaku dan tingkat kesalahannya?
- » Bagaimana hukuman ini dan tingkat keparahannya dibandingkan dengan hukuman untuk jenis tindak pidana lainnya?
- » Apakah ada undang-undang penyitaan atau ketentuan tentang penyitaan umum atau khusus?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa pembohong (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2018) 34–35

4.10 Statistik kejahatan dan data lainnya

4.10.1 Insiden kejahatan satwa liar dan kehutanan

Di beberapa yurisdiksi, statistik dikumpulkan untuk setiap tindak pidana individu, sementara di tempat lain data dikelompokkan dalam kategori yang lebih luas seperti kejahatan hutan, kejahatan lingkungan, dan kejahatan impor/ekspor. Di beberapa yurisdiksi, statistik kejahatan tentang satwa liar dan kehutanan tidak dikumpulkan sama sekali.

Di sebagian besar yurisdiksi, statistik terpisah dikumpulkan untuk kejahatan, penyelidikan, penuntutan, dan hukuman yang dilaporkan. Jika dikumpulkan dan dilaporkan secara konsisten, informasi tersebut memungkinkan untuk meninjau prosedur investigasi dan penuntutan dan mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang menyebabkan kasus goyah. Banyak yurisdiksi memasukkan dalam statistik kejahatan mereka informasi tentang pelaku, korban (jika ada), bahaya atau kerusakan yang disebabkan, dan lokasi kejahatan, yang membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola kegiatan kriminal. Dalam mengumpulkan data dan statistik tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan, penting juga untuk mengumpulkan data tentang kejahatan lain yang memfasilitasi / memungkinkan atau terkait dengan kejahatan ini, seperti korupsi, pencucian uang, penipuan dokumen, penghindaran pajak, tidak membayar biaya, kejahatan yang berkaitan dengan internet dan obstruksi keadilan.

Statistik kejahatan

- » Lembaga mana yang mengumpulkan statistik kejahatan?
- » Seberapa teratur statistik kejahatan dikumpulkan? Bagaimana, seberapa sering, dan di mana mereka diterbitkan?
- » Apakah statistik kejahatan memisahkan kejahatan satwa liar dan kehutanan dari kejahatan lainnya? Jika demikian, spesies apa yang menjadi sasaran, jika ada?
- » Apakah statistik kejahatan menetapkan apakah kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, penggelapan pajak, penipuan dokumen, pencucian uang, dan kejahatan yang berkaitan dengan Internet?
- » Berapa banyak kejahatan satwa liar dan kehutanan yang dilaporkan? Berapa banyak yang diselidiki?
Berapa banyak Penyelidikan yang menghasilkan penuntutan dan hukuman?
- » Dari kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terkait dengan kejahatan lain, berapa banyak yang menghasilkan penyelidikan atas kejahatan terkait atau memungkinkan tersebut termasuk korupsi, penggelapan pajak, penipuan dokumen, pencucian uang, kejahatan yang berkaitan dengan internet? Berapa banyak dari kejahatan lain ini yang dituntut dan dihukum?
- » Apakah statistik ini berisi Informasi tentang pelaku, termasuk jenis kelamin mereka, lokasi kejahatan dan bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan?
- » Apakah ada analisis statistik kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan dilakukan?
Tren dan masalah apa yang dapat diidentifikasi dari statistik yang tersedia?



4.10.2 Kejahatan yang tidak dilaporkan

Statistik kejahatan hanya menghitung tindak pidana yang menjadi perhatian polisi atau lembaga penegak hukum lainnya. Karena berbagai alasan, saksi dan korban kejahatan, termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan, tidak boleh melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang. Tingkat pelaporan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk akses ke lembaga penegak hukum dan kepercayaan pada polisi dan otoritas lainnya. Oleh karena itu, statistik kejahatan adalah ukuran yang sangat tidak sempurna dari jumlah kejahatan satwa liar dan kehutanan yang benar-benar dilakukan dan penelitian dan analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang skala menyeluruh dan karakteristik kejahatan satwa liar dan hutan. Banyak statistik kejahatan juga tidak tersedia secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, yang menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor kritis yang penting ketika merancang tanggapan yang efektif.

Perbedaan antara berapa banyak kejahatan yang sebenarnya terjadi dan berapa banyak kejahatan yang dilaporkan atau ditemukan oleh pihak berwenang disebut sebagai 'jumlah yang tidak diketahui'. Hanya kejahatan yang dilaporkan yang muncul dalam statistik kejahatan, angka kejahatan yang tidak dilaporkan mencakup kejahatan yang tidak memicu reaksi atau tanggapan resmi oleh lembaga penegak hukum.

Untuk mengungkap tingkat dan keadaan kejahatan yang tidak dilaporkan, dan dengan demikian mengungkapkan tingkat sebenarnya, metode pengumpulan data tambahan perlu digunakan. Ini mungkin melibatkan melakukan survei terhadap korban, pelaku, peserta lain atau whistle-blower, menciptakan situasi tes atau menggunakan kamera tersembunyi. Misalnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang skala kejahatan satwa liar dan kehutanan secara menyeluruh, mungkin perlu untuk secara acak dan anonim mensurvei pelaku apakah mereka telah melakukan kejahatan yang belum terdeteksi oleh otoritas penegak hukum di masa lalu (kenakalan yang dilaporkan sendiri). Selain itu, entitas perusahaan yang beroperasi di sektor satwa liar dapat dipertanyakan menggunakan strategi yang sama. Cara lain untuk mengungkap jumlah yang tidak diketahui dari kejahatan satwa liar dan kehutanan adalah dengan membandingkan statistik kejahatan yang dilaporkan dan tidak dilaporkan dengan negara lain. Misalnya, bangkai yang ditemukan selama survei populasi spesies yang terancam punah, atau penyitaan yang dilakukan selama impor/transit/ekspor, dapat menunjukkan tingkat kejahatan yang tidak dilaporkan.



ALAT
I.31

Kejahatan yang tidak dilaporkan

- » Apakah statistik kejahatan yang tersedia hanya berhubungan dengan kejahatan yang dilaporkan atau apakah mereka berisi perkiraan tingkat kejahatan secara umum?
- » Apakah ada perkiraan lain atau Informasi lain tentang jumlah yang tidak diketahui dari kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah statistik yang tersedia mencakup perbandingan dengan data kejahatan satwa liar dan kehutanan dari yurisdiksi lain atau perbandingan dengan jenis kejahatan lainnya? Jika ya, kesimpulan apa yang dapat dibuat untuk statistik kejahatan yang tidak dilaporkan?
- » Apakah ada penelitian tentang jumlah yang tidak diketahui dari kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika ya, Metode apa yang telah digunakan untuk penelitian?

5

Bagian 1

Memfasilitasi dan memungkinkan kejahatan

Selain kejahatan satwa liar dan kehutanan tertentu yang diuraikan dalam Bab 1, Bagian 3 dari Perangkat ini, kejahatan satwa liar dan kehutanan sering melibatkan berbagai lingkup kegiatan Lainnya yang dapat Memenuhi kejahatan Lainnya yang lebih umum menurut hukum pidana dalam negeri.



Beberapa kegiatan ini dapat berfungsi untuk memfasilitasi atau memungkinkan kejahatan satwa liar dan kehutanan, seperti penggunaan senjata yang diperoleh secara ilegal, produksi atau penggunaan dokumen palsu, atau pembayaran suap. Kegiatan lain dapat terjadi setelah kejahatan satwa liar dan kehutanan, seperti pencucian hasil kejahatan, atau intimidasi saksi. Karena kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat dikaitkan dengan bentuk kegiatan kriminal lainnya, prioritas kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat dipertimbangkan kembali dalam beberapa kasus.

Meskipun aktivitas terkait dan kejahatan yang relevan tidak dapat dicermati secara mendalam dalam Perangkat ini, Bagian berikut berfokus pada kejahatan yang memfasilitasi, memungkinkan, dan yang bersifat umum yang paling sering dikaitkan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Penggunaan kejahatan ini bisa sangat penting dalam kasus-kasus aktual, karena dapat memungkinkan penggunaan kekuatan dan teknik investigasi yang tidak tersedia untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Lebih lanjut, mungkin lebih mudah bagi jaksa untuk membuktikan dalam beberapa kasus dan dapat memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi daripada yang seharusnya tersedia.

5.1 Penipuan dokumen dan hal-hal terkait

Penipuan dokumen sering digunakan untuk menyamarkan keaslian, legalitas, jumlah, volume, asal, dan tujuan satwa liar dan hasil hutan. Penipuan dapat terjadi di titik sumber, transit dan tujuan dan dapat dilakukan dengan mengisi dokumen dengan informasi palsu atau dengan memalsukan dokumen itu sendiri. Izin dan sertifikat palsu dapat digunakan untuk menyamarkan satwa liar ilegal dan produk kehutanan sebagai barang dagangan yang seolah-olah sah. Dokumen palsu dapat digunakan untuk mendapatkan izin atau sertifikat yang memungkinkan masuk ke area yang dilindungi atau untuk memungkinkan kepemilikan atau penggunaan senjata, perangkat, atau metode, dan kegiatan yang berkaitan dengan perburuan, penebangan, pemanenan, dan pengambilan, kepemilikan atau perdagangan fauna dan flora. Ada berbagai macam cara di mana dokumen asli dapat diubah dan di mana dokumen palsu dapat dibuat.

Penipuan dokumen tidak hanya berkaitan dengan penipuan berbasis kertas tetapi dapat melibatkan penghapusan, perubahan, perusakan atau penghapusan tanda atau tag yang ditempelkan pada hewan, tumbuhan, dan bagian-bagiannya. Penipuan dapat terjadi ketika informasi palsu diberikan atau ketika pernyataan yang salah diberikan kepada pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin, lisensi, konsesi, dan dokumen lain yang relevan, dengan maksud untuk menghilangkan atau menyesatkan. Misalnya, pernyataan palsu tentang penangkaran hewan

atau budidaya buatan tanaman adalah cara umum untuk secara curang mendapatkan izin dan sertifikat CITES asli. Penipuan dokumen juga dapat dikaitkan dengan korupsi jika pejabat pemerintah disuap untuk mengeluarkan dokumen palsu. Pencurian dan penjualan dokumen kosong atau penggunaan informasi palsu dalam bentuk dan transaksi daring juga dapat merusak sistem. Ketergantungan yang berlebihan pada dokumen, tanda, dan stempel dipandang oleh banyak orang sebagai kerentanan mendasar dari perdagangan fauna dan flora karena mereka sendiri sering diperdagangkan secara ilegal dan didaur ulang dalam berbagai transaksi.

Untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari CITES, kegiatan berikut harus ditetapkan sebagai tindak pidana sesuai dengan undang-undang suatu negara :

- a. setiap kejahatan terhadap ketentuan yang melekat pada izin dan lisensi;
- b. pembuatan pernyataan palsu atau menyesatkan dalam, atau sehubungan dengan, pengajuan untuk izin dan lisensi;
- c. pembuatan pernyataan palsu atau menyesatkan kepada aparat penegak hukum; dan
- d. Pemalsuan izin atau Stempel Keamanan.

Penghapusan, perubahan, perusakan atau penghapusan tanda atau tag yang ditempelkan pada spesimen juga harus disertakan, sesuai dengan peraturan. Selain itu, kegagalan untuk menyimpan catatan, penyimpanan catatan yang tidak lengkap, dan pemalsuan catatan, di mana penyimpanan catatan diperlukan, juga harus ditetapkan sebagai perilaku kriminal



Penipuan dokumen dan kejahatan terkait

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi sesuai dengan hukum nasional? Jenis kejahatan apa yang termasuk?
 - Pemalsuan dokumen, Stempel Keamanan, dan tanda yang dikeluarkan pemerintah;
 - Pencurian dokumen kosong;
 - Memberikan informasi palsu, termasuk memberikan pernyataan palsu dan pernyataan yang salah, kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan lisensi dan izin yang diperlukan;
 - Menggunakan izin atau dokumen yang dikeluarkan untuk orang lain;
 - Menyediakan, menjual, dan mendapatkan dokumen kosong;
 - Penghilangan, perusakan, penghapusan, dan perubahan stempel dan tanda yang tidak sah;
 - Pemalsuan catatan dan kegagalan untuk menyimpan catatan; dan
 - Misrepresentasi dan penghilangan fakta bahan saat mengajukan izin atau dokumen.
- » Di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi? Apakah ini kejahatan penipuan umum, kejahatan terkait identitas atau kejahatan khusus untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah ini tindak pidana atau kejahatan administratif?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, upaya untuk, bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan menyarankan pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini menjadi lebih parah, menghardirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?
- » Data, statistik, atau Informasi lain apa yang

5.2 Pencucian uang

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat menghasilkan keuntungan signifikan yang perlu dicuci untuk menyamarkan asal ilegal mereka dan menghindari kontrol mata uang dan peraturan keuangan lainnya. Sementara sebagian besar yurisdiksi memiliki undang-undang yang secara langsung atau tidak langsung mengkriminalisasi pengalihan, penerimaan, penyembunyian, dan kepemilikan hasil kejahatan, di beberapa tempat, kejahatan satwa liar dan kehutanan bukanlah kejahatan predikat (atau mendasari) untuk pencucian uang.³⁸ Ini dapat mempersulit, jika bukan tidak mungkin, bagi penyelidik untuk 'mengikuti jejak uang' dan membekukan dan pada akhirnya menyita hasil kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan mengidentifikasi serta menghukum mereka yang mendanai atau mendapat untung dari kejahatan semacam itu. Jika undang-undang tersebut ada, terkadang terbatas pada hasil dari pembalakan liar dan/atau jarang digunakan untuk menyelidiki pencucian uang lintas batas.

5.2.1 Kejahatan pencucian uang

Sejumlah Kerangka kerja internasional dapat digunakan untuk mengkriminalisasi dan memeriksa Pencucian hasil kejahatan satwa liar dan kehutanan. Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), misalnya, berisi ketentuan untuk mengkriminalisasi secara komprehensif Pencucian uang ketika Berhubungan dengan kejahatan Terorganisir kejahatan serius Lainnya. Juga menetapkan berbagai tindakan lain untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang.³⁹ Pasal 23 Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) juga menyertakan kejahatan pencucian uang yang mencontoh kejahatan UNTOC. Dalam bentuk penyederhanaan, Pasal 6, Ayat 1, dari UNTOC dan Pasal 23, Ayat 1, dari UNCAC mendefinisikan "pencucian Hasil kejahatan" sebagai:

- a. (i) Konversi atau pengalihan properti, mengetahui bahwa properti tersebut adalah hasil kejahatan, untuk tujuan menyembunyikan atau Menyamarkan asal-usul terlarang dari harta benda...;
- b. (ii) Penyembunyian atau Penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, atau kepemilikan atau hak yang sebenarnya sehubungan dengan properti, mengetahui bahwa properti tersebut adalah hasil kejahatan;
- c. (iii) Perolehan, kepemilikan atau penggunaan properti, mengetahui pada saat penerimaan, bahwa properti tersebut adalah hasil kejahatan.

Konvensi-konvensi ini juga menyatakan bahwa penerapan ketentuan-ketentuan yang relevan akan meluas ke: partisipasi dalam; asosiasi dengan atau konspirasi untuk melakukan; upaya untuk melakukan; dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi, dan memberikan saran atas pelaksanaan kejahatan pencucian uang ini.⁴⁰

³⁸ Pasal 2(h) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional menyatakan: "Kejahatan predikat" berarti setiap kejahatan sebagai akibatnya hasil telah dihasilkan yang dapat menjadi subjek kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 6 Konvensi ini".

³⁹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 6 dan Pasal. 7.

⁴⁰ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal 6, Ayat 1 (b) (ii); Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal 23, Ayat 1 (b) (ii).



Kejahatan pencucian uang

- » Di mana hukum nasional berupa ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang dan hasil kejahatan, termasuk pelanggaran, ditetapkan?
- » Apakah hukum nasional mengkriminalisasi konversi, Transfer atau penyembunyian properti, atau Penyamaran sifat aslinya, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan atau kepemilikan, mengetahui bahwa properti adalah hasil kejahatan?
- » Apakah hukum nasional mengkriminalisasi akuisisi, kepemilikan, atau penggunaan properti, mengetahui bahwa properti tersebut adalah hasil kejahatan?
- » Apakah kejahatan ini berlaku untuk hasil yang berasal dari semua kejahatan serius?
- » Apakah kejahatan satwa liar dan kehutanan yang relevan menjadi predikat kejahatan yang menerapkan ketentuan pencucian uang? Jika demikian, apakah kejahatan predikat mencakup kejahatan yang dilakukan baik di dalam Maupun di luar wilayah nasional? Jika dilakukan di luar wilayah nasional, apakah persyaratan pidana ganda berlaku?
- » Apakah ada kejahatan pencucian uang khusus yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Di mana kejahatan didefinisikan (seperti hukum pidana atau hukum pidana tertentu)? Apa elemen penyusunnya?
- » Apakah ketentuan pencucian uang berlaku untuk orang-orang yang melakukan kejahatan predikat (pencucian secara mandiri) atau apakah kejahatan Predikat dan pencucian uang dihukum secara terpisah?
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke berpartisipasi dalam, mencoba untuk melakukan, bersekongkol untuk melakukan, membantu, mendukung, memfasilitasi, dan memberikan saran untuk pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini menjadi semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?
- » Dapatkah hukum digunakan untuk membekukan dan menyita hasil ilegal dan aset lain yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Alat tambahan yang berkaitan dengan investigasi keuangan, penyitaan, dan perampasan dieksplorasi dalam Bab II, Bagian 5.6 dan 6.7 dari Perangkat ini.

5.2.2 Rekomendasi Satgas Aksi Keuangan

Financial Action Task Force (FATF) adalah lembaga antarpemerintah yang dibentuk khusus untuk menangani pencucian uang. Sembilan yang disebut 'badan regional bergaya FATF' telah dibentuk untuk melengkapi pekerjaan FATF.

FATF telah mengembangkan standar global, yang dikenal sebagai Rekomendasi FATF, yang menetapkan kerangka kerja komprehensif langkah-langkah yang harus diterapkan negara-negara untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata. Rekomendasi terdiri dari langkah-langkah yang harus dimiliki negara-negara dalam sistem peradilan pidana dan peraturan mereka; langkah-langkah pencegahan yang harus diambil oleh lembaga keuangan dan bisnis serta profesi lainnya; langkah-langkah untuk memastikan transparansi tentang kepemilikan badan hukum dan pengaturan; pembentukan otoritas yang kompeten dengan fungsi dan wewenang serta mekanisme kerja sama yang sesuai; dan pengaturan untuk bekerja sama dengan negara lain. Rekomendasi FATF mengakui bahwa negara-negara memiliki

kerangka hukum, administrasi dan operasional yang beragam dan sistem keuangan yang berbeda, sehingga tidak dapat semuanya mengambil tindakan yang sama untuk melawan ancaman ini. Oleh karena itu, *Rekomendasi* FATF menetapkan standar internasional, yang harus diterapkan negara-negara melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan keadaan khusus mereka.

Rekomendasi FATF, meskipun tidak mengikat secara hukum, telah memperoleh penerimaan yang luas, dan FATF memantau kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Rekomendasi di Negara Anggota dan bukan Anggota. Rekomendasi ini tidak dirancang untuk jenis kejahatan tertentu dan dengan demikian mudah beradaptasi untuk memerangi pencucian hasil yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan. Untuk membantu negara-negara dalam upaya mereka menilai dan meningkatkan undang-undang anti pencucian uang domestik, FATF, dalam kemitraan dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, telah mengembangkan buku pegangan terperinci tentang evaluasi dan penilaian anti pencucian uang dan kontra-pendanaan terorisme.⁴¹ FATF merilis sebuah studi pada Juni 2020 yang menilai aspek pencucian uang dari kejahatan satwa liar, dan menunjukkan bagaimana yurisdiksi harus menerapkan standar FATF untuk memerangi kejahatan ini. Kemudian pada Juni 2021, juga diterbitkan laporan serupa terkait kejahatan yang lebih luas yang mempengaruhi lingkungan seperti kejahatan kehutanan.

Rekomendasi FATF

- » Apakah negara tersebut merupakan anggota FATF?
- » Apakah negara tersebut anggota badan Regional bergaya FATF?
- » Apakah negara, dalam Penilaian Risiko Nasionalnya, telah mempertimbangkan dan mengidentifikasi risiko pencucian uang/Pendanaan teroris yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah negara ini telah menjalani evaluasi bersama oleh rekan-rekannya (dalam konteks FATF atau badan Regional bergaya FATF)?
 - Jika demikian, kapan penilaian dilakukan dan apa hasilnya terkait kepatuhan teknis dan efektivitas?
 - Apakah negara tersebut telah terdaftar oleh FATF sebagai yurisdiksi berisiko tinggi atau yurisdiksi di bawah pemantauan yang meningkat?
 - Apakah evaluasi mengacu pada kejahatan satwa liar dan kehutanan serta transaksi terkait? Kekurangan apa yang diidentifikasi (yaitu penilaian risiko, investigasi keuangan, pemulihan aset, Kerja Sama Internasional) dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Langkah-langkah apa yang telah diambil untuk memperbaiki kekurangan ini?

Sumber daya tambahan:

FATF. *Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan (2021)*. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/pencucian-uang-dari-kejahatan-lingkungan.html>

FATF. *Pencucian Uang dan Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2020)*. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/pencucian-uang-perdagangan-satwa-liar.html>

Egmont Centre of FIU Excellent and Leadership (ECOFEL). *Investigasi Keuangan terhadap Kejahatan Satwa Liar (2021)*. <https://egmontgroup.org> Bank Dunia. *Asesmen Risiko Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, modul tentang "Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam "*



ALAT
I.34

41 FATF, 2009, Evaluasi dan Penilaian AML/CTF: Handbook for Countries and Assessors, Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, diakses 3 April 2021, < www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/42/38896285.pdf >

5.2 Kejahatan terkait korupsi

Kejahatan satwa liar dan kehutanan sering difasilitasi oleh korupsi. Korupsi dapat terjadi sebelum operasi (misalnya pemberian izin, sertifikat, kuota atau lisensi), selama operasi (misalnya kontrol aktivitas) dan setelah operasi (misalnya pemberian izin dan lisensi untuk ekspor atau komersialisasi produk) di titik asal, transit, dan tujuan.

5.3.1 Konteks dan jenis korupsi

Korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari pejabat yang menerima suap dan berkolusi dengan penjahat, hingga penyalahgunaan jabatan dan penggelapan sumber daya yang dialokasikan untuk satwa liar dan pengelolaan dan perlindungan hutan.

Ada banyak cara di mana suap dapat ditawarkan dan dibayarkan kepada pejabat pemerintah, perusahaan komersial dan individu yang melakukan kontrol atas bidang, industri, dan bahan tertentu. Korupsi sering melibatkan penyuaan aktif: janji, menawarkan atau memberi kepada orang lain dari keuntungan yang tidak semestinya, agar orang lain bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya. Bentuk umum lain dari korupsi adalah penyuaan pasif: ajakan atau penerimaan oleh orang lain dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya.

Suap dapat ditawarkan di semua tahap pelaksanaan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Salah satu situasi yang paling umum adalah ketika izin, sertifikat atau otorisasi atau dokumen lain diperlukan untuk memperoleh tanah atau untuk berburu, memanen, mengangkut, memproses, menjual, mengimpor, mengekspor, memiliki atau memperoleh fauna dan flora, produk mereka dan turunannya. Suap juga dapat ditawarkan untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan satwa liar atau patroli untuk memungkinkan perburuan liar, untuk memungkinkan spesimen ilegal melewati pos pemeriksaan, atau untuk memastikan bahwa pengiriman ilegal tidak diperiksa atau disita.

Pejabat juga dapat menggelapkan atau menyalahgunakan dana dan sumber daya yang ditujukan untuk konservasi satwa liar dan kehutanan, pengelolaan dan perlindungan, atau penggelapan satwa liar yang diita atau satwa liar atau hasil hutan.

Selain itu, korupsi dapat mengimbangi setiap upaya untuk mengontrol atau menegakkan hukum yang terkait dengan kejahatan kehutanan, karena korupsi pada tahap awal ketika hendak memperoleh hak atas tanah atau klasifikasi tanah dapat membuat semua tindakan lebih lanjut seperti eksploitasi sumber daya hutan, yang seharusnya dilindungi, terlihat sah. Demikian pula, penjahat satwa liar dapat terlibat dalam korupsi untuk menciptakan kesan legitimasi; perusahaan ilegal dapat terlihat sebagai sumber yang sah dari satwa liar dan produk satwa liar.

Korupsi juga bisa mencapai level tertinggi pejabat pemerintah. Pejabat tersebut dapat memperdagangkan pengaruh atau menyalahgunakan fungsi mereka untuk melemahkan keputusan kebijakan atau undang-undang yang terkait dengan sektor satwa liar dan kehutanan, untuk mengakses lahan yang dilindungi secara ilegal atau mengabaikan standar lingkungan. Lebih lanjut, mereka dapat memberikan konsesi perburuan atau penebangan liar atau tidak berkelanjutan atau kontrak pengadaan skala besar untuk kepentingan mereka sendiri atau sekutu. Korupsi tingkat tinggi adalah bentuk korupsi yang paling merusak karena menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan mendorong korupsi di tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, korupsi di sektor kehutanan dan satwa liar mungkin merupakan bagian intrinsik dari sistem patronase yang menopang kekuatan elit penguasa suatu negara. Manipulasi politik dapat menjadi masalah utama dalam kegiatan ilegal yang terus-menerus di sektor satwa liar dan kehutanan. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya hukum dan ketertiban dan menghambat investasi swasta dan asing di sektor-sektor ini.

Lebih lanjut mendorong korupsi di sektor kehutanan dan satwa liar adalah sebuah kenyataan karena risiko tertangkap seringkali rendah sebab kejahatan yang relevan dilakukan jauh dari pandangan publik, di daerah terpencil di mana pengawasan, pemantauan, dan pengawasan media mungkin sangat terbatas. Faktor kunci lainnya adalah tidak adanya sanksi yang efektif dan dissuasif. Selain itu,

mandat yang tidak jelas dan kurangnya transparansi dalam administrasi satwa liar dan hutan publik dan lembaga lainnya, termasuk otoritas penegak hukum, struktur akuntabilitas yang tidak jelas, dan kurangnya pengungkapan publik atas dokumen-dokumen kunci semuanya mendukung berkembangnya praktik korupsi.

Penting juga untuk mempertimbangkan gender dalam konteks korupsi dan kejahatan satwa liar. Perempuan dapat memperoleh dampak lebih buruk dari bentuk-bentuk korupsi tertentu, misalnya ketika aktor korup (laki-laki) menuntut 'bantuan' seksual daripada keuangan.

5.3.2 Kejahatan korupsi

Kejahatan yang berkaitan dengan korupsi dapat sangat bervariasi antar yurisdiksi. Secara umum, mereka tidak terbatas pada menawarkan atau menerima suap, tetapi mencakup berbagai kejahatan di mana pejabat menyalahgunakan posisi mereka atau dihasut untuk melakukannya, dan mencakup korupsi di baik sektor publik maupun swasta.

Selain penyuapan pejabat publik nasional, tindak pidana korupsi umumnya juga meliputi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional, serta penggelapan, penyelewengan atau pengalihan properti lainnya oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, atau pengayaan dengan cara terlarang. Penyuapan dan penggelapan properti juga dapat terjadi di antara aktor swasta.⁴²

Bagi mereka yang ditunjuk untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan satwa liar dan kehutanan, bukti untuk membuktikan salah satu dari kejahatan terkait korupsi ini dapat digunakan bersama dengan bukti kejahatan satwa liar dan kehutanan tertentu, yang memungkinkan lebih banyak titik masuk untuk menuntut perilaku ilegal. Dalam beberapa kasus, bahkan mungkin lebih mudah untuk menunjukkan bahwa seseorang menawarkan atau menerima suap daripada membuktikan bahwa orang tersebut terlibat dalam kejahatan satwa liar atau kehutanan. Sementara korupsi skala kecil, seperti penyuapan pejabat tingkat rendah, mungkin dilakukan secara tersembunyi, banyak jenis korupsi yang terkait dengan sektor satwa liar dan kehutanan meninggalkan jejak dokumen dan uang yang dapat direkonstruksi oleh penyidik dan jaksa. Ini dapat memberikan bukti kegiatan kriminal yang diperlukan untuk mengamankan hukuman. Menggunakan undang-undang antikorupsi untuk mencegah dan menekan kejahatan satwa liar dan kehutanan juga dapat membantu untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau menggunakan kekuatan dan teknik investigasi yang mungkin tidak tersedia untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Lebih lanjut, beberapa fasilitator kejahatan satwa liar dan kehutanan mungkin telah memfasilitasi tindakan tersebut dengan melakukan kejahatan korupsi (daripada melakukan kejahatan satwa liar dan kehutanan, seperti itu). Misalnya, seorang petugas yang menjual lisensi kepada seseorang yang berhak atas lisensi tersebut dan menggelapkan biaya tersebut telah melakukan kejahatan korupsi daripada kejahatan satwa liar dan kehutanan. Menghubungkan korupsi dan kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan menyelidikinya bersama-sama atau secara paralel, seringkali dapat menjadi satu-satunya cara untuk meminta pertanggungjawaban 'fasilitator' atas tindakan mereka.

Alat berikut ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis kejahatan korupsi umum di bawah hukum pidana domestik dan kejahatan korupsi khusus yang berkaitan dengan sektor satwa liar dan kehutanan (jika tersedia). Langkah-langkah penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan korupsi, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi korupsi layanan penuntutan dan peradilan, dieksplorasi dalam Bab II, Bagian 8 dan Bab III, Bagian 2.3 dan 3.4 dari Perangkat ini.

⁴² Lihat lebih lanjut, Pasal 15–25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi



Kejahatan terkait korupsi

- » Apakah kegiatan berikut dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional? Jika demikian, di bawah undang-undang mana kegiatan ini dikriminalisasi (hukum pidana, undang-undang tertentu atau lainnya)? Apa saja unsur-unsur penyusun dari kejahatan-kejahatan ini?
 - Penyuapan aktif dan pasif, keterlibatan dalam kejahatan suap dan bentuk korupsi lainnya;
 - Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan properti lainnya oleh pejabat publik;
 - Penyuapan pejabat publik Asing dan pejabat di organisasi internasional publik;
 - Perdagangan pengaruh ;
 - Penyalahgunaan fungsi;
 - Pengayaan ilegal ;
 - Penyuapan dan penggelapan di sektor swasta;
 - Penyembunyian; dan
 - Obstruksi keadilan.
- » Apakah ada kejahatan khusus sesuai dengan undang-undang sektor satwa liar dan kehutanan untuk mengcriminalisasi hal-hal berikut?
 - Meminta melalui atau pembayaran suap kepada pejabat pemerintah dan politisi untuk menerima konsesi kayu, izin berburu atau izin pemrosesan; atau untuk menghindari pelaporan pembatasan, mengabaikan kejahatan kecil, mengabaikan kegiatan pembalakan liar, pemanenan, dan perburuan liar;
 - Meminta melalui atau pembayaran suap kepada pejabat pemerintah dan politisi untuk menerima konsesi kayu, izin berburu atau izin pemrosesan; atau untuk menghindari pelaporan pembatasan, mengabaikan kejahatan kecil, mengabaikan kegiatan pembalakan liar, pemanenan, dan perburuan liar;
 - Pembayaran suap untuk menghindari penuntutan atau intervensi administratif atas ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan satwa liar dan kehutanan;
 - Perdagangan pengaruh untuk membentuk undang-undang, pedoman, keputusan, dan lain-lain yang menguntungkan;
 - Kroniisme (yaitu, keputusan pejabat satwa liar dan kehutanan yang menguntungkan teman dan kerabat); dan
 - Memanipulasi proses penawaran atau membocorkan informasi penawaran kepada kontraktor pilihan .
- » Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan mencakup dengan sengaja, sadar atau Lalai (tanpa Kehati-hatian) terlibat dalam perilaku yang dilarang? Bisakah kejahatan dilakukan tanpa bukti kesalahan (tanggung jawab ketat)?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan meluas ke partisipasi dalam, mencoba untuk, Bersekongkol untuk, membantu, mendukung, memfasilitasi dan memberikan saran terkait pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan ini?
- » Apakah tanggung jawab badan hukum atas kejahatan yang relevan ditetapkan di dalam negeri?
 - Apa sifat dari tanggung jawab tersebut?
- » Dalam keadaan apa kejahatan ini semakin parah, menghadirkan hukuman yang lebih tinggi?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?

Sumber daya tambahan:

UNODC , *Si Global Program melawan Korupsi: Anti-Korupsi PBB Toolkit edisi Ke-3*. (Wina, 2004)

UNODC. *Scaling Belakang Korupsi: Panduan untuk mengatasi korupsi bagi otoritas pengelolaan satwa liar*. https://www.unodc.org/Dokumen/Margasatwa/19-08373_Scaling_Back_Corruption_ebook.pdf

UNODC. *Saatnya sekarang: mengatasi dimensi jenis kelamin korupsi* (Wina, 2020)

5.4 Penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya biaya

Penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya bea, tarif, dan biaya lainnya tidak unik untuk sektor satwa liar dan kehutanan tetapi memainkan peran penting dalam konteks ini. Misalnya, bahkan jika operator telah memperoleh izin hukum untuk memanen, tidak dibayarnya pajak, royalti, atau biaya lainnya membuat operasi tersebut ilegal. Seringkali kejahatan ini berjalan beriringan, dan jika, misalnya, operator memanen pohon tambahan, biaya lain tetap tidak dibayar. Tunggakan dalam beberapa kasus dapat menguras sumber daya dan pendapatan publik. Kegagalan untuk membayar pajak dan biaya yang relevan merampas pendapatan penting pemerintah dan masyarakat lokal dan dapat secara serius merusak pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak asasi manusia.

Persaingan tidak sehat juga menimbulkan tantangan serius bagi operator yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan dan membayar biaya yang relevan karena produk mereka mungkin lebih mahal pada tahap grosir dan eceran. Selain itu, penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya biaya sering dikaitkan dengan pencucian uang dan korupsi, terutama ketika pejabat pemerintah disuap untuk menghindari pembayaran biaya. Juga perlu dicatat dalam konteks ini adalah penghindaran kontrol mata uang, yang sering terjadi ketika uang tunai dibawa oleh kurir untuk melakukan pembayaran kepada mereka yang berada dalam rantai kejahatan.

Penghindaran pajak dan tidak dibayarkannya biaya

- » Apakah kegiatan berikut dapat dihukum berdasarkan hukum nasional? Apakah mereka dapat dihukum sebagai kejahatan pidana atau administratif? Di bawah hukum Manakah kejahatan ini dapat dihukum? Apa saja unsur-unsur dari kejahatan ini?
 - Menyatakan bahan atau produk hewan dan tumbuhan di bawah harga atau nilai pasar;
 - Pernyataan spesies yang salah untuk menghindari atau mengurangi tarif atau biaya;
 - Menilai terlalu tinggi layanan yang diterima dari perusahaan terkait untuk mengurangi laba yang dinyatakan dan pajak penghasilan perusahaan;
 - Menghindari Royalti dan bea dengan kurang melaporkan atau mengecilkan nilai bahan atau produk hewan dan tumbuhan;
 - Tidak membayar biaya lisensi, royalti, pajak, dan biaya pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan di sektor satwa liar dan kehutanan; dan
 - Menyembunyikan keuntungan dan memanipulasi aliran pendapatan untuk layanan untuk menghindari kewajiban dan pajak.
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini? Apakah kegiatan berikut dapat dihukum berdasarkan hukum nasional?



5.5 Kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terkait dengan internet

Satwa liar, hewan, dan tumbuhan sering diperdagangkan secara daring. Penjual dan pembeli spesimen yang diperoleh secara ilegal atau produk yang terbuat dari spesies yang dilindungi menggunakan pasar daring yang dapat diakses publik, serta darknet, untuk mempromosikan, menjual, atau mencari hewan, tumbuhan, produk, dan turunannya. Karena banyaknya peluang untuk menawarkan dan membeli produk secara daring, Negara perlu memastikan bahwa undang-undang mereka, termasuk tindak pidana, secara memadai menangani kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terkait dengan Internet. Sekretariat CITES mendefinisikan "kejahatan satwa liar yang terkait dengan internet" sebagai :

*kejahatan yang melibatkan spesimen satwa liar, diaktifkan, atau difasilitasi oleh penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi apa pun di dunia digital, termasuk antara lain web publik (clear), web gelap, pasar daring, platform jaringan sosial, aplikasi obrolan instan, jaringan peer to peer atau layanan surel.*⁴³

43 Lihat CITES: <https://cites.org/eng/resources/terms/glossary.php#f>

5.5.1 Pasar daring

Pasar daring menimbulkan tantangan khusus bagi penegak hukum dan bagi mereka yang ditugaskan untuk mengaturnya.

Baik situs web sah (seperti platform media sosial, situs penjualan daring) dan lingkungan daring terlarang (seperti darknet) memungkinkan penjual untuk menawarkan barang dan jasa mereka kepada berbagai pelanggan. Saluran media sosial memungkinkan penjual pada tahap awal rantai perdagangan (penyelundup, grosir, dan produsen) untuk menjangkau konsumen akhir dengan lebih mudah, yang dapat merangsang permintaan lebih lanjut dan perdagangan fauna dan flora liar terkait. Selain itu, iklan untuk satwa liar ilegal dan komoditas hutan dapat dibagikan dengan sejumlah besar pembeli potensial melalui obrolan pribadi di media sosial dan dengan demikian meningkatkan paparan dan, pada akhirnya, penjualan.

Dalam banyak kasus, kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terkait dengan internet terjadi bersamaan dengan pasar legal. Misalnya, perusahaan yang sah dapat memberikan perlindungan hukum untuk perdagangan ilegal atau merangkul peluang kejahatan secara daring untuk meningkatkan keuntungan mereka. Pasar daring juga memberikan peluang untuk menawarkan penjualan dengan harga yang jauh lebih rendah, meskipun seringkali harga tersebut datang dengan biaya tersembunyi untuk pengiriman dan pengantaran atau melibatkan penawaran penipuan yaitu barang yang tidak pernah dikirim atau bahkan tidak ada.

Munculnya mata uang kripto, dalam banyak kasus, memfasilitasi penjualan produk terlarang di internet dengan mengaburkan aliran modal. Regulasi di bidang ini sangat menantang karena merupakan tujuan dari mata uang kripto untuk menghindari kontrol Negara. Namun, popularitas dan kegunaan mata uang kripto seringkali bergantung pada konvertibilitasnya menjadi alat pembayaran yang sah. Keberhasilan pengaturan kemungkinan harus melibatkan upaya internasional.

Undang-undang dan peraturan untuk penjualan daring harus, sebagian besar, tidak berbeda dengan penjualan yang dilakukan melalui pasar lain. Penjualan, penawaran untuk dijual, akuisisi, dan kepemilikan barang selundupan umumnya dikriminalisasi, terlepas dari apakah itu terjadi di pasar fisik atau daring; pencegahan dan larangan penjualan, perdagangan, Impor dan ekspor juga harus berlaku untuk pasar fisik dan daring. Jika ini tidak terjadi, undang-undang dan peraturan yang relevan perlu disesuaikan untuk mencakup perdagangan daring dan sarana elektronik secara memadai. Langkah-langkah domestik harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif, dan dengan cepat disesuaikan untuk menanggapi tren baru.



Pasar daring

- » Apakah undang-undang yang ada yang melarang penjualan, penawaran untuk dijual, iklan, pasokan, perdagangan, pembelian, atau akuisisi satwa liar dan Selundupan dari hutan meluas ke penjualan daring dan penggunaan sarana elektronik?
- » Apakah ada batasan berdasarkan undang-undang nasional tentang penjualan spesies yang terancam punah (mis. Spesies yang terdaftar di CITES) secara daring?
- » Undang-undang mana yang mengatur Mata uang kripto dan Konvertibilitasnya menjadi alat pembayaran Yang Sah?
- » Undang-undang mana yang mengatur Jaringan gelap dan penjualan barang selundupan melalui Jaringan gelap? Apakah undang-undang ini mencakup penjualan satwa liar dan barang selundupan dari hutan?

Sumber daya tambahan:

CITES, *Kejahatan satwa liar Terhubung ke Internet*: https://cites.org/eng/prog/imp/wildlife_crime_linked_to_the_internet
 UNODC, *Panduan untuk Penyusunan legislasi untuk mengatasi kejahatan satwa liar (PBB, 2018)* 29.

INTERPOL, *Kejahatan satwa liar yang terkait dengan Internet: Pedoman praktis untuk praktisi penegak hukum, arsip* [https://cites.org/sites/default/files/2020/05/2020COM0566-ENS-Interpol_Guidelines%20v5%20\(003\)\(1\)-1-](https://cites.org/sites/default/files/2020/05/2020COM0566-ENS-Interpol_Guidelines%20v5%20(003)(1)-1-)

5.5.2 Tanggung jawab perantara daring

Penjualan daring satwa liar dan selundupan dari hutan sering melibatkan transaksi kompleks yang difasilitasi oleh beberapa individu atau badan hukum, seperti penyedia layanan pembayaran elektronik, surat, kurir, layanan transportasi dan penyimpanan, penyedia layanan internet, penyedia layanan hosting web, serta pemilik, penyedia, dan operator platform media sosial. Keterlibatan perantara daring ini tampaknya tidak terbatas dan akun lengkap serta penilaian penyedia ini berada di luar cakupan dan tujuan Perangkat ini.

Untuk mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terkait dengan internet secara efektif, penting bahwa undang-undang nasional secara memadai mengatur berbagai individu dan badan hukum yang berbeda yang menyediakan layanan yang diperlukan untuk penjualan elektronik dan jarak jauh terkait satwa liar dan komoditas hutan. Secara khusus, hukum nasional harus mengkriminalisasi orang yang memberikan layanan kepada orang lain yang mengetahui (atau lalai tentang fakta) bahwa layanan tersebut digunakan untuk, antara lain, menjual secara ilegal, menawarkan untuk dijual, perdagangan dan pembelian satwa liar dan selundupan dari hutan.

Tanggung jawab Perantara daring

- » Apakah hukum nasional menciptakan tanggung jawab (pidana) untuk Perantara daring yang saluran/Caching/Meng-hosting konten ilegal?
- » Apakah hukum nasional menciptakan tanggung jawab (pidana) bagi Perantara daring untuk menautkan ke situs web dengan konten ilegal?
- » Aturan Uji Tuntas mana yang berlaku untuk Perantara daring untuk menghindari tanggung jawab atas konten ilegal?
- » Apakah ada undang-undang khusus untuk mewajibkan / mendorong penyedia platform daring untuk :
 - Memperkenalkan kebijakan publik untuk mengatasi dan mencegah penggunaan platform tersebut untuk perdagangan ilegal Fauna dan Flora termasuk langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut;
 - Memastikan bahwa kebijakan tersebut disajikan dengan jelas dan mudah terlihat;
 - Mendorong mereka untuk memberi tahu pengguna mereka tentang perdagangan daring ilegal satwa liar, dengan menggunakan peringatan yang ditargetkan dan langkah-langkah teknologi lainnya untuk membuat pengguna mengetahui undang-undang dan kebijakan situs web yang relevan ?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 29

UNODC, Pembuatan Kebijakan dan peran Perantara daring dalam perdagangan gelap (2021) 35–40



ALAT
I.38

5.6 Kejahatan yang berkaitan dengan kelompok kriminal terorganisir

Banyak bentuk kejahatan satwa liar dan kehutanan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kejahatan terorganisir. Beberapa kelompok kriminal terorganisir secara sistematis terlibat dalam kegiatan ilegal di sektor satwa liar dan kehutanan dan beroperasi lintas batas. Anggota kelompok tersebut dapat menempati peran yang berbeda : beberapa mungkin secara fisik melakukan kejahatan yang ditetapkan dengan memburu satwa liar, menyelundupkan barang selundupan atau memalsukan dokumen, sementara yang lain bertindak sebagai alat bantu atau pendukung, atau sebagai penyelenggara dan direktur yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kejahatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) menetapkan partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir sebagai kejahatan tersendiri. Tujuan utama Pasal 5 UNTOC adalah untuk menetapkan kejahatan yang menciptakan tanggung jawab pidana bagi orang-orang yang dengan sengaja berpartisipasi atau berkontribusi pada kegiatan kriminal kelompok kejahatan terorganisir. Penetapan kejahatan ini dimaksudkan untuk mengatasi kejahatan terorganisir pada intinya dengan mengkriminalisasi tindakan yang melibatkan partisipasi atau kontribusi kepada kelompok kejahatan terorganisir. Tujuan lain dari Pasal 5 adalah untuk memperluas tanggung jawab pidana untuk berbagai cara di mana

Seseorang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan serius yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, termasuk sebagai penyelenggara, direktur, dan sebagai pihak yang membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau memberikan saran terkait pelaksanaan kejahatan serius yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir. Hal ini memungkinkan Negara untuk meminta pertanggungjawaban pada mereka yang merencanakan, mendalangi, membentuk, membiayai, atau secara aktif mendukung kegiatan kriminal kelompok kejahatan terorganisir tetapi yang mereka sendiri tidak melakukan, atau belum melakukan, tindak pidana tertentu. Dalam Pasal 2(a) UNTOC mendefinisikan "kelompok kejahatan terorganisir" yang berarti kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau kejahatan serius yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya.

"Kejahatan serius" didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 2(b) sebagai "perilaku yang merupakan kejahatan yang dapat dihukum dengan perampasan kebebasan maksimum setidaknya empat tahun atau hukuman yang lebih serius". Kriteria ini sangat penting untuk definisi ruang lingkup penerapan Konvensi karena, ketika kejahatan tertentu mencapai ambang batas ini, Negara pihak dapat mengaktifkan ketentuan kerja sama internasional yang terkandung dalam instrumen internasional yang mengikat secara hukum.

Pendekatan yang diadopsi oleh Negara untuk mengkriminalisasi partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir bervariasi tergantung pada latar belakang sejarah, politik, dan hukum. Secara tradisional, yurisdiksi hukum umum sebagian besar mengandalkan kejahatan berupa konspirasi sementara yurisdiksi hukum perdata mengembangkan kejahatan berasosiasi dengan kriminal. Hal ini tercermin dalam Pasal 5(1)(a)(i) (tindak pidana perjanjian) dan Pasal 5(1)(a)(ii) (tindak pidana asosiasi) masing-masing.

Apakah ketentuan domestik berdasarkan Pasal 5 UNTOC berlaku untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan demikian tergantung pada apakah kejahatan ini dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dengan perampasan kebebasan maksimum setidaknya empat tahun. Negara-negara pihak dalam UNTOC telah didesak oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan Konferensi Para Pihak CITES untuk menjadikan perdagangan satwa liar sebagai kejahatan serius, sebagaimana didefinisikan dalam UNTOC.⁴⁴



ALAT
I.39

Partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir

- » Apakah partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional?
Jika demikian, dalam hukum mana kejahatan ini dapat ditemukan? Apa saja unsur-unsurnya?
- » Apakah kejahatan ini meluas ke semua kejahatan serius? Apakah kejahatan satwa liar dan kehutanan dianggap sebagai kejahatan serius menurut hukum nasional?
- » Apakah kejahatan ini meluas ke mereka yang memimpin, mengarahkan atau membiayai kelompok kejahatan terorganisir?
- » Apakah tanggung jawab atas kejahatan ini meluas ke mencoba, membantu, Bersekongkol, memfasilitasi, dan memberikan saran terkait pelaksanaan kejahatan ini?
- » Apa hukuman hukum untuk kejahatan ini?

⁴⁴ E/RES/2013/40; Resolusi Conf. 11.3 (Pdt. CoP17).

5.7 Obstruksi keadilan

Mereka yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan, khususnya kelompok kejahatan terorganisir dan mereka yang terlibat dalam korupsi, dapat mempertahankan atau memperluas kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh mereka dengan berusaha merusak sistem peradilan. Ancaman, paksaan, dan kekerasan kadang-kadang digunakan untuk memutarbalikkan jalannya keadilan, termasuk dengan menciptakan atau menyajikan bukti palsu, memberikan kesaksian palsu atau dengan mempengaruhi atau mengintimidasi saksi dalam proses pidana yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini mungkin juga termasuk menggunakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum, hakim, atau jaksa.

Pasal 23 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan Pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) mengkriminalisasi obstruksi keadilan. Di bawah dua Konvensi, obstruksi keadilan mencakup penggunaan bujukan, kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu saksi dan pejabat peradilan atau penegak hukum yang perannya adalah untuk menghasilkan bukti dan kesaksian yang akurat.

Obstruksi keadilan

- » Apakah Obstruksi keadilan (atau memutarbalikkan jalannya keadilan) merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional? Di mana itu dikriminalisasi? Apa saja unsur-unsur kejahatan ini?
- » Apakah kejahatan tersebut mengkriminalisasi
 - Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau untuk ikut campur dalam pemberian kesaksian atau produksi bukti dalam Persidangan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan;
 - Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan Tugas resmi oleh hakim atau pejabat penegak hukum sehubungan dengan pelaksanaan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apa hukuman untuk kejahatan ini?





Untuk sepenuhnya memahami ruang lingkup dan operasi kejahatan satwa liar dan kehutanan tertentu, serta memfasilitasi dan memungkinkan kejahatan, di bawah hukum nasional, perlu untuk mendapatkan pemahaman umum tentang sumber-sumber hukum pidana domestik, prinsip-prinsip utamanya, dan ruang lingkup tanggung jawab pidana

Ini termasuk, antara lain, unsur-unsur kejahatan, perluasan dan batasan tanggung jawab pidana, pembelaan umum, batasan dan ketentuan yang berlaku untuk anak-anak dan hukum entitas (perusahaan), beban pembuktian dan aplikasi geografis. Terlepas dari jenis kejahatan yang terlibat, aturan dan prinsip umum ini menetapkan cara di mana tanggung jawab pidana ditetapkan dan menjelaskan organisasi, ruang lingkup, dan operasi kejahatan yang relevan, termasuk yang berhubungan, secara langsung atau tidak langsung, dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Perangkat ini tidak dirancang untuk melakukan analisis komprehensif tentang sistem hukum, aturan umum hukum pidana atau semua kejahatan khusus dalam satu yurisdiksi. Bagian berikut menyoroti prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi pertanggungjawaban pidana atas kejahatan satwa liar dan kehutanan. Perlu ditekankan bahwa analisis sistem peradilan pidana harus dibuat khusus, karena sistem hukum masing-masing negara dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana dengan cara yang berbeda dan di bawah sebutan dan definisi yang berbeda.

6.1 Sumber hukum pidana

Bergantung pada yurisdiksinya, prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban pidana—bersama dengan kejahatan khusus—ditetapkan dalam satu undang-undang atau serangkaian undang-undang, atau, tergantung pada sistem hukum, dalam kasus hukum. Sumber dan prinsip hukum pidana selanjutnya dapat mengikuti tradisi atau sistem tertentu, seperti sistem hukum umum, tradisi hukum perdata, atau hukum pidana sosialis; Ini mungkin mencerminkan sistem hukum yang diperkenalkan oleh kekuatan eksternal sebelumnya atau dapat mengadopsi sistem hibrida.

Selain itu, di sebagian besar yurisdiksi, hukum pidana dibuat oleh otoritas nasional (atau federal) seperti parlemen. Namun, di beberapa yurisdiksi, tingkat yang lebih rendah seperti badan legislatif negara bagian, provinsi, atau wilayah memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang pidana. Dalam beberapa sistem, hukum pidana dapat dibuat dengan ordonansi atau keputusan presiden.

Sumber hukum pidana

- Tingkat pemerintahan mana yang memiliki wewenang untuk memberlakukan hukum pidana?
- Dalam hukum atau hukum Manakah prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban pidana ditetapkan?
- Kapan undang-undang ini/undang-undang ini pertama kali diberlakukan? Kapan terakhir kali diubah ?
- Apa peran hukum kasus dalam Artikulasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana?
- Tradisi dan sistem hukum apa yang diikuti oleh hukum pidana domestik?
- Bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?



6.2 Prinsip pertanggungjawaban pidana

Di hampir semua yurisdiksi, terlepas dari sistem hukum mereka, tanggung jawab pidana didasarkan pada unsur-unsur yang mencerminkan kerugian yang ditimbulkan dan kesalahan terdakwa. 'Blok bangunan' ini biasanya disebut sebagai elemen fisik atau *actus reus* dari kejahatan (yang berhubungan dengan apa yang telah dilakukan terdakwa, dalam keadaan apa dan dengan konsekuensi apa) dan elemen mental atau *mens rea* (yang mengacu pada keadaan pikiran dan kesalahan terdakwa). Pembelaan berfungsi untuk memaafkan atau membenarkan kejahatan dalam keadaan tertentu.

Membangun *mens rea*

Sebagian besar hukum umum dan yurisdiksi hukum perdata memerlukan bukti kesalahan untuk kejahatan pidana. Sebelum seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, penuntut harus membuktikan *mens rea*, atau unsur-unsur mental, dari kejahatan tersebut. Ini didasarkan pada prinsip bahwa orang tidak boleh dihukum karena sesuatu yang tidak mereka maksudkan, tidak tahu, atau tidak sadari.

Dalam menentukan ruang lingkup penerapan kejahatan satwa liar dan kehutanan, penting untuk memutuskan apakah hanya kejahatan yang telah dilakukan dengan sengaja, sadar atau sembrono, yang harus dihukum atau apakah tanggung jawab atas suatu kejahatan harus berlaku dalam semua kasus, bahkan ketika orang yang bersangkutan lalai atau tidak memiliki kesadaran apa pun bahwa tindakannya melanggar hukum.

Tanpa pengakuan, mungkin sulit untuk membuktikan *mens rea*, terutama ketika diperlukan untuk menetapkan bahwa terdakwa menginginkan hasil tertentu atau mengetahui fakta tertentu. Beberapa yurisdiksi memungkinkan untuk menyimpulkan pengetahuan, maksud, atau elemen mental subjektif lainnya yang diperlukan dari bukti (tidak langsung) lainnya. Ini akan sejalan dengan, misalnya, Pasal 5, Ayat 2, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), yang menyatakan bahwa "pengetahuan, maksud, tujuan atau kesepakatan dapat disimpulkan dari keadaan faktual objektif". Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 28 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC).

Beberapa sistem hukum menggunakan konsep 'strict liability', di mana bentuk-bentuk perilaku tertentu dikriminalisasi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur mental. Ini dapat memudahkan pekerjaan otoritas investigasi dan penuntutan dan secara teori dapat merupakan penjera yang lebih besar. Namun, tanggung jawab ketat (yaitu tanggung jawab tanpa kesalahan) kontroversial dan tidak dapat diterima dalam beberapa sistem hukum pidana. Sistem kejahatan administratif kemudian dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap tindak pidana untuk mengatasi perilaku berbahaya terhadap satwa liar dan sumber daya hutan, di mana bukti unsur subjektif tidak dimungkinkan.



ALAT
I.42

Bukti Mens Rea

- Elemen Mental apa (Mens rea) yang diperlukan untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- Apakah hukum pidana menganggap bahwa setiap kejahatan memerlukan pembuktian unsur-unsur Mental (seperti niat, pengetahuan, atau Kecerobohan)?
- Apakah hukum pidana mengizinkan pertanggungjawaban pidana muncul tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan? Apakah konsep Tanggung jawab ketat tersedia? Dalam keadaan apa tanggung jawab tanpa kesalahan dapat muncul? Apakah itu digunakan dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- Apakah hukum pidana nasional mengizinkan penggunaan keadaan faktual objektif untuk membuktikan unsur-unsur Mental Subjektif seperti niat, pengetahuan, dan sebagainya? Apakah diperbolehkan untuk menyimpulkan unsur-unsur Mental Subjektif dari kejahatan satwa liar dan hutan yang relevan dari keadaan faktual objektif?

6.3 Perluasan tanggung jawab pidana

Pertanggungjawaban pidana biasanya tidak terbatas pada kejahatan yang telah selesai dan meluas ke orang-orang yang mencoba, bersekongkol, menghasut atau berpartisipasi dalam tindak pidana. Perluasan ini memungkinkan penuntutan terhadap pelanggar yang mencoba tetapi gagal, yang merupakan pendukung untuk kejahatan orang lain atau yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan yang relevan. Ini bisa sangat relevan dalam konteks beberapa kejahatan satwa liar dan kehutanan dan dapat menghentikan beberapa pelaku sebelum mereka menyebabkan kerusakan, membahayakan hewan apa pun, menghancurkan tanaman dan sebagainya.

Tanggung jawab atas upaya berfungsi untuk menghukum mereka yang berniat melakukan kejahatan, yang melakukan lebih dari sekadar tindakan persiapan, tetapi yang tidak berhasil dalam melakukan kejahatan yang dimaksudkan. Tanggung jawab atas upaya juga dapat timbul jika penuntut tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan lengkap karena bukti yang relevan hilang atau karena kegiatan yang direncanakan ditelantarkan, dibatalkan, diinterupsi atau kemungkinan besar akan gagal sejak awal.

Tanggung jawab atas hasutan mencakup situasi di mana seseorang mencoba membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penghasut untuk dilakukan oleh orang lain. Adalah kejahatan untuk menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan, bahkan jika kejahatan itu tidak dilakukan dan bahkan jika hasutan itu tidak berpengaruh pada individu yang menghasut kejahatan. Tergantung pada keadaannya, perilaku tersebut dapat menyamai, atau sama dengan, korupsi.

Konspirasi berfungsi untuk mengkriminalisasi kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum di mana ada niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum itu.

Tanggung jawab sekunder memperluas kriminalisasi di luar pelaku utama untuk menangkap pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama-sama atau yang berkontribusi pada pelaksanaan tindak pidana oleh orang lain. Tanggung jawab sekunder berlaku untuk orang-orang yang merupakan pihak dalam kejahatan utama tetapi yang mereka sendiri tidak bertanggung jawab secara pidana sebagai pelaku utama. Alasan untuk memperluas tanggung jawab di luar pelaku utama adalah bahwa seseorang yang mempromosikan atau membantu dalam melakukan kejahatan patut disalahkan sama seperti orang yang benar-benar melakukannya.

Oleh karena itu, tanggung jawab pidana untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan harus meluas ke orang-orang yang mencoba atau menghasut kejahatan tersebut atau yang merupakan peserta atau kaki tangan dalam kejahatan tersebut. Di sebagian besar yurisdiksi, ruang lingkup dan kriteria untuk perluasan tanggung jawab pidana ini diatur dalam ketentuan di bawah hukum pidana umum. Jika tidak, undang-undang satwa liar dan kehutanan tertentu mungkin perlu dicermati

Perluasan tanggung jawab pidana

- Apakah upaya dan hasutan terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan dikriminalisasi? Jika demikian, di mana dan apa Persyaratan untuk menetapkan tanggung jawab tersebut?
- Apakah tanggung jawab atas kejahatan satwa liar dan kehutanan meluas ke orang-orang yang membantu, bersekongkol, memberikan saran atau memfasilitasi kejahatan, serta kepada kaki tangan lainnya? Apa Persyaratan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada orang sebagai peserta atau pendukung?
- Apakah tanggung jawab atas kejahatan satwa liar dan kehutanan meluas ke orang-orang yang Bersekongkol untuk melakukan kejahatan tersebut? Apa Persyaratan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang sebagai ko-konspirator?



6.4 Tanggung jawab badan hukum

Kejahatan satwa liar dan kehutanan sering dilakukan melalui atau di bawah naungan badan hukum, seperti korporasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin terlibat langsung dalam penebangan liar, pemrosesan ilegal atau pengangkutan bahan hewan atau tumbuhan, atau dalam impor, ekspor, atau penjualan fauna dan flora ilegal. Dalam kasus yang lebih kompleks, struktur perusahaan dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya, klien atau transaksi tertentu yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan mulai dari penyelundupan hingga pencucian uang dan korupsi.

Legal personality adalah karakteristik organisasi yang memiliki beberapa – tetapi tidak harus semua – hak dan kewajiban orang perseorangan di yurisdiksi tertentu. Perdebatan kuno tentang apakah badan hukum dapat memikul tanggung jawab atas kejahatan telah bergeser ke pertanyaan tentang bagaimana mendefinisikan dan mengatur tanggung jawab tersebut. Rezim hukum nasional tetap cukup beragam dalam cara-cara di mana mereka menangani masalah tanggung jawab badan hukum, bagaimana mengaitkan tanggung jawab atau kesalahan dan bagaimana menentukan sanksi, dengan beberapa Negara menggunakan hukuman pidana terhadap organisasi itu sendiri, seperti denda, penyitaan properti atau perampasan hak hukum, sedangkan yang lain menggunakan tindakan non-kriminal atau kuasi-pidana.

Pasal 10 Konvensi *Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional* (UNTOC) dan Pasal 26 Konvensi *Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi* (UNCAC) mengharuskan Negara-negara Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas kejahatan berdasarkan konvensi ini. Tunduk pada prinsip-prinsip hukum yurisdiksi, tanggung jawab tersebut dapat berupa pidana, perdata atau administratif.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab paling serius yang dapat dikenakan negara kepada badan hukum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan persidangan di pengadilan pidana, tingkat sanksi potensial yang tinggi dan tingkat perlindungan prosedural yang tinggi bagi terdakwa. Pertanggungjawaban pidana suatu badan hukum berpotensi menyebabkan kerusakan reputasi yang merugikan bagi badan tersebut dan juga dapat menghalangi badan hukum untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.

Tanggung jawab perdata dan administratif bagi badan hukum adalah pilihan yang tersedia untuk sistem hukum yang tidak mengakui kapasitas badan hukum untuk melakukan tindak pidana. Meskipun istilah-istilah ini memiliki arti yang berbeda, di beberapa Negara mereka digunakan secara bergantian. Tanggung jawab perdata mengacu pada hukuman perdata yang dijatuhkan oleh pengadilan atau badan serupa. Tanggung jawab administratif umumnya dikaitkan dengan tanggung jawab yang dikenakan oleh regulator, meskipun dalam beberapa sistem hukum badan peradilan dapat menjatuhkan hukuman administratif. Seperti tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif tidak menghasilkan hukuman pidana. Tanggung jawab perdata dan administratif keduanya umumnya dikaitkan dengan standar pembuktian yang lebih rendah daripada tanggung jawab pidana.⁴⁵ Terlepas dari jenis tanggung jawab yang digunakan, tanggung jawab badan hukum harus ditetapkan tanpa mengurangi tanggung jawab pidana dari orang-orang perseorangan yang melakukan kejahatan.

⁴⁵ UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 12.

Menetapkan tanggung jawab untuk badan hukum mengharuskan Negara untuk juga memperkenalkan hukuman dan sanksi yang sesuai untuk badan hukum. Hukuman yang terkait dengan tanggung jawab pidana badan hukum dapat mencakup perintah agar badan hukum dibubarkan, dikecualikan dari penawaran umum atau hak atas manfaat atau bantuan publik, didiskualifikasi atau dilarang berpartisipasi dalam pengadaan publik atau praktik tertentu kegiatan komersial, sosial atau profesional, didiskualifikasi dari membentuk badan hukum lain, diharuskan untuk mempublikasikan putusan pengadilan, atau diharuskan untuk menutup satu atau lebih dari pendirian badan hukum.⁴⁶ Bab III, Bagian 4 dari Perangkat ini menetapkan alat lebih lanjut sehubungan dengan hukuman dan vonis.

Pembentukan tanggung jawab hukum badan hukum juga harus mempertimbangkan apakah uji tuntas diterapkan atau tidak. Uji tuntas mengacu pada langkah-langkah yang diambil badan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum tertentu. Meskipun apa yang diperlukan oleh uji tuntas mungkin berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain, umumnya melibatkan sistem manajemen risiko untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. Dalam konteks hukum pidana, apakah badan hukum telah menerapkan kebijakan uji tuntas atau tidak dapat berfungsi sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan. Di beberapa Negara, bukti uji tuntas memberikan pembelaan mutlak kepada badan hukum. Di Negara lain, uji tuntas mungkin merupakan faktor yang relevan dengan pelaksanaan kebijaksanaan kejaksaan dalam membawa kasus terhadap badan hukum atau dapat memberikan faktor yang meringankan dalam hukuman.



ALAT I.44

Tanggung jawab badan hukum

- Dapatkah badan hukum dianggap bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana badan hukum didefinisikan; Apakah ini mencakup entitas publik?
- Apakah penuntutan korporasi merugikan penuntutan individu?
- Jenis sanksi apa yang bisa dijatuhkan pada korporasi?
- Apakah uji tuntas badan hukum dapat menjadi faktor pembelaan atau mitigasi dalam suatu penuntutan?
- Jika pertanggungjawaban pidana korporasi tidak ada, apakah mungkin untuk menjatuhkan sanksi Perdata atau administratif pada korporasi?

⁴⁶ UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 12.

II

PENEGAKAN

Bab II



Penegakan hukum melibatkan setiap tindakan pemerintah yang diambil untuk menentukan atau menanggapi ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Ini adalah salah satu cara utama, paling cepat, dan paling terlihat untuk menghentikan kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Penegakan hukum meningkatkan risiko bagi pelaku melalui kemungkinan tertangkap, kemungkinan pemidanaan, dan sanksi yang berlaku jika terbukti bersalah. Oleh karena itu, polisi, petugas penegak satwa liar dan kehutanan yang dihormati dan sangat terampil, dan layanan kontrol perbatasan adalah prasyarat untuk berjalannya fungsi sebagaimana mestinya dan terciptanya persepsi positif tentang keadilan.

Pendekatan untuk penegakan hukum sangat bervariasi di antara yurisdiksi. Pemolisian sektor satwa liar dan kehutanan sering melibatkan berbagai lembaga dengan mandat, tujuan, wewenang, teknik dan prosedur investigasi yang berbeda. Di beberapa yurisdiksi, penegakan hukum sangat terpusat, sementara di tempat lain mungkin terdesentralisasi dan melibatkan masyarakat lokal. Cara penegakan hukum dilakukan di sektor satwa liar dan kehutanan tergantung pada sejumlah variabel, termasuk sistem dan keadaan politik, ekonomi dan budaya yang berlaku, serta norma sosial dan tradisi lokal. Mekanisme penegakan hukum berdasarkan adat atau budaya nasional, atau pada hierarki sosial alternatif, mungkin juga ada, terutama di mana kurangnya kepercayaan pada keadilan dan efisiensi sistem resmi lazim terjadi.

Seperti yang ditunjukkan dalam Bab I, Bagian 4 dari Perangkat ini, kejahatan satwa liar dan kehutanan sering melibatkan kejahatan kompleks yang terdiri dari banyak penjahat, dengan banyak insiden melintasi perbatasan nasional. Ini juga dapat difasilitasi/diaktifkan oleh atau terjadi bersama dengan kejahatan lain termasuk korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan obstruksi keadilan. Hal ini dapat membuat penegakan hukum yang tepat dan efektif menjadi lebih menantang. Menyelidiki kejahatan satwa liar dan hutan melibatkan kombinasi metode proaktif, disruptif, dan reaktif. Ini bisa berupa proses intensif waktu dan sumber daya yang seringkali membutuhkan kerja sama domestik dan internasional di antara berbagai lembaga, serta penyelidikan keuangan paralel (dan terkadang lingkungan), ditambah dengan pelatihan ekstensif dalam berbagai disiplin ilmu.

Bab II dari Perangkat ini berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai komponen dari sistem penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan satu yurisdiksi dan memeriksa kapasitasnya untuk mendeteksi dan menyelidiki kegiatan kriminal yang relevan. Ini melibatkan, pertama, garis besar lembaga penegak hukum yang relevan, sumber daya manusia dan kekuatan penegakan hukum mereka. Selanjutnya, eksplorasi alat, teknik, dan prosedur yang tersedia yang digunakan untuk mengumpulkan intelijen dan menyelidiki kejahatan satwa liar dan hutan ditawarkan. Peran khusus otoritas perbatasan dan bea cukai, dan masalah akuntabilitas dan integritas, dicermati pada akhir Bagian II.

1

Bagian II

Lembaga penegak hukum

Langkah pertama dalam menganalisis kapasitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan melibatkan pemahaman tentang struktur makro penegakan hukum dan peran serta tanggung jawab pemangku kepentingan yang berbeda, baik nasional maupun lokal.



Penting untuk memberikan kejelasan kepada 'siapa adalah siapa' dan 'siapa yang melakukan apa' dalam penegakan hukum satwa liar dan kehutanan, karena keraguan tentang mandat dan wewenang untuk menegakkan hukum yang relevan dapat menyebabkan kesulitan, kesenjangan, atau duplikasi.

1.1 Struktur penegakan

Penanganan kejahatan satwa liar dan kehutanan biasanya melibatkan berbagai sektor pemerintah. Di sebagian besar yurisdiksi, ada lebih dari satu entitas yang bertanggung jawab untuk menegakkan banyak aspek satwa liar, hutan, adat istiadat dan hukum pidana yang relevan dan undang-undang lainnya. Seringkali ada beberapa badan nasional, organisasi atau lembaga, serta lembaga regional atau lokal, yang menawarkan cakupan komplementer atau serupa. Bahkan di yurisdiksi dengan satu kepolisian nasional, kemungkinan akan ada organisasi penegak hukum tambahan dengan keterampilan yang sangat terspesialisasi atau dengan fungsi khusus, seperti unit penegakan satwa liar dan kehutanan, bea cukai, polisi perbatasan dan sebagainya.

Di beberapa yurisdiksi, petugas satwa liar, hutan, dan bea cukai mungkin tidak memiliki kekuatan penegakan hukum berdasarkan hukum pidana, dan harus menyerahkan tersangka dan barang selundupan kepada polisi segera setelah mereka ditangkap. Sebaliknya, di negara lain, pejabat bea cukai berwenang untuk menggunakan kekuasaan polisi atau sebaliknya.

Yurisdiksi dengan struktur federal sering kali memiliki beberapa lapisan penegakan hukum, dengan satu lembaga penegak hukum federal yang melengkapi pasukan polisi lokal, provinsi atau negara bagian. Pasukan polisi federal/nasional umumnya berwenang untuk menangani masalah kriminal yang menjadi perhatian nasional atau yang memiliki implikasi antarnegara bagian. Kejahatan impor dan ekspor, termasuk yang melibatkan satwa liar dan tumbuhan (mati atau hidup), biasanya termasuk dalam kategori ini. Kerangka acuan dan mandat untuk berbagai yurisdiksi dan bidang kompetensi yang terlibat mungkin tidak selalu sejelas yang seharusnya, dan ada potensi bentrokan antara pendekatan lokal dan federal.



Struktur penegakan

- » Bagaimana penegakan hukum disusun secara nasional?
- » Lembaga mana yang bertanggung jawab atas Pemolisian nasional, negara bagian/provinsi, dan lokal?
- » Lembaga mana yang bertanggung jawab atas penegakan hukum satwa liar dan kehutanan ?
- » Apakah ada satuan Tugas antarlembaga atau lembaga lain yang bekerja pada satwa liar, kehutanan, Lingkungan atau kejahatan terkait?
- » Kementerian pemerintah mana yang mengendalikan penegakan hukum satwa liar dan hutan?
- » Apakah Ada Strategi kejahatan satwa liar dan hutan nasional, rencana aksi, atau kebijakan lain yang memandu upaya penegakan hukum?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid Saya Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 6–7

1.2 Penegakan Mandat dan direksi

Setelah struktur makro penegakan hukum telah diidentifikasi, perlu untuk menguraikan dan memeriksa masing-masing lembaga yang ditugaskan untuk penegakan satwa liar, hutan, bea cukai, dan tindak pidana lainnya yang relevan.⁴⁷ Di beberapa yurisdiksi, badan polisi umum mungkin bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan. Di tempat lain, departemen kehutanan, pertanian atau perbendaharaan, bea cukai, penjaga pantai atau badan lingkungan dapat menjalankan fungsi ini, secara keseluruhan atau sebagian. Penegakan undang-undang yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) kadang-kadang diberikan dalam layanan bea cukai atau di lembaga khusus lainnya. Di beberapa yurisdiksi, mandat penegakan ditentukan oleh keseriusan kejahatan, sehingga kepolisian ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan (serius), sementara pejabat satwa liar dan kehutanan menangani kejahatan ringan (yang kurang serius). Mungkin juga terjadi bahwa beberapa fungsi penegakan didelegasikan atau dialihdayakan ke perusahaan keamanan swasta;⁴⁸ Di tempat lain, militer dapat menjalankan fungsi penegakan hukum sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan.⁴⁹ Keragaman dalam mandat penegakan hukum di dalam dan di antara yurisdiksi ini menambah kompleksitas dan kesulitan dalam menyelidiki dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan membuat kerja sama internasional lebih menantang.

kerja sama awal dan erat antara otoritas terkait seperti lembaga penegak hukum satwa liar dan hutan, polisi, bea cukai, unit intelijen keuangan, lembaga antikorupsi, dan jaksa penuntut umum sangat penting untuk penyelidikan yang kompleks dan multi-cabang terhadap kelompok kriminal terorganisir. Pembentukan tim penegak hukum satwa liar dan kehutanan multi-lembaga khusus juga memungkinkan pengumpulan keahlian dan sumber daya dalam unit khusus, daripada mencoba mencapai tingkat yang luas dan umum penegakan hukum di seluruh negeri. Penggunaan tim multi-lembaga dapat meningkatkan integritas investigasi dan mencegah risiko korupsi karena hierarki pelaporan yang terpisah di berbagai lembaga yang terlibat. Selain itu, keterlibatan dengan lembaga hak asasi manusia nasional dan organisasi lain yang berfokus pada hak asasi manusia dapat membantu memastikan, antara lain, upaya penegakan hukum menghormati kewajiban Negara di bidang ini.

Keterlibatan lembaga antikorupsi dalam menyelidiki kasus kejahatan satwa liar dan kehutanan di mana kegiatan terkait korupsi telah diidentifikasi atau dicurigai dapat membantu membangun kasus yang lebih kuat dan dapat mengakibatkan pelaku didakwa dengan kejahatan terkait korupsi di samping kejahatan satwa liar dan kehutanan. Di mana satwa liar dan otoritas kehutanan sendiri memiliki kekuatan untuk melakukan penyelidikan korupsi, lembaga anti-korupsi dapat menawarkan keahlian dan kapasitas mereka dalam mendukung.

⁴⁷ Lihat Bab I, Bagian 4 dan 5 dari Perangkat ini.

⁴⁸ Lihat Bab II, Bagian 1.8 dari Perangkat ini.

⁴⁹ Lihat Bab II, Bagian 1.5 dari Perangkat ini.

Lembaga kepolisian umum sering terkendala oleh staf dan anggaran yang terbatas dan dengan demikian mungkin tidak dapat secara memadai memprioritaskan penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan vis-à-vis jenis kejahatan lainnya. Sebagai poin umum, kehadiran unit penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan khusus sangat penting untuk memastikan bahwa penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan menerima tingkat perhatian yang serupa dengan arus utama investigasi kriminal.

Mandat penegakan

- » Apakah yurisdiksi masing-masing lembaga jelas atau ada Disjungsi?
- » Apa tanggung jawab masing-masing lembaga dalam kaitannya dengan penegakan hukum satwa liar dan kehutanan? Apakah tugas-tugas instansi terkait didefinisikan dan dipahami dengan jelas oleh stafnya dan instansi yang berinteraksi dengan mereka?
- » Apakah lembaga-lembaga ini memiliki wewenang atau diskresi yang memadai untuk menjalankan fungsinya dengan benar?
- » Apakah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum telah menerima Pelatihan yang tepat dalam hak asasi manusia?
- » Lembaga mana yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan undang-undang antikorupsi? Undang-undang mana yang memberdayakan lembaga? Apakah badan-badan tersebut memiliki unit atau staf khusus yang didedikasikan untuk menyelidiki kegiatan korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah badan satwa liar dan kehutanan memiliki wewenang untuk menyelidiki kegiatan korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, undang-undang apa yang memberdayakan lembaga tersebut? Jika tidak, apa yang terjadi ketika lembaga-lembaga tersebut mengidentifikasi atau Mencurigai adanya kegiatan korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar?
- » Apakah lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari satu atau beberapa Kementerian pemerintah? Kementerian mana yang terlibat?
- » Bagaimana lembaga dibiayai? Untuk apa anggaran mereka dihabiskan? Di mana secara spesifik kekurangan dan kebutuhan Pendanaan?
- » Siapa yang memiliki kendali atas lembaga-lembaga ini? Siapa yang menilai dan meninjau fungsinya?
- » Jika ada lembaga atau departemen khusus, apakah mereka terdiri dari Perorangan dari sejumlah lembaga yang berbeda?
- » Apakah ada lembaga yang didedikasikan khusus untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan atau apakah mereka juga memiliki tanggung jawab untuk jenis kejahatan lain (misalnya, narkoba, kejahatan terorganisir atau pencucian uang)?
- » Apakah lembaga yang sama atau lain bertanggung jawab atas penegakan CITES?
- » Apakah Tim, satuan, atau satuan tugas Multi-Lembaga telah dibentuk secara khusus untuk menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, lembaga mana yang terlibat, bagaimana mereka bekerja sama; Apa sumber daya manusia, keuangan, teknis, dan lainnya dari Tim-Tim ini?

Di negara-negara dengan sistem federal, pertanyaan tambahan mungkin muncul tentang bagaimana penyelidik lokal, provinsi dan negara bagian bekerja sama dengan petugas penegak hukum federal. Dalam keadaan seperti itu, diperlukan perjanjian atau protokol yang jelas untuk menentukan yurisdiksi masing-masing.

Umumnya, mandat pemolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan penegakan hukum tertentu kepada instansi terkait. Misalnya, undang-undang bea cukai dapat memberdayakan administrasi perbatasan dan bea cukai, departemen dalam negeri atau lembaga serupa dengan menegakkan tindakan terhadap kejahatan perbatasan.





ALAT II.3

Dasar hukum Mandat penegakan

- » Undang-undang atau peraturan mana yang menetapkan tanggung jawab untuk menegakkan undang-undang satwa liar, kehutanan, dan terkait kepada lembaga tertentu?
- » Apakah undang-undang menetapkan dan membedakan Antara peran lembaga yang berbeda dalam melakukan Pemolisian?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume I Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 3–5 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 6–8

1.3 Manajemen CITES

1.3.1 Otoritas Manajemen CITES

Elemen penting dari kerangka kerja CITES adalah penciptaan atau identifikasi lembaga nasional yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan kewajiban CITES. 50 Pasal IX, Ayat 1 (a), Konvensi mengharuskan masing-masing Pihak untuk menunjuk, pada saat aksesi ke CITES, sebuah badan domestik yang diamanatkan dengan manajemen CITES.

Tanggung jawabnya meliputi:

- Otorisasi dan penerbitan izin dan sertifikat persetujuan;
- Komunikasi Informasi kepada Pihak lain dan Sekretariat CITES; dan
- Pelaporan tentang kepatuhan terhadap CITES adalah penting.

Informasi ini kemudian tersedia untuk Sekretariat dan semua Pihak lainnya, sehingga membuat direktori.

Cara di mana Otoritas Manajemen CITES dibentuk diserahkan kepada kebijakan masing-masing Pihak. Di sebagian besar yurisdiksi, Otoritas Pengelola telah ditunjuk oleh keputusan administratif sederhana, sementara beberapa negara telah membentuk Otoritas melalui undang-undang. Di sebagian besar yurisdiksi, penegakan CITES tetap berada dalam mandat layanan bea cukai. Di beberapa yurisdiksi, Otoritas Pengelola CITES juga bertanggung jawab atas penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan spesies. Di tempat lain, badan margasatwa dan kehutanan lainnya menjalankan fungsi pengelolaan CITES.



ALAT II.4

Otoritas Manajemen CITES

- » Badan nasional mana yang ditunjuk sebagai Otoritas Pengelola CITES (jika negara tersebut adalah Pihak CITES)?
- » Apakah Otoritas Pengelola CITES memiliki fungsi penegakan? Jika tidak, lembaga mana yang ditugaskan untuk menegakkan kewajiban CITES? Apakah otoritas penegak hukum tersebut telah ditunjuk untuk Sekretariat CITES?
- » Bagaimana Otoritas Pengelola CITES bekerja sama dengan lembaga dan kementerian penegak hukum lain yang terlibat dalam penegakan dan pengelolaan hukum satwa liar dan kehutanan?

50 Lihat juga Bab I, Bagian 1.5 dari Perangkat ini.

1.3.2 Pelaporan CITES

Berdasarkan Pasal VIII, Ayat 6 CITES, Para Pihak diwajibkan untuk menyimpan catatan perdagangan spesies yang terdaftar di CITES. Mekanisme ini merupakan fitur penting dari penegakan dan kontrol yang efektif. Informasi yang dihasilkan dengan demikian berpotensi mengidentifikasi rute perdagangan ilegal dan menyoroti beberapa sumber utama, titik transit dan tujuan.

Sekretariat CITES telah menetapkan mekanisme untuk mengumpulkan catatan perdagangan dari Para Pihak dalam Konvensi dan informasi lain tentang implementasi dan kepatuhan CITES.⁵¹ Laporan harus diserahkan setiap tahun ke Sekretariat. CITES juga mengharuskan Para Pihak untuk menyerahkan laporan dua tahunan tentang langkah-langkah legislatif, peraturan dan administratif yang diambil untuk menegakkan ketentuan Konvensi, serta laporan perdagangan ilegal tahunan (AITRs).⁵²

Selain itu, Sekretariat CITES telah berusaha untuk mendapatkan gambaran umum tentang bentuk-bentuk spesifik kejahatan satwa liar dan kehutanan dan mengharuskan Negara-negara Pihak untuk menyerahkan laporan tentang perdagangan gelap. Misalnya, skema Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) dan Elephant Trade Information System (ETIS) telah mengumpulkan data tentang perburuan liar dan perdagangan gelap.

Pelaporan CITES

- » Apakah Otoritas Pengelola CITES (atau lembaga lain) menyimpan catatan perdagangan spesies yang terdaftar di CITES? Jika demikian, apakah catatan ini (untuk umum) tersedia? Apakah catatan perdagangan diserahkan ke Sekretariat CITES setiap tahun? Jika demikian, apakah catatan ini lengkap?
- » Apakah negara menyerahkan laporan dua tahunan tentang langkah-langkah legislatif, peraturan, dan administratif yang diambil untuk menegakkan ketentuan CITES?
- » Apakah negara telah mengirimkan Informasi tambahan kepada CITES tentang bentuk tertentu dari kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Jika catatan tidak disimpan atau Laporan tidak diserahkan ke Sekretariat CITES, apa alasan untuk tidak melakukannya?



1.4 Koordinasi dan kolaborasi nasional

Penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan biasanya melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan entitas lain dengan mandat dan wewenang investigasi yang berbeda. Investigasi juga dapat melibatkan interaksi dengan Manajemen CITES dan Otoritas Keilmuan, laboratorium khusus dan terakreditasi, organisasi masyarakat sipil dan organisasi sektor swasta. Keterlibatan jaksa atau otoritas kehakiman juga mungkin diperlukan pada tahap penyelidikan, tergantung pada sistem hukum dan undang-undang nasional.

Koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga — seringkali dengan mandat dan tujuan yang saling bertentangan atau berlawanan — tidak selalu mudah. Beberapa organisasi dan entitas mungkin enggan membantu lembaga penegak hukum karena kekhawatiran mereka akan kemungkinan mengasingkan konstituen mereka, karena prioritas mungkin berbeda, sumber daya yang cukup mungkin tidak tersedia, atau karena kendala hukum (misalnya, dalam hal informasi rahasia dan perlindungan data). Namun, menangani kejahatan satwa liar dan kehutanan secara terpisah, terutama tanpa persetujuan dari lembaga penegak hukum seperti polisi dan bea cukai, atau lembaga yang menegakkan hukum terkait dengan kejahatan yang memfasilitasi kejahatan satwa liar dan hutan, seperti lembaga antikorupsi, mengurangi kemampuan untuk secara efektif mengatasi penyebab dan konsekuensi dari fenomena ini.

⁵¹ Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah, Pasal. VIII, ayat. 7, dan Pasal. XII.
⁵² Laporan Perdagangan Ilegal Tahunan CITES . https://cites.org/eng/resources/reports/Annual_illegal_trade_report

Untuk alasan ini, koordinasi nasional, dan konsultasi serta kemitraan dengan pemangku kepentingan utama, sangat penting. Penting bagi para pemangku kepentingan utama untuk saling berkonsultasi dan membangun kemitraan untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan secara efektif. Lingkungan harus diciptakan di mana penyitaan dan penangkapan untuk kejahatan satwa liar dan hutan tidak berakhir di dalam dan dari diri mereka sendiri tetapi lebih terkait dengan perang yang lebih luas melawan kriminalitas serius. Penyitaan dapat, misalnya, diubah menjadi operasi pengiriman terkontrol untuk mendeteksi jaringan kriminal yang lebih luas.⁵³ Hal ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pejabat satwa liar dan kehutanan dan masyarakat penegak hukum yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional, yang berurusan dengan intelijen kriminal serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Mengingat potensi banyaknya instansi pemerintah dan badan-badan lain yang mungkin terlibat dalam penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan, sangat penting bahwa prosedur yang jelas bagi koordinasi dan kerja sama nasional dan internasional telah ditetapkan. Konsultasi dan Pembangunan kemitraan dapat terjadi di berbagai tingkatan dan dapat diformalkan dalam kerangka koordinasi nasional, nota kesepahaman (MoU), di panitia Struktur atau bersifat ad hoc dan informal, berdasarkan perubahan kebutuhan dan perkembangan. Di beberapa yurisdiksi, komite antar-departemen telah dibentuk untuk mengoordinasikan langkah-langkah kontrol dan penegakan hukum lintas sektor pemerintah. Bersamaan dengan koordinasi formal, semua lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan satwa liar dan kehutanan harus berbagi informasi yang relevan dan sering terlibat dalam komunikasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. kerja sama internasional dibahas secara terpisah di Bab IV Perangkat ini.



ALAT II.6

Pelaporan CITES

- » Mekanisme apa yang ada untuk memfasilitasi kerja sama antarlembaga nasional untuk memerangi dan mencegah kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Kemitraan apa yang ada di antara lembaga penegak hukum dan antara lembaga penegak hukum dan departemen layanan publik lainnya?
- » Apakah ada mekanisme untuk memungkinkan dan memfasilitasi kerja sama Antara administrasi satwa liar dan kehutanan, aparat penegak hukum, jaksa dan peradilan?
- » Apakah pengaturan tersebut mencakup ketentuan tentang berbagi data? Jika demikian, apakah ada protokol dan fasilitas yang memadai untuk tujuan itu?
- » Karena korupsi adalah Fasilitator utama kejahatan satwa liar dan kehutanan, kerja sama dan Kemitraan apa yang ada Antara otoritas satwa liar dan kehutanan dan lembaga antikorupsi?
- » Bagaimana Kemitraan ini bekerja dalam praktiknya? Apakah ada protokol tertulis, Mou, Komite dan lain sebagainya? Apakah kolaborasi terjadi tanpa penundaan yang tidak semestinya?
- » kerja sama apa yang ada Antara penegak hukum dengan lembaga pemerintah lainnya dan penyedia layanan bukan pemerintah, termasuk organisasi masyarakat?
- » Jika ada badan/komite koordinasi nasional, lembaga mana yang terwakili di dalamnya? Instansi/kantor mana yang mengetuai Badan/Panitia? Apa Tugas dan kewajiban badan/komite koordinasi nasional?

Sumber daya tambahan:

Resolusi CITES Conf. 18.6 – 4 tentang penunjukan dan peran Otoritas Manajemen INTERPOL dan WCO, Buku Pegangan kerja sama Bea Cukai–Polisi (2018)

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume I Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 17

UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 23

WCO dan Egmont Kelompok Buku Pegangan kerja sama Bea Cukai–FIU (2020)

⁵³ Lihat lebih lanjut Babd II, Bagian 5.1.1 dari Perangkat ini.

1.5 Keterlibatan militer

Di beberapa tempat, militer terlibat dalam penyelidikan, penuntutan dan adjudikasi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini mungkin terjadi di lokasi tertentu di mana unit penegak hukum reguler dan pengadilan sipil tidak hadir atau tidak dapat beroperasi, atau dalam kasus yang mungkin melibatkan fungsi tertentu yang memerlukan penggunaan peralatan yang hanya dipegang oleh militer. Selain itu, dalam situasi pasca-konflik, militer sering melakukan fungsi penegakan hukum yang cukup luas sementara otoritas negara reguler sedang dibentuk kembali, ditata ulang, dan dibangun kembali.

Penggunaan militer, unit militer yang ditunjuk, atau pengadilan militer untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan mungkin konfrontatif dan kontroversial karena sifat kekuatan, pelatihan, dan peralatan yang mereka miliki.

Personel militer memiliki berbagai keterbatasan terkait penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Mereka tidak terlatih dalam penegakan hukum dan dalam banyak aspek mencegah dan menekan satwa liar dan kejahatan hutan.⁵⁴ kerja sama dengan masyarakat lokal dan kemitraan publik-swasta mungkin lebih sulit dicapai jika militer terlibat. Konstitusi sebagian besar negara secara khusus membatasi penggunaan sumber daya militer untuk menjadi 'bantuan bagi otoritas sipil.' Jika bantuan tersebut digunakan, maka harus berada di bawah pengawasan dan arahan lembaga yang memiliki keutamaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum satwa liar dan kehutanan. Selain itu, sayangnya, ada banyak laporan tentang situasi di mana personel militer menyalahgunakan kekuasaan mereka, melakukan kejahatan hak asasi manusia, berkolusi dengan organisasi kriminal atau bahkan mengambil bagian aktif dalam memfasilitasi atau melakukan kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Mengenai penuntutan dan adjudikasi, ada konsensus umum bahwa yurisdiksi pengadilan militer harus dibatasi pada pejabat militer. Pengadilan warga sipil oleh pengadilan militer bertentangan dengan hak yang tidak dapat ditawar untuk mewujudkan pengadilan yang adil oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak sebagaimana ditetapkan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Karena Alasan ini maka Keterlibatan militer dalam penegakan hukum Satwa liar dan kehutanan harus benar-benar terbatas pada fungsi dan/atau ranah yang ditentukan, terbatas pada jenis kejahatan tertentu dan/atau personel, dan hanya boleh menjadi tindakan sementara hingga lembaga penegak hukum reguler dapat melaksanakan Fungsi tersebut.

Keterlibatan militer

- » Apakah militer (angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, penjaga pantai) atau satuannya terlibat dalam aspek apa pun dari penegakan hukum satwa liar dan kehutanan? Jika ya, apa fungsinya?
- » Jika demikian, bagaimana dan Kapan keterlibatan ini terjadi? Apakah ini tindakan sementara atau berupa pengaturan permanen?
- » Bagaimana keterlibatan militer dalam penegakan hukum satwa liar dan kehutanan diarahkan dan diawasi?
- » Apakah pengadilan militer telah memberikan Putusan atas kasus-kasus terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Jika demikian, apa tuntutan pidananya? Apakah ada warga sipil yang terlibat?
- » Apa hasil dan Pengalaman dari keterlibatan mereka?
 - Apakah keterlibatan ini berujung pada kejahatan HAM, atau dugaan kejahatan HAM? Jika demikian, apa tanggapannya?



⁵⁴ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 6.5 dari Perangkat ini.

1.6 Keterlibatan masyarakat dalam pemolisian

Keterlibatan masyarakat dalam pemolisian adalah strategi yang efektif dan produktif untuk menegakkan hukum di tingkat lokal. Di sektor satwa liar dan kehutanan, beberapa lembaga pemerintah mengerahkan penjaga hutan setempat, penjaga, dan petugas lainnya untuk berpatroli di cagar alam, memantau aktivitas penebangan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Beberapa negara telah melembagakan skema 'bush watch', mirip dengan program Neighbourhood Watch, yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah pencurian satwa liar dan untuk melindungi fauna dan flora asli.

Salah satu karakteristik keterlibatan masyarakat dalam pemolisian adalah penggunaan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Ini melibatkan dan mempekerjakan masyarakat dan struktur masyarakat dalam pendekatan kemitraan untuk mendiagnosis, mengidentifikasi, menanggapi, dan memecahkan masalah kejahatan satwa liar dan kehutanan yang mempengaruhi daerah setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pemolisian bergantung pada hubungan kerja yang efektif antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Membangun kemitraan di antara lembaga penegak hukum satwa liar dan kehutanan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memantau kepatuhan dapat membantu membatasi penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang atau berubah-ubah dan meningkatkan transparansi. Hubungan yang erat antara lembaga dan masyarakat juga dapat mendorong berbagi informasi dan pengembangan intelijen yang lebih baik, dan dapat memfasilitasi penyelidikan kejahatan. Struktur penegakan hukum mungkin memerlukan adaptasi untuk menjadi lebih konsultatif dan inklusif untuk mengembangkan hubungan dekat itu.

Sebagai strategi untuk mencegah dan menekan kejahatan satwa liar dan kehutanan, keterlibatan masyarakat dalam pemolisian bukanlah obat mujarab universal, tetapi mungkin sangat berguna di titik-titik asal di mana masyarakat setempat dipengaruhi oleh atau terlibat dalam industri satwa liar dan kehutanan, seperti cagar alam dan kawasan berburu, dan di daerah dengan kegiatan penebangan dan perburuan komersial. Di tempat-tempat ini, keterlibatan masyarakat dalam pemolisian dan pengelolaan sumber daya alam mereka⁵⁵ dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman, kecurigaan dan konflik di antara industri, petugas penegak hukum dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Keterlibatan semacam itu juga dapat menjadi alternatif untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama di bidang-bidang di mana kontrol negara lemah.

Anggota masyarakat juga dapat menjadi sumber informasi yang baik tentang kegiatan korupsi yang terjadi pada berbagai tahap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Untuk itu, satwa liar, hutan, dan lembaga antikorupsi harus membuat saluran yang akan mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan atau kejadian korupsi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, instansi terkait juga harus memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan dan program perlindungan whistle-blower yang efektif. Setiap informasi dari publik atau whistle-blower harus diperlakukan secara rahasia agar tidak membahayakan keselamatan mereka, dan lembaga terkait harus dapat menawarkan perlindungan yang memadai kepada para whistle-blower yang mungkin menemukan diri mereka dalam keadaan terancam setelah melaporkan kegiatan korupsi. Lembaga-lembaga tersebut harus menyadarkan masyarakat terdampak dan masyarakat luas terhadap tanggung jawab mereka untuk melaporkan, mencegah, dan mengatasi korupsi di sektor satwa liar dan kehutanan. Masyarakat juga harus disadarkan, secara umum, jika informasi yang diberikan oleh publik dapat membantu identifikasi kasus dan tersangka dan pengambilan tindakan lain.

⁵⁵ Lihat lebih lanjut Bab V, Bagian 3.3 dan 4.3 dari Perangkat ini.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemolisian

- » Apakah Ada Strategi Pemolisian masyarakat yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan hutan? Jika ya, apa yang termasuk di dalamnya? Apakah prioritas lokal dan ukuran kinerja ditetapkan?
- » Apakah pengaturan tersebut mencakup ketentuan tentang berbagi data? Jika demikian, apakah ada protokol dan fasilitas yang memadai untuk tujuan itu?
- » Apakah ada mekanisme yang didefinisikan secara formal di mana masyarakat sipil, organisasi masyarakat atau perwakilan mereka, dikonsultasikan tentang masalah pemolisian lokal? Seberapa sering ini terjadi dan dalam keadaan apa? Siapa yang terlibat? Apa hasil dari konsultasi tersebut?
- » Sudahkah lembaga satwa liar, kehutanan, dan antikorupsi membentuk sistem yang memungkinkan anggota masyarakat untuk melaporkan kasus dan dugaan korupsi di sektor satwa liar dan kehutanan? Apakah masyarakat sadar akan peran dan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan melaporkan korupsi?
- » Apakah lembaga-lembaga tersebut telah menetapkan kebijakan dan mekanisme perlindungan whistle-blower yang efektif dan fungsional ?
- » Bagaimana Pemolisian masyarakat dirasakan oleh lembaga peradilan pidana lainnya dan publik?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid Saya Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 15–16



Upaya untuk mendeteksi dan menghentikan kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak terbatas pada lembaga penegak hukum; mereka membutuhkan masukan dari berbagai departemen pemerintah, industri swasta dan organisasi masyarakat sipil yang masing-masing dapat membantu menghadirkan dimensi tambahan pada respons. Di banyak tempat, apa yang disebut 'kemitraan publik-swasta' (PPP) telah didirikan untuk mendorong kerja sama formal dan informal antara pejabat publik, termasuk penegak hukum, dan entitas swasta seperti perusahaan bisnis, asosiasi perdagangan, organisasi bukan pemerintah (LSM), organisasi pemerintah internasional, media dan kelompok masyarakat sipil.

Kemitraan ini menawarkan jalan untuk menyatukan kelompok dan individu dengan minat yang sama dan memungkinkan mereka untuk bertukar informasi, bergabung, dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Mereka juga menawarkan forum untuk posisi yang saling bertentangan untuk dibahas dan, jika mungkin, didamaikan. Misalnya, kemitraan publik-swasta yang berkaitan dengan penggunaan komersial satwa liar dan sumber daya hutan melalui pariwisata dapat mempertemukan pejabat pengelola taman margasatwa, operator tur swasta, perwakilan masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan bersama dalam upaya konservasi dan perlindungan satwa liar tetapi mungkin memiliki pandangan yang berlawanan tentang komersialisasi dan akses ke kawasan lindung. Contoh lain adalah inisiatif 'United for Wildlife', sebuah koalisi perusahaan transportasi dan lembaga keuangan yang bertekad untuk mencegah penyelundup satwa liar menggunakan jaringan mereka. Melalui jenis kolaborasi ini, sektor keuangan dapat membantu dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan dan membantu otoritas pemerintah dengan melacak, membekukan dan menyita aset serta menyelidiki dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia. Perusahaan transportasi dapat membantu menemukan dan menghentikan penyelundupan satwa liar dan barang selundupan hutan serta memperingatkan pihak berwenang tentang pengiriman yang mencurigakan.

Perantara daring mungkin dapat membantu otoritas penegak hukum yang sedang menyelidiki kejahatan satwa liar. Kapasitas perantara daring untuk mengambil tindakan yang efektif dan proporsional terhadap kejahatan daring sangat bervariasi sesuai dengan fungsinya. Secara umum, semakin langsung hubungan bisnis antara perantara daring dan orang yang menggunakan layanannya untuk tujuan kriminal, semakin besar kemungkinan perantara daring tersebut Mampu mengambil tindakan yang efektif

secara relatif. Misalnya, Penyedia Layanan Internet dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi atau memblokir akses ke situs web tertentu, sementara penyedia hosting dan media sosial dapat memberikan data kepada lembaga penegak hukum yang dihosting di server mereka, menghapus data dari server mereka, dan berbagi informasi tentang pengguna mereka. Penyedia cloud dapat memblokir atau menghapus akun. Mereka terkadang menyaring materi yang sedang diunggah ke layanan mereka untuk memeriksa materi ilegal apa pun.

Konsultasi dan pembangunan kemitraan dapat terjadi di berbagai tingkatan dan dapat diformalkan atau informal, berkelanjutan atau ad hoc, tergantung pada kebutuhan, minat, dan perkembangan tertentu. Di beberapa yurisdiksi, pertemuan rutin antara perwakilan pemerintah dan industri berlangsung untuk membahas cara terbaik untuk menyeimbangkan kepentingan komersial dan ekonomi lainnya dengan upaya konservasi, perlindungan, dan penegakan hukum satwa liar dan kehutanan. Selain memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan, kemitraan publik-swasta untuk dapat digunakan untuk memerangi kejahatan lain yang memfasilitasi kejahatan ini termasuk korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak dan biaya.

Konsesi pengelolaan sumber daya alam, seperti konsesi hutan (juga pertambangan, rekreasi, perburuan, dan lain-lain) adalah contoh kemitraan publik-swasta yang dapat melibatkan berbagai tingkat, bentuk, dan risiko terkait sehubungan dengan penegakan hukum. Pengaturan konsesi didasarkan pada kebutuhan atau preferensi pihak swasta yang melakukan beberapa kegiatan di atau dekat wilayah milik publik.

Ini dapat berkisar dari dan termasuk :

1. operasi pengembangan dan eksploitasi sumber daya, seperti eksplorasi, pemanenan, pembangunan infrastruktur, dan regenerasi;
2. layanan sosial, seperti sekolah, klinik kesehatan, dan langkah-langkah pembangunan lokal lainnya (yang dapat sangat berharga bagi masyarakat terpencil dan seringkali kurang terlayani); dan
3. pelaksanaan kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya, seperti pelestarian habitat kritis, pengendalian akses dan kegiatan oleh pihak ketiga, dan perlindungan regenerasi.

Mungkin ada tumpang tindih yang signifikan antar dan di antara pengaturan ini, dan pelaksanaannya dapat melibatkan pemegang konsesi dalam berbagai jenis kegiatan yang terkait dengan penegakan hukum, termasuk memberi tahu pihak ketiga tentang pembatasan dan persyaratan hukum (secara lisan, melalui papan nama, atau melalui media lain); melibatkan staf konsesi dan kontraktor dalam campur tangan jika terjadi kejahatan yang sedang berlangsung; memberi tahu pihak berwenang tentang kejahatan; memberikan informasi dan bukti; dan mendukung penyelidikan dan penuntutan. Secara paralel, berbagai lembaga publik, termasuk tidak hanya otoritas pemberi konsesi, akan melakukan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan yang sama terkait dengan area konsesi.

Tanggung jawab dan kewajiban sehubungan dengan penegakan hukum dan kepatuhan dapat, tetapi seringkali tidak, ditentukan dalam kontrak konsesi serta dalam aturan, peraturan dan undang-undang terkait. Di mana dan ketika ketidakpastian dan ambiguitas muncul, mekanisme untuk konsultasi dan koordinasi mungkin sudah ditentukan atau mungkin diperlukan.

Kemitraan publik-swasta perlu direncanakan dengan hati-hati. Satu kekecewaan umum yang ditemui dalam kemitraan semacam itu adalah bahwa beberapa mitra memandangi kontak dengan lembaga penegak hukum sebagai aliran satu arah dan bahwa sektor swasta atau mitra bukan pemerintah mendapatkan sedikit atau tidak mendapat umpan balik mengenai informasi dan bantuan yang mereka berikan. Kerahasiaan dan aturan lain yang berkaitan dengan investigasi dapat mencegah umpan balik semacam itu, tetapi semua mitra harus menyadari hal ini dan penegak hukum harus memberikan tanggapan sebanyak yang dimungkinkan secara hukum. Kekecewaan lain berasal dari fakta bahwa beberapa entitas swasta mungkin enggan atau lambat untuk berbagi

informasi dengan otoritas pemerintah jika ini dapat mengganggu operasi, jadwal, atau perencanaan mereka.

Kehati-hatian juga perlu dikerahkan sehubungan dengan pekerjaan investigasi yang dilakukan secara independen oleh LSM atau aktor bukan negara lainnya. Meskipun diakui bahwa, di banyak negara, pekerjaan oleh aktor-aktor semacam itu penting untuk lebih memahami dan mendokumentasikan kejahatan satwa liar dan kehutanan, informasi yang diperoleh dari penyelidikan independen mungkin tidak dapat diterima di pengadilan atau dapat merugikan penyelidikan polisi yang sedang berlangsung. Untuk itu, mitra yang terlibat dalam kemitraan ini juga perlu menghormati batasan dari apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh masing-masing mitra.

Kemitraan Publik-Swasta

- » Kemitraan resmi atau Informal apa yang melibatkan sektor publik, swasta atau bukan pemerintah yang ada untuk mencegah dan menekan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada Kemitraan Publik-Swasta yang memberikan dukungan keuangan, logistik, atau lainnya untuk penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan, terutama yang melibatkan sektor keuangan, transportasi, atau pariwisata?
- » Lembaga, organisasi, perusahaan, kelompok masyarakat sipil mana yang bergabung dalam kemitraan ini? Bagaimana mereka bekerja sama dan bertukar informasi? Bagaimana Kemitraan ini bekerja dalam praktiknya? Inisiatif dan kegiatan apa yang telah keluar dari Kemitraan ini?
- » Apakah Kemitraan ini terbatas pada kelompok dan Perorangan nasional atau apakah mereka juga memungkinkan kerja sama internasional?
- » Apakah ada kekhawatiran bahwa lembaga dan pejabat pemerintah terlalu dekat dengan industri atau kelompok kepentingan tertentu? Apakah ada dugaan bahwa Kemitraan semacam itu menciptakan pemberian layanan yang tidak setara, yaitu, apakah ada kekhawatiran akan favoritisme?
- » Apakah salah satu dari pengaturan ini mencakup ketentuan tentang berbagi data? Jika demikian, apakah ada protokol dan fasilitas yang memadai untuk tujuan itu?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Laporan Kejahatan Margasatwa Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 22 UNODC, Pembuatan Kebijakan dan Peran Perantara Daring (2021) 15–77 Inggris bagi Satwa liar. <https://unitedforwildlife.org/>



ALAT
II.9

1.8 Pemolisian dan penegakan hukum oleh perusahaan keamanan swasta

Dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan, pemolisian dan penegakan hukum sering melibatkan campuran lembaga publik dan entitas swasta. Beberapa otoritas Negara mengalihdayakan layanan kepolisian terpilih ke perusahaan keamanan swasta yang memiliki keahlian dan peralatan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau karena penggunaan perusahaan swasta mungkin lebih murah. Demikian pula, pemilik tanah swasta dapat mempekerjakan kontraktor eksternal atau memiliki staf sendiri untuk berpatroli di tanah, permainan atau cagar alam mereka, atau bisnis kehutanan. Untuk alasan ini, sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Dalam konteks ini, sektor swasta melibatkan perusahaan keamanan atau penggunaan individu yang sebelumnya sudah terlatih di bidang ini.

Penting untuk dicatat dalam konteks ini bahwa personel yang dipekerjakan secara pribadi mungkin tidak memiliki mandat hukum untuk menjalankan fungsi penegakan hukum resmi dan dengan demikian bukan pengganti personel penegak hukum. Meskipun mereka mungkin berhak untuk melindungi properti majikan mereka, perusahaan keamanan swasta tidak memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka, menggeledah orang dan tempat, atau menyita aset. Fungsi-fungsi ini — dan harus — dikhususkan untuk otoritas Negara. Untuk alasan ini

pemantauan perusahaan keamanan swasta penting, terutama di daerah terpencil di mana pengawasan yang dilembagakan menantang dan di mana kejahatan dapat dengan mudah luput dari perhatian.

Keterlibatan perusahaan keamanan swasta dalam pemolisian dan penegakan hukum memiliki banyak keuntungan dan dapat menghasilkan banyak hasil yang diharapkan dalam mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Namun, ini juga menghadirkan tantangan serius, terutama jika cara atau kekuatan koersif digunakan oleh entitas swasta, seperti jika mereka membawa senjata api atau senjata lainnya. Sayangnya, ada kasus di mana perusahaan keamanan swasta terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia yang parah. Sementara masalah yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan dan supremasi hukum tidak terbatas pada keterlibatan aktor swasta dalam penegakan hukum, hal itu tentu saja menambah pertanyaan tentang akuntabilitas dan legalitas.⁵⁶ Dalam beberapa kasus, perusahaan keamanan swasta tidak hanya terlibat dalam memberikan layanan pemolisian dan penegakan hukum di kawasan lindung, tetapi juga menjalankan fungsi kuasi-yudisial. Situasi seperti itu memperburuk masalah dan keretakan antara kekuasaan dan tanggung jawab publik dan swasta dan antara penegak hukum dan masyarakat lokal. Hal ini dapat meningkatkan rasa saling tidak percaya dan menghambat arus informasi, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi dan efektivitas penegakan hukum satwa liar dan kehutanan.

Terhadap latar belakang ini, penting untuk memantau dengan cermat peran dan kegiatan perusahaan keamanan swasta dan memastikan bahwa personel mereka dilatih secara memadai dalam mandat mereka, kekuatan mereka dan keterbatasan kekuatan ini, penggunaan peralatan, termasuk kondisi di mana senjata dapat digunakan, jika ada, dan tanggung jawab hak asasi manusia mereka. Seperti dalam kasus lembaga penegak hukum publik, pelatihan, peralatan, dan kekuasaan harus sesuai dengan lingkungan tempat perusahaan keamanan swasta bekerja.



ALAT
II.10

Pemolisian dan penegakan hukum oleh perusahaan Keamanan swasta

- » Se jauh mana dan dalam konteks dan lokasi seperti apa perusahaan Keamanan swasta swasta terlibat dalam penegakan satwa liar dan kehutanan?
- » Apa alasan keterlibatan mereka dan bagaimana hal ini terkait dengan kehadiran dan operasi penegakan hukum di lokasi ini?
- » Apa fungsi spesifik dari perusahaan keamanan swasta dalam kaitannya dengan penegakan satwa liar dan kehutanan? Di manakah fungsi-fungsi ini (dan batasannya) ditetapkan? Apakah ada undang-undang yang mengatur pembentukan dan aktivitas perusahaan keamanan swasta di sektor satwa liar dan kehutanan (misalnya kekuasaan, pelatihan, tugas pelaporan, dan penggunaan kekuatan)?
- » Jenis perusahaan Keamanan swasta apa yang terlibat dalam penegakan satwa liar dan kehutanan?
- » Bagaimana perusahaan-perusahaan ini dipantau? Kepada siapa mereka bertanggung jawab?
- » Bagaimana perusahaan-perusahaan ini didanai, dikelola, dan dilatih? Jenis peralatan apa yang mereka gunakan/ apakah mereka diizinkan untuk menggunakannya?
- » Bagaimana perusahaan-perusahaan ini dipersepsikan oleh lembaga resmi dan masyarakat setempat?
- » Apa hasil dan Pengalaman dengan penggunaan Perusahaan Keamanan swasta dalam penegakan satwa liar dan hutan?
- » Apakah ada Laporan tentang ketidakpatuhan, pelanggaran, atau kejahatan hak asasi manusia oleh perusahaan Keamanan swasta? Jika ya, apa konsekuensinya?

⁵⁶ Lihat juga Bab II, Bagian 6.5 dari Perangkat ini.

2

Bagian II

Sumber daya lembaga penegak hukum

Di masa lalu, banyak negara telah menganggap kejahatan satwa liar dan kehutanan sebagai prioritas rendah dan tingkat kepegawaian, perekrutan dan pelatihan telah mencerminkan sikap ini.



Akibatnya, banyak kejahatan satwa liar dan kehutanan luput dari perhatian, dan pelanggar telah menghindari deteksi dan penangkapan. Ketika negara-negara meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi kejahatan satwa liar dan kehutanan, tingkat kepegawaian dan kegiatan terkait seperti pelatihan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan upaya ini.

2.1 Staf

Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum satwa liar dan kehutanan mengharuskan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mereka yang beragam. Sayangnya, di beberapa tempat, instansi terkait tidak memiliki staf yang memadai; di tempat lain, jabatan tetap tidak terisi selama bertahun-tahun dan gaji serta tunjangan mungkin tidak cukup mencerminkan pekerjaan yang sedang dilakukan dan/atau berbulan-bulan terlambat dibayarkan. Gaji harus sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Proses sumber daya manusia (misalnya rekrutmen, perekrutan, retensi, promosi, transfer, dan pensiun) harus adil, inklusif, dan transparan untuk mencegah korupsi dan nepotisme, untuk mempromosikan keragaman dan inklusi, termasuk kesetaraan gender dan ras, dan untuk memastikan bahwa staf merasa bertanggung jawab dan termotivasi.

2.1.1 Tingkat kepegawaian

Penilaian kapasitas penegakan hukum membutuhkan inventarisasi dasar dari sumber daya manusia yang tersedia untuk pemolisian kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini melibatkan identifikasi tingkat kepegawaian, lokasi dan hierarki, serta komposisi staf. Yang terakhir ini melibatkan identifikasi apakah ada keterwakilan untuk perempuan, kelompok minoritas, penduduk asli dan/atau komunitas lokal.



ALAT
II.11

Tingkat Kepegawaian

- » Apakah satuan yang bertugas melakukan penindakan memiliki staf yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah yang Dicapuk? Jika tidak, alasan apa yang diberikan untuk ini?
- » Apa kualifikasi Minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan?
- » Pelatihan apa yang perlu diikuti staf sebelum melakukan pekerjaan?
- » Bagaimana komposisi staf misalnya bagaimana perempuan dan orang-orang dari kelompok minoritas terwakili di setiap satuan dan di setiap tingkat/pangkat? Apakah upaya sedang dilakukan untuk memastikan kesetaraan terkait jenis kelamin dan ras?
- » Dalam satuan terkait, berapa proporsi petugas penegak hukum dalam jajaran pengawasan atau manajemen?
- » Berapa rasio petugas dengan masa kerja kurang dari dua tahun dengan mereka yang memiliki masa kerja dua tahun atau lebih? Berapa lama rata-rata petugas tinggal di satuan terkait?
- » Dalam unit yang relevan, berapa proporsi staf penuh waktu/paruh waktu, administratif/ investigasi?
- » Apakah petugas penegak hukum dikerahkan secara strategis di lokasi-lokasi penting seperti tempat berburu dan cagar hutan, taman nasional, pelabuhan, penyeberangan perbatasan, dan sebagainya? Apa keseimbangan Antara staf yang bekerja di lapangan dan mereka yang bekerja di kantor pusat?

Sumber daya tambahan:

*UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian Jilid Saya Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006)
7-8 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi*

2.1.2 Gaji dan tunjangan

Gaji dan hak-hak lain dari petugas penegak hukum perlu mencerminkan tanggung jawab, pendidikan, dan pengalaman mereka. Gaji yang tidak memadai, atau kegagalan untuk membayar gaji secara teratur dan tepat waktu, menurunkan semangat staf dan membuat mereka kurang bersemangat untuk bekerja.

Terkait dengan gaji dan tunjangan adalah masalah kesetaraan. Beberapa penjaga hutan, sipir perburuan, pengawas perburuan, sipir satwa liar dan lainnya yang bekerja di penegakan hukum satwa liar dan kehutanan tidak menikmati kesetaraan dengan rekan-rekan mereka di lembaga-lembaga seperti bea cukai dan polisi. Ini terkait dengan gaji dan tunjangan dan juga dalam kaitannya dengan otoritas dan kekuasaan yang disediakan dalam undang-undang, pelatihan, dan peralatan nasional. Petugas margasatwa dan kehutanan kadang-kadang dianggap sebagai petugas penegak 'kelas dua' oleh rekan-rekan mereka. Hal ini menyulitkan lembaga dan petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan untuk mendapatkan dukungan dari rekan-rekan mereka dan membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam operasi multi-lembaga. Kurangnya kesetaraan ini mengalir ke masyarakat luas, sehingga pejabat satwa liar dan kehutanan mungkin kurang dihormati masyarakat umum. Ini juga dapat berkontribusi pada kesan penjeratan yang terasa terbatas bagi penjahat.

Beberapa yurisdiksi mengoperasikan skema penghargaan untuk petugas penegak hukum sebagai insentif untuk penangkapan dan penyitaan yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Meskipun skema ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat deteksi, skema dapat menjadi sangat bermasalah karena dapat menciptakan risiko bukti palsu dan beberapa tersangka menjadi sasaran yang tidak semestinya. Selanjutnya, pada prinsipnya, aparat penegak hukum tidak boleh melaksanakan tugasnya dengan harapan imbalan atau manfaat lainnya.

Gaji dan tunjangan

- » Bagaimana struktur gaji untuk petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan serta staf lainnya? Berapa gaji rata-rata, termasuk lembur, untuk setiap tingkat? Bagaimana ini dibandingkan dengan upah rata-rata nasional? Bagaimana jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum resmi lainnya ?
- » Berapa beban kerja yang diharapkan untuk petugas satwa liar, kehutanan, dan polisi serta staf tidak tersumpah di satuan terkait?
- » Apakah petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan terlibat dalam pekerjaan tambahan atau perusahaan swasta untuk menambah penghasilan mereka? Jika ya, mengapa demikian?
- » Apakah tingkat gaji sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang terlibat?
- » Apakah petugas satwa liar, kehutanan dan polisi serta staf lainnya benar-benar menerima gaji mereka? Apakah mereka menerimanya tepat waktu?
- » Apakah pembayaran lembur dan tunjangan yang relevan dan sesuai tersedia dan apakah mereka benar-benar dibayar?
- » Apakah petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan dilindungi oleh asuransi cedera/kesehatan?
Apakah mereka memiliki akses ke Manfaat seperti cuti hamil/melahirkan/sakit?
- » Apakah ada skema Santunan cedera/kematian bagi petugas dan keluarganya?
- » Apakah skema penghargaan dan pengakuan ada? Bagaimana pelaksanaannya?



2.2 Rekrutmen, masa jabatan, dan promosi

Prosedur rekrutmen bagi aparat penegak hukum harus adil dan transparan untuk memastikan profesionalisme dan integritas, serta untuk menghindari diskriminasi, nepotisme, dan korupsi. Pemilihan staf di semua tingkatan harus didasarkan pada prestasi, pengalaman dan pendidikan, dan kriteria seleksi perlu diartikulasikan dengan jelas. Terutama di instansi yang lebih besar, rekrutmen harus dilakukan di tingkat junior, menengah dan senior. Kebijakan internal dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan keahlian dan pengalaman dengan keinginan untuk merotasi staf dan membawa ide-ide baru, perspektif segar, dan perubahan generasi. Kebijakan dan prosedur rekrutmen harus mendorong inklusi perempuan dan keragaman, serta perekrutan dari komunitas lokal. Hal ini dapat menjadi penting untuk mencapai perubahan organisasi dalam penegakan hukum, meningkatkan persepsi publik dan lebih baik dalam menanggapi kebutuhan kelembagaan dan masyarakat. Selanjutnya perlu diperiksa di mana staf ditempatkan secara geografis setelah menyelesaikan induksi dan pelatihan yang relevan. Beberapa lembaga, misalnya, tidak mengizinkan rekrutan untuk bekerja di komunitas lokal mereka untuk menghindari nepotisme dan pengaruh yang tidak semestinya, meskipun praktik semacam itu juga berisiko kehilangan pengetahuan lokal. Jika rekrutan harus pindah dari daerah setempat, ada pertanyaan lebih lanjut tentang apakah keluarga dapat pindah bersama mereka atau apakah tunjangan dibayarkan.

Seperti halnya rekrutmen, penting bahwa peluang promosi tersedia untuk semua kandidat yang memenuhi syarat, dan dilakukan berbagai upaya untuk menghindari persepsi nepotisme atau favoritisme. Kemajuan harus didasarkan pada penilaian kompetensi dan kinerja, dan sarana untuk mengukurnya harus ditetapkan dan tersedia dengan jelas.

Sistem rotasi staf atau masa jabatan dapat menghindari 'kebuntuan' di pos yang sama, memperluas basis pengalaman personel, membantu dalam pengembangan karir dan mengurangi kemungkinan praktik korupsi. Sekali lagi, sistem seperti itu harus adil dan tidak sewenang-wenang, dan harus diimbangi dengan kebutuhan untuk memaksimalkan pelatihan spesialis apa pun yang telah diterima anggota staf untuk peran tertentu.



ALAT
II.13

Rekrutmen, masa jabatan, dan promosi

- » Bagaimana proses seleksi dan prosedur Rekrutmen untuk bergabung dengan satuan dan instansi yang bertugas menegakkan hukum, peraturan, dan regulasi satwa liar dan kehutanan? Bagaimana staf dipilih?
- » Tingkat kualifikasi, keterampilan, dan Pengalaman profesional apa yang diperlukan untuk bergabung dengan unit-unit ini? Apa persyaratan pendidikan dasar untuk perekrutan (seperti tingkat literasi dan berhitung)?
- » Apakah ada prosedur pemeriksaan untuk pelamar? Apakah rekrutmen didasarkan pada penilaian objektif dan wawancara? Apakah proses seleksi tampak adil dan objektif?
- » Apakah staf menyelesaikan masa percobaan sebelum dikonfirmasi sebagai petugas?
- » Apakah prosedur Rekrutmen dan seleksi adil dan transparan? Apakah mereka mempromosikan perekrutan perempuan dan orang-orang dari berbagai latar belakang?
- » Apakah staf diambil dari beberapa agensi atau mereka Direkrut secara independen?
- » Apakah staf direkrut dari dalam satuan atau instansi atau Direkrut dari luar langsung ke unit penegakan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah staf baru diizinkan untuk bekerja dalam komunitas lokal mereka atau apakah mereka ditempatkan di tempat lain?
- » Jika staf baru dipindahkan, dapatkah keluarga mereka pindah bersama mereka atau tunjangan dibayarkan untuk mengunjungi keluarga?
- » Apakah ada ketentuan untuk menarik instansi lain untuk melengkapi kebutuhan staf untuk Persyaratan operasional atau selama masa kekurangan?
- » Apakah ada sistem masa jabatan di mana staf dipindahkan ke departemen atau lembaga yang berbeda setelah jangka waktu tertentu?
- » Apakah ada mekanisme perkembangan karier bagi aparat penegak hukum satwa liar dan kehutanan berdasarkan kompetensi dan kinerja?
- » Apakah ada proses seleksi promosi yang adil dan Merata?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume I Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 8
UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana:

2.3 Pelatihan

Sangat penting bahwa staf di semua tingkatan dilatih dan terampil secara memadai untuk memenuhi banyak tantangan dan bahaya yang terkait dengan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan. Jika dugaan kejahatan satwa liar atau hutan diselidiki oleh petugas yang tidak cukup akrab dengan latar belakang, teknik, proses, dan persyaratan hukum yang relevan, ada kemungkinan bahwa integritas penyelidikan dapat dikompromikan, dengan implikasi potensial untuk penuntutan dan persidangan berikutnya.

Oleh karena itu, analisis kapasitas penegakan harus melibatkan tinjauan komprehensif terhadap program pelatihan, penyampaian dan kontennya, serta jenis dan kedalaman pelatihan yang tersedia untuk unit khusus, lembaga penegak hukum umum, rekrutan baru, penyelidik senior dan staf lain yang terlibat dalam penegakan hukum satwa liar dan kehutanan.

2.3.1 Konten

Penegakan hukum di sektor satwa liar dan kehutanan memerlukan pemahaman tentang wewenang dan prosedur investigasi yang relevan, undang-undang dan standar hak asasi manusia yang terkait dengan penegakan hukum dan kejahatan lain yang merupakan memungkinkan atau terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan (misalnya korupsi, pencucian uang, pajak dan penghindaran biaya dan lain-lain). Ini juga menuntut pengetahuan teknis tentang operasi sektor-sektor ini, masalah lingkungan, hak atas tanah dan properti, dan masalah komersial dan perdagangan. Selain itu, pelatihan dalam teknik investigasi khusus kejahatan satwa liar dan kehutanan dan, jika diperlukan, metode penegakan hukum tingkat lanjut seperti investigasi terselubung dan teknik investigasi khusus lainnya, diperlukan. Selain itu, personel di titik kontrol perbatasan harus terbiasa dengan prosedur bea cukai dan karantina, persyaratan impor, ekspor dan CITES, identifikasi spesies, dan kewajiban internasional yang relevan. Perhatian juga harus diberikan pada apakah dan seberapa sering konten pelatihan dinilai dan ditingkatkan, dan apakah dan seberapa sering pelatihan yang sedang berlangsung dan menyegarkan berlangsung untuk memastikan keterampilan tertanam dan diperbarui secara memadai, dan bahwa pengembangan pekerjaan dan karir dan pengayaan terjadi.

Pelatihan harus dirancang secara efisien untuk audiens target dan cukup spesifik agar efektif. Isi dari program pelatihan yang tersedia tentu bervariasi di antara yurisdiksi dan tergantung pada tingkat dan jenis staf yang dilatih, pengetahuan dan tugas mereka sebelumnya. Sementara mereka yang secara khusus ditugaskan untuk menanggapi kejahatan satwa liar mungkin memerlukan pelatihan khusus, sama pentingnya bahwa lembaga penegak hukum utama di setiap yurisdiksi, seperti bea cukai dan polisi, memiliki kesadaran dasar tentang undang-undang nasional yang berlaku, dari CITES, dan tentang peran mereka mungkin dipanggil untuk berperan dalam penegakan dan implementasi. Akademi dan perguruan tinggi bea cukai dan kepolisian didorong untuk memasukkan modul atau modul-modul tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan dalam kurikulum kursus pelatihan dasar untuk rekrutan baru. Selain itu, personel keamanan pelabuhan dan bandara akan mendapat manfaat dari peningkatan kesadaran tersebut, karena mereka ditempatkan secara ideal untuk menemukan penyelundupan satwa liar dan barang selundupan hutan selama pekerjaan mereka dalam menyaring penumpang, bagasi, dan kargo. Ini sangat penting di negara-negara di mana pejabat bea cukai tidak secara rutin ditempatkan untuk mengontrol arus ekspor. Demikian pula, dimasukkannya modul pencucian uang dasar dan kejahatan keuangan dalam pelatihan umum untuk bea cukai, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai mata rantai dalam rantai kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Dengan demikian, tidak ada templat tunggal untuk pelatihan petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan. Alat berikut menyediakan beberapa indikator sederhana dari variasi dan jenis konten yang dapat disertakan dalam program pelatihan yang relevan.

Pelatihan: konten

- » Pelatihan dasar apa yang diberikan kepada orang-orang yang bergabung dengan unit penegakan satwa liar dan kehutanan yang relevan?
- » Apakah Pelatihan petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan mencakup masalah-masalah berikut?
 - Hukum satwa liar dan kehutanan domestik, termasuk prosedur dan kejahatan
 - Tingkat dan karakteristik kegiatan kriminal di sektor-sektor ini
 - Perlindungan spesies dan masalah Lingkungan yang relevan
 - Perdagangan, dokumentasi yang benar, dan prosedur Bea Cukai
 - Pengumpulan dan Diseminasi Informasi
 - Identifikasi komoditas
 - Teknik investigasi, prosedur investigasi dan penanganan satwa liar dan hasil hutan Yang Disita



ALAT
II.14

Pelatihan: konten

- Bagaimana korupsi memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan serta cara mendeteksi dan menyelidiki korupsi
 - Ketersediaan dan batasan kekuatan penegakan
 - Penggunaan peralatan, teknologi, dan prosedur forensik
 - Kerja sama internasional
 - Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga domestik dan internasional
 - Pencegahan, Pendidikan, dan peningkatan kesadaran
 - Akuntabilitas, etika, hak asasi manusia, integritas dan korupsi
 - Pemadam kebakaran
 - Keterampilan bertahan hidup / teknik bertahan hidup lapangan
 - Pelatihan pertolongan pertama
 - Pelatihan manajemen bagi mereka yang memiliki tanggung jawab pengawasan
- » Apakah Pelatihan dilengkapi dengan manual dan materi lain yang meringkas masalah ini?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi (2006) 11 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 3 Investigasi Kejahatan (2006) 8–9 UNODC, Manual di atas Satwa liar dan Hutan Kejahatan bagi garis depan Petugas (2014) UNODC, Satwa liar dan kehutanan Kejahatan: panduan lapangan untuk kantor garis depan (2018)

2.3.2 Pelaksanaan

Pelatihan dapat disampaikan kepada berbagai audiens dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun daring. Pelatih harus cukup berkualitas dan berpengalaman dan materi pelatihan harus muktahir dan cocok untuk audiens target. Materi pelatihan yang menyertainya sangat penting bagi petugas untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi dalam menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan. Bahkan di mana ada program pelatihan yang komprehensif, penting bahwa silabus dan kurikulum ditinjau secara teratur untuk memastikan mereka tetap muktahir dan mengimbangi ciri satwa liar dan kejahatan hutan yang terus berubah. Masalah kapasitas juga perlu dipertimbangkan ketika pelatihan diberikan.

Cara lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas adalah dengan menawarkan kursus 'pelatihan pelatih', yang memungkinkan instansi menjadi mandiri untuk pelatihan dan menjadi kurang bergantung pada bantuan dari luar. Jika pelatihan dan pengembangan kapasitas disampaikan oleh para ahli eksternal, maka harus mempertimbangkan kebijakan dan undang-undang nasional yang relevan secara memadai dan harus, sedapat mungkin, disampaikan dalam bahasa nasional, menggunakan juru bahasa atau materi terjemahan.

Program pelatihan juga dapat dirancang untuk membangun jaringan penegakan hukum dan kemitraan baru jika melibatkan peserta dari berbagai latar belakang dan lembaga, baik domestik maupun internasional. Ini sangat penting ketika mengembangkan tanggapan yang efektif terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan, sebuah proses yang melibatkan banyak departemen pemerintah, termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan yang lain yang memungkinkan atau terkait dengan kejahatan ini (misalnya korupsi, pencucian uang, penggelapan biaya dan pajak), dan mencakup perbatasan internasional. Beberapa agensi mungkin menawarkan peluang untuk penugasan ke agensi lain, pengembangan profesional dan pendidikan tinggi di luar agensi, sehingga meningkatkan basis pengetahuan dan keahlian mereka.

Pelatihan: pelaksanaan

- » Apa kapasitas untuk Pelatihan rekrutan dan untuk Pelatihan khusus?
- » Seberapa sering petugas menerima Pelatihan penyegaran? Kursus Pelatihan khusus apa yang tersedia? Bagaimana kebutuhan Pelatihan dinilai?
- » Bagaimana Pelatihan disampaikan (misalnya, ruang kelas, belajar mandiri atau berbasis komputer)?
- » Siapa yang memberikan pelatihan? Tindakan apa yang diambil untuk menilai kualifikasi pelatih?
- » Siapa yang mengembangkan Silabus untuk pelatihan? Apakah lembaga mitra berkontribusi pada pengembangan Silabus? Kapan rencana Pelatihan terakhir diperbarui?
- » Materi apa saja yang digunakan untuk mendukung pelatihan? Kapan terakhir kali diperbarui?
- » Apakah Pelatihan melibatkan peserta dari berbagai instansi (dalam dan luar negeri)? Apakah lembaga terlibat dalam memerangi kejahatan yang terkait dengan atau memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terlibat (misalnya lembaga antikorupsi, lembaga pengumpul pendapatan, agen anti pencucian uang)? Bagaimana staf baru diperkenalkan kepada rekan-rekan di agensi mitra?
- » Apakah ada masukan atau bantuan dari organisasi internasional atau Regional?
- » Apakah ada ukuran akreditasi yang diterapkan untuk memastikan kualitas dan standarisasi pelatihan?
- » Apa peluang Pelatihan lain yang tersedia (seperti Studi lebih lanjut, pengembangan profesional, penugasan atau lampiran ke satuan pusat atau ke lembaga lain)?
- » Apakah Pelatihan terakreditasi?
- » Pelatihan tentang masalah kejahatan satwa liar dan kehutanan apa yang relevan yang tersedia untuk lembaga Bea Cukai dan polisi? Apakah subjek kejahatan satwa liar dan kehutanan termasuk dalam Pelatihan dasar semua petugas Bea Cukai dan polisi?
- » Apakah subjek penyelundupan satwa liar dan penyelundupan Selundupan hutan termasuk dalam Pelatihan staf Keamanan pelabuhan dan BANDARA?
- » Apakah ada rencana Pelatihan lintas lembaga?

Sumber daya tambahan:

Bank Dunia, Alat dan Sumber Daya untuk Memerangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2018) 12–13

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid Saya Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 8–9



2.4 Fasilitas dan peralatan

Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga penegak hukum dan prosedur investigasi seringkali tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk memenuhi dan mengikutinya. Penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan memerlukan fasilitas tertentu dan membutuhkan sumber daya umum dan peralatan khusus untuk melaksanakan tugasnya. Ini dimulai dengan sumber daya dasar seperti kantor, alat tulis, transportasi, akses ke kendaraan bermotor, dan borgol. Sumber daya dan alat inti seperti komputer, akses internet, ponsel, radio, dan kendaraan patroli adalah persyaratan dasar tambahan untuk dapat memberikan respons penegakan yang efektif. Pendanaan yang cukup juga diperlukan untuk menjalankan fungsi sehari-hari serta untuk membeli, menyimpan, dan memelihara peralatan yang diperlukan.

Untuk melakukan pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan secara efektif, termasuk forensik,⁵⁷ penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan mungkin memerlukan peralatan canggih seperti komputer dan perangkat lunak tertentu, peralatan untuk prosedur forensik, laboratorium, dan senjata api. Drone (kendaraan udara tak berawak) dapat menawarkan solusi kepada petugas penegak hukum untuk

⁵⁷ Lihat Bab II, Bagian 5.4 dan 5.5 dari Perangkat ini.

beberapa tantangan yang terlibat dalam memantau area besar atau terpencil dari habitat satwa liar yang dilindungi dan dalam mengumpulkan intelijen tentang penjahat satwa liar. Namun, ada juga kelemahan dalam penggunaan drone, karena dapat menimbulkan ancaman terhadap perlindungan data dan privasi, kerahasiaan, dan bahkan keamanan dunia maya. Teknologi penginderaan jauh lainnya, seperti citra satelit, sensor inframerah termal, survei udara, sensor tanah seismik, dan monitor detak jantung, semakin menjadi fitur respons canggih terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan di negara sumber. Anjing pelacak dapat dilatih untuk mendeteksi gading, cula badak, bahan biologis lainnya, uang tunai, dan komoditas lainnya di berbagai lokasi, terutama di bandara, pelabuhan laut, gudang kargo, kontainer, dan fasilitas mall. Selain itu, jika sesuai, pakaian tempur pelindung, peralatan senjata api, dan pelatihan untuk penjaga hutan dan petugas perbatasan diperlukan dalam menanggapi pemburu bersenjata yang telah dilaporkan menggunakan persenjataan kaliber tinggi. Perlu dicatat bahwa peralatan tersebut mahal dan membutuhkan perawatan kualitas rutin, yang dapat berada di luar kapasitas keuangan beberapa unit. Selain itu, seperti halnya semua aspek penegakan hukum satwa liar dan kehutanan, penting bagi staf terkait untuk dilatih dengan benar dalam menggunakan dan, jika relevan, menyimpan dan memelihara peralatan.



ALAT
II.16

Fasilitas dan peralatan

- » Di fasilitas apa penyelidik satwa liar dan kejahatan hutan ditempatkan? Di mana mereka berada dan bagaimana kondisi bangunan, lokasi, kantor, furnitur, dan lain-lain yang relevan?
- » Apakah mereka memiliki akses ke fasilitas dasar seperti air minum bersih, kamar kecil dan lain-lain?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan memiliki akses ke peralatan dan bahan dasar seperti komputer dan Internet, ponsel, peralatan kantor, kendaraan patroli? Bagaimana kondisi peralatan ini?
- » Bagaimana peralatan dicatat, dirawat, Diservis, dan disimpan?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan memiliki akses ke perangkat lunak dan basis data yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka? Apakah mereka memiliki akses ke perangkat lunak dan basis data khusus?
- » Di mana dan bagaimana properti, aset, dan barang bukti yang disita disimpan? Apakah penyimpanannya aman?
- » Fasilitas apa saja yang tersedia untuk menampung hewan/tumbuhan hidup? Apakah ada data tentang jumlah pasti dari spesimen, pemanfaatan kapasitas dan hasil masing-masing untuk hewan/tumbuhan?
- » Fasilitas dan peralatan khusus apa yang dibutuhkan oleh penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan? Manakah dari berikut ini yang tersedia dan fungsional, termasuk, misalnya:
 - Perangkat lunak
 - Pakaian pelindung
 - Senjata api dan amunisi
 - Anjing pelacak
 - Pesawat tak berawak
 - Teknologi penginderaan jauh

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 3 Investigasi Kejahatan (2006) 9 Bank Dunia, Perkakas dan Sumber daya ke Tempur Ilegal Satwa liar Dagang (2018) 5.

3

Bagian II

Kekuatan penegakan

Agar penegakan hukum menjadi bermakna, penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan dan polisi, bea cukai, dan lembaga lain harus memiliki kekuatan dan peralatan yang memadai untuk memungkinkan mereka melakukan penggeledahan, mewawancarai saksi dan tersangka, memasuki tempat, mengumpulkan bukti, menyita



Di beberapa yurisdiksi, petugas penegak satwa liar dan kehutanan adalah petugas yang disumpah dengan wewenang hukum untuk melakukan penyelidikan, membawa senjata api, melakukan penangkapan, dan menyerahkan dan melaksanakan surat perintah. Karena kekuasaan ini intrusif, maka perlu dibatasi dan dipantau untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang tidak perlu. Di tempat lain, departemen margasatwa dan kehutanan tidak memiliki kekuatan untuk terlibat dalam metode penegakan hukum lingkungan yang koersif dan bergantung pada polisi untuk intervensi koersif sesuai kebutuhan.

3.1 Sumberkekuatanpenegakan

Fungsi, wewenang, dan prosedur penegakan hukum biasanya diatur dalam — dan dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang yang relevan dapat mencakup tindakan kekuasaan dan tanggung jawab polisi, hukum acara pidana atau hukum pidana. Tindakan kekuasaan polisi tertentu biasanya mencakup unsur-unsur organisasi serta kekuatan yang relevan dari suatu lembaga kepolisian, khususnya di ranah ketertiban umum. Jika lembaga lain dan unit khusus terlibat dalam penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan, seperti unit penegakan satwa liar, departemen kehutanan, bea cukai, dan lembaga kejahatan serius, kekuatan investigasi mereka dinyatakan secara merata dalam undang-undang yang relevan, seperti undang-undang satwa liar, kehutanan, atau bea cukai. Kewenangan kepolisian yang berkaitan dengan penyidikan pidana kemungkinan besar terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dalam negeri.

Bahkan di yurisdiksi di mana undang-undang polisi umum atau yang dikodifikasikan telah diberlakukan, undang-undang ini biasanya bukan satu-satunya sumber kekuatan penegakan hukum. Undang-undang khusus kadang-kadang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu (seperti korupsi dan pencucian uang) dan sering memberikan kekuasaan tambahan atau diperluas kepada penegak hukum untuk membantu mereka dalam menangani masalah ini atau untuk mengklarifikasi peran mereka.




ALAT
II.17

Sumber kekuatan penegakan

- » Apakah satuan yang bertugas melakukan penindakan memiliki staf yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah yang Dicapup? Jika tidak, alasan apa yang diberikan untuk ini?
- » Apa kualifikasi Minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan?
- » Pelatihan apa yang perlu dihadiri staf sebelum melakukan pekerjaan?
- » Bagaimana komposisi staf misalnya bagaimana perempuan dan orang-orang dari kelompok minoritas terwakili di setiap satuan dan di setiap tingkat/pangkat? Apakah upaya sedang dilakukan untuk memastikan kesetaraan terkait jenis kelamin dan ras?
- » Dalam satuan terkait, berapa proporsi petugas penegak hukum dalam jajaran pengawasan atau manajemen?
- » Berapa rasio petugas dengan masa kerja kurang dari dua tahun dengan mereka yang memiliki masa kerja dua tahun atau lebih? Berapa lama rata-rata petugas tinggal di satuan terkait?
- » Dalam unit yang relevan, berapa proporsi staf penuh waktu/paruh waktu, administratif / investigasi?
- » Apakah petugas penegak hukum dikerahkan secara strategis di lokasi-lokasi penting seperti tempat perburuan dan cagar hutan, taman nasional, pelabuhan, penyeberangan perbatasan, dan sebagainya? Apa keseimbangan Antara staf yang bekerja di lapangan dan mereka yang bekerja di kantor pusat?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian Jilid Saya Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 7-8* UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi (2006) 9-10*

3.2 Jenis kekuatan investigasi

Dalam beberapa kasus, lembaga penegak hukum mengandalkan kekuatan koersif untuk menuntut kepatuhan terhadap undang-undang satwa liar dan kehutanan yang relevan. Untuk itu, kewenangan penegakan hukum petugas harus ditentukan dengan jelas. Kekuasaan utama yang secara tradisional dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam kaitannya dengan penyelidikan kejahatan termasuk penggeledahan dan penyitaan properti, penangkapan dan interogasi. Ini diuraikan dalam Bab II, Bagian 6 dari Perangkat ini.

Teknik investigasi khusus (seperti pengawasan, pengiriman terkontrol, dan kegiatan penyamaran), penggunaan informan, investigasi keuangan, dan kekuatan investigasi yang dibuat khusus untuk penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan dieksplorasi lebih lanjut di Bab II, Bagian 5, dari Perangkat ini.

Jenis kekuatan investigasi

- » Apakah lembaga yang terlibat dalam penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan berwenang untuk melakukan kegiatan berikut?
 - Menghentikan, mempertanyakan, memeriksa dan melakukan penggeledahan barang, orang, tempat dan alat angkut;
 - Mengumpulkan Informasi tentang orang, tempat, alat transportasi dan sebagainya jika mereka dicurigai terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan;
 - Melakukan penangkapan;
 - Menyita properti;
 - Menyita kapal, kendaraan, pesawat terbang, dan sarana serta peralatan lain yang digunakan untuk mengangkut satwa liar atau tumbuhan;
 - Mengakses lisensi, izin dan sertifikat, catatan perdagangan, dokumen impor dan ekspor, catatan pajak dan properti, rekening bank, catatan Komunikasi dan sejenisnya;
 - Menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan; dan
 - Membawa senjata api atau senjata lainnya.
- » Apa wewenang investigasi lain yang tersedia bagi petugas yang bertugas menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan; misalnya apakah mereka melakukan penyelidikan sehubungan dengan korupsi, pencucian uang dan hasil kejahatan yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika tidak, bagaimana kejahatan terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan diselidiki?
- » Apakah kekuatan yang tersedia dan diizinkan cukup untuk mencegah dan mengganggu kejahatan satwa liar dan kehutanan?



ALAT
II.18

3.3 Pelaksanaan kekuasaan, checks and balances

Undang-undang yang relevan biasanya mencakup berbagai pemeriksaan dan keseimbangan prosedural yang tersirat dalam pemberian kekuasaan tertentu. Faktanya, jarang sekali lembaga penegak hukum diberikan kekuasaan yang tidak memiliki batasan dan penggambaran yang tegas.

Hampir semua kekuatan penegakan hukum adalah masalah kebijaksanaan. Sementara sebagian besar kekuasaan polisi yang sah diciptakan oleh hukum, jarang ada undang-undang yang menetapkan bahwa kekuasaan tertentu harus dilaksanakan. Keputusan tentang apakah akan menggunakan kekuasaan tertentu atau tidak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi, adalah masalah penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum mempengaruhi orang dan komunitas.

Penggunaan kekuatan penegakan memiliki implikasi hak asasi manusia yang serius. Pelaksanaan kekuasaan penegakan harus dibatasi pada apa yang benar-benar diperlukan dan masuk akal dalam keadaan tersebut, dan kekuatan yang tidak terbatas dan sembarangan tidak boleh digunakan. Pelaksanaan kekuasaan penegakan hukum yang tidak tepat dan melanggar hukum dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah dirugikan dan dihukum, dan membebaskan orang yang sebenarnya telah melakukan tindak pidana. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau melanggar hukum juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan administrasi peradilan.



Pelaksanaan kekuasaan penegakan hukum

- » Apakah undang-undang menentukan alasan dan ambang batas untuk penerapan kekuatan koersif (misalnya, konsep 'alasan yang masuk akal', 'keyakinan yang masuk akal' atau 'dasar yang cukup')?
- » Apakah penerapan kekuatan penegakan terbatas pada penggunaan kekuatan Minimum atau wajar (atau serupa), sehingga petugas harus menerapkan hanya tingkat kekuatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sah mereka?
- » Tindakan penegakan apa yang memerlukan penerbitan surat perintah? Siapa yang mengeluarkan ini?
- » Apa batasan tersurat dan tersirat lainnya untuk penggunaan kekuatan penegakan hukum yang ada?
- » Catatan apa yang harus dibuat mengenai penggunaan kekuatan penegakan hukum?
- » Apakah mekanisme pengaduan yang independen dan berfungsi sudah ada, baik untuk anggota masyarakat (termasuk masyarakat adat) maupun untuk aparat penegak hukum?
- » Apakah kode etik tersedia untuk memandu penegakan hukum yang etis?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi (2006) 6–7 Universal Ranger Aliansi. Kode Etik Ranger Internasional Ranger Fondasi (IRF) (2021).

4

Bagian II

Intelijen

Penegakan hukum semakin dipimpin oleh intelijen. Ini melibatkan, antara lain, pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi, dan memberikan pendekatan sistematis untuk berpikir kritis yang dapat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan kriminal.



Investigasi yang dikelola dengan baik dan dipimpin oleh intelijen seringkali dapat terbukti lebih hemat sumber daya dan biaya daripada metode spekulatif atau reaktif. Dalam beberapa tahun terakhir, analisis intelijen kriminal telah menjadi bidang yang sangat terspesialisasi dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan semacam itu telah menerima pelatihan ekstensif.

Di bidang kejahatan satwa liar dan kehutanan, intelijen yang berkaitan dengan pelaku, pola penebangan dan perburuan liar, pasar, rute penyelundupan, konsumen dan sebagainya sering hilang atau tidak ada. Di banyak negara, penggunaan intelijen dalam bidang ini, termasuk pengumpulan, penyatuan, analisis, dan penyebarannya, masih kurang dipahami, dan hanya sedikit negara yang mendedikasikan staf untuk bidang ini. Ketika intelijen yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan diperhitungkan, seringkali dalam bentuk yang berdiri sendiri sehingga tidak tergabung dalam intelijen terkait jenis pelanggaran lainnya. Pembagian dan analisis internasional tentang intelijen semacam itu adalah masalah lain yang masih hijau di sebagian besar negara, jika memang ada. Hal ini membatasi kemampuan untuk mengoordinasikan respons terhadap kasus individual atau untuk menetapkan strategi, kebijakan, atau panduan operasional umum.

4.1 Jenis intelijen

Pengumpulan informasi dan pertukaran intelijen di antara otoritas terkait sangat penting untuk keberhasilan kegiatan yang bertujuan membatasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Agar bernilai maksimal, kegiatan pengembangan intelijen harus fokus secara bersamaan pada tingkat strategis, taktis, dan operasional.

- Kecerdasan strategis memungkinkan analisis yang akurat tentang tingkat dan pola kejahatan satwa liar dan kehutanan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Intelijen strategis biasanya meninjau tren saat ini dan yang muncul untuk menjelaskan perubahan dalam lingkungan kejahatan dan ancaman nyata di bidang yang menjadi perhatian. Memanfaatkan berbagai informasi baik dari dalam maupun di luar dunia penegakan hukum untuk mengidentifikasi peluang tindakan dan kemungkinan jalan untuk perubahan kebijakan, program dan undang-undang. Intelijen strategis memfasilitasi reformasi hukum, kerja sama internasional dan

pengembangan strategi pencegahan, pendidikan dan kampanye kesadaran. Mengidentifikasi masalah jangka panjang di bidang kejahatan tertentu, serta ruang lingkup dan proyeksi pertumbuhan kriminalitas. Mengambil pendekatan semacam itu membantu menetapkan prioritas penegakan hukum, menentukan alokasi sumber daya, mendukung perencanaan bisnis, dan menyediakan informasi untuk manajer senior dan pembuat kebijakan.

- ↪ Intelijen taktis mendukung manajer unit garis depan nasional dan lokal dalam merencanakan kegiatan dan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan dan efektivitas operasional, serta mengalokasikan kembali sumber daya dan upaya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang berubah. Juga membantu manajemen operasional dalam memilih target, memandu penyelidikan, membentuk rencana, dan mempertahankan pengawasan.
- ↪ Intelijen operasional biasanya bersifat jangka pendek dan memberikan tim investigasi dengan hipotesis dan kesimpulan mengenai unsur-unsur tertentu dari operasi kriminal, jaringan kriminal dan individu dan kelompok yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Intelijen operasional juga memusatkan perhatian pada penentuan metodologi dan teknik kriminal khusus serta kemampuan, kerentanan, keterbatasan, dan itikad. Dapat membantu mengidentifikasi penjahat, memberikan informasi awal tentang aktivitas mereka dan membantu merencanakan penyelidikan yang dipimpin oleh intelijen secara proaktif, disruptif, dan lebih lanjut. Dalam konteks kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, dan tergantung pada sifat tugasnya, hal itu dapat melibatkan isu-isu seperti metode sumber satwa liar, kayu dan tanaman, metode transportasi, metode pemalsuan dokumen, sarana komunikasi, transaksi keuangan, motif, pasar dan harga.

Meskipun analisis intelijen operasional, taktis, dan strategis memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya saling bergantung dan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Upaya untuk memisahkan mereka, atau untuk mendukung satu dengan mengorbankan yang lain, akan menghasilkan program intelijen yang cacat secara fundamental dan kegagalan untuk menghasilkan penilaian kegiatan kriminal yang berarti. Selain itu, bukti yang dikumpulkan selama investigasi, penyitaan, dan penangkapan seringkali memiliki nilai intelijen dan karenanya tidak boleh diabaikan atau diacuhkan.

4.2 Pengembangan intelijen

Pengembangan intelijen dan aksi-aksi yang muncul dari intelijen tersebut perlu memiliki tujuan akhir, baik pada tingkat strategis untuk mengubah kebijakan maupun pada tingkat operasional/taktis di mana pelaku kejahatan tertentu menjadi sasaran. Dengan demikian, tugas harus dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Itulah sebabnya perencanaan dan arahan yang cermat sangat penting untuk memulai proses intelijen. Tugas analitis dapat dimulai dengan satu bagian informasi yang menimbulkan kekhawatiran atau sebagai akibat dari keinginan manajemen senior untuk memiliki pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang berfokus pada subjek atau berbagai subjek yang menjadi perhatian. Apa pun tugasnya, mereka yang melakukan pekerjaan itu harus objektif dan tidak terpengaruh oleh gagasan yang terbentuk sebelumnya.

4.2.1 Pengumpulan Data

Kejahatan satwa liar dan kehutanan sering terjadi jauh dari pandangan publik; Oleh karena itu, pada umumnya aparat penegak hukum tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menetapkan berbagai sumber untuk pengumpulan informasi berdasarkan fase perencanaan dan pengarahan yang jelas dari proses tersebut.

Secara tradisional, pengumpulan informasi dan pengembangan intelijen terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sumber, misalnya, jagawana

yang selalu berhubungan dengan masyarakat lokal, individu dari masyarakat itu sendiri, petugas patroli perbatasan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di daerah di mana aktivitas satwa liar ilegal banyak terjadi. Ketika pelaku kejahatan satwa liar dan kehutanan memperluas penggunaan teknologi mereka, bidang penting pekerjaan forensik adalah pemeriksaan teknologi tersebut, termasuk analisis telepon seluler, komputer, dan perangkat penyimpanan data. Ini dapat mengungkapkan tautan berharga di antara individu, transaksi keuangan, lokasi, dan riwayat penjelajahan web. Pembukaan lahan dan kepatuhan terhadap — atau pelanggaran — pembatasan penebangan, misalnya, dapat dikenai pengawasan udara dan penginderaan jarak jauh satelit.

Karena korupsi sering memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan, mengumpulkan informasi dan mengembangkan intelijen tentang kejahatan terkait korupsi mungkin berguna untuk memungkinkan petugas penegak hukum mendeteksi di mana kejahatan satwa liar dan kehutanan mungkin terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika laporan bahwa petugas disuap untuk mengeluarkan izin atau lisensi dapat mengarah ke kejahatan satwa liar dan kehutanan lainnya.

Pengumpulan data harus seluas dan sevariatif mungkin, memungkinkan pengembangan produk intelijen yang seimbang dan lebih kredibel. Sementara pengembangan intelijen adalah bidang spesialis penegakan hukum, harus ditekankan bahwa mata dan telinga semua anggota organisasi harus digunakan untuk efek maksimum dalam merekam dan menyampaikan informasi yang mereka peroleh atau amati dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, semua staf berkewajiban untuk memiliki pemahaman tentang cara kerja intelijen, dan kontribusi yang dapat mereka berikan untuk mengembangkan gambaran intelijen yang akurat dan andal.

Pengumpulan data yang lebih canggih juga dapat dilakukan. Ini termasuk penggunaan pengawasan terselubung, informan, dan penyelidik yang menyamar. Teknik-teknik ini memang membutuhkan sejumlah besar pelatihan dan harus mengikuti pedoman hukum.⁵⁸ Jika informasi diperoleh oleh sumber-sumber bukan penegak hukum atau produk intelijen mereka sendiri disebarluaskan kepada penegak hukum, maka perlu dilakukan dengan cermat jika ini akan digunakan, terutama dalam penuntutan dan persidangan.

Penting juga untuk dicatat bahwa pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi untuk tujuan menghasilkan intelijen dapat menimbulkan sejumlah risiko, termasuk risiko manusia penyalahgunaan hak. Misalnya, pengumpulan informasi dapat membahayakan kepercayaan antara anggota masyarakat dan agen penegak hukum, menimbulkan risiko bagi sumber manusia dan mereka yang informasinya, secara sadar atau tidak sadar, diberikan, dan bahkan mungkin mengancam satwa liar itu sendiri.

Terlepas dari sumber manusia, intelijen dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai perangkat elektronik, seperti kamera perangkap untuk mengidentifikasi pemburu liar, atau melalui kecerdasan buatan. Namun, perangkat semacam itu harus diatur penggunaannya, dan bersifat tidak invasif dan tidak merugikan. Analisis media sosial juga merupakan bidang penting dari pengembangan intelijen karena organisasi kriminal yang memperdagangkan satwa liar dan selundupan hutan sering menggunakan situs media sosial untuk mengiklankan dan menjual barang-barang mereka. Jika kejahatan satwa liar dan kehutanan mengikuti tren yang diamati dalam konteks jenis kejahatan terorganisir lainnya, banyak transaksi akan semakin berlangsung di darknet, seringkali melibatkan mata uang kripto untuk pembayaran.

Perkembangan ini merupakan ancaman tetapi juga merupakan kesempatan bagi penyelidik untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan intelijen, dan mendeteksi kasus kejahatan satwa liar dan kehutanan. Penegak hukum dapat memindai dan mencari situs web, terlibat dalam komunikasi daring, dan secara diam-diam terlibat dalam percakapan dengan pedagang manusia dan orang lain yang terlibat dalam perdagangan gelap ini. Selain itu, sistem pengawasan digital otomatis telah dikembangkan yang menggunakan pemrosesan bahasa alami dan algoritma pembelajaran mesin untuk menggabungkan laporan tidak resmi dan resmi tentang peristiwa perdagangan satwa liar yang diperoleh dari internet dalam upaya untuk membangun sistem pengawasan perambahan web otomatis terkait perdagangan satwa liar. Apapun metodologinya

⁵⁸ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 5.1 dan 5.2 dari Perangkat ini.

digunakan untuk mendapatkan informasi, ini dapat membantu mengidentifikasi tren dan metode baru. Kegiatan semacam itu juga dapat mengarah pada perolehan bukti yang mengarah pada penuntutan, penyitaan, penangkapan dan gangguan jaringan dan dapat melampaui pengumpulan intelijen.

4.2.2 Evaluasi

Evaluasi data adalah elemen kunci dari siklus intelijen. Meskipun penting untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemungkinan sumber akan bervariasi dalam keandalan dan motivasi dan bahwa informasi akan bervariasi dalam hal kualitas. Evaluasi harus dilakukan bersamaan dengan atau segera setelah perolehannya, untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan dalam konteks di mana informasi telah diperoleh karena sulit untuk mengevaluasi dengan benar informasi yang belum disampaikan dalam lingkungan setempat. Evaluasi membutuhkan penilaian yang terpisah dari keandalan dan kredibilitas sumber (penyedia informasi) dan setiap bagian dari informasi harus dievaluasi validitas dan akurasi. Satu sumber dapat memberikan banyak informasi pada saat yang sama, tetapi setiap bagian harus melalui evaluasi yang terpisah. Dalam konteks kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, proses ini tidak mungkin dilakukan dan oleh karena itu setiap informasi harus diperlakukan dengan hati-hati. Setelah pengumpul dan analisis data menjadi mahir dalam mengevaluasi data, setiap produk analitis akan memiliki kredibilitas yang lebih besar saat disebarluaskan.

Analisis intelijen adalah bidang yang sangat terspesialisasi dan orang-orang yang melakukan pekerjaan semacam itu telah menerima pelatihan ekstensif. Mengingat bahwa sumber dan informasi harus dievaluasi secara independen satu sama lain, orang yang menulis laporan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem evaluasi. Di unit/badan intelijen yang berkembang dengan baik terdapat perlindungan dalam hal penanganan data. Ini termasuk melindungi sumber dari identifikasi, khususnya ketika data yang sangat sensitif telah diperoleh, dan menggunakan sistem kode penanganan yang menunjukkan kapan dan kepada siapa data dan/atau produk analitis dapat disebarluaskan.

4.2.3 Penyatuan

Collation adalah menyatukan informasi yang dikumpulkan (data mentah) yang diperoleh selama tugas tertentu ke dalam sistem penyimpanan terpusat (baik itu lemari arsip atau basis data terkomputerisasi), dalam format terstruktur (diindeks, referensi silang) yang memungkinkan akses yang cepat dan akurat sebagai bagian dari fase analisis.

Collation adalah prosedur intensif dan memakan waktu yang umumnya membutuhkan tindakan manusia untuk memasukkan data ke dalam basis data (relasional). Orang yang memasukan data harus metodis dan akurat karena basis data akan menjadi alat utama yang digunakan untuk membuat produk analitis/intelijen.

4.2.4 Penilaian ulang tugas

Meskipun proses pengembangan intelijen sering digambarkan sebagai sebuah siklus, setiap elemen dapat berlangsung secara bersamaan. Pengumpulan informasi dapat dilakukan secara rutin atau ditargetkan, premis dapat dibuat, kesimpulan dikembangkan dan hipotesis dapat diuji saat proyek berkembang. Dengan demikian seluruh proses sedang dalam penilaian dan penilaian ulang hingga suatu produk intelijen/analitis siap disebarluaskan.

Pengembangan intelijen

- » Apakah ada undang-undang dan/atau apakah ada kerangka kerja atau Standar (tertulis) lainnya tentang pengumpulan dan penyimpanan Informasi kriminal atau intelijen dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah kerangka kerja dan Standar tersebut memberikan hubungan Antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dan kejahatan terkait seperti korupsi dan pencucian uang?
- » Apa yang diizinkan oleh undang-undang dan kerangka kerja dalam hal pengumpulan Informasi; Apa kendala dan batasannya?
- » Siapa yang mengumpulkan Informasi sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana itu dikumpulkan? Apakah proses ini melibatkan identifikasi dan pengumpulan informasi tentang kejahatan terkait seperti korupsi dan pencucian uang?
- » Teknologi apa yang digunakan untuk mengumpulkan Informasi dan menyusunnya?
- » Sumber informasi bukan manusia apa yang dapat/digunakan (yaitu apakah citra satelit dari penebangan liar dan kegiatan pembukaan lahan tersedia?) Jika demikian, siapa yang menggunakannya dan bagaimana caranya?
- » Siapa yang mengawasi bagaimana Informasi dikumpulkan ?
- » Sistem apa yang digunakan untuk mengevaluasi dan menyusun informasi?
- » Di mana dan bagaimana intelijen dan Informasi disimpan? Apakah basis data dan alat analisis nasional atau regional tertentu digunakan? Apakah informasi dicatat secara manual atau elektronik?
- » Apakah petugas dihimbau untuk mengumpulkan Informasi, menulis Laporan, dan mengajukannya di lokasi pusat? Jika tidak, mengapa tidak?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 4 Sistem Informasi dan Intelijen Polisi (2006) 11–12



4.3 Analisis intelijen

Analisis adalah bagian paling vital dari siklus intelijen, karena produknya akan membentuk dasar dari banyak tindakan yang dilakukan dalam penyelidikan proaktif. Analisis juga mengidentifikasi kesenjangan informasi, menentukan apakah pekerjaan tambahan perlu dilakukan dan menyoroti informasi yang salah atau kontradiktif. Untuk alasan ini, penting bahwa semua informasi harus tunduk pada beberapa bentuk analisis dan pemrosesan sebelum disebarluaskan atau digunakan sebagai intelijen.

Proses analisis ditujukan untuk pengembangan dan penggunaan intelijen untuk mengarahkan tujuan penegakan hukum, baik itu untuk tujuan operasional jangka pendek atau untuk tujuan strategis jangka panjang. Ruang lingkup analisis dan kredibilitasnya secara keseluruhan tergantung pada tingkat dan keakuratan informasi yang diperoleh, dikombinasikan dengan keterampilan analis. Analisis adalah proses siklus, yang dapat dilakukan untuk membantu semua jenis tujuan penegakan hukum. Jenis kejahatan dan operasi kriminal yang berbeda memerlukan skenario yang berbeda, tetapi dalam semua kasus informasi yang digunakan tidak boleh disaring sebelumnya melalui sudut pandang selektif yang dipaksakan secara artifisial dan sewenang-wenang.

Integrasi data adalah fase pertama dari proses analitis. Ini melibatkan menggabungkan informasi dari berbagai sumber dalam persiapan untuk perumusan kesimpulan. Berbagai teknik dapat digunakan untuk menampilkan informasi ini, yang paling umum adalah penggunaan teknik pembuatan grafik. Bagan semacam itu tidak boleh berdiri sendiri dan harus selalu disertai dengan arahan lisan atau laporan tertulis.

Selama beberapa tahun terakhir, perangkat lunak analitis telah sangat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi pola dan kesenjangan dalam data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum dan jaksa penuntut untuk lebih mudah mengidentifikasi jaringan pemburu liar, penjual, pembeli, dan fasilitator (seperti pejabat korup), untuk mengenali pola, karakteristik dan lokasi perilaku kriminal, dan untuk mengambil tindakan

sebelum terjadi tindak pidana. Selain itu, kemunculan dan perkembangan pesat alat kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin telah memungkinkan penegak hukum untuk secara mandiri mendeteksi pola perilaku kriminal dengan 'mengajar' perangkat lunak melalui informasi yang dikumpulkan dalam penyelidikan sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak dalam proses analitik telah sangat meningkatkan kemampuan pengguna untuk menemukan koneksi dan pola yang sebelumnya tersembunyi dalam data dan memungkinkan pemetaan jaringan kriminal. Namun, perangkat lunak dan perangkat keras mahal dan oleh karena itu mungkin lebih hemat biaya bagi lembaga untuk berbagi sumber daya analitis, basis data, dan perangkat lunak komputer. Selain itu, banyak lembaga penegakan hukum dan intelijen mungkin tidak memiliki materi, pelatihan, atau konektivitas internet untuk mendukung hal ini.

Langkah selanjutnya dalam proses analitis adalah interpretasi atau penalaran logis, yang seringkali membutuhkan melampaui fakta dan membutuhkan jumlah maksimum informasi yang harus dinilai pada saat integrasi untuk menentukan relevansinya. Mengecualikan informasi pada awal proses dapat dengan mudah mengarah pada signifikansi informasi penting yang diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan analisis yang salah, yang pada akhirnya dapat membahayakan penyelidikan.

Analisis sering mengidentifikasi proyek tambahan yang bersinggungan dengan yang asli. Di masa lalu, proyek-proyek ini biasa dilakukan secara serempak dan bersamaan dengan tugas utama. Namun, pendekatan ini dapat menyebabkan penyebaran sumber daya, penundaan, kurangnya kohesi, dan produk akhir berkualitas rendah. Melalui pengalaman, sekarang telah diterima bahwa sebagian besar proyek analitis harus dilakukan secara berurutan, satu per satu, atau oleh tim analisis independen.



Analisis intelijen

- » Apakah ada undang-undang dan/atau apakah ada kerangka kerja atau Standar (tertulis) lain tentang analisis Informasi kriminal atau intelijen dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah kerangka kerja dan Standar tersebut memberikan hubungan Antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dan kejahatan terkait seperti korupsi dan pencucian uang?
- » Apa yang diizinkan oleh undang-undang dan kerangka kerja dalam hal analisis intelijen? Apa kendala dan batasannya?
- » Siapa yang menganalisis Informasi dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Siapa yang menganalisis Informasi terkait korupsi dan pencucian uang?
- » Metode dan teknologi apa yang digunakan untuk menganalisis informasi dan menghasilkan intelijen?
- » Siapa yang mengawasi bagaimana intelijen dihasilkan?
- » Di mana dan bagaimana intelijen dan Informasi disimpan? Apakah basis data dan alat analisis nasional atau regional tertentu digunakan? Apakah informasi dicatat secara manual atau elektronik?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 4 Sistem Informasi dan Intelijen Polisi (2006) 13–15*
 Bank Dunia, *Alat dan Sumber Daya untuk Memerangi Perdagangan Satwa Liar Illegal (2018) 4.*

4.4 Penyebaran

Faktor penting dalam setiap tugas intelijen adalah penyebaran produk yang cepat dan efektif kepada lembaga atau penyelidik terkait yang berada dalam posisi untuk menggunakannya. Selanjutnya, jika sesuai, lembaga penerima harus didorong untuk merespons, baik dengan informasi atau intelijen tambahan, atau dengan memberikan rincian tentang bagaimana produk itu digunakan. Dalam ranah kejahatan satwa liar dan kehutanan, ini sangat penting karena ada kesenjangan pengetahuan yang luas sehubungan dengan bidang kriminalitas ini.

Secara historis, penyebaran intelijen cenderung dipandu oleh prinsip 'perlu tahu'. Hal ini dapat menyebabkan intelijen terbuang sia-sia ketika terlalu sedikit orang yang dianggap perlu tahu. Sementara penyebaran akan menyebabkan hilangnya kendali atas bagaimana intelijen digunakan, perlindungan tertentu dapat ditambahkan untuk memastikan perlindungan data. Selain itu, lembaga dan unit perlu memiliki kepercayaan satu sama lain; di sinilah membangun hubungan pribadi dengan kolega, terutama melalui jejaring dan seminar, harus didorong. Selain itu, tidak jarang lembaga, atau pejabat di dalamnya, salah memahami undang-undang, peraturan, dan kebijakan perlindungan data dan menafsirkannya sebagai mencegah berbagi informasi dan intelijen, meskipun sebagian besar undang-undang semacam itu secara khusus mengizinkan berbagi untuk tujuan mendeteksi dan mencegah kejahatan.

Selain berbagi intelijen dengan instansi terkait, hasil analisis intelijen dapat disebarluaskan kepada khalayak yang lebih luas, seperti LSM atau masyarakat umum, melalui penggunaan laporan analitis yang disanitasi. Ketika intelijen tidak dapat dibagikan dengan mudah karena alasan sensitivitas operasional, sistem komunikasi yang aman mungkin perlu digunakan atau dibuat.

Tahap diseminasi sangat penting karena membentuk dasar untuk tindakan lebih lanjut. Produk intelijen tersebut dapat merupakan bagian dari investigasi yang sedang berlangsung, dimana produk-produk lain juga akan disebarluaskan, atau dapat berupa laporan akhir di akhir investigasi yang kemudian ditutup.

Diseminasi intelijen

- » Apakah ada undang-undang dan/atau ada kerangka kerja (tertulis) lain tentang pertukaran dan penyebaran informasi atau intelijen kriminal dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah kerangka kerja semacam itu memberikan hubungan Antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dan kejahatan terkait seperti korupsi dan pencucian uang?
- » Apa yang diizinkan oleh undang-undang dan kerangka kerja dalam hal pertukaran intelijen; Apa kendala dan batasannya?
- » Bagaimana Informasi dan intelijen terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan dipertukarkan?
- » Siapa yang mengawasi bagaimana Informasi dan intelijen dipertukarkan?
- » Apakah lembaga diizinkan atau diharuskan untuk bertukar Informasi dan intelijen dengan negara lain? Apakah ada lembaga yang bertanggung jawab untuk berbagi intelijen secara sistematis antar negara?
- » Apakah ada Komite penegakan multi-lembaga dan antar-lembaga yang mendukung pertukaran intelijen?

Sumber daya tambahan:

UUNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 4 Sistem Informasi dan Intelijen Polisi (2006) 15–16



4.5 Investigasi proaktif

Investigasi proaktif berusaha menargetkan ancaman kejahatan yang menonjol dan muncul untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkannya, daripada menanggapi kejahatan setelah terjadi (investigasi reaktif). Melalui investigasi proaktif, penegak hukum dapat mendeteksi kegiatan kriminal atas inisiatif mereka sendiri, daripada bereaksi terhadap kejahatan yang telah dilaporkan atau diamati oleh orang lain.⁵⁹ Akibatnya, dalam investigasi proaktif, penegak hukum melakukan kontrol yang jauh lebih besar atas awal dan arah investigasi. Investigasi semacam itu juga merupakan metode yang digunakan dalam menanggapi intelijen mengenai kegiatan kriminal yang sedang berlangsung atau yang direncanakan.

Teknik yang digunakan dalam investigasi proaktif sebagian besar sama dengan yang digunakan untuk bentuk investigasi⁶⁰ lainnya tetapi kegiatan kriminal diidentifikasi melalui penelitian dan pengumpulan intelijen. Investigasi proaktif sangat berguna untuk mengganggu jaringan kriminal dan kelompok kriminal terorganisir dan mungkin sangat membantu dalam membatasi, menjerakan, mencegah, dan mengganggu kejahatan satwa liar dan kehutanan.



Investigasi proaktif

- » Bagaimana dan dalam konteks apa investigasi proaktif digunakan dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah (Tim) investigasi dikerahkan untuk menyelidiki Target yang telah diidentifikasi sebelumnya (yaitu penjahat terkemuka) daripada menanggapi Laporan kejahatan?
- » Apakah analisis dan Profil digunakan untuk membangun kasus terhadap Target? Jika ya, bagaimana Target dipilih?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 10

4.6 Penilaian risiko dan ancaman

Penilaian risiko dan ancaman berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya. Sehubungan dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, alat penilaian risiko dan ancaman dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang terjadinya kejahatan. Penelitian menyeluruh tentang risiko yang mempengaruhi kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat membantu menilai kemungkinan perilaku kriminal di masa depan; misalnya, risiko pelaku yang diketahui melakukan pelanggaran kembali atau ancaman kelompok kejahatan terorganisir yang memasuki pasar tertentu. Memahami kekuatan yang mempengaruhi risiko, alat ini juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana intervensi dapat diterapkan dengan baik. Dikombinasikan dengan investigasi proaktif, yang dibahas di Bagian sebelumnya dari Perangkat ini, penilaian risiko dan ancaman dapat memainkan peran penting dalam menghalangi dan mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Faktor-faktor (atau kekuatan) yang meningkatkan atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan mungkin terkait dengan pelaku atau kelompok kriminal, catatan kriminal mereka, akses ke peralatan dan senjata, peluang mereka untuk menyuap pejabat, atau risiko sosial dan lingkungan yang lebih luas terkait komunitas lokal, permintaan, perlindungan spesies dan kemiskinan.

Salah satu jenis alat penilaian risiko adalah apa yang disebut instrumen penilaian risiko aktuarial. Instrumen ini mengambil pendekatan statistik untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan. Untuk pelanggar individu, ini dapat mencakup nilai numerik dalam kaitannya dengan faktor-faktor seperti riwayat kriminal, penyakit mental, dan masalah penyalahgunaan zat. Alat algoritmik untuk memprediksi risiko pelanggaran ulang saat ini sedang dikembangkan tetapi tetap bersifat sangat kontroversial. Alat penilaian risiko kedua

⁵⁹ Mengenai 'melaporkan kejahatan' lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 6.1, dari Perangkat ini.
⁶⁰ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 5, dari Perangkat ini.

melibatkan penilaian profesional terstruktur: alat ini tidak menghasilkan skor risiko otomatis melainkan evaluator yang menentukan perkiraan risiko akhir dan membuat saran tentang bagaimana risiko tersebut dapat dikelola. Ini juga berfungsi untuk menghindari bias, yang biasanya berkontribusi pada prediksi risiko yang tidak akurat. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa banyak penyelidik cenderung mengabaikan bukti seperti keterangan saksi, bukti foto atau DNA jika bukti tersebut bertentangan dengan pandangan mereka tentang kesalahan tersangka. Hasil penelitian berkaitan dengan bagaimana skor risiko digunakan oleh aktor peradilan pidana untuk membuat keputusan mereka.

Penilaian risiko dan ancaman

- » Alat apa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terjadi? Apakah alat tersebut menilai risiko korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Faktor risiko apa yang berkaitan dengan Perorangan yang dipertimbangkan? Faktor sosial dan Lingkungan apa yang dipertimbangkan?
- » Siapa/unit penegak hukum mana yang melakukan penilaian risiko dan ancaman dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka dilatih, dan hasil apa yang telah mereka hasilkan? Langkah-langkah apa yang ada untuk menghindari bias dan Diskriminasi?

Sumber daya tambahan:

UUNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 4 Sistem Informasi dan Intelijen Polisi (2006) 15–16





Dalam investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan, yang seringkali sangat canggih dan sering melibatkan sejumlah besar penjahat atau organisasi kriminal, teknik investigasi khusus mungkin sangat berguna; Dalam beberapa kasus, teknik investigasi khusus mungkin menawarkan satu-satunya metode investigasi yang efektif.

5.1 Teknik Investigasi Khusus

'Teknik investigasi khusus' (berbeda dari metode investigasi rutin) adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada tindakan penegakan hukum yang dirancang untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan mendeteksi dan menyelidiki kejahatan dan pelakunya dengan cara yang tidak memperingatkan orang atau kelompok yang menjadi sasaran penyelidikan. Hal itu mungkin melibatkan, misalnya, pengiriman bahan tumbuhan atau hewan yang dilarang secara terkendali, penggunaan identitas perusahaan palsu, atau penggunaan pengawasan teknis, fotografi, dan video. Pengawasan internet adalah metode yang semakin diperlukan untuk mengungkap kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan situs web dan iklan daring untuk fauna dan flora, termasuk bagian dan bahan hewan dan tumbuhan.

Teknik investigasi khusus tidak boleh menjadi alat investigasi pilihan pertama. Sebaliknya, penggunaannya harus dipertimbangkan ketika cara lain yang tidak terlalu intrusif terbukti tidak efektif atau ketika tidak ada alternatif yang masuk akal untuk mendapatkan informasi atau bukti penting. Bahkan ketika penggunaan teknik investigasi khusus sudah tepat, teknik tersebut umumnya perlu digunakan bersamaan dengan metode investigasi lain agar menjadi paling efektif.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi mendorong, sejauh mungkin dan diperbolehkan menurut undang-undang domestik, penggunaan teknik investigasi khusus yang tepat, seperti pengawasan elektronik atau bentuk lain dan operasi penyamaran oleh pihak yang berwenang, untuk tujuan memerangi kejahatan terorganisir dan korupsi secara efektif.⁶¹

Beberapa teknik investigasi khusus bisa sangat intrusif dan karenanya membutuhkan keseimbangan yang cermat antara hak privasi tersangka dengan kebutuhan untuk menyelidiki kejahatan yang serius. Hak atas perlindungan dari pelanggaran privasi yang sewenang-wenang adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang diatur dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Poin lebih lanjut untuk dipertimbangkan adalah penerimaan dan penggunaan bukti yang dikumpulkan melalui teknik investigasi khusus dalam proses pidana selanjutnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi

⁶¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal. 50; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 20.

tidak membahas masalah ini dan keputusan tentang persyaratan untuk menggunakan bukti tersebut di pengadilan diserahkan kepada undang-undang dan kebijaksanaan Negara Pihak yang bersangkutan.

Perlindungan yang sesuai untuk teknik investigasi khusus dapat bervariasi tergantung pada teknik yang bersangkutan. Teknik investigasi khusus biasanya membutuhkan dasar legislatif, yang tanpanya mereka mungkin tidak diizinkan oleh undang-undang. Beberapa teknik menimbulkan perhatian khusus tentang privasi dan hak asasi manusia dan karenanya harus sepenuhnya memperhitungkan hak tersangka dan pihak ketiga. Untuk alasan ini, sebagian besar yurisdiksi memerlukan sejumlah perlindungan ketat terhadap penyalahgunaan, termasuk persyaratan bahwa pelanggaran tersebut serius, bahwa penggunaan teknik tersebut penting untuk kasus tersebut, bahwa bukti penting tidak dapat diperoleh dengan cara yang tidak terlalu intrusif, dan bahwa otoritas yang berwenang harus puas dengan alasan yang masuk akal bahwa ciri dan tingkat kegiatan kejahatan membenarkan penggunaan teknik investigasi khusus. Hal ini membutuhkan otoritas yang berwenang untuk mempertimbangkan kebutuhan dan proporsionalitas penggunaan teknik investigasi khusus. Di sebagian besar yurisdiksi, penggunaan teknik semacam itu memerlukan otorisasi oleh pejabat senior lembaga penegak hukum, jaksa, atau pengadilan (terkadang melalui penerbitan surat perintah). Bukti yang dikumpulkan tanpa otorisasi tersebut kemungkinan besar akan diputuskan tidak dapat diterima di pengadilan dan dapat mendorong litigasi terhadap agen dan petugas individu. Di beberapa yurisdiksi, penggunaan teknik tersebut dibatasi untuk lembaga penegak hukum tertentu dan untuk jenis kejahatan tertentu. Aspek terakhir adalah alasan bagus lainnya untuk tidak hanya berfokus pada undang-undang satwa liar atau kekhutanan ketika menanggapi, dan menyelidiki, kejahatan semacam itu.

Teknik investigasi khusus

- » Teknik investigasi khusus apa yang diizinkan untuk digunakan dalam Investigasi kejahatan satwa liar dan kekhutanan? Ini mungkin termasuk, Antara lain, penggunaan :
 - Intersepsi telekomunikasi, lalu lintas surel dan pos/surat;
 - Perangkat mendengarkan, dan perangkat pelacakan dan Pemosisian;
 - Pengawasan statis atau seluler, dan pengawasan foto dan video;
 - Identitas yang diduga digunakan untuk menyamar ;
 - Penggeledahan Terselubung tempat, surat, paket, kontainer dan kendaraan;
 - Pengiriman terkontrol ;
 - Simulasi atau uji coba pembelian suatu barang;
 - Pengawasan internet;
 - Simulasi tindak pidana korupsi atau 'tes integritas';
 - Pemantauan real-time terselubung atas transaksi keuangan;
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kekhutanan menggunakan teknik investigasi khusus dalam praktiknya? Jika demikian, yang mana, seberapa sering dan dalam keadaan apa?
- » Bagaimana penyidik kejahatan satwa liar dan kekhutanan dilatih dalam penggunaan teknik investigasi khusus ?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan teknik investigasi Terselubung? Apakah penggunaannya memerlukan otorisasi dari pengadilan atau sumber mandiri lainnya? Apa batasan dan ketentuan pada perintah untuk pengawasan rahasia?
- » Siapa yang mengawasi penggunaan teknik investigasi khusus? Apakah upaya pencegahan dan penanganan kejahatan HAM dilakukan? Jika ya, bagaimana caranya?

Sumber daya tambahan:

Konferensi PBB Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Kelompok Kerja Sama Internasional, kerja sama internasional yang melibatkan teknik investigasi khusus, Dokumen PBB CTOC/COP/WG.3/2020/3 (12 Mei 2020) UUNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 4 Informasi Polisi dan Sistem Intelijen (2006) 15–16



5.1.1 Pengiriman terkontrol

Ketika otoritas penegak hukum secara fisik mendeteksi atau mengumpulkan intelijen tentang satwa liar atau tanaman yang diselundupkan, reaksi pertama mereka adalah mencegah dan menyita pengiriman semacam itu untuk memastikan bahwa barang selundupan tidak dapat diperdagangkan. Dalam kasus perdagangan lintas batas, tindakan seperti itu seringkali akan menggagalkan identifikasi tersangka dan tentunya akan membuat semakin sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut orang tersebut dan rekan mereka.

Pengiriman terkontrol adalah teknik investigasi rahasia yang digunakan oleh penegak hukum untuk melacak rute komoditas untuk mengidentifikasi orang yang terkait dengan kegiatan kejahatan dan untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Metode ini telah digunakan secara luas dalam kaitannya dengan perdagangan narkoba, tetapi dapat digunakan juga untuk kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Meski biasanya pengiriman terkontrol biasanya melibatkan pengiriman, bagasi atau kargo untuk melanjutkan perjalanannya, mungkin ada kesempatan (jika dikelola dengan sangat hati-hati) ketika kurir atau bagal diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya.

Di beberapa negara, undang-undang mencakup penggunaan atau pelarangan pengiriman terkendali, meskipun mungkin tidak terkait secara khusus dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Dimungkinkan juga untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas penegakan untuk menggunakan teknik tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi juga mendorong, sejauh mungkin dan diperbolehkan menurut undang-undang domestik, penggunaan pengiriman terkendali yang tepat oleh otoritas yang berwenang untuk tujuan memerangi kejahatan terorganisir dan korupsi secara efektif.⁶²

Seperti halnya teknik investigasi khusus lainnya, tanggung jawab khusus diperlukan dari lembaga yang terlibat dalam operasi pengiriman yang terkendali. Tanggung jawab ini berbeda-beda tergantung pada tahap di mana suatu lembaga terlibat. Misalnya, suatu operasi pengiriman terkendali mungkin harus diberi wewenang atau diberi otoritas oleh seorang pejabat dengan pangkat tertentu, atau persetujuan dapat diminta terlebih dahulu dari seorang jaksa atau hakim. Pengiriman terkendali membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang hati-hati terutama ketika beberapa lembaga dan negara terlibat.



ALAT
II.26

Pengiriman terkontrol

- » Apa dasar hukum untuk melakukan operasi pengiriman terkontrol? Apakah undang-undang ini khusus untuk Penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan berdasarkan hukum domestik untuk melakukan pengiriman terkontrol?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan melakukan pengiriman terkontrol dalam praktiknya? Jika ya, bagaimana dan dalam keadaan apa?
- » Dengan tidak adanya dasar hukum, apakah mungkin untuk melakukan operasi pengiriman terkontrol dengan persetujuan otoritas penuntutan?
- » Apakah undang-undang atau peraturan nasional mengizinkan penggantian barang selundupan yang terdeteksi sebelum pengiriman terkontrol yang sebenarnya dilakukan? Jika demikian, dapatkah catatan diterima untuk tujuan bukti di pengadilan?
- » Agensi mana yang harus memimpin sehubungan dengan pengiriman terkontrol?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan pengiriman terkontrol? Apakah otorisasi dari sumber yudisial atau sumber mandiri lainnya diperlukan? Apa batasan dan ketentuan untuk perintah untuk pengiriman terkontrol ?
- » Apakah prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk mendukung pengiriman terkontrol yang cepat dan efisien?

Sumber daya tambahan:
INTERPOL dan CITES Pengiriman Terkontrol: Teknik untuk Menyelidiki Kejahatan Satwa Liar (2007)

⁶² Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal. 50; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 20.

5.1.2 Pengawasan fisik

Pengawasan fisik melibatkan pengamatan terhadap orang atau tempat untuk tujuan menyelidiki suatu kejahatan yang telah atau sedang dilakukan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengawasan fisik berarti bahwa jika aparat penegak hukum mencurigai seseorang terlibat dalam kegiatan terlarang, mereka akan mengikutinya. Ini mungkin juga melibatkan pengawasan tempat atau lokasi tertentu, kendaraan atau benda lain.

Pengawasan fisik adalah alat investigasi yang banyak digunakan yang dapat digunakan dalam batas-batas tertentu. Jika pengawasan fisik melibatkan metode rahasia, itu bisa menjadi metode pengumpulan bukti yang sangat intrusif, membutuhkan keseimbangan yang cermat antara hak privasi seseorang dan kebutuhan untuk menyelidiki kejahatan serius. Karena alasan ini, prosedur persetujuan, mekanisme kontrol, dan perlindungan lainnya akan diperlukan untuk memastikan penggunaan pengawasan fisik wajar dan diperlukan dalam situasi tersebut dan untuk mencegah penyalahgunaan. Hak atas privasi di rumahnya sendiri, misalnya, hampir diakui secara universal, sehingga yurisdiksi membatasi intrusi tersebut. Ambang batas kapan pihak berwenang dapat memasuki ruang pribadi bergantung pada yurisdiksi dan dapat mencakup rujukan ke dasar yang cukup, kecurigaan yang masuk akal, dan alasan serta kemungkinan yang masuk akal. Entri semacam itu umumnya membutuhkan otorisasi yudisial sebelumnya.

Pengawasan fisik, apakah itu di satu tempat, berjalan kaki atau bergerak, mungkin memerlukan penggunaan tim petugas dengan peralatan komunikasi yang relevan. Staf tersebut memerlukan pelatihan spesialis: mengikuti seseorang tanpa diketahui tidaklah mudah dan sangat memakan sumber daya dan waktu. Kelompok kejahatan terorganisir dan penjahat individu yang sadar akan pengawasan sangat sulit untuk diawasi secara diam-diam. Mengizinkan target untuk mengetahui pengawasan kemungkinan besar akan merusak investigasi saat ini dan menghambat investigasi di masa mendatang, juga menimbulkan risiko keamanan bagi personel penegak hukum. Untuk alasan ini, memasuki ranah teknik investigasi ini harus direncanakan dengan sangat cermat dan hati-hati. Beberapa yurisdiksi memiliki unit dan departemen khusus yang fungsinya hanya untuk menangani pengawasan. Jika unit semacam itu ada, akan jauh lebih efektif untuk memberi pengarahan dan melibatkan mereka pada aspek penyelidikan yang terkait dengan satwa liar atau kehutanan, daripada agen satwa liar atau kehutanan yang mencoba melakukan teknik semacam itu.

Pengawasan fisik

- » Apa dasar hukum untuk pengawasan fisik orang atau tempat? Apakah undang-undang ini berlaku untuk Investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan berdasarkan hukum domestik untuk melakukan pengawasan fisik? Perangkat apa yang tersedia dan diizinkan untuk digunakan untuk tujuan pengawasan fisik?
- » Apakah ada satuan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan fisik? Jika ya, apakah mereka pernah terlibat dalam pengawasan fisik sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Dengan tidak adanya dasar hukum, apakah mungkin untuk terlibat dalam pengawasan fisik dengan persetujuan otoritas penuntutan?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan pengawasan fisik? Apakah otorisasi dari sumber yudisial atau sumber independen lainnya diperlukan? Apa batasan dan kondisi untuk pengawasan fisik?
- » Apakah prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk mendukung pengawasan fisik yang cepat dan efisien?



ALAT
II.27

5.1.3 Pengawasan elektronik

Pengawasan elektronik melibatkan pemantauan, intersepsi, penyalinan atau manipulasi pesan atau sinyal yang ditransmisikan melalui sarana elektronik, atau pemantauan atau perekaman kegiatan dengan cara elektronik untuk tujuan menyelidiki suatu kejahatan. Ini termasuk pengawasan elektronik dalam bentuk alat pendengar atau penyadapan telepon dan komunikasi daring dan surel. Yang terakhir ini sangat berguna ketika sekelompok tersangka yang erat tidak dapat ditembus oleh orang luar atau di mana infiltrasi atau pengawasan fisik akan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima untuk penyelidikan atau keselamatan penyelidik.

Pengawasan elektronik selanjutnya mencakup pengawasan audio, pengawasan visual, pelacakan, dan pengawasan data. Alat yang lebih baru termasuk perangkat penginderaan jauh, drone, satelit yang dapat digunakan untuk memantau penebangan dan aktivitas hutan lainnya, dan pelacakan sistem identifikasi otomatis (AIS) yang banyak digunakan untuk tujuan maritim.

Mengingat intrusifnya, pengawasan elektronik umumnya tunduk pada kontrol yudisial yang ketat dan banyak perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Perolehan otorisasi untuk menggunakan pengawasan elektronik secara terlebih dahulu memastikan bahwa bukti diperoleh secara sah, yang mungkin berimplikasi pada penerimaan bukti tersebut. Di beberapa yurisdiksi kewenangan untuk melakukan pengawasan dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di negara lain, pengadilan memiliki peran pengaturan utama. Artinya, seorang hakim dapat mengizinkan pengawasan terjadi atas dasar kasus tanpa batasan legislatif.

Ketika pengawasan dilakukan dalam situasi di mana subjek pengawasan akan memiliki ekspektasi privasi yang wajar, surat perintah biasanya diperlukan. Agar suatu surat perintah dapat dikeluarkan, umumnya diperlukan adanya alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa pelanggaran yang relevan telah, sedang atau akan dilakukan. Jika surat perintah untuk melakukan pengawasan tidak diperlukan, biasanya ada faktor lain yang membatasi penggunaannya. Ini termasuk pertimbangan harapan privasi subjek yang wajar, perolehan beberapa izin lain (meskipun bukan yudisial), dan persyaratan pemberitahuan untuk pengawasan terbuka.

Pengawasan elektronik yang dilakukan oleh penegak hukum di tempat umum tidak selalu membutuhkan surat perintah. Ini biasanya mencakup, misalnya, pengawasan visual seperti sistem video dalam mobil, perangkat video yang dikenakan di tubuh, dan CCTV yang dipantau polisi. Bentuk-bentuk pengawasan ini biasanya diatur oleh kode etik dan pedoman, jika tersedia.

Seperti teknik investigasi khusus lainnya, pengawasan elektronik membutuhkan waktu dan sumber daya yang intensif dan membutuhkan staf yang telah terlatih secara memadai. Penggunaannya harus direncanakan dengan sangat cermat dan hati-hati dan, seperti pengawasan fisik, penggunaan lebih disukai untuk menggunakan personel pengawasan spesialis, jika tersedia.

Pengawasan elektronik

- » Apa dasar hukum untuk melakukan operasi pengawasan elektronik? Apakah undang-undang ini berlaku untuk Penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan berdasarkan hukum domestik untuk melakukan pengawasan elektronik? Perangkat apa yang tersedia dan diizinkan untuk digunakan untuk tujuan pengawasan elektronik?
- » Dengan tidak adanya dasar hukum, apakah mungkin untuk melakukan operasi pengawasan elektronik dengan persetujuan otoritas penuntutan?
- » Lembaga mana yang harus memimpin sehubungan dengan pengawasan elektronik?
- » Apakah ada satuan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan elektronik? Jika ya, apakah mereka telah terlibat dalam pengawasan elektronik dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan pengawasan elektronik? Apakah otorisasi dari sumber yudisial atau sumber independen lainnya diperlukan? Apa batasan dan ketentuan untuk perintah pengawasan elektronik?
- » Siapa yang mengawasi operasi pengawasan elektronik?
- » Apakah prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk mendukung pengawasan elektronik yang cepat dan efisien ?

Sumber daya tambahan:

Konferensi PBB Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Kelompok Kerja Sama Internasional, kerja sama internasional yang melibatkan teknik investigasi khusus, Dokumen PBB CTOC/POLISI/WG.3/2020/3 (12 Mei 2020) 3 [9]–[12]



5.1.4 Pengawasan internet dan pemantauan media sosial

Internet adalah platform penting untuk memperdagangkan satwa liar dan hasil hutan dan media yang nyaman untuk beriklan dan menjual secara anonim. Menggunakan internet dan platform media sosial memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan dan / atau memalsukan identitas mereka untuk menghindari deteksi di mana pun di dunia. Mengenali penjualan barang terlarang di internet bisa sangat menantang, karena melihat gambar atau nama populer yang digunakan pada iklan situs web seringkali tidak cukup untuk mengidentifikasi spesimen atau untuk menentukan apakah spesimen tersebut terdaftar di CITES atau spesies yang dilindungi secara nasional. Selain itu, internet memungkinkan penjualan langsung ke pembeli, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perantara, bersama dengan biaya terkait dan risiko deteksi. Seperti halnya pasar fisik, penjualan daring legal dan ilegal serta transaksi lainnya sering kali bercampur. Perusahaan yang sah dapat memberikan perlindungan untuk perdagangan ilegal, pedagang yang sah dapat merambah ke peluang kejahatan untuk menjual produk mereka secara daring atau untuk mencuci hasil perolehan. Meskipun ada peningkatan kesadaran dan kewaspadaan oleh beberapa perusahaan daring, proliferasi produk satwa liar ilegal di internet terus berlanjut.

Internet telah menjadi outlet utama untuk mengiklankan dan mengatur penjualan, termasuk spesimen satwa liar, baik secara legal maupun ilegal. Berbagai platform digital, seperti media sosial dan darknet, dapat memungkinkan kontak langsung antara pembeli dan penjual tanpa publisitas yang terkait dengan situs web daring atau pasar fisik. Untuk lebih menyembunyikan transaksi, kata kunci sering diganti sedemikian rupa sehingga produk seperti gading, cula badak, dan kayu tropis biasanya tidak disebut dengan nama aslinya. Alih-alih teks yang diketik, gambar teks adalah cara lain untuk menghalangi upaya deteksi dan penyaringan oleh lembaga penegak hukum. Hingga saat ini, darknet jarang digunakan untuk memperdagangkan satwa liar, tetapi pemerintah harus tetap waspada dan siap beradaptasi serta merespons tren baru.

Sebanyak internet dan komunikasi daring menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, hal itu juga menghadirkan peluang untuk deteksi dan intervensi. Pengawasan rutin internet adalah metode yang sangat diperlukan untuk mengungkap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini melibatkan pemeriksaan situs web daring dan iklan untuk fauna dan flora, termasuk bagian dan bahan hewan dan tumbuhan, serta pemantauan rutin media sosial. Selain itu, penelitian tentang pasar daring memiliki potensi untuk mengungkap tren lain, seperti pergeseran preferensi konsumen dan reaksi pasar terhadap peristiwa khusus (misalnya undang-undang baru dan daftar spesies yang terancam punah).

Melakukan investigasi terkait internet, pemantauan dan pengawasan akan selalu membutuhkan pengetahuan khusus dan penggunaan harus dilakukan (jika mungkin) dari unit dan departemen penegakan terhadap kejahatan dunia maya yang ada. Pekerjaan penegakan terkait dunia maya bersifat khusus dan intensif sumber daya dan waktu, dan karenanya perlu ditargetkan dengan hati-hati ke tempat yang benar-benar bermanfaat dan produktif. Membujuk unit penegakan kejahatan dunia maya untuk menangani kejahatan satwa liar dan kehutanan mungkin sulit, mengingat prioritas mereka dengan jenis kejahatan lainnya. Sangat penting untuk hanya menargetkan kegiatan berbasis internet yang benar-benar komersial dan bersifat kriminal, terutama karena kesulitan yurisdiksi mungkin dihadapi, seperti halnya rintangan sehubungan dengan identifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Atas permintaan Sekretariat CITES, Program Keamanan Lingkungan INTERPOL menghasilkan 'Wildlife Linked to Internet – Guidelines for Law Enforcement Practitioners'. Bagian pertama dari Panduan ini memberikan ikhtisar tentang teknologi dasar seperti perangkat keras dan perangkat lunak, internet, perambah, cloud, pencadangan, dan mesin telusur, serta cara memanfaatkannya selama penyelidikan daring. Bagian kedua "memperkenalkan karakteristik khas Internet dan cara mengenali kejahatan terhadap satwa liar yang terkait dengan Internet". Bagian ketiga berfokus pada pengumpulan bukti dalam penyelidikan perdagangan gelap satwa liar secara daring, termasuk cara meminta, menangani, dan menganalisis bukti tersebut, mengingat bahwa setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda untuk memastikan bahwa setiap bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan.⁶³



ALAT
II.29

Pengawasan Internet dan pemantauan media sosial

- » Apakah ada dasar hukum untuk melakukan pengawasan Internet dan pemantauan media sosial? Jika demikian, apakah undang-undang ini khusus untuk Investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan berdasarkan hukum domestik untuk melakukan pengawasan Internet dan pemantauan media sosial?
- » Dengan tidak adanya dasar hukum, apakah mungkin untuk melakukan operasi pengawasan dan pemantauan Internet dengan persetujuan otoritas penuntutan?
- » Lembaga mana yang harus memimpin sehubungan dengan pengawasan dan pemantauan internet ?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan pengawasan dan pemantauan Internet? Apakah otorisasi dari sumber yudisial atau sumber mandiri lainnya diperlukan? Apa batasan dan ketentuannya?
- » Apakah prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk mendukung pengawasan Internet dan pemantauan media sosial yang cepat dan efisien ?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan telah melakukan pengawasan Internet dan pemantauan media sosial? Bagaimana pengalaman dan hasilnya?

Sumber daya tambahan:

INTERPOL Satwa Pembohong Terkait dengan Internet – Pedoman bagi Praktisi Penegak Hukum (2021)

⁶³ Lihat lebih lanjut Bab IV, Bagian 3.2 dari Perangkat ini.

5.1.5 Operasi penyamaran

Investigasi rahasia melibatkan penggunaan petugas penegak hukum atau orang lain yang diberi wewenang oleh otoritas penegak hukum yang, untuk tujuan menyelidiki kejahatan, tidak mengungkapkan atau menyingkap posisi resmi atau mandat mereka. Operasi penyamaran digunakan khususnya ketika ada kemungkinan agen penegak hukum atau orang lain menyusup ke kelompok kejahatan terorganisir untuk mengumpulkan bukti. Bukti yang diberikan oleh 'orang dalam', apakah petugas polisi yang menyamar atau rekan konspirator, bisa sangat penting untuk keberhasilan penuntutan. Selain itu, efek dari bukti konklusif semacam itu seringkali menghadirkan tawaran kerja sama dan pengakuan bersalah dari para tertuduh.

Karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses ke kelompok kejahatan dan kejahatan terorganisir, bahaya bagi petugas yang menyamar jika identitasnya diketahui, dan biaya terkait, operasi penyamaran jarang digunakan. Namun demikian, mereka mungkin berguna dan, dalam beberapa kasus, menjadi teknik investigasi yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengganggu jaringan kejahatan dan aktivitasnya.

Mengingat banyaknya bahaya dan risiko yang terkait dengan investigasi penyamaran, termasuk sifat intrusif dan risiko penyalahgunaan, sebagian besar yurisdiksi menerapkan persyaratan dan batasan ketat pada penggunaan teknik ini. Secara khusus, di sebagian besar yurisdiksi, petugas yang menyamar tidak diizinkan untuk mendorong tersangka melakukan kejahatan yang biasanya tidak mereka lakukan, baik sebagai agen provokator atau melalui pengebakan. Jebakan mengacu pada situasi di mana seorang agen atau pejabat melontarkan ide kejahatan dan mendorong terdakwa untuk terlibat di dalamnya; di beberapa yurisdiksi, jebakan digunakan sebagai pembelaan terhadap tuntutan pidana).

Seperti pengawasan, ini adalah bidang khusus dan petugas yang menyamar harus dipilih, dilatih, dan dikelola dengan sangat cermat. Setiap lembaga yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang ini harus mencari bimbingan dari pakar.

Operasi Penyamaran

- » Apakah ada dasar hukum untuk menggunakan operasi penyamaran? Jika demikian, apakah undang-undang ini khusus untuk investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan berdasarkan hukum domestik untuk terlibat dalam operasi Penyamaran?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan telah melakukan operasi Penyamaran?
- » Dengan tidak adanya dasar hukum, apakah mungkin untuk melakukan operasi Penyamaran dengan persetujuan otoritas penuntutan?
- » Agensi mana yang harus memimpin sehubungan dengan operasi Penyamaran?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan operasi Penyamaran? Apakah otorisasi dari sumber yudisial atau sumber mandiri lainnya diperlukan? Apa batasan dan ketentuannya?
- » Apakah pedoman atau prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk mendukung operasi Penyamaran yang cepat dan efisien?

Sumber daya tambahan:

Konferensi PBB Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Kelompok Kerja Sama Internasional, kerja sama internasional yang melibatkan teknik investigasi khusus, Dokumen PBB CTOC/COP/WG.3/2020/3 (12 Mei 2020) 4 [16]–[18]





5.1.6 Identitas yang samaran

'Identitas samaran mengacu pada identitas palsu atau yang diubah yang dibuat, diperoleh dan/ atau digunakan oleh otoritas penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan, menjalin kontak dan membangun hubungan kepercayaan dengan orang lain atau menyusup ke jaringan kejahatan. Identitas samaran dapat berupa identitas seseorang atau perusahaan.

Seperti halnya operasi penyamaran, pembuatan dan penggunaan identitas samaran memakan waktu dan mahal, dan ada bahaya bagi orang yang menggunakan identitas samaran. Untuk alasan-alasan ini, dan mengingat tindakan ini bersifat intrusif, ada perlindungan ketat pada pembuatan dan penggunaan identitas samaran.

Identitas samaran

- » Apakah ada dasar hukum untuk menetapkan dan menggunakan identitas yang samaran? Jika demikian, apakah undang-undang ini khusus untuk Investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan berdasarkan hukum domestik untuk menggunakan identitas samaran?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan menggunakan identitas samaran dalam pekerjaan mereka?
- » Dengan tidak adanya dasar hukum, apakah mungkin untuk menggunakan identitas samaran dengan persetujuan otoritas penuntutan?
- » Instansi mana yang harus memimpin sehubungan dengan pembentukan dan pemantauan penggunaan identitas samaran?
- » Apa prasyarat untuk penggunaan identitas samaran? Apakah otorisasi dari sumber yudisial atau sumber mandiri lainnya diperlukan? Apa batasan dan ketentuannya?
- » Apakah pedoman atau prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk mendukung penggunaan identitas samaran secara cepat dan efisien?

5.2 Penggunaan informan

Informan adalah orang yang membangun atau memelihara hubungan pribadi atau lainnya dengan orang lain untuk tujuan memfasilitasi tindakan yang secara diam-diam menggunakan hubungan tersebut untuk mendapatkan informasi atau bukti atau untuk memberikan akses ke informasi atau bukti apa pun kepada orang ketiga; atau secara diam-diam mengungkapkan informasi atau bukti yang diperoleh dengan menggunakan hubungan tersebut, atau sebagai akibat dari adanya hubungan tersebut. Informasi yang diberikan oleh informan dapat menjadi vital dan terkadang merupakan satu-satunya cara untuk mencegah atau menyelesaikan kejahatan. Peran mereka berbeda dengan saksi, karena mereka tidak dipanggil untuk bersaksi di pengadilan dan, di beberapa negara, bantuan yang mereka berikan tidak perlu diungkapkan.

Penggunaan informan mungkin merupakan teknik investigasi kriminal yang paling efektif, khususnya ketika memerangi kejahatan serius dan terorganisir. Namun, ini mungkin juga merupakan teknik yang paling sering disalahpahami, berpotensi berbahaya dan sensitif, dan yang paling sering dikelola dengan tidak tepat oleh komunitas penegak hukum. Misalnya, kesalahpahaman yang tersebar luas adalah bahwa semua informan menuntut bayaran. Faktanya, beberapa informan yang paling efektif tidak meminta bayaran apapun. Berbagai faktor mempengaruhi calon informan.

Memahami apa yang memotivasi setiap informan sangat penting untuk merekrut, menugaskan, Memahami apa yang memotivasi setiap informan sangat penting untuk merekrut, menugaskan, mengarahkan dan mengelola mereka. Perekrutan dan penanganan informan yang efektif terbukti jauh lebih hemat sumber daya dan biaya dibandingkan dengan metode investigasi rahasia lainnya. Pengembangan jaringan informan dapat difasilitasi melalui skema imbalan dan hotline informasi rahasia untuk memungkinkan penyediaan informasi.

Perlu diingat bahwa informan bisa jadi adalah pelaku kejahatan dengan berbagai motivasi untuk memberikan informasi. Untuk alasan ini, informan memerlukan seleksi dan manajemen yang cermat. Sistem yang digunakan untuk menggunakan dan mengawasi informan, keselamatan mereka, dan setiap pembayaran yang diberikan kepada mereka, perlu ditetapkan dan dipelihara secara menyeluruh.

Seperti teknik lainnya, penggunaan dan manajemen informan memerlukan spesialisasi, pelatihan dan, yang terpenting, pengawasan dan manajemen yang efisien. Setiap instansi yang ingin menggunakan informan harus menetapkan pedoman yang jelas sehubungan dengan penggunaan tersebut dan pemahaman dasar tentang bidang ini harus diberikan kepada setiap tingkat petugas, terutama selama pelatihan dasar. Informan membutuhkan penanganan dan setidaknya satu manajer untuk menghindari aktivitas yang tidak benar dan untuk memastikan pengarahan dan pengawasan yang tepat bagi informan. Meski hanya petugas yang dipilih dengan hati-hati yang harus ditunjuk untuk menjadi 'penangan' informan, setiap petugas memiliki kesempatan, melalui pekerjaan sehari-hari mereka, untuk mengidentifikasi calon informan. Sangatlah penting bahwa semua lembaga menghargai pendekatan modern dalam bidang ini, memahami risikonya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan informan kepada aparat penegak hukum, informan itu sendiri, calon tersangka dan pihak ketiga. Para lembaga harus dengan hati-hati merefleksikan kapasitas mereka untuk merekrut dan menggunakan informan secara efektif, sah dan dapat diterima dalam kaitannya dengan audiens mereka. Ketika menetapkan kebijakan terkait dengan informan, dan menawarkan panduan umum dan pelatihan spesialis berikutnya, bantuan dan dukungan dari pakar harus diperoleh.

Penggunaan informan

- » Se jauh mana informan digunakan oleh pihak berwenang dalam Investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada Standar operasional prosedur penanganan informan?
- » Bagaimana informan dikelola? Secara khusus, prosedur apa yang diberlakukan untuk menghubungi informan dan merekam informasi?
- » Apakah Penyidik terlatih dalam pengelolaan informan?
- » Apakah identitas informan dilindungi di seluruh sistem peradilan pidana? Jika ya, bagaimana caranya?
- » Sistem apa yang ada untuk mengelola pembayaran informan? Apakah pembayaran tersebut tunduk pada Audit eksternal oleh lembaga pemerintah lain?
- » Apa aturan mengenai pembayaran kepada informan? Misalnya : Siapa yang mengotorisasi pembayaran? Bagaimana jumlah ditentukan (biaya atau persentase)? Bagaimana Dana dibayarkan? Prosedur Audit mana yang digunakan? Apakah ada hubungan Antara pembayaran informan dan imbalan kepada informan?
- » Apakah aturan, prosedur, dan pedoman pengawasan menetapkan perbedaan Antara penanganan saksi dan informan, dan bagaimana cara bekerja sama dengan mereka?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi (2006) 17 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3



5.3 Patroli, pemantauan, dan pos pemeriksaan

Hutan dan habitat satwa liar seringkali merupakan daerah terpencil, luas dan tidak dapat diakses yang sulit untuk dipatroli secara teratur dan menyeluruh. Petugas kehutanan, penjaga hutan, jagawana, polisi dan petugas penegak hukum lainnya biasanya hanya dapat memeriksa sejumlah kecil lokasi secara langsung, meskipun melalui penggunaan drone dan teknologi lainnya mereka dapat memantau area yang jauh lebih luas. Penebangan liar dan bentuk pembukaan lahan ilegal lainnya, termasuk penebangan pohon yang dilindungi, terkadang dapat dipantau melalui teknologi satelit

Manajemen risiko, analisis kejahatan, dan patroli sistematis dengan rute yang ditetapkan untuk mengoptimalkan cakupan area utama adalah metode dasar untuk meningkatkan pengumpulan dan deteksi informasi. Selain itu, pos pemeriksaan di sepanjang jalan utama, sungai, jalur perdagangan dan persimpangan, dan di pelabuhan laut, bandara, dan titik masuk utama ke taman nasional dan kawasan lindung lainnya, dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan satwa liar dan kehutanan. Pemeriksaan dan penggeledahan kendaraan secara acak dan tindakan serupa biasanya memerlukan dasar hukum, yang tidak dimiliki semua lembaga penegak hukum. Petugas yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut juga perlu dilatih secara memadai dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai.



Patroli, pemantauan, dan POS Pemeriksaan

- » Bagaimana dan seberapa sering habitat satwa liar dan hutan Dipatroli?
- » Siapa yang berpatroli di daerah ini (pejabat kehutanan, pengawas perburuan, polisi atau lainnya)?
- » Sistem apa yang digunakan untuk menentukan Rute patroli dan frekuensi patroli? Teknologi dan peralatan apa yang digunakan untuk mendukung patroli?
- » Apakah pemeriksaan kendaraan acak atau POS Pemeriksaan khusus di sepanjang Rute perdagangan utama, jalan, sungai, pelabuhan, situs alam, atau lainnya digunakan? Apa dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut?
- » Bagaimana pos pemeriksaan ini dikelola dan inspeksi apa yang dilakukan di POS Pemeriksaan ini? Bagaimanastaf dilatih? Apakah hukum dan Standar hak asasi manusia terkait dengan patroli dan pemantauan di pos pemeriksaan, termasuk dalam pelatihan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid Saya Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 13

5.4 Pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan

Pekerjaan TKP yang tepat sangat penting, terutama dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ini memberikan titik awal yang penting untuk pengembangan petunjuk investigasi dan memfasilitasi diterimanya bukti di pengadilan. Pekerjaan TKP melibatkan persiapan yang tepat untuk dan pelestarian cepat TKP satwa liar dan kehutanan.

Pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan memerlukan peralatan khusus, seperti detektor logam untuk menemukan bukti potensial seperti peluru dan selongsong, wadah spesimen untuk menyimpan bukti, dan pakaian pelindung serta kamera untuk merekam TKP. Pekerjaan TKP yang tepat selanjutnya membutuhkan personel yang cukup terlatih dalam manajemen TKP dan penyimpanan catatan.

Dalam pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan, seperti dalam bentuk upaya forensik lainnya, sangat penting bahwa penyelidikan dilakukan dengan cermat, catatan terperinci disimpan dan rantai kustodi yang tepat (kesinambungan bukti) dipertahankan untuk setiap item bukti.⁶⁴ Rantai seperti itu meminimalkan kemungkinan kehilangan, kontaminasi, atau substitusi material dan membantu membuktikan asal dan kebenaran spesimen atau bukti. Lebih memperumit pekerjaan adalah kenyataan bahwa TKP satwa liar dan kehutanan sering terganggu sebelum ditemukan dan bahwa kejahatan terjadi jauh dari pusat kota, di mana lembaga penegak hukum biasanya berbasis dan di mana laboratorium dan keahlian ilmiah paling mungkin ditemukan.

⁶⁴ Lihat lebih lanjut Bab III, Bagian 1.3.1 dari Perangkat ini.

Pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan

- » Undang-undang atau prosedur operasi khusus apa yang berlaku untuk pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada personel spesialis untuk pengelolaan TKP satwa liar dan kehutanan?
- » Pelatihan spesialis dan umum apa tentang pekerjaan satwa liar dan TKP yang ditawarkan dan kepada siapa?
- » Apakah semua staf menyadari pentingnya mengamankan dan melestarikan TKP untuk memfasilitasi pemeriksaan menyeluruh terhadapnya?
- » Apakah Penyidik melakukan olah TKP supaya tetap layak untuk pemeriksaan forensik?
- » Apakah staf terkait terlatih dengan baik dalam membangun TKP, pencatatan, pengumpulan data elektronik, penggunaan peralatan, fotografi, dan sebagainya?
- » Apakah staf terkait mengetahui potensi masalah kontaminasi silang? Apakah mereka tahu cara Mengantongi, memberi label, dan merekam bukti dan barang bukti?
- » Peralatan apa yang tersedia untuk memeriksa TKP dan menyimpan bukti?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 5 Layanan dan Infrastruktur Forensik (2006). 13–16 UNODC, Panduan TKP Satwa Pembohong untuk Responden Pertama (2019)



ALAT
II.34

5.5 Forensik

Dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan, penggunaan forensik secara luas dapat dibagi menjadi dua bidang: teknik forensik yang digunakan untuk membantu identifikasi atau asal spesies dan teknik forensik yang digunakan untuk menghubungkan tersangka atau objek fisik dengan kejahatan.

Penentuan spesies

Jenis pemeriksaan forensik yang digunakan dalam investigasi bervariasi tergantung pada ciri kejahatan yang dituduhkan. Perburuan satwa liar dan penebangan liar, misalnya, dapat dilacak melalui penggunaan tes DNA di titik asal, transit, dan penjualan akhir. Tes keturunan DNA dapat digunakan untuk menyelidiki apakah seekor hewan diambil dari alam liar atau dari fasilitas penangkaran. Studi identifikasi dan morfologi dapat digunakan untuk menentukan spesies hewan tertentu dengan menggunakan tulang, rambut, bulu, sisik, dan jaringan atau organ lainnya. Hal ini dapat membantu menentukan apakah suatu spesies yang dilindungi telah diambil secara ilegal. Analisis mikroskop atau unsur dapat digunakan, misalnya, untuk mengidentifikasi gading. Studi patologis yang melibatkan pemeriksaan bangkai, organ, jaringan, dan sampel lain dari hewan mati membantu menentukan penyebab kematian hewan. Tes DNA juga menghubungkan beberapa pengiriman gading ke jaringan pedagang yang sama yang beroperasi di beberapa pelabuhan. Metode ini mengidentifikasi pasangan gading yang telah dipisahkan dan dikirim dalam pengiriman yang berbeda ke tujuan yang berbeda dengan tumpang tindih yang tinggi dalam asal geografis gading dalam pengiriman yang cocok. Beberapa prosedur forensik, seperti pemeriksaan isotop, dapat membantu menentukan waktu kematian dan asal geografis. Ini dapat menjadi penting dalam menetapkan atau menyangkal klaim kepemilikan sah dan asal usul yang sah. Prosedur forensik lainnya meliputi studi anatomi kayu (struktur kayu), penambahan pertumbuhan pohon dan penentuan umur. Penggunaan prosedur tersebut secara cermat dan data yang dihasilkan memungkinkan pengembangan paket intelijen yang lebih akurat dan mengarah pada kesuksesan yang lebih besar dalam melawan kejahatan terorganisir. Untuk alasan ini, pemeriksaan forensik harus diterapkan pada lebih banyak penyitaan dan pencegahan barang selundupan daripada yang terjadi saat ini.

Tersangka dan objek

Sejumlah teknik dapat digunakan untuk menghubungkan tersangka atau benda fisik dengan kejahatan. Misalnya, balistik dapat menghubungkan peluru yang ditemukan dari bangkai dengan senjata api yang disita dari tersangka. Tanda peluru

dapat menentukan apakah seekor gajah ditembak dari tanah atau udara. Tangan, kuku, rambut, dan pakaian tersangka mungkin mengandung kotoran atau darah dari hewan atau tumbuhan, atau sisa senjata api. Jejak kecil dari DNA atau sidik jari tersangka dapat tertinggal di TKP, atau pada barang-barang yang terkait dengannya, termasuk satwa liar yang disita. Kendaraan dan tempat mungkin berisi sisa-sisa bahan dari suatu tempat kejadian. Dokumen dapat mengungkap tulisan tangan, sidik jari, atau DNA tersangka. Barang yang diukir atau dipotong dapat mengungkapkan tanda fisik yang mungkin terkait dengan alat dan instrumen lain yang digunakan oleh pelaku.

Fasilitas dan peralatan

Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan tergantung pada kemampuan ilmuwan forensik yang terlibat serta fasilitas dan peralatan laboratorium yang tersedia. Demikian pula, jika laboratorium tidak memiliki staf yang kompeten, misalnya, dalam penggunaan mikroskop, maka, terlepas dari ketersediaan peralatan yang diperlukan, pemeriksaan yang relevan tidak dapat dilakukan. Di tempat-tempat di mana peralatan atau fasilitas forensik ahli forensik yang diperlukan untuk sementara atau secara permanen tidak tersedia, mekanisme untuk mendapatkan atau memperoleh akses ke keahlian atau peralatan tersebut harus dikembangkan. Di beberapa yurisdiksi, laboratorium bea cukai telah mulai mendukung penegakan hukum di garis depan dengan pemeriksaan forensik mereka. Beberapa organisasi dan laboratorium forensik satwa liar menawarkan untuk memberikan dukungan ilmu forensik. Peluang ini dibahas lebih lanjut di Bab IV, Bagian 2.5 Perangkat ini.

Prosedur forensik selanjutnya perlu didukung oleh rencana dan proses yang tepat. Ini termasuk, misalnya, protokol untuk mengambil, menguji, menyimpan, dan mengirimkan sampel serta tindakan lain untuk memastikan bahwa sampel dapat dilacak selama proses analisis. Hal ini lebih lanjut membutuhkan langkah-langkah keamanan untuk memastikan bahwa sampel tidak rusak atau hancur dan aman dari akses orang yang tidak berwenang. Sertifikasi dan jaminan mutu lainnya adalah langkah-langkah untuk menjamin bahwa laboratorium bekerja dengan standar yang tinggi dan bahwa temuannya dapat diandalkan dan dijadikan sebagai bukti.



ALAT
II.35

Forensik

- » Kapasitas, fasilitas, dan peralatan pemeriksaan forensik apa yang tersedia di Yurisdiksi? Bisakah mereka digunakan untuk investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah mereka digunakan dalam praktik?
- » Apakah bukti forensik dapat diterima di pengadilan? Jika demikian, apa dasar legislatif dan jenis bukti forensik apa yang dapat diterima?
- » Apakah penyelidik terlatih dalam apa yang harus dicari dan apakah mereka menyadari potensi pemeriksaan forensik dan bukti? Apakah penyidik sudah terbiasa dengan prosedur pengumpulan bukti forensik?
- » Apakah ada fasilitas dan personel untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti DNA? Apakah petugas penegak satwa liar dan kehutanan, Bea Cukai, dan polisi memiliki akses ke tes DNA?
- » Apa dukungan forensik lain yang tersedia (misalnya, mikroskop, Balistik, profil isotop, morfologi, patologi, dan toksikologi)?
- » Lembaga mana yang melakukan analisis forensik? Apakah ada sertifikasi laboratorium oleh ahli yang sesuai? Apakah ada tinjauan dan Audit luar terhadap karya ilmiah untuk memastikan teknik yang tepat?
- » Apakah ada dasar data nasional untuk data forensik dari kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah staf forensik terlatih dalam mekanisme penuntutan dan Penyajian bukti forensik di pengadilan?
- » Jika dukungan forensik yang memadai, personel dan/atau peralatan tidak (siap) tersedia, dapatkah dukungan diperoleh dari laboratorium lain, termasuk dari luar negeri?

Sumber daya tambahan :

Bank Dunia, Alat dan Sumber Daya untuk Memerangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2018) 6–7
UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 5 Layanan dan Infrastruktur Forensik (2006) 17–32 UNODC,
Panduan Praktik Terbaik untuk Identifikasi Kayu Forensik (2016)
UNODC, Pedoman Metode dan Prosedur Pengambilan Sampel Gading dan Analisis Laboratorium (2014)

5.6 Metode investigasi korupsi

Meskipun korupsi sering memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan (seperti yang dibahas dalam Bab I, Bagian 5.3 dari Perangkat ini), hingga saat ini, sebagian besar investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak diperluas ke penyelidikan korupsi. Keuntungan utama dari melakukan penyelidikan terkait korupsi adalah bahwa kejahatan korupsi tersebut dapat mengakibatkan terdakwa menerima hukuman yang lebih tinggi daripada yang mungkin tersedia untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Investigasi praktik korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat mengungkap kejahatan lain yang melibatkan pejabat korup dan organisasi kriminal. Hal ini dapat memberikan bukti tambahan untuk membuktikan kejahatan satwa liar dan kehutanan sebagai kejahatan asal⁶⁵. Selain itu, korupsi yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dapat menyebabkan terganggunya aliran ilegal hasil kejahatan dan melindungi negara dari hilangnya pendapatan.

Penyidik harus menyadari bagaimana praktik korupsi memanifestasikan dirinya dalam kaitannya dengan memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan untuk memungkinkan mereka melakukan investigasi korupsi secara paralel atau sebagai tambahan terhadap investigasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Teknik yang sama yang digunakan untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung kasus kejahatan satwa liar dan kehutanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan bukti untuk mendukung kasus korupsi. Misalnya, ketika mewawancarai tersangka pemburu liar tentang bagaimana mereka mengakses kawasan lindung, penyidik juga dapat memperoleh bukti apakah pemburu tersebut menyuap petugas untuk diizinkan masuk ke kawasan tersebut atau untuk mendapatkan informasi tentang lokasi spesies tertentu. Ketika petugas penegak hukum menangkap pemburu, selain menyita alat yang digunakan untuk perburuan liar, mereka mungkin menemukan catatan keuangan yang dapat menjadi kunci dalam mendukung penyelidikan korupsi, seperti catatan pembayaran yang dilakukan yang mungkin termasuk pembayaran kepada pejabat yang korup. Saat menerapkan teknik investigasi khusus (seperti yang dibahas dalam Bab II, Bagian 5.1 Perangkat ini) untuk menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan, penyidik dapat menggunakan teknik yang sama untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan praktik korupsi.

Karena praktik korupsi dapat bervariasi dalam kompleksitasnya, mungkin perlu untuk memiliki mekanisme di mana penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat bekerja dengan, atau merujuk kasus ke, pakar/unit/badan anti-korupsi dan otoritas terkait lainnya yang telah menerima pelatihan khusus dan memiliki peralatan khusus untuk melakukan investigasi korupsi. Bekerja dengan otoritas anti-korupsi memungkinkan penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk mendapatkan catatan, data, dan informasi keuangan yang diperlukan terkait dengan terdakwa.

⁶⁵ Pasal 2(h) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional menyatakan: "Kejahatan asal" berarti setiap tindak pidana yang menghasilkan hasil yang dapat menjadi subyek tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Konvensi ini". Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 5.2



ALAT
II.36

Metode investigasi korupsi

- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan memiliki wewenang atau diizinkan untuk menyelidiki praktik korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika tidak, dari siapa mereka perlu meminta otoritas? Apa yang telah menjadi pengalaman?
- » Apakah investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan mencakup investigasi tentang praktik korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, seberapa sering dan dalam keadaan apa?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan dilatih tentang apa yang harus dicari dalam kaitannya dengan praktik korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah Penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan sudah terbiasa dengan teknik investigasi korupsi? Apakah mereka menerima Pelatihan khusus dan/atau umum tentang teknik-teknik ini?
- » Apakah Penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan melibatkan lembaga antikorupsi dan lembaga terkait lainnya ketika ada bukti korupsi yang terkait dengan Kejahatan ini? Apakah ada pedoman yang jelas tentang kapan dan bagaimana melibatkan atau berkolaborasi dengan lembaga antikorupsi dan lembaga terkait lainnya? Dalam keadaan seperti itu, agensi mana yang memimpin Penyidikan semacam itu?
- » Jika penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan diberdayakan untuk melakukan investigasi korupsi, peralatan apa yang tersedia untuk mendukung mereka?
- » Apakah prosedur operasi Standar telah dikembangkan untuk memandu penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk menyelidiki praktik korupsi yang terkait dengan kejahatan ini?

6

Bagian II

Prosedur investigasi

Penciptaan dan pengelolaan investigasi terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan serta pengelolaan investigasi dapat menjadi tugas kompleks yang membutuhkan berbagai metode dan pendekatan.



Bagian berikut menetapkan beberapa elemen inti dari prosedur investigasi, mulai dari pelaporan kejahatan dan pengumpulan bukti hingga perlindungan saksi dan korban. Daftar ini bukan merupakan daftar yang lengkap.

6.1 Melaporkan kejahatan

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat menjadi perhatian polisi, bea cukai, atau lembaga penegak hukum lainnya dalam beberapa cara. Misalnya, kasus dapat dilaporkan oleh korban atau saksi, dapat dirujuk oleh lembaga lain atau dapat dideteksi selama patroli rutin atau penyelidikan. Yang memperumit proses pelaporan adalah kenyataan bahwa di beberapa negara lembaga yang berbeda memiliki beberapa bentuk tanggung jawab dalam kaitannya dengan sektor satwa liar dan kehutanan dan karenanya memakan waktu hingga laporan sampai ke unit investigasi yang relevan.

Beberapa yurisdiksi telah melembagakan skema imbalan sebagai insentif bagi individu untuk memberikan informasi tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan, terkadang disebut sebagai 'skema whistle blower'. Sistem tersebut telah menerima dukungan beragam, dengan banyak kritik berpendapat bahwa imbalan hanya akan meningkatkan kuantitas dan bukan jumlah kualitas pelaporan kejahatan, serta menciptakan bahaya tuduhan palsu.

Beberapa yurisdiksi dan beberapa komunitas lokal telah membentuk 'kelompok pengawas' sebagai jalan alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaporan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Sistem ini, yang mencontoh skema 'Neighbourhood Watch' yang beroperasi di banyak tempat, adalah alat bagi komunitas untuk bekerja sama guna mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan komunitas. Mereka mendorong penduduk dan bidang usaha untuk bergabung bersama dalam kelompok informal kecil dengan tujuan meningkatkan keamanan wilayah lokal mereka dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara anggota masyarakat untuk mencegah, melaporkan, dan mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Di tempat lain, hotline dan program khusus seperti 'Crime Stoppers' telah dibentuk untuk mendorong masyarakat melaporkan kejahatan secara tepat waktu dan tidak birokratis.

Pendeteksian tindak pidana korupsi merupakan unsur penting dalam penyidikan tindak pidana tersebut. Tip ditemukan sebagai cara yang paling umum untuk menemukan korupsi, dengan tiga kali lebih banyak kasus yang dilaporkan melalui mekanisme tersebut daripada cara deteksi yang paling umum kedua (tinjauan manajemen dan audit).⁶⁶ Tip tentang praktik korupsi dapat berasal dari: karyawan lembaga satwa liar dan kehutanan; badan/orang yang wajib memiliki lisensi dan izin untuk mengakses satwa liar dan sumber daya hutan; masyarakat yang berbatasan dengan kawasan lindung; instansi pemerintah lainnya dan masyarakat umum. Hal ini meningkatkan pentingnya satwa liar, hutan, antikorupsi, dan lembaga terkait lainnya yang membangun beberapa bentuk mekanisme pelaporan korupsi. Agar mekanisme tersebut efektif, lembaga-lembaga ini perlu memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan yang jelas dan menyadarkan pemangku kepentingan utama tentang cara kerja mekanisme pelaporan korupsi, termasuk: bagaimana dan di mana pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat melapor; perlindungan kerahasiaan informasi yang diterima; perlindungan pelapor; proses penanganan pengaduan setelah diterima; dan penyediaan umpan balik tentang bagaimana lembaga tersebut menyelesaikan keluhan.

Seperti tindak pidana lainnya, setiap laporan tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan harus dicatat secara akurat dan komprehensif. Segera setelah pelanggaran terhadap satwa liar atau kehutanan dilaporkan, pengawas harus meninjau dugaan tersebut bersama dengan fakta pendukung dan kemudian mengalokasikan sumber daya yang cukup dan tepat untuk menangannya. Keputusan ini dapat menjadi sulit untuk diambil ketika ada prioritas yang bersaing sementara sumber daya untuk menangannya berjumlah terbatas.



Melaporkan kejahatan

- » Bagaimana kejahatan satwa liar dan kehutanan menjadi perhatian pihak berwenang?
- » Apakah Informasi kontak (seperti nomor telepon, situs web, dan alamat surel) tersedia untuk umum agar mereka dapat melaporkan kejahatan?
- » Langkah apa yang diambil ketika kejahatan satwa liar atau kehutanan dilaporkan? Siapa yang merekamnya?
Apakah ada prosedur untuk memproses Laporan tersebut?
- » Bagaimana dan di mana laporan dicatat? Apakah mereka dicatat di atas kertas atau elektronik? Bagaimana Laporan disimpan dan diarsipkan?
- » Apakah ada format yang ditetapkan untuk merekam Laporan kejahatan awal? Jika demikian, apakah formatnya mencakup informasi tentang tanggal, spesies yang terlibat, jenis peristiwa atau kejahatan, dan tersangka?
- » Bagaimana tindakan segera diidentifikasi dan dikelola? Siapa yang harus diberitahu tentang kejahatan tersebut?
- » Apakah Hotline khusus telah disiapkan untuk melaporkan kejahatan, termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah orang yang melaporkan kejahatan tersebut terus mengikuti perkembangan investigasi?
- » Apakah ada skema imbalan untuk orang yang melaporkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada 'kelompok pengawas' lokal yang terdiri dari Perorangan dan bisnis yang berkolaborasi untuk mencegah, melaporkan, dan mengurangi kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan:
UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 10*

6.2 Hasutan dan manajemen investigasi

Ada variasi yang signifikan dalam cara investigasi kejahatan atau administratif dapat dilakukan. Dalam beberapa sistem, hanya jaksa atau hakim investigasi yang dapat memulai, mengelola, dan mengawasi investigasi, sementara di sistem lain, petugas polisi atau otoritas penegakan lainnya memiliki wewenang untuk melakukannya. Untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan, lembaga di luar ranah peradilan pidana tradisional mungkin memiliki otoritas investigasi khusus. Di beberapa yurisdiksi, kewajiban yang ditetapkan ini mungkin tidak ada atau tidak didukung oleh pemerintah, tergantung pada konteks politik dan sosial negara tersebut.

Hasutan dan manajemen investigasi

- » Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola Penyelidikan kriminal yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan : jaksa penuntut, hakim penyidik, petugas polisi, Badan Margasatwa atau kehutanan, atau kontrol perbatasan atau agen Bea Cukai?
- » Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola investigasi yang melibatkan kejahatan bea cukai, impor/ekspor, dan kontrol perbatasan?
- » Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola investigasi kejahatan CITES?
- » Apakah tanggung jawab untuk mengelola Penyelidikan jelas dan Ringkas untuk memastikan Penyelidikan terkoordinasi dan menghindari hilangnya bukti?
- » Apakah hasil Penyelidikan, penuntutan, dan Putusan pengadilan dibagi di antara lembaga penegak hukum terkait, khususnya lembaga yang merujuk atau menyerahkan kasus yang dimaksud?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid I Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 13–14



ALAT
II.38

6.3 Pengumpulan dan penanganan bukti

Hasil investigasi kriminal tergantung pada kualitas bukti. Keputusan mengenai informasi Hasil investigasi kejahatan tergantung pada kualitas bukti. Keputusan mengenai informasi atau materi apa yang harus dikumpulkan atau direkam perlu dibuat oleh seseorang yang berkompeten dalam pengumpulan bukti. Ini akan memastikan bahwa tidak ada bukti yang dikompromikan atau hilang, sehingga mencegah gangguan investigasi dan penuntutan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bahwa bukti dikumpulkan dan dicatat secara menyeluruh dan sistematis.

Dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan khususnya, mungkin ada keadaan di mana penyidik TKP spesialis tidak tersedia dan bukti perlu dikumpulkan secara tepat waktu karena, misalnya, kondisi cuaca yang memburuk mengancam untuk menghilangkan atau menghancurkan barang bukti. Untuk alasan ini, aparat penegak hukum yang pertama merespons kejahatan satwa liar dan kehutanan idealnya sudah setidaknya mengikuti pelatihan pengumpulan bukti dasar dan peralatan yang sesuai untuk memastikan bahwa tidak ada bukti yang secara tidak sengaja terkontaminasi, rusak atau hancur selama pengumpulan. Pelatihan dan peralatan pengumpulan bukti yang memadai, termasuk alat pelindung diri, juga penting untuk keselamatan petugas penegak hukum, karena mengumpulkan bukti dari senjata api atau hewan mati bisa berbahaya.

Informasi dan alat tambahan mengenai pengelolaan, penyimpanan, dan penerimaan bukti dapat ditemukan di Bab III, Bagian 1.3 dari Perangkat ini.



ALAT
II.39

Pengumpulan dan penanganan bukti

- » Apakah semua petugas penegak kejahatan satwa liar dan kehutanan yang relevan (tidak hanya polisi dan penyidik) terlatih dalam peraturan terkait bukti? Apakah mereka terlatih dalam apa yang harus dicari dan cara melindungi bukti?
- » Untuk kasus-kasus besar, apakah seorang petugas ditunjuk untuk memastikan Kontinuitas dan menjaga integritas bukti dan barang bukti?
- » Apakah kemajuan dalam Investigasi dicatat secara elektronik atau di atas kertas? Siapa yang menyimpan catatan ini? Apakah mereka diperbarui secara berkala?
- » Apakah ada peralatan pengumpulan bukti yang memadai, baik untuk memastikan integritas pengumpulan bukti dan Keamanan kolektor?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi (2006) 15–16
UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi

6.4 Identifikasi tersangka

Proses investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Sebuah kasus akan sangat diperkuat dengan bukti identifikasi yang kuat, tetapi prosedur untuk mengidentifikasi tersangka harus dikontrol secara ketat untuk mencegah kegagalan dalam mewujudkan keadilan. Prosedur identifikasi yang buruk dapat menyebabkan bias yang tidak dapat diterima, pelanggaran terhadap hak tersangka, dan semua bukti yang dihasilkan dianggap tidak dapat diterima.



ALAT
II.40

Identifikasi tersangka

- » Hukum, peraturan, dan prosedur apa yang tersedia untuk memungkinkan dan memfasilitasi identifikasi tersangka?
- » Bagaimana hak asasi manusia, termasuk hak atas proses hukum, dipertimbangkan?
- » Apakah Penyidik memiliki sarana untuk mengambil sidik jari dan DNA dari tersangka kejahatan untuk tujuan identifikasi?
- » Apakah penyidik memiliki buku besar, arsip, atau data dasar yang berisi foto, sidik jari, atau informasi biometrik lainnya dari penjahat yang diketahui? Bagaimana informasi ini disimpan dan diatur? Apakah diperbarui secara berkala?
- » Apakah penyidik memiliki akses ke fasilitas dan peralatan identifikasi, seperti 'ruang identifikasi' dan kamera?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 12–13

6.5 Wawancara

Wawancara adalah landasan dari penyelidikan apa pun. Ada dua jenis wawancara dasar yang dilakukan oleh penyidik: wawancara dengan korban dan saksi, dan wawancara dengan tersangka. Penyidik sering mencatat ingatan saksi atau korban (dengan asumsi mereka kooperatif). Tersangka, di sisi lain, biasanya mencoba menghindari memberikan jawaban jujur atas pertanyaan penyidik dan wawancara semacam itu bisa bersifat bermusuhan dan mungkin memerlukan teknik yang terampil.

Hukum dan standar internasional, bersama dengan banyak hukum domestik, membatasi penggunaan teknik wawancara koersif dan dengan tegas melarang penggunaan penyiksaan. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang batas-batas teknik wawancara yang diizinkan, dan hak-hak narasumber.

Meski sebagian besar sistem peradilan di seluruh dunia mengizinkan tersangka untuk menolak menjawab pertanyaan, hal ini tidak melarang penyidik untuk mengajukan pertanyaan. Menghentikan wawancara setelah pertama kali mendengar ucapan 'tidak ada komentar' adalah sebuah kesia-siaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak tertuduh, jika diwawancarai secara sah dan efektif, akan memberikan beberapa tanggapan atau penjelasan.

Banyak yurisdiksi sekarang mengharuskan semua wawancara investigasi kejahatan direkam dengan audio dan/atau video. Jika tersangka kejahatan satwa liar dan kehutanan, atau tersangka memfasilitasi kejahatan seperti korupsi, ditahan atau ditangkap jauh dari fasilitas wawancara yang memadai, pedoman yang relevan perlu dibuat untuk mengatasi situasi tersebut, terutama jika wawancara di tempat kejadian dapat menghasilkan informasi waktu nyata yang dapat segera ditindaklanjuti. Penggunaan peralatan perekam portabel dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengatasi hal ini.

Masalah tambahan muncul jika personel sektor swasta atau militer bertemu dengan calon tersangka.⁶⁷ Meskipun mereka mungkin tergoda untuk menanyai tersangka, mereka biasanya tidak memiliki dasar hukum untuk melakukannya, dan apa pun yang dikatakan kepada personel tersebut mungkin tidak dapat diterima di pengadilan. Pertanyaan semacam itu juga berisiko menghambat atau mengganggu wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik yang sebenarnya dan berwenang secara hukum. Personel sektor swasta dan militer harus diberi pengarahan tentang aspek-aspek ini.

Wawancara

- » Apa aturan untuk mewawancarai saksi? Apakah pewawancara memberi tahu saksi tentang hak-hak mereka (yaitu bebas dari menyalahkan diri sendiri selama wawancara, untuk menghadiri pengadilan selama wawancara)?
- » Siapa yang mengambil pernyataan saksi? Apakah saksi memiliki kesempatan untuk membaca pernyataan mereka dan menyatakan bahwa setiap halaman akurat?
- » Apakah ada pedoman atau kode praktik untuk mewawancarai tersangka? Apakah pedoman ini mencerminkan Standar internasional?
- » Apakah penyidik kejahatan satwa liar dan kehutanan menerima Pelatihan dalam teknik wawancara?
Jika demikian, apa yang tercakup dalam Pelatihan?
- » Apakah penyidik menyadari risiko mewawancarai orang-orang yang rentan? Apakah ketentuan khusus dibuat untuk orang-orang seperti itu?
- » Apakah penyidik mematuhi Standar internasional (dan nasional), termasuk untuk hukum dan Standar hak asasi manusia ?
- » Apakah ada bukti bahwa teknik wawancara yang tidak tepat sedang digunakan? Apakah ada mekanisme di mana orang yang diwawancarai dapat dengan aman melaporkan dugaan pelanggaran hak-hak mereka?

Sumber daya tambahan:

INTERPOL Sekretariat CITES, dan Organisasi Kepabeanan Dunia (2010). *Mempertanyakan penyelundup Satwa liar: Teknik untuk menyelidiki kejahatan satwa liar*. Lyon Prancis. (Permintaan akses harus ditujukan ke INTERPOL).
UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 17–18*



⁶⁷ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 1.5 dan 1.8 dari Perangkat ini.

Perlindungan saksi dan korban

Banyak saksi dan korban kejahatan satwa liar dan kehutanan takut akan intimidasi dan pembalasan jika mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum atau bersaksi di pengadilan. Ketakutan ini sangat akut ketika ada hubungan dekat antara saksi dan pelaku (misalnya, saksi adalah pegawai pelaku), ketika pelaku adalah bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, atau di mana ada korupsi dalam lembaga penegak hukum. Dalam kasus korban korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, ketakutan akan intimidasi atau pembalasan sering dikaitkan dengan ketidakpercayaan terhadap pejabat pemerintah, penegak hukum, dan peradilan.

Oleh karena itu penting bahwa langkah-langkah yang efektif diambil untuk melindungi keselamatan korban, saksi dan keluarga mereka. Memastikan perlindungan privasi korban dan saksi adalah masalah lain. Harus dicatat bahwa skema perlindungan saksi yang efektif itu rumit dan seringkali sangat mahal. Banyak yurisdiksi mungkin tidak memiliki anggaran yang sesuai, terutama yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Jika skema perlindungan saksi tidak ada, penyelidik tidak boleh mengindikasikan atau menjanjikan bahwa seorang saksi akan dilindungi, kecuali hal itu benar-benar dapat dilakukan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir mencakup sejumlah ketentuan yang mewajibkan Negara-Negara Pihak mengambil langkah-langkah untuk melindungi saksi, membantu dan melindungi korban, dan bekerja sama dengan otoritas penegak hukum lainnya untuk menawarkan perlindungan kepada korban dan saksi.⁶⁸ Ketentuan-ketentuan ini hanya mencakup kejahatan yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, yang mungkin atau mungkin tidak mencakup kejahatan satwa liar dan kehutanan secara umum. Konvensi PBB Menentang Korupsi memuat ketentuan serupa tentang perlindungan korban dan saksi korupsi.⁶⁹



Perlindungan saksi dan korban

- » Apakah intimidasi terhadap saksi dan korban dikriminalisasi? Apakah kejahatan ini meluas ke intimidasi saksi dan korban kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Tindakan apa yang tersedia untuk melindungi saksi dan korban kejahatan satwa liar dan kehutanan (seperti perintah perlindungan, perintah larangan kontak, kondisi jaminan, pengawalan untuk korban dan saksi, dan bantuan Kesaksian)? Apakah tindakan tersebut mencakup kejahatan yang terkait dengan atau memungkinkan kejahatan satwa liar dan kehutanan (seperti korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak dan biaya)?
- » Kapasitas apa yang ada untuk menawarkan perlindungan fisik yang efektif kepada korban dan saksi?
- » Perlindungan fisik seperti apa yang tersedia untuk seorang saksi? Misalnya, apakah saksi tinggal di kantor polisi, atau apakah mereka ditawari perlindungan atau akomodasi yang aman di tempat lain? Apakah perlindungan tersedia untuk petugas polisi, jaksa dan hakim?
- » Apakah hukum nasional mengizinkan penggunaan Metode alternatif untuk memberikan bukti?
- » Apakah hukum nasional menetapkan batasan pada pengungkapan Informasi mengenai identitas atau keberadaan korban dan saksi dan, dalam keadaan luar biasa, melindungi anonimitas orang yang memberikan bukti?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 13

⁶⁸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 24-26.

⁶⁹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal. 32.

6.7 Penyitaan dan perampasan

Tindakan yang efektif terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan harus mencakup langkah-langkah untuk merampas hasil kejahatan dari pelaku, terutama jika spesimen yang terlibat memiliki nilai pasar yang tinggi. Kemampuan otoritas penegak hukum, peradilan dan kejaksaan untuk mengidentifikasi, menyelidiki, merampas dan menyita aset yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan memfasilitasi kejahatan seperti korupsi, mengirimkan pesan kepada para penjahat bahwa kegiatan ini sangat tidak menguntungkan.

Karena alasan ini, sebagian besar yurisdiksi memiliki mekanisme untuk memungkinkan pelacakan, pembekuan, perampasan, dan penyitaan aset dan hasil kejahatan. Sebagai aturan umum, petugas terkait harus diberi wewenang untuk menggunakan wewenang untuk menyita kapan pun mereka memiliki alasan untuk mencurigai bahwa barang dari satwa liar atau kehutanan, hidup atau mati, diperoleh, diperdagangkan, diimpor atau diekspor secara bertentangan dengan hukum. Selain itu, penting bahwa barang-barang yang disita disimpan dengan aman untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tersedia sebagai bukti dalam penuntutan dan proses lainnya dan bahwa barang-barang tersebut tidak masuk kembali ke pasar ilegal.

Selain itu, ketika dan di mana barang-barang ini tidak lagi bernilai sebagai barang bukti, metode pembuangan perlu memastikan bahwa barang-barang yang disita tidak digunakan untuk kegiatan kejahatan di masa depan. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga spesimen yang disita, untuk mengangkut dan membuangnya, atau untuk memelihara hewan atau tumbuhan hidup selama penyitaan, harus dapat diminta dari orang yang memegangnya pada saat itu, atau dari pemilik, pengangkut, importir atau eksportir.

Terkait erat dengan masalah penyitaan dan penyimpanan satwa liar dan selundupan hutan adalah perdebatan tentang pemusnahan stok produk hewan dan tumbuhan yang disita. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang apakah penghancuran timbunan dapat berpotensi menghasilkan permintaan lebih lanjut untuk satwa liar dan hasil hutan, langkah ini membersihkan timbunan dan mengurangi kemungkinan kebocoran perdagangan ilegal. Penghancuran timbunan juga menghadirkan peluang unik untuk menarik perhatian publik terhadap skala, sifat, dan dampak dari kejahatan serius yang ada di balik penyitaan ini, dan untuk bertindak sebagai penjera perdagangan ilegal.

Ada banyak perbedaan di antara undang-undang nasional tentang otoritas mana, baik administratif maupun yudikatif, yang dapat memerintahkan penyitaan aset atau penyitaan hasil kejahatan, kewenangan masing-masing otoritas tersebut, dan prosedur yang harus mereka ikuti. Di beberapa yurisdiksi, misalnya, penyitaan hanya dapat dilakukan dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Penyitaan atas perintah pengadilan dapat bersifat wajib menurut undang-undang atau diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan itu sendiri. Di tempat lain, penyitaan dapat diperintahkan oleh otoritas administratif.



Penyitaan dan perampasan

- » Apakah ketentuan penyitaan yang relevan mengizinkan penyitaan semua Fauna dan Flora yang diimpor, diekspor, diangkut, dijual, diterima, diperoleh, atau dibeli secara ilegal?
- » Apakah penyitaan spesimen wajib bila ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa suatu transaksi melanggar CITES?
- » Apakah undang-undang penyitaan juga berlaku untuk kapal, kendaraan, pesawat terbang, dan peralatan lain yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Bagaimana undang-undang yang relevan mendefinisikan 'hasil kejahatan' dan apakah definisi ini mencakup properti apa pun yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Dapatkah biaya untuk penahanan, pengangkutan, pembuangan, dan pemeliharaan barang yang Disita dapat ditanggung oleh pemilik atau pengangkut?
- » Mekanisme apa yang ada untuk mengidentifikasi, melacak, menyita atau membekukan properti dan aset lainnya, termasuk catatan bank, keuangan atau komersial, serta peralatan dan instrumen lain yang digunakan dalam, atau ditakdirkan untuk digunakan dalam, pelaksanaan kejahatan?
- » Hukum nasional apa yang mengatur pemulihan, penyitaan, dan perampasan aset pidana dan non-pidana? Apakah ada ketentuan khusus terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah kerangka kerja yang ada mengenai identifikasi, pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset dan penyitaan hasil kejahatan memadai? Apakah mereka digunakan dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan; Jika ya, bagaimana dan dalam keadaan apa?
- » Apakah ada data tentang penyitaan aset yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
Apakah ada data nilai aset yang Disita atau dipulihkan?
- » Di mana barang-barang Yang Disita disimpan? Apakah mereka disimpan dengan aman? Apakah ada tuduhan bahwa aset ilegal masuk kembali ke pasar?
- » Siapa yang membayar untuk penanganan, penyimpanan, dan pemberian makan satwa liar hidup? Apakah ada anggaran pemerintah khusus untuk tujuan ini?
- » Bagaimana aset Yang Disita dibuang, didistribusikan, atau dikembalikan?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 40–45 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana : Pemolisian, Jilid 2 Integritas dan Akuntabilitas dari Polisi (2006) 16–17 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Jilid 4:*

6.8 Hasil investigasi dan indikator kinerja

Setiap lembaga peradilan pidana, termasuk yang beroperasi di sektor satwa liar dan kehutanan, harus didorong untuk mengidentifikasi target kinerja yang disetujui untuk setiap fungsinya, mengadopsi indikator berbasis kinerja, dan menetapkan mekanisme pengumpulan data yang diperlukan untuk memantaunya. Sistem akuntabilitas kinerja yang baik harus berfokus pada hasil; beberapa indikator terpilih untuk mengukur kinerja, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu, dapat memberikan informasi yang tak ternilai untuk keputusan manajemen kebijakan dan program, dan untuk melaporkan hasil secara teratur dan publik. Namun, indikator numerik tidak dapat menjadi tujuan akhir itu sendiri. Kinerja lembaga penegak hukum tidak boleh dilihat secara terpisah, melainkan dalam konteks yang lebih luas dari data yang tersedia tentang proses peradilan secara keseluruhan. Data penuntutan dan pengadilan dan hasil masing-masing tercakup dalam Bab III Bagian 2.3 dan 3.4.

Dalam penegakan hukum, indikator yang paling sering digunakan mungkin adalah persentase kejahatan yang diselesaikan oleh polisi dari total kejadian kejahatan yang menjadi perhatian mereka (kejahatan yang dilaporkan). Total beban kasus, yang didefinisikan sebagai jumlah kejahatan pidana (tidak termasuk lalu lintas) per kekuatan polisi yang berwenang, juga digunakan sebagai ukuran umum beban kerja, dan persentase kejahatan yang diselesaikan (berdasarkan kategori kejahatan) sebagai indikator kinerja.

Indikator ini tidak selalu didasarkan pada data yang sangat kokoh karena adanya perubahan perilaku pelaporan kejahatan dan variasi dalam cara polisi mendefinisikan 'kejahatan yang terpecahkan'. Standar yang berbeda untuk yang terakhir ini mencakup poin-poin di mana dakwaan telah diajukan, pelaku telah diidentifikasi, bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk mendapatkan dakwaan atau telah ada pengakuan. Pertimbangan selanjutnya adalah apakah semua jenis kejahatan dapat dimasukkan atau hanya jenis tertentu saja (misalnya, hanya kejahatan kekerasan). Indikator lain yang dapat digunakan adalah persentase kejahatan yang mengakibatkan dakwaan.

Sehubungan dengan patroli, indikator kinerja yang paling umum digunakan meliputi jumlah panggilan yang diterima dan ditanggapi (berdasarkan prioritas), waktu respons terhadap berbagai jenis panggilan, dan waktu penggunaan petugas. Terkadang, indikator 'blackout' digunakan. Ini mengacu pada berapa kali tidak ada petugas yang tersedia untuk menanggapi panggilan. Setiap komunitas itu unik, dan oleh karena itu perbandingan memiliki nilai yang sangat terbatas tanpa penilaian lebih lanjut tentang jenis kejahatan, praktik pelaporan lembaga, kebijakan respons dan investigasi, dan faktor solvabilitas.

Namun, beberapa keberatan perlu diungkapkan terkait penggunaan dan ketergantungan pada indikator kinerja dan data hasil investigasi. Informasi dan data tersebut terkenal tidak dapat diandalkan dan dapat menjadi tidak tepat dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan, paling tidak karena begitu banyak kejahatan tidak dilaporkan, dan korban kecil kemungkinannya melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang. Selama pemahaman yang sebenarnya tentang seberapa banyak kejahatan yang terjadi masih kurang, menilai upaya penegakan hukum berdasarkan hasil investigasi dan indikator kinerja mungkin tidak ada artinya. Penting juga untuk dicatat bahwa ada banyak cara untuk mengukur 'keberhasilan' dalam penegakan hukum, dan tidak semuanya akan memiliki dampak yang berarti pada keadaan keseluruhan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, karena, misalnya, kekurangan dalam langkah-langkah lain dari proses peradilan pidana, jenis penangkapan dan pelaku dan kegagalan untuk menegakkan proses hukum. Misalnya, tingkat penangkapan atau hukuman yang tinggi mungkin tidak menghasilkan penurunan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, tetapi jika itu adalah akibat dari kegagalan sistem peradilan pidana untuk menghormati hak atas pengadilan yang adil bagi tersangka, hal ini dapat menimbulkan kebencian terhadap aparat penegak dan membahayakan reputasi lembaga peradilan.

Selain itu, efektivitas unit penegakan hukum satwa liar perlu dinilai tidak hanya dalam hal apakah perburuan berkurang dan/atau peningkatan konservasi lingkungan tetapi juga dalam hal semua hasil dari kegiatan penegakan hukum. Misalnya, jika tingginya persentase investigasi

yang tidak berhasil, penting untuk memahami alasannya dan tidak hanya berkonsentrasi pada persentase keberhasilan, karena banyak faktor seperti kurangnya sumber daya, korupsi/pengaruh yang tidak semestinya, kurangnya bukti dapat mengganggu hasil. Selain itu, efektivitas penegakan hukum perlu dicermati dalam hal catatan hak asasi manusia, hubungan mereka dengan masyarakat lokal, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keamanan manusia.



ALAT
II.44

Hasil investigasi dan indikator kinerja

- » Target kinerja apa, jika ada, yang telah diidentifikasi untuk lembaga pemerintah yang beroperasi di sektor satwa liar dan kehutanan? Apa Target khusus untuk lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan peradilan?
- » Indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur aktivitas instansi terkait?
- » Siapa yang melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator ini? Bagaimana hasilnya dilaporkan kembali ke masing-masing lembaga?
- » Apakah bonus atau imbalan diberikan, dan jika demikian, atas dasar apa?
- » Apakah indikator kinerja ditinjau dan diperbarui secara berkala?
- » Berapa jumlah dan jenis kejahatan satwa liar dan kehutanan yang telah dilaporkan? Berapa proporsi dari kasus-kasus ini termasuk unsur-unsur kejahatan yang memungkinkan/mendukung seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan biaya?
- » Berapa jumlah dan jenis kejahatan satwa liar dan kehutanan yang telah diselidiki? Berapa proporsi dari kasus-kasus ini yang telah menghasilkan Penyelidikan untuk memungkinkan / mendukung kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan biaya?
- » Berapa jumlah dan jenis tindak pidana korupsi yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang telah dilaporkan dan/atau diselidiki?
- » Berapa banyak tersangka yang telah diselidiki? Berapa banyak yang telah ditahan?
- » Berapa banyak dan jenis properti dan aset lainnya yang Disita setiap tahun sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada orang yang terpapar secara politik (PEPs) telah Diselidiki sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Berapa banyak Penyelidikan yang dilanjutkan ke penuntutan atau mengakibatkan tuntutan pidana dijatuhkan? Berapa banyak orang yang telah Didakwa?
- » Berapa proporsi kejahatan satwa liar dan kehutanan yang dilaporkan dan ditemukan yang diklaim telah dipecahkan oleh pihak berwenang (yaitu, berapa tingkat 'pembersihan')?
- » Dari investigasi yang tidak berhasil, apa faktor-faktor yang berkontribusi yang mempengaruhi hasilnya?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 1 Keselamatan Publik dan Pemberian Layanan Polisi (2006) 3 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 3– 4

7

Bagian II

Aspek keuangan investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan

Kejahatan satwa liar dan kehutanan disertai dengan arus keuangan untuk melakukan pembayaran dan untuk mentransfer hasil kejahatan ini.



7.1 Investigasi keuangan: konteks dan kondisi

Kejahatan satwa liar dan kehutanan disertai dengan aliran keuangan untuk melakukan pembayaran dan untuk mentransfer hasil kejahatan tersebut. Selain investasi awal yang diperlukan untuk melakukan kejahatan, pengelolaan yang berkelanjutan dari hasil kejahatan dan pencucian serta pergerakan keuntungan merupakan bagian penting dari kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Dengan latar belakang ini, investigasi keuangan memainkan peran penting dalam mendeteksi dan memberantas kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan dalam mengalihkan fokus dari pelaku kejahatan tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika 'mengikuti uang', sangat penting untuk melakukan penyelidikan ke segala arah dan tidak membatasi penyelidikan pada keuntungan dan aset. Kekayaan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan dapat menjadi salah satu indikator kegiatan kejahatan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat diinvestasikan kembali atau digunakan untuk membeli peralatan, membayar rekanan, menutupi biaya transportasi, membeli senjata, membayar suap atau bahkan mendanai kampanye politik. Jika dilakukan secara teratur, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dapat menjadi 'kejahatan gaya hidup' dan menyediakan sumber berkelanjutan untuk mendanai perwujudan gaya hidup seperti perjalanan, barang-barang mewah (misalnya mobil dan perhiasan), dan kegiatan rekreasi (misalnya restoran dan kasino).

Teknik investigasi, seperti mengajukan pertanyaan tentang sumber dan keberadaan uang tunai dan dana lain dalam wawancara tersangka, analisis pembayaran biaya pengiriman dan perjalanan, dan penyelidikan dengan Unit Intelijen Keuangan (FIU), lembaga keuangan, bea cukai, dan jaringan pemulihan aset dapat dilakukan secara substansial meningkatkan investigasi dengan :

- Memberikan informasi tambahan yang dapat menjadi dasar untuk alokasi sumber daya pengawasan, dan seringkali dapat membantu mengidentifikasi lebih lanjut anggota jaringan kejahatan;
- Mengidentifikasi keuntungan dari kejahatan satwa liar dan kehutanan, memahami cara pembayaran, memungkinkan perampasan dan penyitaan hasil kejahatan dan aset terkait; dan
- Memberikan bukti tambahan untuk membuktikan kejahatan asal kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Dalam beberapa kasus, penggunaan investigasi keuangan dan alat anti pencucian uang dapat menjadi penjera yang lebih baik daripada tindakan lain karena mereka menargetkan aliran dana dan merampas aset pelaku. Jika penyelidikan keuangan menghasilkan dakwaan untuk kejahatan yang berkaitan dengan korupsi atau pencucian uang, maka dapat menghasilkan hukuman yang lebih tinggi daripada yang tersedia untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan.⁷⁰

Sayangnya, di beberapa yurisdiksi, hukum yang memadai untuk melakukan penyelidikan keuangan secara menyeluruh masih kurang atau kurang dimanfaatkan. Terlalu sering, investigasi kasus individu dimulai dan diakhiri dengan penyitaan satwa liar atau selundupan hutan. Tidak diikuti oleh penyelidikan lebih lanjut terhadap penjahat atau organisasi kejahatan di luar pemburu atau kurir, dan transaksi keuangan yang dilakukan untuk membayar peralatan, untuk membeli komoditas satwa liar dan kehutanan, atau untuk mencuci hasil kejahatan.

Investigasi keuangan adalah alat penting untuk mengeksplorasi dan memahami jaringan kejahatan yang lebih luas dan untuk memitigasi risiko kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan serta pencucian uang terkait. Investigasi keuangan tingkat tinggi terhadap kelompok kejahatan terorganisir mungkin rumit dan mahal, tetapi dalam banyak kasus, investigasi keuangan dapat melibatkan tugas-tugas sederhana. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa banyak kegiatan kejahatan yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, terutama di tingkat lokal, berbasis uang tunai tanpa aliran uang ke lembaga keuangan. Dalam kasus ini, teknik yang rumit mungkin tidak diperlukan, namun penting untuk menyelidiki sumber (dan tujuan) uang tunai yang ditemukan dalam kepemilikan tersangka.

Jika undang-undang dan langkah-langkah lain yang relevan untuk melakukan investigasi keuangan ada, untuk menerapkannya pada kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, penting bahwa kejahatan ini dianggap cukup serius atau diklasifikasikan dengan cara yang memungkinkan penegakan hukum untuk menggunakan alat-alat ini. Di beberapa yurisdiksi, tindakan anti pencucian uang dapat digunakan dalam kaitannya dengan semua kejahatan; di tempat lain, membutuhkan pelanggaran asal⁷¹ dan terkadang kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak begitu memenuhi syarat. Oleh karena itu, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan yang relevan diklasifikasikan sebagai kejahatan asal untuk menggunakan berbagai tindakan anti pencucian uang yang tersedia. Jika kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak memenuhi syarat untuk penggunaan langkah-langkah anti pencucian uang dan teknik investigasi keuangan, dimungkinkan untuk menggunakan kejahatan lain yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir, korupsi, penipuan atau perpajakan untuk memanfaatkan alat-alat ini. Di banyak yurisdiksi, undang-undang yang berkaitan dengan penyelidikan keuangan dilengkapi dengan undang-undang kekayaan yang tidak dapat dijelaskan atau pengayaan gelap yang berfungsi sebagai alat tambahan untuk melacak hasil dari kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Salah satu prasyarat penyelidikan keuangan adalah penegak hukum, bea cukai, dan pejabat lainnya mengetahui metode yang digunakan oleh penjahat untuk menyembunyikan transaksi dan menyembunyikan hasil kejahatan mereka, dan bahwa pejabat ini dilengkapi dengan keterampilan dan sumber daya untuk melakukan penyelidikan keuangan dan bekerja sama dengan unit ahli dan otoritas terkait lainnya.

Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Konvensi PBB melawan Korupsi, yang dibahas di Bab I, Bagian 2.1 dan 2.2 Perangkat ini, membantu Negara Pihak dalam menciptakan kerangka hukum dan menyiapkan perangkat lain untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan perilaku investigasi keuangan.

⁷⁰ Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 5.2 dari Perangkat ini.

⁷¹ Pasal 2(h) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir menyatakan: "tindak pidana asal" berarti setiap tindak pidana yang sebagai akibatnya diperoleh hasil yang dapat menjadi subyek tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Konvensi ini. *Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 5.2.

Investigasi keuangan: konteks dan kondisi

- » Apakah teknik dan tindakan investigasi keuangan digunakan dalam konteks investigasi terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan? Untuk jenis kejahatan lain apa teknik tersebut digunakan?
- » Apakah Penyelidikan keuangan rutin dilakukan setelah penyitaan satwa liar atau kayu besar-besaran?
- » Kejahatan satwa liar dan hutan manakah yang merupakan tindak pidana asal dalam kaitannya dengan pencucian uang?
- » Apakah hukum yang berkaitan dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan Pengayaan terlarang sudah ada? Apakah mereka telah digunakan dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah aparat penegak hukum, termasuk mereka yang bekerja di bidang kejahatan satwa liar dan kehutanan, menyadari manfaat dari penyelidikan keuangan? Apakah penyelidik diberi wewenang, dilatih, dan diperlengkapi untuk melakukan Penyelidikan keuangan? Apakah mereka bekerja sama dengan FIU? Jika petugas tidak terlatih, apakah mereka bekerja sama dengan lembaga lain yang terlatih dan diperlengkapi untuk melakukan penyelidikan keuangan?
- » Apakah ada organisasi swasta atau bukan pemerintah yang mendukung penegakan hukum untuk melakukan Penyelidikan keuangan? Jika ya, yang mana? Bagaimana cara kerja pengaturannya?

Sumber daya tambahan :

LALU LINTAS. *Perkara Kunyah: Arus keuangan dan mekanisme pembayaran di balik kejahatan satwa liar (2021)*. <https://www.traffic.org/publications/reports/case-digest-an-initial-analysis-of-the-financial-flows-and-payment-mechanisms-behind-wildlife-and-forest-crime/ECOFEL>, *Investigasi Keuangan terhadap Kejahatan Satwa Liar (2021)* 34–36



7.2 Unit Intelijen Keuangan (FIU)

Unit Intelijen Keuangan (FIU) berfungsi sebagai titik fokus untuk penerimaan dan analisis laporan transaksi mencurigakan dan informasi relevan lainnya yang terkait dengan pencucian uang dan tindak pidana asal terkait. FIU terampil dalam tindakan anti pencucian uang dan memiliki mandat hukum untuk mendukung otoritas penegak hukum dalam mengidentifikasi dan memberantas kejahatan, termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Mereka dapat memainkan peran penting melalui pelacakan aliran keuangan yang terkait dengan barang yang dirampas dan disita, memperluas profil pelaku, mengidentifikasi jaringan kejahatan dan perusahaan cangkang yang terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, mengidentifikasi mekanisme pembayaran dan teknik pencucian uang, menganalisis aliran hasil kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan mendeteksi aktivitas satwa liar dan kehutanan ilegal dengan menganalisis laporan transaksi mencurigakan yang relevan.

FIU mendapatkan informasi mereka dari entitas pelapor, yang mencakup lembaga keuangan dan otoritas pemerintah lainnya. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, FIU perlu menerima, mengakses, dan menganalisis informasi yang relevan secara tepat waktu dan menyebarluaskan hasil analisisnya kepada lembaga terkait yang dapat menindaklanjuti informasi tersebut. FIU umumnya perlu diberi pengarahan oleh lembaga lain yang sesuai untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan membantu mereka memahami sifat aspek keuangan yang terkait dengan kejahatan tersebut. Tidak semua FIU melakukan investigasi kejahatan: di beberapa yurisdiksi mereka lebih mengutamakan pengumpulan intelijen dan menyampaikan informasi yang menunjukkan bahwa kejahatan telah dilakukan kepada polisi, bea cukai atau unit investigasi kejahatan keuangan khusus atau lembaga lain.

Di beberapa yurisdiksi, mungkin terdapat lebih dari satu lembaga dengan mandat dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan keuangan. FIU dan penyelidik dan analis keuangan mereka perlu bekerja sama dengan penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan sebaliknya. Karena kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan sering menyatu dengan penipuan, korupsi, penghindaran pajak, pelanggaran bea cukai, pencucian uang dan jenis kejahatan lainnya, kerja sama multi-lembaga sangat penting dan harus menjadi praktik umum, baik secara nasional maupun internasional. Kerja sama multi-lembaga yang baik harus melibatkan semua aktor sistem peradilan pidana, termasuk polisi, bea cukai, jaksa, dan otoritas peradilan, serta FIU dan regulator keuangan, otoritas anti-korupsi, otoritas lingkungan, dan entitas masyarakat sipil yang relevan seperti LSM spesialis kejahatan satwa liar dan



ALAT
II.46

kehutanan. FIU juga harus bekerja sama, jika memungkinkan, di tingkat internasional, termasuk melalui Grup Egmont, yang memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan, dan kerja sama di antara anggota FIU.⁷² Jika ada mekanisme kerja sama, harus dipastikan bahwa mekanisme tersebut dicerminkan oleh praktik yang sesuai di lapangan.

Unit Intelijen Keuangan

- » Apa Mandat Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Yurisdiksi? Apa sumber dayanya? Bagaimana cara mengumpulkan, menerima, dan menganalisis informasi? Ke lembaga mana sajakah penyebaran informasi tersebut?
- » Apakah lembaga penegak hukum lain memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan Penyelidikan keuangan?
- » Apakah FIU memberikan dukungan untuk Penyelidikan keuangan yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah FIU mempertimbangkan untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan sebagai bagian dari misinya?
- » Apakah penyelidik kejahatan satwa liar dan kehutanan bekerja sama dengan FIU, dan sebaliknya?
- » Apakah FIU secara teratur menerima Laporan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada mekanisme kerja sama Multi-Lembaga resmi yang berlaku Antara otoritas investigasi keuangan dan lembaga yang menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Memiliki langkah-langkah (seperti deklarasi wajib uang Tunai atau instrumen pembawa lainnya yang dapat dinegosiasikan melebihi jumlah ambang batas) telah diterapkan untuk memastikan bahwa pihak berwenang yang didedikasikan untuk memerangi pencucian uang memiliki kemampuan untuk Bekerja sama dan bertukar Informasi baik di tingkat nasional maupun internasional?
- » Apakah FIU merupakan anggota Egmont Group of Financial Intelligence Units atau jaringan FIU formal atau informal lainnya untuk meningkatkan kerja sama internasional?

Sumber daya tambahan :

ECOFEL, Investigasi keuangan terhadap kejahatan satwa liar (2021) 7 [7], 9 [2], 42–43

APG dan UNODC, Meningkatkan Deteksi, Investigasi, dan Gangguan Aliran Keuangan Gelap dari Kejahatan Satwa Liar, Laporan Penelitian (2017) 24

FATF, Pencucian Uang dan Perdagangan Satwa liar Ilegal (2020) 31–34, 41–48

UNODC, Kejahatan Satwa liar: Aktor kunci, struktur organisasi, dan pola bisnis (2021), <https://www.unodc.org/Dokumen/>

7.3 Metode investigasi keuangan

Jika relevan dan memungkinkan, investigasi keuangan harus dilakukan bersamaan dengan investigasi terhadap kejahatan asal satwa liar dan kehutanan. Investigasi keuangan paralel dapat membantu dalam mengidentifikasi jaringan kejahatan yang lebih luas dan peserta tambahan dalam kelompok kejahatan terorganisir, dalam mengungkap bukti tambahan untuk mendukung penuntutan tindak pidana asal dan dalam menemukan hasil kejahatan yang memungkinkan perampasan dan penyitaan. Pembekuan aset, perampasan dan penyitaan merupakan perangkat penting yang dibahas lebih lanjut di Bab II, Bagian 6.7 Perangkat ini.

Dalam kasus di mana hasil kejahatan dan aset lainnya tidak mudah ditemukan atau terlihat dan di mana penyelidikan yang lebih mendalam diperlukan, otoritas terkait perlu dilengkapi dengan kewenangan yang memadai untuk mendapatkan catatan, data, dan informasi keuangan lainnya yang diperlukan. Ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kewenangan untuk menggunakan langkah-langkah wajib untuk pembuatan catatan yang dipegang oleh lembaga keuangan, penyedia barang dan jasa serta jasa profesi dan orang perseorangan atau badan hukum lainnya, untuk penggeledahan orang dan tempat, untuk mengambil pernyataan kesaksian, dan untuk penyitaan dan perolehan bukti. Teknik

⁷² Lihat lebih lanjut Bab IV, Bagian 5.5 dari Perangkat ini.

investigasi seperti penyadapan, surat perintah penggeledahan, wawancara saksi, perintah penggeledahan dan penyitaan, perintah produksi dan perintah pemantauan rekening dapat digunakan untuk memeriksa catatan keuangan atau mengakses dokumen, mengumpulkan intelijen bisnis dan keuangan, mengidentifikasi skema ilegal yang rumit dan bertindak cepat untuk menghindari pemborosan aset. Penggunaan teknik investigasi khusus yang diuraikan dalam Bab II, Bagian 5.1 Perangkat ini juga penting dalam konteks ini.

Selain itu, mekanisme legislatif dan praktis harus ada untuk mengidentifikasi secara tepat waktu apakah perorangan atau badan hukum memegang atau mengontrol rekening bank yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Penegakan hukum juga harus memiliki kekuatan dan proses untuk mengidentifikasi aset tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik. Beberapa tindakan ini bisa sangat intrusif dan melanggar undang-undang privasi dan perlindungan data. Perlindungan yang relevan perlu dibuat dan dihormati.

Metode investigasi keuangan

- » Apa kekuatan, Metode, dan alat yang tersedia untuk memungkinkan Penyelidikan keuangan? Di mana kekuatan-kekuatan ini diletakkan? Apa batasannya? Apakah ini telah digunakan dalam konteks investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan secara rutin mencakup investigasi keuangan?
- » Prosedur apa (yaitu permintaan sederhana, atau perintah pengadilan) yang harus dipatuhi penyelidik untuk mendapatkan atau mengakses informasi rekening bank dan catatan transaksi keuangan? Apakah aturan khusus berlaku untuk FIU? Apakah ada batasan terkait FIU berbagi informasi dengan penegak hukum?
- » Dapatkah FIU menahan aset tanpa pemberitahuan sebelumnya ke pemiliknya?
- » Apakah ada langkah-langkah khusus untuk mendeteksi dan memantau arus kas lintas batas terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

APG dan UNODC, Meningkatkan Deteksi, Investigasi, dan Gangguan Aliran Keuangan Gelap dari Kejahatan Satwa Liar, Laporan Penelitian (2017) 20–23
FATF, Pencucian Uang dan Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2020) 27–40



7.4 Pencatatan dan pelaporan

Persyaratan pencatatan dan pelaporan yang diberlakukan pada lembaga keuangan, terutama pada bank dan beberapa 'Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi' (DNFBP), sangat penting dalam mendeteksi pencucian hasil kejahatan, termasuk aset yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan. Standar internasional (dan undang-undang domestik yang menerapkannya) mengamanatkan agar lembaga keuangan berhati-hati saat melakukan transaksi keuangan dan mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan kepada FIU terkait.

Pasal 7, Ayat 1(a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir mensyaratkan Para Pihak membentuk rezim pengaturan dan pengawasan dalam kompetensi mereka untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan pencucian uang. Rezim ini harus komprehensif, tetapi ciri khusus dan unsur-unsur tertentu dari rezim tersebut diserahkan kepada Negara, asalkan mereka mensyaratkan, minimal, bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memastikan identifikasi pelanggan yang efektif, pencatatan yang akurat, dan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan.

Ini berarti bahwa lembaga keuangan yang berbisnis dengan, misalnya, perusahaan kehutanan atau perburuan, harus menyadari skala umum dari operasi sah klien mereka, dan harus benar-benar curiga ketika muncul transaksi yang tidak sesuai dengan operasi bisnis klien yang normal, lazim dan sah.

Untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, lembaga keuangan memerlukan informasi tipologi, indikator risiko, dan hubungan intelijen. Hal ini membantu dalam pelaporan informasi kepada pihak yang berwenang untuk mendeteksi pencucian hasil kejahatan satwa liar dan kehutanan. Indikator risiko atau 'bendera merah' dapat terkait dengan, antara lain, 'kenali pelanggan Anda' dan informasi uji tuntas untuk menentukan sumber dana dan (jenis) orang perseorangan dan badan hukum yang berhubungan dengan mereka, penggunaan 'perusahaan cangkang' untuk mengaburkan kepemilikan manfaat dan sumber selundupan, informasi tentang transaksi keuangan dan jenis sistem pembayaran yang digunakan, dan metode pembayaran, rute dan perilaku.

Lembaga keuangan harus diminta untuk menyimpan, setidaknya selama lima tahun, semua catatan transaksi yang diperlukan, baik domestik maupun internasional, untuk memungkinkan mereka memenuhi permintaan informasi dari otoritas penegak hukum dengan cepat. Catatan tersebut harus memadai untuk memungkinkan rekonstruksi transaksi individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang yang terlibat, jika ada) sehingga memberikan, jika perlu, bukti untuk penuntutan kegiatan kejahatan. Karena sebagian besar lembaga keuangan hanya memiliki sedikit, jika ada, pengetahuan sebelumnya tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, mereka mungkin perlu diberi pengarahan tentang jenis transaksi keuangan dan aset yang biasanya terlibat.

Ketidapatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan pencatatan seperti itu dapat dihukum di beberapa yurisdiksi. Negara-negara harus memastikan bahwa ada serangkaian sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan, baik pidana, perdata, atau administratif, yang tersedia untuk menindak orang perseorangan atau badan hukum yang gagal mematuhi persyaratan anti pencucian uang. Sanksi harus diterapkan tidak hanya untuk lembaga keuangan dan DNFBP, tetapi juga untuk direktur dan manajemen senior mereka.



ALAT
II.48

Pencatatan dan pelaporan

- » Apa tindakan uji tuntas pelanggan yang diterapkan entitas pelapor untuk menetapkan identitas pelanggan dan pemilik manfaat?
- » Entitas pelapor apa yang tercakup di negara ini?
- » Apakah entitas pelapor, termasuk bank, diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan?
Apakah kewajiban tersebut berlaku untuk, Antara lain, hal-hal berikut:
 - » Hasil dari semua kejahatan yang harus dimasukkan sebagai kejahatan Predikat berdasarkan Rekomendasi 3 dari Rekomendasi FATF;
 - » Dana yang diduga terhubung atau terkait dengan terorisme;
 - » Semua transaksi mencurigakan, termasuk percobaan transaksi, terlepas dari apakah transaksi tersebut melibatkan masalah pajak.
 - » Apakah FIU memberikan panduan atau instruksi yang memadai kepada entitas pelapor tentang pelaporan transaksi yang mencurigakan?
 - » Apakah negara memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatasi risiko yang terkait dengan hubungan bisnis atau transaksi bukan tatap muka?
 - » Apakah ada langkah-langkah untuk mendeteksi transportasi lintas batas fisik mata uang dan bearer negotiable instruments, termasuk sistem deklarasi atau kewajiban pengungkapan lainnya?
 - » Apakah lembaga keuangan dilengkapi dan dilatih untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan? Apakah mereka cukup menyadari jenis transaksi keuangan dan aliran aset yang umumnya terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan:
APG dan UNODC, *Meningkatkan Deteksi, Investigasi, dan Gangguan Aliran Keuangan Gelap dari Kejahatan Satwa Liar, Laporan Penelitian (2017) Lampiran 2*
ECOFEL, *Investigasi Keuangan terhadap Kejahatan Satwa Liar (2021) 43–46*

8

Bagian II

Kontrol perbatasan dan bea cukai

Sebagian besar produk satwa liar dan hutan ilegal diekspor dari negara asalnya, sehingga penyeberangan perbatasan darat, pelabuhan laut dan bandara memainkan peran penting dalam perdagangan gelap flora dan fauna. Pada saat yang sama, penyeberangan perbatasan dan pelabuhan dapat menjadi poin penting untuk intervensi bea cukai dan lembaga penegak hukum lainnya.



Untuk alasan ini, kontrol perbatasan yang efektif dan pekerjaan bea cukai sangat penting. Hal yang membuat pekerjaan ini sangat menantang adalah bahwa banyak perbatasan mengandung banyak celah, berupa garis pantai kepulauan atau pegunungan dan/atau perbatasan terpencil yang sulit untuk dipatroli, dan dengan demikian mudah ditembus oleh pedagang gelap internasional. Titik-titik penyeberangan perbatasan yang terpencil tanpa patroli rutin dan titik kontrol yang tidak memiliki staf yang memadai dapat dengan mudah dieksploitasi oleh para pedagang gelap. Selain itu, petugas pabean dan perbatasan mungkin rentan terhadap praktik korupsi dan pengawasan petugas yang bekerja di daerah terpencil bisa jadi sulit. Pelatihan, peralatan, dan pemeliharannya menimbulkan tantangan tambahan, terutama jika sumber daya langka.

Kontrol atas dan pengelolaan pergerakan semua barang, alat transportasi, dan orang serta barang bawaan mereka melintasi perbatasan internasional umumnya berada di tangan pabean. Sebagai lembaga pemerintah, bea cukai biasanya diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan peraturan lembaga lain ketika izin untuk ekspor atau impor barang diperlukan. Dalam yurisdiksi di mana mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memperoleh kembali barang-barang yang diekspor dan diimpor secara ilegal, bea cukai dapat memberikan nilai yang signifikan bagi penyelidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan.

8.1 Inspeksi perbatasan dan bea cukai

Administrasi pabean ditugaskan untuk menegakkan sejumlah besar undang-undang nasional yang mencakup pergerakan fisik melintasi perbatasan. Di satu sisi, badan-badan ini harus memfasilitasi perdagangan lintas batas, termasuk satwa liar dan hasil hutan, sementara di sisi lain mereka dihadapkan pada peningkatan volume dan kompleksitas perdagangan internasional, mobilitas manusia, potensi ancaman keamanan dan kejahatan terorganisir.

Di banyak tempat, pusat pabean melakukan pemeriksaan kiriman, kendaraan, bagasi, dan kargo untuk mendeteksi kasus di mana bea belum dibayar. Memang, pengumpulan pendapatan adalah prioritas pertama bagi banyak otoritas bea cukai dan ini menentukan pendekatan mereka terhadap penilaian risiko, pembuatan profil, penargetan, dan setiap pengumpulan dan analisis intelijen. Fokus pada pengumpulan pendapatan ini sering mengorbankan penegakan hukum dan keamanan perbatasan. Ini dapat mengakibatkan, misalnya, tidak ada kontrol atas ekspor, karena pajak tidak dapat dikenakan pada barang-barang tersebut.

Ini juga akan menentukan bagaimana pengeledahan dan pemeriksaan dokumen dan deklarasi dilakukan. Pengeledahan fisik dapat dilakukan dan perangkat pemindaian digunakan dengan tujuan untuk mengungkap ketidaksesuaian deklarasi dan penghindaran pajak/bea, tetapi tidak untuk tujuan mendeteksi barang selundupan.

Kesadaran akan pola dasar dan metode perdagangan gelap flora dan fauna serta pengetahuan dasar botani dan zoologi sangat penting untuk mencegah satwa liar dan hasil hutan ilegal di perbatasan. Petugas bea cukai juga perlu mengetahui berbagai jenis penipuan dan penyimpangan yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Selain itu, mereka memerlukan beberapa pemahaman tentang apakah standar internasional dan persyaratan CITES tentang perlakuan yang manusiawi terhadap spesimen hidup selama pengangkutan telah dipatuhi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa petugas bea cukai diperlengkapi dan dilatih secara memadai untuk mendeteksi, mencegah, dan menghentikan perdagangan gelap lintas batas flora dan fauna. Penting juga bahwa mereka bekerja sama secara erat dengan badan pengawas perbatasan lainnya dan otoritas CITES dan, khususnya, memiliki akses ke bantuan praktis para ahli dari Otoritas Pengelola CITES. Ahli veteriner, fitosanitari, zoologi dan akademisi yang dapat mendukung identifikasi atau penanganan spesimen liar, serta ahli swasta atau kolektor legal dan penangkar untuk spesies tertentu, juga dapat memberikan bantuan kepada bea cukai. Demikian pula, bea cukai harus menjaga kemitraan yang erat dengan polisi dan lembaga penegak hukum lainnya, terutama jika dan ketika kasus kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan terdeteksi tetapi juga dalam konteks profil dan manajemen risiko.⁷³

Kejahatan satwa liar semakin sering terdeteksi dengan jenis kejahatan lainnya, seperti narkoba dan perdagangan manusia. Petugas perbatasan dan bea cukai harus peka untuk memahami hubungan antara kejahatan ini, yang dapat menawarkan peluang tambahan untuk mengganggu jaringan kejahatan yang terlibat dalam kejahatan terorganisir transnasional ini.

Anjing pelacak, sinar-x dan alat pemindai lainnya digunakan di banyak tempat untuk memeriksa kargo yang masuk; di beberapa tempat, juga digunakan untuk transshipment dan barang keluar. Jika peralatan tersebut tersedia, peralatan tersebut harus dipelihara dengan baik dan digunakan oleh personel yang terlatih secara memadai. Di beberapa tempat, penggunaan dan pengoperasian pemindai dan pengeledahan selanjutnya dialihdayakan ke perusahaan swasta. Staf mereka juga harus dilatih dan diawasi secara memadai.

Bahkan otoritas pabean dan perbatasan yang terlatih dengan baik dan memiliki sumber daya yang tinggi hanya dapat memeriksa secara fisik sebagian kecil dari volume pengiriman yang sangat besar dan sejumlah besar orang yang melintasi perbatasan internasional. Oleh karena itu, penting bagi agen pabean beroperasi berdasarkan manajemen risiko yang ditargetkan dengan bertindak berdasarkan informasi atau kecurigaan yang menunjukkan bahwa komoditas ilegal sedang dikirim. Pendekatan ini membutuhkan sistem data dan intelijen yang komprehensif, dan pertukaran informasi yang tepat waktu antar lembaga dan dengan negara lain. Aspek-aspek ini dieksplorasi lebih lanjut dalam Bab II, Bagian 4.5 dari Perangkat ini.

Salah satu tantangan khusus untuk kontrol pabean dan perbatasan adalah zona perdagangan bebas dan pergudangan perdagangan bebas, yang dikenal sebagai lokasi kejahatan utama dan perdagangan gelap. Terlalu sering, tempat-tempat seperti itu digunakan untuk mencuci aset, mengemas ulang barang, mengubah deklarasi, atau mengubah rute pengiriman terkait CITES seraya menghindari penerbitan sertifikat ekspor ulang, yang akan disyaratkan menurut Konvensi. Di banyak kawasan perdagangan bebas, dasar hukum lembaga pabean untuk pemeriksaan, atau bahkan masuk ke kawasan, mungkin dibatasi atau tidak ada.

⁷³ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 4.6 dari Perangkat ini

Kontrol perbatasan dan inspeksi Bea Cukai

- » Apakah importir dan eksportir diharuskan untuk menyatakan hewan dan tumbuhan dimaksudkan untuk impor dan ekspor? Apakah importir dan eksportir diharuskan menunjukkan dokumen CITES?
- » Apakah otoritas Bea Cukai harus diberi tahu terlebih dahulu mengenai, misalnya, Informasi kargo?
- » Staf khusus, peralatan teknis, anjing pendeteksi, dan fasilitas apa yang tersedia di penyeberangan perbatasan darat, pelabuhan laut, dan bandara?
- » Apakah semua unit pabean (seperti klasifikasi barang, pengumpulan bea, kontrol penumpang dan kontrol kargo) diberi tanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dan peraturan satwa liar dan kehutanan yang relevan?
- » Apakah ada perjanjian kerja sama yang diformalkan Antara lembaga Bea Cukai dan satwa liar dan kehutanan dan dengan otoritas penegak hukum misalnya lembaga anti korupsi, anti pencucian uang? Apa hubungan kerja sehari-hari di Antara mereka?
- » Apakah petugas Bea Cukai dan petugas perbatasan lainnya terlatih dalam Persyaratan CITES, identifikasi spesimen dan sebagainya? Bagaimana otoritas Bea Cukai bekerja sama dengan otoritas CITES?
- » Berapa persentase pengiriman, bagasi, kargo, dan penumpang (dll.) yang diperiksa sebelum ekspor atau impor? Apa dan siapa yang menentukan pengiriman mana (dll.) yang diperiksa?
- » Apakah pengiriman dan penumpang dalam perjalanan diperiksa?
- » Apakah keberadaan dan Keabsahan dokumen untuk semua impor dan ekspor diperiksa? Apakah keasliannya selalu diverifikasi? Apakah dokumen diperiksa silang terhadap isi pengiriman yang sebenarnya?
- » Apakah langkah-langkah telah diterapkan untuk mencegah maskapai komersial (maskapai penerbangan, jalur pelayaran, perusahaan truk) digunakan untuk tujuan perdagangan manusia?
- » Apakah langkah-langkah telah diterapkan untuk menetapkan bahwa kargo didokumentasikan dengan benar, termasuk sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut?
- » Apakah teknik penilaian risiko diterapkan untuk menargetkan pengiriman Fauna dan Flora berisiko tinggi? Apakah indikator risiko yang terkait dengan Fauna dan Flora dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem penilaian risiko?
- » Apakah ada zona perdagangan bebas atau gudang perdagangan bebas di Yurisdiksi? Jika ya, apakah badan Pabean memiliki wewenang untuk memasuki dan memeriksa lokasi-lokasi ini? Apakah ada dugaan bahwa lokasi ini digunakan untuk kegiatan KEJAHATAN?

Sumber daya tambahan :
 APG dan UNODC, *Meningkatkan Deteksi, Investigasi, dan Gangguan Aliran Keuangan Gelap dari Kejahatan Satwa Liar, Laporan Penelitian (2017) 20–23*
 FATF, *Pencucian Uang dan Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2020) 27–40*



8.2 Data kepabeanan

Data pabean mencakup informasi tentang perdagangan lintas batas, termasuk volume perdagangan dan nilai yang dinyatakan. Data tentang impor dan ekspor dikumpulkan oleh sebagian besar otoritas pabean di seluruh dunia dan biasanya ditata menurut jenis komoditas, seringkali menggunakan “Sistem Deskripsi Komoditas dan Pengodean yang Terharmonisasi”.⁷⁴

Data kepabeanan

- » Data bea cukai apa yang tersedia untuk impor dan ekspor yang melibatkan fauna dan flora?
- » Apakah laporan bea cukai berisi informasi tentang spesies, volume dan nilai yang dinyatakan dari impor dan ekspor fauna dan flora?



⁷⁴ Lihat <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx>

8.3 Indikator kinerja kepabeanan

Sangat sedikit otoritas bea cukai yang mengadopsi indikator yang secara sistematis mengatasi masalah kinerja bea cukai di bidang penegakan hukum. Dalam Kerangka Standar SAFE untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global, Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) menetapkan sejumlah standar untuk pengukuran kinerja kepabeanan. Beberapa indikator kinerja utama untuk penegakan pabean satwa liar dan hutan termasuk, namun tidak terbatas pada :

- ↳ Satwa liar sebagai bagian dari Strategi Bea Cukai nasional;
- ↳ Waktu rata-rata untuk pelepasan perdagangan Yang Sah;
- ↳ Pelatihan petugas Bea Cukai;
- ↳ Kuantitas dan kualitas penanganan informasi dan intelijen;
- ↳ Manajemen risiko dan penilaian risiko, termasuk penerapan indikator risiko dalam operasi sehari-hari;
- ↳ Jumlah satuan atau petugas khusus untuk penegakan satwa liar;
- ↳ Jumlah kontrol fisik berdasarkan penilaian risiko, dan persentase intersepsi setelah kontrol tersebut;
- ↳ Jumlah perampasan;
- ↳ Persentase investigasi lanjutan terhadap perdagangan ilegal;
- ↳ kerja sama dengan lembaga lain (misalnya: Mou, pertukaran informasi, bantuan dari Otoritas Manajemen CITES, penyerahan penyitaan untuk tindak lanjut);
- ↳ kerja sama di tingkat Regional dan internasional;
- ↳ Kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan bantuan untuk meningkatkan kesadaran publik; dan
- ↳ Efektivitas kontrol atas titik titik penyeberangan perbatasan tanpa aparat reguler.



Indikator kinerja kepabeanan

- » Sasaran kinerja apa, jika ada, yang telah diidentifikasi untuk Bea Cukai? Apakah Bea Cukai terutama merupakan otoritas pengumpulan pendapatan; prioritas apa yang diberikan pada penegakan hukum dan kontrol perbatasan?
- » Indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur aktivitas Bea Cukai?
- » Siapa yang melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator ini? Bagaimana hasilnya dilaporkan kembali ke masing-masing lembaga?
- » Apakah indikator kinerja ditinjau dan diperbarui secara berkala?
- » Bagaimana Peringatan CITES ditindaklanjuti? Apakah mereka diterima, didistribusikan, dan dibaca? Apa kendala yang ditemui dalam menggunakan Peringatan CITES?

Sumber daya tambahan :

Robert Irandia, Thomas Kantens dan Tadashi Yasui, Tinjauan Pengukuran Kinerja dalam Administrasi Kepabeanan, Makalah Penelitian WCO No. 13 (April 2011).

9

Bagian II

Korupsi, Integritas dan Akuntabilitas

Penjahat yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan semakin berkembang dengan adanya korupsi karena memungkinkan mereka untuk melakukan dan menyembunyikan kegiatan ilegal mereka.



9.1 Korupsi

Penjahat yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan semakin berkembang dengan adanya korupsi karena memungkinkan mereka untuk melakukan dan menyembunyikan kegiatan ilegal mereka. Petugas yang bekerja dalam penegakan hukum satwa liar dan kehutanan dan bagian lain dari administrasi satwa liar dan kehutanan bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya bernilai komersial tinggi. Mereka sering bekerja di daerah terpencil, jauh dari pengawasan publik dan terkadang dengan pengawasan minimal. Dalam beberapa sistem, pejabat satwa liar dan kehutanan yang tidak diawasi memiliki kewenangan diskresi yang luas dan ruang gerak yang luas. Mereka mungkin rentan terhadap korupsi atau berkolusi dengan orang dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, konflik kepentingan dapat muncul jika tugas penegakan petugas bertentangan dengan kepentingan pribadi; misalnya, jika kerabat atau teman memiliki kepentingan di sektor satwa liar atau kehutanan atau jika mereka tampak melakukan kejahatan.

Pejabat senior dapat disuap atau dipengaruhi (perdagangan pengaruh) untuk membuat penegakan hukum kekurangan staf atau sumber daya, termasuk melalui pembatasan peralatan, seragam dan pendanaan. Selain itu, mereka mungkin tidak memberikan pelatihan yang memadai atau menugaskan staf yang tidak berpengalaman ke daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, sehingga mengurangi risiko tertangkapnya penjahat. Karena beberapa kawasan lindung terletak di daerah terpencil yang tidak memiliki utilitas dan fasilitas yang memadai ('kawasan sulit'), akan ideal bagi staf yang bekerja di kawasan tersebut untuk memiliki shift reguler di mana mereka dirotasi masuk dan keluar dari kawasan yang sulit tersebut. Pejabat senior mungkin dengan sengaja tidak merotasi beberapa personel keluar dari kawasan ini, yang mengakibatkan demotivasi dan bahkan mungkin membatasi efektivitas dalam menjalankan tugas penegakan mereka. Pejabat senior mungkin dengan sengaja menunda pembayaran tunjangan kesulitan kepada personel tersebut, yang selanjutnya menurunkan motivasi mereka. Faktor-faktor ini juga dapat meningkatkan risiko pejabat tersebut menjadi berisiko melakukan korupsi.

Korupsi juga dapat menjadi penghalang untuk menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan. Misalnya, pelaku perorangan atau kelompok kejahatan terorganisir dapat menyuap petugas satwa liar dan kehutanan yang bekerja di kawasan lindung agar tidak melaporkan kejahatan kepada atasan mereka atau melaporkan kejahatan secara tidak tepat (yaitu melaporkan kejahatan dengan hukuman yang lebih rendah). Anggota masyarakat yang mengetahui kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat disuap oleh pelaku untuk tidak melaporkan hal yang sama kepada aparat penegak hukum. Terkadang, daripada membayar anggota komunitas individu, para pemimpin atau kepala daerah

disuap yang kemudian mengintervensi dan mencegah kejahatan tersebut dilaporkan. Karena beberapa penjahat atau organisasi kejahatan yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan mungkin juga terlibat dalam perdagangan satwa liar dan kehutanan legal, mereka dapat mengancam anggota masyarakat yang ingin melaporkan kejahatan dengan hilangnya lapangan pekerjaan atau berkurangnya kesempatan untuk dipekerjakan oleh entitas di masa depan.

Setelah suatu kejahatan dilaporkan, penjahat dapat berkolusi dengan atau menyuap petugas penegak hukum senior untuk mengubah, salah menempatkan, atau menghancurkan catatan yang berisi informasi tentang kejahatan yang dilaporkan. Mungkin juga ada kasus di mana pejabat senior pemerintah memengaruhi pelaporan kejahatan sehingga menguntungkan pelakunya. Petugas senior ini mungkin memegang posisi di dalam lembaga satwa liar dan kehutanan, lembaga penegak hukum lainnya atau lembaga pemerintah lainnya.

Petugas penegak hukum dapat disuap untuk menunda dimulainya penyelidikan atas kasus yang dilaporkan. Karena beberapa bukti mungkin melibatkan satwa liar dan hasil hutan, yang membusuk seiring berjalannya waktu kecuali jika disimpan dengan baik (membutuhkan sumber daya yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa lembaga penegak hukum), hal ini dapat mengakibatkan perubahan status bukti yang dapat menghambat penyelidikan. Penundaan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi barang bukti untuk diganti, dirusak atau dimusnahkan. Penundaan tersebut juga dapat memberikan waktu yang cukup bagi penjahat yang belum ditangkap untuk menghindari penangkapan.

Petugas penegak hukum selanjutnya dapat disuap atau dipengaruhi oleh atasan mereka untuk menugaskan petugas yang kurang kompeten untuk melakukan investigasi, yang dapat mengakibatkan investigasi menjadi tidak efektif. Selama investigasi, petugas investigasi dapat disuap atau dipengaruhi oleh atasannya untuk dengan sengaja mengganti, mencemarkan, merusak, menghancurkan atau tidak menjaga rantai bukti dengan tepat.

Penyidik juga dapat disuap atau diarahkan oleh penyelia mereka untuk hanya menghubungkan kejahatan tersebut dengan staf tingkat rendah dari kelompok kejahatan terorganisir, dan mengabaikan 'aktor yang lebih besar' yang mungkin memiliki hubungan baik dengan petugas penegak hukum senior dan politisi. Setelah penyelidikan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan selesai, pelaku dapat menyuap petugas kunci untuk memastikan bahwa kasus tersebut tidak diteruskan ke otoritas kejaksaan atau untuk menunda meneruskan kasus tersebut ke otoritas kejaksaan.

Pelaku juga dapat menyuap penyidik atau penyelia mereka untuk berbagi dengan mereka kemajuan penyelidikan dan terkadang bahkan informasi rahasia, yang dapat mencakup nama saksi dan/atau informan. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengancam saksi/informan agar tidak memberikan keterangan lebih lanjut atau hadir di pengadilan. Informasi tersebut memungkinkan tertuduh untuk semakin menyembunyikan atau menghancurkan bukti yang belum ditemukan, dan juga menutup celah dalam kegiatan kejahatan yang menyebabkan mereka terdeteksi.

Korupsi

- » Sudahkah lembaga satwa liar dan kehutanan menetapkan mekanisme untuk melaporkan korupsi? Jika ya, apakah lembaga tersebut telah mempublikasikan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk melaporkan korupsi?
- » Apakah ada tuduhan atau bukti bahwa pejabat yang terlibat dalam penegakan hukum satwa liar dan kehutanan menerima atau meminta suap, menyalahgunakan jabatan mereka, atau dipengaruhi oleh orang lain (termasuk atasan) untuk :
 - Mengabaikan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
 - Tidak melaporkan, tidak akurat melaporkan, mengubah, menghancurkan atau memusnahkan laporan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
 - Menunda dimulainya penyelidikan?
 - Menugaskan petugas yang tidak kompeten untuk suatu kasus?
 - Dengan sengaja mengganti, mencemari, merusak, menghancurkan atau tidak mempertahankan rantai bukti dengan tepat?
 - Menghapus tersangka utama dari sebuah kasus?
 - Membocorkan Informasi tentang Penyelidikan yang sedang berlangsung?
 - Mengubah hasil penyelidikan?
 - Sengaja menimbulkan kekurangan staf atau menugaskan staf yang tidak berpengalaman ke daerah/tempat Tugas tertentu?
 - Kekurangan sumber daya atau penundaan penyediaan sumber daya untuk kawasan/ tempat tugas tertentu (yang mungkin termasuk tunjangan pengiriman)?
 - Batasi atau tunda rotasi staf yang ditempatkan di daerah sulit?
- » Apakah ada tuduhan atau bukti bahwa anggota masyarakat:
 - Disuap oleh penjahat atau pejabat pemerintah untuk tidak melaporkan atau melaporkan kejahatan satwa liar dan kehutanan secara tidak akurat?
 - Diancam oleh aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah lainnya (penyalahgunaan jabatan) untuk tidak melaporkan atau melaporkan kejahatan satwa liar dan kehutanan secara tidak akurat?
 - Diancam oleh tersangka kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Sudahkah lembaga satwa liar dan kehutanan membuat sistem untuk menyelidiki korupsi? Bagaimana pengalaman proses investigasi? Apakah prosesnya melibatkan analisis insiden korupsi yang dilaporkan, diselidiki dan disimpulkan?
- » Apakah undang-undang satwa liar dan kehutanan yang relevan memuat ketentuan khusus tentang korupsi? Jika ya, apa itu dan bagaimana penerapannya? Jika tidak, apa kaitan antara undang-undang satwa liar dan kehutanan dengan undang-undang yang berkaitan dengan korupsi?
- » Apakah lembaga satwa liar dan kehutanan telah melakukan penilaian risiko korupsi untuk mengidentifikasi risiko korupsi yang mungkin terjadi? Jika ya, apakah lembaga tersebut telah menyusun rencana penanggulangan korupsi dan bagaimana status pelaksanaan rencana tersebut?
- » Apakah ada mekanisme bagi lembaga satwa liar dan kehutanan untuk bekerja sama dengan lembaga antikorupsi? Apa pengalaman kerja samanya?
- » Apakah ada strategi atau rencana nasional untuk memberantas korupsi di sektor satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, apa yang termasuk di dalamnya? Kapan itu ditulis? Apakah ada integritas menyeluruh atau rencana aksi antikorupsi untuk kepolisian dan bea cukai? Jika demikian, apa yang termasuk di dalamnya? Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya? Bukti apa yang ada tentang penerapannya, baik secara nasional maupun lokal?
- » Apakah ada dugaan atau bukti bahwa aparat penegak hukum menerima pembayaran tidak resmi atau gratifikasi dari pelaku bisnis? Jika demikian, apa alasan yang diberikan untuk ini? Apa konsekuensi tersirat jika pembayaran tidak dilakukan?
- » Apakah pejabat publik diizinkan untuk menerima hadiah, keuntungan, atau imbalan pribadi? Jika demikian, atas dasar apa ini diperbolehkan? Siapa yang berwenang menerima hadiah? Apakah ada catatan hadiah yang diterima? Apa yang terjadi dengan hadiah yang telah diterima? Apakah keluarga pejabat publik diizinkan untuk menerima hadiah, manfaat, atau imbalan yang terkait dengan pekerjaan anggota staf tersebut? Jika tidak, bagaimana ini dicegah?



9.2 Akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum

Oleh karena itu penting bahwa pejabat pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dan bahwa kode etik yang jelas ditetapkan untuk memastikan integritas pejabat dan departemen mereka.

Petugas penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berbagai cara. Mereka mungkin bertanggung jawab dalam hal manajemen atau bisnis untuk kinerja dan produktivitas mereka, mungkin terhadap target dan tujuan yang ditetapkan pemerintah atau masyarakat. Lebih penting lagi, mereka harus bertanggung jawab atas cara mereka menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Alat-alat berikut membahas sejauh mana, dan mekanisme yang digunakan, penegakan hukum di sektor satwa liar dan kehutanan dipantau, bersama dengan cara-cara di mana ketidakjujuran, korupsi, dan kurangnya integritas dapat muncul dengan sendirinya.



Akuntabilitas dan integritas

- » Apakah undang-undang menetapkan mekanisme untuk pemantauan dan pengawasan perilaku dan kinerja petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, apa mekanisme ini?
- » Apakah ada kode etik yang jelas untuk unit penegak hukum satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, apa isinya? Apakah ada kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsipnya? Bagaimana kasus-kasus ini ditangani?
- » Apakah petugas diharapkan dan berhak untuk melaporkan rekan kerja atas kegagalan menjaga integritas dan standar profesional? Apakah petugas yang membuat laporan seperti itu dilindungi dari viktimisasi atau pelecehan oleh hukum dan diberikan dukungan praktis?
- » Apakah ada jalan bagi warga sipil untuk mengajukan pengaduan terhadap polisi dan mereka yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah ada pengawasan independen terhadap sistem pengaduan?
- » Bagaimana petugas penegak hukum satwa liar dan kehutanan dipandang oleh lembaga lain dan oleh masyarakat umum? Apakah mereka dipercaya dan dihormati? Jika tidak, mengapa tidak?
- » Apakah ada penilaian risiko korupsi atau strategi manajemen yang dikembangkan atau diterapkan?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 2 Integritas dan Akuntabilitas Polisi (2006) 5–20*
 UNODC, *Mengurangi korupsi: Panduan untuk mengatasi korupsi bagi otoritas pengelolaan satwa liar.* https://www.unodc.org/Dokumen/Margasatwa/19-08373_Scaling_Back_Corruption_ebook.pdf
 Dana Seluruh Dunia untuk Alam. *Menargetkan Korupsi Sumber Daya Alam:* <https://www.worldwildlife.org/pages/tnrc-knowledge-hub-Publikasi>

III

PROSEDUR DAN PENGADILAN PIDANA

Bagian III



Aturan acara pidana yang jelas dan transparan, bersama dengan penuntutan dan otoritas peradilan yang independen, memiliki sumber daya yang memadai dan dikelola secara efisien, sangat penting untuk menangani kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, baik untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan menjamin hak-hak dasar mereka dihormati oleh penegakan hukum satwa liar dan kehutanan.

Otoritas kejaksaan dan kehakiman yang terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan staf yang memadai dapat membuat perbedaan dalam hasil dari setiap proses pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan mengingat tantangan unik di bidang ini. Seperti dalam setiap aspek sistem peradilan pidana, integritas dan akuntabilitas jaksa dan hakim harus dijamin, dan independensi serta ketidakberpihakan mereka dilindungi. Hal ini juga memerlukan langkah-langkah untuk melindungi mereka yang terlibat dalam proses pidana dari korupsi, nepotisme, pemaksaan, dan bentuk pengaruh lain yang tidak semestinya.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan (dan kejahatan yang mempengaruhi lingkungan secara umum) penuntutan dan dimulainya proses peradilan adalah pilihan terakhir. Alasan untuk ini termasuk sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk melakukan proses pidana, sifat rasio ultima hukum pidana, kemungkinan hukuman berat dijatuhkan, dan fakta bahwa seringkali lebih efisien untuk mencapai solusi melalui negosiasi dan penggunaan perintah administratif jika perlu dan memungkinkan.

Bab III dari Perangkat ini mengkaji masalah-masalah tertentu dari prosedur pidana dan peran serta pelaksanaan penuntutan dan otoritas peradilan dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Bagian 1 menguraikan langkah-langkah yang mengarah dari investigasi ke persidangan dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi dan bukti. Bagian 2 dan 3 menjabarkan langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya, susunan staf dan sumber daya otoritas kejaksaan dan peradilan secara tepat, dan berisi alat untuk melindungi independensi mereka. Langkah-langkah terkait hukuman dan sanksi dijelaskan dalam Bagian 4 dan terkait dengan restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dijelaskan dalam Bagian 5. Bagian 6 mengeksplorasi beberapa langkah gangguan peradilan bukan pidana.

1

Bagian III

Prosedur pidana

Setelah selesainya penyelidikan kejahatan⁷⁵ di sebagian besar yurisdiksi, penyelidik perlu melaporkan hasil investigasi ke kejaksaan, sedangkan di yurisdiksi lain, investigasi ditugaskan kepada hakim investigasi.



1.1 Dari penyelidikan hingga persidangan

Hasil investigasi yang berhasil adalah kemunculan tersangka di depan pengadilan, setelah investigasi mencapai ambang bukti yang diperlukan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Beberapa yurisdiksi mematuhi peraturan penuntutan wajib yang mewajibkan jaksa untuk membawa kasus yang cukup terbukti ke pengadilan, sedangkan yurisdiksi lain memberikan keleluasaan kepada jaksa untuk memutuskan, berdasarkan fakta kasus, apakah akan menuntut tersangka atas tindakan kriminalnya atau menghentikan penuntutan.⁷⁶

Terkadang pengadilan menentukan bahwa seorang tertuduh dialihkan dari penuntutan ke tindakan alternatif (seperti penyelesaian arbitrase, proses keadilan restoratif, perintah pelayanan masyarakat atau perlakuan yang sesuai),⁷⁷ dibebaskan dengan jaminan atau menunggu persidangan dalam tahanan. Di lain waktu, polisi dan jaksa memiliki keleluasaan untuk mengalihkan kasus dari proses peradilan pidana atau memberikan jaminan. Pembebasan dengan jaminan sangat sensitif ketika kejahatan yang dicurigai berada di atas ambang keseriusan tertentu atau ketika ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa tersangka terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terorganisir. Jaminan tidak boleh diberikan bila ada bahaya penghilangan barang bukti, kolusi, pelarian atau pelanggaran kembali, tetapi bila mungkin dan aman, alternatif penahanan (sebelum dan sesudah persidangan) harus dipertimbangkan.

Sebelum penyelidik mengajukan kasus ke kejaksaan, mereka perlu memastikan bahwa berkas kasus mereka memenuhi ambang batas pembuktian, berkualitas tinggi, dan berisi semua informasi yang relevan. Dalam menyiapkan berkas, mereka juga perlu mempertimbangkan informasi dan bukti apa yang akan (perlu) diungkapkan kepada tertuduh dan penasihat hukum (misalnya, rincian tentang saksi dan korban) untuk melindungi hak-hak tertuduh dan untuk melindungi saksi (khususnya jika mereka takut akan ada pembalasan).⁷⁸ Juga harus dipastikan bahwa informasi yang berpotensi membebaskan tersangka tidak dikecualikan. Jika ada sistem manajemen kasus, akan ada cara khusus untuk menyusun, mengkategorikan, dan menyimpan informasi yang harus diikuti.

⁷⁵ Prosedur investigasi diatur dalam Bab II, Bagian 6 dari Perangkat ini.

⁷⁶ Lihat lebih lanjut Bab III, Bagian 2.1.3 dari Perangkat ini.

⁷⁷ Lihat lebih lanjut Bab III, Bagian 6 dari Perangkat ini.

⁷⁸ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 6.6 dari Perangkat ini.



Sangatlah penting bahwa pada semua tahap prosedur pidana, proses hukum ditegakkan, khususnya hak atas pengadilan yang adil, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum, dan hak untuk mendapat bantuan hukum.

Dari penyelidikan hingga Persidangan

- » Berdasarkan undang-undang dan prosedur sistem peradilan pidana, bagaimana kasus pidana yang melibatkan kejahatan satwa liar atau kehutanan dimulai dari dugaan atau kecurigaan adanya kejahatan hingga saran kepada penyidik, hingga tuntutan formal, hingga putusan dan disposisi?
- » Secara spesifik, langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh penyidik untuk mengajukan perkara ke kejaksaan atau otoritas kehakiman? Informasi apa yang perlu diberikan dan dalam bentuk apa untuk mengajukan kasus ke penuntutan atau otoritas peradilan?
- » Apakah ada undang-undang dan peraturan tentang jaminan dan proses jaminan yang relevan (dan digunakan dalam kaitannya) dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Informasi apa yang akan/harus diungkapkan kepada terdakwa dan penasihat hukum?
- » Apakah hak-hak saksi, tersangka dan tertuduh ditegakkan selama prosedur pidana? Apakah ada laporan atau dugaan pelanggaran proses hukum atau hak peradilan yang adil dalam kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada sistem manajemen kasus yang dapat diakses oleh penyidik dan jaksa? Bagaimana cara kerjanya; informasi apa yang dibutuhkannya; apakah itu digunakan oleh penyidik dan penuntut kasus kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Panduan Penyusunan Undang-Undang untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar (2018) 55–56
UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Jilid 3 Investigasi Kejahatan (2006) 20

1.2 Yurisdiksi

Yurisdiksi mengacu pada kekuasaan suatu Negara, melalui jaksa, pengadilan, dan lembaga lainnya, untuk menjalankan otoritas hukum atas suatu wilayah, orang, atau benda. Menetapkan yurisdiksi yang komprehensif — di dalam dan di luar batas negara — sangat penting dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan karena banyak kejahatan terjadi lintas batas internasional dan pelaku sering berpindah dari satu negara ke negara lain secara khusus untuk mengeksploitasi celah yurisdiksi dalam undang-undang untuk menghindari penangkapan dan penuntutan.

Negara dapat melaksanakan yurisdiksi atas tindakan yang dilakukan di dalam wilayahnya, termasuk perairan teritorialnya (prinsip teritorialitas). Hukum internasional juga mengakui hak negara-negara untuk melaksanakan yurisdiksi ekstrateritorial dalam sejumlah keadaan lain. Meski ruang lingkup yang tepat dari keadaan ini belum sepenuhnya ditetapkan, masyarakat internasional umumnya telah mengakui yurisdiksi suatu Negara atas warga negaranya, bahkan ketika berada di luar wilayahnya (prinsip kepribadian aktif); yurisdiksi suatu Negara atas tindakan yang merugikan warga negaranya (prinsip kepribadian pasif); dan yurisdiksi suatu Negara atas tindakan yang dilakukan di luar Negara tetapi dimaksudkan untuk memiliki efek substansial di dalam wilayah Negara tersebut (prinsip teritorial objektif). Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam ketentuan yang relevan dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Pasal 15) dan Konvensi PBB Menentang Korupsi (Pasal 42).

Masalah yurisdiksi dapat muncul jika tidak jelas di mana kejahatan telah dilakukan. Penggunaan layanan daring oleh penjahat yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan menimbulkan banyak tantangan bagi penegakan hukum. Sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang dilakukan secara daring,

misalnya, mungkin ada sejumlah besar negara yang dapat menjalankan yurisdiksi sehubungan dengan kasus tertentu karena perantara daring secara bersamaan tunduk pada undang-undang dari beberapa yurisdiksi sehubungan dengan tindakan yang sama. Masalah yurisdiksi lebih lanjut terkait dengan akses lintas batas ke bukti elektronik oleh penegak hukum. Bukti elektronik dari aktivitas yang melanggar hukum seringkali dapat ditemukan di server di luar wilayah lembaga investigasi. Lembaga penegak hukum mungkin perlu mengakses informasi dasar pelanggan, data lalu lintas, dan/atau data konten di luar negeri. Mereka mungkin juga perlu mencegah data lalu lintas dan/atau konten secara real-time.

Yurisdiksi

- » Sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, apakah Negara memiliki yurisdiksi atas :
 - Kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya;
 - Kejahatan yang dilakukan di dalam perairan teritorialnya ;
 - Kejahatan yang dilakukan di atas kapal yang mengibarkan bendera Negara tersebut dan pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan hukum Negara tersebut;
 - Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara atau penduduk biasa Negara di Negara lain; dan
 - Kejahatan yang dilakukan di luar Negara tetapi dimaksudkan untuk memiliki efek substansial di dalam wilayah Negara?
 - Kejahatan yang dilakukan di Negara dengan implikasi bagi Negara lain?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Panduan Penyusunan Undang-Undang untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar (2018) 10–11
UNODC, Pembuatan Kebijakan dan peran Perantara daring dalam perdagangan gelap (2021) 62–63



1.3 Bukti

1.3.1 Manajemen dan penyimpanan bukti

Dari saat bukti dikumpulkan di TKP,⁷⁹ penting untuk disimpan dengan cara yang meminimalkan kemungkinan kontaminasi, perusakan, atau pemutusan rantai bukti, yang dapat mengakibatkan barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk penuntutan. Bukti dapat berupa barang fisik atau barang digital seperti foto, rekaman surel, perangkat elektronik, dan protokol obrolan.

Yurisdiksi yang berbeda melampirkan persyaratan yang berbeda untuk dokumentasi tertulis tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan bukti. Kapan pun memungkinkan, bukti fisik individu harus disimpan dalam kantong bukti atau bentuk lain dari kemasan 'tahan rusak' dengan nomor pengenal unik. Merupakan praktik umum dan baik untuk mencatat pada kemasan bukti, minimal, nama dan tanda tangan kolektor, nama orang yang menemukan barang bukti di tempat kejadian, nomor barang bukti yang unik, tanggal dan waktu pengambilan, lokasi pengambilan di tempat kejadian, serta penjelasan singkat tentang barang bukti tersebut. Dokumentasi fotografi dapat sangat berguna untuk mendukung barang fisik dan catatan tertulis dan harus disimpan dengan kecermatan yang sama, karena ketertelusuran dan batas TKP dapat menjadi tantangan khusus bagi kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Untuk memastikan bahwa bukti dikelola dan disimpan secara akurat dan aman, petugas penegak hukum harus memiliki pelatihan yang memadai dalam dokumentasi tertulis dan menyadari potensi pentingnya lebih jauh dalam prosedur pidana, karena kesalahan dapat membahayakan validitas dan penerimaan bukti di pengadilan, yang mana dapat mencegah pelaku dibawa ke pengadilan.

79 Pekerjaan TKP satwa liar dan kehutanan dibahas dalam Bab II, Bagian 5.4 dari Perangkat ini.



ALAT
III.3

Manajemen dan penyimpanan bukti

- » Hukum dan peraturan apa yang mengatur penanganan bukti?
- » Apa Persyaratan khusus mengenai penyimpanan, keamanan, penanganan, dan pembuangan bukti?
- » Bagaimana rantai kustodi (integritas bukti) dicatat, dikelola, dan dipantau?
Apakah rantai kustodi bukti dicatat setiap saat?
- » Apakah ada aturan khusus tentang pemindahan barang bukti dari TKP ke laboratorium atau fasilitas penyimpanan lainnya?
- » Apakah bukti yang disita dari kepemilikan beberapa tersangka dikumpulkan dan ditandai dengan cara yang menunjukkan tersangka mana yang memiliki bukti apa?
- » Apakah aturan dan persyaratan yang ada diikuti oleh aparat penegak hukum terkait, khususnya penyidik TKP?
- » Apakah bukti diberi label secara memadai?
 - Apakah bukti individu diberi label dan disimpan dalam wadah terpisah?
 - Apakah kemasannya terbukti rusak?
 - Apakah nomor pelabelan benar-benar unik dan apakah memberikan informasi tentang kolektor, tanggal pengumpulan, dan jumlah barang yang dikumpulkan oleh orang tersebut pada hari itu?
- » Apakah ada fasilitas yang memadai untuk menyimpan barang bukti (misalnya, dapatkah barang biologis disimpan dalam keadaan dingin atau beku)?
- » Untuk kasus-kasus besar, apakah petugas ditunjuk untuk memastikan kesinambungan dan menjaga keutuhan bukti dan barang bukti?

*Sumber daya tambahan:
UNODC, Panduan TKP Satwa Liar untuk Responden Pertama (2019) 43–51*

1.3.2 Penerimaan bukti

Aturan bukti yang diadopsi oleh sistem peradilan pidana dapat menghalangi beberapa jenis bukti untuk dipertimbangkan. Jenis bukti lain, seperti desas-desus, dapat dikecualikan karena dianggap oleh beberapa sistem secara inheren tidak dapat diandalkan, dengan pengecualian tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apa yang dapat diterima sebagai bukti dan prosedur agar bukti diterima di pengadilan bervariasi di antara yurisdiksi. Umumnya, diterimanya bukti mengikuti syarat pengamanan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan pengawasan yudisial atau independen. Aturan khusus mungkin berlaku (dan diperlukan) untuk penggunaan bukti elektronik dan untuk bukti yang bersumber di luar yurisdiksi pengadilan.



ALAT
III.4

Penerimaan bukti

- » Apakah kerangka hukum mencakup ketentuan tentang diterimanya bukti dalam proses pengadilan?
- » Aturan apa yang harus dipatuhi agar bukti diterima?
- » Jenis bukti apa yang dilarang?
- » Apakah penggunaan bukti forensik diperbolehkan?

1.3.3 Bukti elektronik

Bukti elektronik (atau digital) adalah setiap informasi yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Metode pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, penerimaan dan penggunaan bukti elektronik sangat bervariasi antar yurisdiksi, seperti halnya hukum dan peraturan mereka tentang topik ini.

Langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti elektronik meliputi, antara lain, penyimpanan data komputer yang dipercepat, perintah untuk mengakses data konten yang disimpan, data lalu lintas yang disimpan atau informasi pelanggan, pengumpulan data konten atau lalu lintas secara real-time, surat perintah penggeledahan untuk perangkat keras komputer atau data, penyitaan perangkat keras atau data komputer, akses lintas batas ke sistem atau data komputer, dan penggunaan alat forensik jarak jauh. Penggunaan teknik pengumpulan bukti elektronik biasanya diatur oleh undang-undang dan, di sebagian besar yurisdiksi, melalui penggunaan sistem berbasis surat perintah, khususnya dalam kasus pengawasan elektronik di tempat-tempat pribadi. Bab II Bagian 5.1.3 dan 6.3 dari Perangkat ini berisi informasi tambahan dan alat terkait pengawasan dan pengumpulan bukti elektronik.

Diterimanya bukti elektronik mensyaratkan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan yang melindungi hak asasi manusia. Saat menilai penerimaan bukti elektronik, penekanan harus diberikan pada pentingnya kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas saat menggunakan teknik investigasi khusus, termasuk penggunaan agen rahasia dan forensik jarak jauh, terutama di darknet.

Bukti elektronik

- » Undang-undang dan peraturan apa yang berlaku tentang penggunaan, penyimpanan, pengelolaan, dan penerimaan bukti elektronik?
- » Apakah ada aturan khusus tentang penggunaan bukti elektronik lintas batas?

Sumber daya tambahan :

Konferensi PBB Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Kelompok Kerja Kerja Sama Internasional, kerja sama internasional yang melibatkan teknik investigasi khusus, Dokumen PBB CTOC/ POLSI/WG.3/2020/3 (12 Mei 2020) 3–4, 13



1.3.3 Kesaksian ahli

Kesaksian ahli (atau bukti ahli) dapat diterima sebagai pengecualian dari aturan bahwa saksi hanya dapat memberikan bukti tentang fakta. Kesaksian ahli sangat berguna ketika bukti tidak mudah dipahami oleh orang awam, yang sering terjadi dalam proses yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Ahli mampu menafsirkan dan menjelaskan bukti, dan dapat memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sendiri. Penggunaan kesaksian ahli berfungsi untuk mencegah ketergantungan pengadilan pada informasi yang tidak berdasar atau subjektif, yang dapat merugikan terdakwa secara berlebihan.

Fungsi para ahli adalah untuk mengajukan semua materi di depan pengadilan, bersama dengan alasan yang mendorong mereka untuk mencapai kesimpulan tertentu. Dari materi dan alasan inilah pengadilan, meskipun bukan seorang ahli, dapat membentuk penilaiannya sendiri dengan pengamatannya sendiri terhadap materi tersebut. Ketika pengadilan menerima jenis bukti ini, ruang lingkupnya terbatas untuk menilai kualitasnya. Harus diingat bahwa para ahli bukanlah saksi fakta dan dengan demikian bukti mereka bersifat masukan; ahli bukanlah hakim, juri, atau penilai. Karena hakim hanya dapat menilai bukti objektif, penting untuk menyelidiki keilmiahannya kesaksian ahli untuk setiap kasus.



Kesaksian ahli

- » Peraturan perundang-undangan apa saja yang berlaku mengenai penggunaan tenaga ahli untuk memberikan bukti dalam proses pidana?
- » Bagaimana para ahli yang memberikan bukti dalam persidangan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan dipilih (yaitu apa keahlian mereka; apa kualifikasi mereka; apa tingkat pengalaman yang dibutuhkan)?
- » Seberapa umum para ahli memberikan bukti dalam proses yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apa pengalamannya?

1.4 Persidangan tanpa penundaan

Penegakan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan yang efektif membutuhkan layanan penuntutan yang berfungsi dengan baik dan efisien serta peradilan yang independen, yang keduanya terkait erat dengan aturan hukum dan kepatuhan terhadapnya. Efisiensi persidangan merupakan faktor penting dalam membawa pelaku kejahatan satwa liar dan kehutanan ke pengadilan dan memastikan keadilan dan transparansi prosedural.

Penundaan yang lama dalam persiapan, dimulainya, dan kelanjutan persidangan dapat melemahkan kasus penuntutan, mengkompromikan peran dan hak terdakwa dan melemahkan proses peradilan pidana. Selain itu, penundaan dan gangguan lain dalam proses pidana meningkatkan risiko hilangnya saksi dan memaparkan saksi pada risiko intimidasi dan ancaman (terutama jika mereka berulang kali diminta hadir di pengadilan). Penundaan meningkatkan kesempatan bagi terdakwa untuk mencoba merusak sistem dan melemahkan kepercayaan publik. Penundaan yang tidak perlu juga merupakan pemborosan sumber daya publik yang luar biasa. Penundaan pada kasus yang melibatkan barang bukti hidup juga meningkatkan biaya pemeliharaan hewan hidup dan meningkatkan risiko kematian mereka secara alami sebelum kasus diselesaikan. Banyak kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan gagal karena korupsi dan/atau ketidakmampuan yang terwujud dalam bentuk penundaan berulang kali, penundaan yang lama, hilangnya barang bukti dan pengurangan saksi. Terakhir, persidangan yang tertunda dapat berakibat pada hukuman yang lebih ringan karena penundaan dipandang sebagai beban bagi tertuduh.

Di banyak tempat, kasus kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan tidak dianggap sebagai prioritas utama dan ditunda karena kasus lain dianggap lebih mendesak. Alasan utama penundaan persidangan adalah kurangnya kapasitas untuk menuntut dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan, sumber daya manusia yang terbatas, banyaknya penumpukan kasus, keahlian yang tidak memadai dan kurangnya pengalaman yang relevan. Ini mungkin akibat dari perencanaan pra-sidang yang buruk: meskipun persyaratan saksi, persyaratan pengungkapan mengenai barang bukti dan bukti ahli, dan argumen hukum tentang penerimaan sebagian besar dapat diperkirakan, sering tidak ditangani sampai persidangan dimulai dan para saksi menunggu. Hal ini dapat menyebabkan penundaan yang lama untuk proses pidana. Dalam beberapa kasus, campur tangan politik dan korupsi dapat menyebabkan persidangan ditunda, terhenti, atau dihentikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan awal antara penyelidik dan jaksa mengarah pada keputusan dakwaan yang lebih baik, persiapan kasus yang lebih baik, dan hasil yang lebih baik di pengadilan. Misalnya, konferensi pra-penangkapan dapat memastikan bahwa penangkapan dilakukan pada tahap penyelidikan yang tepat. Konferensi pasca-penangkapan dapat memastikan bahwa tinjauan (dan amandemen jika perlu) dari setiap keputusan sebelumnya dibuat secara tepat waktu, dan keterlibatan pra-sidang dan pasca-sidang memastikan persiapan yang lebih baik dan memungkinkan adanya pelajaran yang dapat dipetik. Sebagai mekanisme antikorupsi, diskusi-diskusi ini dapat memberikan check and balance atas keputusan yang dibuat dalam sebuah berkas dan mendorong investasi oleh kedua lembaga hingga berakhirnya persidangan.

Persidangan tanpa penundaan

- » Undang-undang, peraturan, dan prosedur manajemen kasus dan alur apa yang ada untuk memastikan persidangan terlaksana tanpa penundaan?
- » What other practical steps, arrangements and plans have been adopted by the prosecution service and the judiciary?
- » Bagaimana penyidik dan penuntut berkolaborasi dalam persiapan persidangan?
- » Apakah mereka terlibat dalam konferensi sebelum dan sesudah penangkapan?



1.5 Akses terhadap keadilan

Hak atas akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil merupakan kewajiban utama pemerintah terhadap korban kejahatan. Sayangnya, dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan dan masalah lingkungan secara lebih umum, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap keadilan dan asimetri serta ketidaksetaraan (dalam kekuatan politik, peralatan teknis, kekuatan dan pengaruh ekonomi) antara penegak hukum dan otoritas lain di satu sisi dan pemangku kepentingan dan pengguna sistem di sisi lain.

Akses ke bentuk keadilan prosedural dan keadilan proses menyiratkan penerapan prosedur keadilan yang adil baik untuk korban maupun pelaku secara setara.

Ini termasuk :

- kesempatan untuk didengar;
- bahwa proses berlangsung dengan cara yang efisien yang menghormati kebutuhan korban akan sebuah titik akhir;
- terpeliharanya martabat dan harga diri dalam interaksi dengan aparat penegak hukum, jaksa, hakim, pengacara, dan pegawai pengadilan;
- proses pengambilan keputusan yang tidak bias;
- proses yang menimbulkan kepercayaan korban dan Pelaku;
- memungkinkan korban dan pelaku untuk sepenuhnya memahami kasus, proses dan hasilnya, termasuk setiap perintah pengadilan; dan
- mengkomunikasikan dan menerapkan keyakinan bahwa para pelaku sistem peradilan memiliki kepentingan terhadap kebutuhan dan situasi pribadi baik korban maupun terdakwa.

Salah satu hak prosedural yang sangat penting bagi para korban adalah hak atas informasi. Hak ini menyiratkan bahwa korban harus diberi tahu pada tahap paling awal dan selama proses peradilan pidana, termasuk tentang prosedur, peran korban (jika ada) dalam prosedur ini, laporan tentang kemajuan (menjelaskan setiap penundaan), dan hasil dari proses pidana. Korban harus diberi informasi tentang di mana mereka bisa mendapatkan bantuan lebih lanjut, termasuk perlindungan, dukungan, bantuan hukum dan kompensasi. Penting untuk memastikan bahwa para korban memahami informasi yang diberikan kepada mereka dan mereka harus diberi penghubung untuk berdiskusi atau mengklarifikasi informasi yang diberikan.

Keadilan prosedural dapat diperkuat dengan langkah-langkah khusus, termasuk misalnya :

- ↳ pelatihan bagi pemangku kepentingan sistem peradilan pidana tentang praktik yang sensitif akan trauma dan kompetensi budaya;
- ↳ menciptakan ruang aman bagi korban baik di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan maupun di gedung pengadilan;
- ↳ advokat korban yang membantu korban menavigasi proses;
- ↳ materi tertulis tersedia dalam berbagai bahasa, dan layanan penerjemahan untuk korban dengan berbagai kemahiran bahasa; dan
- ↳ dukungan emosional dan mekanisme rujukan yang membantu korban untuk mengakses layanan, termasuk bantuan medis, bantuan psikologis dan dukungan sosial.



Akses terhadap keadilan

- » Pada tahap proses peradilan pidana apa korban kejahatan satwa liar dan kehutanan memiliki kesempatan untuk didengar?
- » Bagaimana korban dan orang lain yang terkena dampak kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat berpartisipasi dalam proses pidana?
- » Apakah korban diberitahu tentang prakarsa dan kemajuan proses pidana?
- » Apakah aparat penegak hukum, penuntutan dan peradilan cukup terlatih terkait hak-hak dari dan cara berkomunikasi dengan korban?
- » Informasi lain apa yang tersedia mengenai akses ke keadilan dalam proses kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Hal-hal yang tidak dibahas lebih lanjut dalam Bagian ini adalah pemulihan perdata, putusan sela ganti rugi dan jalan peradilan lainnya yang dapat ditempuh oleh korban atau orang lain yang terkena dampak kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan untuk menghentikan tersangka pelaku. Salah satu contoh dari mekanisme tersebut adalah meminta perintah untuk menghentikan seseorang atau perusahaan yang dicurigai melakukan penebangan atau perburuan liar.

2

Bagian III

Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum memainkan peran unik dalam kasus pidana karena mereka tampil atas nama pemerintah sebagai wakil rakyat dan bukan sebagai korban individu. Seorang jaksa memiliki kewajiban yang luas untuk menegakkan supremasi hukum, dengan tugas etis dan profesional yang menyertainya untuk memastikan bahwa seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran menerima pengadilan yang adil.



Jika jaksa gagal memenuhi kewajiban ini, kegagalan penegakan hukum mulai dari penuntutan ilegal hingga hasil keputusan hukum yang salah dapat terjadi, merusak integritas sistem peradilan dan melanggar kepercayaan publik. Penuntutan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang tidak memadai atau yang tidak dilakukan juga mengirimkan pesan bahwa jenis kejahatan ini tidak memakan korban dan tidak seserius kejahatan lainnya.

Rancangan dan pemberian layanan penuntutan sangat berbeda di antara yurisdiksi dan seringkali dipengaruhi oleh hukum umum, hukum perdata, atau tradisi campuran. Karena keragaman struktur penuntutan, yurisdiksi dan pendekatan, sulit untuk mengatasi semua masalah potensial dalam perangkat yang ditetapkan di Bagian berikut. Selain itu, banyak masalah yang tidak secara khusus terkait dengan penuntutan terhadap kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan lebih baik dikaji untuk semua jenis kejahatan. Perangkat Penilaian Peradilan Pidana UNODC berisi bagian khusus tentang 'Layanan Penuntutan' yang dapat digunakan untuk menilai semua elemen otoritas penuntutan secara komprehensif. Selain itu, International Association of Prosecutors mengadopsi 'Standar tanggung jawab profesional dan pernyataan tentang tugas dan hak utama jaksa', yang harus diintegrasikan ke dalam analisis komprehensif layanan penuntutan. Bagian-bagian berikut berfokus secara eksklusif pada analisis ciri-ciri utama penuntutan publik atas kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Sumber daya tambahan :

UNODC, *Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Akses ke Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 22–23*

Asosiasi Jaksa Internasional, "Standar tanggung jawab profesional dan pernyataan tentang tugas dan hak penting jaksa" (April 1999). tersedia di [https://www.iap-association.org/Resources-Dokumentasi/IAP-Standar-\(1\)](https://www.iap-association.org/Resources-Dokumentasi/IAP-Standar-(1)) (diakses 27 Agustus 2021).

2.1 Sumber , organisasi, dan pendelegasian wewenang penuntutan

2.1.1 Kerangka hukum

Langkah pertama dalam menilai sistem penuntutan meliputi identifikasi sumber kewenangan penuntutan. Di banyak negara, konstitusi nasional memuat ketentuan yang menggambarkan organisasi umum tentang siapa yang bertanggung jawab atas penuntutan kasus pidana, di cabang pemerintahan mana otoritas itu berada, dan kekuasaan umum serta kewajiban penuntutan. Selain itu, undang-undang dan peraturan khusus biasanya memuat perincian tambahan tentang fungsi dan operasi otoritas penuntutan untuk kejahatan lingkungan, satwa liar, dan kehutanan. Di beberapa negara, ini diatur dalam administrasi umum tindakan peradilan, hukum pidana atau hukum acara pidana. Di negara-negara lain, terdapat tindakan-tindakan khusus yang berhubungan secara eksklusif dengan otoritas penuntutan atau investigasi.



Sumber otoritas penuntutan

- » Dalam statuta atau undang-undang Manakah fungsi dan organisasi otoritas penuntutan ditetapkan?
- » Apakah konstitusi menetapkan cabang pemerintah yang bertanggung jawab atas penuntutan?
- » Apa fungsi (hukum) dari otoritas penuntutan? Bagaimana hubungannya dengan cabang-cabang pemerintahan lainnya?
- » Apakah kejaksaan memiliki pedoman tentang penuntutan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 5

2.1.2 Organisasi dan pendelegasian wewenang penuntutan

Setelah kerangka hukum untuk penuntutan tindak pidana, termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan, telah diidentifikasi, perlu untuk mencermati organisasi dan pendelegasian kewenangan untuk penuntutan dan fungsi investigasi terkait. Sementara beberapa yurisdiksi memiliki unit penuntutan kejahatan satwa liar dan kehutanan khusus, sangat sedikit sistem yang memiliki jaksa yang hanya berfokus pada kejahatan ini. Selain itu, sangat jarang untuk menjabarkan prosedur khusus yang berlaku secara eksklusif untuk penuntutan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Mungkin ada pengecualian, dan dalam beberapa kasus ketentuan hukum khusus, di dalam undang-undang khusus yang membahas aspek-aspek tertentu dari peran jaksa dalam tahap proses pidana tertentu. Ketika tidak ada, prosedur umum untuk penuntutan tindak pidana berlaku.



Penuntutan: organisasi dan delegasi

- » Di mana letak kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana? Apakah independen atau bagian dari peradilan? Apakah polisi atau lembaga penegak hukum lainnya melakukan penuntutan?
- » Apakah kewenangan penuntutan ada pada jaksa, hakim investigasi atau keduanya?
- » Bagaimana otoritas penuntutan diatur? Apakah otoritas kejaksaan memiliki staf atau unit khusus untuk menuntut kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah lembaga satwa liar dan hutan yang relevan telah mendelegasikan otoritas penuntutan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 5–6, 14–15

2.1.3 Peran jaksa

Peran jaksa dalam persidangan pidana terkait dengan, antara lain, penyelidikan, tuduhan dan identifikasi kebutuhan terkait bukti ahli, berbeda-beda di antara yurisdiksi. Hal ini terutama terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Di beberapa yurisdiksi, jaksa diberikan keleluasaan baik oleh undang-undang atau melalui prosedur administratif, apakah akan menuntut kejahatan. Tingkat keleluasaan juga dapat berbeda di antara yurisdiksi. Di yurisdiksi lain, jaksa tidak menggunakan kebijaksanaan tersebut. Syarat pelaksanaan kebijaksanaan ini dapat mencakup kepentingan masyarakat dalam menuntut atau tidak menuntut suatu kejahatan, dan kebutuhan untuk membawa pelaku ke pengadilan dan menjerakan dilakukannya kejahatan serupa.

Di beberapa yurisdiksi, jaksa memiliki wewenang untuk menyita dokumen, memerintahkan penahanan pra-sidang, atau mengambil tindakan lain untuk mencegah tertuduh melarikan diri. Kebijaksanaan kejaksaan dapat berhubungan tidak hanya dengan keputusan untuk memulai dan melanjutkan penuntutan, tetapi juga dengan keputusan untuk menerima pengaturan jalur khusus (plea bargaining). Plea bargaining dapat menjadi alat yang berguna bagi jaksa dan dapat memungkinkan jaksa menuntut kasus yang melibatkan pelaku tingkat tinggi dengan mendapatkan kesaksian dari pelaku tingkat rendah.

Bergantung pada yurisdiksinya, jaksa dapat menggunakan keleluasaan untuk menyelesaikan kasus melalui alternatif persidangan, seperti melalui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, program pengalihan, dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dapat ditawarkan kepada terdakwa yang setuju untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti membayar kompensasi untuk dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan dan melakukan pembayaran biaya kesehatan hewan dan biaya yang telah diatur sebelumnya untuk pemeliharaan hewan hidup yang terlibat dalam kejahatan.

Bagi Negara-negara yang memberikan keleluasaan kepada jaksa mengenai apakah akan memulai dan melanjutkan penuntutan, ada kebutuhan untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan kejaksaan mengenai kapan harus memulai penuntutan, mempertahankan atau menghentikan penuntutan, dan menerima plea bargain.

Peran jaksa

- » Apa peran kejaksaan dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apa peran jaksa di persidangan, saat menjatuhkan hukuman dan banding?
- » Apakah jaksa (kejahatan satwa liar dan kehutanan) melakukan atau mengawasi penyelidikan?
- » Apakah kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan? Jika demikian, bagaimana ini dilakukan? Jika tidak, siapa yang memulai penuntutan? Apakah jaksa secara hukum terikat oleh hasil penyelidikan polisi (atau lembaga lain)?
- » Apakah warga negara (atau individu lain) memiliki hak untuk membuat permintaan pribadi untuk penuntutan?
- » Apakah jaksa berwenang untuk memerintahkan penyitaan dokumen, penahanan pra-sidang dan tindakan lain dalam persiapan persidangan?
- » Apakah jaksa penuntut memiliki keleluasaan untuk mengajukan dakwaan, menolak melanjutkan, membatalkan dakwaan atau mengalihkan kasus ke alternatif penuntutan pidana dan sebagainya?
- » Apakah jaksa penuntut memiliki kewenangan hukum untuk merundingkan plea agreement?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana : Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 7–10



2.1.4 Kemitraan antara penegak hukum dan penuntutan

Dalam upaya untuk meningkatkan penuntutan kejahatan satwa liar dan kehutanan, beberapa yurisdiksi menempatkan jaksa dalam unit penegakan hukum satwa liar dan kehutanan.

Bahkan jika tidak demikian, setiap upaya harus dilakukan untuk membangun hubungan kerja yang sedekat mungkin antara unit penegakan hukum dan otoritas kejaksaan. Peningkatan kesadaran di antara otoritas tersebut harus diprioritaskan, dan dukungan mereka kepada unit harus dibangun. Unit ini mungkin dapat memberikan pelatihan kepada jaksa. Pelaporan kasus dan standar persyaratan pembuktian harus ditetapkan. Jaksa juga dapat membantu dalam mengidentifikasi prioritas dan target untuk unit tersebut.



ALAT
III.12

Kemitraan Antara penegak hukum dan penuntutan

- » Hubungan kerja apa yang ada antara unit penegakan hukum satwa liar dan kehutanan dan otoritas penuntutan? Bagaimana lembaga-lembaga ini berkomunikasi dan bertukar informasi?
- » Apakah satu atau lebih jaksa ditempatkan di unit penegakan hukum satwa liar dan kehutanan? Jika tidak ada, apakah penempatan seperti itu dapat dilakukan?
- » Bisakah jaksa memimpin penyelidikan dengan lembaga penegak hukum?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 25

2.2 Sumber daya otoritas penuntutan

Keefektifan penuntutan pelanggaran terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan sebagian besar bergantung pada kualitas layanan penuntutan. Kualitas tersebut bergantung pada, antara lain, sumber daya manusia dan material yang tersedia, seperti tingkat kepegawaian otoritas kejaksaan, kualifikasi dan pelatihan staf, serta fasilitas dan perlengkapan yang tersedia bagi para jaksa. Namun, harus dipahami bahwa elemen-elemen ini tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas, integritas, dan akuntabilitas.

2.2.1 Staf dan gaji

Agar berfungsi dengan baik, otoritas kejaksaan perlu memiliki staf yang memadai, dan jaksa serta staf pendukungnya perlu dibayar dengan layak. Gaji dan hak lain dari jaksa perlu mencerminkan tanggung jawab, pendidikan dan pengalaman mereka. Sayangnya, banyak unit kejaksaan kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi tugas mereka. Di beberapa negara, unit kejaksaan mengalami kekurangan staf yang parah. Posisi tetap tidak terisi selama bertahun-tahun dan gaji serta tunjangan mungkin terlambat berbulan-bulan. Gaji yang tidak memadai, atau kegagalan membayar gaji secara teratur, dapat mengurangi motivasi staf secara signifikan.



ALAT
III.13

Penuntutan : staf dan gaji

- » Apakah analisis staf telah dilakukan untuk menetapkan jumlah jaksa yang dibutuhkan (struktur/jabatan dan jumlah)? Bagaimana beban kasus yang diharapkan dibandingkan dengan beban kerja sebenarnya? Berapa kesenjangan antara jumlah yang dibutuhkan dan jumlah staf yang sebenarnya?
- » Berapa banyak jaksa dan staf pendukung yang terlibat dalam penuntutan terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah ini satu-satunya tanggung jawab mereka atau apakah mereka juga menuntut jenis kejahatan lainnya?
- » Apakah otoritas kejaksaan dan unit khusus mereka memiliki staf yang lengkap? Jika tidak, apa alasan yang diberikan untuk ini?
- » Apa jenis staf pendukung yang terlibat dalam penuntutan terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan (administratif, paralegal atau lainnya)? Bagaimana mereka diawasi dan kepada siapa mereka melapor?

Penuntutan : staf dan gaji

- » Bagaimana struktur gaji untuk jaksa dan staf pendukung? Berapa gaji rata-rata, termasuk lembur, untuk setiap tingkatan? Bagaimana hal ini dibandingkan dengan gaji rata-rata nasional?
- » Apakah tingkat gaji sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang terlibat?
- » Apakah jaksa dan stafnya menerima gaji tepat waktu dan penuh? Jika ada keterlambatan atau pembayaran sebagian, apa alasannya?

Sumber daya tambahan :

UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 19*

2.2.2 Rekrutmen dan pelatihan

Prosedur rekrutmen kejaksaan harus adil dan transparan untuk menjamin profesionalisme dan integritas, serta menghindari nepotisme dan korupsi. Pemilihan staf di semua tingkatan harus didasarkan pada prestasi, pengalaman dan pendidikan, dan kriteria seleksi perlu diartikulasikan dengan jelas. Kebijakan dan prosedur rekrutmen harus mendorong inklusivitas dan keragaman. Hal ini penting untuk mencapai perubahan organisasi, meningkatkan persepsi publik, dan untuk menanggapi kebutuhan kelembagaan dan masyarakat dengan lebih baik.

Seperti halnya mereka yang terlibat dalam investigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan, sangat penting bagi jaksa penuntut untuk memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai. Mereka membutuhkan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan hukum kasus yang relevan, dan elemen teknis hukum satwa liar dan kehutanan, serta fungsi dan operasi dari setiap aspek sistem peradilan pidana. Jika kejahatan dituntut oleh orang-orang yang tidak cukup paham dengan teknik, proses dan persyaratan hukum yang relevan, integritas penuntutan dapat dikompromikan, dengan implikasi potensial terhadap persidangan dan hukuman.

Oleh karena itu, analisis kapasitas penuntutan harus melibatkan tinjauan komprehensif terhadap program pelatihan, termasuk penyampaian dan isinya, serta jenis dan kedalaman pelatihan yang tersedia bagi jaksa. Selain itu, meskipun ada program pelatihan yang komprehensif, penting agar silabus dan kurikulum ditinjau secara berkala. Hal ini memastikan bahwa mereka tetap muktahir dan mengikuti perkembangan legislatif dan yurisprudensi, dan dengan sifat kejahatan satwa liar dan kehutanan yang selalu berubah.

Penuntutan : Rekrutmen dan Pelatihan

- » Bagaimana prosedur seleksi dan rekrutmen untuk bergabung dengan otoritas kejaksaan? Jenis dan tingkat kualifikasi apa yang dibutuhkan?
- » Di mana unit khusus ditugaskan untuk menuntut kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan bagaimana staf dipilih untuk unit ini?
- » Pelatihan dasar apa yang diberikan kepada orang-orang yang bergabung dengan otoritas kejaksaan? Apakah pelatihan khusus dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan ditawarkan kepada anggota staf baru atau yang sudah ada?
- » Seberapa sering jaksa menerima pelatihan penyegaran? Kursus pelatihan berkelanjutan dan khusus apa yang tersedia? Apakah kursus pelatihan berkelanjutan dan khusus mencakup modul tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana kebutuhan pelatihan dinilai? Bagaimana pelatihan disampaikan?
- » Apakah ada mekanisme yang tersedia untuk menyediakan akses ke keahlian yang relevan bagi jaksa yang menangani kasus kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah pelatihan melibatkan peserta dari berbagai instansi (dalam dan luar negeri), seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga satwa liar dan kehutanan atau lainnya?

Sumber daya tambahan :

UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 20–21*



ALAT
III.14

2.2.3 Fasilitas dan peralatan

Jaksa Penuntut Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan memerlukan fasilitas dasar tertentu dan mungkin juga memerlukan peralatan khusus untuk melaksanakan tugasnya. Fasilitas dasar meliputi kantor, komputer dan alat tulis. Akses ke perpustakaan, basis data hukum dan dana yang cukup juga diperlukan untuk menjalankan fungsi sehari-hari.

Analisis fasilitas dan peralatan yang tersedia dan dibutuhkan sangat bervariasi di antara yurisdiksi dan lembaga. Harus mempertimbangkan peran, pelatihan, tanggung jawab dan senioritas jaksa. Analisis juga bergantung pada kondisi sosial ekonomi lokal, sumber daya yang tersedia, dan akses ke bantuan keuangan dan bantuan teknis.

Penuntutan : fasilitas dan peralatan

- » Di mana jaksa / di mana otoritas penuntut berada? Apakah fasilitas gedung kejaksaan memadai?
- » Apakah peralatan kantor (seperti furnitur, alat tulis, dan mesin fotokopi) memadai?
- » Apakah jaksa memiliki akses mudah ke lembaga investigasi dan ke pengadilan?
- » Teknologi komunikasi dan pengolahan kata apa yang tersedia (seperti komputer, Internet, telepon, telepon seluler, dan mesin faks)?
- » Apakah jaksa memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan berkas, bukti, dan informasi elektronik dengan aman?
- » Apakah jaksa memiliki akses ke undang-undang yang relevan, termasuk undang-undang pidana, dan undang-undang satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah otoritas kejaksaan memiliki perpustakaan, atau dapatkah jaksa mengakses perpustakaan hukum di tempat lain yang berdekatan? Apakah jaksa memiliki akses ke basis data elektronik yang relevan? Apakah perpustakaan memiliki koleksi dan sumber daya lain yang memadai untuk mendukung penuntutan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?

2.3 Data dan hasil penuntutan

Pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan penuntutan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan merupakan bagian integral untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem penuntutan, beban kerja dan kinerja jaksa, dan untuk memantau bagaimana kasus melewati sistem peradilan.

2.3.1 Data penuntutan umum

Data dasar mencakup jumlah penuntutan yang dimulai, dakwaan yang dijatuhkan (terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan tertentu) dan data yang terkait dengan hasil penuntutan seperti hukuman, pembebasan dan banding. Data relevan lainnya termasuk, antara lain, jumlah dan proporsi kasus yang dibawa ke pengadilan, kasus di mana pelaku mengaku bersalah dan kasus dialihkan ke tindakan alternatif (seperti arbitrase atau proses restoratif pelayanan masyarakat). Data tersebut harus dicatat secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala (misalnya setiap tahun). Upaya juga harus dilakukan untuk mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Angka absolut dapat memberikan indikasi penting tentang perkiraan skala kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Namun, membandingkan data yang tersedia pada berbagai tahapan proses peradilan dapat mengungkapkan informasi penting tentang kesejahteraan struktural sistem peradilan serta keterkaitan berbagai aktor di sepanjang jalan. Jika ada penurunan yang signifikan dari jumlah kejahatan yang dilaporkan ke yang diinvestigasi, dari jumlah kejahatan yang diinvestigasi dan dakwaan yang diajukan serta selanjutnya dari dakwaan hingga

vonis, hal ini mungkin menunjukkan, antara lain, kelemahan peraturan/legislatif, kekurangan staf dan kelemahan yang lebih serius dari sistem peradilan, dan keterputusan antara aktor-aktor terkait di sepanjang proses peradilan. Pengumpulan data dengan sendirinya tidak menjadi tujuan akhir tetapi sebaliknya harus dimanfaatkan untuk mendapatkan wawasan yang relevan dan tindakan

Data penuntutan umum

- » Berapa banyak penuntutan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan telah dimulai?
- » Berapa banyak penuntutan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang menghasilkan keputusan pengadilan?
- » Berapa banyak orang yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan telah diadili? Berapa banyak yang telah dihukum? Berapa banyak yang telah dibebaskan? Berapa banyak kasus yang tertunda?
- » Berapa banyak kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang menghasilkan keputusan bersalah setidaknya untuk salah satu dakwaan? Berapa kasus yang dicabut atau dihentikan? Berapa banyak kasus yang dialihkan ke tindakan alternatif?
- » Berapa banyak banding yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang telah diprakarsai oleh kejaksaan?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Volume 3 Layanan Penuntutan (2006) 3–4 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Volume 1 Informasi Peradilan Pidana (2006) 6–7

2.3.2 Operasi dan beban kerja otoritas penuntutan

Otoritas penuntutan harus memiliki staf dan sumber daya yang memadai agar dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dalam menganalisis sistem penuntutan, memperoleh informasi, termasuk statistik, tentang operasi dasar otoritas penuntutan dan beban kerja jaksa merupakan hal yang tidak terpisahkan. Ketika informasi dan data ini dianalisis, penting untuk memahami terminologi yang digunakan dalam yurisdiksi tersebut karena arti istilah seperti 'kasus pidana', 'pengarsipan', 'penyelesaian' dan 'hasil' dapat bervariasi. Memastikan keamanan jaksa adalah masalah lain di banyak tempat, khususnya ketika kelompok kejahatan terorganisir terlibat.

Operasi dan beban kerja jaksa

- » Di yurisdiksi di mana polisi mengajukan dokumen dakwaan asli, berapa banyak kasus kejahatan yang melibatkan kejahatan satwa liar atau kehutanan yang diterima setiap tahun oleh kantor kejaksaan?
- » Di yurisdiksi di mana jaksa penuntut bertanggung jawab atas pengajuan dakwaan di pengadilan, berapa banyak kasus yang diajukan setiap tahun? Di mana kasus-kasus ini diajukan?
- » Berapa banyak kasus pidana yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang diselesaikan setiap tahun oleh kejaksaan? Apakah kasus tersebut diselesaikan, misalnya, melalui pengadilan atau pengakuan bersalah?
- » Apakah kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan ditugaskan ke jaksa tertentu? Jika ya, berapa rata-rata beban kasus tahunan mereka? Berapa banyak kasus tertunda yang ditangani jaksa pada satu waktu?



ALAT
III.16



ALAT
III.17

Operasi dan beban kerja jaksa

- » Apakah ada sistem manajemen kasus bagi jaksa untuk memastikan aliran dan penyelesaian kasus?
- » Apakah ada tumpukan kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah mungkin untuk menentukan berapa lama kasus yang ditugaskan ke jaksa telah tertunda tanpa pemeriksaan?
- » Apakah undang-undang menetapkan kerangka waktu untuk setiap tahapan proses pidana atau untuk tindakan yudisial? Apakah ada pengecualian?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Volume 3 Layanan Penuntutan (2006) 3–4 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Volume 1 Informasi Peradilan Pidana (2006) 6–7

2.3.3 Indikator kinerja penuntutan

Indikator kinerja penuntutan berfungsi untuk memonitor pekerjaan dan beban kerja jaksa secara sistematis dan membantu mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perhatian dan peningkatan. Beberapa indikator yang paling relevan dalam hal ini termasuk, antara lain, jumlah kasus per jaksa; jumlah kasus yang diselesaikan per tahun, per jaksa; jumlah kasus di mana penuntutan telah dimulai dan kemudian ditinggalkan atau ditunda; dan rata-rata jumlah kasus banding per jaksa. Data tersebut harus dicatat secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala (misalnya setiap tahun). Seperti telah dicatat sebelumnya dalam Bagian ini, informasi tersebut harus dianalisis bersama dengan data lain yang tersedia tentang proses peradilan dan harus dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas.



Indikator kinerja penuntutan

- » Target kinerja apa, jika ada, yang telah diidentifikasi untuk instansi pemerintah yang beroperasi di sektor satwa liar dan kehutanan? Apa target khusus untuk otoritas penuntutan?
- » Indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur kegiatan kejaksaan, dan bagaimana cara menentukannya?
- » Siapa yang melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator tersebut? Bagaimana hasilnya dilaporkan kembali ke masing-masing instansi?
- » Apakah indikator kinerja ditinjau dan diperbarui secara berkala?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Volume 3 Layanan Penuntutan (2006) 3–4 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Volume 1 Informasi Peradilan Pidana (2006)

3

Bagian III

Peradilan

Peradilan memainkan peran penting dalam melindungi flora dan fauna dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang relevan. Dalam beberapa situasi, badan peradilan juga dapat memiliki fungsi pengawasan yang melekat untuk meninjau kembali keputusan-keputusan eksekutif ketika mengancam satwa liar atau hutan.



Bahkan jika kapasitas untuk mendeteksi dan menyelidiki kejahatan satwa liar dan kehutanan tinggi, potensi efek jera dari penuntutan minimal jika sistem peradilan lemah dan rawan korupsi dan penundaan. Oleh karena itu, manajemen peradilan harus efisien dan efektif sehingga beban perkara pidana dapat diadili secara adil, tepat dan cepat.

Meskipun terdapat sistem peradilan yang berfungsi dengan baik, mungkin terdapat hambatan yang signifikan untuk mengaksesnya, yang dapat menghalangi akses yang efektif terhadap keadilan. Akses yang efektif terhadap keadilan mensyaratkan bahwa mereka yang mencari bantuan memiliki pengetahuan tentang, atau dapat dengan mudah menemukan mekanisme yang tersedia bagi mereka; dapat memanfaatkan mekanisme ini tanpa penundaan yang tidak semestinya atau biaya yang mahal; dan dapat mengakses bantuan teknis terampil yang diperlukan untuk mengajukan klaim mereka

Bagian berikut berisi alat-alat umum untuk memberikan analisis dasar dari organisasi dan operasi peradilan, bersama dengan alat-alat khusus tertentu yang berhubungan dengan masalah khusus kejahatan satwa liar dan kehutanan. Analisis peradilan biasanya melibatkan pendekatan yang jauh lebih luas daripada apa yang ada dalam lingkup Perangkat ini. Untuk itu, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana UNODC menyediakan alat penilaian yang relevan dalam dua Bagian – ‘Pengadilan’ dan ‘Kemandirian, ketidakberpihakan dan integritas peradilan’.

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006)

UNODC, Kriminal Penilaian Keadilan Perangkat: Akses ke Keadilan, Jilid 2 Kemandirian, Ketidakberpihakan dan Integritas Peradilan (2006)

3.1 Struktur dan organisasi peradilan

3.1.1 Kerangka hukum

Titik awal untuk setiap penilaian peradilan adalah kerangka hukum dan peraturan yang ada yang mengatur hirarki, mandat, operasi dan manajemen pengadilan.

Sistem pengadilan pidana sangat penting dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan 80, meskipun mungkin ada pengadilan administratif atau khusus dengan fungsi tertentu yang terkait, langsung atau tidak langsung, dengan aspek-aspek tertentu dari sektor satwa liar, kehutanan atau peradilan pidana.⁸¹

Di sebagian besar negara, konstitusi nasional memuat ketentuan yang menggambarkan struktur umum pengadilan dan administrasi peradilan. Hal ini biasanya dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan yang menjabarkan fungsi khusus dari masing-masing pengadilan dan cabang peradilan lainnya. Selain itu, aturan pengadilan dan dokumen kebijakan pemerintah dapat memberikan rincian tambahan tentang pengoperasian pengadilan.



ALAT
III.19

Peradilan : kerangka hukum

- » Undang-undang mana yang mengatur fungsi dan organisasi peradilan? Apa yang tertulis dalam undang-undang ini?
- » Apakah konstitusi menetapkan struktur umum sistem pengadilan?
- » Dokumen atau dokumen kebijakan pemerintah apa lagi yang memberikan informasi tentang organisasi peradilan?

Sumber daya tambahan :
UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006) 5*
UNODC, *Perangkat Penilaian*

3.1.2 Sistem pengadilan pidana

Analisis struktur dan operasi sistem pengadilan pidana melibatkan identifikasi dan penilaian berbagai tingkat sistem pengadilan yang dituntut untuk mendengarkan kasus-kasus primer, banding, dan, jika berlaku, peninjauan yudisial yang melibatkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.



ALAT
III.20

Sistem pengadilan pidana

- » Tingkat hierarki apa yang dimiliki sistem pengadilan pidana? Wewenang apa yang dimiliki setiap level?
- » Bagaimana proses banding dan peninjauan beroperasi di berbagai tingkat sistem pengadilan?
- » Di pengadilan manakah kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan pertama kali diadili?
Pengadilan mana yang menangani banding?
- » Apakah ada pengadilan, hakim, dan pejabat peradilan lainnya di tingkat mana pun yang hanya berfokus pada kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah undang-undang membuat ketentuan untuk sistem juri dalam kasus pidana? Apakah dakwaan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan disidangkan oleh juri atau hakim tunggal? Bagaimana sistem bekerja dalam praktiknya?
- » Apakah ada sistem penilai yang duduk bersama juri? Jika demikian, apakah mereka penilai awam? Apakah mereka duduk dalam kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :
UNODC, *Toolkit Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006) 5–6*
UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Access to Justice, Volume 2 Kemandirian, Ketidakberpihakan dan Integritas Peradilan (2006) 8*

80 Lihat lebih lanjut: Bab III, Bagian 3.1.2 dari Perangkat ini.

81 Lihat lebih lanjut: Bab III, Bagian 3.1.3 dari Perangkat ini.

3.1.3 Pengadilan khusus

Beberapa yurisdiksi telah membentuk pengadilan atau tribunal yang ditunjuk dengan yurisdiksi atas masalah lingkungan, termasuk perdagangan gelap satwa liar dan kejahatan satwa liar dan kehutanan lainnya. Hal ini umumnya dilihat oleh para ahli sebagai perkembangan yang disambut baik karena beberapa keuntungan utama dari apa yang disebut 'pengadilan hijau' termasuk keahlian yang lebih besar dari badan yang berkuasa, biaya litigasi yang lebih rendah dan keseragaman dalam yurisprudensi.

Misalnya, pada tahun 2017, Uganda meluncurkan pengadilan khusus untuk kasus-kasus yang dirujuk dari Otoritas Margasatwa Uganda (UWA), di antara kejahatan lainnya. 'Pengadilan Standar, Satwa Liar, dan Utilitas' ini berfungsi untuk mengurangi penumpukan kasus yang besar dan penundaan sidang yang lama. Pada tahun 2010, Undang-Undang Pengadilan Hijau Nasional India disahkan untuk membentuk pengadilan lingkungan khusus. Peradilan India memainkan peran sentral dalam membentuk undang-undang ini dan para penyusun Undang-Undang tersebut berhati-hati dalam menangani kebutuhan khusus yang telah diidentifikasi oleh para hakim dan pihak lain yang bekerja dalam sistem peradilan. Pengadilan Masalah Lingkungan dan Agraria di Negara Bagian Amazonas, Brasil, adalah contoh lain dari pengadilan lingkungan yang independen secara substansial. Pengadilan ini memiliki salah satu solusi terluas dan paling inovatif yang tersedia untuk mengatasi kejahatan yang mempengaruhi lingkungan.

Di beberapa yurisdiksi, gagasan pengadilan khusus mungkin tidak sesuai dengan sistem peradilan dan tradisi peradilan, dan pembentukan pengadilan semacam itu memiliki implikasi sumber daya yang signifikan. Jika ada pengadilan khusus seperti itu, yurisdiksinya dan hubungannya dengan sistem pengadilan reguler harus jelas. Apa yang disebut 'pengadilan hijau' juga dapat memperkuat kesan bahwa kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat atau harus diperlakukan berbeda dari kejahatan lain, atau bahkan berpotensi mendukung perlakuan secara kurang serius dibandingkan kejahatan lainnya. 'Pengadilan hijau' mungkin juga tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan keseriusan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan serta kejahatan lain yang mempengaruhi lingkungan.

Pengadilan khusus

- » Apakah pengadilan atau tribunal khusus telah dibentuk untuk mengadili masalah lingkungan? Jika demikian, apakah mereka mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Jika belum ada, apakah sudah ada rencana atau usulan untuk mendirikannya? Apakah ada hambatan dan keberatan untuk mendirikannya?
- » Apakah ada pengadilan khusus lain yang disediakan oleh undang-undang atau melalui pengaturan administratif yang memiliki relevansi dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan (seperti pengadilan antikorupsi)?
- » Bagaimana pengadilan dan tribunal seperti itu dibentuk? Apa yurisdiksi mereka? Apa hubungan mereka dengan hierarki pengadilan biasa dan sistem peradilan pidana?
- » Bagaimana staf pengadilan dan tribunal tersebut; apa beban kerja mereka; apa pengalaman dengan pengadilan dan tribunal semacam itu)?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Volume 3 Layanan Penuntutan (2006) 3–4 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Volume 1 Informasi Peradilan Pidana (2006)



ALAT
III.21

3.1.4 Kemandirian peradilan

Merupakan prasyarat bahwa fungsi yudikatif dipisahkan dari fungsi eksekutif dan legislatif. Kurangnya kemandirian — atau kesan — dapat menyebabkan campur tangan dalam urusan peradilan dan korupsi di semua tingkatan, termasuk di sektor satwa liar dan kehutanan.

Mencapai independensi peradilan untuk memastikan ketidakberpihakan peradilan adalah usaha yang kompleks. Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan tersebut. Ini termasuk memastikan prosedur yang transparan, memperjelas hubungan antara lembaga peradilan dan pemerintah lainnya, mempromosikan pengaturan organisasi dan struktural yang independen untuk lembaga peradilan, mempromosikan akuntabilitas pengadilan kepada publik, meningkatkan syarat dan ketentuan serta pelatihan hakim individu, dan meningkatkan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim dan stabilitas pekerjaan mereka.



Independensi peradilan

- » Apa hubungan antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan legislatif?
- » Apa ketentuan konstitusional dan hukum lainnya yang menjamin dan melindungi independensi peradilan?
- » Apakah organisasi dan struktur peradilan menjamin independensinya?
- » Apakah proses pengadilan dan penunjukan hakim transparan?
- » Bagaimana lembaga peradilan bertanggung jawab kepada publik?
- » Interaksi dan komunikasi apa, jika ada, yang terjadi antara unit penegakan hukum satwa liar dan kehutanan dengan lembaga peradilan?

Kemandirian peradilan berarti bahwa hubungan antara unit penegakan hukum satwa liar dan kehutanan dan peradilan suatu negara harus dijaga pada jarak yang sesuai. Namun penting bahwa unit-unit tersebut meningkatkan kesadaran di kalangan peradilan tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan mempromosikan partisipasi mereka dalam tahapan proses peradilan pidana yang sesuai. Unit penegakan hukum juga harus mencari informasi dan umpan balik dari pengadilan tentang keputusan dan masalah yang relevan yang muncul dalam kasus pidana, administratif dan perdata yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, serta masalah yang terkait bukti atau cara investigasi dilakukan.

3.2 Sumber daya peradilan

Kualitas sistem pengadilan bergantung, antara lain, pada sumber daya manusia dan material yang tersedia bagi hakim dan staf mereka, termasuk tingkat staf otoritas peradilan, kualifikasi dan pelatihan staf, serta fasilitas dan peralatan.

3.2.1 Staf dan gaji

Agar berfungsi dengan baik, pengadilan perlu memiliki staf yang memadai, dan gaji serta hak-hak lain para hakim harus mencerminkan tanggung jawab, kualifikasi, dan pengalaman mereka. Sayangnya, banyak pengadilan kekurangan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mereka, yang menyebabkan penundaan yang lama. Otoritas peradilan di banyak yurisdiksi menderita kekurangan staf yang parah. Di beberapa tempat, jabatan tetap tidak terisi selama bertahun-tahun, dan gaji serta tunjangan mungkin terlambat berbulan-bulan. Gaji yang tidak memadai, atau kegagalan membayar gaji secara teratur, dapat mengurangi motivasi staf secara signifikan.⁸²

⁸² Lihat lebih lanjut, Bagian III, Bagian 3.4 dari Perangkat ini.

Peradilan : staf dan gaji

- » Berapa banyak hakim yang saat ini dipekerjakan untuk mengadili kasus pidana?
- » Apakah analisis staf telah dilakukan untuk menetapkan jumlah hakim yang dibutuhkan (struktur/jabatan dan jumlah)? Bagaimana beban kasus yang diharapkan dibandingkan dengan beban kerja sebenarnya? Berapa kesenjangan antara jumlah yang dibutuhkan dan staf yang sebenarnya?
- » Ke pengadilan/hakim manakah kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan dirujuk? Atas dasar apa mereka dirujuk?
- » Apakah pengadilan pidana memiliki staf yang lengkap? Jika tidak, apa alasan yang diberikan untuk ini?
- » Jenis staf pendukung apa yang terlibat dalam persiapan persidangan pidana (administratif, paralegal, atau lainnya)? Bagaimana mereka diawasi dan kepada siapa mereka melapor?
- » Bagaimana struktur gaji untuk hakim dan staf pendukung? Berapa gaji rata-rata, termasuk lembur untuk setiap tingkatan? Bagaimana hal ini dibandingkan dengan gaji rata-rata nasional?
- » Apakah tingkat gaji sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang terlibat?
- » Apakah hakim dan stafnya menerima gaji mereka? Jika ya, apakah mereka menerimanya dengan tepat waktu?

*Sumber daya tambahan:
UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006) 8–9*



3.2.2 Rekrutmen dan pelatihan

Seperti halnya orang lain yang terlibat dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan, hakim dan staf mereka harus memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai. Jika kasus disidangkan oleh hakim yang tidak cukup memahami latar belakang, teknik, proses dan persyaratan hukum yang relevan, integritas persidangan dapat dikompromikan.

Sistem pengadilan yang mempekerjakan pelamar yang memenuhi syarat melalui proses seleksi yang transparan, yang memandang dan memberi kompensasi kepada staf sebagai profesional, dan yang mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan fungsi mereka dengan pelatihan berkelanjutan pada gilirannya dapat menuntut integritas dan keunggulan dari staf mereka. Sebaliknya, inefisiensi, pelayanan yang buruk dan korupsi lebih cenderung menjadi masalah yang menantang sistem peradilan dan para penggunanya jika susunan kepegawaian pengadilan tidak dipandang sebagai prioritas dan jika fungsi staf sebagai pegawai negeri tidak dikomunikasikan dengan baik oleh kepemimpinan. Kebijakan dan prosedur rekrutmen harus mendorong inklusivitas dan keragaman. Hal ini penting untuk mencapai perubahan organisasi, meningkatkan persepsi publik, dan untuk menanggapi kebutuhan kelembagaan dan masyarakat dengan lebih baik.



ALAT
III.24

Yudikatif : Rekrutmen dan pelatihan

- » Bagaimana proses seleksi dan prosedur rekrutmen hakim? Tingkat kualifikasi apa yang dibutuhkan? Bagaimana hakim dipilih untuk pengadilan yang lebih tinggi dan khusus?
- » Pelatihan dasar apa yang diberikan kepada hakim baru dan karyawan lainnya? Apakah pelatihan khusus tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan ditawarkan kepada anggota staf baru atau yang sudah ada?
- » Seberapa sering hakim dan karyawan lainnya menerima pelatihan penyegaran? Kursus pelatihan berkelanjutan dan khusus apa yang tersedia? Apakah kursus pelatihan berkelanjutan dan khusus mencakup modul tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana kebutuhan pelatihan dinilai? Bagaimana pelatihan disampaikan?
- » Apakah pelatihan melibatkan peserta dari berbagai instansi (dalam dan luar negeri), seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga satwa liar dan kehutanan atau lainnya?
- » Apakah ada mekanisme untuk memberikan hakim yang terkadang menangani kasus kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dengan akses ke keahlian yang relevan?

Sumber daya tambahan :
UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Volume 2 Kemandirian, Ketidakberpihakan dan Integritas Peradilan (2006) 10–13*

3.2.3 Fasilitas dan peralatan

Hakim dan staf pendukungnya membutuhkan fasilitas dasar tertentu dan membutuhkan peralatan khusus untuk menjalankan tugasnya. Fasilitas dasar meliputi kantor, alat tulis dan peralatan IT. Para hakim dan staf mereka selanjutnya membutuhkan akses ke perpustakaan dan basis data hukum untuk menjalankan fungsi sehari-hari.

Analisis fasilitas dan peralatan yang tersedia dan dibutuhkan sangat bervariasi di antara yurisdiksi. Peran, pelatihan, tanggung jawab dan senioritas hakim harus diperhitungkan dalam konteks ini. Analisis juga bergantung pada kondisi sosial ekonomi lokal, sumber daya yang tersedia, dan akses ke bantuan keuangan dan bantuan teknis.



ALAT
III.25

Peradilan : fasilitas dan peralatan

- » Apa saja fasilitas peradilan? Di manakah lokasi pengadilan yang relevan? Bagaimana kondisi fisik gedung pengadilan?
- » Tindakan pengamanan apa yang diterapkan di dalam dan di sekitar gedung pengadilan?
- » Apakah peralatan kantor (seperti furnitur, alat tulis, dan mesin fotokopi) memadai? Apakah ruang sidang dilengkapi dan diperlengkapi secara memadai?
- » Teknologi komunikasi dan pengolahan kata apa yang tersedia (seperti komputer, Internet, telepon, telepon seluler, dan lain-lain)?
- » Apakah berkas, bukti, dan informasi elektronik dapat disimpan dengan aman?
- » Apakah hakim dan staf mereka memiliki akses ke undang-undang yang relevan, termasuk undang-undang pidana, dan undang-undang satwa liar dan kehutanan?
- » Di mana hakim dapat mengakses materi hukum saat ini (seperti undang-undang, laporan kasus, dan literatur lainnya)? Apakah gedung pengadilan dilengkapi dengan perpustakaan? Apakah hakim memiliki akses ke basis data elektronik yang relevan?

Sumber daya tambahan :
UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006) 19–22*

3.3 Manajemen informasi

Pencatatan, pemeliharaan dan penyimpanan informasi, termasuk berkas kasus dan laporan pengadilan, sangat penting untuk integritas dan fungsi peradilan. Pengelolaan informasi yang tepat dan menyeluruh juga memiliki fungsi penting bagi orang-orang di luar sistem pengadilan dan masyarakat luas, dan tidak terbatas pada proses pengadilan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Alat berikut menetapkan berbagai mekanisme dasar yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pengadilan.

Catatan dan pelaporan pengadilan

- » Bagaimana berkas kasus dibuat, diidentifikasi, dan terus diperbarui? Bisakah berkas dilacak saat berpindah-pindah di pengadilan?
- » Apakah ada pendaftaran pengadilan? Apakah staf terlatih dalam pencatatan? Bagaimana memastikan integritas staf yang bertanggung jawab atas pemeliharaan informasi pengadilan?
- » Di bawah undang-undang saat ini, catatan pengadilan mana yang terbuka untuk umum dan catatan mana yang harus dirahasiakan?
- » Berapa lama berbagai jenis catatan pengadilan disimpan? Apakah ada aturan yang jelas tentang penyimpanan dan pembuangan arsip? Apakah arsip terkadang hilang, rusak, atau dicuri?
- » Apakah undang-undang atau peraturan pengadilan saat ini menyediakan catatan proses pengadilan dan cara melakukannya? Apakah semua proses pengadilan dicatat? Bagaimana mereka dicatat? Bagaimana, dimana dan berapa lama catatan pengadilan disimpan?
- » Apakah laporan hukum disusun? Jika ya, siapa yang bertanggung jawab atas kompilasi dan seberapa sering laporan hukum diterbitkan? Bagaimana laporan hukum disebarluaskan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006) 13–16



3.4 Data dan hasil pengadilan

3.4.1 Data pengadilan umum

Pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan merupakan bagian integral untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem peradilan, dan beban kerja serta kinerja hakim, serta untuk memantau bagaimana kasus melewati sistem pengadilan dan untuk mengidentifikasi tren dalam preseden yang dapat menginformasikan kasus di masa mendatang. Data dasar mencakup jumlah persidangan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan, jumlah hukuman, pembebasan dan banding, dan lamanya proses pengadilan. Data relevan lainnya termasuk, antara lain, jumlah dan proporsi kasus yang disidangkan, kasus di mana pelaku mengaku bersalah, dan kasus yang dialihkan dari sistem peradilan pidana.⁸³ Data tersebut harus dicatat secara terus-menerus dan dilaporkan secara berkala, sebagaimana mestinya, dan upaya harus dilakukan untuk memastikannya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Catatan resmi pengadilan yang digunakan oleh jaksa dan pejabat pengadilan untuk mencatat vonis dan hukuman harus dijaga keamanannya, karena penghancuran yang disengaja dapat digunakan oleh sindikat kriminal untuk menunda atau menggagalkan sistem peradilan.

⁸³ Data dan informasi lain mengenai penuntutan dan hukuman dibahas secara terpisah di Bab III, Bagian 2.4 dan 4.1 dari Perangkat ini.



ALAT
III.27

Data pengadilan umum

- » Berapa banyak proses pengadilan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan telah dimulai? Berapa banyak proses yang melibatkan dakwaan? Berapa banyak yang melibatkan banding?
- » Berapa banyak kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang menghasilkan hukuman? Berapa banyak yang menghasilkan pembebasan?
- » Berapa banyak hukuman yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan yang telah dibatalkan saat naik banding? Apa alasan utama banding?
- » Berapa lama biasanya proses pengadilan yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 1 Pengadilan (2006) 3–4

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Jilid 1 Informasi Peradilan Pidana (2006) 6–7

3.4.2 Indikator kinerja pengadilan

Indikator kinerja pengadilan berfungsi untuk memantau pekerjaan dan beban kerja para hakim secara sistematis dan membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Beberapa indikator yang paling relevan dalam hal ini adalah rata-rata jumlah perkara per hakim, rata-rata lama waktu penyelesaian suatu perkara pidana, rata-rata jumlah sidang per tahun, rata-rata jumlah sidang per hakim, dan rata-rata jumlah sidang per hakim, panjang rata-rata sidang, dan biaya rata-rata per perkara.



ALAT
III.28

Indikator kinerja pengadilan

- » Target kinerja apa, jika ada, yang telah diidentifikasi untuk para hakim tersebut dan lainnya dalam sistem pengadilan yang menangani kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apa target khusus untuk otoritas yudisial?
- » Indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur kegiatan pengadilan?
- » Siapa yang melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator tersebut? Bagaimana hasilnya dilaporkan kembali ke masing-masing instansi?
- » Apakah indikator kinerja ditinjau dan diperbarui secara berkala?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Volume 2 Kemandirian, Ketidakberpihakan dan Integritas Peradilan (2006) 3–4

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Jilid 1 Informasi Peradilan Pidana (2006) 11

4

Bagian III

Hukuman dan sanksi

Kejahatan satwa liar dan kehutanan sering dipandang sebagai kegiatan yang menguntungkan dan berisiko rendah. Salah satu alasan untuk persepsi ini adalah fakta bahwa hukuman hukum untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan sering dianggap terlalu rendah dan hukuman terlalu ringan dan sulit diperoleh.



Meskipun pandangan tersebut tidak selalu didasarkan pada fakta yang akurat, namun dapat mendorong pelaku untuk terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan dan dapat merusak persepsi publik terhadap sistem peradilan pidana.

4.1 Hukuman dan hukuman

Secara umum, pemidanaan perlu diikuti dengan hukuman yang cukup untuk menghukum pelaku sampai tingkat atau dengan cara yang dibenarkan dalam keadaan, menyediakan kondisi yang akan membantu pelaku untuk direhabilitasi, menghalangi pelaku dan orang lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang sama atau serupa, memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, dan memperjelas bahwa masyarakat, yang bertindak melalui pengadilan, mencela jenis perilaku yang dilakukan pelaku. Hukuman menurut undang-undang untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan dan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan ini harus secara memadai mencerminkan beratnya kejahatan sehubungan dengan kerugian yang ditimbulkan dan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kejahatan yang relevan (dijelaskan dalam Bab I, Bagian 4 Perangkat ini) dapat dihukum dengan hukuman yang efektif dan disuasif. Hukuman juga harus proporsional dengan keseriusan kejahatan.

Kerugian tersebut dapat tercermin dalam kerusakan yang disebabkan atau kemungkinan disebabkan oleh kejahatan terhadap lingkungan atau individu spesies, tumbuhan atau hewan; dalam bentuk cedera, kerugian atau bahaya lain yang ditimbulkan pada individu; dan setiap kerugian, kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap komunitas lokal atau masyarakat luas. Kesalahan pelaku umumnya tercermin dalam keadaan mentalnya pada saat kejahatan dilakukan. Umumnya, hukuman yang lebih tinggi diperuntukkan bagi mereka yang bertindak dengan sengaja, sadar atau sembrono, sedangkan hukuman yang lebih rendah (atau tanpa hukuman) sesuai untuk pelaku yang bertindak lalai atau bukan karena kesalahan mereka sendiri. Selain itu, ketika menjatuhkan hukuman untuk kejahatan satwa liar atau kehutanan, pengadilan dapat mempertimbangkan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mencegah, mengendalikan, mengurangi atau memitigasi bahaya, sejauh mana orang yang melakukan pelanggaran memiliki kendali atas penyebab yang menimbulkan kejahatan tersebut, sejauh mana dia dapat memperkirakan secara wajar kerugian tersebut dan apakah, dalam melakukan kejahatan tersebut, orang tersebut mematuhi perintah dari majikan atau atasan.

Beratnya hukuman akan ditentukan lebih lanjut oleh bukti yang meringankan atau memberatkan yang diajukan kepada hakim yang menjatuhkan hukuman (selama belum menjadi unsur kejahatan: lihat Bab I, Bagian 4 dari Perangkat ini). Keadaan yang cenderung meningkatkan kesalahan pelaku atau menuntut hukuman yang lebih tinggi dikenal sebagai faktor yang memberatkan. Keadaan yang cenderung menurunkan kesalahan pelaku atau menjamin hukuman yang lebih rendah dikenal sebagai faktor yang meringankan. Misalnya, melakukan kejahatan untuk keuntungan finansial atau atas nama kelompok kejahatan terorganisir adalah keadaan yang dapat memperberat hukuman.⁸⁴ Pelanggar berulang juga sering menghadapi hukuman yang lebih tinggi. Jika pelakunya adalah badan hukum, bisa juga dimasukkan ke dalam 'daftar hitam' perusahaan.

Sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, faktor-faktor lain yang memberatkan dapat mencakup :

- ↳ ketika kejahatan menyebabkan dampak yang sangat serius pada suatu spesies, lingkungan, ekosistem, keanekaragaman hayati, warisan, budaya, pariwisata, masyarakat atau ekonomi;
- ↳ jumlah atau jenis spesimen atau barang yang terlibat dalam kejahatan;
- ↳ ketika kejahatan melibatkan penggunaan senjata, alat atau metode yang dilarang atau dibatasi;
- ↳ di mana pelanggaran itu terjadi, seluruhnya atau sebagian, di kawasan lindung;
- ↳ apakah hewan yang terlibat dalam kejahatan sedang hamil, melahirkan, mengerami atau merawat keturunan tanggungan pada saat kejahatan;
- ↳ besarnya manfaat keuangan atau materi lainnya bagi pelaku atau orang lain sebagai hasil dari kejahatan;
- ↳ besarnya kerugian finansial atau materi lainnya bagi orang lain yang disebabkan oleh kejahatan tersebut;
- ↳ apakah pelaku berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan selama penyelidikan, penuntutan atau penentuan hukuman atas kejahatan tersebut;
- ↳ apakah pelaku bertindak sebagai bagian dari kelompok kejahatan terorganisir;
- ↳ ketika kejahatan itu dilakukan oleh pejabat pemerintah;
- ↳ ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi yang mengandung kepercayaan atau otoritas, termasuk pemegang izin atau sertifikat yang relevan;
- ↳ apakah pelaku menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau pelecehan lainnya terhadap penyidik, petugas perbatasan, atau mereka yang bertugas melindungi flora dan fauna;
- ↳ biaya rehabilitasi suatu kawasan atau hewan dan biaya penyelidikan dan penuntutan kasus tersebut.

Faktor-faktor yang meringankan hukuman dapat meliputi :

- ↳ ketika pelaku memiliki peran yang lebih rendah atau kecil dalam kejahatan tersebut;
- ↳ ketika pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya;
- ↳ ketika pelaku sebelumnya menunjukkan karakter yang baik;
- ↳ ketika pelaku menunjukkan penyesalan atas kejahatan atau berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan;

⁸⁴ Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 5.6 dari Perangkat ini.

- ketika orang tersebut secara sukarela bekerja sama dengan memberikan informasi atau membantu pihak berwenang yang kompeten, termasuk untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan;
- ketika kejahatan tersebut tidak melibatkan atau sejumlah kecil keuntungan finansial atau material lain bagi pelaku atau orang lain, atau tidak menyebabkan atau hanya menyebabkan kerugian finansial atau material lain yang tidak signifikan bagi orang lain;
- usia pelaku pada saat kejahatan atau pada saat penjatuhan hukuman;
- apakah pelaku pernah atau sedang menderita penurunan kapasitas mental pada saat melakukan kejahatan atau pada saat penjatuhan hukuman.

Seperti disebutkan di atas dalam Bab II, Bagian 5.6 dan 5.7 dari Perangkat ini, ketika pelaku terlibat dalam memfasilitasi kejahatan (misalnya korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak), penalti dan hukuman yang lebih tinggi seringkali dapat diperoleh dibandingkan dengan yang diberikan untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Karena kurangnya investigasi atas kejahatan yang memfasilitasi ini sebagai bagian dari/bersamaan dengan kejahatan satwa liar dan hutan, namun, penuntutan seringkali tidak dapat mengajukan dakwaan tambahan di bawah pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi, tidak membayar biaya dan hukum yang relevan lainnya.

Penalti dan hukuman

- » Hukuman hukum apa yang diberikan undang-undang saat ini untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan? Berapa lama hukuman penjara maksimum dan denda maksimum untuk kejahatan yang relevan? Apakah ada hukuman minimum untuk mereka?
- » Siapa yang menentukan hukuman (misalnya, pengadilan yang menjatuhkan hukuman atau hakim individu)?
- » Apa saja prinsip penjatuhan hukuman? Di mana mereka diartikulasikan?
- » Apakah mungkin untuk menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi untuk pelanggar berulang dan untuk kejahatan yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir?
- » Jenis data apa yang tersedia terkait penalti dan hukuman yang diberikan oleh pengadilan?
- » Apa faktor lain yang memberatkan yang dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman?
- » Faktor-faktor peringan apa saja yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman?
- » Apakah ada pedoman atau kriteria hukuman formal atau informal untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah unit penegakan hukum, termasuk unit penegakan hukum satwa liar dan kehutanan, berpartisipasi dalam penjatuhan hukuman? Apakah korban didengar?
- » Apakah ada putusan untuk kasus satwa liar dan hutan yang telah digunakan untuk menuntut tertuduh karena memfasilitasi kejahatan seperti pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi atau tidak membayar biaya?

Sumber daya tambahan :
UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 36–37

kasus-kasus serius, pelaku dijatuhi hukuman penjara. Jenis sanksi lain termasuk peringatan, larangan dari tempat-tempat tertentu, perampasan hak-hak sipil, larangan untuk melanjutkan perdagangan atau pendudukan dalam rangka pelanggaran itu dilakukan, pencabutan lisensi atau izin, larangan untuk memiliki satwa liar atau bahan kehutanan yang berkaitan dengan tindak pidana atau alat dan sarana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana, publikasi tindak pidana, perbaikan dan pemulihan. Dalam praktiknya, kombinasi dari sanksi-sanksi ini seringkali tepat.



Pelarangan wilayah dapat bermanfaat, misalnya, dalam menolak akses pelaku ke suatu area atau populasi spesies yang pada gilirannya dapat mencegah pemanenan atau perburuan ilegal, dan dengan demikian juga memutus rantai perdagangan ilegal ke titik transit dan tujuan. Larangan untuk melanjutkan perdagangan atau pendudukan di mana pelanggaran tersebut dilakukan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencegah kejahatan di masa depan. Hal yang sama dapat dikatakan untuk penangguhan izin penebangan dan perburuan, izin perdagangan dan sebagainya.⁸⁵

Dalam menentukan hukuman yang tepat, penting agar pengadilan mempertimbangkan seluruh rangkaian sanksi yang tersedia berdasarkan undang-undang saat ini untuk orang perseorangan dan, jika terdakwa adalah badan usaha, sanksi dapat dikenakan pada badan hukum. Sanksi administratif (sanksi) umumnya dijatuhkan oleh lembaga penegak hukum, dengan kemungkinan peninjauan kembali oleh pihak yang dirugikan. Penalti perdata dan pidana biasanya membutuhkan keterlibatan yudisial dan bergantung pada hukum dan praktik Negara tertentu. Penalti tertentu, seperti denda, dapat diterapkan dalam konteks administratif, perdata, atau pidana. Penjara harus diperuntukan bagi pelanggaran yang paling serius. Penjatuhan hukuman yang melibatkan hukuman fisik atau hukuman mati sangat tidak dianjurkan dan akan ilegal di sebagian besar negara.

Secara khusus, dalam kasus di mana pelaku berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah dari jaringan kejahatan dan/atau lokal di daerah di mana kejahatan telah dilakukan, otoritas penghukum dapat mengeksplorasi serangkaian sanksi alternatif yang inovatif. Alternatif penahanan seringkali lebih hemat biaya daripada pemenjaraan dan dapat lebih mendukung prospek rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku. Sanksi alternatif seperti tindakan pendidikan (apakah khusus untuk sektor satwa liar dan hutan atau tidak), kerja masyarakat (mungkin dikombinasikan dengan perspektif pekerjaan tetap), atau membiayai kampanye peningkatan kesadaran (tanda pendidikan lingkungan di bus dan buku pendidikan lingkungan untuk sekolah lokal) dalam beberapa kasus secara signifikan mengurangi tingkat residivisme.

Seperti disebutkan dalam Bab II, Bagian 5.6 dan 5.7 dari Perangkat ini, ketika para pelaku terlibat dalam memfasilitasi kejahatan (misalnya korupsi, pencucian uang atau penghindaran pajak), sanksi yang lebih atau lebih kuat seringkali dapat diperoleh, termasuk pembekuan dan penyitaan hasil dan aset lainnya yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan.



Sanksi

- » Jenis sanksi apa untuk kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan yang diperbolehkan menurut hukum domestik (seperti hukuman penjara, denda atau pengabdian masyarakat)?
- » Sanksi apa yang umumnya mengikuti hukuman untuk kejahatan satwa liar dan hutan? Data apa yang tersedia tentang lamanya dan jenis sanksi yang dijatuhkan?
- » Otoritas mana yang memiliki kekuatan hukum atau keleluasaan untuk menjatuhkan sanksi?
- » Apakah undang-undang mengizinkan pengadilan menjatuhkan hukuman untuk memerintahkan larangan wilayah, pencabutan dan penangguhan perizinan dan izin perdagangan, dan untuk melarang pelaku terlibat dalam jenis pekerjaan atau perdagangan tertentu? Sanksi apa lagi yang dapat dikenakan?
- » Penalti apa yang dapat dikenakan pada badan hukum (korporasi)?
- » Apakah ada undang-undang atau peraturan untuk menyita dan merampas instrumen kejahatan sebagai bagian dari atau terlepas dari hukuman (misalnya kendaraan, fasilitas penyimpanan atau perahu)?
- » Apakah ada undang-undang atau peraturan untuk menyita dan merampas hasil dari kejahatan, sebagai bagian dari atau terlepas dari hukuman (misalnya kendaraan, rumah atau uang tunai)?
- » Apakah sanksi yang berkaitan dengan pencucian uang, korupsi, penghindaran pajak, tidak dibayarnya biaya dan kejahatan lain yang memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan diterapkan? Apa pengalamannya?

⁸⁵ Lihat juga Bab III, Bagian 6 dari Perangkat ini.

5

Bagian III

Restitusi, kompensasi, dan restorasi

Dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan, restitusi mungkin tidak relevan dalam kasus di mana hak milik korban atau Negara telah dilanggar atau ketika degradasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan tanah, air atau properti, atau mengurangi atau menghancurkan hak korban atas sumber pendapatan yang sah.



Restitusi dengan demikian harus mencakup pengembalian properti. Jika hal ini tidak memungkinkan, korban harus diberi kompensasi dengan menerima pembayaran atas bahaya atau kerugian yang ditimbulkan, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.

Dalam banyak kasus kejahatan satwa liar dan kehutanan, restitusi akan dibayarkan kepada Negara dan bukan kepada korban tertentu. Dalam kasus seperti itu, restitusi juga harus dipertimbangkan untuk waktu dan biaya pembersihan, dan untuk perawatan hewan dan rehabilitasi satwa liar. Tempat tinggal hewan atau tumbuhan hidup yang disita, seringkali dalam waktu lama sebelum sidang pengadilan atau persidangan, bisa sangat mahal, dan otoritas kejaksaan didorong untuk meminta perintah pengadilan yang mewajibkan pelanggar menanggung biaya ini. Menyusul pembuangan kasus, pertimbangan mungkin harus diberikan untuk memulangkan hewan hidup ke tempat asalnya. Dalam beberapa kasus, pengembaliannya mungkin tidak praktis, dan mungkin perlu menemukan pengaturan alternatif. Kedua opsi tersebut bisa sangat mahal, dan pengadilan harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan perintah yang mengharuskan pelaku menanggung biaya tersebut.

Pengadilan di sejumlah yurisdiksi mensyaratkan denda dan hukuman moneter lainnya dibayarkan ke dalam dana yang kemudian digunakan untuk tujuan konservasi atau untuk membantu mensubsidi kegiatan penegakan hukum. Pengadilan juga harus mempertimbangkan untuk menyerahkan barang-barang yang disita selama penjatuhan hukuman kepada lembaga penegak hukum untuk penggunaan selanjutnya. Ini dapat mencakup, misalnya, kendaraan, kapal, atau bahkan pesawat terbang.

5.1 Restitusi dan kompensasi

Restitusi dapat dilaksanakan dalam beberapa cara dan pada berbagai titik dalam sistem: sebagai syarat masa percobaan, sebagai sanksi itu sendiri atau sebagai hukuman tambahan. Ini juga bisa menjadi hasil dari hukuman, atau mekanisme alternatif yang diperintahkan oleh pengadilan, seperti proses mediasi korban-pelaku atau proses keadilan restoratif lainnya. Beberapa yurisdiksi juga memungkinkan para korban, seperti pemilik atau orang lain yang memegang hak sah atas satwa liar atau hutan yang telah dirusak, terluka, dibunuh atau dicuri, untuk mencari kompensasi atau memulai gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan satwa liar dan kehutanan. Seperti halnya semua tindakan, sangat penting

bahwa perintah restitusi ditegakkan secara efektif dan bahwa pelanggar menghadapi konsekuensi jika mereka tidak mematuhi perintah restitusi.

Dalam beberapa kasus, kompensasi mungkin tidak dapat dilakukan. Misalnya, jika spesimen telah dibunuh atau dimusnahkan dan pelaku tidak memiliki sarana keuangan untuk memberikan ganti rugi, pengembalian spesimen dan pembayaran sebagai kompensasi mungkin tidak mungkin, tidak praktis atau tidak memadai. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang menjadi korban kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka, beberapa Negara telah mengadopsi metode alternatif untuk memulihkan kerugian atau kerusakan atau memberikan kompensasi kepada korban, yang sesuai dalam kasus-kasus tertentu. Apabila restitusi atau kompensasi lain tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, Negara dapat memberikan kompensasi finansial. Dalam kasus di mana pelaku adalah agen Negara atau bertindak atas nama Negara, Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan pada mereka. Beberapa Negara telah mengadopsi undang-undang dan membentuk mekanisme khusus untuk memberikan kompensasi kepada korban.



ALAT
III.31

Restitusi dan kompensasi

- » Apakah undang-undang dan peraturan saat ini mengizinkan restitusi diperintahkan sebagai bagian dari hukuman?
Apakah ini mencakup kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah korban dapat memulai gugatan perdata terhadap pelaku?
- » Apakah korban mengetahui atau dibuat sadar akan undang-undang dan peraturan ini? Apakah korban kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat meminta restitusi?
- » Bagaimana perintah restitusi ditegakkan?
- » Bagaimana Negara memberikan kompensasi kepada korban atas kerusakan satwa liar dan kehutanan yang disebabkan oleh pejabat Negara atau atas nama Negara?
- » Apakah Negara menawarkan kompensasi finansial jika pelaku atau sumber lain tidak dapat memberikannya? Undang-undang dan peraturan apa yang ada tentang kompensasi korban? Apakah ada skema atau dana kompensasi korban?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018)

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Masalah Lintas Sektoral, Jilid 3: Korban dan Saksi (2006) 16–17

5.2 Langkah-langkah pemulihan dan perbaikan

Jika kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan mengakibatkan kerusakan lingkungan pada tanah publik atau pribadi, pengadilan juga dapat memerintahkan pemulihan atau tindakan perbaikan lainnya. Apakah pemulihan diinginkan atau memang dimungkinkan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat keparahan kerusakan, risiko yang ditimbulkan oleh kerusakan tersebut, kemungkinan kecepatan regenerasi alami, dan kelayakan pemulihan dan regenerasi buatan. Dalam beberapa kasus, restitusi mungkin tidak dapat dilakukan, misalnya untuk penebangan pohon atau pembunuhan hewan yang terancam punah. Oleh karena itu, kegiatan pencegahan dan pemantauan harus diberikan prioritas yang lebih tinggi.



ALAT
III.32

Langkah-langkah pemulihan dan perbaikan

- » Dapatkah pengadilan memerintahkan langkah-langkah pemulihan dan perbaikan dalam menanggapi kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Tindakan pemulihan dan perbaikan apa yang dapat diperintahkan? Apakah termasuk, misalnya, waktu dan biaya untuk pembersihan, atau perawatan medis satwa liar?

6

Bagian III

Tindakan gangguan lainnya

Dalam beberapa keadaan, tidak mungkin atau berguna untuk mengadili dan/atau membawa pelaku kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan ke persidangan. Dalam situasi ini, penegakan hukum mungkin perlu menggunakan langkah-langkah di luar proses peradilan pidana untuk menghentikan kejahatan terhadap satwa liar atau kehutanan tertentu yang dimaksud.



Langkah-langkah gangguan yang bentuknya bukan peradilan pidana juga dapat dimulai sebagai taktik rutin terlepas dari kesulitan yang dihadapi dalam penuntutan atau persidangan.

Intervensi yang berfokus pada aset (AFI) seperti pengambilan paksa, perampasan, dan penyitaan adalah tindakan gangguan yang paling umum — dan seringkali paling efektif — karena tindakan tersebut berpotensi membatasi atau menolak akses pelaku ke hasil kejahatan mereka dan ke modal yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan kejahatan lebih lanjut. Banyak poin yang relevan dengan hal ini diuraikan dalam Bab II, Bagian 5.6 dari Perangkat ini. Selain itu, tindakan penolakan aset seperti Pemulihan Sipil dan Pajak (CRT) harus dipertimbangkan sejak awal penyelidikan untuk mengidentifikasi, membekukan, dan memulihkan aset yang tidak dapat dijelaskan oleh sumber yang sah (disebut kekayaan yang tidak dapat dijelaskan).

Langkah-langkah gangguan yang tidak berupa peradilan pidana lainnya yang dapat sangat mengurangi kemampuan penjahat dan jaringannya termasuk pencabutan izin untuk berburu, memiliki, dan membawa senjata; mengemudi; atau menjalankan profesi tertentu atau tindakan administratif lainnya yang terkait dengan profesi atau gaya hidup seseorang (seperti izin penggunaan dan perencanaan lahan, dan perintah kepatuhan seperti pembatasan perjalanan).⁸⁶ Tindakan seperti patroli, pemasangan kamera CCTV atau penggunaan alat pengawasan lainnya juga dapat berfungsi untuk mengganggu kegiatan kejahatan di sepanjang rute tertentu atau di tempat tertentu dan untuk mengumpulkan intelijen pada saat yang bersamaan.

Harus diingat bahwa tindakan tersebut hanya dapat mengganggu atau meringankan situasi untuk sementara waktu dan hanya menyebabkan tergesernya kegiatan kejahatan atau mendorong pelaku untuk menyembunyikan kegiatannya lebih lanjut atau menggunakan cara yang lebih canggih dan teknologi yang lebih maju. Untuk mengatasi beberapa masalah ini, langkah-langkah gangguan bukan berbentuk peradilan pidana harus sering ditinjau dan departemen terkait terlibat secara luas dalam kerja sama multi-lembaga untuk memaksimalkan upaya dan efek gangguan.

⁸⁶ Lihat juga Bab III, Bagian 4.2 dari Perangkat ini.



ALAT
III.33

Tindakan gangguan lainnya

- » Tindakan gangguan bukan berbentuk peradilan pidana apa yang diizinkan berdasarkan undang-undang dan peraturan domestik? Yang mana yang digunakan dalam praktik?
- » Apakah aparat penegak hukum yang menginvestigasi kejahatan satwa liar dan kehutanan diizinkan untuk memulai tindakan yang mengganggu yang tidak berbentuk peradilan pidana ketika mereka mencurigai adanya aktivitas kejahatan?
- » Apakah petugas penegak hukum secara rutin mempertimbangkan langkah-langkah gangguan yang tidak berbentuk peradilan pidana ketika dihadapkan dengan kasus dugaan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Bagaimana prosedur untuk memulai tindakan gangguan yang tidak berbentuk peradilan pidana; apakah dapat diterapkan dalam praktiknya?
- » Apakah kerja sama multi-lembaga memfasilitasi langkah-langkah gangguan yang tidak berbentuk peradilan pidana?
Jika demikian, apakah itu diformalkan?

7

Bagian III

Korupsi, integritas dan akuntabilitas jaksa dan peradilan

Hambatan serius bagi keberhasilan upaya apa pun untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan adalah sistem peradilan pidana yang korup.



7.1 Korupsi jaksa dan peradilan

Pelaku kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan memahami bahwa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pihak kejaksaan dan pengadilan adalah kunci untuk memastikan bahwa kejahatan mereka tidak dihukum atau menerima hukuman yang ringan. Selain mempengaruhi proses dan hasil investigasi kejahatan,⁸⁷ pelaku juga dapat menerapkan praktik korupsi untuk mempengaruhi sistem peradilan pidana agar memihak mereka. Jika otoritas penuntutan dan peradilan korup, mekanisme hukum dan kelembagaan yang dirancang untuk mengekang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, serta jenis kejahatan lainnya, tidak peduli seberapa tepat sasarannya, tetap lumpuh.

Otoritas kejaksaan dapat disuap, dipengaruhi atau ditekan oleh pejabat pemerintah senior atau politisi, dan penyalahgunaan jabatan dapat menyebabkan jaksa tidak melakukan penuntutan, menunda pengajuan kasus di pengadilan, atau mengalihkan kasus dari sistem peradilan pidana ke sistem resolusi alternatif yang kurang punitif. Taktik lain yang digunakan adalah menyuap atau mempengaruhi pejabat senior sehingga kasus tersebut diserahkan kepada jaksa atau hakim yang tidak memiliki pelatihan dan pengalaman tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan atau yang memiliki tumpukan kasus yang signifikan sehingga lebih sedikit waktu untuk memeriksa kasus secara hati-hati. Hakim yang mengawasi kasus tersebut dapat disuap atau dipengaruhi, atau dapat menyalahgunakan jabatannya, untuk menunda dimulainya kasus tersebut atau untuk memastikan kasus tersebut memiliki banyak/penundaan yang berkelanjutan.

Bahkan setelah investigasi yang efektif dilakukan, jaksa dapat disuap atau dipengaruhi (perdagangan pengaruh) untuk mencemari, menghancurkan atau menghilangkan informasi dan bukti kunci, sehingga memperlemah kasus tersebut. Jaksa dapat disuap atau dipengaruhi untuk melanjutkan kasus yang lemah yang dapat menyebabkan pelakunya tidak dihukum. Jaksa juga dapat disuap untuk sengaja tidak mengikuti langkah-langkah yang diperlukan saat mengajukan kasus satwa liar dan kehutanan di pengadilan, sehingga kasus dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Jaksa dapat dipengaruhi untuk mengajukan kasus berdasarkan undang-undang yang menetapkan penalti dan hukuman yang lebih ringan. Misalnya, di Kenya, kasus pemanenan kayu cendana dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Hutan atau Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Satwa Liar; hukuman di bawah Undang-Undang Hutan kurang punitif dibandingkan dengan Undang-Undang Satwa Liar.

Jika pengadilan khusus telah dibentuk untuk menyidangkan kasus satwa liar dan kehutanan, otoritas penuntut dapat dipengaruhi untuk mengajukan kasus di pengadilan yang salah, sehingga menunda kasus tersebut disidangkan di pengadilan yang tepat. Jaksa dapat disuap atau dipengaruhi untuk mengajukan kasus di pengadilan

⁸⁷ Lihat Bab II, Bagian 8 dari Perangkat ini.

yang tidak mudah dijangkau oleh para saksi atau bahkan oleh penyidik (misalnya di pengadilan yang mengharuskan saksi dan penyidik untuk pergi jauh dari rumah atau kantornya), sehingga mempersulit mereka untuk menghadiri sidang pengadilan. Otoritas kejaksaan bahkan dapat menggelapkan beberapa satwa liar dan hasil hutan yang merupakan bagian dari barang bukti, karena hanya sampel dari barang bukti yang diminta untuk ditunjukkan di pengadilan selama pra-sidang.

Hakim dapat disuap, dipengaruhi atau menyalahgunakan jabatannya untuk membatalkan suatu kasus, membebaskan semua atau sebagian orang yang dituduh atau memberikan penalti dan hukuman yang ringan (yaitu tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan). Di beberapa yurisdiksi di mana tidak ada akses ke proses peradilan dan/atau putusan pengadilan, pelaku kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dapat menyuap atau mempengaruhi aparat peradilan untuk menunda penyerahan putusan kepada aparat penegak hukum atau bahkan mengubah putusan tersebut.

Otoritas kejaksaan senior atau pejabat pengadilan dapat disuap atau dipengaruhi (perdagangan pengaruh) untuk kasus-kasus satwa liar dan kehutanan yang kekurangan staf dan sumber daya (dalam hal peralatan, seragam, dana dan sumber daya lainnya), atau untuk tidak memberikan pelatihan yang memadai atau menugaskan staf yang tidak berpengalaman untuk menanganinya.



Korupsi jaksa dan peradilan

- » Apakah ada dugaan atau bukti adanya petugas di kejaksaan dan otoritas kehakiman menerima atau meminta suap atau dipengaruhi oleh orang lain (termasuk atasan), atau menyalahgunakan jabatannya untuk:
 - Dengan sengaja mengganti, mencemari, merusak, menghancurkan, atau tidak mempertahankan rantai kustodi barang bukti yang tepat?
 - Menunda dimulainya kasus pengadilan? Apakah keterlambatan ini disebabkan oleh petugas investigasi, otoritas kejaksaan atau pengadilan?
 - Mengabaikan kejahatan yang relevan?
 - Mengalihkan kasus pidana berat dari sistem peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian alternatif yang tidak terlalu menghukum?
 - Menugaskan kasus kepada petugas penuntut atau hakim yang tidak memiliki pengalaman dan/atau pelatihan sebelumnya terkait kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
 - Untuk menugaskan kasus kepada petugas penuntut atau hakim yang memiliki tumpukan kasus yang signifikan?
 - Sengaja mengadili kasus yang lemah atau tidak mengikuti langkah-langkah yang diperlukan selama proses penuntutan sehingga kasus tersebut dinyatakan unprosedural?
 - Dengan sengaja mengajukan perkara di pengadilan yang salah, di pengadilan yang tidak mudah diakses/dijangkau oleh saksi atau petugas yang menyelidiki kasus tersebut, atau di bawah hukum yang kurang menghukum?
 - Terus menunda kasus?
 - Dengan sengaja menghentikan suatu kasus tanpa mengizinkan sidang penuh?
 - Membebaskan semua tertuduh atau beberapa tertuduh secara tidak tepat (biasanya Aktor yang menjadi Dalang)?
 - Menunda menyerahkan putusan kepada aparat penegak hukum?
 - Mengubah Putusan ?
 - Kekurangan staf atau menugaskan staf yang tidak berpengalaman untuk kasus satwa liar dan kehutanan atau pengadilan tertentu?
 - Kekurangan sumber daya atau penundaan pemberian sumber daya ke pengadilan / tempat tugas tertentu?
- » Apakah ada dugaan atau bukti adanya saksi atau petugas penyidik kasus satwa liar dan kehutanan telah disuap, diancam atau dipengaruhi oleh orang lain untuk tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian?
- » Ketika kasus satwa liar dan kehutanan meliputi bukti bahwa tersangka juga terlibat dalam korupsi, bagaimana tindak pidana korupsi dituntut?

7.2 Akuntabilitas dan integritas penuntutan dan peradilan

Seperti yang ditunjukkan pada bab sebelumnya, integritas sistem peradilan pidana akan sangat terganggu jika jaksa, hakim dan petugas peradilan berkolusi dengan individu atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti kejahatan satwa liar dan kehutanan. Hal yang sama berlaku jika tugas mereka bertentangan dengan kepentingan pribadi, seperti apabila kerabat atau teman mereka terlibat dalam sektor satwa liar atau kehutanan atau jika mereka dituduh melakukan Kejahatan. Dengan demikian penting bahwa jaksa, hakim, dan petugas peradilan, sama seperti semua pejabat pemerintah, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, dan bahwa terdapat kode yang jelas untuk memastikan integritas penuntutan dan otoritas peradilan dan staf mereka.

Jaksa, hakim, dan petugas peradilan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berbagai cara. Mereka mungkin bertanggung jawab dalam hal manajemen atau bisnis atas kinerja dan produktivitas mereka, mungkin terhadap target dan tujuan yang ditetapkan pemerintah atau masyarakat. Lebih penting lagi, mereka harus bertanggung jawab atas cara mereka menggunakan kekuasaan dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada mereka. "Standar Tanggungjawab Profesional dan Pernyataan Tugas-Tugas dan Hak-Hak Mendasar Jaksa" dan Pedoman "Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan" yang dikeluarkan oleh International Association of Prosecutors berisikan pedoman lebih lanjut akuntabilitas dan integritas jaksa.

Akuntabilitas dan integritas jaksa dan peradilan

- » Apakah undang-undang yang ada menetapkan mekanisme untuk pemantauan dan pengawasan perilaku dan kinerja jaksa, hakim, dan peradilan? Jika demikian, seperti apa mekanisme ini? Bagaimana kinerja jaksa dievaluasi?
- » Apakah ada kode etik dan pedoman etika yang jelas untuk jaksa, hakim, dan petugas peradilan? Jika demikian, saja isinya? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana penegakan dan implementasinya?
- » Apakah jaksa, hakim, dan petugas peradilan menerima Pelatihan tentang kode etik dan pedoman etika? Jika demikian, Kapan mereka menerima Pelatihan seperti itu? Apakah Pelatihan ini diperlukan untuk mendapatkan gelar atau lisensi untuk beracara? Apakah jaksa, hakim, dan petugas peradilan diharuskan menjalani Pelatihan berkala tentang kode etik dan etika?
- » Dapatkah hakim ditugaskan kembali dalam kasus-kasus di mana mungkin terdapat atau ada dugaan bias?
- » Apakah ada jalan bagi warga sipil untuk mengajukan keluhan terhadap jaksa, hakim, dan petugas peradilan? Apakah ada pengawasan mandiri terhadap sistem pengaduan? Bagaimana tuduhan pelanggaran ditangani? Siapa yang menanganinya?
- » Bagaimana jaksa, hakim, dan aparat peradilan dipandang oleh lembaga lain dan oleh masyarakat umum? Apakah mereka dipercaya dipercaya dan dihormati? Jika tidak, mengapa tidak?
- » Apakah ada Strategi atau rencana nasional untuk memerangi korupsi di kejaksan dan otoritas peradilan? Jika demikian, langkah-langkah apa yang terkandung dalam Strategi ini?

Sumber daya tambahan :

UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Akses terhadap Keadilan, Jilid 3 Layanan Penuntutan (2006) 22–24*
 UNODC, *Criminal Justice Assessment Perangkat: Access to Justice, Volume 2 Independensi, Ketidakberpihakan dan Integritas Peradilan (2006) 14–15, 17–18*
 Asosiasi Jaksa Internasional, "Standar tanggung jawab profesional".





IV

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Bab IV



Kejahatan satwa liar dan kehutanan sering melampaui batas internasional. Selundupan sering diperdagangkan antara negara dan diangkut dari sumbernya melalui satu atau lebih titik transit ke tujuan.

Terkadang, rute berputar digunakan untuk menyembunyikan isi, asal, atau tujuan pengiriman yang dilarang. Kelompok kriminal dan penjahat individu dapat berpindah-pindah dengan sering dan menghindari deteksi, penangkapan, dan hukuman dengan beroperasi di berbagai negara. Mereka sering memanfaatkan celah hukum, kelemahan penegakan hukum, dan keengganan otoritas pemerintah untuk terlibat dalam penyidikan lintas batas yang bisa menjadi rumit, mahal, dan memakan waktu.

Lemahnya kapasitas salah satu Negara untuk mengatasi beberapa ancaman ini secara efektif diterjemahkan menjadi kelemahan keseluruhan rezim internasional kerja sama peradilan pidana. Untuk alasan ini, kerja sama internasional yang komprehensif, multi-lembaga, dan fleksibel sangat penting untuk memastikan penyidikan dan penuntutan yang tepat terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Komunitas internasional mengakui kerja sama internasional dalam masalah pidana sebagai kebutuhan mendesak, terutama untuk kejahatan perdagangan yang bersifat transnasional. Hal ini, pada gilirannya, membutuhkan upaya nasional untuk mematuhi standar internasional dan untuk mendorong konvergensi dan kompatibilitas hukum nasional masing-masing.⁸⁹ Konvergensi dan kompatibilitas hukum nasional dapat sangat menantang karena berkaitan dengan banyak hal yang berpotensi sensitif, seperti pertukaran data. Kerja sama internasional yang efektif mungkin juga memerlukan reformasi prosedural yang kompleks untuk mengembangkan kapasitas penyidikan dan penuntutan yang lebih besar di tingkat nasional. Bagi beberapa Negara, membangun kapasitas untuk kerja sama internasional dalam sistem peradilan pidana mereka sendiri dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber daya manusia, teknis atau keuangan yang diperlukan.

Berbagai mekanisme formal untuk kerja sama penegakan hukum dan peradilan internasional dibahas dalam bagian Perangkat ini. Selain berbagai alat praktis yang diadopsi untuk memungkinkan dan meningkatkan kerja sama lintas batas, mekanisme ini juga mencakup banyak jalan hukum untuk memfasilitasi kerja sama internasional, pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis yang dapat ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir (UNTOC) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC).⁹⁰

kerja sama internasional harus dilihat sebagai peluang, bukan hambatan. Jika dilaksanakan dan dilaksanakan dengan benar, kerja sama penegakan hukum berkontribusi pada efektivitas kerja sama peradilan internasional, sehingga memungkinkan Negara untuk mencari bantuan hukum, ekstradisi, pemindahan narapidana, transfer proses pidana dan kerja sama untuk tujuan penyitaan dan perampasan hasil dan aset terkait tindak pidana. kerja sama internasional membuka jalan untuk mendapatkan bukti tambahan, informasi, memulihkan aset, membekukan dana, menyita properti, dan menangkap serta mengembalikan buronan yang apabila tidak dikembalikan kebal dari penuntutan.

⁸⁹ Dibahas di Bab 1, Bagian 1.3 dan 2.7 dari Perangkat ini.

⁹⁰ Lihat lebih lanjut Bab 1, Bagian 2.1 dan 2.3 dari Perangkat ini.

1

Bagian IV

Kerangka hukum dan administrasi untuk kerja sama internasional



1.1 Kerangka hukum untuk kerja sama internasional

kerja sama peradilan pidana internasional formal membutuhkan kerangka kerja nasional dan internasional yang memberikan dasar hukum untuk mencari bantuan dari Negara lain dan menetapkan cara, persyaratan, dan bentuk di mana bantuan tersebut dapat diminta dan diberikan. Sebagian besar Negara memiliki hukum nasional yang mengidentifikasi kondisi dan mekanisme kerja sama penegakan hukum, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana dan sebagainya. Perjanjian bilateral mungkin juga terdapat untuk membuat permintaan atau menerima permintaan dari Negara-negara tertentu.

Meskipun saat ini tidak ada perjanjian internasional khusus untuk mencegah dan memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan, instrumen seperti UNTOC dan UNCAC dapat berfungsi sebagai platform untuk kerja sama internasional dalam hal-hal yang melibatkan korupsi atau kelompok kriminal terorganisir. Berbagai alat kerja sama internasional yang tersedia di bawah Konvensi ini dieksplorasi secara lebih rinci di seluruh Bagian berikut.

Tidak adanya kerangka kerja sama nasional dan internasional dapat mendorong beberapa pelaku kejahatan untuk memindahkan diri mereka sendiri, kegiatan mereka atau aset mereka ke Negara-negara yang tidak memiliki kerangka kerja tersebut. Ini dapat melindungi mereka dari penuntutan dan melindungi aset mereka dari penyitaan. Oleh karena itu, analisis terhadap langkah-langkah penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan seharusnya tidak hanya melibatkan pertanyaan terkait pengaturan kerja sama yang ada tetapi juga mengidentifikasi yurisdiksi-yurisdiksi di mana tidak ada jalan untuk kerja sama formal.



ALAT IV.1

Restitusi dan kompensasi

- » Hukum nasional apa yang mencakup penegakan hukum internasional dan kerja sama peradilan dalam masalah pidana? Apakah undang-undang ini mencakup kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah juga mencakup korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah Negara Anda merupakan pihak pada UNTOC dan UNCAC? Jika demikian, di hukum nasional mana ketentuan kerja sama internasional dari perjanjian-perjanjian ini dilaksanakan?
- » Apakah Negara Anda merupakan pihak dalam perjanjian Bilateral atau Multilateral lainnya yang memungkinkan penegakan hukum atau kerja sama peradilan atau menerima permintaan dari Negara lain?
- » Apakah Negara merupakan pihak dalam perjanjian internasional apa pun mengenai kerja sama polisi internasional (misalnya, perjanjian Bilateral berdasarkan Pola [Bilateral] Perjanjian Kerja Sama Polisi INTERPOL)?
- » Dengan Negara mana yang relevan untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan terdapat jalan formal (atau informal) untuk kerja sama penegakan hukum internasional? Dengan Negara mana yang relevan jalan resmi (atau informal) masih dirasakankurang?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Jilid 4 : Kerja Sama Internasional (2006) 4

1.2 Prosedur dan administrasi

kerja sama internasional formal yang efektif dan efisien membutuhkan sistem operasional dan administrasi yang konsisten dan jelas untuk mengirimkan dan menerima permintaan kerja sama ke dan dari yurisdiksi lain. Untuk alasan ini, sebagian besar Negara memiliki otoritas pusat yang ditunjuk yang berfungsi sebagai titik fokus untuk permintaan kerja sama internasional dan memastikan penyediaan bantuan secara lancar dan cepat. Di sebagian besar Negara, departemen kehakiman dan jaksa agung bertindak sebagai otoritas pusat untuk mengelola kerja sama peradilan pidana dengan Negara lain. kerja sama multilateral juga sering dilakukan melalui kerangka kerja internasional seperti interpol dan WCO.⁹¹

Di beberapa Negara mungkin ada lebih dari satu otoritas yang ditunjuk, masing-masing kompeten untuk elemen atau tahapan kerja sama internasional yang ditentukan. Jika dibentuk dengan baik, otoritas ini dikelola oleh pejabat yang berpengalaman, telah mengembangkan hubungan dengan rekan-rekan di Negara lain, dan mengetahui bagaimana membuat kerangka permintaan untuk memenuhi persyaratan hukum sistem nasional negara lain.

UNTOC dan UNCAC berisi ketentuan-ketentuan yang mengharuskan Negara-negara Pihak untuk menunjuk otoritas pusat dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan bantuan hukum timbal balik dan untuk mengeksekusi permintaan ini atau mengirimkannya ke otoritas yang kompeten untuk dieksekusi. Untuk memastikan bahwa Negara-negara Pihak mematuhi ketentuan-ketentuan ini, kedua Konvensi mengharuskan Negara-negara Pihak untuk memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang otoritas yang berwenang yang ditunjuk untuk menangani permintaan tersebut. Konvensi ini lebih lanjut lagi mendorong Negara-negara Pihak untuk mengirimkan semua informasi yang relevan secara langsung ke dan melalui otoritas yang kompeten, daripada melalui saluran diplomatik yang panjang, yang bagaimanapun, juga tetap dicatat sebagai pilihan alternatif.⁹²

⁹¹ Lihat lebih lanjut, Bab IV, Bagian 2.1 dan 4.3 dari Perangkat ini.

⁹² Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 18(13); Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal. 46(13).

Di bawah tingkat pusat pemerintahan, masing-masing lembaga harus memiliki mekanisme untuk mempersiapkan dan mengelola kasus yang melibatkan kerja sama internasional. Badan-badan yang lebih besar mungkin telah menunjuk staf untuk mempersiapkan permintaan internasional sebelum mengirimkannya ke otoritas pusat. Agar mekanisme ini berfungsi dengan baik, penyidik dan staf garis depan lainnya perlu menyadari kemungkinan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui kerja sama internasional.

Prosedur dan kerangka administrasi untuk kerja sama internasional

- » Apakah Negara telah menunjuk otoritas pusat dengan kekuasaan untuk menerima dan melaksanakan atau mengirimkan permintaan kerja sama internasional? Jika ya, apa otoritasnya, di mana letaknya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana staf dan sumber dayanya?
- » Apakah otoritas pusat telah menerima, mengeksekusi, atau mengirimkan permintaan kerja sama internasional yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika ya, apa yang telah dilakukan: dalam keadaan/kasus apa permintaan dibuat atau diterima?
- » Apakah otoritas pusat telah menerima, mengeksekusi, atau mengirimkan permintaan kerja sama internasional yang melibatkan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika ya, apa yang telah dilakukan: dalam keadaan/kasus apa permintaan itu dibuat atau diterima?
- » Bagaimana Otoritas Manajemen CITES dan unit serta departemen penegakan satwa liar dan kehutanan terkait terlibat dalam kerja sama internasional? Bagaimana mereka bisa mendapatkan dan berbagi Informasi dengan badan lain di luar negeri?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Masalah Lintas Sektor, Volume 4: Kerja Sama Internasional (2006) UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Pemolisian, Jilid 3: Penyidikan Kejahatan (2006).



1.3 Kerja sama internasional informal

kerja sama internasional berfungsi untuk membangun dan menggunakan hubungan lintas batas dan untuk memaksimalkan peluang untuk terlibat dengan rekan-rekan di negara lain. Untuk mendapatkan informasi dengan cepat di sektor satwa liar dan kehutanan, penting bahwa kementerian, departemen pemerintah, lembaga khusus, penegak hukum atau otoritas penuntutan terkait dapat menghubungi rekan atau agen mitra mereka di luar negeri yang dapat mendukung penyidikan. kerja sama informal biasanya melibatkan kontak agensi-ke-agensi, misalnya antara Otoritas Manajemen CITES nasional.⁹³ Informasi yang dipertukarkan harus, tentu saja, dikumpulkan secara sah di kedua yurisdiksi.

Mekanisme kerja sama informal dapat sangat berguna untuk memverifikasi fakta atau memperoleh informasi latar belakang, atau untuk memperoleh informasi sebelum saluran formal digunakan. Ini adalah alat yang efektif untuk memfasilitasi pengiriman informasi secara cepat. Namun, informasi yang diperoleh melalui saluran tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti dan tidak dapat digunakan di pengadilan. Selain itu, mungkin sulit untuk mengidentifikasi kontak dan informasi tidak selalu dapat diungkapkan tanpa ada batasan. kerja sama informal antara lembaga penegak hukum mungkin mengalami keterbatasan dalam hal penggunaan upaya paksa. Namun, berbagi informasi informal dapat meningkatkan peluang kerja sama internasional yang efektif dan sangat berguna untuk menentukan arah penyidikan.

⁹³ Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 1.5 dan Bab II, Bagian 1.3.1 dari Perangkat ini.

kerja sama dapat dipercepat melalui penggunaan alternatif permintaan formal, seperti saluran antar polisi dan mekanisme komunikasi informal, dalam situasi ketika bukti diberikan secara sukarela atau tersedia untuk umum, atau melalui penggunaan tim penyidikan gabungan dengan kapasitas untuk secara langsung mengirimkan dan memenuhi permintaan bantuan informal. Penggunaan saluran informal sebelumnya dapat mendukung permintaan bukti formal. Saluran informal selanjutnya digunakan untuk mendapatkan jenis informasi tertentu yang tidak memerlukan upaya paksa. INTERPOL dan khususnya, basis datanya dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi dan membantu menyebarkan informasi informal antar negara.⁹⁴ Misalnya, Kelompok Kerja Kejahatan Satwa Liar INTERPOL dan Satuan Tugas CITES telah mempromosikan jaringan informal, serta pertemuan UNODC Wildlife Inter-Regional Enforcement (WIRE), yang dapat memainkan peran penting dalam menciptakan koneksi informal di antara praktisi peradilan pidana.



Kerja sama internasional informal

- » Apakah dimungkinkan adanya pertukaran Informasi Informal (dan tidak diminta secara resmi) Antara negara dan yurisdiksi lain?
- » Apakah saluran tersebut digunakan dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan, atau kejahatan lain yang memfasilitasi seperti korupsi, pencucian uang, atau penggelapan pajak?
- » Lembaga dan departemen mana yang terlibat?

1.4 Pola dan praktik kerja sama internasional

Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari langkah-langkah kerja sama internasional yang ada, akan sangat membantu untuk meninjau pola kerja sama internasional untuk masing-masing Negara. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki hubungan kerja yang erat dan lancar dengan yurisdiksi lain, sehingga memungkinkan permintaan untuk diajukan dan ditangani dengan cepat, sementara bekerja sama dengan yurisdiksi lain mungkin lebih sulit. Analisis aliran kasus saat ini dan data yang relevan dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan untuk mengatasi hambatan. Perlu dicatat bahwa kerja sama internasional sering dipengaruhi oleh faktor geografis, historis dan politik yang mungkin berada di luar ruang lingkup analisis.



Pola dan Praktik Kerja Sama Internasional

- » Apakah badan-badan nasional telah terlibat dalam meminta kerja sama dari atau memberikan kerja sama kepada Negara lain dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak satwa liar dan kehutanan (dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan pencucian uang)? Jika demikian, dalam keadaan apa?
- » Apa hasil dari permintaan ini? Hambatan dan kesulitan apa yang biasanya dihadapi lembaga-lembaga dalam mencoba mencari bantuan dari Negara-negara lain?
- » Negara mana yang paling sering meminta kerja sama internasional? Negara lain mana yang paling sering meminta kerja sama internasional?
- » Apakah personel dan petugas yang relevan telah menerima pelatihan tentang kerja sama internasional? Jika ya, apakah baru-baru ini? Apakah pelatihan mencakup modalitas ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, proses transfer pelaku kejahatan, Transfer orang yang dijatuhi hukuman, dan kerja sama internasional dalam penyitaan aset?

Sumber daya tambahan :
UNODC, *Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 76–78 UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Volume 4: Kerja Sama Internasional (2006) 3–4*

⁹⁴ Lihat lebih lanjut Bab IV, Bagian 2.4 dari Perangkat ini.

2

Bagian IV

Kerja sama penegakan hukum internasional

kerja sama penegakan hukum internasional dapat ditingkatkan melalui pengembangan sistem pertukaran informasi yang lebih efektif di tingkat bilateral, regional dan internasional.



2.1 kerja sama penegakan hukum dan pertukaran informasi

UNTOC⁹⁵ dan UNCAC⁹⁶ berisi ketentuan khusus untuk memfasilitasi kerja sama penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini.

Dalam banyak kasus, kerja sama internasional terhalang oleh tidak adanya saluran komunikasi yang jelas. Dalam kasus lain, saluran-saluran ini ada tetapi karena tidak efisien sehingga mencegah pertukaran informasi operasional secara tepat waktu (data yang berguna dalam menanggapi tindak pidana, pelaku atau kelompok kejahatan tertentu) dan informasi umum (data tentang jaringan kriminal, tentang tren dan pola perdagangan, sejauh mana diketahui aktivitas kriminal di sektor tertentu dan modus operandi tipikal). Salah satu hambatan utama bisa jadi adalah pembatasan ketat untuk pertukaran informasi dengan negara lain karena masalah terkait perlindungan privasi, atau kepentingan komersial.

Untuk mengatasi tantangan ini, banyak Negara memiliki pejabat penegak hukum seperti petugas bea cukai, petugas penegak hukum narkoba, petugas penghubung polisi atau atase hukum yang ditempatkan di kedutaan mereka dan komisi tinggi di seluruh dunia. Petugas penghubung penegak hukum memberikan kontak langsung dengan penegak hukum dan otoritas pemerintah Negara tuan rumah. Mereka dapat mengembangkan hubungan profesional, membangun kepercayaan dan umumnya memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum negara-negara yang terlibat. Perlu juga dicatat bahwa mungkin terdapat batasan untuk penggunaan intelijen atau informasi yang diperoleh. Ketika tradisi dan sistem hukum Negara yang bersangkutan sangat berbeda, petugas penghubung dapat memberi nasihat kepada penegak hukum dan otoritas kejaksaan, baik dari negara mereka sendiri dan di negara tuan rumah, tentang cara merumuskan permintaan bantuan. Peran petugas penghubung tersebut dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa petugas memiliki akses, sesuai dengan hukum Negara tuan rumah, ke semua lembaga di Negara tersebut memiliki tanggung jawab terkait.

Berkenaan dengan kerja sama antara otoritas bea cukai secara khusus,⁹⁷ sebagian besar bantuan timbal balik bersifat administratif, di bawah kerangka, atau sejalan dengan prinsip-prinsip,

⁹⁵ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir transnasional, Seni. 26 dan 27.

⁹⁶ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Seni. 48.

⁹⁷ Lihat lebih lanjut, Bagian IV, Bagian 4.3 dari Perangkat ini.

Selain itu, bantuan administratif multilateral dapat mencakup sejumlah bidang seperti kontrol, pengawasan dan analisis tugas, wawancara saksi atas nama pihak lain, pertukaran informasi, kehadiran petugas di depan pengadilan pihak lain dan partisipasi dalam penyidikan di luar negeri.



kerja sama penegakan hukum dan pertukaran Informasi

- » Apakah Negara merupakan Pihak dalam perjanjian Bilateral atau Multilateral tentang kerja sama penegakan hukum dan pertukaran Informasi dan Intelijen?
- » Apakah polisi nasional bekerja sama (secara formal dan informal) dengan lembaga Kepolisian di Negara lain dalam pengumpulan, pertukaran, dan analisis Informasi intelijen kriminal?
- » Bagaimana unit penegak hukum satwa liar dan kehutanan khusus bekerja sama di tingkat bilateral, Regional, dan internasional?
- » Apakah polisi, Bea Cukai, dan lembaga penegak hukum terkait lainnya bertukar Informasi dan intelijen yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan hutan dengan Negara lain? Jika ya, bagaimana dilakukan, seberapa sering dan dalam keadaan apa?
- » Jika kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait dengan korupsi, pencucian uang, atau kejahatan terorganisir, bagaimana satuan penegak hukum yang relevan bekerja sama di tingkat Bilateral, Regional, dan internasional?
- » Apakah Negara memiliki pengaturan dengan Negara lain untuk penempatan atau pertukaran petugas penghubung polisi? Apakah Negara memiliki petugas penghubung penegak hukum yang ditempatkan di Negara lain? Dukungan apa yang telah diterima Negara dari petugas penghubung dan atase lainnya?
- » Apakah ada petugas penghubung polisi Asing yang ditempatkan di Negara? Jika demikian, dari Negara mana?
Sudah pernahkah petugas penghubung ini menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 74–76* UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Masalah Lintas Sektoral, Jilid 4: Kerja Sama Internasional (2006) 18–19*
UNODC, *Panduan Penyusunan Undang-Undang untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar (2018) 50–51*

2.2 Penyidikan bersama

Penyidikan bersama, di mana aparat penegak hukum dari dua atau lebih Negara bekerja sama, dapat menjadi alat yang berguna untuk menyidik dan menuntut kasus-kasus transnasional yang kompleks dan dapat melengkapi jenis kerja sama internasional lainnya. Karena kejahatan satwa liar dan kehutanan sering melibatkan tindak pidana lintas batas, penyidikan bersama bisa sangat efektif dalam membongkar jaringan kriminal. Penyidikan seperti ini memaksimalkan kontak pribadi langsung dan mengatasi masalah praktis bahwa aparat penegak hukum biasanya tidak dapat bekerja lintas batas atau, jika mereka melakukannya, bisa jadi melanggar hukum nasional yang mungkin hanya mengizinkan pejabat nasional untuk menyidik kejahatan.

Penyidikan bersama melibatkan tingkat kerja sama yang lebih besar dan langkah-langkah dari kerja sama penegakan hukum yang diuraikan dalam Bab III, Bagian 2.2 dari Perangkat ini. Terdapat masalah hukum, masalah pendekatan dan kepercayaan di antara lembaga penegak hukum, dan pertanyaan prosedural yang perlu ditangani ketika membuat dan mengoperasikan tim penyidikan gabungan. Selain itu, beberapa masalah praktis ada dalam organisasi penyidikan bersama, termasuk kurangnya

⁹⁸ Dibuka untuk ditandatangani 9 Juni 1977, 1547 UNTS 444 (mulai berlaku 21 Mei 1980). Konvensi Internasional tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanaan (Konvensi Johannesburg) diadopsi oleh Dewan WCO pada Juni 2003 tetapi belum berlaku karena jumlah ratifikasi yang kurang.

standar dan praktik yang diterima, masalah mengenai pengawasan penyidikan dan tidak adanya mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

Perjanjian dan pengaturan yang memungkinkan penyidikan bersama adalah salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini sejauh memungkinkan pejabat penegak hukum asing untuk bekerja bersama atau atas nama mereka rekan-rekan lokal. Pembentukan tim penyidikan gabungan selanjutnya memungkinkan transmisi informasi langsung tanpa perlu saluran bantuan hukum timbal balik formal. UNTOC dan UNCAC juga mendorong Negara-negara Pihak untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral untuk membentuk badan penyidikan bersama lintas yurisdiksi.⁹⁹

Bentuk kerja sama internasional lain yang efektif adalah keterlibatan dalam operasi regional atau internasional gabungan dengan target tertentu, seperti perdagangan satwa liar, untuk jangka waktu tertentu. Selain meningkatkan jumlah tangkapan, pihak-pihak yang berpartisipasi dapat memperoleh manfaat seperti peningkatan saling pengertian, kepercayaan, pembentukan mekanisme kerja sama yang efektif dan peningkatan kapasitas petugas.

Penyidikan bersama

- » Apakah Negara memiliki kerangka hukum atau kerangka kerja lain yang memungkinkan terbentuknya dan keterlibatan dalam penyidikan bersama dengan Negara lain? Jika ya, apakah ini dimungkinkan dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah Negara merupakan Pihak dalam perjanjian atau pengaturan Bilateral atau Multilateral yang mengizinkan pembentukan Penyidikan bersama?
- » Apakah Negara telah berpartisipasi dalam operasi gabungan Regional atau internasional? Jika demikian, apa hasilnya?
- » Apakah penegak hukum dan lembaga terkait satwa liar dan kehutanan pernah terlibat dalam Tim penyidikan gabungan internasional yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan (atau tindak pidana terkait seperti korupsi dan pencucian uang)? Jika demikian, seperti apa pengalamannya?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 73–76 UNODC, Panduan Penyusunan Undang-Undang untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar (2018) 51–52



2.3 kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan

Hasil kejahatan satwa liar dan hutan dan kejahatan terkait, serta barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan ini, sering kali berada di lebih dari satu yurisdiksi. Untuk alasan ini, kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan adalah alat yang penting. Permintaan kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan pada dasarnya adalah permintaan bantuan hukum timbal balik. Dalam kasus ini, penting bahwa negara-negara yang terlibat menyepakati terlebih dahulu tentang bagaimana aset yang disita akan dipulihkan atau dibagikan.

Sejumlah instrumen internasional, termasuk UNTOC¹⁰⁰ dan UNCAC,¹⁰¹ menetapkan rezim komprehensif yang memungkinkan pemulihan aset lintas batas. Pasal VIII, Ayat 1 (b) CITES juga berusaha memastikan bahwa spesies yang terancam punah yang diperdagangkan secara ilegal disita atau, terutama dalam kasus spesimen hidup, dikembalikan.

⁹⁹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal. 49; dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang

¹⁰⁰ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 13

¹⁰¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, Pasal. 54, 55.



Penyitaan dan perampasan

- » Apakah Negara telah menandatangani perjanjian Multilateral atau Bilateral yang menciptakan kewajiban penyitaan dan perampasan aset?
- » Apakah Negara telah menandatangani perjanjian bilateral atau perjanjian lain sehubungan dengan pembagian aset di antara Negara-negara yang terlibat dalam penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah Negara telah membuat, menerima, dan melaksanakan permintaan internasional untuk melacak, membekukan, dan menyita aset yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 40–45

2.4 Peran INTERPOL

INTERPOL berada dalam posisi unik untuk memfasilitasi penegakan hukum lintas batas karena organisasi ini menyatukan negara-negara dalam perang melawan kejahatan internasional. Semua Negara Anggota INTERPOL memiliki Biro Pusat Nasional yang dibentuk untuk bertindak sebagai focal point kerja sama dengan Sekretariat Jenderal, Biro Regional INTERPOL dan biro pusat nasional lainnya. Biro-biro ini juga bertindak sebagai titik penghubung antara otoritas penegak hukum nasional dan Sekretariat Jenderal INTERPOL.

INTERPOL menawarkan sejumlah kemampuan kepada Negara-negara Anggotanya, termasuk saluran komunikasi yang aman, akses ke berbagai pangkalan data terkait kejahatan, koordinasi pertemuan operasional dan penyidikan global dan regional, penerahan operational tim pendukung, penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas dan pengembangan analisis intelijen kejahatan.

Dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar, INTERPOL membantu mendisrupsi dan membongkar jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan dan membantu Negara-negara Anggota dalam menegakkan nasional dan hukum dan perjanjian internasional secara efektif. Program Keamanan Lingkungan, didukung oleh Komite Kepatuhan dan Penegakan Lingkungan dan kelompok kerjanya, terlibat dengan seluruh sektor satwa liar dan rantai pasokan untuk mengidentifikasi modi operandi pelaku dan mengeluarkan pemberitahuan INTERPOL untuk memperingatkan Negara-negara Anggota. Dalam konteks ini, Kelompok Kerja Kejahatan Satwa Liar dan Kelompok Kerja Kejahatan Kehutanan dirancang khusus untuk berbagi informasi dan praktik baik dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kejahatan hutan.

Sehubungan dengan kejahatan kehutanan, INTERPOL mendukung penegakan hukum yang bekerja di seluruh rantai pasokan kayu untuk mendisrupsi jaringan kriminal internasional dan membantu Negara-negara Anggota dengan mengidentifikasi modus operandi dan rute perdagangan, meningkatkan pertukaran intelijen dan mengoordinasikan operasi dan penyidikan lintas batas yang menargetkan jaringan yang terlibat dalam kejahatan kehutanan. Tim ahli khusus menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk lembaga penegak hukum, dengan program regional dan nasional di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Semua ini juga mendukung kolaborasi antara penegak hukum dan sektor publik dan swasta dalam mengatasi pembalakan liar dan kejahatan kehutanan lainnya.

INTERPOL

- » Apakah Negara adalah anggota INTERPOL?
- » Pengalaman apa yang dimiliki Negara dengan Program Keamanan Lingkungan INTERPOL? Jenis kerja sama apa yang telah dilakukan?
- » Apakah lembaga-lembaga Negara responsif terhadap permintaan yang dibuat melalui INTERPOL?
- » Apakah Negara berpartisipasi dalam Komite Kepatuhan dan Penegakan Lingkungan INTERPOL, Kelompok Kerja Kejahatan Satwa Liar dan / atau Kelompok Kerja Kejahatan Kehutanan?
- » Apakah Negara mengetahui, atau telah terlibat dalam, operasi satwa liar yang dipimpin INTERPOL seperti seri Operasi Guntur, atau Pertemuan Pembahasan Kasus Penyidikan dan Analitis Regional (RIACMs)?





Untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antara otoritas bea cukai nasional dan Otoritas Manajemen CITES, WCO dan Sekretariat CITES mendorong anggota-anggota mereka untuk membuat nota kesepahaman (MOU) sebagai bagian dari strategi keseluruhan mereka untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan.

3.1 kerja sama antara bea cukai dan otoritas CITES

*Pedoman Kerja Sama antara Administrasi Bea Cukai dan Otoritas Manajemen CITES yang Mengelola Perdagangan Hewan dan Tumbuhan (CITES) dikembangkan secara khusus untuk tujuan itu.*¹⁰²

MOU nasional antara bea cukai dan Otoritas Manajemen CITES memberikan kerangka kerja yang tepat kepada bea cukai untuk mendapatkan informasi dan bantuan teknis dari Otoritas Manajemen untuk menargetkan kiriman dan pelancong berisiko tinggi. MOU tersebut juga memungkinkan otoritas bea cukai untuk mendukung Otoritas Manajemen dengan memberitahukan situasi atau kiriman yang mencurigakan. Pada gilirannya, peningkatan kuantitas dan frekuensi informasi yang disediakan oleh Otoritas Manajemen memungkinkan bea cukai untuk membedakan dan menargetkan lalu lintas berisiko tinggi secara lebih efektif, sambil memungkinkan sebagian besar lalu lintas yang sah untuk bergerak bebas.

Pada tahun 2014, WCO mendirikan Proyek INAMA, yang berupaya memperkuat kemampuan penegakan otoritas bea cukai di negara-negara di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika sub-Sahara dalam kaitannya dengan perdagangan satwa liar dan penegakan CITES. INAMA berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pelatihan, meningkatkan manajemen risiko dan pemilihan kasus, memperkuat kerja sama antar-lembaga, dan mendukung penyusunan dan implementasi MOU.

Pada tahun 2014 juga, WCO mengadopsi Deklarasi Dewan Kerja Sama Bea Cukai tentang Perdagangan Satwa Liar Ilegal yang menunjukkan komitmen komunitas bea cukai global untuk mengatasi perdagangan satwa liar secara tepat waktu, koheren, dan terkoordinasi. Deklarasi ini menekankan pentingnya pertukaran intelijen dan kerja sama yang erat antara tingkat nasional dan internasional.

¹⁰² Lihat juga Bagian I, Bagian 1.5 dari Perangkat ini.

KERJA SAMA ANTARA BEA CUKAI DAN OTORITAS MANAJEMEN CITES

- » kerja sama apa, jika ada, yang ada Antara Bea Cukai dan Otoritas Manajemen CITES?
- » Apakah MOU nasional Antara Bea Cukai dan Otoritas Manajemen CITES telah ditetapkan? Jika demikian, apa yang dinyatakan di dalamnya?
- » Apakah MOU mencerminkan Pedoman Kerja Sama antara Administrasi bea cukai dan Otoritas Manajemen CITES yang Mengelola Perdagangan Hewan dan Tumbuhan (CITES)?

Sumber daya tambahan :

WCO, Pedoman Kerja Sama Antara Administrasi Bea Cukai dan Otoritas Manajemen CITES yang Mengelola Perdagangan Hewan dan Tumbuhan (CITES). Nomor referensi WCO Lampiran IV ke Doc. 41.827 (diklasifikasikan, hanya tersedia untuk anggota WCO)



ALAT
IV.9

3.2 ENVIRONET

ENVIRONET adalah salah satu aplikasi Customs Enforcement Network Communication (CENcomm), yang hanya dapat diakses oleh grup pengguna tertutup. ENVIRONET berfungsi sebagai alat komunikasi real-time global untuk pertukaran informasi tentang masalah lingkungan bagi petugas bea cukai, otoritas penegak hukum lainnya dan organisasi internasional, serta jaringan regional mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama satu sama lain dan berbagi informasi untuk digunakan dalam perang melawan tindak pidana terkait lingkungan yang bersifat lintas batas. Informasi yang dikirimkan melalui ENVIRONET dienkripsi dan diamankan. Informasi yang berkaitan dengan semua komoditas yang berpotensi merusak lingkungan dan yang dicakup oleh perjanjian lingkungan multilateral terkait perdagangan dapat dipertukarkan melalui ENVIRONET. Termasuk di dalamnya fauna dan flora yang terancam punah, dan isu-isu seperti zat perusak ozon, limbah dan bahan berbahaya, pestisida, senjata kimia, dan organisme hidup yang dimodifikasi.

CITES telah mengintegrasikan penegakan hukumnya ke ENVIRONET, sehingga sekarang ENVIRONET juga memiliki Salinan notifikasi CITES mengenai masalah penegakan hukum, peringatan yang dikeluarkan oleh Sekretariat CITES, contoh izin dan sertifikat CITES, dan bahan dan informasi terkait lainnya.

ENVIRONET

- » Apakah Bea Cukai, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki akses ke ENVIRONET?
- » Apakah Bea Cukai, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya berbagi Informasi seperti Tren dan rute baru, dan metode penyembunyian melalui ENVIRONET?
- » Bagaimana hasil dan seperti apa pengalamannya?



ALAT
IV.10

3.3 Jaringan dan basis data Penegakan Kepabeanaan

WCO telah membentuk Global Customs and Enforcement Network (CEN) dan National Customs Enforcement Network (nCEN). CEN adalah jaringan global untuk mengumpulkan data dan informasi terkait bea cukai. Jaringan ini tersedia untuk otoritas bea cukai di seluruh dunia dan memungkinkan mereka untuk bertukar informasi tentang tindak pidana terkait bea cukai dan untuk berbagi informasi secara tepat waktu, andal, dan aman. CEN mengandalkan teknologi enkripsi untuk melindungi komunikasi dan transfer data.

Basis data CEN berisi informasi penyitaan non-nominal seperti tanggal, lokasi, spesies, jumlah, asal, tujuan, alat angkut, metode penyembunyian, dan dokumentasi CITES. Layanan bea cukai di seluruh dunia melaporkan penyitaan mereka secara sukarela. Kantor penghubung intelijen regional menganalisis data dan menerbitkan laporan analitik secara berkala. Komponen komunikasi memfasilitasi kerja sama antara pengguna di tingkat regional dan internasional, sementara Situs Web Penegakan yang ditautkan memberi mereka pilihan untuk berkonsultasi dengan berbagai publikasi terkait penegakan hukum seperti peringatan, laporan analitis, dan buletin informasi.

Jaringan Penegakan Kepabeanaan nasional (nCEN) adalah sistem yang dikembangkan oleh WCO untuk membantu otoritas bea cukai dalam hal pengumpulan dan penyimpanan informasi penegakan hukum di tingkat nasional, dengan kemampuan tambahan untuk bertukar informasi ini di tingkat regional dan internasional. Dengan memasang nCEN, administrasi memiliki kemampuan untuk mengelola informasi tentang semua aspek fungsi penegakan hukum mereka (termasuk penyitaan, tindak pidana dan orang atau entitas bisnis yang dicurigai). Information Communication Interface (Icomm), yang termasuk dalam aplikasi nCEN, memungkinkan pihak berwenang untuk bertukar data dengan pengguna nCEN lain sepanjang ada dasar hukumnya, atau untuk mentransfer komponen data non-nominal langsung ke database WCO CEN global.



Jaringan dan pangkalan data Penegakan Kepabeanaan WCO

- » Apakah Bea Cukai, polisi, dan otoritas penegak hukum lainnya memiliki akses ke CEN?
- » Apakah penyitaan satwa liar secara teratur dilaporkan ke CEN?
- » Apakah Informasi penyitaan yang tersedia dianalisis? Jika demikian, oleh siapa?
- » Apakah administrasi bea cukai menggunakan aplikasi CEN untuk mengumpulkan dan menyimpan Informasi tentang penyitaan/orang yang dicurigai/entitas bisnis yang melakukan kejahatan?

4

Bagian IV

kerja sama peradilan

Bagian ini mengeksplorasi modalitas kerja sama peradilan internasional dalam masalah pidana, yaitu ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, transfer proses pidana dan transfer narapidana.



Modalitas ini didefinisikan dalam perjanjian internasional seperti UNTOC dan UNCAC. Keterlibatan otoritas administratif dalam prosedur yang dijelaskan dalam Bagian ini dapat bervariasi untuk setiap Negara.¹⁰³ Lembaga penegak hukum seringkali dilibatkan dalam pelaksanaan perintah peradilan atas dasar permintaan oleh otoritas yang berwenang.

4.1 Bantuan hukum timbal balik

Bantuan hukum timbal balik adalah mekanisme yang memungkinkan suatu Negara untuk memberikan bantuan kepada Negara lain selama penyidikan, penuntutan atau proses peradilan lainnya. Untuk memungkinkan penegak hukum dan otoritas peradilan untuk berkolaborasi secara internasional, Negara-negara telah memberlakukan undang-undang yang mengizinkan mereka untuk menyediakan kerja sama tersebut. Di masa lalu, bantuan hukum timbal balik sebagian besar dilakukan melalui sistem diplomatik surat rogatori; saat ini sebagian besar diatur dalam perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian semacam itu biasanya mencantumkan jenis bantuan yang akan diberikan, hak-hak Negara yang meminta dan diminta terkait terhadap ruang lingkup dan cara kerja sama, hak-hak terduga pelaku tindak pidana dan prosedur yang akan dilakukan diikuti dalam membuat dan melaksanakan permintaan. Berbagi informasi dan komunikasi antar-lembaga juga penting untuk memfasilitasi bantuan hukum timbal balik dan memungkinkan untuk memberikan bantuan tanpa permintaan formal.¹⁰⁴

4.1.1 Persyaratan dan prosedur

Bantuan hukum timbal balik dapat dilakukan berdasarkan perjanjian multilateral atau bilateral, serta hukum nasional yang memberikan efek penuh pada perjanjian yang relevan atau memungkinkan bantuan timbal balik tanpa adanya perjanjian tersebut. Instrumen internasional seperti UNTOC dan UNCAC memberikan ketentuan terperinci mengenai bantuan hukum timbal balik.¹⁰⁵ Alat IV.12 dalam Perangkat ini menjabarkan persyaratan utama berdasarkan perjanjian ini.

¹⁰³ Lihat Lebih Lanjut Bab IV, Bagian 1.2 dari Perangkat ini

¹⁰⁴ Lihat Bab IV, Bagian 1.3 dari Perangkat ini.

¹⁰⁵ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 18; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pasal. 46

Berdasarkan ketentuan ini bantuan dapat diminta untuk mengambil bukti atau pernyataan, melaksanakan pelayanan dokumen peradilan, melaksanakan penggeledahan dan penyitaan, memeriksa objek dan situs, memberikan informasi, bukti dan evaluasi ahli, dokumen dan catatan, melacak hasil kejahatan, memfasilitasi kehadiran saksi, dan segala jenis bantuan lainnya yang tidak dilarang oleh hukum domestik. Ketentuan ini selanjutnya juga berlaku untuk kerja sama internasional dalam identifikasi, pelacakan, dan penyitaan hasil kejahatan, properti, dan instrumentalitas kejahatan untuk tujuan penyitaan.

Beberapa ketentuan ini melengkapi perjanjian lain yang ada dan memberikan dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum timbal balik sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Konvensi. Beberapa ketentuan lain berlaku jika Para Pihak tidak terikat oleh perjanjian lain (atau, jika mereka terikat, apabila Para Pihak menyetujui prosedur di mana lebih mudah untuk melakukannya).

UNTOC dan UNCAC mengizinkan Negara-negara Pihak untuk menolak bantuan hukum timbal balik dalam kondisi tertentu tetapi juga memastikan bahwa bantuan tidak dapat ditolak atas dasar kerahasiaan bank atau untuk tindak pidana yang dianggap melibatkan masalah fiskal. Negara-negara diharuskan untuk memberikan alasan penolakan untuk membantu. Jika tidak, Negara harus melaksanakan permintaan dengan cepat dan mempertimbangkan kemungkinan tenggat waktu yang dihadapi otoritas yang meminta.

Bantuan hukum timbal balik dapat terhalang oleh fakta bahwa hukum acara Negara yang bekerja sama bisa sangat bervariasi. Untuk memfasilitasi upaya ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Model Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Model Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga telah disiapkan oleh UNODC.



Bantuan hukum timbal balik : Persyaratan dan prosedur

- » Hukum nasional mana yang mendasari penyediaan bantuan hukum timbal balik?
- » Untuk kejahatan apa bantuan hukum timbal balik dapat diberikan? Apakah termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Dalam perjanjian Multilateral mana terkait bantuan hukum timbal balik saja Negara menjadi Pihak?
- » Perjanjian Bilateral apa tentang bantuan hukum timbal balik yang dimiliki Negara dengan Negara lain? Apakah ada Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian tetapi dirasakan penting untuk memiliki perjanjian dengan negara tersebut?
- » Apakah perjanjian bantuan hukum timbal balik yang ada mencakup tindak pidana satwa liar dan kehutanan, serta tindak pidana yang dijabarkan dalam UNTOC dan UNCAC (jika Negara adalah Negara Pihak untuk Konvensi ini)?
- » Berdasarkan hukum nasional, apakah Negara memerlukan perjanjian untuk bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana? Apakah bantuan dimungkinkan tanpa perjanjian? Jika demikian, mekanisme apa yang digunakan untuk mengajukan dan menerima permintaan bantuan hukum timbal balik?
- » Apa Persyaratan utama Negara untuk mengabulkan permintaan bantuan? Apakah ada Persyaratan kriminalitas ganda berdasarkan hukum nasional dan perjanjian Bilateral?
- » Berdasarkan hukum nasional, atas dasar apa bantuan hukum timbal balik dapat ditolak?
- » Apakah Negara telah menunjuk otoritas pusat dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk menyusun dan menerima permintaan bantuan hukum timbal balik, baik untuk mengeksekusi atau mengirimkannya?
- » Jika ada, lembaga lain mana yang berurusan dengan bantuan hukum timbal balik?
- » Bagaimana proses ini dikoordinasikan? Apakah personel terkait telah dilatih dalam Persyaratan hukum bantuan hukum timbal balik?

Bantuan hukum timbal balik : Persyaratan dan prosedur

- » Apakah Negara telah mengajukan dan menerima permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika ya, kasus seperti apa yang melibatkan permohonan ini dan bagaimana pengalaman dengan permintaan ini?
- » Apakah Negara biasanya dapat memastikan bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik dilaksanakan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Negara yang meminta?

Sumber daya tambahan:

Majelis Umum PBB, Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, UN Doc A/RES/45/117 (14 Desember 1990) UNODC, Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 68–73 UNODC, Panduan Penyusunan Undang-Undang untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar (2018) 49–50

4.1.2 Surat rogatori

Dengan tidak adanya perjanjian atau perjanjian, atau hukum nasional yang menyatakan sebaliknya, beberapa Negara menggunakan surat rogatori sebagai metode kebiasaan internasional untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri. Surat rogatory, suatu praktik yang sudah berusia seabad berdasarkan prinsip comity (di mana pengadilan mengakui dan menegakkan keputusan satu sama lain), adalah permohonan dari pengadilan satu Negara ke pengadilan Negara lain untuk meminta tindakan atau informasi. Permintaan tersebut awalnya dapat melewati saluran yang dibuka antara masing-masing kementerian luar negeri, kemudian mencapai lembaga penegak hukum nasional dan / atau pengadilan. Surat rogatori dapat digunakan di Negara-negara di mana perjanjian multilateral atau bilateral tentang bantuan hukum timbal balik tidak berlaku untuk mempengaruhi layanan proses atau untuk mendapatkan bukti jika diizinkan oleh hukum Negara lain.

Surat Rogatori

- » Departemen mana yang berurusan dengan Surat Rogatori untuk bantuan internasional? Departemen/petugas mana yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengeluarkan permintaan bantuan hukum timbal balik tersebut ?
- » Rata-rata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan dan memproses surat Rogatori?» Apakah surat Rogatori digunakan dalam kaitannya dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Jika demikian, bagaimana dan dalam kasus apa? Jika tidak, mengapa tidak?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Jilid 4: kerja sama Internasional (2006)



4.2 Ekstradisi

Ekstradisi adalah proses di mana satu Negara (Negara yang diminta) menyerahkan seseorang kepada Negara lain (Negara yang meminta) untuk tujuan penuntutan pidana atau untuk penegakan hukuman pidana sehubungan dengan kejahatan yang dapat diekstradisi. Ekstradisi orang tersebut difasilitasi melalui proses peradilan formal, seringkali membutuhkan dasar pembuktian untuk ekstradisi, meskipun keputusan akhir tentang penyerahan umumnya berada di tangan cabang eksekutif, seperti Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung.

Konvensi multilateral yang berkaitan dengan ekstradisi telah dibuat dalam kerangka berbagai organisasi regional dan internasional lainnya. UNTOC¹⁰⁶ dan UNCAC¹⁰⁷ berisi ketentuan ekstradisi yang dapat digunakan sehubungan dengan proses pidana yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Dalam lingkup kejahatan yang berada dalam cakupannya, konvensi ini menetapkan standar minimum dasar

¹⁰⁶ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Seni. 16.

¹⁰⁷ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Seni. 44.

untuk ekstradisi dan juga mendorong adopsi berbagai mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses ekstradisi. Selain itu, sebagian besar yurisdiksi memiliki perjanjian bilateral yang memungkinkan ekstradisi ke dan dari Negara-negara tertentu. Di beberapa Negara, undang-undang ekstradisi atau undang-undang serupa menetapkan persyaratan secara domestic untuk administrasi permintaan ekstradisi ke dan dari Negara lain.

Masih banyak situasi di mana instrumen hukum nasional dan internasional yang ada tidak mencukupi atau tidak mencakup ekstradisi untuk kejahatan satwa liar dan kehumanan. Selain itu, bahkan ketika tersedia, proses ekstradisi bisa menjadi rumit dan masih ada banyak hambatan untuk mendapatkan ekstradisi yang cepat dan dapat diprediksi. Untuk mengatasi masalah ini, perjanjian model seperti Perjanjian Model PBB tentang Ekstradisi, yang diadopsi oleh Majelis Umum, tersedia bagi Negara-negara yang ingin menandatangani perjanjian bilateral baru. Model Undang-Undang untuk Ekstradisi juga telah dikembangkan.¹⁰⁸



Ekstradisi

- » Hukum nasional mana yang mengatur ekstradisi?
- » Tindak pidana apa yang dapat diekstradisi? Apakah kejahatan satwa liar dan kehumanan dapat diekstradisi? Jika tidak, mengapa tidak? Apakah perjanjian yang ada mencakup tindak pidana satwa liar dan kehumanan, serta kejahatan lain yang terdapat dalam UNTOC dan UNCAC (jika Negara adalah Negara Pihak dalam Konvensi ini)?
- » Negara merupakan Pihak pada Perjanjian Multilateral terkait ekstradisi apa saja?
- » Perjanjian Bilateral apa tentang ekstradisi yang dimiliki Negara dengan Negara lain? Apakah ada Negara yang tidak termasuk tetapi dirasakan penting untuk memiliki perjanjian dengan negara tersebut?
- » Apakah hukum nasional Negara mensyaratkan perjanjian untuk mengekstradisi seseorang? Apakah ekstradisi seseorang secara sah ke Negara lain dimungkinkan tanpa perjanjian? Jika demikian, mekanisme apa yang digunakan untuk mengajukan dan menerima permintaan ekstradisi?
- » Apa Persyaratan utama Negara untuk mengabulkan permintaan ekstradisi? Apakah ada Persyaratan kriminalitas ganda berdasarkan hukum nasional dan perjanjian Bilateral?
- » Apakah Negara mengakui nilai hukum Surat perintah penangkapan Negara lain?
- » Menurut hukum nasional, atas dasar apa ekstradisi dapat ditolak? Apakah ada pengecualian berdasarkan jenis tindak pidana atau hukuman tertentu, pada masalah hak asasi manusia, pada sifat politik dari tindak pidana tersebut atau pada larangan mengekstradisi warga negara?
- » Apakah Negara telah menunjuk otoritas pusat dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk menyusun dan menerima permintaan ekstradisi dan untuk mengeksekusi atau mengirimkannya? Apakah terdapat lembaga lain berurusan dengan ekstradisi?
- » Bagaimana proses ini dikoordinasikan? Apakah personel yang relevan telah dilatih dalam Persyaratan hukum ekstradisi?
- » Apakah Negara biasanya dapat memastikan bahwa permintaan ekstradisi dilaksanakan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Negara yang meminta?
- » Apakah Negara pernah mengajukan dan menerima permintaan ekstradisi yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehumanan? Jika ya, kasus seperti apa yang melibatkan permintaan ini dan seperti apa pengalaman dengan permintaan ini?

Sumber daya tambahan :

Majelis Umum PBB, 45/116. Model Perjanjian Ekstradisi PBB Doc A/RES/45/116 (14 Desember 1990)

Majelis Umum PBB, 52/88. kerja sama internasional dalam masalah pidana, Dokumen PBB A/RES/52/88 (4 Februari 1998), 2–4 dan Lampiran: Ketentuan pelengkap untuk Model Perjanjian Ekstradisi

UNODC, Model UU tentang Ekstradisi (2004)

UNODC, Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016) 63–68. UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Jilid 4: kerja sama Internasional (2006) 8–10

UNODC, Panduan Penyusunan Undang-Undang untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar (2018) 50

¹⁰⁸ UNODC, Model Law on Extradition (2004), https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf

4.3 Transfer proses pidana

Dalam konteks proses yang melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan, situasi dapat muncul di mana dimungkinkan bagi lebih dari satu Negara untuk memulai atau melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Dalam keadaan ini, untuk membuat proses pidana lebih efisien, mungkin diinginkan untuk mentransfer kasus ke yurisdiksi yang paling cocok untuk menyidangkan kasus atau mengkonsolidasikan proses yang melibatkan beberapa yurisdiksi di satu tempat. Dalam beberapa kasus, ini mungkin satu-satunya cara untuk memastikan penuntutan.

Kemungkinan mentransfer proses pidana dari satu Negara ke Negara lain dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan penuntutan, ketika misalnya, Negara lain mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan proses hukum. Mekanisme ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penuntutan di Negara yang memulai proses sebagai pengganti ekstradisi. Dalam kasus lain, mungkin tepat untuk mentransfer proses ke Negara di mana terdakwa adalah warga negara, penduduk habitual, atau memiliki hubungan dekat.

UNTOC dan UNCAC berisi ketentuan khusus untuk mendorong transfer proses pidana untuk penuntutan kejahatan berdasarkan konvensi "*dalam kasus di mana transfer tersebut dianggap untuk kepentingan administrasi peradilan yang tepat, khususnya di mana beberapa yurisdiksi terlibat, dengan maksud untuk memusatkan penuntutan*".¹⁰⁹

Transfer proses pidana

- » Apakah transfer proses pidana ke yurisdiksi lain dimungkinkan dan diizinkan berdasarkan hukum nasional? Hukum nasional mana yang mengatur transfer proses pidana? Pembatasan apa yang diberlakukan hukum nasional pada transfer tersebut?
- » Untuk kejahatan apa saja transfer proses pidana dapat dilakukan? Apakah ini termasuk juga untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah Negara merupakan pihak dalam perjanjian Multilateral atau Bilateral yang memungkinkan transfer proses pidana dalam masalah pidana ke dan dari Negara lain?
- » Apakah Negara menerima dan mengajukan permintaan untuk transfer proses pidana? Jika demikian, apakah salah satu dari permintaan ini melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Jilid 4: kerja sama Internasional (2006)* 13

UNODC, *Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016)* 74–78

UNODC & UNICRI, *Panduan Teknis Konvensi Melawan Korupsi (2009)* 172

Konferensi PBB Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, *Kelompok Kerja Kerja Sama Internasional, Pertimbangan praktis, praktik baik dan tantangan yang dihadapi di bidang pengalihan proses pidana sebagai bentuk terpisah dari kerja sama internasional dalam masalah pidana, Makalah latar belakang disiapkan oleh Sekretariat, PBB Doc CTOC/WG.3/2017/2 (7 Agustus 2017)*



ALAT
IV.15

4.4 Pemindahan orang yang dijatuhi hukuman

Pemindahan orang yang dijatuhi hukuman memungkinkan seseorang yang dihukum dan dijatuhi hukuman penjara yang melibatkan perampasan kebebasan di satu Negara (Negara yang menjatuhkan hukuman) untuk menjalani hukuman mereka di Negara lain (Negara pelaksana). Pemindahan semacam itu sering didorong oleh pertimbangan hak asasi manusia; misalnya, dengan memungkinkan orang untuk menjalani hukuman mereka di lingkungan di mana tujuan rehabilitasi dan reintegrasi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Transfer biasanya dilakukan ke Negara pelaksana di mana orang tersebut memiliki ikatan sosial, terutama berdasarkan ikatan kebangsaan dan keluarga. Keputusan untuk memindahkan orang yang dijatuhi hukuman juga dapat dibuat atas dasar kemanusiaan atau alasan belas kasih, termasuk biaya yang dikeluarkan

¹⁰⁹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Seni. 21; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Art. 47.

dengan keluarga yang mengunjungi dan mendukung kerabat yang dipenjarakan di luar negeri, layanan konsuler yang tidak memadai, kebutuhan medis atau kesehatan mental, keluhan penganiayaan, atau di mana kondisi di institusi di mana orang tersebut dihukum dan dijatuhi hukuman berada di bawah standar internasional.

Untuk otoritas pemasyarakatan di negara yang menjatuhkan hukuman, pemindahan orang yang dijatuhi hukuman memberikan jalan untuk meringankan beban yang terkait dengan penahanan warga negara asing yang dihukum oleh pengadilan mereka. Kesulitan menyediakan layanan konsuler, hubungan internasional, dan ketidakmampuan untuk mengawasi orang yang dijatuhi hukuman setelah pembebasan mereka juga memainkan peran dalam kasus-kasus yang melibatkan pemindahan orang yang dijatuhi hukuman.

UNTOC dan UNCAC mendorong penciptaan mekanisme yang memungkinkan dan memfasilitasi pemindahan orang yang dijatuhi hukuman dari satu Negara ke Negara lain. Kedua Konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan khusus yang mendorong Negara-negara Pihak untuk mengadakan "perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral tentang pemindahan orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan" konvensi ini ke wilayah mereka.¹¹⁸



ALAT
IV.16

Pemindahan orang yang dijatuhi hukuman

- » Apakah pemindahan orang yang dijatuhi hukuman ke yurisdiksi lain mungkin dan diizinkan berdasarkan hukum nasional? Hukum nasional mana yang mengatur pemindahan orang yang dijatuhi hukuman? Pembatasan apa yang diberlakukan hukum nasional untuk pemindahan semacam itu?
- » Untuk tindak pidana apa saja pemindahan orang yang dijatuhi hukuman dapat dilakukan? Apakah termasuk kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah Negara memiliki otoritas pusat yang ditunjuk dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengawasi pemindahan orang yang dijatuhi hukuman?
- » Apakah Negara merupakan pihak dalam perjanjian Multilateral atau Bilateral yang memungkinkan pemindahan orang yang dijatuhi hukuman karena masalah pidana ke dan dari Negara lain?
- » Apakah Negara menerima dan mengajukan permintaan untuk pemindahan orang yang dijatuhi hukuman? Jika demikian, apakah salah satu dari permintaan ini melibatkan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana permintaan ini Diproses? Kesulitan apa yang dihadapi?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional: Alat Penilaian Kebutuhan (2016)* 74–78 UNODC, *Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Volume 4: Kerja Sama Internasional (2006)* 12

110 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Seni. 17; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Pas. 45.

5

Bagian IV

Inisiatif regional dan khusus

Selain langkah-langkah kerja sama internasional umum yang ditetapkan di bagian sebelumnya dari Perangkat ini, beberapa inisiatif khusus telah dibuat untuk menangani berbagai aspek kejahatan satwa liar dan kehutanan atau dengan fokus pada wilayah geografis tertentu



5.1 Penegakan Hukum dan Tata Kelola Kehutanan

Proses Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) adalah inisiatif regional yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia dan diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah negara produsen dan konsumen. Tujuan dari proses FLEG adalah untuk meningkatkan tata kelola di sektor kehutanan, untuk mendorong dialog dan kerja sama internasional antara produsen kayu dan negara-negara konsumen, dan untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan ilegal dengan meningkatkan keterhubungan dan menyelaraskan peraturan. Di sisi pasokan, proses FLEG mengatasi penyebab mendasar dari pembalakan liar dan korupsi. Di sisi permintaan, proses ini memberikan pengakuan tanggung jawab negara-negara konsumen untuk menempatkan kontrol pada impor dan konsumsi untuk memastikan bahwa hanya kayu legal yang memasuki pasar negara-negara konsumen.

Proses FLEG regional diakui secara luas karena memobilisasi komitmen politik untuk melakukan tindakan perbaikan di negara-negara yang berpartisipasi dalam proses ini. Mereka telah menciptakan kemitraan antara berbagai lembaga donor dan pembangunan yang memiliki tujuan yang sama untuk peningkatan tata kelola kehutanan. Proses regional pertama diluncurkan di Asia Tenggara pada tahun 2001. Deklarasi Bali dan diskusi lanjutannya telah menghasilkan kesepakatan tentang upaya nasional dan regional khusus yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap hutan. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah membentuk badan dan program kerja regional untuk mengimplementasikan Deklarasi tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, inisiatif regional lainnya telah dibentuk oleh Negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Eropa, dan di tempat lain di Asia. Meskipun kemajuan di lapangan terkadang lambat dan kemitraan regional memiliki tingkat daya tahan yang berbeda, secara keseluruhan proses tersebut menunjukkan kepemilikan regional dan secara teratur mengarah pada tindakan di tingkat nasional atau subregional.

Deklarasi FLEG adalah 'hukum lunak', yang berarti deklarasi kebijakan aspiratif. Namun beberapa Negara telah memperkenalkan undang-undang nasional untuk menciptakan kerangka kerja yang mengikat. Di negara-negara konsumen, contoh yang paling terkenal adalah amandemen 2008 untuk Lacey Act, undang-undang utama di Amerika Serikat untuk perdagangan satwa liar. Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa 2005 kemudian berkontribusi untuk meloloskan Peraturan Kayu UE pada tahun 2010, yang mengharuskan pedagang kayu untuk melakukan "uji tuntas" ketika menjual kayu di pasar Uni Eropa dan juga melarang penjualan kayu yang dipanen secara ilegal di Uni Eropa. Contoh selanjutnya adalah Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012 (UU Pelarangan Pembalakan Liar Australia 2012).

Dalam kerangka FLEGT Uni Eropa, sejumlah Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) telah ditandatangani dengan negara-negara produsen. Perjanjian perdagangan bilateral yang mengikat antara UE dan negara-negara pengekspor kayu di luar UE ini berusaha untuk menjamin bahwa setiap kayu yang diekspor dari negara penghasil kayu ke UE berasal dari sumber legal dan untuk membantu negara mitra menghentikan ilegal penebangan dengan memperbaiki tata kelola dan regulasi hutan. Setelah VPA mulai berlaku, itu mengikat secara hukum di kedua sisi. Jika kesepakatan yang mengikat belum tercapai, UE mencari kerja sama melalui Mekanisme Koordinasi Bilateral (BCM) di bawah payung FLEG.

Sejumlah Negara dengan peran penting dalam produksi hasil hutan dan rantai pemasaran terkait masih hanya sedikit berkomitmen untuk mengatasi masalah ini. Sebagian dari industri yang beroperasi di negara-negara yang terkena dampak pembalakan liar dan kejahatan hutan lainnya terus mengekspor produk ke pasar yang kurang sensitif terhadap lingkungan atau untuk menggunakan produk untuk konsumsi domestik.



Proses FLEG Regional

- » Apakah Negara berpartisipasi dalam salah satu proses FLEG Regional?
- » Apakah deklarasi dan resolusi lain oleh proses FLEG Regional telah diperhitungkan dalam kebijakan nasional, undang-undang, peraturan, dan sebagainya?
- » Apakah Negara telah menandatangani perjanjian Bilateral atau Multilateral dengan produsen kayu atau Negara konsumen untuk mencegah penebangan liar dan memantau perdagangan kayu? Jika ya, apakah perjanjian ini mengikat? Bagaimana mereka telah diimplementasikan dan apa dampaknya?

Sumber daya tambahan :

Fasilitas FLEGT UE <https://www.euflegt.efi.int/home>

Kleinschmit et al (eds.), Pembalakan Liar dan Perdagangan Kayu Terkait – Dimensi, Pendorong, Dampak dan Tanggapan, Bab 7, Seri Dunia IUFRO Volume 35 (2016), 119–132

5.1 Jaringan penegakan satwa liar

Pengembangan kapasitas dan pembagian sumber daya dapat difasilitasi oleh jaringan penegakan satwa liar khusus (WENs). Beberapa jaringan penegakan satwa liar regional, dengan berbagai tingkat formalitas dan organisasi, telah muncul untuk memfasilitasi kerja sama lintas batas di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam mencegah dan menangani kejahatan satwa liar di seluruh dunia. Jaringan ini, bersama dengan kelompok penegak satwa liar lainnya, dapat mengoordinasikan tanggapan regional terhadap perdagangan ilegal spesies yang dilindungi. Mereka menyediakan mekanisme di mana Negara dapat berbagi informasi dan praktik terbaik dan dapat membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum di dalam wilayah untuk memerangi kejahatan satwa liar.

Sejauh ini, WENs telah didirikan di Asia, Afrika dan Eropa serta di Amerika Selatan, Tengah dan Utara. Sekretariat CITES mengelola direktori WEN yang mencantumkan lebih dari selusin WEN regional.

Jaringan penegakan satwa liar

- » Apakah Negara berpartisipasi dalam salah satu jaringan penegakan satwa liar Regional? Jika ya, partisipasi seperti apa dan hasil apa yang telah dicapai?
- » Apakah deklarasi dan pedoman praktik terbaik yang dikembangkan oleh jaringan penegakan satwa liar regional telah diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, undang-undang, peraturan, prosedur administratif, dan sebagainya?

Sumber daya tambahan :

Direktori CITES untuk jaringan penegakan satwa liar (WEN) (November 2021): https://cites.org/eng/resources/enforcement_focal_points
ICCWC, Pedoman ICCWC untuk Jaringan Penegakan Satwa Liar: Alat penilaian mandiri untuk penggunaan Regional (Mei 2020)



5.3 TWIX –Pertukaran Informasi Perdagangan Satwa Liar

Trade in Wildlife Information Exchange (TWIX) adalah alat daring yang dikembangkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama internasional antara aparat penegak hukum di seluruh Eropa dan Afrika. Saat ini, empat platform TWIX sedang beroperasi: EU-TWIX, AFRICAN-TWIX, Southern African Development Community (SADC)-TWIX dan Eastern Africa-TWIX.

Setiap platform TWIX terdiri dari dua komponen utama: milis dan situs web. Situs web ini menampung basis data tentang penyitaan satwa liar nasional dan regional yang dilakukan di negara-negara yang berpartisipasi. Petugas menyerahkan data penyitaan untuk diakses dan dianalisis oleh sesama pejabat. Untuk data kepabeanan, transfer dilakukan melalui WCO untuk beberapa Negara Anggota. Selain basis data, situs web ini memberikan akses ke berbagai sumber daya seperti informasi untuk mendukung petugas penegak hukum, panduan identifikasi, materi pelatihan dan direktori termasuk daftar pusat penyelamatan untuk spesimen yang disita. Selain itu, situs web tersebut berisi informasi tentang lembaga forensik serta harga umum spesimen satwa liar yang diperdagangkan.

Milis memungkinkan petugas penegak hukum (termasuk polisi, Otoritas Manajemen CITES, dan layanan inspeksi lingkungan) untuk berkomunikasi, mencari bantuan, dan saling mengingatkan tentang tindakan penegakan hukum yang relevan. Ini adalah alat untuk memicu penyitaan, membantu identifikasi spesimen yang disita dan / atau membantu dalam menemukan pusat penyelamatan.

Akses ke platform TWIX diberikan secara eksklusif kepada petugas penegak hukum dan manajemen yang ditunjuk (seperti bea cukai, polisi, layanan satwa liar, dan unit kejahatan nasional yang terlibat dalam kontrol perdagangan satwa liar) dan organisasi internasional (Sekretariat CITES, INTERPOL, UNODC dan WCO) yang bertanggung jawab atas implementasi CITES. Pejabat yang berwenang menerima surel undangan untuk mengaktifkan akses mereka ke platform.

Keberhasilan TWIX sangat bergantung pada masukan informasi yang berkaitan dengan penangkapan baru oleh lembaga penegak hukum nasional. TWIX bukan hanya alat untuk analisis strategis tetapi juga untuk mendukung pertanyaan di lapangan. Satu hal yang perlu diingat adalah fakta bahwa banyak jaringan TWIX dikelola oleh masyarakat sipil dapat memiliki implikasi tertentu pada pertukaran informasi atau intelijen yang bersifat sangat rahasia atau sensitif.



Pertukaran Informasi Perdagangan Satwa Liar (TWIX)

- » Apakah otoritas Negara terkait memiliki akses dan berkontribusi pada platform TWIX Regional yang tersedia?
- » Instansi mana saja yang menggunakan platform TWIX yang relevan?
- » Bagaimana cara lembaga yang bertanggung jawab mencatat dan menyebarkan Informasi di platform TWIX?
- » Apa yang telah menjadi pengalaman dalam menyediakan, menerima dan menggunakan Informasi dan dalam memberi dan mencari bantuan?

Sumber daya tambahan :

Bank Dunia, Alat dan Sumber Daya untuk Memerangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2018) 11

5.4 Skema sertifikasi dan verifikasi; Standar pribadi dan sukarela

Di beberapa industri dan di antara beberapa bisnis, standar sukarela digunakan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang dijual, antara lain, dari sumber hukum, telah diperoleh dengan cara yang berkelanjutan, atau diproduksi sesuai dengan standar industri yang diterima. Untuk beberapa produk, terutama di industri kayu, skema sertifikasi tersedia untuk memverifikasi keaslian jenis kayu dan asal-usulnya. Sistem sertifikasi membantu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan membuktikan keberlanjutan pengelolaan dan produk hutan bersertifikat. Salah satu kesamaan dari skema sertifikasi dan verifikasi ini adalah bahwa mereka adalah sistem sukarela yang digerakkan oleh pasar yang membawa transparansi ke rantai pasokan dan bertujuan untuk mengarahkan produksi dan pola konsumsi menuju sumber dan proses yang lebih berkelanjutan. Ini, pada gilirannya, juga dapat membawa perubahan pada investasi dan arus keuangan.

Beberapa sistem sertifikasi sukarela yang lebih terkenal di industri kayu termasuk sistem Forest Stewardship Council dan Programme for the Endorsement of Forest Certification, yang merupakan organisasi payung internasional yang menyediakan penilaian pihak ketiga independen terhadap pengelolaan hutan lestari (SFM). Standar SFM ditujukan pada tingkat yang lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh undang-undang, memperkenalkan elemen untuk memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sementara fokus utamanya adalah pada sektor hutan, dengan melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami, operasi pengelolaan hutan bersertifikat juga memiliki dampak positif pada satwa liar lokal dan populasi manusia. Skema sertifikasi hutan dapat lebih bermanfaat bagi upaya konservasi secara keseluruhan dengan memfasilitasi pengumpulan dan pelaporan data, yang dapat menjadi katalis untuk penelitian dan pengembangan kebijakan.

World Wide Fund for Nature (WWF) menekankan bahwa sertifikasi hutan adalah salah satu inisiatif terpenting dalam dekade terakhir untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang lebih baik. Hutan bersertifikat dianggap dikelola secara berkelanjutan tidak hanya karena praktik penebangan yang digunakan, tetapi juga dalam konteks lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih luas faktor-faktor, seperti kesejahteraan pekerja dan masyarakat lokal, serta transparansi dan inklusivitas pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan utama harus berpartisipasi dalam tata kelola dan penetapan standar, yang harus didasarkan pada standar kinerja yang objektif dan terukur yang disesuaikan dengan kondisi lokal, dan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Misalnya, sertifikasi dan akreditasi oleh Program on Forests (PROFOR) Bank Dunia mensyaratkan kepatuhan terhadap kerangka kerja, prinsip, kriteria, kebijakan, dan standar internasional yang ditetapkan yang disiapkan dalam proses multi-pemangku kepentingan yang transparan, demokratis dan inklusif.

Standar lain digunakan untuk memverifikasi legalitas kayu dan produk kayu. Verifikasi tersebut dipandang sebagai langkah pertama menuju sertifikasi penuh dan diberikan oleh pihak ketiga yang independen

asesor setelah kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, standar, dan prosedur yang relevan untuk pengelolaan hutan telah ditetapkan.

Skema verifikasi hukum sukarela terbagi dalam dua kategori:

- Verifikasi Asal Hukum (VLO) memverifikasi bahwa kayu berasal dari sumber yang memiliki hak hukum yang terdokumentasi untuk dipanen, sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Yurisdiksi. Asal hukum mengacu pada pemenuhan Persyaratan administrasi pemanenan. Pemasok kayu tersebut harus mengikuti dan memelihara sistem rantai kustodi yang terdokumentasi.
- Verifikasi Kepatuhan Hukum (VLC) memperluas komponen dasar Verifikasi Asal Hukum dengan memverifikasi bahwa pemanenan kayu mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan relevan yang lebih luas terkait dengan kehutanan. Kepatuhan hukum mencakup berbagai undang-undang yang lebih luas tentang perlindungan lingkungan, satwa liar, konservasi air dan tanah, kode dan praktik pemanenan, kesehatan dan keselamatan pekerja, dan keadilan bagi masyarakat.

Karena sertifikasi memastikan bahwa penjual mengakses pasar tertentu, skema sertifikasi dan verifikasi mungkin rentan terhadap korupsi dan malpraktik. Organisasi yang bekerja di bawah skema ini dapat secara keliru menyatakan bahwa satwa liar atau hasil hutan mereka memenuhi standar yang ditetapkan padahal tidak. Mungkin ada beberapa contoh, terutama dalam sektor kehutanan, di mana hasil hutan yang memenuhi standar yang ditetapkan dapat dicampur dengan yang tidak dan seluruh kiriman dapat dinyatakan secara salah telah memenuhi standar tersebut. Organisasi yang telah mendaftar di bawah skema sertifikasi dan verifikasi dapat dinilai (biasanya oleh pihak ketiga) untuk memverifikasi bahwa proses dan produk mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal ketidaksesuaian, petugas dari organisasi tersebut dapat menyuap penilai untuk tidak melaporkan ketidaksesuaian atau mengubah laporan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka sesuai.

Sistem dan skema sertifikasi; Standar pribadi dan sukarela

- » Apakah Negara memiliki Standar pengelolaan hutan berkelanjutan nasional yang disahkan oleh Forest Stewardship Council atau Program untuk Pengesahan Sertifikasi Hutan?
- » Apakah semua kelompok pemangku kepentingan utama berpartisipasi dalam Tata Kelola dan penetapan Standar?
- » Apakah sistem sertifikasi dan verifikasi dipandang menyebabkan hambatan yang tidak perlu untuk berdagang? Jika demikian, tindakan apa yang telah diambil untuk menyelesaikan ini?
- » Apakah standar disesuaikan dengan kondisi lokal? Apakah mereka didasarkan pada kinerja yang objektif dan terukur?
- » Apakah prosedur dan proses pengambilan keputusan transparan dan dilaporkan kepada publik?
- » Apakah ada dugaan organisasi di bawah skema sertifikasi dan verifikasi menjual atau membeli satwa liar dan hasil hutan yang tidak memenuhi ketentuan Standar? Apakah ada mekanisme pengaduan di mana tuduhan tersebut dapat dilaporkan? Bagaimana tuduhan tersebut diselesaikan; apakah ada mekanisme banding?
- » Apakah ada kapasitas sertifikasi nasional yang memadai untuk menerapkan sertifikasi pengelolaan hutan Lestari?
- » Apakah Standar sukarela dan pribadi dikenal dan diterapkan secara luas?
- » Apakah pendanaan Negara untuk sektor kehutanan dipengaruhi oleh skema sertifikasi dan verifikasi?



5.5 kerja sama penyidikan keuangan

Untuk melacak hasil kejahatan yang bergerak melintasi batas, penting untuk terlibat dalam kerja sama untuk penyidikan keuangan yang mencakup semua aktor sistem peradilan pidana dan sektor swasta. Kerja sama multi-lembaga merupakan respons penting dan efektif untuk mengatasi penipuan, korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya sehubungan dengan kejahatan satwa liar dan hutan di tingkat nasional dan internasional.

Unit penyidikan keuangan (FIU) diposisikan secara unik untuk bekerja sama dan mendukung upaya nasional dan internasional untuk berbagi informasi keuangan sesuai dengan standar anti pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme (AML/CFT) global.¹¹¹ FIU dapat menggunakan berbagai saluran yang sudah mapan untuk bertukar informasi satu sama lain dan membantu menghasilkan dan memberikan intelijen keuangan dari sektor swasta. Ini termasuk, misalnya, 'Egmont Secure Web' yang didirikan oleh Egmont Group, sebuah asosiasi Unit Intelijen Keuangan (FIU). Ini menyediakan platform untuk pertukaran keahlian dan intelijen keuangan yang aman untuk memerangi pencucian uang. Demikian pula, FIU.Net adalah jaringan komputer aman yang didirikan oleh EUROPOL untuk memfasilitasi berbagi informasi antara FIU di Uni Eropa. Pertukaran informasi dan kerja sama internasional antara FIU juga dapat dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) atau pengaturan dan perjanjian lainnya.



kerja sama penyidikan keuangan internasional

- » Apakah FIU Negara bagian dari Egmont Group of FIUs dan apakah menggunakan Egmont Secure Web untuk berkomunikasi dengan FIU lain? Apakah ya, apakah cara ini telah digunakan untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah FIU adalah anggota atau peserta dalam jaringan atau Mou lain yang memungkinkan pertukaran Informasi dan kerja sama internasional Antara FIU?

Sumber daya tambahan :

ECOFEL, Penyidikan Keuangan terhadap Kejahatan Satwa Liar (2021) 60–61

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Volume 4: kerja sama Internasional (2006) 13–14 WCO

5.6 kerja sama pemulihan aset

Jaringan pemulihan aset adalah (seringkali informal) jaringan antar-lembaga penegak hukum dan praktisi peradilan yang mendukung proses pemulihan aset lengkap. Pekerjaan dari titik awal penyidikan melalui penelusuran aset, hingga pembekuan dan penyitaan, manajemen dan perampasan/penyitaan, termasuk pembagian aset yang diperlukan antara yurisdiksi. Contoh Jaringan Antarlembaga Pemulihan Aset regional adalah: ARINSA (Afrika Selatan), RRAG (Amerika Latin), ARIN-AP (Asia Pasifik), ARIN-EA (Afrika Timur), ARIN-WA (Afrika Barat), ARIN- CARIB (Karibia) dan Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN).

Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), kemitraan antara Kelompok Bank Dunia dan UNODC, mendukung implementasi UNCAC serta upaya internasional untuk mengakhiri safe haven bagi dana koruptor. StAR bekerja dengan negara-negara berkembang dan pusat keuangan untuk mencegah pencucian hasil korupsi dan untuk memfasilitasi pengembalian aset curian yang lebih sistematis dan tepat waktu.

ICCWC juga menyediakan berbagai layanan dukungan operasional yang mempromosikan regional

¹¹¹ Lihat lebih lanjut Bab II Bagian 5.6.2 arab ini Perangkat.

kerja sama regional dan internasional. Ini termasuk Pertemuan Kasus Investigasi dan Analitis Regional (RIACM), Tim Pendukung Insiden Satwa Liar (WIST) dan Pertemuan Penegakan Antar-Wilayah Satwa Liar (WIRE).

kerja sama penyidikan keuangan internasional

- » Apakah Negara adalah anggota dari salah satu inisiatif ini (atau apakah itu mengambil bagian di dalamnya)?
- » Apakah Negara telah menggunakan salah satu inisiatif ini dalam konteks kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

*UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana, Volume 4: kerja sama Internasional (2006) 15–16 UNODC, jaringan GLOBE, <https://globenetwork.unodc.org/>
Bank Dunia. Inisiatif Pemulihan Aset Kuria, <https://star.worldbank.org/>*



ALAT
IV.22

5.5 kerja sama forensik internasional

Pentingnya forensik dalam penyidikan kejahatan satwa liar dan kehutanan tercakup dalam Bab II, Bagian 5.5 dari Perangkat ini, di mana juga dicatat bahwa di banyak lokasi dan situasi ahli atau fasilitas forensik yang diperlukan tidak tersedia. Relatif sedikit Negara yang memiliki ahli, peralatan, dan fasilitas laboratorium untuk melakukan seluruh pemeriksaan forensik, keterbatasan yang terutama dirasakan di beberapa Negara yang merupakan rumah bagi beberapa spesies yang paling dicari.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa Negara menawarkan kemampuan forensik mereka kepada lembaga-lembaga di Negara bagian lain. Berbagi penyediaan layanan forensik lintas lembaga dan antar negara adalah salah satu cara untuk memastikan dan meningkatkan ketersediaan kemampuan forensik. Untuk mendorong kerja sama internasional, komunitas ilmu forensik satwa liar juga telah bekerja untuk mendirikan jaringan praktisi laboratorium yang mampu memberikan layanan internasional berdasarkan kasus per kasus.

CITES, bekerja sama dengan organisasi mitra ICCWC lainnya, telah menyusun direktori laboratorium elektronik yang melakukan pengujian forensik satwa liar, yang memenuhi standar jaminan kualitas minimum dan bahwa, tergantung pada sumber daya yang tersedia, mampu dan bersedia untuk melaksanakan Analisis forensik satwa liar atas permintaan dari negara lain. Direktori ini ditinjau secara teratur untuk memasukkan laboratorium terkait yang sesuai dengan kriteria sehingga Negara-negara Pihak tahu siapa yang harus didekati.

Misalnya, Clark R. Bavin Wildlife Forensic Laboratory, yang dioperasikan oleh USFWS, adalah laboratorium forensik yang didedikasikan semata-mata untuk masalah kejahatan satwa liar. Meskipun layanannya terutama disediakan untuk lembaga penegak Federal dan Negara Bagian Amerika Serikat, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Sekretariat CITES di mana ia dapat memberikan dukungan kepada setiap Pihak CITES.

Di tingkat global, beberapa inisiatif telah dibentuk untuk memungkinkan dan meningkatkan kerja sama forensik internasional. Misalnya, Society for Wildlife Forensic Services (SWFS) mempromosikan kerja sama dan kolaborasi internasional antar laboratorium dan telah berperan penting dalam menciptakan standar umum untuk praktik ilmu forensik satwa liar. Aliansi Strategis Forensik Internasional (IFSA) adalah kemitraan multilateral antara jaringan regional laboratorium forensik operasional yang dibentuk untuk menciptakan peluang kolaborasi strategis di seluruh komunitas ilmu forensik global.

Di tingkat regional, African Wildlife Forensics Network (AWFN) telah membentuk jaringan internasional praktisi forensik dan TKP satwa liar di seluruh benua, dengan

tujuan menyeluruh untuk memastikan semua negara Afrika memiliki akses ke layanan ilmu forensik untuk mendukung penegakan hukum satwa liar. AWFN sebagian besar terdiri dari pejabat pemerintah, tetapi secara aktif didukung oleh LSM, UNODC, dan donor internasional.

TRACE Wildlife Forensics Network adalah organisasi bukan pemerintah yang dibentuk khusus untuk mempromosikan ilmu forensik dalam konservasi satwa liar dan penegakan hukum. Bekerja secara langsung dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum satwa liar di seluruh dunia untuk membangun kapasitas untuk analisis forensik. Antara lain, TRACE memungkinkan akses ke analisis laboratorium di wilayah di mana teknik forensik satwa liar saat ini terbatas dan mempromosikan pendekatan terkoordinasi untuk forensik satwa liar di tingkat nasional dan internasional.

Negara-negara yang ingin membangun kemampuan forensik nasional mereka sendiri dapat mencari bantuan dari organisasi berpengalaman seperti SWFS, ITTO/CITES, UNODC, dan TRACE.



kerja sama forensik internasional

- » Apakah otoritas yang kompeten memanfaatkan fasilitas Negara lain seperti laboratorium forensik untuk analisis bukti dan laboratorium atau keahlian lainnya?
- » Apakah otoritas terkait dan laboratorium forensik menawarkan layanan dan keahlian mereka kepada lembaga di Negara bagian lain?
- » Apakah Laboratorium Forensik berpartisipasi dalam jaringan laboratorium Regional atau Global yang terlibat dalam pengujian forensik satwa liar, kayu, dan tumbuhan?
- » Apakah ada atau telah ada upaya untuk membangun kemampuan forensik nasional dengan bantuan organisasi internasional, negara Donor atau organisasi bukan pemerintah khusus?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Panduan Praktik Terbaik untuk Identifikasi Kayu Forensik (2016) 77, 83, 103–104

UNODC, Perangkat Penilaian Peradilan Pidana: Pemolisian, Volume 5 Layanan dan Infrastruktur Forensik (2006) 36–37 African Wildlife Forensics Network <http://www.africsebuahwildlifeforensics.org>

TRACE Wildlife Forensics Network <https://www.tracenetwork.org/about-trace-network/>

6

Bagian IV

Bantuan teknis dan bantuan

Banyak Negara memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas untuk menyelidiki kejahatan satwa liar dan hutan secara menyeluruh dan mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis, keahlian, atau peralatan untuk melakukan penyidikan tertentu Teknik.



6.1 Bantuan internasional, regional, dan bilateral

Untuk membantu negara-negara tersebut dengan peralatan teknis, personel ahli atau kapasitas keuangan, organisasi internasional dan regional, bersama dengan masing-masing negara donor, menawarkan cara di mana negara dapat meminta bantuan, pelatihan dan dukungan. Namun, penting untuk dicatat bahwa seringkali pendampingan juga dapat diminta dari sumber lokal atau nasional, yang mungkin termasuk lembaga resmi, prakarsa khusus, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di beberapa tempat, badan penelitian dapat membantu dengan data, pengetahuan, keahlian teknis, dan saran kebijakan. Selain itu, UNTOC dan UNCAC memuat ketentuan tentang pengembangan ekonomi dan bantuan teknis mengenai kejahatan yang tercakup dalam perjanjian ini.¹¹²

Bantuan internasional, Regional, dan Bilateral

- » Apa, jika ada, jenis dan tingkat bantuan teknis dan dukungan yang telah diminta dari organisasi internasional dan Regional untuk meningkatkan penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Jenis dan tingkat bantuan teknis dan bantuan apa yang telah dicari dari Negara lain (dan lembaga mereka) untuk meningkatkan penegakan hukum dan peraturan satwa liar dan hutan?
- » Bagaimana bantuan dan dukungan ini diminta? Apakah berhasil? Jika tidak, mengapa tidak?
- » Apakah ada (atau pernahkah ada) inisiatif yang didanai oleh organisasi internasional atau regional atau oleh Negara lain yang bertujuan mengembangkan aspek Pemolisian dan penegakan hukum di sektor satwa liar dan kehutanan? Apa tujuan dari proyek-proyek ini? Apakah tercapai?
- » Apakah (atau apakah) inisiatif ini menawarkan pelatihan? Jika demikian, apakah pelatih dilatih untuk memberikan rencana Pelatihan Bertingkat atau untuk melatih individu?
- » Apakah (atau apakah) inisiatif ini menyediakan peralatan? Jika demikian, apakah kebutuhan akan peralatan ini diidentifikasi melalui evaluasi mandiri atau ditentukan oleh daftar pemerintah?



ALAT
IV.24

112 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Pasal. 29 dan 30; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, Seni. 60 dan 62.

Bantuan internasional, Regional, dan Bilateral

- » Apakah ada rencana untuk pemeliharaan dan penggantian peralatan? Apakah ada contoh peralatan yang sama atau serupa yang disediakan, dan kemudian tidak digunakan atau disalahgunakan?
- » Dukungan lain apa yang diberikan/telah diberikankan oleh inisiatif ini?
- » Kesulitan apa yang biasanya dihadapi oleh lembaga Donor internasional, Regional, dan lainnya dalam mencoba menawarkan bantuan teknis

Sumber daya tambahan :
UNODC, "Penyidikan kejahatan", dalam Perangkat Penilaian Peradilan Pidana.

6.2 Donor koordinasi

Pemberian bantuan teknis dan dukungan tidak selalu mudah, karena terkadang bisa menciptakan dependensi dan ketergantungan jangka panjang pada kontribusi eksternal. Fluktuasi dalam bantuan luar negeri juga dapat membahayakan upaya domestik. Selain itu, dapat terjadi duplikasi upaya jika bantuan teknis dan dukungan tidak dikoordinasikan dan dikelola dengan baik. Karena alasan ini, penting bagi otoritas nasional untuk merencanakan dan mengkoordinasikan bantuan yang diterima dari para donor dan memastikan bahwa bantuan tersebut diinvestasikan dan digunakan secara berkelanjutan. Lembaga donor, termasuk masing-masing Negara, organisasi regional dan internasional, dan organisasi bukan-pemerintah harus mengoordinasikan upaya mereka untuk menghindari duplikasi, memastikan transparansi, dan melakukan tinjauan pasca implementasi.



Koordinasi Donor

- » Bagaimana implementasi, pengiriman dan penerimaan bantuan teknis dan dukungan dikoordinasikan oleh Negara penerima?
- » Apakah ada bukti duplikasi? Apakah beberapa Donatur memberikan bantuan, dukungan, atau peralatan yang sama atau serupa?
- » Apakah ada mekanisme untuk memastikan keberlanjutan aktivitas yang disponsori?
- » Dalam hal bantuan teknis dan dukungan yang diterima, apakah ada tinjauan pasca-implementasi yang membantu mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi di tempat lain? Apakah hasil dari inisiatif tersebut disusun dan dikoordinasikan untuk menginformasikan perencanaan masa depan?

Sumber daya tambahan :
UNODC, "Keamanan publik dan pemberian layanan polisi", dalam Perangkat Penilaian Peradilan Pidana.
Rencana Margasatwa Global Bank Dunia , Analisis Pendanaan Internasional untuk Mengatasi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2016): <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25340>



PENDORONG DAN PENCEGAHAN

Bagian V



Meski sistem peradilan pidana yang kuat dan berfungsi dengan baik, hukuman yang tepat dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, kejahatan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme ini saja.

Mereka harus bersamaan dengan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam, kebijakan industri dan ekonomi, layanan pembangunan pedesaan dan hak asasi manusia, termasuk intervensi yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang bergantung pada satwa liar dan kehutanan untuk mata pencaharian mereka. Ciri khusus kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah bahwa mereka dapat muncul dari masalah mendasar dalam kebijakan dan pengelolaan alokasi sumber daya serta kurangnya sumber pendapatan alternatif. Untuk kejahatan yang kurang serius, mungkin lebih baik dikelola sebagai masalah sumber daya daripada murni sebagai masalah penegakan hukum pidana.

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat didorong oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan ekonomi, keserakahan, kemiskinan pedesaan, kerawanan pangan, ketidaksetaraan distribusi lahan pertanian yang tersedia, pasar legal dan ilegal paralel untuk satwa liar dan hasil hutan, pergolakan sosial seperti perang dan kelaparan, dan semakin banyak, isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Keterlibatan dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat menjadi sumber pendapatan tetap, jaring pengaman untuk memenuhi kebutuhan mendadak atau peluang menguntungkan untuk memperoleh keuntungan besar seringkali dengan sedikit risiko tertangkap.

penting untuk membedakan antara kegiatan yang didorong oleh kebutuhan dan kemiskinan, dan kegiatan yang didorong oleh keserakahan dan iming-iming keuntungan yang tinggi. Ketika kebutuhan dan kemiskinan merupakan faktor yang mendorong kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, kriminalisasi formal atas kegiatan yang berkaitan dengan perburuan dan pengumpulan makanan, atau penjualan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dasar, dapat merugikan orang-orang yang bergantung pada satwa liar dan sumber daya hutan untuk kelangsungan hidup mereka, dan kontraproduktif dalam menangani kejahatan satwa liar dan kehutanan. Mempertimbangkan hal ini, dimensi sosial, politik, ekonomi, ekologi, perkembangan dan budaya perlu dipertimbangkan ketika menciptakan strategi yang efektif untuk mencegah individu terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan. Negara-negara harus mengadopsi pendekatan holistik untuk mencegah kejahatan satwa liar dan kehutanan, terutama dengan mengurangi kerentanan penduduk lokal terhadap keterlibatan dengan kelompok kejahatan terorganisir.

Bab V dari Perangkat ini menyediakan alat dasar untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan. Alat-alat ini dapat membantu untuk lebih memahami penyebab dan konteks kejahatan tertentu dan untuk mengidentifikasi titik akses untuk intervensi pencegahan. Bab V juga menawarkan alat untuk membantu dalam analisis kapasitas yang ada dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, khususnya satwa liar nasional dan sumber daya hutan.

1

Bagian V

Aktor

Untuk mencegah dan memerangi satwa liar dan kejahatan hutan secara efektif, penting untuk mengidentifikasi berbagai aktor dalam rantai pasokan satwa liar dan motivasi yang mendorong aktivitas mereka.



Alat-alat berikut dimaksudkan untuk membantu pengguna Perangkat ini dalam mengidentifikasi aktor utama dan peran mereka dalam rantai pasokan satwa liar dan hutan.

1.1 Pelaku

1.1.1 Profil pelanggar

Kejahatan satwa liar dan kehutanan melibatkan berbagai aktor yang terlibat dalam perburuan liar, penjeratan, pemanenan, pengolahan, pemasok, perdagangan, impor, ekspor, penjualan, kepemilikan, dan konsumsi hewan liar yang dilindungi, produk hewani, dan tumbuhan, termasuk kayu. Individu dan kelompok ini termasuk, antara lain, pengguna subsisten, pemburu komersial, pemegang konsesi hutan di sisi penawaran, dan pemburu trofi, perantara dan pengguna akhir di sisi permintaan. Pemburu komersial atau pemegang konsesi hutan yang sah masih dapat terlibat dalam kegiatan kejahatan jika mereka melebihi izin. Ada beberapa contoh bisnis yang sah (atau secara sekilas sah) yang terlibat dalam praktik perburuan ilegal atau penebangan liar, meskipun ini belum tentu sumber pendapatan utama mereka. Pelanggar juga termasuk penjahat oportunistik yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan ketika mereka melihat prospek untuk mencapai imbalan tinggi dengan risiko rendah.

Aktor-aktor ini berbeda tidak hanya dalam peran yang mereka mainkan di sepanjang rantai nilai, tetapi juga dalam latar belakang sosial ekonomi mereka, preferensi dan motivasi, dalam skala operasi mereka dan intensitas aktivitas mereka, tingkat teknologi dan investasi, sumber pendanaan mereka, dan keterampilan serta pengetahuan mereka, termasuk undang-undang dan peraturan yang relevan. Pelaku dapat menempati banyak peran, dengan berbagai motivasi yang bergantung pada konteks dan nilai, dan itu dapat berubah seiring waktu. Beberapa menargetkan aktivitas mereka ke spesies tertentu, sementara yang lain beroperasi lebih luas. Kisaran dan jumlah individu yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan tergantung pada banyak faktor, termasuk pasar akhir yang diharapkan dan konsumen yang diantisipasi, karakteristik unik dari barang yang diperdagangkan, dan kemampuan dan keterbatasan aktor yang sudah terlibat dalam perdagangan.

Pelaku kejahatan satwa liar dan kehutanan juga dapat terlibat dalam kejahatan lain. Ini termasuk terlibat dalam praktik korupsi untuk memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan, terlibat dalam pencucian uang untuk mendanai kegiatan kejahatan satwa liar dan kehutanan atau / dan menyembunyikan hasil dari kejahatan ini, melakukan penipuan dokumen untuk menghasilkan lisensi fiktif, izin (termasuk CITES) dan dokumen lainnya, dan penggelapan pajak dan penghindaran biaya yang dibayarkan. Dalam memeriksa profil pelaku, sangat penting untuk menentukan apakah mereka mungkin terlibat dalam kejahatan lain. Menetapkan apakah pelaku kejahatan satwa liar dan kehutanan terlibat dalam kejahatan lain dapat memungkinkan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi lebih banyak aktor yang memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan.

Dalam mencermati profil pelaku, jenis kelamin juga harus diperhitungkan, karena peran yang dimainkan perempuan dan motivasi mereka untuk terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar mungkin berbeda dengan laki-laki. Selain itu, status sosial pelaku berdampak pada alasan berpartisipasi dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan, yang pada gilirannya akan relevan ketika merancang langkah-langkah untuk mencegah pelaku, dan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Informasi tersebut juga penting untuk mengatasi stereotip dan untuk memastikan perlakuan yang adil dan tepat oleh penegak hukum dan lembaga peradilan pidana lainnya.



ALAT
V.1

Profil pelanggar

- » Bagaimana profil orang-orang yang terlibat dalam berbagai kejahatan satwa liar dan kehutanan? Sehubungan dengan pelanggaran terpisah, informasi apa yang tersedia tentang usia, jenis kelamin, keadaan sosial, pendidikan, latar belakang, situasi ekonomi, posisi, dan profesi mereka?
- » Apakah profiling orang yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan melibatkan penilaian apakah mereka terlibat dalam memfasilitasi kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, tidak membayar biaya?
- » Apakah para pelaku ini bekerja secara mandiri atau apakah mereka memiliki kontrak informal dengan perantara, kelompok kejahatan terorganisir, atau aktor perusahaan?
- » Berapa banyak pelaku yang merupakan pelanggar berulang? Bagaimana profil mereka dan pola pelanggaran mereka?
- » Apakah para pelaku mengeksploitasi konsesi hutan dan izin berburu?
- » Apa peran penduduk setempat dalam kegiatan penebangan, perburuan, dan pengumpulan di sumbernya? Apa yang diketahui tentang motivasi mereka untuk terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan?

*Sumber daya tambahan:
Seager, Gender and illegal wildlife trade: Overlooked and underestimated (Laporan WWF, 2021)*

1.1.2 Kelompok kejahatan terorganisir

Setelah tindakan awal perburuan liar atau penebangan atau pemanenan liar, tahap selanjutnya seringkali membutuhkan lebih banyak pengorganisasian dan keterlibatan perantara lokal, regional dan internasional, pusat pengolahan dan sebagainya. Jika perantara diharuskan untuk memindahkan barang selundupan dari satu tempat ke tempat lain, jika metode canggih diperlukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan barang tersebut, dan jika perbatasan internasional perlu dilintasi, pelaku mungkin perlu bermitra dengan individu dan entitas lain.

Dalam keadaan seperti itu, kelompok kejahatan terorganisir dapat muncul di mana banyak pelanggar berkolaborasi dan kadang-kadang membuat skema kompleks untuk memperoleh, memindahkan, dan menjual barang secara ilegal, untuk menyembunyikan barang mereka dan untuk mencuci hasil kejahatan mereka. Beberapa dari jaringan ini berkonsentrasi pada penargetan spesies individu atau jenis kejahatan tertentu, sementara yang lain menyelundupkan berbagai barang selundupan yang berbeda dan terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan bersama dengan kejahatan lainnya. Didorong oleh keuntungan tinggi dan kemampuan untuk memanfaatkan jaringan, rute, dan operasi yang mapan, kelompok kejahatan terorganisir yang mapan telah terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka.

Perdebatan sedang berlangsung terkait sejauh mana dan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan. Tergantung pada spesies dan wilayah dunia, 'terorganisir' dapat berarti mulai dari dua atau lebih individu yang sedikit terkait dengan perusahaan kriminal yang terdiri dari semua tahap perdagangan gelap (yaitu organisasi yang terintegrasi secara vertikal). Struktur kejahatan yang lebih kompleks kemungkinan akan muncul jika akses ke pasar dibatasi karena struktur ketersediaan sumber daya, rute transportasi atau konsumen, yang mungkin terutama berasal dari pasar perkotaan atau internasional yang jauh yang bersedia membayar harga lebih tinggi. Indikator lain, seperti struktur terorganisir, pembiayaan canggih, penggunaan korupsi, dokumentasi palsu, dan kekerasan dapat menunjukkan kemungkinan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir.

Kelompok kejahatan terorganisir

- » Bukti dan indikator apa yang menunjukkan bahwa kelompok kejahatan terorganisir terlibat dalam atau terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Siapa kelompok-kelompok ini; apa latar belakang mereka; Seberapa mapan mereka? Dalam jenis kejahatan (lainnya) apa yang mereka lakukan?
- » Apa yang diketahui tentang anggota kelompok-kelompok ini, profil mereka, latar belakang, kebangsaan, dan rekrutmen?
- » Bagaimana kelompok-kelompok ini terstruktur dan terorganisir? Di mana mereka beroperasi? Apakah mereka beroperasi secara nasional dan/atau melintasi perbatasan internasional? Apakah mereka berkolaborasi dengan grup lain? Apakah mereka berkolusi dengan pejabat; dengan industri?
- » Bagaimana kelompok-kelompok ini dilengkapi (seperti senjata api dan mesin)? Bagaimana mereka dibiayai?

Sumber daya tambahan :

UNODC, Laporan Kejahatan Margasatwa Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 19–20
 Komisi Keadilan Satwa Liar. Konvergensi kejahatan satwa liar dengan bentuk kejahatan terorganisir lainnya (2021) [https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2021/05/Laporan Konvergensi-Kejahatan-2021.pdf](https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2021/05/Laporan-Konvergensi-Kejahatan-2021.pdf)



ALAT
V.2

1.1.3 Kelompok bersenjata

Untuk membiayai tujuan mereka atau mengejar agenda mereka, kelompok bersenjata, seperti milisi lokal, kelompok pemberontak, atau organisasi teroris, dapat terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan, mengeksploitasi struktur penegakan hukum yang lemah dan mencari keuntungan dari tingginya harga yang dibayarkan untuk beberapa satwa liar dan komoditas hutan. Pendapatan dari pembalakan liar dan perburuan gading juga telah digunakan untuk membiayai pemberontakan bersenjata atau pemerintah yang represif. Kelompok bersenjata juga dapat memperoleh keuntungan dari penguasaan konsesi kayu, menyewakan konsesi kepada perusahaan dengan imbalan uang, senjata dan peralatan, dan pajak jalan dan transportasi melalui wilayah yang dikuasai milisi. Keterlibatan kelompok bersenjata juga dapat meningkatkan ancaman terhadap spesies kunci dan populasi manusia setempat. Komunitas lokal dapat mengalami ancaman, intimidasi, kerja paksa, perekrutan tentara anak dan perdagangan manusia.



Kelompok bersenjata

- » Bukti dan indikator apa yang menunjukkan bahwa kelompok bersenjata terlibat dalam atau terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Siapa kelompok-kelompok ini; apa latar belakang mereka; Seberapa mapan mereka? Dalam jenis kejahatan (lainnya) apa yang mereka lakukan?
- » Apa yang diketahui tentang anggota grup ini, profil, latar belakang, Dan Rekrutmen mereka?
- » Bagaimana kelompok-kelompok ini terstruktur dan terorganisir? Di mana mereka beroperasi? Apakah mereka beroperasi secara nasional dan/atau melintasi perbatasan internasional? Apakah mereka berkolaborasi dengan grup lain? Apakah mereka berkolusi dengan pejabat publik dan/atau dengan sektor korporasi?
- » Bagaimana kelompok-kelompok ini dilengkapi (seperti senjata dan mesin); bagaimana mereka dibiayai?

Sumber daya tambahan :

Seager, Gender and illegal wildlife trade: Overlooked and underestimated (Laporan WWF, 2021)

1.1.4 Keterlibatan sektor korporasi

Meskipun banyak yang telah dilakukan oleh pelaku pasar yang sah untuk mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan tanpa sepengetahuan mereka, perusahaan korporasi, secara sadar atau tidak sadar, sering terlibat dalam kegiatan ilegal yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Perusahaan penebangan dapat terlibat dalam korupsi (misalnya penyuapan atau perdagangan pengaruh) untuk beroperasi tanpa izin penebangan atau secara ilegal merambah kawasan lindung, memanen spesies yang dilindungi, melebihi kuota penebangan mereka, atau yang diberikan konsesi penebangan secara berlebihan. Demikian pula, bisnis yang terlibat dalam perdagangan satwa liar mungkin secara sadar atau tidak sadar membeli hewan atau bagian tubuh hewan dari sumber ilegal. Perusahaan perdagangan satwa liar dapat berkolusi dengan pejabat pemerintah untuk memasuki kawasan lindung secara tidak sah, menangkap atau memanen spesies yang dilindungi, melebihi kuota yang ditetapkan (berburu), atau menggunakan metode perburuan atau penangkaran yang dilarang.

Keterlibatan sektor korporasi juga dapat terjadi pada tahap transit, jika perusahaan transportasi dengan sengaja atau ceroboh membawa, mengimpor, mengekspor atau mencuci barang selundupan, memalsukan dokumen, atau gagal memenuhi persyaratan dokumentasi, sertifikasi, dan pelaporan. Hal ini juga dapat melibatkan suap atau kolusi oleh pengelola barang, staf maskapai penerbangan, dan awak kapal peti kemas atau kapal pesiar yang mendukung atau 'menutup mata' terhadap aktivitas terkait perdagangan gelap. Di tempat tujuan, perusahaan dapat memainkan peran penting jika mereka dengan sengaja atau lalai mengambil atau memasok kayu, tanaman, hewan hidup atau produk hewan yang berasal dari kawasan lindung atau melibatkan spesies yang dilindungi. Topik tanggung jawab korporasi (badan hukum) dibahas secara terpisah di Bab I, Bagian 6.4 Perangkat ini.

Keterlibatan sektor korporasi

- » Bukti dan indikator apa yang menunjukkan bahwa entitas perusahaan dan bisnis lain terlibat dalam atau terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah ada indikasi atau bukti bahwa organisasi-organisasi ini terlibat dalam kejahatan lain yang memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan seperti korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang?
- » Siapa entitas ini? apa latar belakang mereka; Seberapa mapan mereka? Apa aktivitas bisnis dan sumber pendapatan mereka yang biasa? Dalam jenis kejahatan (lainnya) apa mereka diketahui terlibat?
- » Apa yang diketahui tentang orang-orang yang mengarahkan entitas ini, profil dan latar belakang mereka?
- » Bagaimana entitas ini terstruktur dan terorganisir? Di mana mereka beroperasi? Apakah mereka beroperasi secara nasional dan/atau melintasi perbatasan internasional? Apakah mereka berkolaborasi dengan penjahat dan/atau organisasi kriminal? Apakah mereka berkolusi dengan pejabat publik dan/ atau dengan kelompok kriminal terorganisir?



1.2 Pejabat publik

Kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak akan mungkin terjadi dalam skala internasional yang luas tanpa keterlibatan pejabat publik. Dalam beberapa kasus, pejabat adalah pelanggar utama, terlibat langsung dalam melakukan kejahatan satwa liar dan kehutanan, atau mereka dapat menjadi peserta dan rekan orang lain. Dalam kebanyakan kasus, pejabat publik bertindak sebagai fasilitator atau penerima manfaat kejahatan satwa liar dan kehutanan. Keterlibatan seperti itu biasanya merupakan hasil dari korupsi. Meski sebagian besar pejabat publik yang bekerja di sektor satwa liar dan kehutanan patuh pada hukum dan menjalankan tugasnya dengan rajin, pengaturan dan kondisi kerja banyak pejabat dapat membuat mereka rentan terhadap korupsi dan menciptakan peluang untuk menerima atau meminta suap atau menggelapkan dana yang dimaksudkan untuk pengelolaan dan perlindungan satwa liar dan kehutanan.

Korupsi terjadi untuk memungkinkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan terjadi sejak awal, atau berlanjut karena tidak ada check and balances. Hal ini dapat melibatkan pengawas hewan buruan berpangkat rendah, petugas bea cukai, dan petugas kehutanan yang menerima suap dan kemudian 'menutup mata' terhadap aktivitas ilegal. Ini juga dapat menjangkau tingkat atas pemerintahan yang terlibat dalam keputusan kebijakan dan pembuatan undang-undang di sektor satwa liar dan kehutanan. Korupsi tingkat tinggi dapat sangat merusak karena menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi suatu negara dan dapat mendorong korupsi di tingkat yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, korupsi merupakan bagian intrinsik dari sistem patronase yang menopang kekuasaan elite penguasa suatu negara. Manipulasi politik merupakan masalah utama dalam kegiatan ilegal yang terus-menerus di sektor satwa liar dan kehutanan. Hal ini sering menyebabkan rusaknya hukum dan ketertiban serta menghambat investasi swasta dan asing di sektor-sektor ini.

Karena flora dan fauna mewakili sumber daya alam bernilai tinggi, seringkali berada di bawah kendali atau regulasi pemerintah, mereka menawarkan potensi sumber kekuatan politik yang penting, dan juga risiko tinggi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Akibatnya, korupsi dalam alokasi konsesi perburuan, dalam pemberian izin penebangan, dan dalam penerbitan izin untuk mengolah, mengimpor dan/atau mengeksport flora dan fauna tersebar luas. Penjahat juga dapat menawarkan suap kepada pejabat untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan satwa liar atau patroli, agar perburuan tidak diketahui, spesimen ilegal melewati pos pemeriksaan atau untuk memastikan bahwa pengiriman ilegal tidak diperiksa atau disita. Pada tingkat korporasi, korupsi dapat digunakan untuk menciptakan kesan legitimasi sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan ilegal tampak sebagai sumber yang sah dari satwa liar dan hasil hutan.

Korupsi menghambat kemampuan pejabat publik yang jujur untuk memenuhi mandatnya, baik itu mengelola dan melindungi sumber daya satwa liar, melindungi perbatasan, atau mengelola dan mengatur

pasar untuk produk satwa liar. Korupsi juga merusak proses peradilan pidana, karena ketiadaan kontrol dapat mengakibatkan hilangnya atau disembunyikannya bukti, serta membuat saksi, jaksa dan petugas pengadilan lainnya rentan terhadap korupsi. Penundaan dalam proses persidangan yang lancar dapat meningkatkan peluang untuk melakukan pelanggaran. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan penduduk setempat, sehingga semakin melemahkan kepatuhan terhadap undang-undang pada umumnya dan undang-undang perlindungan satwa liar dan kehutanan pada khususnya.

Faktor-faktor yang memungkinkan dan mendorong korupsi terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan bermacam-macam, antara lain, kurangnya transparansi dalam proses dan prosedur (seperti pengadaan), kurangnya akuntabilitas, konflik kepentingan, keterbatasan kapasitas manusia dan teknis, kurangnya kerja sama antar-lembaga, kesulitan membawa kasus ke pengadilan, hukuman yang ringan, sistem pelaporan dan pemantauan yang tidak memadai, undang-undang, peraturan dan birokrasi yang kompleks dan kontradiktif, dan gaji yang tidak dibayarkan teratur. Analisis lengkap tentang penyebab dan perwujudan korupsi berada di luar cakupan Perangkat ini, tetapi dalam menilai mekanisme yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, akan berguna untuk menyusun dan menganalisis informasi yang tersedia tentang tingkat dan karakteristik korupsi dan keterlibatan pejabat publik dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan. Selain pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan di bawah ini, Bab I, Bagian 4.3 dari Perangkat ini menguraikan tindak pidana korupsi dan Bab II, Bagian 2.3, 3.4 dan 8 mencermati akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum, jaksa dan peradilan.



Keterlibatan pejabat publik

- » Bukti dan indikator apa yang menunjukkan bahwa pejabat publik terlibat atau terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan? Apakah aktor atau fasilitator utamanya adalah pejabat publik?
- » Siapa lembaga, unit dan individu yang terlibat; apa latar belakang mereka? Dalam jenis kejahatan (lain) apakah mereka diketahui terlibat?
- » Apa peran dan tanggung jawab utama mereka di bidang operasi?

Sumber daya tambahan:

UNODC, *Mencegah dan Anggota korupsi yang berkaitan dengan kejahatan yang berdampak pada lingkungan: Suatu Tinjauan*. Wina (2021)

UNODC, *Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia. Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 20–21*

UNODC, *Scaling belakang korupsi : Sebuah Memandu di atas Mengatasi korupsi bagi Satwa liar direksi Pihak berwenang*

1.3 Komunitas lokal dan masyarakat adat

Memahami dampak kejahatan satwa liar dan kehutanan terhadap populasi spesies yang terkena dampak, komunitas lokal dan masyarakat adat sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut secara efektif. Karena hubungan yang kuat dengan wilayah, sumber daya alam dan ekosistem di sekitarnya, masyarakat adat dan komunitas lokal seringkali menjadi sekutu utama dalam mencegah dan memberantas kejahatan satwa liar dan kehutanan. Terlibat dengan kelompok dan komunitas ini penting untuk mengembangkan dan menerapkan strategi, undang-undang, dan tindakan praktis yang berarti; untuk mengaktifkan dan memfasilitasi kerja sama dan pemahaman; dan membangun dukungan bagi upaya penegakan hukum.

Hal ini sangat relevan bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada satwa liar dan sumber daya hutan dan masyarakat adat atau pedesaan yang merupakan penjaga lahan tradisional dan yang mungkin terpinggirkan oleh kebijakan dan program pembangunan yang ada. Bagi banyak kelompok masyarakat adat, pedesaan atau terpinggirkan, satwa liar dan hutan merupakan bagian integral dari budaya mereka, terutama untuk makanan (termasuk daging), tempat tinggal dan obat-obatan, dan berfungsi sebagai jaring pengaman selama masa-masa sulit. Karena hubungan mereka yang kuat dengan sumber daya, tanah dan wilayah mereka, masyarakat adat dan mereka yang hidup dengan gaya hidup tradisional terkena dampak secara tidak proporsional oleh

kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan seperti perburuan liar, penebangan liar dan pengambilan hasil kayu dan bukan kayu dari hutan. Terlalu sering, kejahatan satwa liar dan kehutanan berjalan beriringan dengan ancaman dan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran serius terhadap kebebasan sipil orang-orang yang mempertahankan lingkungannya. Hak asasi masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk hak mereka atas kehidupan dan keamanan, dan standar hidup yang layak, termasuk pangan dan perumahan, sangat berisiko terhadap ancaman kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka yang mengambil tindakan damai untuk melindungi lingkungan dapat memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan terhadap satwa liar.

Di banyak negara, undang-undang terkait satwa liar dan kehutanan yang berlaku saat ini membatasi hak dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada satwa liar dan hutan. Masyarakat ini sering mengalami kesulitan mendapatkan hak kepemilikan tanah dan akses mereka ke, dan penggunaan, satwa liar dan sumber daya hutan seringkali tidak tercermin dalam program pengelolaan hutan. Selain itu, langkah-langkah penegakan hukum satwa liar dan kehutanan seringkali memperkuat ketidakadilan sosial, membatasi mata pencaharian pedesaan dan memperburuk penggunaan satwa liar dan hasil hutan yang tidak berkelanjutan. Mekanisme pembagian manfaat dapat menjadi metode untuk mengatasi dampak buruk strategi konservasi terhadap masyarakat lokal: idenya adalah untuk mengarahkan manfaat moneter dan bukan moneter yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya tertentu kembali ke masyarakat yang paling dekat hubungannya dengan sumber daya tersebut, sehingga menciptakan penerimaan untuk penggunaan tertentu tersebut.

Dengan latar belakang ini, peran dan keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok adat harus dianalisis dengan baik, dan isu-isu seperti mengatasi kemiskinan dan menyediakan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan perlu dipertimbangkan. Undang-undang, kebijakan dan program satwa liar dan kehutanan harus memastikan bahwa masyarakat adat dikonsultasikan tentang masalah apa pun yang mungkin mempengaruhi mereka, bahwa mereka memberikan persetujuan bebas dan terinformasi sebelum mengambil langkah-langkah yang mempengaruhi mereka, dan bahwa mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya mereka (termasuk proses pembuatan hukum). Adanya undang-undang dan strategi untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan yang merugikan masyarakat lokal dan kelompok adat berisiko memperburuk masalah dengan menciptakan ketegangan dan hambatan antara kelompok yang berbeda, dan dengan mendorong lebih banyak kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan sebagai tindakan pembalasan terhadap hukum yang dianggap tidak adil dan tidak seimbang. Langkah-langkah ini dibahas lebih lanjut di Bab V, Bagian 4.1 dan 4.2 Perangkat ini.

Komunitas lokal dan masyarakat adat

- » Komunitas lokal dan kelompok adat mana yang terkena dampak kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana mereka terpengaruh?
- » Bagaimana masyarakat lokal menjelaskan tindakan mereka sehubungan dengan pemanfaatan satwa liar dan kehutanan?
- » Bagaimana situasi sosial ekonomi masyarakat dan kelompok ini? Berdasarkan apa mata pencaharian dan pendapatan mereka? Sampai sejauh mana mata pencaharian dan kelangsungan hidup bergantung pada satwa liar dan hasil hutan?
- » Apa hak hukum komunitas dan kelompok ini?
- » Bagaimana situasi ketahanan pangan komunitas dan kelompok ini? Apa strategi penanggulangan mereka untuk mengatasi kekurangan pangan?
- » Bagaimana komunitas dan kelompok ini melindungi dan mengelola satwa liar dan sumber daya hutan mereka? Apakah ada inisiatif kontrol dan pencegahan masyarakat untuk perburuan dan penebangan?
- » Apakah hukum nasional menghormati adat istiadat setempat dan hak (milik) masyarakat lokal dan kelompok adat? Apakah masyarakat dan kelompok memiliki akses ke satwa liar dan hutan?



ALAT
V.6

Komunitas lokal dan masyarakat adat

- » Apakah mekanisme pembagian keuntungan struktural dan akses telah dibuat untuk kepentingan masyarakat lokal?
- » Apakah komunitas lokal dan kelompok adat berpartisipasi atau terlibat dalam konsultasi terkait pengambilan keputusan dan penyusunan undang-undang yang relevan dengan satwa liar dan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka?
- » Apakah komunitas lokal memiliki inisiatif perencanaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya mereka sendiri?
- » Apakah penilaian sosial terhadap operasi penegakan hukum merupakan bagian dari praktik standar?
- » Apakah ada kampanye peningkatan kesadaran dan pencegahan berbasis komunitas?
- » Apakah saat ini ada inisiatif yang sedang berlangsung untuk menyediakan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan dan/atau mengatasi kemiskinan?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Mencegah dan Anggota korupsi yang berkaitan dengan kejahatan yang berdampak pada lingkungan: Suatu Tinjauan. Wina (2021)

UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia. Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 20–21

UNODC, Scaling belakang korupsi : Sebuah Memandu di atas Mengatasi korupsi bagi Satwa liar direksi Pihak berwenang

1.4 Konsumen

Permintaan dan kekayaan konsumen satwa liar dan hasil hutan – yang dapat berlokasi dekat atau di tempat yang jauh dari sumbernya – dapat menjadi pendorong kuat kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Ada banyak penyebab besarnya minat konsumen terhadap satwa liar dan hasil hutan, beberapa di antaranya dibahas di Bab V, Bagian 2.3 Perangkat ini. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang profil konsumen dan peran mereka sebagai pelaku dalam rantai perdagangan ilegal. Memahami apa yang memotivasi konsumen untuk menginginkan produk yang berasal dari kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat membantu mengembangkan penanggulangan kejahatan satwa liar dan kehutanan, mulai dari peningkatan kesadaran hingga intervensi pengurangan permintaan berbasis pasar dan kriminalisasi. Mengadopsi lensa peka gender untuk memahami dan mengekang minat konsumen terhadap satwa liar dan produk hutan adalah kuncinya, karena penggunaan produk satwa liar ilegal sangat dipengaruhi oleh gender dan seringkali didorong oleh norma identitas.



ALAT
V.7

Konsumen

- » Apakah ada permintaan yang tinggi untuk satwa liar dan hasil hutan di negara/lokasi? Apa produk konsumsi utama? Dan apa motivasi konsumsi/penggunaannya? (misalnya makanan/protein, obat-obatan, simbol status, dan lain-lain). Apakah tersedia data terpilah berdasarkan gender tentang hal ini?
- » Apakah konsumen sengaja mencari spesies yang dilindungi? Apakah mereka tahu jika objek konsumsi mereka melibatkan spesies yang dilindungi dan/atau berasal dari sumber ilegal?
- » Orang atau perusahaan komersial apa yang membeli satwa liar dan hasil hutan dari masyarakat lokal? Bagaimana mereka menghubungi komunitas lokal atau kelompok adat?
- » Jika satwa liar dan hasil hutan berasal dari luar negeri, bagaimana cara konsumen mengakses pasar (misalnya sektor perhotelan, daring, pasar fisik, melalui kenalan atau anggota keluarga, dan lain-lain)?
- » Siapa pengguna akhir satwa liar dan hasil hutan? Dimana mereka; apa tempat tujuan dari satwa liar dan hasil hutan? Apakah tersedia data terpilah gender?
- » Apakah satwa liar dan hasil hutan dijual di pasar lokal atau disajikan di restoran?

2

Bagian V

Analisis konteks

Mengidentifikasi pola perdagangan ilegal satwa liar dan hasil hutan, mencermati permintaan yang mendorong kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan mengeksplorasi dampak kejahatan tersebut terhadap manusia dan lingkungan dapat membantu menjelaskan penyebab dan konteks dari kejahatan spesifik dan terhadap satwa liar dan kejahatan kehutanan pada umumnya.



2.1 Perdagangan dan pasar legal

2.1.1 Pasar legal paralel

Berbeda dengan pasar yang melarang sepenuhnya, perdagangan satwa liar dan hasil hutan melibatkan barang-barang yang legal atau ilegal tergantung pada kapan, di mana dan bagaimana mereka diperoleh, ditransfer, atau dijual. Banyak hewan dan tumbuhan liar diperdagangkan secara legal di seluruh dunia, tanpa ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Perdagangan legal satwa liar dan hasil hutan adalah industri global yang signifikan, menghasilkan pendapatan bagi banyak ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi banyak orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi dengan jelas batas antara produk yang dipasok dan diperdagangkan secara legal dan ilegal.

Perdagangan satwa liar legal dan ilegal secara paralel memiliki banyak karakteristik. Beberapa spesies diperdagangkan baik secara legal maupun ilegal, artinya perdagangan ilegal menghasilkan tingkat permintaan yang tidak berkelanjutan untuk populasi spesies tersebut. Seperti yang dibahas lebih lanjut di Bab V, Bagian 2.3 Perangkat ini, permintaan mungkin berasal dari penggunaan tradisional yang telah berusia berabad-abad, tetapi juga dapat berasal dari penggunaan yang baru diiklankan. Selain itu, permintaan akan spesies liar seringkali merupakan produk dari kekayaan yang terus meningkat, baik karena semakin banyak orang yang mampu membeli produk yang mahal atau karena hal itu dapat menjadi bentuk konsumsi yang mewah. Ketidakseimbangan antara terbatasnya pasokan legal dan tingginya tingkat permintaan meningkatkan aliran produk ke pasar ilegal.



ALAT
V.8

Pasar legal paralel

- » Apakah satwa liar dan hasil hutan dijual di pasar legal? Apakah pasar legal ini juga digunakan untuk menjual produk ilegal?
- » Apakah ada pasar domestik untuk satwa liar dan hasil hutan? Apakah ada pasar internasional untuk satwa liar dan hasil hutan?
- » Apakah satwa liar dan hasil hutan diekspor?
- » Apakah produk diperdagangkan dan dikirim dalam bentuk hidup, mentah, atau setengah jadi?
- » Apa bentuk produk yang diterima konsumen akhir?
- » Apakah pasar legal dapat dipisahkan dengan jelas dari pasar ilegal? Di mana mereka bertemu dan kesamaan apa yang mereka miliki?
- » Apakah ada perbedaan legalitas antara hukum internasional (seperti CITES) dan hukum nasional?
- » Bagaimana legalitas produk ditentukan?

2.1.2 Intervensi Berbasis Pasar

Keuntungan yang menguntungkan dari perdagangan ilegal satwa liar dan hasil hutan membuat kegiatan yang terlibat dalam perdagangan ini menarik. Harga yang tinggi dapat diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan legal satwa liar dan hasil hutan di satu sisi dan permintaan yang tinggi di sisi lain. Pendekatan berbasis pasar untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan mengatasi permintaan dan pasokan satwa liar dan hasil hutan. Pendekatan tersebut menargetkan pasar dan harga satwa liar dan hasil hutan, serta produk penggantinya, seperti sumber daya yang dipanen secara lestari. Strategi berbasis pasar yang umum untuk mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan termasuk, antara lain, mengenakan pajak atau pungutan lain untuk menaikkan harga konsumen atau mengurangi profitabilitas produsen, menurunkan tarif pajak atas produk pengganti (berkelanjutan), dan meningkatkan profitabilitas produksi yang dipanen secara lestari melalui subsidi, nilai tambah, sertifikasi dan pelabelan.

Misalnya, intervensi berbasis pasar mungkin tepat untuk mengatasi kegiatan ilegal yang berkaitan dengan penebangan jika meningkatkan penebangan yang diperbolehkan secara legal dan berkelanjutan dapat berfungsi lebih baik daripada meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Selain itu, menurunkan bea masuk dapat efektif dalam meningkatkan pasokan kayu dan, sebagai akibatnya, mengurangi permintaan kayu bulat domestik ilegal. Negara konsumen dan industri harus mengambil keuntungan dari kemungkinan ini untuk mengurangi insentif pembalakan liar. Ini juga dapat mencakup reformasi pasar dan kebijakan pengadaan publik yang mendiskriminasi barang curian.

Penerapan instrumen keuangan dan ekonomi untuk perdagangan satwa liar relatif baru dan belum meluas. Selain itu, instrumen ini biasanya bergantung pada hak kepemilikan yang jelas dan pasar kompetitif yang relatif terbuka — kondisi yang tidak ada di beberapa negara tempat terjadinya perdagangan satwa liar legal dan ilegal.



ALAT
V.9

Intervensi berbasis pasar

- » Apakah intervensi berbasis pasar digunakan untuk mengatasi aktivitas ilegal yang terkait dengan satwa liar dan hasil hutan?
- » Apakah kebijakan tentang penetapan harga (termasuk pajak, retribusi, dan Persyaratan sertifikasi) menciptakan atau mempromosikan pasar ilegal?
- » Apakah kebijakan pengadaan publik mempromosikan penggunaan produk dari sumber legal yang berkelanjutan?

2.1.3 Data ekonomi

Data ekonomi dan statistik perdagangan dapat membantu dalam mengidentifikasi skala dan pola perdagangan ilegal fauna dan flora. Misalnya, data tentang kekurangan pendapatan dan informasi tentang kapasitas industri atau efisiensi pemanfaatan sangat membantu dalam menganalisis sejauh mana flora dan fauna ilegal dimanfaatkan.

'Penyusutan' adalah istilah yang diterapkan pada perubahan inventaris yang tidak dapat dijelaskan. Dengan tidak adanya penyebab lain yang jelas (seperti pembusukan dan kerusakan), penyusutan sering dikaitkan dengan pencurian atau aktivitas ilegal lainnya. Demikian pula dalam pengelolaan kehutanan dan satwa liar, pengurangan luas hutan, populasi dan jumlah satwa liar dapat digunakan untuk memperkirakan kerugian akibat kejahatan. Sayangnya, dalam banyak kasus yang melibatkan sumber daya alam, penilaian sumber daya, inventarisasi dan sensus satwa liar dan hutan sangat ketinggalan zaman, atau sangat tidak akurat dan tidak tepat sehingga nilai praktisnya kecil dalam memperkirakan kerugian akibat kejahatan.

Metode lain untuk mengidentifikasi aktivitas ilegal adalah dengan menggunakan perbandingan data produksi, konsumsi dan perdagangan satwa liar dan hasil hutan. Membandingkan, misalnya, pengiriman log dan hasil pabrik, atau catatan ekspor di negara pengirim dengan catatan impor di negara penerima, dapat mengungkapkan perbedaan. Perbedaan ini dapat menunjukkan besarnya potensi pencurian, penyelundupan dan harga transfer. Pemeriksaan konsistensi serupa antara pendapatan hutan dan panen yang dilaporkan juga dapat bermanfaat.

Data ekonomi

- » Data ekonomi apa saja yang tersedia tentang perdagangan Fauna dan Flora?
- » Apakah perubahan yang tidak terhitung dalam inventaris mengungkapkan adanya aktivitas ilegal?
- » Apakah ada perbedaan perdagangan yang signifikan antara masukan-keluaran dan ekspor-impor yang menunjukkan terjadinya aktivitas ilegal?



2.2 Integritas rantai pasokan

Perdagangan satwa liar dan hasil hutan melibatkan rantai pasokan yang kompleks yang sering menjangkau negara bagian dan benua yang berbeda. Rantai pasokan mengacu pada tempat, tahapan, dan orang-orang yang terlibat dalam aliran barang, jasa, dan keuangan dari tempat asal hingga konsumen akhir. Integritas rantai pasokan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada komoditas asal ilegal yang dimasukkan ke dalam rantai pasokan pasar yang sah. Tahapan dasar rantai pasokan untuk satwa liar dan produk hutan melibatkan langkah-langkah di bawah ini, tetapi mungkin tidak selalu linier dan untuk beberapa produk dan beberapa tahapan dapat berulang :

1. Kegiatan persiapan: tindakan diarahkan untuk memastikan akses ke lokasi dan lahan di mana fauna atau flora berada, serta alat dan kontak yang diperlukan untuk melanjutkan pemanenan, pengangkutan dan penjualan fauna atau flora yang ditargetkan. Hal ini juga dapat mencakup pengamanan hak guna lahan, sertifikat dan izin;
2. Berburu, menebang, Memanen: pemindahan dan pengambilan secara fisik fauna atau flora liar dari habitat aslinya;
3. Transportasi: perpindahan fauna atau flora yang dipanen ke lokasi yang akan diolah (bila diperlukan), dikonsolidasikan atau dijual;
4. Pemrosesan: modifikasi fauna atau flora liar untuk mengekstraksi atau membuat produk akhir yang akan dijual kepada konsumen, jika diperlukan;

5. Ekspor/Impor: relevan untuk transportasi internasional, yang melibatkan negara asal, tujuan, dan terkadang negara transit; dan
6. Penjualan: pertukaran komoditas (produk atau spesimen hidup) untuk uang atau komoditas lainnya.

2.2.1 Rantai pasokan geografis

Rantai pasokan global untuk satwa liar dan hasil hutan sering dipahami sebagai melibatkan negara sumber, transit, dan tujuan. Dalam konteks spesifik kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, negara sumber adalah tempat satwa liar awalnya diekstraksi, dieksploitasi, diambil, dibunuh, atau diburu. Negara transit adalah negara tempat satwa liar dan hasil hutan ilegal bergerak (terkadang tanpa proses perizinan formal, deklarasi atau pembayaran bea). Negara tujuan adalah tempat produk tersebut dijual dan dikonsumsi untuk berbagai keperluan. Titik sumber, transit, dan tujuan tidak saling eksklusif dan satu negara atau wilayah dapat berfungsi sebagai beberapa titik di sepanjang rantai pasokan.

2.2.2 Rantai aktor

Cara lebih lanjut adalah mengkaji para pelaku di sepanjang rantai pasokan satwa liar dan kehutanan di sepanjang jalur perdagangan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara para pelaku dan melacak aliran keuangan gelap yang terkait dengan perdagangan satwa liar dan kehutanan ilegal.

Kategori berikut adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan berbagai aktor yang terlibat:

- ↪ Pemburu liar adalah mereka yang secara ilegal memanen, menangkap, memburu, membunuh atau menawan fauna atau flora di sumbernya, yang bertentangan dengan undang-undang nasional.
- ↪ Penjaja dan perantara membeli satwa liar atau hasil hutan ilegal langsung dari pemburu liar di sumbernya dan mengirimkannya ke pelaku berikutnya dalam rantai pasokan.
- ↪ Perantara biasanya pedagang tingkat menengah hingga tinggi yang menangani logistik yang diperlukan untuk mengangkut dan mengkonsolidasikan satwa liar atau hasil hutan ilegal. Mereka bekerja sebagai perantara antara broker dan eksportir.
- ↪ Eksportir/importir adalah aktor kunci dalam memindahkan satwa liar atau hasil hutan ilegal dari satu negara ke negara lain dan ke luar negeri. Mereka mungkin bertanggung jawab menyiapkan dokumen transportasi dan menyembunyikan produk.
- ↪ Pedagang grosir membeli satwa liar atau hasil hutan ilegal di negara tujuan dan mendistribusikannya ke pedagang eceran.
- ↪ Pengecer menjual satwa liar atau produk hutan ilegal ke konsumen akhir.
- ↪ Konsumen membayar pengecer, sehingga memberikan motivasi untuk tindakan kejahatan lebih lanjut.

Pelaku mana yang terlibat akan bergantung pada komoditas yang diperdagangkan dan pada keadaan masing-masing kasus. Sementara semua pelaku mungkin terlibat dalam perdagangan beberapa spesies, spesies lain mungkin langsung berpindah dari pemburu liar ke pengecer. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan juga bahwa beberapa kegiatan terlarang bersifat musiman, terutama yang berkaitan dengan spesies yang bermigrasi dan beberapa tumbuhan, sehingga intervensi mungkin perlu ditargetkan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Mungkin juga para pemburu liar dan pemanen liar dapat beralih ke komoditas lain, seperti penambangan liar, jika yang biasanya dicari tidak tersedia atau menguntungkan.

2.2.3 Rantai pasokan

Memahami rantai pasokan untuk berbagai produk sangat membantu dalam memahami para pelaku dan praktik bisnis yang terlibat dalam perdagangan ini. Ini dapat membantu mengklarifikasi bagaimana penjahat dan organisasi kejahatan terlibat, bagaimana mereka diorganisir, bagaimana kelompok kejahatan terorganisir mengeksploitasi praktik bisnis legal, arus keuangan apa yang menyertai perdagangan gelap dan kejahatan lain apa (misalnya korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, biaya yang tidak dibayarkan) yang memfasilitasi perdagangan satwa liar dan kehutanan ilegal. Organisasi kejahatan mungkin, misalnya, memperkenalkan produk dari sumber ilegal ke dalam rantai pasokan pasar legal untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke calon pembeli, yang pada gilirannya mungkin tidak mengetahui asal usul ilegal dari produk yang mereka beli. Sejumlah besar produk satwa liar dan hutan dicuci melalui rantai pasokan resmi, seringkali difasilitasi oleh dokumen palsu, korupsi atau jenis penipuan lainnya.

Mendokumentasikan rantai pasokan adalah salah satu langkah untuk melindungi integritasnya. Hal ini sering didukung oleh penggunaan sistem penandaan seperti barcode, stempel, penandaan laser, atau cat khusus dan tinta yang tidak dapat dihapus. Pemeriksaan penandaan tersebut di sumber, di pos pemeriksaan dan titik transit, di perbatasan dan oleh pengecer, serta pemeriksaan acak di berbagai lokasi, adalah salah satu cara untuk memvalidasi sumber dan keaslian produk dan untuk memastikan integritas rantai pasokan. Ini juga termasuk tahapan rantai pasokan di tempat bahan mentah diproses, di tempat kayu digiling, atau di tempat konversi flora dan fauna lainnya terjadi. Namun, langkah-langkah ini hanya berguna jika komoditas dinyatakan secara akurat; dalam banyak kasus, tidak demikian, dan pernyataannya dibuat salah, atau barang selundupan satwa liar dan hutan disembunyikan di antara kargo lainnya. Tes DNA dapat digunakan di berbagai titik dalam rantai pasokan untuk memastikan bahwa spesies dinyatakan secara akurat.

Integritas rantai pasokan mendapat manfaat dari membuat beberapa bagian dari proses transaksi perdagangan menjadi elektronik, sehingga mengurangi peluang korupsi, yang mungkin juga termasuk mengeksplorasi teknologi baru seperti blockchain. CITES, misalnya, telah memperkenalkan berbagai langkah untuk memperkuat sistem perizinannya dan mendukung para Pihaknya yang menyatakan minat untuk menerapkan sistem perizinan e-CITES.

Analisis rantai pasokan

- » Peran apa yang dimainkan negara dalam rantai pasokan satwa liar dan hasil hutan?
- » Data ekonomi apa saja yang tersedia tentang perdagangan Fauna dan Flora?
- » Apa saja tempat dan siapa aktor yang terlibat dalam rantai pasokan satwa liar dan hasil hutan?
- » Bagaimana rantai pasokan dipantau?
- » Apakah perubahan Inventaris yang tidak terhitung mengungkap aktivitas ilegal?
- » Apakah ada perbedaan perdagangan yang signifikan antara masukan-keluaran dan ekspor-impor yang menunjukkan terjadinya aktivitas ilegal?
- » Langkah-langkah apa yang telah diadopsi untuk memastikan integritas rantai pasokan? Seberapa sukses langkah-langkah tersebut?
- » Apakah studi resmi atau independen telah dilakukan untuk mendokumentasikan dan menganalisis rantai pasokan dan integritas rantai pasokan untuk satwa liar dan hasil hutan?



2.2.4 Rantai nilai

Konsep rantai pasokan dapat dilengkapi dengan konsep rantai nilai, yang mengacu pada bagaimana nilai produk berubah pada setiap tahap rantai pasokan. Tergantung pada tahapan dan komoditasnya, perubahan ini bisa signifikan. Pemahaman yang terinci tentang rantai nilai satwa liar dan hasil hutan ilegal, dari produsen melalui perantara hingga konsumen akhir, memungkinkan untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat mengganggu pasar ilegal dan rantai nilai. Analisis rantai nilai dapat sangat berguna dalam mengidentifikasi kejahatan lain yang memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar dan hutan (misalnya pencucian uang, korupsi, penghindaran pajak atau tidak membayar biaya) yang mungkin menjadi kunci dalam mengganggu arus keuangan dan untuk mendukung investigasi keuangan, korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak.



Analisis rantai nilai

- » Apa pengetahuan yang tersedia tentang nilai satwa liar dan hasil hutan yang diperdagangkan secara ilegal pada tahap sumber dan transit di seluruh Negeri?
- » Apa pengetahuan yang tersedia tentang jumlah/nilai yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, tidak dibayarkannya biaya dan kejahatan lain yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?

Sumber daya tambahan :

ECOFEL, Penyidikan Keuangan terhadap Kejahatan Satwa Liar (2021) 22–25

UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 22, 26–27

2.3 Penggunaan satwa liar dan sumber daya hutan

Satwa liar dan hasil hutan merupakan sumber dari berbagai macam barang dan digunakan dengan berbagai cara. Dapat digunakan secara lokal (misalnya, untuk konsumsi langsung), atau dapat melewati pemrosesan yang rumit dan rantai perdagangan dari pemasok ke pengguna akhir. Menganalisis penggunaan dan konsumsi satwa liar dan sumber daya hutan dapat membantu dalam mengidentifikasi permintaan yang mendorong kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Jenis permintaan dan tingkat konsumsi berubah dari waktu ke waktu, terkadang dengan cepat, karena tren penggunaan dan komoditas berubah dengan cepat.

Salah satu perbedaan utama mengenai penggunaan satwa liar dan hasil hutan dapat dibuat antara penggunaan subsisten dan komersial. Motif yang mendorong perburuan tradisional, penebangan dan pengambilan untuk subsisten dan konsumsi lokal berbeda dengan motif yang mendorong kegiatan komersial berskala besar untuk melayani pasar yang lebih besar, seringkali internasional. Sebagian besar permintaan internasional melibatkan barang-barang mewah; konsumsi semacam itu didorong oleh pilihan daripada kebutuhan. Baik dalam kasus penggunaan subsisten atau komersial, menganalisis penggunaan satwa liar dan sumber daya hutan membutuhkan pemahaman tentang peran yang dimainkan oleh dinamika gender. Misalnya, penggunaan satwa liar dan hasil hutan ilegal di pasar konsumen komersial seringkali didorong oleh identitas dan norma gender, yang diklaim dapat meningkatkan kejantanan, atau keindahan dan kesuburan.

2.3.1 Subsisten

Dalam banyak kasus, pemanfaatan satwa liar dan hasil hutan merupakan sarana penghidupan bagi masyarakat dan individu yang bergantung pada satwa liar dan kehutanan untuk penghidupan dan ketahanan pangan mereka. Kurangnya sumber makanan dan pendapatan alternatif, dan dalam arti yang lebih luas, kurangnya pembangunan pedesaan dan ekonomi, memaksa beberapa kelompok untuk bergantung pada satwa liar dan sumber daya hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam kasus ini, kegiatan yang dianggap ilegal didorong oleh kebutuhan dasar atau cara hidup tradisional.

Banyak orang di seluruh dunia mengandalkan hewan dan tumbuhan yang bersumber dari alam liar untuk makanan. Konsumsi makanan berupa hewan liar mencakup berbagai macam spesies mulai dari primata hingga serangga, herbivora liar, kucing liar, dan reptil. Di beberapa tempat, hewan dari sumber liar ditampilkan sebagai elemen makanan pokok, terutama jika dagingnya berfungsi sebagai pasokan protein karena alternatifnya tidak tersedia atau tidak terjangkau. Masakan tradisional, terutama di daerah pedesaan, seringkali menggunakan produk yang bersumber dari alam. Ini mungkin melibatkan penggunaan seluruh hewan, dengan daging yang digunakan untuk makanan dan bagian lain yang digunakan untuk, antara lain, tujuan pengobatan, pembuatan pakaian dan peralatan.

Pemanfaatan satwa liar sebagai makanan dan obat sangat erat kaitannya, paling tidak karena keyakinan yang kuat bahwa konsumsi produk satwa liar bermanfaat bagi kesehatan.

Di tempat lain, perburuan dan bentuk-bentuk lain dari sumber bulu dan kulit dari alam tetap menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan di mana sumber spesiesnya melimpah, termasuk kawasan di mana perburuan diabadikan sebagai hak masyarakat adat.

Berkaitan dengan kayu dan hasil hutan, seringkali ketidakseimbangan kronis antara permintaan kayu yang tinggi, terutama kayu bakar, dan pasokan (legal) yang rendah yang mendorong penebangan liar. Selain itu, kurangnya sumber energi alternatif yang terjangkau memaksa kaum miskin pedesaan di banyak negara terlibat dalam kegiatan ilegal. Di banyak negara, produksi dan penjualan ilegal arang, beberapa di antaranya terjadi di luar batas negara, berdampak besar pada hutan. Intervensi yang menangani peningkatan kondisi ekonomi di daerah pedesaan dan pembangunan ekonomi secara umum dapat membantu mengurangi pengambilan kayu bakar ilegal.

Subsisten

- » Satwa liar dan hasil hutan apa yang digunakan oleh masyarakat setempat?
- » Apakah satwa liar dan hasil hutan digunakan untuk makanan, kayu bakar, pakaian, obat-obatan, konstruksi, peralatan atau tujuan lainnya? Apakah pria dan perempuan menggunakan atau menghargai produk ini secara berbeda?
- » Apakah produk ini digunakan untuk konsumsi pribadi/lokal atau untuk dijual? Jika untuk konsumsi, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa produk-produk ini dikonsumsi untuk tujuan lain di luar subsisten?
- » Sejauh mana mata pencaharian masyarakat lokal bergantung pada satwa liar dan hasil hutan ini? Sejauh mana masyarakat memiliki akses dan kapasitas hukum untuk mengelola produk-produk ini secara berkelanjutan?
- » Apakah permintaan yang tinggi untuk bahan bakar kayu dan kurangnya alternatif yang berkelanjutan memaksa masyarakat lokal untuk (secara ilegal) menggunakan hasil hutan?
- » Apakah kurangnya akses ke hutan memaksa masyarakat lokal untuk berburu dan memanen secara ilegal, termasuk di kawasan lindung?
- » Bisakah pengganti berkelanjutan digunakan sebagai pengganti satwa liar dan hasil hutan yang sedang ditinjau?
- » Jenis mata pencaharian apa yang dapat diperkenalkan untuk menggantikan spesies satwa liar dan hasil hutan yang dilindungi?



2.3.2 Penghasilan dari kejahatan satwa liar dan kehutanan

Dalam beberapa kasus, keuntungan yang diperoleh melalui partisipasi dalam aktivitas satwa liar dan hutan ilegal dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan reguler atau keuntungan lainnya. Dalam kasus lain, terkadang menjadi sumber pendapatan atau jaring pengaman pada saat-saat sulit. Bergantung pada skala dan keadaan, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dapat menguntungkan dan menghasilkan keuntungan besar yang mendorong para penjahat, termasuk kelompok kejahatan terorganisir, untuk terlibat dalam jenis kejahatan ini secara berkelanjutan.

Misalnya, salah satu bidang yang mendapat perhatian internasional adalah perdagangan komersial daging hewan liar. Dengan meningkatnya populasi manusia dan meningkatnya kemakmuran, khususnya di daerah perkotaan, permintaan daging hewan liar meningkat, yang berarti meningkatnya komersialisasi daging hewan liar.



Penghasilan dari kejahatan satwa liar dan kehutanan

- » Apakah satwa liar dan hasil hutan digunakan untuk menambah pendapatan pertanian masyarakat setempat?
- » Sejauh mana masyarakat lokal menghasilkan pendapatan melalui kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah ini sumber pendapatan utama atau apakah mereka menambah penghasilan tetap dengan kegiatan ilegal?
- » Apakah orang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga atau darurat untuk pendapatan Tunai?
- » Apakah keterlibatan dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan mendukung kebutuhan lain seperti penggunaan narkoba, konsumsi alkohol, permintaan barang material (seperti ponsel) atau digunakan untuk kebutuhan keluarga?
- » Apa alternatif realistis yang tersedia untuk kejahatan terhadap satwa liar dan hutan untuk menghasilkan pendapatan?

2.3.3 Budaya dan tradisi

Hewan dan tumbuhan yang diambil secara ilegal dari alam terkadang digunakan dalam praktik tradisional dan keagamaan, beberapa di antaranya berakar pada kepercayaan dan adat istiadat setempat. Misalnya, obat-obatan tradisional, yang banyak orang andalkan untuk perawatan kesehatan primer, terkadang melibatkan komponen yang berasal dari spesies hewan atau tumbuhan liar yang bersumber secara ilegal. Demikian pula, banyak tonik dan suplemen termasuk turunan dari hewan atau tumbuhan liar yang bersumber secara ilegal. Konsumsi produk semacam itu sering didasarkan pada keyakinan bahwa produk tersebut dapat memberikan beberapa kualitas hewan atau tumbuhan yang menjadi sumber.

Penggunaan produk-produk tersebut tidak terbatas pada orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama: penggunaan hewan dan tumbuhan liar sangat tertanam dalam obat-obatan tradisional, yang membuat semakin sulit untuk mengubah perilaku konsumen, bahkan jika melibatkan spesies yang terancam punah, barang terlarang atau kegiatan ilegal. Alternatif penangkaran atau perkebunan, jika tersedia, dianggap oleh banyak konsumen sebagai inferior dan kurang efisien dibandingkan produk yang didasarkan pada bahan yang bersumber dari alam liar. Karena (anggapan) efek penyembuhannya, spesies hewan dan tumbuhan yang digunakan dalam produksi obat-obatan, tonik, dan suplemen juga sering dikonsumsi untuk makanan.



Budaya dan tradisi

- » Jenis satwa liar dan hasil hutan apa yang dikonsumsi dalam pengobatan tradisional sebagai tonik atau untuk tujuan lain yang berhubungan dengan kesehatan? Apa dinamika jenis kelamin mereka (yaitu beberapa produk lebih disukai oleh pria / perempuan?)
- » Apakah satwa liar dan hasil hutan digunakan untuk upacara adat atau praktik budaya lainnya?
- » Apakah ada mekanisme hukum bagi masyarakat untuk mengakses produk-produk ini secara berkelanjutan ?
- » Apakah keyakinan dan status sosial atau kekayaan tertentu terkait dengan satwa liar dan hasil hutan?
- » Apakah kepemilikan satwa liar dan hasil hutan diterima secara sosial, dihargai atau distigmatisasi?
- » Bisakah pengganti berkelanjutan digunakan sebagai pengganti satwa liar dan hasil hutan ini?

2.3.4 Kegiatan rekreasi: pariwisata, hewan peliharaan, dan olahraga

Kelompok pengguna yang beragam ada di sisi permintaan perdagangan satwa liar dan kehutanan.¹¹³ Ini termasuk pengguna akhir yang konsumtif di pasar dan restoran serta pengguna seperti turis dan pemburu trofi. Beberapa sumber daya dapat terpengaruh secara negatif oleh dampak penggunaan rekreasi dan pariwisata. Contohnya termasuk pengumpulan karang, gangguan tempat bersarang, dan perburuan trofi.

Bagian-bagian hewan dan tumbuhan yang eksotis dan langka sering dijual sebagai suvenir, barang koleksi, dan barang antik, lalu digunakan untuk tujuan dekorasi atau ornamen. Ini terkadang melibatkan seluruh hewan yang diisi atau serangga atau hewan kecil yang dibungkus plastik untuk dipajang di rumah atau koleksi pribadi. Semakin langka spesiesnya, semakin banyak item tersebut dapat berfungsi sebagai simbol status dan semakin tinggi harga yang mungkin dipasang. Wisatawan sering membeli suvenir yang terbuat dari satwa liar setempat dan dengan demikian, secara sadar atau tidak sadar, memperoleh benda yang berasal dari spesies yang terancam punah atau dari hewan atau tumbuhan yang bersumber secara ilegal.

Sebagian besar perdagangan hewan hidup terjadi dalam konteks perdagangan hewan peliharaan, atau untuk koleksi pribadi atau kebun binatang. Sama seperti orang membeli hewan untuk digunakan sebagai hewan peliharaan, banyak tumbuhan diperdagangkan secara internasional untuk digunakan di kebun, taman, dan rumah pribadi. Perdagangan spesies hidup melibatkan spesimen hasil penangkaran dan yang bersumber dari alam liar, beberapa di antaranya merupakan spesies yang dilindungi. Pengumpul yang berdedikasi sering mencari untuk mendapatkan spesies yang terancam punah dan siap membayarkan harga yang tinggi, terlepas dari apakah mereka diperdagangkan secara legal atau ilegal. Sementara beberapa konsumen bersedia membayar harga premium untuk hewan atau tumbuhan yang bersumber dari alam liar, tergantung pada spesiesnya, juga bisa lebih murah untuk mengambil dari alam liar yang, pada gilirannya, dapat merangsang permintaan lebih lanjut. Peternak juga dapat mencoba untuk mendapatkan hewan atau tanaman dari sumber liar untuk meningkatkan keragaman genetik stok pengembangbiakan.

Kegiatan rekreasi: pariwisata, hewan peliharaan, dan olahraga

- » Kegiatan rekreasi apa yang melibatkan satwa liar dan hasil hutan?
- » Satwa liar dan hasil hutan yang dilindungi atau diatur mana yang dikumpulkan untuk disimpan di rumah atau dijual sebagai hewan peliharaan atau ornamen?
- » Spesies mana yang diburu dan bagaimana kuota ditentukan? Apa dampak positif/negatif yang muncul dari rencana perburuan tersebut?
- » Apa dampak positif/negatif dari aktivitas wisata terhadap satwa liar dan sumber daya hutan?
- » Fasilitas penangkaran apa yang ada di dalam negeri dan untuk spesies dan jenis penggunaan apa? Bagaimana ini dilisensikan atau diatur, dan oleh lembaga mana?



2.3.5 Barang mewah

Beberapa produk satwa liar telah mencapai status dan kelangkaan sedemikian rupa sehingga nilainya terlepas dari penggunaan praktis apa pun yang mungkin mereka miliki secara historis. Bahan-bahan ini dapat dibentuk menjadi perhiasan, barang-barang dekorasi, atau benda seni, dengan keterampilan yang berfungsi membuat barang-barang berharga dapat ditampilkan secara mencolok. Produk yang cocok untuk peran ini cenderung menggabungkan dua faktor utama: mereka secara tradisional diakui berharga dan pasokannya terbatas. Dengan kata lain, produk membawa prestise justru karena sulit mendapatkannya secara legal. Beberapa satwa liar yang bersumber secara ilegal, seperti gading dan cula badak, selanjutnya dapat diproses agar tampak seperti benda antik asli, seperti ukiran mahal dan piala persembahan.

¹¹³ Lihat juga Bab V, Bagian 1.5 arab ini Perangkat.

Misalnya, di banyak tempat penggunaan hewan dan tumbuhan yang bersumber dari alam liar dalam memasak bukanlah hasil dari kebutuhan, melainkan lebih merupakan cerminan dari status atau 'tren' dalam konsumsi makanan. Bahkan jika alternatif hasil penangkaran sudah tersedia, beberapa konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari alam liar. Tumbuhan eksotis dan daging dari hewan liar yang terancam punah terkadang ditampilkan sebagai makanan baru di menu restoran, seringkali sebagai hidangan mewah yang dijual dengan harga tinggi. Sangat sedikit makanan populer, baik hewani maupun tumbuhan, yang tidak dapat dibudidayakan. Bahkan daging yang agak eksotis dibudidayakan secara komersial untuk memenuhi permintaan ceruk (niche). Namun, makanan yang bersumber dari alam liar mungkin dihargai justru karena berasal dari alam liar. Konsumsi makanan juga menjadi pendorong utama penggunaan metode penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan di kawasan lindung, dan penangkapan ikan sangat berlebihan. Banyak spesies laut terancam bukan karena menjadi spesies target, tetapi karena tertangkap sebagai tangkapan sampingan.

Permintaan akan daging hewan liar meningkat karena populasi manusia yang terus bertambah serta kemakmuran yang meningkat, terutama di daerah perkotaan di mana daging hewan liar dan daging satwa liar sering dianggap sebagai makanan lezat. Permintaan daging hewan liar juga dapat muncul dalam komunitas diaspora yang ingin menjaga keakraban kuliner dengan rumah, mengakibatkan daging hewan liar selundupan melintasi perbatasan internasional melalui udara dan pelabuhan laut.

Selain itu, tanaman yang berasal dari alam masih digunakan secara luas dalam industri kosmetik dan wewangian, terutama jika penanamannya tidak praktis atau tidak hemat biaya. Karena populasi tumbuhan liar tidak terdokumentasi dengan baik, sulit untuk menentukan apakah pengambilan tumbuhan itu berkelanjutan atau apakah berkontribusi pada kepunahan spesies dan degradasi ekosistem. Peningkatan permintaan dapat menyebabkan pemanenan berlebihan secara cepat dan ketika spesies tersebut lambat pulih, seperti halnya dengan banyak spesies pohon dan sukulen, dampaknya bisa parah.

Kulit dan bulu binatang, bulu burung, dan serat telah digunakan untuk membuat atau menghias pakaian selama berabad-abad. Penggunaan utama mereka saat ini adalah di industri mode di mana produk mamalia, reptil, burung, dan ikan digunakan untuk membuat mantel, jaket, celana, alas kaki, tas, ikat pinggang, dompet, dan aksesoris lainnya. Banyak perusahaan telah mengganti bahan dari alam liar dengan bahan yang berasal dari peternakan penangkaran atau dengan kain dan bahan sintesis. Akan tetapi, barang-barang adibusana yang mahal terus diproduksi dari hewan yang bersumber dari alam liar, terutama jika penangkaran tidak memungkinkan atau tidak hemat biaya, dan jika konsumen yang bersedia membayar harga tinggi secara khusus meminta bahan asli yang bersumber dari alam liar. Penggunaan hewan dan produk hewani dalam pakaian yang diproduksi secara industri semakin diperdebatkan karena sifat industri fesyen yang mudah berubah, yang tunduk pada tren dan perubahan sedemikian rupa sehingga bahan yang modis di satu musim akan ketinggalan zaman di musim berikutnya. Dengan demikian, permintaan dapat berubah secara tiba-tiba dan cepat, yang dapat menjadikan peternakan hewan sebagai sektor ekonomi yang berisiko. Sumber alam liar, di sisi lain, membutuhkan lebih sedikit investasi dan dengan demikian dapat memiliki risiko keuangan yang lebih kecil.



ALAT
V.17

Barang mewah

- » Jenis satwa liar dan hasil hutan apa yang dikonsumsi sebagai makanan lezat atau makanan mewah lainnya? Apakah mereka melibatkan spesies yang dilindungi atau terancam punah? Dari mana mereka bersumber secara hukum? Bisakah mereka diganti dengan produk dari fasilitas Penangkaran atau Peternakan?
- » Jenis satwa liar dan hasil hutan apa yang digunakan untuk memproduksi (menjual, mengkonsumsi, dan lain-lain) kosmetik atau wewangian? Apakah mereka melibatkan spesies yang dilindungi atau terancam punah? Dari mana mereka bersumber? Bisakah mereka diganti dengan produk dari sumber yang berkelanjutan?
- » Jenis produk satwa liar apa yang digunakan dalam industri fesyen? Apakah mereka melibatkan spesies yang dilindungi atau terancam punah? Dari mana sumbernya? Bisakah mereka diganti dengan bahan sintesis atau dengan produk dari fasilitas penangkaran atau peternakan?

2.3.6 Kegiatan pertanian dan hutan

Perubahan tutupan lahan

Perubahan tutupan lahan mengacu pada modifikasi manusia terhadap permukaan terestrial bumi. Selama ribuan tahun, manusia telah memodifikasi lahan untuk mendapatkan makanan, menyiapkan tempat berlindung, dan menyediakan kebutuhan pokok lainnya. Luas dan intensitas perubahan tutupan lahan saat ini jauh lebih besar daripada sebelumnya, mendorong perubahan ekosistem dan proses lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menimbulkan risiko besar bagi ekosistem, satwa liar, dan sumber daya alam.

Perubahan tutupan lahan

- » Bagaimana tutupan lahan berubah dari waktu ke waktu? Apa pendorong utama perubahan tutupan lahan?
- » Apakah Deforestasi terjadi di daerah yang diminati?
- » Apakah lahan yang Digarap meningkat?
- » Apakah penggunaan tanaman agroindustri (seperti karet, kelapa Sawit, dan perkebunan kayu) berubah seiring waktu?
- » Bagaimana investasi lintas batas, agribisnis transnasional, dan pertanian kontrak memengaruhi penggunaan lahan lokal dan tutupan hutan? Industri apa yang terlibat dan apa sumber pembiayaannya?
- » Apa dampak perubahan tutupan lahan terhadap satwa liar dan hutan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati? Bagaimana pengaruhnya terhadap spesies yang terancam punah?

Penggembalaan dan pertanian

Pembunuhan spesies yang terancam punah dan dilindungi dapat dimotivasi oleh pendapatan yang menguntungkan yang diperoleh dari penjualan bagian dan turunan dari spesies tersebut. Selain itu, ada faktor lain dan perilaku manusia yang mengancam spesies yang dilindungi. Konservasi yang berhasil, yang menghasilkan peningkatan populasi hewan liar, dapat menyebabkan (risiko) insiden konflik manusia-satwa liar yang lebih tinggi. Demikian pula, dalam beberapa konteks, penggembalaan berlebihan oleh ternak domestik dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya sumber mangsa pemangsa, juga meningkatkan konflik manusia-satwa liar di mana ternak domestik dimangsa, dan pemangsa dibunuh sebagai pembalasan atau untuk mencegah serangan terhadap ternak lebih lanjut dan dampak buruk pada mata pencaharian. Kehadiran predator juga dapat menimbulkan risiko bagi anggota masyarakat, termasuk anak-anak.

Begitu seekor binatang dibunuh, bagian tubuhnya boleh dijual, meskipun motif utama pembunuhan itu bukan untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, berbagai jenis tindakan yang mengancam satwa liar dapat saling berhubungan, sehingga sulit untuk membedakan antara penyebab dan efek dasar. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terbunuhnya spesies yang dilindungi. Terutama ketika keuntungan komersial bukan merupakan motif utama, sangat penting untuk mengidentifikasi faktor kontekstual dan kontribusi yang terkait dengan kegiatan ilegal dan mengatasi penyebab ini untuk mencegah kejahatan terhadap satwa liar.

Penggembalaan dan pertanian

- » Apakah ada konflik Antara penggembala dan Satwa Liar?
- » Apakah hewan dibunuh oleh penggembala/anggota masyarakat setempat ? Mengapa?
- » Apakah hewan dibunuh untuk melindungi pertanian? Apakah bahan penjagaan yang memadai tersedia dan digunakan (kandang, kandang kuda, tempat penampungan dan sebagainya)?
- » Apakah hewan menimbulkan ancaman bagi penggembala/anggota komunitas?
- » Apakah hilangnya habitat atau basis mangsa alami melalui fragmentasi atau penggembalaan berlebihan lazim?
- » Apakah ada peningkatan populasi satwa liar?
- » Apakah ada skema kompensasi pemerintah yang terkait dengan konflik manusia/hewan? Apakah ada yang bukan pemerintah?
- » Apakah api digunakan untuk memperbesar area penggembalaan?



Perburuan dan pembunuhan tidak selektif

Pembunuhan tidak selektif (misalnya, dengan menggunakan perangkap atau umpan beracun) melibatkan teknik berburu yang dapat menyebabkan pembunuhan spesies selain yang menjadi sasaran. Pembunuhan yang tidak disengaja seperti itu dapat memengaruhi spesies yang terancam punah dan satwa liar yang lebih umum. Perkumpulan berburu dan sarana lain untuk mengatur perburuan, dan kontrol atas penggunaan senjata api dan senjata lainnya, adalah salah satu cara untuk mengatur dan memantau metode perburuan, tetapi dalam beberapa kasus, juga dapat berfungsi sebagai fasilitator pembunuhan tidak selektif.

**Perburuan dan pembunuhan Tidak Selektif**

- » Apa teknik berburu yang umum di area yang diminati? Apakah teknik berburu yang digunakan di area yang diminati menyebabkan tangkapan sampingan yang tidak disengaja (misalnya berburu dengan jaring, perangkap, racun, atau api)?
- » Apakah perburuan legal diatur? Jika ya, dengan cara apa? Apakah ada asosiasi perburuan dan bagaimana mereka mengatur dan mengontrol metode perburuan dan pembunuhan? Bagaimana mereka mendistribusikan manfaat, jika berlaku?
- » Apakah akses ke dan kepemilikan senjata, bahan peledak, dan senjata lain serta peralatan berburu oleh pemburu diatur?
- » Apakah ada masalah perburuan berlebihan? Jika demikian, sejauh mana?

2.4 Analisis dan pemantauan sumber daya

Jika tersedia, data tentang masalah lingkungan seperti kawasan hutan dan stok satwa liar sangat membantu untuk mengidentifikasi aktivitas manusia di sektor satwa liar dan kehutanan serta dampaknya terhadap sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat membantu mendeteksi aktivitas ilegal dan kerusakan yang terjadi pada habitat alami.

Analisis dan pemantauan sumber daya hutan dapat memberikan informasi yang sangat berharga untuk mengembangkan kebijakan dan undang-undang kehutanan yang memadai, dan untuk membantu membentuk langkah-langkah penegakan hukum yang tepat. Beberapa yurisdiksi telah membentuk sistem pemantauan dan pelacakan satwa liar dan kehutanan yang komprehensif dengan prosedur pelaporan standar yang membantu dalam mengendalikan perdagangan legal fauna dan flora dan dalam mengidentifikasi kegiatan ilegal. Sistem ini dirancang untuk melacak tanaman atau hewan (serta bahan tanaman atau hewan) dari sumber ke penjual dan mungkin seterusnya. Umumnya, sistem pemantauan ini didasarkan pada inventarisasi stok, penandaan, dan dokumentasi. Setiap langkah perdagangan membutuhkan bukti bahwa hewan, tumbuhan atau bahan diperoleh dari sumber yang sah dan disertai dengan izin, tanda dan tanda terima yang relevan yang menunjukkan bahwa bea dan pajak yang diperlukan telah dibayar.

Beberapa Negara menggunakan pemantau satwa liar atau hutan independen yang membantu pemerintah dalam melakukan analisis yang didukung informasi dan bersifat independen terhadap upaya dan pencapaian lembaga terkait dalam menyelidiki dan menekan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Pemantau ini sering membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem saat ini. Pemantauan independen dengan demikian memiliki potensi untuk memperkuat seruan untuk reformasi dan langkah-langkah anti-korupsi, yang disambut baik oleh para pejabat yang memiliki minat tulus dalam tugas publik mereka. Mereka juga dapat membantu mengungkap kepentingan politik dan hubungan yang mendasari banyak kegiatan ilegal di sektor satwa liar dan kehutanan. Secara umum, pemantau independen terbukti sangat efektif dalam meningkatkan tingkat informasi tentang sektor satwa liar dan kehutanan serta tingkat kepatuhan hukum di dalamnya.

Analisis dan pemantauan sumber daya

- » Apakah ada catatan, data, atau Informasi lain tentang perubahan tutupan hutan atau stok satwa liar, atau data Lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sektor satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah sistem pemantauan satwa liar atau kehutanan digunakan? Jika demikian, bagaimana sistem ini beroperasi?
Siapa yang melaksanakannya?
- » Apakah sistem pemantauan melibatkan pemantau mandiri? Jika demikian, siapa mereka dan bagaimana mereka beroperasi?

*Sumber daya tambahan :
FAO dan ITTO, Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum (2005) 62–64*



2.5 Konsekuensi kejahatan satwa liar dan kehutanan

Meskipun ancaman terhadap satwa liar dan spesies tanaman berasal dari berbagai sumber, seperti polusi, penggundulan hutan, perusakan habitat alami dan perubahan iklim, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan tetap menjadi kontributor yang signifikan terhadap masalah ini melalui perburuan, pemanenan, atau pengurusan berjumlah besar dari spesies yang sudah terancam punah atau berisiko. Selain itu, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan memiliki implikasi luas lainnya, tidak hanya untuk spesies yang terlibat, tetapi juga untuk penghidupan dan hak-hak manusia, keanekaragaman hayati dan tata kelola. Meskipun pemeriksaan menyeluruh atas konsekuensi ekologis, sosial, ekonomi dan lainnya dari kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan berada di luar cakupan Perangkat ini, Bagian berikut berfungsi untuk menyoroti beberapa masalah utama dan menyediakan alat tambahan untuk mendokumentasikan, mengukur, dan menganalisis dampak kejahatan satwa liar dan kehutanan di wilayah yang dicermati.

2.5.1 Untuk spesies hewan dan tumbuhan

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat mengancam kelangsungan hidup spesies. Perburuan, penebangan liar dan pemanenan ilegal spesies yang terancam punah dapat menyebabkan penurunan populasi dan akhirnya kepunahan.

Banyak spesies yang terancam punah rapuh dan membutuhkan penanganan ahli. Banyak cara penangkapan, pengangkutan, dan penyimpanan hewan dan tumbuhan sering kali menyebabkan cedera, kematian, atau gesekan, yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Metode yang digunakan oleh pemburu liar untuk membunuh atau menangkap hewan dan cara penanganan hewan seringkali sangat kejam dan gagal memenuhi standar kesejahteraan hewan. Penyelundupan hewan hidup dapat mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi untuk spesimen yang terlibat, terutama jika hewan tidak dipelihara dan diberi makan dengan benar. Metode sembarangan yang digunakan untuk menangkap hewan juga dapat membahayakan dan membunuh spesies yang tidak menjadi target, menguras populasi, dan merusak ekosistem.

Di luar dampak biologis negatif langsung pada spesies tertentu, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dapat memiliki dampak tidak langsung dari perspektif konservasi. Dua contoh yang paling jelas adalah tangkapan sampingan yang merugikan dari spesies yang tidak menjadi target dan masuknya spesies asing berbahaya ke dalam habitat. Contoh tangkapan sampingan yang merugikan sangat terkenal di sektor perikanan: jaring, tali, dan alat tangkap lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan yang diinginkan juga akan menangkap semua yang ada di jalurnya, termasuk penyu, lumba-lumba, dan ikan remaja. Contoh terestrial termasuk dampak pada spesies bukan target dari kegiatan seperti penebangan dan perburuan unggas air.



Konsekuensi dari kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk spesies hewan dan tumbuhan

- » Se jauh mana kejahatan satwa liar dan kehutanan di kawasan/yurisdiksi yang diperiksa mengancam spesies? Spesies mana yang paling terpengaruh?
- » Apakah kejahatan satwa liar dan kehutanan di wilayah/yurisdiksi yang diperiksa melibatkan cara-cara kejam yang digunakan untuk menangkap, membunuh, menangani, mengangkut, menyembunyikan, dan lain-lain, satwa? Apakah banyak hewan hidup yang terluka atau mati selama pengangkutan?
- » Jika ada, data terkait skala masalah dan hasil untuk spesies yang terkena dampak apa yang tersedia?
- » Dengan cara apa kejahatan satwa liar dan kehutanan mengancam atau berdampak pada spesies lain yang bukan target, misalnya dengan Metode perburuan, penebangan, dan Pemanenan tanpa pandang bulu?

2.5.2 Untuk lingkungan

Kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait dengan beberapa penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati dan dapat mengancam fungsi ekosistem yang menjadi sandaran kita semua. Di luar spesies yang terancam punah melalui hilangnya populasi, eksploitasi berlebihan satwa liar dapat menyebabkan masalah ekologis jangka panjang seperti menciptakan ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dan memperlambat tingkat reproduksi dan keragaman genetik spesies yang rentan. Penurunan populasi menjadi masalah lebih lanjut jika spesies kunci, yang didefinisikan sebagai spesies yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem sekitarnya dan spesies lain di dalam ekosistem tersebut, dipengaruhi oleh kejahatan satwa liar dan kehutanan. Selain itu, ekosistem telah diubah melalui praktik-praktik perusakan lingkungan yang digunakan untuk menghilangkan satwa liar, kayu, dan ikan.

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi manusia, spesies asli, dan ternak, terutama jika hal itu memperkenalkan virus, bakteri, atau spesies sementara ketahanan populasi aslinya tidak cukup resisten. Spesies yang diperdagangkan secara ilegal menurut definisi tidak menjalani kontrol kebersihan, sanitasi, dan fitosanitari dan oleh karena itu dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit zoonosis (terutama dari mamalia darat dan burung). Spesies eksotis yang diselundupkan dapat menimbulkan risiko biosekuriti karena berpotensi menetap di alam liar dan menjadi hama. Mereka juga dapat membawa benih, parasit, dan virus yang jika dilepaskan ke lingkungan, dapat berdampak negatif pada satwa liar asli, dan pada pertanian, hortikultura, dan akuakultur.



Konsekuensi kejahatan satwa liar dan kehutanan bagi lingkungan

- » Se jauh mana kejahatan satwa liar dan kehutanan di wilayah/yurisdiksi yang sedang diperiksa menyebabkan atau berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam ekosistem?
- » Bagaimana kejahatan satwa liar dan kehutanan berdampak pada tingkat reproduksi spesies rentan dan kunci?
- » Apakah kejahatan satwa liar dan kehutanan menimbulkan risiko biosekuriti dan perambahan tertentu, terutama melalui introduksi spesies asing?
- » Apakah ada peningkatan risiko penyebaran penyakit zoonosis ke hewan lain yang terkait dengan spesies yang diburu, diperdagangkan atau dijual di dalam negeri? Apakah ada prosedur untuk memantau dan meningkatkan kontrol kebersihan dan sanitasi?
- » Apakah ada peningkatan risiko penyebaran penyakit zoonosis yang terkait dengan konversi lahan atau perambahan oleh manusia dan ternak?

2.5.3 Untuk manusia

Kejahatan satwa liar dan kehutanan melemahkan dan mengancam kemampuan dan upaya negara untuk mengelola sumber daya alam mereka dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang parah, terutama di daerah yang bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan legal. Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat mengancam kehidupan pedesaan di mana kehidupan dan pendapatan masyarakat bergantung pada satwa liar, termasuk yang berbasis pada ekowisata. Selain itu, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dapat mengancam seluruh hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup dan keamanan hingga hak atas makanan, air dan sanitasi yang layak.

Karena flora dan fauna yang diperdagangkan secara ilegal tidak menjalani kontrol higiene, sanitasi, dan fitosanitari, mereka berpotensi berkontribusi terhadap penyebaran penyakit zoonosis ke manusia. Pandemi COVID-19 menyoroti bahwa kejahatan terhadap satwa liar merupakan ancaman tidak hanya bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga bagi kesehatan manusia, pembangunan ekonomi, dan keamanan. Penyakit zoonosis (yang disebabkan oleh patogen yang menyebar dari hewan ke manusia) mewakili hingga 75% dari semua penyakit menular yang muncul. Spesies liar yang diperdagangkan dan produk yang dihasilkan ditawarkan untuk konsumsi manusia biasanya lolos dari kontrol kebersihan atau sanitasi dan oleh karena itu menimbulkan risiko infeksi yang lebih besar. Ketika hewan liar diburu dari habitat aslinya, disembelih dan dijual secara ilegal, potensi penularan penyakit zoonosis meningkat. Penggunaan, konsumsi, dan perdagangan spesies satwa liar oleh manusia perlu dievaluasi berdasarkan informasi ilmiah dan berdasarkan fakta yang menempatkan keamanan dan kemakmuran planet ini di atas nilai ekonomi atau komersial spesies ini. Menghentikan perdagangan spesies satwa liar merupakan langkah penting tidak hanya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan supremasi hukum tetapi juga untuk membantu mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan.

Konsumsi daging hewan liar juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Daging hewan liar sering disiapkan di tempat yang tidak higienis karena sifatnya yang terlarang. Selain itu, daging hewan liar dapat menjadi vektor penyakit zoonosis, dengan risiko kesehatan bagi manusia yang berasal dari praktik penanganan yang tidak aman dan tidak diatur di sepanjang rantai pasokan, termasuk selama penyembelihan, pengangkutan, penjualan, pemasakan, dan konsumsi.

Pemburu liar dan pemburu sering dipersenjatai dengan senjata api atau senjata lain yang digunakan tidak hanya untuk membunuh, menangkap, atau mengumpulkan satwa liar, tetapi juga digunakan untuk melawan jagawana, petugas konservasi, polisi, dan masyarakat lokal yang melindungi atau tinggal di dekat hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Ancaman, kekerasan, dan skala penipisan seringkali dapat meningkat secara paralel ketika kelompok kejahatan terorganisir terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan. Meningkatnya militerisasi upaya anti perburuan terkadang dapat mengarah pada kebijakan 'tembak dulu' yang pada akhirnya dapat menyebabkan lebih banyak kematian pelaku potensial dan meningkatkan risiko kekerasan antara mereka yang berada di garis depan dan penduduk setempat, termasuk risiko kekerasan berbasis gender. Dalam keadaan seperti ini, kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat sangat melanggar hak asasi manusia.

Konsekuensi kejahatan satwa liar dan kehutanan bagi manusia

- » Apa konsekuensi dari kejahatan satwa liar dan kehutanan bagi ekonomi lokal dan ekonomi nasional? Bagaimana pengaruhnya terhadap mata pencaharian masyarakat setempat?
- » Jenis dan tingkat ancaman dan kekerasan apa yang terkait dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Bagaimana hal ini memengaruhi Perorangan dan komunitas lokal?
- » Dengan cara lain apa kejahatan satwa liar dan kehutanan melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil?
- » Apakah ada peningkatan risiko penyebaran penyakit zoonosis ke manusia yang terkait dengan spesies yang diburu, diperdagangkan, atau dijual di negara ini? Apakah ada prosedur untuk memantau dan meningkatkan kebersihan dan kontrol hygiene dan sanitasi?

Sumber daya tambahan :

UNODC, *Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi* (2020) 27
 Rencana Lingkungan PBB , *Mencegah pandemi berikutnya: penyakit zoonosis dan cara Memutus rantai Penularan* (2020) <https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and-oie-siapa-dan-unep-mengurangi-risiko-kesehatan-masyarakat-yang-terkait-dengan-penjualan-hewan-liar-hidup-spesies-mamalia-di-pasar-makanan-tradisional> (2021) https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/ig--121-1-food-safety-and-covid-19-guidance-for-traditional-food-markets-2021-04-12-en.pdf?sfvrsn=921ec66d_1&download=true



ALAT

V.24

2.5.4 Untuk tata kelola

Kejahatan satwa liar dan kehutanan dapat merusak tata kelola yang baik dan supremasi hukum dan, dalam beberapa kasus, mengancam stabilitas nasional. Ini dapat menyulut konflik bersenjata internal dan berkontribusi pada rusaknya hukum dan ketertiban, terutama jika kelompok bersenjata dan jaringan kejahatan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, termasuk satwa liar dan hasil hutan. Di beberapa tempat, kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait dengan proliferasi dan perdagangan senjata dan jenis kejahatan lainnya, yang dapat mengancam keamanan nasional dan menggoyahkan otoritas nasional.



Konsekuensi kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk Tata Kelola

- » Sejauh mana kejahatan satwa liar dan kehutanan di wilayah/yurisdiksi yang sedang diperiksa menyebabkan atau berkontribusi pada konflik internal?
- » Sejauh mana kejahatan satwa liar dan kehutanan terkait dengan kelompok bersenjata, proliferasi senjata dan amunisi, dan jenis kejahatan lainnya ?
- » Dengan cara lain apa kejahatan satwa liar dan kehutanan berdampak pada tata kelola dan keamanan nasional ?

2.6 Tren dan ancaman yang muncul

Kejahatan satwa liar dan kehutanan adalah fenomena yang selalu berubah baik dalam cara dilakukan maupun dalam cara persepsi. Munculnya teknologi baru, perubahan undang-undang dan peraturan, pergeseran dalam tindakan penegakan hukum dan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas semuanya berdampak pada tingkat dan pola kejahatan satwa liar dan kehutanan. Keberhasilan dalam pemberantasan kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak selalu menghilangkan aktivitas kejahatan yang ditargetkan, terutama karena pelaku mungkin mencoba mengubah atau melahirkan kembali aktivitas kriminal mereka. Kelompok kejahatan terorganisir seringkali sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap pembatasan, peraturan, dan tindakan penegakan baru.

Pasar gelap satwa liar dan hasil hutan sama seperti pasar gelap lainnya. Dengan peraturan yang kuat dan permintaan yang tinggi, harga produk naik, yang dapat meningkatkan keuntungan para penjahat. Ketika upaya untuk mengekang perdagangan gelap tidak berdampak pada penawaran dan permintaan, berbagai jenis efek perpindahan dapat terlihat. Regulasi yang kuat di satu tempat dikombinasikan dengan tingkat permintaan yang tinggi dapat mengalihkan operasi kejahatan ke tempat yang kurang diatur atau menggunakan spesies pengganti. Kejahatan satwa liar dan kehutanan juga dapat beralih ke spesies yang sama sekali baru karena perubahan permintaan atau penawaran.

Kebijakan, kapasitas, dan kerangka peraturan berbeda antar negara, mendorong penjahat untuk beralih ke tempat di mana mereka dapat beroperasi secara efisien dengan risiko hukuman yang rendah. Penjahat dan organisasi kejahatan cenderung mengeksploitasi celah legislatif dan penegakan di negara-negara yang kurang mampu mengatasinya, akibatnya negara-negara tersebut mulai terpengaruh oleh aktivitas kejahatan. Penegakan yang meningkat di satu kawasan dapat membuat lokasi geografis lain memiliki penegakan hukum yang kurang ketat dan lebih menguntungkan bagi para penjahat.

Bentuk pemindahan serupa dapat terjadi untuk jenis spesies yang diperdagangkan. Jika upaya penegakan hukum menarget spesies tertentu sebagai prioritas tinggi, pemburu dapat beradaptasi untuk memperdagangkan spesies lain, terutama yang bernilai serupa di pasar tujuan, yang risiko tertangkapnya lebih rendah. Penggantian spesies semacam ini sangat umum di pasar kayu, di mana bahkan para ahli pun kesulitan membedakan kayu dari spesies terkait. Beberapa dari pergeseran ini juga merupakan akibat dari perubahan preferensi konsumen atau pengurangan konsumsi karena penegakan hukum yang kuat.

Dalam kasus lain, penjahat dapat menggunakan praktik baru atau menggunakan bidang kegiatan ekonomi yang ada, yang pada prinsipnya sah, untuk memperluas atau melanjutkan kegiatan kejahatan mereka. Contoh yang terdokumentasi dengan baik adalah penangkaran: ketika tidak ada populasi liar yang layak, penangkaran telah dilihat sebagai solusi efektif untuk pelestarian spesies yang terancam punah, tetapi juga dapat dieksploitasi oleh kelompok kejahatan terorganisir. Ada bukti bahwa penjahat telah menggunakan beberapa fasilitas penangkaran berlisensi untuk memasok perdagangan ilegal hewan peliharaan eksotis, produk mewah, dan ramuan obat tradisional.¹¹⁴

Seperti banyak pasar, perdagangan satwa liar dan produk satwa liar bergerak secara daring. Kelompok kejahatan terorganisir semakin banyak menggunakan berbagai platform daring, media sosial, dan teknologi untuk memfasilitasi penjualan satwa liar dan hasil hutan, baik secara nasional maupun internasional. Pemantauan perdagangan daring, dan menggunakan teknologi yang tersedia untuk melacak pusat, pola, dan pemain utama yang terlibat dalam perdagangan ilegal, sangat penting untuk mengganggu organisasi yang mengeksploitasi platform daring.¹¹⁵

Tren dan ancaman yang muncul

- » Apakah langkah-langkah untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan mencerminkan potensi perpindahan aktivitas kejahatan ke negara tetangga atau wilayah lain? Apakah ada mekanisme kerja sama yang memadai ?
- » Apakah kejahatan satwa liar dan kehutanan meningkat di satu tempat karena perpindahan dari daerah lain?
- » Apakah ada spesies yang berpotensi melayani penjahat sebagai spesies target alternatif? Apakah upaya yang dikerahkan memadai untuk mengurangi efek dari berbagai penawaran dan permintaan pada spesies target alternatif ini?
- » Apakah ada operasi penangkaran yang bisa atau telah menjadi sasaran potensial kegiatan kejahatan?
- » Apakah ada bidang kegiatan ekonomi yang sah yang menanggung risiko besar digunakan sebagai kedok untuk kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah undang-undang dan penegakannya sejalan dengan teknologi dan perubahan apa pun yang mungkin ditimbulkannya terhadap kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan? Apakah lembaga bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi dalam mencegah dan menghentikan aktivitas kejahatan?
- » Bagaimana tren dan ancaman yang muncul ditetapkan, dinilai, dan ditinjau? Apakah ada proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data yang relevan? Data mana yang digunakan? Siapa yang bertanggung jawab atas pengumpulannya?

Sumber daya tambahan :
 UNODC, *Laporan Kejahatan Satwa Liar (2020)* 12–15, 21, 25, 27



⁹⁵ Lihat lebih lanjut Bab I, Bagian 3.3 dari Perangkat ini.
⁹⁶ Lihat lebih lanjut Bab II, Bagian 5.1.4 dari Perangkat ini.

Pengelolaan satwa liar dan kehutanan

3



Ruang lingkup tindakan pencegahan kejahatan Satwa liar dan kehutanan meliputi pengelolaan satwa liar dan sumber daya hutan sehingga peluang untuk kegiatan ilegal berkurang.

Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan berusaha mencapai keseimbangan antara perlindungan dan konservasi sumber daya alam di satu sisi dan tuntutan ekonomi dan pembangunan di sisi lain, dan merupakan elemen pelengkap yang penting bagi penegakan hukum satwa liar dan kehutanan.

Bagian ini memberikan beberapa alat dasar untuk mengkaji mekanisme preventif satwa liar dan pengelolaan hutan. Ini harus digunakan sebelum, atau bersamaan dengan, analisis mekanisme hukum, penegakan hukum, peradilan dan penuntutan. Analisis pengelolaan sumber daya suatu negara membantu merancang respons yang memadai dan efektif terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan serta kejahatan yang menjadi fasilitator seperti korupsi dan pencucian uang. Tanggapan ini dapat berfokus baik pada pembangunan struktur pelindung, seperti pengelolaan sumber daya atau program pembangunan pedesaan, atau pada penguatan penegakan hukum dan langkah-langkah peradilan pidana. Bagian ini tidak dirancang untuk memberikan rekomendasi konkrit untuk diterapkan pada semua tantangan masalah satwa liar dan kehutanan di wilayah atau yurisdiksi tertentu, tetapi untuk menggarisbawahi pentingnya pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan langkah-langkah terkait dalam pembahasan undang-undang dan penegakan hukum tentang satwa liar dan kehutanan.

3.1 Sistem manajemen

Kejahatan satwa liar dan kehutanan seringkali difasilitasi oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak efektif atau lemah. Ini termasuk, antara lain, tidak adanya survei dan inventarisasi dasar, kondisi kerja yang tidak aman, kurangnya pengetahuan tentang masalah, pelaku korup dan kurangnya praktik bisnis standar. Sebaliknya, mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel dengan tujuan yang jelas, pengaturan tenurial yang diterima secara sosial, partisipasi publik dan pembagian keuntungan dengan kelompok yang bergantung pada sumber daya alam dapat membantu mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Alat-alat berikut mengeksplorasi keberadaan dan kekuatan sistem pengelolaan sumber daya alam dan menyoroti hubungan antara perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Undang-undang satwa liar dan kehutanan nasional, dicermati lebih lanjut di Bab I, Bagian 2 dari Perangkat ini, meletakkan dasar bagi pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Dalam hal ini, undang-undang yang berkaitan dengan sektor satwa liar dan kehutanan, sekurang-kurangnya harus menetapkan aturan kepemilikan, pengelolaan dan administrasi, kawasan perburuan dan sistem perizinan. Selain unsur-unsur ini, World Wide Fund for Nature (WWF) dan World Bank Global Forest Alliance merekomendasikan agar standar berikut menjadi bagian dari sistem pengelolaan satwa liar dan kehutanan yang efektif dan berkelanjutan :

- Kepatuhan terhadap semua undang-undang yang relevan dengan satwa liar dan kehutanan
- Kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan nasional dan internasional yang berlaku
- Penghormatan terhadap hak legal dan adat atas kepemilikan, akses dan penggunaan
- Menghormati hak, adat dan budaya masyarakat adat
- Menghormati hubungan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak-hak pekerja
- Menyalurkan berbagai manfaat dari hutan
- Penilaian dan mitigasi dampak Lingkungan
- Pemeliharaan kawasan hutan kritis
- Ketentuan khusus untuk perkebunan
- Implementasi rencana manajemen
- Pemantauan dan penilaian yang efektif.

Kerangka Penilaian dan Pemantauan Tata Kelola Hutan dikembangkan oleh Program Bank Dunia tentang Hutan bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menyajikan kerangka komprehensif bagi pemangku kepentingan untuk digunakan saat menganalisis status tata kelola hutan di negara tertentu dan saat merencanakan reformasi. Ini terdiri dari tiga pilar :

- a. kerangka kebijakan, hukum, Kelembagaan dan peraturan;
- b. proses perencanaan dan pengambilan keputusan; dan
- c. implementasi, penegakan, dan kepatuhan.

Setiap pilar terdiri dari tiga hingga lima komponen. Kerangka kerja ini dirancang untuk digunakan dalam penilaian tata kelola hutan nasional atau subnasional.

Sistem manajemen

- » Apakah sistem pengelolaan satwa liar dan sumber daya hutan transparan dan akuntabel dengan tujuan yang jelas, pengaturan tenurial yang diterima secara sosial dan apakah melibatkan partisipasi publik?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan kehutanan sesuai dengan semua undang-undang satwa liar dan kehutanan yang relevan di suatu negara?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan menghormati hak tenurial dan pemanfaatan?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan kehutanan menghormati hukum dan standar hak asasi manusia internasional, termasuk hak masyarakat adat?



Sistem manajemen

- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan menghormati hubungan masyarakat?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan menghormati hak-hak pekerja?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan memberikan banyak manfaat dari hutan?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan menilai dan memitigasi dampak lingkungan?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan mempertahankan kawasan hutan lindung?
- » Apakah pengelolaan satwa liar dan hutan menyediakan ketentuan khusus untuk Perkebunan?
- » Apakah rencana pengelolaan satwa liar dan hutan dipengaruhi oleh campur tangan dari pejabat publik?
- » Apakah rencana pengelolaan satwa liar dan hutan dilaksanakan?
- » Apakah pemantauan dan penilaian yang efektif dilakukan?
- » Apakah negara atau wilayah tersebut telah menjalani penilaian Tata Kelola sumber daya Alam yang holistik?

3.2 Kelembagaan dan mandat

Satwa liar dan sumber daya hutan memiliki nilai lokal melalui pemanfaatannya secara konsumtif dan memberikan penghasilan dengan menarik pendatang, seperti pemburu trofi atau wisatawan. Ada juga barang dan jasa publik lokal dan global terkemuka yang disediakan oleh hutan dan satwa liar, termasuk keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan perlindungan daerah aliran sungai. Oleh karena itu, kepentingan yang berbeda dan terkadang bertentangan perlu dikelola pada tingkat yang sesuai oleh para pengambil keputusan di lembaga terkait. Lembaga-lembaga tersebut harus memiliki mandat untuk mendefinisikan, menerapkan dan mengontrol penggunaan satwa liar dan sumber daya hutan serta distribusi manfaat yang terkait dengannya. Lembaga-lembaga ini menciptakan dasar untuk pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Pada tingkat kelembagaan, pengelolaan satwa liar dan hutan harus mencakup pengaturan dan kontrol hak tenurial dan properti, ekonomi sumber daya alam, dan penegakan hukum. Pada tingkat sektoral, organisasi pengelolaan satwa liar harus memiliki mandat untuk mengelola habitat dan perbatasan, populasi liar (spesies, struktur dan dinamika populasi) dan dampak manusia (pemangku kepentingan, manipulasi habitat dan populasi).



Kelembagaan dan Mandat

- » Lembaga atau instansi apa yang bertanggung jawab atas pengelolaan satwa liar dan hutan?
- » Apakah ada departemen atau unit kehutanan, satwa liar atau lingkungan?
- » Apakah mekanisme dan struktur pengelolaan satwa liar dan hutan mencakup seluruh wilayah yang diminati?
- » Bagaimana struktur pengelolaan satwa liar dan hutan serta rantai komandonya? Bagaimana mekanisme koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut?
- » Apakah lembaga pengelolaan satwa liar dan hutan dipengaruhi oleh campur tangan pejabat publik dan/atau pihak swasta, termasuk korporasi?
- » Apakah masyarakat dan komunitas lokal berpartisipasi dalam mekanisme dan struktur ini?
- » Apakah masyarakat lokal memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam mereka? Apakah mereka diberdayakan untuk melindungi satwa liar dan hutan mereka?
- » Apakah organisasi masyarakat sipil atau organisasi bukan pemerintah berpartisipasi dalam proses pengelolaan satwa liar dan hutan?

3.3 Rencana pengelolaan

3.3.1 Perencanaan pengelolaan

Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan didasarkan pada undang-undang, peraturan dan kebijakan. Dalam prakteknya, ini dirangkum dan digabungkan dengan data biofisik dalam rencana pengelolaan yang telah dikembangkan dan disepakati oleh semua pemangku kepentingan utama.

Sebagai panduan umum, rencana pengelolaan ini harus mencakup aspek-aspek berikut :

- Inventarisasi sumber daya dan nilai untuk menentukan kawasan yang diminati, dan kategori penggunaan lahan dan zonasi (seperti kawasan lindung, akses terbatas, akses bagi masyarakat adat dan komersial);
- Pengaturan yang terdefinisi dengan baik dan diterima secara sosial tentang penguasaan lahan dan kepemilikan lahan, termasuk hak dan kewajiban kelompok pemangku kepentingan utama seperti komunitas lokal dan kelompok adat;
- Penetapan dan pengaturan produktivitas dan hasil yang lestari, serta merancang rencana perburuan dan pemanenan untuk menetapkan batasan mengenai jumlah atau spesies yang dapat ditebang atau diburu secara sah dalam jangka waktu tertentu;
- Konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan sektor satwa liar dan kehutanan;
- Tujuan pengelolaan yang didefinisikan dengan jelas dan berkelanjutan berdasarkan kesepakatan dan konsensus di antara kelompok pemangku kepentingan utama;
- Kode praktik yang menerjemahkan tujuan pengelolaan ke dalam rencana dan standar operasional spesifik lokasi;
- Perencanaan dan pengaturan akses dengan menempatkan jalan, penghalang, gerbang, dan pos pemeriksaan untuk menghindari area sensitif; memfasilitasi pengawasan, pemantauan dan pengendalian; dan
- Konsultasi dengan masyarakat (seperti pemilik tanah dan kelompok masyarakat) dan melibatkan mereka sebagai 'pengawas dan penjaga' untuk melaporkan kegiatan ilegal, dan memberi mereka program pendidikan, peningkatan kesadaran dan insentif untuk mengubah sikap dan perilaku.

Perencanaan pengelolaan satwa liar dan hutan

- » Apakah ada inventarisasi dan survei sumber daya? Jika ada, apakah dilakukan secara rutin?
- » Apakah batas-batas ditandai dengan jelas di peta dan di lapangan, menggunakan penanda yang aman atau fitur yang mudah diidentifikasi seperti jalan atau sungai?
- » Apakah ada rencana berburu dan memanen? Jika ya, apakah berdasarkan informasi dari inventarisasi dan survei yang dilakukan di area yang diminati?
- » Apakah tujuan manajemen didefinisikan dengan jelas?
- » Apakah peran, hak dan tanggung jawab semua pihak diperjelas? Apakah pemangku kepentingan utama, seperti masyarakat lokal dan sektor satwa liar dan kehutanan, dikonsultasikan?
- » Apakah ada kode praktik? Jika demikian, bagaimana mereka menerjemahkan tujuan manajemen ke dalam rencana dan standar operasional?



Perencanaan pengelolaan satwa liar dan hutan

- » Apakah akses ke area sensitif diatur, dipantau dan dikendalikan, misalnya dengan lokasi jalan, gerbang, dan pos pemeriksaan? Apakah ini diawasi dengan baik setiap saat?
- » Apakah pemangku kepentingan utama dilibatkan dan didorong untuk berperan sebagai 'pemantau dan pengawas'?
- » Apakah tersedia program dan insentif untuk mendidik dan melatih pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap dan perilaku?
- » Apakah masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pemahaman

3.3.2 Kerangka hukum dan kebijakan

Perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan satwa liar dan hutan harus dengan jelas menggambarkan ketentuan tenurial lahan, kepemilikan dan penggunaan untuk menghilangkan ambiguitas atau keraguan tentang legalitas kegiatan. Ini termasuk hak dan kewajiban pemangku kepentingan utama seperti pengelola dan pekerja satwa liar dan kehutanan, serta masyarakat lokal. Perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan satwa liar dan kehutanan dibahas secara rinci di Bagian I Perangkat ini. Aspek kunci dari kerangka hukum yang efektif dan fungsional untuk mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dirangkum dalam alat berikut.



Kerangka hukum dan kebijakan

- » Apakah kawasan yang menjadi perhatian digambarkan dalam hal tenurial, kepemilikan dan penggunaan lahan?
- » Apakah penguasaan lahan dan batas-batasnya didefinisikan dan diidentifikasi dengan jelas?
- » Apakah kerangka hukum menentukan hak pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat?
- » Apakah kerangka hukum menentukan ruang lingkup tujuan pengelolaan hutan?
- » Apakah ada kode praktik? Apakah dipatuhi?

3.3.3 Inventarisasi sumber daya alam

Melakukan inventarisasi yang tepat terhadap satwa liar dan sumber daya hutan yang menunjukkan kisaran spesies yang terancam punah dan dilindungi di negara atau wilayah tertentu sangat penting untuk menyusun tanggapan yang efektif terhadap kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Inventarisasi berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi kegiatan yang terjadi dan untuk mengukur dampak dan keberlanjutan intervensi.



Inventarisasi sumber daya Alam

- » Apa sumber daya satwa liar dan hutan di daerah atau yurisdiksi tersebut?
- » Ekosistem apa yang lazim (seperti hutan hujan atau gurun)?
- » Apakah kawasan lindung seperti taman alam ada? Bagaimana kawasan hutan nasional diklasifikasikan menurut hukum nasional?
- » Sejauh mana kawasan ini di bawah rencana pengelolaan sumber daya yang berfungsi?
- » Spesies satwa liar utama apa yang ada di daerah yang sedang ditinjau?
- » Apakah kawasan ini dikategorikan (misalnya, terbuka untuk penebangan komersial, pariwisata, penelitian atau diperuntukan bagi kelompok masyarakat adat)?
- » Spesies apa yang dipengaruhi oleh kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah spesies ini dianggap terancam punah? Apakah mereka terdaftar dalam CITES atau daftar relevan lainnya untuk spesies yang terancam punah?

3.3.4 Kawasan lindung

Kawasan lindung sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati dan merupakan elemen penting dalam banyak strategi konservasi nasional dan internasional. International Union for the Conservation of Nature (IUCN) telah membuat kerangka kerja untuk pengembangan dan analisis kawasan lindung. Alat Pelacakan Efektivitas Pengelolaan yang dikembangkan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) dan Bank Dunia memberikan rangkaian pertanyaan lain untuk menilai pengelolaan kawasan lindung.

Kawasan Lindung

- » Apa potensi ancaman terhadap kawasan lindung (seperti pembangunan komersial, pertanian, pertambangan, transportasi, pariwisata, perang, polusi, cuaca buruk, dan ancaman budaya tertentu)?
- » Apakah kawasan lindung memiliki status hukum atau dicakup oleh perjanjian?
- » Apakah ada rencana pengelolaan, tujuan dan tindakan penegakan? Apakah staf mampu menegakkan aturan untuk kawasan lindung?
- » Apakah kawasan lindung memiliki ukuran dan bentuk yang tepat untuk melindungi semua spesies yang menjadi perhatian?
- » Apakah ada demarkasi batas? Jika ya, apa itu?
- » Apakah fasilitas pengunjung tersedia? Jika demikian, apakah memadai? Apakah diawasi dengan cara apa pun?
- » Apakah operator pariwisata komersial menghormati dan berkontribusi pada perlindungan?

Sumber daya tambahan:

Marc Hockings Et Al, Mengevaluasi Efektivitas: Kerangka kerja untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan Lindung (IUCN, Ke-2 ed 2006)
Rencana Satwa Liar Global Bank Dunia , Perangkat Kemitraan Manajemen Kolaboratif (2021)



3.3.5 Sistem sertifikasi dan izin

Apabila suatu negara memiliki rezim izin atau sertifikat, pemegang instrumen tersebut mungkin memiliki hak yang diakui oleh hukum untuk melakukan kegiatan tertentu dalam kaitannya dengan spesies tertentu, untuk memasuki kawasan lindung atau untuk memiliki atau menggunakan senjata atau perangkat tertentu yang diatur. Berbagai istilah lain, seperti 'lisensi', 'konsesi' dan 'otorisasi', dapat digunakan untuk menjelaskan instrumen yang memberikan hak tersebut kepada pemegang instrumen.

Instrumen tersebut sering digunakan untuk memisahkan tindakan yang melanggar hukum dari tindakan yang sah dan, seperti yang ditunjukkan pada Bab I, Bagian 3 dari Perangkat ini, kegiatan tertentu tanpa izin yang sah, lisensi atau sejenisnya dapat dianggap sebagai tindak pidana. Sebagai contoh, suatu negara dapat menggunakan sistem izin atau sertifikat untuk mengatur jumlah spesimen yang dapat diburu dalam jangka waktu tertentu atau untuk membatasi perburuan spesies tertentu selama musim kawin. Suatu sistem perizinan dapat memungkinkan suatu Negara untuk menyesuaikan batas-batas perilaku yang sah dengan mempertimbangkan konteks geografis dan ekologis Negara tersebut. Sistem sertifikasi membantu untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan dan membuktikan kelestarian satwa liar dan hasil hutan bersertifikat.

Hak yang diberikan oleh izin atau sertifikat biasanya tunduk pada kondisi tertentu. Persyaratan ini mungkin khusus untuk izin atau sertifikat individu yang diberikan atau mungkin secara umum berlaku untuk semua izin atau sertifikat dari kelas tertentu. Misalnya, persyaratan umum untuk izin berburu berkaitan dengan identitas pemegang izin, jumlah dan jenis kelamin spesimen yang diburu, masa berlaku, wilayah dan musim di mana izin berlaku dan informasi yang harus diberikan kepada otoritas terkait tentang kegiatan yang dilakukan berdasarkan izin. Mungkin juga terdapat ketentuan bahwa pemegang izin menandai spesimen(-spesimen) yang relevan yang tunduk pada izin dengan cara tertentu (misalnya, melalui tanda yang tidak dapat dihapus, label atau microchip) dan merujuk tanda tersebut dalam dokumentasi yang diberikan kepada pihak yang berwenang sehingga

izin tidak dapat digunakan untuk spesimen lain. Merupakan pelanggaran bagi pemegang izin untuk melanggar salah satu dari syarat-syarat ini.

Sertifikasi satwa liar dan hasil hutan sering digunakan untuk membuktikan bahwa produk berasal dari sumber tertentu dan berkelanjutan, sesuai dengan standar internasional, dan memiliki nilai lingkungan, sosial dan ekonomi yang tinggi. Sistem sertifikasi membantu menjamin pemeliharaan habitat satwa liar yang memadai dan perlindungan kualitas air.

Karena izin dan sertifikat memberi pemegang hak untuk mengakses satwa liar dan sumber daya hutan (seperti yang ditunjukkan pada Bagian 1, Bagian 4 dan 5) dan pasar preferensial, maka berisiko terjadi korupsi untuk memungkinkan individu dan organisasi memperoleh izin dan sertifikat ini. Ada kebutuhan untuk memastikan proses pengurusan izin dan sertifikat transparan dan akuntabel.



Sistem sertifikasi dan izin

- » Izin apa saja yang diperlukan terkait dengan kegiatan satwa liar dan kehutanan, seperti izin berburu, izin penebangan, dan sejenisnya? Apa persyaratan dan prosedur untuk memperoleh dan memperbaharui izin tersebut; siapa yang menerbitkannya?
- » Sistem sertifikasi dan akreditasi apa yang ada dalam kaitannya dengan satwa liar dan hasil hutan? Jika ada, apakah sesuai dengan kerangka kerja internasional untuk sertifikasi, akreditasi dan penetapan standar?
- » Apakah semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan berpartisipasi dalam pengaturan tata kelola dan standar?
- » Apakah sistem perizinan dan sertifikasi menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak perlu?
- » Apakah persyaratan dan standar disesuaikan dengan kondisi setempat? Apakah mereka didasarkan pada kinerja yang obyektif dan terukur?
- » Apakah prosedur dan proses pengambilan keputusan transparan dan dilaporkan kepada publik?
- » Apakah ada mekanisme pengaduan dan banding?

Sumber daya tambahan :
UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 9–10

3.3.6 Tenurial, hak milik dan akses atas tanah

Tenurial tanah dan hak milik yang berkaitan dengan satwa liar dan kehutanan dapat digunakan melalui kewenangan yang diberikan atau diakui oleh hukum. Otoritas yang sah dibedakan dari izin dan sertifikat karena pelaksanaannya tidak bergantung pada otoritas yang berwenang yang memberikan izin atau sertifikat yang relevan. Keadaan di mana seseorang atau komunitas lokal harus dapat menjalankan otoritas yang sah sehubungan dengan satwa liar dan kehutanan adalah masalah yang ditentukan oleh setiap yurisdiksi sesuai dengan tradisi dan budaya hukumnya, dan dipandu oleh hukum dan standar internasional. Program pengelolaan satwa liar dan hutan harus dirancang dengan hati-hati sehingga mencerminkan mata pencaharian dan hak-hak masyarakat yang bergantung pada satwa liar dan hutan dan oleh karena itu memastikan kepemilikan, akses dan penggunaan sumber daya tersebut yang memadai. Selain itu, otoritas yang sah harus diberikan kepada penegak hukum dan petugas satwa liar yang melakukan kegiatan untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan pelanggaran kejahatan terhadap satwa liar.

Tenurial, hak milik dan akses atas tanah

- » Siapa yang memiliki sumber daya Alam yang sedang ditinjau?
- » Apakah hukum nasional menghormati hak milik masyarakat setempat?
- » Bagaimana orang memiliki tanah? Bagaimana orang diberikan kepemilikan dan hak atas tanah?
- » Bagaimana Pewarisan dan pengalihan kepemilikan tanah dilakukan?
- » Siapa yang memiliki akses ke sumber daya Alam seperti satwa liar, hutan, dan tanah? Bagaimana akses diatur?
- » Apa kebijakan dan undang-undang nasional untuk pemanfaatan pribadi dan komersial hutan dan sumber daya alam lainnya?
- » Sejauh mana pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan domestik dan internasional untuk penggunaan komersial hutan dan sumber daya alam lainnya?
- » Apakah penegak hukum dapat menyelidiki kejahatan satwa liar atau apakah mereka dihalangi dengan cara apa pun oleh tenurial tanah dan hak milik masyarakat lokal/kelompok adat? Jika terhalang, apakah ada upaya untuk memastikan partisipasi yang berarti dan kerja sama dengan masyarakat lokal/kelompok adat dalam proses yang ditujukan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?

*Sumber daya tambahan:
UNODC, Panduan penyusunan undang-undang untuk memerangi kejahatan satwa liar (2018) 10*



3.3.7 Langkah-langkah keamanan

Langkah-langkah Keamanan

- » Risiko dan ancaman apa yang dihadapi personel pelindung dan manajemen sebagai akibat dari pekerjaan mereka?
- » Dengan kapasitas, alat, dan peralatan apa personel disediakan?
- » Dengan layanan keselamatan dan asuransi apa personel disediakan?
- » Kompensasi atau hadiah moneter dan non-moneter apa yang ditawarkan kepada personel?



Rencana pengelolaan sumber daya alam harus mencakup langkah-langkah keamanan untuk melindungi personel pengelola dari potensi ancaman yang terjadi sebagai akibat dari pekerjaan mereka sehari-hari. Ini termasuk, antara lain, ancaman dari kelompok kejahatan terorganisir, kelompok bersenjata, pelaku individu dan rekan mereka, dan dari penduduk setempat yang mungkin memandang petugas penegak hukum sebagai ancaman.

3.4 Basis data, alat daring, dan manajemen informasi

Berbagi informasi di antara badan-badan nasional dan lintas batas internasional sangat penting dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Berbagai alat yang dirancang untuk memulai dan memfasilitasi kerja sama di dalam dan di antara negara telah diidentifikasi di bagian awal Perangkat ini. Meningkatnya akses ke teknologi informasi dan komunikasi elektronik telah mengarah pada pengembangan inisiatif tata kelola daring, yaitu aplikasi daring untuk interaksi antara pemerintah dan warga negara. Meningkatnya penggunaan teknologi telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, banyak kerentanan pengelolaan sumber daya alam dapat diatasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi elektronik.

Meskipun internet dan komunikasi elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh penjahat dan menciptakan bentuk atau jalur baru untuk dieksploitasi oleh kelompok kejahatan terorganisir, teknologi yang sama

dapat digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam kelompok tersebut, dan dengan demikian dapat memainkan peran dalam pencegahan, deteksi dan pemberantasan kejahatan kehutanan dan satwa liar dan kejahatan yang memfasilitasi/terkait dengan kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak dan tidak membayar biaya. Contohnya meliputi :

- Pencegahan: pemetaan kejahatan dan mekanisme dan sistem pelaporan korupsi;
- Deteksi : pelacakan kayu, sistem rantai kustodi, pos pemeriksaan, citra satelit, pengawasan sistem pemosisian global, mengidentifikasi kerentanan; dan
- Pemberantasan: basis data dan sistem manajemen kasus kejahatan.

Selain itu, dan mengingat sifat transnasional dari kejahatan satwa liar dan kehutanan serta kompleksitas rute perdagangan, akses ke platform komunikasi penegakan hukum global menjadi penting. Ini dieksplorasi lebih lanjut di Bab IV, Bagian 4.3 dan 4.4 dari Perangkat ini.

3.4.1 Basis data

Basis data menyediakan struktur dan kerangka kerja untuk menyimpan dan mengatur informasi tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Mereka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sifat, skala dan ruang lingkup perdagangan, dan untuk menyoroti kerentanan di pasar legal dan rantai pasokan. Dengan demikian, data perdagangan dapat digunakan untuk menjelaskan kemungkinan rute perdagangan, termasuk pasar resmi yang digunakan sebagai kedok untuk perdagangan ilegal. Basis data adalah sistem informasi vital yang membantu memungkinkan petugas penegakan kejahatan satwa liar dan kehutanan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengejar penjahat. Pada tingkat operasional, mereka adalah kendaraan utama untuk memungkinkan berbagi informasi di dalam badan intelijen dan penegak hukum dan, bila terintegrasi dengan baik, di antara mereka.

Di tingkat internasional, Basis Data Perdagangan CITES merupakan mekanisme penting untuk memantau tingkat perdagangan satwa liar legal yang membantu mengidentifikasi di mana perdagangan dapat berdampak buruk bagi populasi liar. Setiap Pihak CITES diharuskan untuk memberikan pelaporan perdagangan nasional secara reguler. Basis data menyediakan ringkasan perdagangan antar negara, yang berlangsung selama beberapa tahun dan dapat membantu dalam analisis rute perdagangan. Ini adalah alat penting untuk memantau tingkat perdagangan internasional dari spesies yang terdaftar di CITES. Basis data dapat diakses untuk memberikan ringkasan perdagangan spesies antar negara, yang memfasilitasi analisis pola perdagangan global.

Basis data World Wildlife Seizures (WorldWISE) (dan Basis data Laporan Perdagangan Ilegal Tahunan CITES yang ada secara bersamaan) dikelola oleh UNODC. WorldWISE menggabungkan semua data yang tersedia tentang penyitaan satwa liar untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang perdagangan satwa liar. Sejak 2016, Para Pihak CITES diwajibkan untuk menyerahkan laporan perdagangan ilegal tahunan yang dimasukkan ke dalam Basis data Laporan Perdagangan Ilegal Tahunan CITES. Beberapa LSM, seperti TRAFFIC dan EIA, mengoperasikan basis data lebih lanjut yang dapat berguna untuk mendokumentasikan dan menganalisis kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Selain mengakses basis data kejahatan satwa liar khusus ini, kemampuan pejabat untuk mengakses basis data kejahatan umum nasional dan internasional yang tersedia juga penting untuk mengidentifikasi pelaku dan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam kejahatan ini.

Meskipun merupakan alat vital untuk mencegah dan memberantas kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, basis data masih belum sempurna dan terdapat banyak variasi dalam kualitas, cakupan, dan aksesibilitas berbagai basis data. Pejabat dan pengguna lain memerlukan pelatihan untuk memasukkan dan mencari data secara sistematis. Pejabat mungkin membenci sifat entri data yang memakan waktu, tetapi kesalahan dalam entri data atau kategorisasi informasi dapat menyebabkan informasi penting tidak dapat ditemukan saat dibutuhkan. Basis data yang paling efektif dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi beban administrasi pada

petugas penegak hukum dan untuk menyediakan fungsi pencarian yang terperinci dan kuat yang dapat secara efektif membedakan antara kecocokan yang relevan dan tidak relevan.

Basis data

- » Apakah negara mengelola basis data nasional yang mencatat insiden kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Lembaga mana yang memiliki akses ke basis data itu?
- » Informasi apa yang dicatat? Bagaimana informasi dicatat, dimasukkan dan disebarluaskan? Apakah undang-undang membatasi penggunaan data forensik dalam basis data? Jika informasi tentang identitas pelaku dicatat, apakah termasuk jenis kelamin?
- » Apakah pihak berwenang yang relevan memasukkan informasi yang relevan ke dalam dan mengambil informasi dari Basis data Perdagangan CITES? Kapan dan bagaimana informasi itu digunakan?
- » Apakah otoritas terkait menyampaikan laporan tahunan tentang perdagangan ilegal?
- » Siapa yang bertanggung jawab untuk entri data? Apakah pemeliharaan basis data memiliki sumber daya yang memadai?

Sumber daya tambahan :
UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi



3.4.2 Aplikasi seluler dan platform daring

Di antara alat dan teknik paling inovatif yang tersedia adalah aplikasi (apps) telepon pintar yang dirancang untuk membantu mendeteksi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan serta penuntutan terhadap penjahat. Tersedia beberapa aplikasi yang membantu pengguna dalam mengidentifikasi spesies fauna dan flora serta menilai keaslian sumber barang tersebut. Banyak aplikasi menggunakan desain pohon keputusan untuk memungkinkan pengguna menentukan dengan cepat kemungkinan identitas satwa liar atau hasil hutan yang dimaksud. Seringkali sulit bagi yang bukan ahli untuk secara cepat dan akurat membedakan antara spesies yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Hal ini terutama berlaku jika produk hewani telah diproses secara signifikan atau digabungkan dengan bahan lain. Aplikasi kejahatan satwa liar dan kehutanan paling berguna ketika pemakai memiliki kemampuan untuk dengan cepat membedakan antara spesies lokal yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Beberapa app menyertakan fungsi tambahan, seperti fungsi komunikasi waktu nyata. Fungsi-fungsi ini dapat sangat berguna bagi petugas garis depan dan petugas pabean di pelabuhan yang mungkin berada di bawah tekanan waktu yang signifikan untuk mengambil keputusan untuk menghentikan atau meneruskan kargo. Aplikasi dan perangkat lunak lain dapat membantu merekam, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dikumpulkan selama patroli atau di lokasi tertentu. Sistem untuk mengumpulkan, merekam, dan menganalisis situs geografis tertentu (misalnya kawasan lindung) atau spesies tertentu (misalnya gajah dan badak) penting untuk membangun gambaran akurat tentang lokasi satwa liar, tingkat populasi, dan ancaman khusus terhadap spesies yang dilindungi.



Aplikasi seluler dan platform daring

- » Aplikasi seluler dan platform daring apa yang tersedia untuk menentukan dan bertukar informasi tentang spesies yang dilindungi, kawasan lindung, dan sebagainya?
- » Instansi dan pejabat mana yang memiliki akses ke dan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak ini? Apakah pejabat cukup terlatih dalam penggunaannya? Apakah pejabat disediakan ponsel atau teknologi serupa lainnya (yaitu tablet) untuk menggunakan aplikasi ini atau apakah merupakan milik pribadi?
- » Informasi apa yang direkam? Bagaimana informasi dicatat, dimasukkan dan disebarluaskan?

Sumber daya tambahan:

Bank Dunia, Alat dan Sumber Daya untuk Memerangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2018) 9–10

3.5 Kepatuhan

Dalam konteks pengelolaan satwa liar dan kehutanan, kepatuhan mengacu pada pertanyaan tentang mengapa beberapa orang mematuhi aturan dan peraturan yang ada dan mengapa orang lain memilih untuk tidak mematuhi. Pertanyaan semacam itu penting untuk menjelaskan alasan dan motivasi orang terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

Ketidakpatuhan sering terjadi jika pelaku mengetahui atau percaya bahwa mereka tidak akan menghadapi — atau hanya akan menghadapi konsekuensi kecil — karena gagal mematuhi aturan dan peraturan pengelolaan hutan dan satwa liar yang relevan. Selain itu, jika pelaku mengetahui bahwa aturan tersebut tidak dipantau dan ditegakkan, dan bahwa ketidakpatuhan lebih menguntungkan secara finansial daripada kepatuhan ketat, maka ketidakpatuhan dapat berkembang pesat. Ketidakpatuhan juga dapat terjadi jika aturan dan peraturan yang ada terlalu birokratis dan rumit atau di mana orang bergantung pada satwa liar dan aktivitas hutan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk menghasilkan pendapatan dasar.

Penjelasan untuk kepatuhan terhadap aturan dan peraturan pengelolaan satwa liar dan kehutanan secara garis besar dapat dibagi menjadi alasan instrumental dan alasan normatif. Perspektif instrumental memandang kepatuhan sebagai maksimalisasi keuntungan individu dan pribadi. Dalam konteks ini, penggunaan insentif penting untuk mempromosikan dan meningkatkan kepatuhan. Perspektif normatif menekankan komitmen individu terhadap aturan atau penerimaan otoritas. Di sini, kepatuhan dapat dipromosikan melalui partisipasi masyarakat dan dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Misalnya, pendelegasian hak pengguna untuk memungut pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam kepada masyarakat lokal dapat memberikan manfaat keuangan yang positif dan menciptakan insentif untuk kepatuhan, pemanfaatan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam oleh masyarakat tersebut.

Pelaksanaan insentif untuk mematuhi peraturan pengelolaan satwa liar dan kehutanan sangat penting. Insentif tersebut dimulai dengan penyederhanaan aturan dan regulasi serta pengurangan birokrasi. Selain itu, meningkatkan biaya keuangan dan pribadi untuk ketidakpatuhan (termasuk hilangnya lisensi dan hak istimewa, sanksi dan biaya), sambil memberikan cara yang lebih jauh dan realistis untuk menghasilkan pendapatan dengan cara yang sah, dapat memperkuat kepatuhan. Menghubungkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan yang memfasilitasi (seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan tidak membayar biaya), dan menyelidiki dan menuntut kejahatan ini yang seringkali menawarkan hukuman dan sanksi yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam undang-undang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, akan juga meningkatkan biaya atas ketidakpatuhan.

Kepatuhan

- » Se jauh mana individu, organisasi, dan bisnis yang relevan mematuhi aturan dan peraturan pengelolaan satwa liar dan hutan yang relevan?
- » Apa alasan utama ketidakpatuhan?
- » Insentif apa yang ada untuk mematuhi aturan dan peraturan yang relevan? Apa disinsentif karena gagal mematuhi?
- » Apakah investigasi dan penuntutan kejahatan yang memfasilitasi kejahatan satwa liar dan kehutanan (seperti korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak) dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan aturan satwa liar dan kehutanan?



Pengembangan kapasitas sosial

4



Banyak individu dan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat adat, bergantung pada satwa liar dan hutan untuk penghidupan mereka. Di banyak tempat, satwa liar dan sumber daya hutan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pada saat yang sama, undang-undang yang berkaitan dengan hutan dan satwa liar dapat membatasi hak dan mata pencaharian masyarakat tersebut. Mereka sering mengalami kesulitan mendapatkan hak kepemilikan tanah, dan akses mereka ke dan penggunaan satwa liar dan sumber daya hutan seringkali bukan merupakan bagian dari program pengelolaan satwa liar dan hutan. Selain itu, perburuan tradisional untuk penghidupan mungkin berada di bawah undang-undang nasional yang melindungi satwa liar dan hutan, dan dalam beberapa kasus dapat mengarah pada kriminalisasi kegiatan tradisional mereka dan semakin terpinggirkan.

Dengan latar belakang tersebut, penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa dan masyarakat miskin yang menggantungkan hidupnya pada satwa liar dan hutan. Alat-alat berikut berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan kekokohan langkah-langkah pencegahan yang menangani pembangunan pedesaan dan pembangunan kapasitas sosial di bidang perlindungan satwa liar dan hutan.

Dalam banyak kasus, intervensi yang ditujukan untuk mengurangi dan mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan harus mempertimbangkan faktor dan bidang yang berada di luar sektor satwa liar dan kehutanan. Intervensi dan program semacam itu dapat mengatasi masalah seperti promosi sumber energi alternatif yang berkelanjutan, seperti dengan menyediakan energi matahari dan angin untuk daerah pedesaan untuk meningkatkan keseimbangan antara permintaan dan pasokan kayu bakar.

4.1 Pengentasan kemiskinan

Bagi banyak orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, satwa liar dan sumber daya hutan secara langsung berkontribusi pada mata pencaharian mereka. Di banyak negara berkembang, ini merupakan pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan pembangunan industri. Selain itu, di banyak Negara, komunitas penghuni hutan yang paling miskin dan paling rentan, banyak dari mereka adalah kelompok masyarakat adat, sebagian besar atau seluruhnya bergantung pada satwa liar dan sumber daya hutan untuk penghidupan dan ketahanan pangan mereka.¹¹⁶

Intervensi dan program jangka panjang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan pedesaan

97 Lihat juga: Bab V, Bagian 1.4 dari Perangkat ini.

dapat membantu mengatasi penyebab terkait kemiskinan yang menyebabkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Dalam pengertian ini, intervensi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan pada masyarakat yang bergantung pada satwa liar dan hutan yang terlibat dalam kegiatan ilegal dapat menjadi pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dalam jangka panjang. Intervensi dan tindakan ini harus mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang relevan yang seringkali bias terhadap masyarakat miskin yang bergantung pada satwa liar dan hutan. Selain itu, mereka harus memasukkan isu-isu yang terkait dengan pengaturan tenurial lahan, hak akses, transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam keputusan yang secara langsung mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bersangkutan.

Pengentasan kemiskinan

- » Apakah ada program pengentasan kemiskinan atau program pembangunan pedesaan untuk masyarakat yang terlibat atau terpengaruh oleh kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah program ini menghubungkan pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan sumber daya alam atau satwa liar dan hasil hutan secara berkelanjutan?



4.2 Mata pencaharian berkelanjutan

Selain pengurangan kemiskinan, melihat masalah kejahatan satwa liar dan kehutanan dari perspektif mata pencaharian bisa sangat berguna. Penghidupan dalam konteks ini mengacu pada cara di mana individu dan komunitas memenuhi kebutuhan dasar mereka serta hasil lain yang mereka cita-citakan. Pendekatan ini peka terhadap konteks dan membedakan antara aset (sumber daya alam dan sosial ekonomi yang tersedia), kapabilitas (peluang yang dibuka oleh aset) dan aktivitas (praktik yang dilakukan dalam aset dan kapabilitas yang tersedia) yang melekat pada mata pencaharian tertentu.

Mata pencaharian biasanya dianggap berkelanjutan ketika dapat mengatasi dan pulih dari berbagai tekanan dan guncangan (seperti perubahan kondisi iklim atau bencana alam) dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan asetnya baik sekarang maupun di masa depan tanpa merusak basis sumber daya alam. Mata pencaharian dapat menjadi tidak berkelanjutan jika merusak basis sumber daya alam atau karena (sering bersamaan) kriminalisasi kegiatan yang terkait dengan mata pencaharian tersebut. Di banyak tempat, undang-undang dan kebijakan satwa liar dan kehutanan, bersama dengan langkah-langkah penegakan dan pengelolaan, berdampak negatif pada mata pencaharian pedesaan dan memperburuk penggunaan satwa liar dan hasil hutan yang tidak berkelanjutan. Faktor-faktor ini biasanya lebih mendesak dalam situasi pasca-konflik.

Dalam keadaan seperti ini, menjadi penting untuk menyediakan individu dan komunitas yang terkena dampak dengan jalur untuk membangun kembali pemanfaatan satwa liar secara berkelanjutan atau menciptakan mata pencaharian alternatif. Menyediakan mata pencaharian alternatif untuk populasi terpinggirkan yang bergantung pada satwa liar dan sumber daya hutan untuk pendapatan dasar mereka diperlukan untuk alasan hak asasi manusia dan efektivitas kebijakan untuk melestarikan satwa liar dan hutan. Bagaimana penghidupan masyarakat lokal, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat adat, dapat dibuat berkelanjutan bergantung pada banyak faktor, banyak di antaranya berada di luar cakupan Perangkat ini. Mengakui hak-hak khusus kelompok adat untuk memanfaatkan lingkungan alam mereka merupakan langkah penting, tetapi itu bukanlah obat mujarab. Akses ke pasar legal dan legalisasi perdagangan adalah pilihan lain yang mungkin berguna di beberapa tempat, tetapi dapat mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan memfasilitasi pengurusan flora dan fauna dari daerah tersebut. Dalam beberapa keadaan, mungkin juga perlu untuk menggabungkan pembelajaran dan diskusi dengan masyarakat lokal dan kelompok adat tentang bagaimana beberapa praktik tradisional mereka dapat mengakibatkan pemanfaatan satwa liar dan produk hutan yang tidak berkelanjutan, terutama jika populasinya meningkat, sehingga berdampak negatif bagi keberlanjutan penghidupan mereka. Langkah-langkah tersebut juga perlu

mempertimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Terlalu sering, tindakan drastis telah diambil tanpa mempertimbangkan hak, situasi dan sejarah komunitas lokal dan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan penduduk direlokasi di luar keinginan mereka, termasuk melalui penggunaan kekerasan. Hal ini sering menyebabkan pelanggaran terhadap hak masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki atau tempati atau gunakan. Kebijakan semacam itu telah menyebabkan masyarakat lokal mengasosiasikan beberapa tindakan konservasi dengan kolonialisme dan dengan demikian menolak upaya perlindungan lingkungan, yang berpotensi berdampak negatif pada konservasi satwa liar dan hutan.

Penyediaan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen dari respons yang komprehensif terhadap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Para Pihak CITES membentuk kelompok kerja dengan mandat untuk mengembangkan alat untuk implementasi berkelanjutan dari daftar CITES.



Mata pencaharian berkelanjutan

- » Apakah penghidupan individu dan masyarakat yang bergantung pada kejahatan satwa liar dan kehutanan berkelanjutan atau merugikan basis sumber daya alam, perlindungan spesies dan upaya konservasi?
- » Langkah-langkah apa yang telah diterapkan untuk menyediakan mata pencaharian alternatif berkelanjutan bagi individu dan masyarakat yang terkena dampak? Apa dampak dari langkah-langkah ini? Apa lagi yang perlu dilakukan?

Sumber daya tambahan :

CITES, 'CITES dan Mata Pencaharian', tersedia di <<https://cites.org/eng/prog/livelihoods>>

OAS & CITES, Handbook on CITES and Livelihoods, Bagian II: Mengatasi dan mengurangi dampak penerapan keputusan CITES terhadap mata pencaharian di masyarakat pedesaan miskin (2015)

UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 25 Bank Dunia, Alat dan Sumber Daya untuk Memerangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (2018) 16

4.3 Pendekatan partisipatif

Masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi internasional dan organisasi bukan pemerintah (LSM) memainkan peran penting dalam memahami dan mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan dalam membantu individu dan komunitas yang paling terkena dampaknya. Keahlian mereka dapat berharga dalam mengembangkan dan menilai kebijakan, undang-undang dan langkah-langkah praktis, dan dalam pengembangan alat dan pelatihan teknis. Partisipasi masyarakat sipil, sektor swasta dan LSM nasional dan internasional, serta perwakilan dari masyarakat lokal, dan dari masyarakat adat, penting untuk membangun dan mempertahankan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan satwa liar dan kehutanan. Keterlibatan masyarakat sipil — termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal, sektor swasta dan LSM — dalam pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan termasuk, antara lain, meningkatkan kesadaran tentang jangkauan dan dampak kegiatan ilegal, penelitian dan analisis yang berkontribusi pada pemahaman ruang lingkup dan penyebab kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan penyediaan solusi potensial untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan. Hal ini juga berlaku untuk memfasilitasi kejahatan, seperti korupsi.

Dalam konteks ini, penting juga untuk mengakui dan melibatkan perempuan sebagai pemangku kepentingan utama dan memastikan bahwa konsultasi dan partisipasi mereka adil dan efisien. Penelitian telah menunjukkan bahwa gender merupakan variabel penting dalam bagaimana kelompok dan individu terlibat dalam upaya konservasi dan perempuan memainkan peran unik dalam konteks ini; mereka juga sering terpengaruh secara tidak proporsional oleh kejahatan satwa liar dan kehutanan. Sama pentingnya untuk melibatkan

kaum muda dalam upaya yang ditujukan dalam mencegah kejahatan satwa liar dan kehutanan, karena mereka harus dilibatkan dan membantu mempengaruhi pelaksanaan strategi konservasi.

Pentingnya partisipasi pemangku kepentingan utama dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum dieksplorasi lebih lanjut di Bab 2, Bagian 1.4–1.8

Pendekatan partisipatif

- » Bagaimana masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi bukanpemerintah dan internasional terlibat dalam pengelolaan satwa liar dan hutan? Apakah mereka dilibatkan dalam konsultasi ketika strategi dan rencana manajemen dikembangkan?
- » Apakah para pemangku kepentingan ini terlibat dalam pengambilan keputusan atau apakah mereka memiliki peran penasihat atau pengamat?
- » Bagaimana perempuan, laki-laki dan pemuda terwakili dan bagaimana mereka terlibat dalam forum konsultatif? Bagaimana mereka diakui dalam rencana dan pengembangan pengelolaan satwa liar dan kehutanan?





Pencegahan adalah salah satu tujuan utama menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Sebagai tujuan hukuman, pencegahan bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui contoh menghukum pelanggar.

Penjeraan umum diarahkan untuk mencegah kejahatan di kalangan masyarakat umum, sedangkan penjeraan khusus ditujukan untuk mencegah kejahatan di masa depan oleh pelaku tertentu. Penjeraan juga secara eksplisit diakui dalam Pasal 11 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Bab III, Bagian 4 dari Perangkat ini mengeksplorasi hukuman dan sanksi baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kekhasan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Selain menjaga keseimbangan antara unsur umum dan khusus, penjeraan bergantung pada tiga komponen utama: untuk menjerakan calon pelaku secara efektif, sanksi harus (i) cukup berat, (ii) cukup mungkin terjadi, dan (iii) dijatuhkan tanpa alasan penundaan yang tidak semestinya.

Fokus pada penjeraan sebagai strategi pencegahan sering dipertanyakan. Sangat penting untuk membedakan antara pelaku yang tindakan ilegalnya lebih terlokalisasi dalam ruang lingkup dan mereka yang memiliki niat kriminal transnasional dan terorganisir. Sementara individu yang terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisir lebih cenderung menampilkan jenis perilaku rasional yang diandalkan oleh strategi penjeraan, pelaku yang aktivitas kejahatannya lebih tepat dijelaskan oleh pelestarian mata pencaharian atau budaya lokal mungkin mempertimbangkan berbagai faktor dalam melakukan salah satu dari kejahatan ini, di mana tingkat keparahan, kepastian, dan kecepatan pemberian sanksi mungkin bukan yang paling relevan.

Meskipun relevansi keseluruhan dari strategi berbasis penjeraan untuk memberantas kejahatan satwa liar dan kehutanan tetap tidak terbantahkan, penjeraan akan paling efektif bila diterapkan dalam pendekatan holistik untuk pencegahan. Kejahatan memiliki banyak penyebab dan banyak sektor masyarakat dapat berdampak pada terjadinya dan tingkat kejahatan, dan oleh karena itu banyak sektor memiliki tanggung jawab untuk bertindak membantu mencegah kejahatan. Meski di banyak yurisdiksi, pencegahan kejahatan secara tradisional dilihat sebagai tanggung jawab polisi atau berasal dari aspek penjeraan hukum atau represi pelaku, lembaga penegak hukum dan peradilan tidak terlepas dari masyarakat secara keseluruhan dan oleh karena itu tidak dapat melakukannya sendirian. Menciptakan lingkungan di mana komunitas dan lingkungan memperhatikan lingkungan mereka dan mencari kemungkinan pelaku dapat bertindak sebagai penjera yang signifikan dalam beberapa situasi.¹¹⁷

97 Lihat juga Bab V, Bagian 1.4 dari Perangkat ini.

Legitimasi pemerintah sangat penting untuk kepatuhan normatif. Hanya ketika orang percaya pada keseluruhan legitimasi hukum dan penegakan hukum, upaya konservasi dapat berhasil bertahan lama. Kejahatan satwa liar dan kehutanan yang terutama dimotivasi oleh pelestarian mata pencaharian atau faktor struktural lain yang lebih luas hanya akan berhenti ketika legitimasi larangan hukumnya diterima dan diinternalisasi. Strategi berbasis penjeratan mungkin merupakan batu loncatan yang diperlukan untuk mencapai hasil ini, tetapi itu bukanlah obat mujarab.

Penjeratan

- » Apakah hukuman dan sanksi untuk kejahatan satwa liar dan kehutanan secara keseluruhan cukup berat, pasti dan cepat untuk menjadi penjera yang efektif? Apakah ada kejahatan satwa liar dan kehutanan yang relevan yang hukuman dan sanksinya tidak demikian?
- » Apakah badan legislatif, penegak hukum, dan kehakiman sadar akan kebutuhan potensial untuk membedakan antara pelaku kejahatan lokal dan kelompok kejahatan terorganisir, dalam hal penjeratan? Apakah diferensiasi relevan dalam konteks nasional?
- » Apakah ada masalah korupsi dan/atau legitimasi lainnya dalam kaitannya dengan pemerintah dan aparat penegak hukum di wilayah di mana kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan biasanya terjadi yang dapat berdampak buruk pada program penjeratan?

Sumber daya tambahan :

*UNODC, Kriminal Keadilan Penilaian Perangkat, Lintas sektoral Masalah, Jilid 5: Kejahatan Pencegahan Penilaian Alat (2009)
2 Moreto/Gau, Pencegahan, Legitimasi, dan Satwa liar Kejahatan di Dilindungi Daerah dalam: Menandung (Ed.) Kriminologi
Konservasi (2017) 45–58*



Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku

6



Sebagian besar upaya untuk memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan telah berusaha untuk mencegah dan menghukum pemasok: pemburu liar, yang melakukan pembunuhan; para pedagang, yang menyelundupkan bangkai dan derivatif hewan ke pasar konsumen; dan pengecer, yang mendapat untung dari penjualan satwa liar dan barang selundupan hutan.

Kampanye yang berupaya mengubah perilaku konsumen untuk mengurangi permintaan produk ini telah menjadi pertimbangan sekunder. Ini perlahan berubah. Sekarang ada peningkatan fokus kampanye yang berusaha mengubah perilaku konsumen untuk mengurangi permintaan akan produk-produk ini merupakan pertimbangan kedua. Ini perlahan berubah. Saat ini terdapat peningkatan fokus untuk mengurangi permintaan guna menghambat perdagangan ilegal dan menurunkan insentif untuk terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan demi keuntungan. Kampanye pengurangan permintaan yang ditargetkan bersamaan dengan langkah-langkah hukuman sekarang diakui secara luas sebagai strategi yang lebih dipilih ketika bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Misalnya, resolusi Majelis Umum PBB tahun 2017 mendesak Negara Anggota untuk mengurangi permintaan satwa liar yang diperdagangkan dengan *"menggunakan strategi bertarget dan berbasis bukti untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang undang-undang yang melarang perdagangan ilegal satwa liar dan hukuman terkait"*.¹¹⁸

Mengurangi permintaan akan satwa liar dan hasil hutan ilegal bertujuan untuk mengurangi niat konsumen untuk membeli produk tersebut dan mencapai perubahan nyata dalam perilaku konsumen dari produk tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Bab V, Bagian 2.3 dari Perangkat ini, terdapat sejumlah besar alasan untuk mengkonsumsi produk yang berasal dari kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Tanpa pemahaman menyeluruh tentang pendorong ini, melalui wawasan perilaku tentang motivasi dan pemicu konsumsi, perubahan tidak mungkin terjadi. Ketika kampanye pengurangan permintaan dijalankan sesuai dengan praktik terbaik, mereka dapat memberikan hasil yang luar biasa.

Sumber daya tambahan :

UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 25–26
 CITES Panduan Pengurangan Permintaan CITES (2021) <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-34-A3-R1.pdf>

⁹⁹ Majelis Umum PBB, Mengatasi Perdagangan Gelap Satwa Liar, Dokumen PBB A/RES/71/326 (11 September 2017) 5 [11].

¹⁰⁰ CITES mencirikan pengurangan permintaan sebagai salah satu dari tiga pendekatan untuk memerangi perdagangan ilegal di pasar akhir untuk produk satwa liar. Dua pendekatan lainnya adalah penegakan hukum dan penghidupan. Dalam pendekatan pengurangan permintaan, Proses Lima Langkah didefinisikan. Lihat draft Panduan bagi Pihak CITES untuk Mengembangkan dan Menerapkan Strategi Pengurangan Permintaan untuk Memerangi Perdagangan Ilegal Spesies yang Terdaftar di CITES (April 2021): <https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notfi-2021-038.pdf>

6.1 Kampanye kesadaran

Tingkat kesadaran akan kejahatan satwa liar dan kehutanan jauh lebih rendah pada populasi umum daripada kesadaran akan kejahatan seperti narkoba dan imigrasi ilegal. Alasan untuk hal ini bervariasi tetapi termasuk kurangnya kesadaran dan kesalahpahaman tentang asal usul satwa liar dan komoditas hutan, kurangnya kesadaran bahwa spesies tertentu secara teratur diburu atau dipanen secara ilegal, kurangnya kesadaran tentang undang-undang yang melarang penjualan dan konsumsi (diperparah saat tingkat penuntutan dan penghukuman rendah atau tidak dipublikasikan secara luas), dan konsumsi barang-barang yang terbuat dari spesies yang dilindungi secara tidak sengaja tetapi dijual sebagai produk alternatif. Dalam beberapa kasus, bahkan ada persepsi negatif terhadap hewan tertentu, yang dianggap berbahaya bagi manusia dan ternak setempat, sehingga perlu dibunuh. Pandangan ini dilengkapi dengan keyakinan yang keliru bahwa spesies yang diperdagangkan tidak terancam punah, karena jumlah hewan di negara sumber dianggap melimpah.

Agar strategi pengurangan permintaan berhasil, harus ada pemahaman dasar bahwa ada masalah, dan tentang spesies, wilayah, perilaku, dan segmen audiens tertentu yang akan ditargetkan untuk mengatasi masalah ini. Untuk itu, kampanye kesadaran merupakan elemen yang diperlukan, meskipun tidak cukup, dari pendekatan yang lebih luas untuk perubahan perilaku. Misalnya, ketidaktahuan tentang ancaman eksistensial terhadap gajah perlu ditangani, tetapi pengetahuan tentang status mereka sebagai spesies yang terancam punah mungkin tidak menghalangi pembeli untuk membeli barang antik gading kecil, jika mereka percaya bahwa pembelian tersebut akan berdampak kecil pada masa depan spesies tersebut. Artinya, dalam banyak kasus terdapat kesenjangan kesadaran yang saling melengkapi tentang komoditas alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tanpa konsekuensi konservasi atau hukum.

Meskipun kampanye kesadaran yang paling efektif sekalipun tidak akan sepenuhnya menghilangkan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, penting bagi konsumen untuk memiliki pemahaman yang akurat tentang asal produk yang mereka beli. Ketidaktahuan akan fakta-fakta ini dapat menghalangi konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi secara sadar. Selain itu, perbedaan antara kegiatan legal dan ilegal harus jelas, terutama bagi pemangku kepentingan utama seperti pekerja satwa liar dan kehutanan, pengelola satwa liar dan kehutanan, masyarakat lokal, dan sistem peradilan. Kerangka hukum dan kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif kecuali regulator mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang isi dan prosedurnya. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran di antara konsumen dan pemangku kepentingan utama. Mereka harus memiliki pemahaman yang jelas tentang persyaratan undang-undang dan sanksi atas ketidakpatuhan, serta dampak negatif dari kejahatan satwa liar dan kehutanan terhadap alam dan masyarakat dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi mereka secara pribadi.

Meningkatkan kesadaran tentang keterkaitan kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan lain seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, tidak membayar biaya dan bahkan terorisme dapat membantu mengubah persepsi konsumen satwa liar dan hasil hutan, yang berpotensi mengurangi permintaan.



Kampanye kesadaran

- » Apakah konsumen mengetahui asal usul, legalitas dan spesies satwa liar dan hasil hutan yang mereka beli? Jika tidak, informasi apa yang kurang?
- » Apakah konsumen dan pemangku kepentingan lainnya menyadari tingkat, konsekuensi dan dampak kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan? Apakah mereka mendapat informasi tentang keterkaitan kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan lain seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, terorisme?
- » Apakah konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memiliki pemahaman tentang undang-undang, pemulihan, dan sanksi yang ada terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Entitas dan sarana mana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi ini kepada konsumen, dan apakah diperlukan sarana yang berbeda untuk menargetkan perempuan dan laki-laki?
- » Kampanye dan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran akan isu-isu ini? Pada penelitian dan informasi apa kampanye ini didasarkan, bagaimana mereka dirancang, dan apa pengaruhnya? Apakah jenis kelamin dipertimbangkan?

Sumber daya tambahan :

CITES. Komite Tetap 74. Strategi pengurangan permintaan untuk memerangi perdagangan ilegal spesies yang terdaftar di CITES. <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-34.pdf>
 USAID Satwa Liar Asia. Buku Panduan Pengurangan Permintaan Komunikasi Perubahan Sosial dan Perilaku (2020). <https://www.usaidwildlifeasia.org/sumber-daya/alat/sbcc-guidebook/view>

6.2 Program pendidikan

Kampanye pendidikan harus melangkah lebih jauh dari upaya peningkatan kesadaran dalam hal menyebarkan informasi tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan, masalah lingkungan yang lebih luas dan keterkaitan dengan kejahatan lain seperti korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Mereka juga dapat berfungsi untuk menghilangkan mitos tentang sifat satwa liar dan hasil hutan. Misalnya, kampanye kesadaran dapat menyoroti nasib buruk badak dalam menghadapi perburuan liar; sebuah program pendidikan akan menginformasikan bahwa cula badak tidak memiliki nilai obat dan bahwa setiap perdagangan di dalamnya tidak hanya membuang-buang uang tetapi juga mendukung kejahatan transnasional terorganisir.

Fokus program pendidikan terkadang dapat dibingungkan oleh perbedaan pendapat tentang apa yang mengubah perilaku manusia. Misalnya, beberapa berpendapat bahwa memanfaatkan sisi altruisme bukanlah strategi yang efektif karena dorongan egois lebih besar dari pengendalian diri. Sebaliknya, upaya pendidikan paling efektif ketika individu merasa ada ancaman langsung terhadap kehidupan atau pilihan mereka sendiri, dan kesempatan untuk menghindari ancaman itu tersedia bagi mereka. Yang lain memperingatkan untuk tidak membanjiri audiens target dengan pesan yang terlalu negatif, mempertaruhkan terciptanya rasa apatis. Jelas bahwa pendekatan 'satu ukuran untuk semua' dalam upaya pendidikan tidaklah efektif dan tidak diinginkan. Pada akhirnya, sangat penting untuk diingat bahwa pesan yang sesuai untuk satu kelompok demografis mungkin tidak sesuai untuk yang lain.

Penggunaan program pendidikan di sekolah melibatkan mendidik anak-anak tentang dampak kejahatan satwa liar dan kehutanan terhadap kelangsungan hidup spesies. Mereka dapat memberi anak-anak alat untuk menghindari konsumsi produk semacam itu, baik dengan menegosiasikan jalan keluar dari tekanan teman sebaya atau dengan meningkatkan budaya di mana konsumsi spesies yang terancam punah dikancam. Meskipun hasil dari upaya tersebut mungkin tidak segera terwujud, sudah pasti bahwa kampanye semacam itu meningkatkan pemikiran kritis, yang dapat meningkatkan efektivitas program pendidikan dan kesadaran saat anak-anak memasuki demografi konsumsi.

Program Pendidikan

- » Apa, jika ada, upaya pendidikan yang telah dilakukan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan? Apakah program pendidikan tersebut menunjukkan keterkaitan antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan lain seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak?
- » Siapa Target Audiens?
- » Pada penelitian dan informasi apa program atau upaya ini didasarkan, bagaimana mereka dirancang, dan apa pengaruhnya?
- » Apakah anak-anak sekolah dididik tentang dampak kejahatan satwa liar dan kehutanan dan tentang cara mencegah dan menghentikannya?

Sumber daya tambahan:

UNODC, Pendidikan untuk Keadilan, Seri Modul Universitas: Kejahatan Satwa Liar (2019)

UNODC, Hewan dalam Bahaya: Vita dan Scooter dalam Misi (2022). <https://www.unodc.org/UNODC/en/lingkungan-iklim/pendidikan-meningkatkan-kesadaran.html>



6.3 Inisiatif masyarakat

Inisiatif masyarakat melibatkan program berbasis masyarakat menggabungkan kesadaran, pendidikan dan pencegahan, menargetkan tekanan masyarakat untuk menyesuaikan diri. Contoh dalam kategori ini masih terbatas, tetapi yang ada telah memberikan hasil yang menjanjikan.

Misalnya, Animals Asia Foundation telah bekerja di ruang kelas di Vietnam untuk mendidik anak-anak tentang kekejaman peternakan empedu beruang. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa

— keputusan agama — menentang perdagangan satwa liar dan berbagai organisasi keagamaan lainnya telah menyatakan dukungan mereka untuk menentang praktik ini.

Salah satu contoh inisiatif komunitas dengan fokus di luar demografi konsumen langsung adalah kemitraan antara Humane Society International dan Viet Nam CITES Management Authority untuk mengurangi konsumsi cula badak di negara tersebut. Di luar audiens target kampanye, strateginya termasuk bekerja dengan anak-anak, asosiasi perempuan, mahasiswa, bisnis, dan Persatuan Asosiasi Sains dan Teknologi Viet Nam. Lokakarya dan program pendidikan telah menargetkan lintas komunitas yang luas dalam upaya untuk mengubah norma budaya dan masyarakat, sehingga perilaku antikonsumsi dapat diperkuat oleh kelompok-kelompok ini.

Inisiatif masyarakat

- » Apa, jika ada, prakarsa masyarakat yang telah dilakukan untuk menginformasikan masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan?
- » Siapa Target Audiens?
- » Pada penelitian dan informasi apa inisiatif ini didasarkan, bagaimana mereka dirancang, dan apa efeknya?

Sumber daya tambahan :

NODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia, Perdagangan spesies yang dilindungi (2020) 24





Pekerjaan penelitian analitik sangat penting untuk memahami kejahatan satwa liar dan kehutanan, dan untuk mendapatkan perspektif tentang berfungsinya pasar ilegal lokal, Regional dan Global untuk Fauna dan Flora untuk mengidentifikasi cara yang lebih baik untuk melawannya.

Hanya dengan dasar pengetahuan yang kuat, pemerintah dapat didorong dan dimintai pertanggungjawaban untuk mengambil tindakan kebijakan berbasis bukti yang akan mengubah dinamika kejahatan satwa liar dan kehutanan.

7.1 Penelitian ilmiah dan independen

Penelitian ilmiah independen sangat penting untuk memahami dan menangkal kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Hal ini juga diperlukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang ada dan yang diusulkan, undang-undang, tindakan administratif dan penegakan hukum, dan dalam mengembangkan rekomendasi untuk reformasi hukum dan perubahan kebijakan. Ada kebutuhan untuk penelitian ilmiah untuk menganalisis hubungan antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dan kejahatan yang memfasilitasi/terkait seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, tidak membayar biaya, dan terorisme. Selain itu, diperlukan upaya untuk menganalisis hubungan antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dan isu-isu yang lebih luas seperti perubahan iklim.

Sangat menggembirakan bahwa semakin banyak lembaga penelitian, universitas, cendekiawan individu dan pakar lainnya yang tertarik untuk meneliti banyak aspek dan aspek kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan dan membuat temuan mereka tersedia untuk khalayak yang relevan dan masyarakat luas. Penelitian semacam itu dapat memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap inisiatif yang diambil oleh otoritas pemerintah.

Meski beberapa pemerintah mendukung penelitian independen di bidang ini, yang lain kurang terbuka dan tidak bekerja sama dengan peneliti ilmiah karena takut kebijakan, undang-undang, dan sistem administrasi mereka dapat dikritik. Sikap ini secara langsung dan tidak langsung menguntungkan mereka yang terlibat dalam kejahatan satwa liar dan kehutanan dan menghambat upaya domestik dan internasional untuk membatasi perdagangan ilegal fauna dan flora.

Penelitian ilmiah dan independen

- » Penelitian independen apa yang telah dilakukan pada setiap aspek kejahatan satwa liar dan kehutanan? Aspek apa yang telah diteliti dan oleh siapa? Aspek apa yang perlu penelitian lebih lanjut?
- » Apakah penelitian tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan mencakup keterkaitan dengan kejahatan yang memfasilitasi lainnya, mis. korupsi, penghindaran pajak, pencucian uang, tidak membayar biaya dan lain-lain?
- » Apa temuan kunci dan hasil penelitian dari analisis yang relevan?
- » Tanggapan apa, jika ada, yang ditunjukkan atau diberikan oleh lembaga pemerintah terkait untuk penelitian ilmiah dan independen tentang kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan?
- » Apakah ada sistem untuk mengevaluasi dan memanfaatkan informasi dari penelitian akademik dan dari organisasi bukan pemerintah untuk tujuan pengembangan kebijakan, pembuatan hukum dan penegakan hukum?



7.2 Survei diagnostik

Survei diagnostik yang akurat tentang kegiatan ilegal dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkirakan besarnya, prosedur yang digunakan untuk melakukan dan memberantas kejahatan ini, dan motivasi pelaku dan penegak hukum. Survei ini dapat ditujukan untuk bisnis, pejabat pemerintah, masyarakat, dan pelaku utama lainnya di sektor ini. Selain itu, mereka dapat memberikan dasar yang berguna untuk merancang tindakan korektif. Survei-survei ini sangat berguna jika ditujukan kepada beberapa pelaku yang berbeda untuk mengecek ulang informasi yang diterima. Berlawanan dengan skeptisisme awal, pengalaman menunjukkan bahwa responden bisa sangat jujur dan informatif. Survei diagnostik berguna untuk mendapatkan informasi tentang tindakan paling rahasia dari proses pidana, seperti pencucian kayu dan satwa liar, pembayaran suap dan tindakan korupsi lainnya yang memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan, prosedur khusus yang digunakan untuk melanggar hukum, dan keterkaitan kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan lain seperti pencucian uang, penghindaran pajak dan tidak membayar biaya. Survei dapat ditujukan untuk mengukur sejauh mana tindakan ilegal, mengeksplorasi faktor-faktor (termasuk kegagalan kebijakan) yang memfasilitasi mereka, atau menyelidiki tindakan atau aktor tertentu.

Survei diagnostik memerlukan desain yang cermat untuk memastikan hasil yang objektif dan valid secara statistik dan oleh karena itu, dalam analisis akhir, tingkat kredibilitas yang tinggi. Mereka juga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga responden yakin akan kerahasiaan jawaban mereka, sesuai kebutuhan. Mempekerjakan surveyor independen dan bereputasi baik merupakan syarat penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas. Misalnya, kerangka kerja yang dikembangkan oleh Program Hutan Bank Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) didasarkan pada proses multi-pemangku kepentingan yang transparan.

Survei diagnostik

- » Apakah survei diagnostik yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan telah dilakukan?
- » Apakah survei diagnostik yang berkaitan dengan kejahatan yang memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan (misalnya korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan lain-lain) telah dilakukan?
- » Siapa yang menugaskan survei ini dan siapa yang melaksanakannya ?
- » Apa temuan utama dari survei ini? Bagaimana tanggapan instansi terkait terhadap temuan ini?

Sumber daya tambahan :
 FAO dan ITTO, *Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum (2005) 78*



7.3 Diseminasi

Poin terakhir berkaitan dengan diseminasi dan publikasi data yang relevan, penelitian dan informasi lainnya. Di banyak negara dan di masing-masing lembaga, ada tumpukan besar informasi yang berkaitan dengan kejahatan satwa liar dan kehutanan, tetapi informasi ini jarang tersedia untuk umum. Dalam beberapa kasus, lembaga mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menyajikan, menerbitkan dan menyebarluaskan informasi secara lebih luas, sementara di tempat lain budaya kerahasiaan, kebungkaman dan kecurigaan menghalangi pembagian informasi dan keahlian.

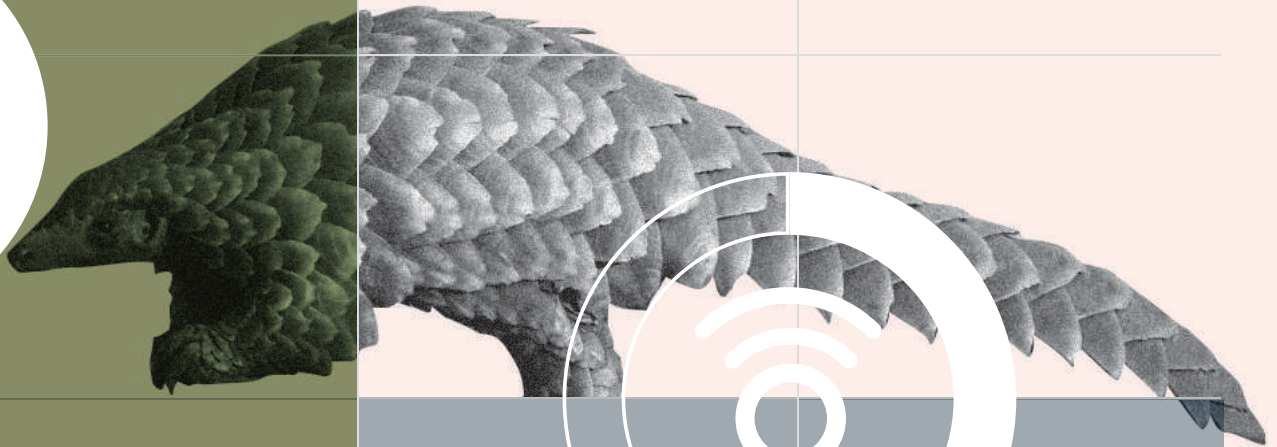
Transparansi dan komunikasi yang lebih besar adalah alat penting untuk mencegah dan mengatasi kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan secara lebih efektif. Publikasi tentang hubungan antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan lain seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan terorisme dapat membantu dalam memprioritaskan perang melawan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan. Adalah penting bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam dialog terbuka dan menyediakan informasi yang akan membantu pihak lain dalam upaya mereka untuk mengurangi fenomena ini.



Diseminasi

- » Bagaimana lembaga pemerintah terkait mempublikasikan, merilis dan menyebarluaskan data dan informasi lain yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan? Apakah publikasi tersebut menyertakan keterkaitan antara kejahatan satwa liar dan kehutanan dengan kejahatan yang memfasilitasi lainnya seperti korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, atau hubungan dengan isu besar lainnya seperti perubahan iklim?
- » Informasi apa yang tersedia untuk umum? Informasi apa yang diklasifikasikan dan hanya tersedia untuk lembaga domestik atau lembaga penegak hukum internasional?
- » Apakah Informasi yang relevan dipublikasikan secara daring, dan/atau dalam Laporan tahunan atau laporan berkala lainnya?

REFERENSI SILANG KE KERANGKA KERJA INDIKATOR ICCWC



Toolkit Analisis Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan ICCWC, Kerangka Indikator Pemberantasan
(edisi ke-2nd 2022) Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan (2016)

V. Pendorong dan Pencegahan

1. Aktor	45. Pendorong kejahatan satwa liar 46. Kegiatan sisi permintaan 48. Keterlibatan masyarakat lokal 49. Penghidupan 50. Kesadaran Masyarakat
2. Analisis Konteks	46. Kegiatan sisi permintaan 47. Komunitas yang diatur 50. Kesadaran Masyarakat ;
3. Pengelolaan satwa liar dan hutan	6. Manajemen risiko Strategis 16. Penyitaan satwa liar 17. Penyitaan satwa liar skala besar 23. Pelaporan kejahatan satwa liar 39. Tingkat penjatuhan hukuman 47. Komunitas yang diatur 48. Keterlibatan masyarakat lokal 49. Mata pencaharian 50. Kesadaran masyarakat
4. Pengembangan kapasitas sosial	48. Keterlibatan masyarakat lokal 49. Penghidupan 50. Kesadaran masyarakat
5. Penjeraan	42. Kesadaran yudisial 50. Kesadaran publik
6. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku	48. Keterlibatan masyarakat lokal 50. Kesadaran publik
7. Penelitian dan analisis	46. Komunitas yang diatur 48. Keterlibatan masyarakat lokal 50. Kesadaran publik
8. Penutup	

DAFTAR PUSTAKA



APG and UNODC, *Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife Crime*, Research Report (2017):
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2017/FINAL_-_UNODC_APG_Wildlife_Crime_report.pdf

CITES, *CITES and Livelihoods*:
<https://cites.org/eng/prog/livelihoods>

CITES, *Directory of wildlife enforcement network (WEN) focal points* (2019):
<https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/WENs/WENs%20list%2009.01.2019.pdf>

de Klemm, C, *Guidelines for Legislation to Implement CITES, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 26* (1993):
<https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-026.pdf>

ECOFEL, *Financial Investigations into Wildlife Crime* (2021):
<https://egmontgroup.org/en/content/ecofel-financial-investigations-wildlife-crime-report-now-available-0>

EU FLEGT Facility:
<https://www.euflegt.efi.int/home>

FAO / ITTO, *Best Practices for Improving Law Compliance in the Forestry Sector* (2005):
<https://www.fao.org/3/a0146e/a0146e00.htm>

FATF, *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade, Report* (2020):
<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade.pdf>

FATF, *Money Laundering from Environmental Crimes, Report* (2021):
<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf>

Hockings M. et al, *Evaluating Effectiveness: A framework for assessing management effectiveness of protected areas* (2006), 2nd ed.:
<https://www.iucn.org/content/evaluating-effectiveness-a-framework-assessing-management-effectiveness-protected-areas>

ICCWC, *ICCWC Guidelines for Wildlife Enforcement Networks: A self-assessment tool for regional use* (2020):
https://cites.org/sites/default/files/EST/Complete_ICCWC_WEN_Guidelines_ENG.pdf

International Association of Prosecutors, *Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors* (1999):
[https://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards-\(1\)](https://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards-(1))

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, *Certification, Verification and Governance in Forestry in Southeast Asia* (2012):
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27433?locale-attribute=en>

INTERPOL and CITES, *Controlled Deliveries: A Technique for Investigating Wildlife Crime* (2007)

INTERPOL and WCO, *Customs–Police Cooperation Handbook* (2018):
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/enforcement/CustomsPoliceCoopHandbook_EN_LR.pdf

INTERPOL, *Wildlife Crime Linked to the Internet – Practical Guidelines for Law Enforcement Practitioners* (2021), restricted access:
https://cites.org/sites/default/files/EST/INTERPOL_Guidelines-Wildlife_Crime_Linked_to_Internet-March2020-PUBLIC.pdf

Ireland R., Cantens T. and Yasui T., *An Overview of Performance Measurement in Customs Administrations*, WCO Research Paper No. 13 (2011):
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/13_performance_measurement_2011.pdf?la=fr

Kleinschmit et al (eds.), *Illegal Logging and Related Timber Trade – Dimensions, Drivers, Impacts and Responses*, Chapter 7, IUFRO World Series Volume 35 (2016):
<https://www.iufro.org/publications/series/world-series/article/2016/12/03/world-series-vol-35-illegal-logging-and-related-timber-trade-dimensions-drivers-impacts-and-r/>

Moreto/Gau, *Deterrence, Legitimacy, and Wildlife Crime in Protected Areas*, in: Gore (Ed.) *Conservation Criminology* (2017)

OAS and CITES, *Handbook on CITES and Livelihoods, Part I: How to rapidly assess the effects of the application of CITES decisions on livelihoods in poor rural communities* (2015):
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/Livelihoods/Guia_Parte1_CITES_eng_final.pdf

OAS and CITES, *Handbook on CITES and Livelihoods, Part II: Addressing and mitigating the effects of the application of CITES decisions on livelihoods in poor rural communities* (2015):

https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/Livelihoods/Guia_PART2_CITES_ENG_FINAL.pdf

PROFOR / FAO, *Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance* (2011):

<https://www.fao.org/documents/card/en/c/03cc002e-b31e-5081-af25-94fabb00f7e8/>

PROFOR, *Approaches to Measuring the Conservation Impact of Forest Management Certification*, Working Paper (2013):

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16498?locale-attribute=en>

Seager, *Gender and illegal wildlife trade: Overlooked and underestimated*, WWF Report (2021):

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/gender_iwt_wwf_report_v9.pdf

TRACE, the wildlife network:

<https://www.tracenetwork.org/about-trace-network/>

TRAFFIC, *Case Digest : Financial flows and payment mechanisms behind wildlife crime* (2021)

UN General Assembly, 45/116. *Model Treaty on Extradition*, UN Doc A/RES/45/116 (14 December 1990):

https://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf

UN General Assembly, 52/88. *International cooperation in criminal matters*, UN Doc A/RES/52/88 (4 February 1998), 2–4 and Annex: Complementary provisions for the Model Treaty on Extradition:

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1990-1999/1997/General_Assembly/A-RES-52-88.pdf

UN General Assembly, *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*, UN Doc A/RES/45/117 (14 December 1990):

https://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf

UN, *UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Working Group on International Cooperation, International cooperation involving special investigative techniques*, UN Doc CTOC/COP/WG.3/2020/3 (12 May 2020):

https://www.unodc.org/documents/treaties/International_Cooperation_2020/WG_IC_website/CTOC_COP_WG.3_2020_3/CTOC_COP_WG.3_2020_3_E.pdf

UN, *UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Working Group on International Cooperation, Practical considerations, good practices and challenges encountered in the area of transfer of criminal proceedings as a separate form of international cooperation in criminal matters*, Background paper prepared by the Secretariat, UN Doc CTOC/WG.3/2017/2 (7 August 2017):

https://www.unodc.org/documents/treaties/International_Cooperation_2017/V1705658_E.pdf

UN, *United Nations Convention on Animal Health and Protection*:

www.uncahp.org

UNODC and UNICRI, *Technical guide to the United Nations Convention against Corruption* (2009):

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/09-84395_Ebook.pdf

UNODC, *Best Practice Guide for Forensic Timber Identification* (2016):

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guide_Timber.pdf

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit, Cross-Cutting Issues*, Volume 5: Crime Prevention Assessment Tool (2009):

<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Access to Justice*, Volume 1 The Courts (2006):

<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Access to Justice*, Volume 2 The Independence, Impartiality and Integrity of the Judiciary (2006):

<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Access to Justice*, Volume 3 The Prosecution Service (2006):

<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Cross-cutting Issues*, Volume 1 Criminal Justice Information (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Cross-Cutting Issues*, Volume 3 Victims and Witnesses (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Cross-cutting Issues*, Volume 4 International Cooperation (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Policing*, Volume 1 Public Safety and Police Service Delivery (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Policing*, Volume 2 The Integrity and Accountability of the Police (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Policing*, Volume 3 Crime Investigation (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Policing*, Volume 4 Police Information and Intelligence Systems (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Criminal Justice Assessment Toolkit: Policing*, Volume 5 Forensic Services and Infrastructure (2006):
<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

UNODC, *Current practices in electronic surveillance in the investigation of serious and organized crime* (2009):
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Electronic_surveillance.pdf

UNODC, *Guide on drafting legislation to combat wildlife crime* (2018):
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/guide-on-drafting-legislation-to-combat-wildlife-crime_html/Wildlife_Crime_ebook.pdf

UNODC, *Guide on drafting legislation to combat wildlife crime* (2018):
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/guide-on-drafting-legislation-to-combat-wildlife-crime_html/Wildlife_Crime_ebook.pdf

UNODC, *Guidelines on Methods and Procedures for Ivory Sampling and Laboratory Analysis* (2014):
<https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-on-methods-and-procedures-for-ivory-sampling.html>

UNODC, *Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: Needs Assessment Tools* (2016):
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02938_eBook.pdf

UNODC, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2017), 2nd ed.:
<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html>

UNODC, *Manual on Wildlife and Forest Crime for frontline officers* (2014)

UNODC, *Model Law on Extradition* (2004):
https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf

UNODC, *Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters* (2007):
https://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf

UNODC, *Policymaking and the role of online intermediaries in illicit trafficking* (2021)

UNODC, *Scaling back corruption: A Guide on addressing corruption for wildlife management authorities* (2019):
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2019/19-08373_Scaling_Back_Corruption_ebook.pdf

UNODC, *The Global Programme against Corruption: UN Anti-Corruption Toolkit* (2004), 3rd ed.:
https://www.unodc.org/documents/treaties/corruption/toolkit/toolkitv5_foreword.pdf

UNODC, *Wildlife and Forest Crime: a field guide for frontline offices* (2018):
<https://fieldguides.github.io/guide03/en/>

UNODC, *Wildlife Crime Scene Guide for First Responders* (2019), not for circulation:
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Wildlife_Crime_Scene_Guide_restricted.pdf

UNODC, *World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected species* (2020):

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf

WCO and Egmont Group, *Customs–FIU Cooperation Handbook* (2020):

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/report/wco_fiu_handbook_sanitised-public-version_wco_en.pdf?la=en

WCO, *Guidelines on Co-operation between Customs Administrations and CITES Management Authorities Managing the Trade in Animals and Plants* (CITES). WCO reference number Annex IV to Doc. 41.827 (classified, only available to WCO members)

World Bank Global Wildlife Program, *Collaborative Management Partnership Toolkit* (2021):

<https://www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program/publication/collaborative-management-partnership-toolkit>

World Bank, *National Risk Assessment for Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, module on “Environmental and Natural Resource Crimes.”*

World Bank, *Strengthening forest law enforcement and governance* (2006):

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/330441468161667685/pdf/366380REVISED010Forest0Law01PUBLIC1.pdf>

World Bank, *Tools and Resources to Combat Illegal Wildlife Trade* (2018):

<https://pubdocs.worldbank.org/en/389851519769693304/24691-Wildlife-Law-Enforcement-002.pdf>

WWF and World Bank Global Forest Alliance, *Forest Certification Assessment Guide* (2006):

https://wwf.panda.org/wwf_news/?81080/WWFWorld-Banks-Forest-Certification-Assessment-Guide-En-Ru-Pt-

ICCWC

